



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 31);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.762.051.008.104,00 (satu trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar lima puluh satu juta delapan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp214.840.302.458,00 (dua ratus empat belas milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.976.891.310.562,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp1.101.005.112.260,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp703.857.128.391,00
- Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.804.862.240.651,00
- setelah perubahan

2.	Belanja Daerah	
	a. semula	Rp1.683.551.008.104,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp284.840.302.458,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.968.391.310.562,00
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) semula	Rp661.045.895.844,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp489.016.825.933,00)</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp172.029.069.911,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) semula	Rp78.500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp8.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp163.529.069.911,00
	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp0,00
	Anggaran Tahun Berkenaan	

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	1) semula	Rp76.958.155.200,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.084.875.915,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp81.043.031.115,00
b.	Pendapatan Transfer	
	1) semula	Rp988.012.669.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp264.074.813.225,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.252.087.482.225,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) semula	Rp36.034.288.060,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp435.697.439.251,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp471.731.727.311,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp19.450.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.905.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp23.355.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp4.570.465.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp4.570.465.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp179.875.915,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.179.875.915,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) semula	Rp47.937.690.200,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp47.937.690.200,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) semula	Rp837.218.848.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp109.359.698.527,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp946.578.546.527,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) semula	Rp150.793.821.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp154.715.114.698,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp305.508.935.698,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1) semula	Rp7.624.725.300,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp434.873.939.251,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp442.498.664.551,00
b. Dana Darurat	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp28.409.562.760,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp823.500.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp29.233.062.760,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 bersumber dari:

a. Belanja Operasional	
1) semula	Rp954.227.830.063,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp186.297.996.289,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp1.140.525.826.352,00
b. Belanja Modal	
1) semula	Rp539.670.179.941,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp98.809.833.962,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp638.480.013.903,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.522.657.093,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp23.477.342.907,00
d. Belanja Transfer	
1) semula	Rp164.652.998.100,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.051.129.300,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp165.704.127.400,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) semula	Rp506.900.663.842,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.461.965.048,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp508.362.628.890,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) semula	Rp393.117.455.035,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp159.042.195.667,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp552.159.650.702,00
c. Belanja Bunga	
1) semula	Rp7.782.683.508,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp7.782.683.508,00
d. Belanja Subsidi	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp0,00
c. Belanja hibah	
1) semula	Rp41.598.820.050,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.855.305.474,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp62.454.125.524,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) semula	Rp4.828.207.628,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.938.530.100,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp9.766.737.728,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1) semula	Rp79.436.274.843,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp55.878.804.843,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp23.557.470.000,00

b. Belanja Modal Peralatan Mesin	
1) semula	Rp67.994.462.291,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.604.130.848,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah perubahan	Rp99.598.593.139,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1) semula	Rp142.510.140.080,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp42.738.575.665,00</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp185.248.715.745,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) semula	Rp244.561.292.427,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp80.139.306.592,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp324.700.599.019,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) semula	Rp4.918.010.300,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp391.625.700,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp5.309.636.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) semula	Rp250.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp185.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp65.000.000,00

3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:	
1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.522.657.093,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp23.477.342.907,00
4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) semula	Rp2.402.046.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp390.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp2.792.546.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) semula	Rp162.250.951.600,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp660.629.300,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp162.911.580.900,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp661.045.895.844,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp489.016.825.933,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp172.029.069.911,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp78.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp8.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) semula	Rp636.888.330.844,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp504.095.813.683,00)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp132.792.517.161,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) semula	Rp23.657.565.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.078.987.750,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp38.736.552.750,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) semula	Rp500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.500.000.000,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1) semula	Rp78.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Uang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) semula	Rp500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp500.000.000,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
 1. bencana alam;
 2. bencana non-alam;
 3. bencana sosial;
 4. kejadian luar biasa;
 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SYAMSIR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 08

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.958.155.200	81.043.031.115	4.084.875.915	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	19.450.000.000	23.355.000.000	3.905.000.000	20 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.570.465.000	4.570.465.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	5.179.875.915	179.875.915	4 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.937.690.200	47.937.690.200	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	988.012.669.000	1.252.087.482.225	264.074.813.225	27 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	837.218.848.000	946.578.546.527	109.359.698.527	13 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.793.821.000	305.508.935.698	154.715.114.698	103 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.034.288.060	471.731.727.311	435.697.439.251	1.209 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.624.725.300	442.498.664.551	434.873.939.251	5.703 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.409.562.760	29.233.062.760	823.500.000	3 %
	Jumlah Pendapatan	1.101.005.112.260	1.804.862.240.651	703.857.128.391	64 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	954.227.830.063	1.140.729.826.352	186.501.996.289	20 %
5.1.01	Belanja Pegawai	506.900.663.842	508.362.628.890	1.461.965.048	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.117.455.035	552.159.650.702	159.042.195.667	40 %
5.1.03	Belanja Bunga	7.782.683.508	7.782.683.508	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	41.598.820.050	62.454.125.524	20.855.305.474	50 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.828.207.628	9.970.737.728	5.142.530.100	107 %
5.2	BELANJA MODAL	539.670.179.941	638.480.013.903	98.809.833.962	18 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	79.436.274.843	23.557.470.000	(55.878.804.843)	70 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.994.462.291	99.598.593.139	31.604.130.848	46 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.510.140.080	185.248.715.745	42.738.575.665	30 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.561.292.427	324.700.599.019	80.139.306.592	33 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.918.010.300	5.309.636.000	391.625.700	8 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	65.000.000	(185.000.000)	74 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	23.477.342.907	(1.522.657.093)	6 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	23.477.342.907	(1.522.657.093)	6 %
5.4	BELANJA TRANSFER	164.652.998.100	165.704.127.400	1.051.129.300	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.402.046.500	2.792.546.500	390.500.000	16 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.250.951.600	162.911.580.900	660.629.300	0 %
	Jumlah Belanja	1.683.551.008.104	1.968.391.310.562	284.840.302.458	17 %
	Total Surplus/(Defisit)	(582.545.895.844)	(163.529.069.911)	419.016.825.933	-72 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	661.045.895.844	172.029.069.911	(489.016.825.933)	74 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	636.888.330.844	132.792.517.161	(504.095.813.683)	79 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	23.657.565.000	38.736.552.750	15.078.987.750	64 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	661.045.895.844	172.029.069.911	(489.016.825.933)	74 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.500.000.000	8.500.000.000	(70.000.000.000)	89 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000	8.000.000.000	(70.000.000.000)	90 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.500.000.000	8.500.000.000	(70.000.000.000)	89 %
	Pembiayaan Netto	582.545.895.844	163.529.069.911	(419.016.825.933)	72 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.691.426.760	539.904.957.712	384.838.091.194	0	0	924.743.048.906	73.443.674.640	624.621.936.862	530.926.301.229	0	0	1.155.548.238.091
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	21.329.500.000	232.733.978.143	18.515.425.342	0	0	251.249.403.485	22.153.000.000	239.481.490.653	37.296.494.235	0	0	276.777.984.888
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	21.329.500.000	232.733.978.143	18.515.425.342	0	0	251.249.403.485	22.153.000.000	239.481.490.653	37.296.494.235	0	0	276.777.984.888
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	51.031.562.760	183.860.247.363	30.007.815.500	0	0	213.868.062.863	51.031.562.760	216.562.015.937	45.139.955.459	0	0	261.701.971.396
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	8.031.562.760	122.013.295.160	947.854.100	0	0	122.961.149.260	8.031.562.760	132.957.568.174	4.082.918.850	0	0	137.040.487.024
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	43.000.000.000	52.366.320.500	28.486.406.900	0	0	80.852.727.400	43.000.000.000	62.977.983.815	40.494.061.209	0	0	103.472.045.024
1 02	1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara	0	1.303.889.872	42.908.700	0	0	1.346.798.572	0	2.490.244.572	67.578.500	0	0	2.557.823.072
1 02	1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan	0	695.079.010	63.750.600	0	0	758.829.610	0	1.611.954.310	51.988.300	0	0	1.663.942.610
1 02	1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang	0	667.166.305	31.173.200	0	0	698.339.505	0	1.461.363.305	31.173.200	0	0	1.492.536.505
1 02	1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung	0	541.182.900	18.628.400	0	0	559.811.300	0	1.436.454.300	0	0	0	1.436.454.300
1 02	1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan	0	403.262.000	6.338.000	0	0	409.600.000	0	1.075.778.000	6.338.000	0	0	1.082.116.000
1 02	1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat	0	647.071.922	27.526.800	0	0	674.598.722	0	1.393.254.837	22.880.400	0	0	1.416.135.237
1 02	1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan	0	761.194.965	88.055.200	0	0	849.250.165	0	1.715.708.565	82.983.600	0	0	1.798.692.165
1 02	1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris	0	445.386.865	58.073.400	0	0	503.460.265	0	1.165.119.965	22.656.200	0	0	1.187.776.165
1 02	1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani	0	410.489.500	15.190.500	0	0	425.680.000	0	1.141.867.500	18.190.500	0	0	1.160.058.000
1 02	1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang	0	1.305.047.420	184.845.300	0	0	1.489.892.720	0	2.286.655.350	222.122.300	0	0	2.508.777.650
1 02	1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun	0	413.421.800	10.578.200	0	0	424.000.000	0	1.141.668.800	10.578.200	0	0	1.152.247.000
1 02	1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin	0	890.219.144	26.486.200	0	0	916.705.344	0	1.858.534.944	26.486.200	0	0	1.885.021.144
1 02	1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari	0	997.220.000	0	0	0	997.220.000	0	1.847.859.500	0	0	0	1.847.859.500

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	330.364.000	73.333.932.646	329.426.782.200	0	0	402.760.714.846	259.111.880	112.299.561.582	436.500.357.773	0	0	548.799.919.355
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.364.000	73.333.932.646	329.426.782.200	0	0	402.760.714.846	259.111.880	112.299.561.582	436.500.357.773	0	0	548.799.919.355
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	15.865.443.331	6.301.043.452	0	0	22.166.486.783	0	20.376.525.215	10.563.225.662	0	0	30.939.750.877
1 04	1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	15.865.443.331	6.301.043.452	0	0	22.166.486.783	0	20.376.525.215	10.563.225.662	0	0	30.939.750.877
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	16.708.058.035	587.024.700	0	0	17.295.082.735	0	16.778.318.488	871.707.600	0	0	17.650.026.088
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	0	11.557.585.152	425.371.400	0	0	11.982.956.552	0	11.779.820.805	599.902.600	0	0	12.379.723.405
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5.150.472.883	161.653.300	0	0	5.312.126.183	0	4.998.497.683	271.805.000	0	0	5.270.302.683
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	17.403.298.194	0	0	0	17.403.298.194	0	19.124.024.987	554.560.500	0	0	19.678.585.487
1 06	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	0	17.403.298.194	0	0	0	17.403.298.194	0	19.124.024.987	554.560.500	0	0	19.678.585.487
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.992.727.880	113.785.108.823	118.988.644.784	0	0	232.773.753.607	1.696.340.000	176.746.720.147	59.112.490.848	90.000.000	0	235.949.210.995
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	5.341.707.345	267.484.850	0	0	5.609.192.195	0	7.306.021.555	378.977.450	0	0	7.684.999.005

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07	2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	0	5.341.707.345	267.484.850	0	0	5.609.192.195	0	7.306.021.555	378.977.450	0	0	7.684.999.005
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	7.245.757.711	177.935.250	0	0	7.423.692.961	0	9.045.195.657	172.486.450	0	0	9.217.682.107
2 08	2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	7.245.757.711	177.935.250	0	0	7.423.692.961	0	9.045.195.657	172.486.450	0	0	9.217.682.107
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	6.008.742.482	111.240.300	0	0	6.119.982.782	0	8.358.479.111	66.729.300	0	0	8.425.208.411
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0	6.008.742.482	111.240.300	0	0	6.119.982.782	0	8.358.479.111	66.729.300	0	0	8.425.208.411
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	2.091.299.850	57.936.274.843	0	0	60.027.574.693	0	1.065.085.000	3.897.470.000	0	0	4.962.555.000
2 10	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	2.091.299.850	57.936.274.843	0	0	60.027.574.693	0	1.065.085.000	3.897.470.000	0	0	4.962.555.000
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	668.237.880	18.920.534.434	8.736.469.400	0	0	27.657.003.834	730.000.000	19.943.508.312	6.460.969.120	0	0	26.404.477.432
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	668.237.880	18.920.534.434	8.736.469.400	0	0	27.657.003.834	730.000.000	19.943.508.312	6.460.969.120	0	0	26.404.477.432
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	6.448.544.176	705.377.800	0	0	7.153.921.976	0	7.063.054.496	1.169.299.527	0	0	8.232.354.023
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	6.448.544.176	705.377.800	0	0	7.153.921.976	0	7.063.054.496	1.169.299.527	0	0	8.232.354.023

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	9.514.906.933	39.859.066.000	0	0	49.373.972.933	0	53.756.911.391	34.528.032.018	0	0	88.284.943.409
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	9.514.906.933	39.859.066.000	0	0	49.373.972.933	0	53.756.911.391	34.528.032.018	0	0	88.284.943.409
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	6.077.380.543	263.704.545	0	0	6.341.085.088	0	9.576.467.343	1.184.949.745	0	0	10.761.417.088
2 14	2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	6.077.380.543	263.704.545	0	0	6.341.085.088	0	9.576.467.343	1.184.949.745	0	0	10.761.417.088
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	582.840.000	5.085.416.253	4.193.334.516	0	0	9.278.750.769	582.840.000	6.843.872.130	2.681.074.458	90.000.000	0	9.614.946.588
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	582.840.000	5.085.416.253	4.193.334.516	0	0	9.278.750.769	582.840.000	6.843.872.130	2.681.074.458	90.000.000	0	9.614.946.588
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130.000.000	6.339.115.120	408.087.680	0	0	6.747.202.800	130.000.000	7.093.734.156	657.161.880	0	0	7.750.896.036
2 16	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	130.000.000	6.339.115.120	408.087.680	0	0	6.747.202.800	130.000.000	7.093.734.156	657.161.880	0	0	7.750.896.036
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	753.426.200	25.050.000	0	0	778.476.200	0	188.779.700	25.050.000	0	0	213.829.700
2 17	3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian	0	753.426.200	25.050.000	0	0	778.476.200	0	188.779.700	25.050.000	0	0	213.829.700

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	450.000.000	6.228.070.307	541.536.700	0	0	6.769.607.007	150.000.000	6.648.791.275	640.442.700	0	0	7.289.233.975
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450.000.000	6.228.070.307	541.536.700	0	0	6.769.607.007	150.000.000	6.648.791.275	640.442.700	0	0	7.289.233.975
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	108.150.000	22.201.952.094	3.128.622.900	0	0	25.330.574.994	50.000.000	26.736.339.919	3.671.736.100	0	0	30.408.076.019
2 19	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga	108.150.000	22.201.952.094	3.128.622.900	0	0	25.330.574.994	50.000.000	26.736.339.919	3.671.736.100	0	0	30.408.076.019
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	67.117.900	0	0	0	67.117.900	0	62.127.900	0	0	0	62.127.900
2 20	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	0	67.117.900	0	0	0	67.117.900	0	62.127.900	0	0	0	62.127.900
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0	39.267.900	0	0	0	39.267.900
2 21	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	0	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0	39.267.900	0	0	0	39.267.900
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	53.500.000	6.456.397.210	486.360.750	0	0	6.942.757.960	53.500.000	7.919.144.403	1.264.856.850	0	0	9.184.001.253
2 22	2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	53.500.000	6.456.397.210	486.360.750	0	0	6.942.757.960	53.500.000	7.919.144.403	1.264.856.850	0	0	9.184.001.253
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	4.657.066.765	2.011.504.550	0	0	6.668.571.315	0	4.785.304.199	2.222.077.550	0	0	7.007.381.749
2 23	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	4.657.066.765	2.011.504.550	0	0	6.668.571.315	0	4.785.304.199	2.222.077.550	0	0	7.007.381.749

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	308.405.600	136.594.700	0	0	445.000.300	0	314.635.700	91.177.700	0	0	405.813.400
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	308.405.600	136.594.700	0	0	445.000.300	0	314.635.700	91.177.700	0	0	405.813.400
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.158.750.000	62.083.397.492	14.407.002.650	0	0	76.490.400.142	1.508.750.000	76.679.997.409	22.380.037.231	0	0	99.060.034.640
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	43.250.000	6.665.063.317	724.630.500	0	0	7.389.693.817	43.250.000	7.592.196.093	639.172.400	0	0	8.231.368.493
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	43.250.000	6.665.063.317	724.630.500	0	0	7.389.693.817	43.250.000	7.592.196.093	639.172.400	0	0	8.231.368.493
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	2.006.356.500	2.998.257.700	0	0	5.004.614.200	0	2.270.617.100	437.797.000	0	0	2.708.414.100
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	2.006.356.500	2.998.257.700	0	0	5.004.614.200	0	2.270.617.100	437.797.000	0	0	2.708.414.100
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40.500.000	39.266.456.661	7.967.818.700	0	0	47.234.275.361	40.500.000	50.972.756.361	18.203.018.981	0	0	69.175.775.342
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	40.500.000	39.266.456.661	7.967.818.700	0	0	47.234.275.361	40.500.000	50.972.756.361	18.203.018.981	0	0	69.175.775.342
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.075.000.000	8.232.640.822	2.557.819.650	0	0	10.790.460.472	1.425.000.000	10.173.447.311	2.779.692.750	0	0	12.953.140.061
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	1.075.000.000	8.232.640.822	2.557.819.650	0	0	10.790.460.472	1.425.000.000	10.173.447.311	2.779.692.750	0	0	12.953.140.061
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	5.912.880.192	158.476.100	0	0	6.071.356.292	0	5.670.980.544	320.356.100	0	0	5.991.336.644
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	0	5.912.880.192	158.476.100	0	0	6.071.356.292	0	5.670.980.544	320.356.100	0	0	5.991.336.644
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	120.782.721.770	14.617.217.300	0	0	135.399.939.070	0	139.824.650.995	17.585.688.700	0	0	157.410.339.695
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0	72.632.410.897	12.961.537.300	0	0	85.593.948.197	0	85.633.017.797	15.410.305.900	0	0	101.043.323.697

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	72.632.410.897	12.961.537.300	0	0	85.593.948.197	0	85.633.017.797	15.410.305.900	0	0	101.043.323.697
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	48.150.310.873	1.655.680.000	0	0	49.805.990.873	0	54.191.633.198	2.175.382.800	0	0	56.367.015.998
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	48.150.310.873	1.655.680.000	0	0	49.805.990.873	0	54.191.633.198	2.175.382.800	0	0	56.367.015.998
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.025.162.207.620	54.129.717.668	2.579.222.700	25.000.000.000	164.652.998.100	246.361.938.468	1.728.213.476.011	54.744.483.013	2.858.978.100	23.387.342.907	165.704.127.400	246.694.931.420
5 01	PERENCANAAN	0	10.810.610.299	994.386.900	0	0	11.804.997.199	0	10.919.286.145	620.078.900	0	0	11.539.365.045
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0	10.810.610.299	994.386.900	0	0	11.804.997.199	0	10.919.286.145	620.078.900	0	0	11.539.365.045
5 02	KEUANGAN	1.025.152.207.620	32.601.309.202	1.454.163.600	25.000.000.000	164.652.998.100	223.708.470.902	1.728.203.476.011	32.877.408.846	1.935.585.200	23.387.342.907	165.704.127.400	223.904.464.353
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	13.576.265.632	1.254.710.900	0	0	14.830.976.532	0	13.394.004.043	1.600.749.100	0	0	14.994.753.143
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0	7.782.683.508	0	25.000.000.000	164.652.998.100	197.435.681.608	0	7.782.683.508	0	23.387.342.907	165.704.127.400	196.874.153.815
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	1.025.152.207.620	11.242.360.062	199.452.700	0	0	11.441.812.762	1.728.203.476.011	11.700.721.295	334.836.100	0	0	12.035.557.395
5 03	KEPEGAWAIAN	10.000.000	9.310.273.167	130.672.200	0	0	9.440.945.367	10.000.000	9.166.249.022	273.314.000	0	0	9.439.563.022
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000	9.310.273.167	130.672.200	0	0	9.440.945.367	10.000.000	9.166.249.022	273.314.000	0	0	9.439.563.022
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0	517.710.000	0	0	0	517.710.000
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0	517.710.000	0	0	0	517.710.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	889.815.000	0	0	0	889.815.000	0	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0	889.815.000	0	0	0	0	889.815.000	0	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	14.042.850.522	186.646.000	0	0	0	14.229.496.522	0	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	14.042.850.522	186.646.000	0	0	0	14.229.496.522	0	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	14.042.850.522	186.646.000	0	0	0	14.229.496.522	0	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	44.043.863.698	3.928.901.313	0	0	0	47.972.765.011	0	44.067.159.948	4.951.053.063	0	0	49.018.213.011
7 01	KECAMATAN	0	44.043.863.698	3.928.901.313	0	0	0	47.972.765.011	0	44.067.159.948	4.951.053.063	0	0	49.018.213.011
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Piani	0	2.181.659.763	111.993.100	0	0	0	2.293.652.863	0	2.249.470.863	100.493.100	0	0	2.349.963.963
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tapin Selatan	0	4.966.807.886	479.804.200	0	0	0	5.446.612.086	0	5.091.591.636	458.770.450	0	0	5.550.362.086
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Binuang	0	6.187.780.349	328.114.900	0	0	0	6.515.895.249	0	5.335.545.749	1.281.542.300	0	0	6.617.088.049
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungur	0	2.854.883.205	166.480.200	0	0	0	3.021.363.405	0	2.922.733.605	160.129.800	0	0	3.082.863.405
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tapin Utara	0	6.602.609.891	1.520.572.613	0	0	0	8.123.182.504	0	6.761.618.291	1.497.866.313	0	0	8.259.484.604
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bakarangan	0	2.910.395.166	100.097.000	0	0	0	3.010.492.166	0	3.044.306.966	133.135.200	0	0	3.177.442.166
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Candi Laras Selatan	0	3.176.754.143	160.775.700	0	0	0	3.337.529.843	0	3.279.741.143	131.203.500	0	0	3.410.944.643
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Candi Laras Utara	0	2.885.548.557	109.193.200	0	0	0	2.994.741.757	0	2.956.597.757	131.043.200	0	0	3.087.640.957
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Hatungun	0	2.842.146.069	109.213.000	0	0	0	2.951.359.069	0	2.913.830.169	97.528.900	0	0	3.011.359.069
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Salam Babaris	0	2.917.707.041	53.346.400	0	0	0	2.971.053.441	0	2.933.436.641	97.616.800	0	0	3.031.053.441
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tapin Tengah	0	2.648.892.568	322.813.400	0	0	0	2.971.705.968	0	2.746.983.468	285.322.500	0	0	3.032.305.968
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000	Kecamatan Lokpaikat	0	3.868.679.060	466.497.600	0	0	0	4.335.176.660	0	3.831.303.660	576.401.000	0	0	4.407.704.660
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.455.212.378	124.454.000	0	0	0	5.579.666.378	0	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378

KABUPATEN TAPIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	0	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378		
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	0	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		1.101.005.112.260	954.227.830.063	539.670.179.941	25.000.000.000	164.652.998.100	1.683.551.008.104	1.804.862.240.651	1.140.729.826.352	638.480.013.903	23.477.342.907	165.704.127.400	1.968.391.310.562		

Bupati Tapin

M. Ariin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.329.500.000	22.153.000.000	823.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.329.500.000	22.153.000.000	823.500.000	
Jumlah Pendapatan								21.329.500.000	22.153.000.000	823.500.000	
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	251.249.403.485	276.777.984.888	25.528.581.403	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.866.639.142	56.736.384.735	24.869.745.593	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.656.225.982	34.697.876.414	9.041.650.432	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	200.000.000	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 5 1		BELANJA OPERASI	0	24.087.200	24.087.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 5 1 01		Belanja Pegawai	0	2.655.000	2.655.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	0	21.432.200	21.432.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 5 2		BELANJA MODAL	0	175.912.800	175.912.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	175.912.800	175.912.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.097.100	449.172.000	224.074.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1		BELANJA OPERASI	25.097.300	49.172.200	24.074.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1 01		Belanja Pegawai	5.205.000	9.772.500	4.567.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	19.892.300	39.399.700	19.507.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 2		BELANJA MODAL	199.999.800	399.999.800	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.999.800	399.999.800	200.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	115.436.320	221.404.320	105.968.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 1		BELANJA OPERASI	15.459.800	31.328.800	15.869.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 1 01		Belanja Pegawai	4.567.500	9.982.500	5.415.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	10.892.300	21.346.300	10.454.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 2		BELANJA MODAL	99.976.520	190.075.520	90.099.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.976.520	190.075.520	90.099.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	249.678.500	249.678.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 1		BELANJA OPERASI	0	23.022.500	23.022.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 1 01		Belanja Pegawai	0	3.885.000	3.885.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	0	19.137.500	19.137.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 2		BELANJA MODAL	0	226.656.000	226.656.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	226.656.000	226.656.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.135.869.462	6.916.065.354	1.780.195.892	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 1		BELANJA OPERASI	585.659.000	789.361.200	203.702.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 1 01		Belanja Pegawai	113.085.000	151.365.000	38.280.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	472.574.000	637.996.200	165.422.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2		BELANJA MODAL	4.550.210.462	6.126.704.154	1.576.493.692	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.999.368.400	5.575.862.092	1.576.493.692	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.842.062	550.842.062	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.628.073.640	2.046.814.123	418.740.483		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	BELANJA OPERASI	178.564.600	226.714.400	48.149.800		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	01	Belanja Pegawai	31.995.000	41.130.000	9.135.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	02	Belanja Barang dan Jasa	146.569.600	185.584.400	39.014.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	BELANJA MODAL	1.449.509.040	1.820.099.723	370.590.683	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.449.509.040	1.820.099.723	370.590.683	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.214.800	225.214.800	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	BELANJA OPERASI	25.214.800	25.214.800	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	01	Belanja Pegawai	5.205.000	5.205.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	02	Belanja Barang dan Jasa	20.009.800	20.009.800	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	875.474.860	875.474.860	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	BELANJA OPERASI	99.715.700	99.715.700	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	01	Belanja Pegawai	20.182.500	20.182.500	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	02	Belanja Barang dan Jasa	79.533.200	79.533.200	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	BELANJA MODAL	775.759.160	775.759.160	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	775.759.160	775.759.160	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	0	149.999.800	149.999.800		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	BELANJA OPERASI	0	3.585.800	3.585.800		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	01	Belanja Pegawai	0	1.635.000	1.635.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.950.800	1.950.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	BELANJA MODAL	0	146.414.000	146.414.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	146.414.000	146.414.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	5.500.362.968	5.500.362.968		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	BELANJA OPERASI	0	5.120.000	5.120.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.120.000	5.120.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	2	BELANJA MODAL	0	5.495.242.968	5.495.242.968	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.495.242.968	5.495.242.968	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	122.500.000	220.000.000	97.500.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	BELANJA OPERASI	122.500.000	220.000.000	97.500.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	02	Belanja Barang dan Jasa	122.500.000	220.000.000	97.500.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.199.000	33.189.000	14.990.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	BELANJA OPERASI	18.199.000	33.189.000	14.990.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	02	Belanja Barang dan Jasa	18.199.000	33.189.000	14.990.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	16.800.900	16.800.900	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24	5	BELANJA OPERASI	16.800.900	16.800.900	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	24	5	02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.900	16.800.900	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.499.900	22.499.900	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	BELANJA OPERASI	22.499.900	22.499.900	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.900	22.499.900	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.201.060.000	17.476.199.889	275.139.889	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 1	BELANJA OPERASI	8.600.530.000	8.738.099.944	137.569.944	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.530.000	8.738.099.944	137.569.944	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 2	BELANJA MODAL	8.600.530.000	8.738.099.945	137.569.945	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.160.318.000	5.242.859.967	82.541.967	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.440.212.000	3.495.239.978	55.027.978	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.000.000	95.000.000	25.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	30	5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000	95.000.000	25.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	30	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	95.000.000	25.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.228.437.700	10.117.129.156	5.888.691.456	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	1.080.713.800	1.080.713.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	0	65.503.800	65.503.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	65.503.800	65.503.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 2	BELANJA MODAL	0	1.015.210.000	1.015.210.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.015.210.000	1.015.210.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	493.296.000	493.296.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	0	21.000.000	21.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.000.000	21.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 2	BELANJA MODAL	0	472.296.000	472.296.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	472.296.000	472.296.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	514.430.200	514.430.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	0	21.800.000	21.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.800.000	21.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 2	BELANJA MODAL	0	492.630.200	492.630.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	492.630.200	492.630.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	0	1.835.190.000	1.835.190.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	71.200.000	71.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	71.200.000	71.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 2	BELANJA MODAL	0	1.763.990.000	1.763.990.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	102.620.000	102.620.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.661.370.000	1.661.370.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.181.100.245	1.181.100.245	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1	BELANJA OPERASI	0	123.921.000	123.921.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 01	Belanja Pegawai	0	8.385.000	8.385.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	115.536.000	115.536.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2	BELANJA MODAL	0	1.057.179.245	1.057.179.245	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.057.179.245	1.057.179.245	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25		Pengadaan Mebel Sekolah	0	205.601.000	205.601.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	0	16.645.700	16.645.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1 01	Belanja Pegawai	0	2.390.000	2.390.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	14.255.700	14.255.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 2		BELANJA MODAL	0	188.955.300	188.955.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	188.955.300	188.955.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	0	40.000.000	40.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5 1		BELANJA OPERASI	0	40.000.000	40.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	40.000.000	40.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.738.300	54.738.300	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5 1		BELANJA OPERASI	54.738.300	54.738.300	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.738.300	54.738.300	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45.259.400	4.000.000	(41.259.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5 1		BELANJA OPERASI	45.259.400	4.000.000	(41.259.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.259.400	4.000.000	(41.259.400)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0	31.259.500	31.259.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5 1		BELANJA OPERASI	0	31.259.500	31.259.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	31.259.500	31.259.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.128.440.000	4.676.800.111	548.360.111	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5 1		BELANJA OPERASI	2.064.220.000	2.338.400.056	274.180.056	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.220.000	2.338.400.056	274.180.056	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5 2		BELANJA MODAL	2.064.220.000	2.338.400.055	274.180.055	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.238.532.000	1.403.040.033	164.508.033	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5 2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.688.000	935.360.022	109.672.022	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.915.048.060	9.618.089.865	7.703.041.805	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	225.214.600	1.341.448.700	1.116.234.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1		BELANJA OPERASI	25.214.800	109.100.900	83.886.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1	01	Belanja Pegawai	2.655.000	22.415.000	19.760.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.559.800	86.685.900	64.126.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 2		BELANJA MODAL	199.999.800	1.232.347.800	1.032.348.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.999.800	1.232.347.800	1.032.348.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	381.086.860	2.040.123.430	1.659.036.570	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1		BELANJA OPERASI	50.866.300	185.955.700	135.089.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1	01	Belanja Pegawai	1.700.000	16.730.000	15.030.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.166.300	169.225.700	120.059.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 2		BELANJA MODAL	330.220.560	1.854.167.730	1.523.947.170	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330.220.560	1.854.167.730	1.523.947.170	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07			Pengadaan Mebel PAUD	0	93.919.700	93.919.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5 1		BELANJA OPERASI	0	7.975.400	7.975.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5 1	01	Belanja Pegawai	0	1.085.000	1.085.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.890.400	6.890.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5 2		BELANJA MODAL	0	85.944.300	85.944.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	85.944.300	85.944.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09			Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	175.000.000	175.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5 2	BELANJA MODAL	0	175.000.000	175.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	175.000.000	175.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	25.000.000	25.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5 2	BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	25.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.206.000.000	1.809.000.000	603.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15	5 1	BELANJA OPERASI	1.206.000.000	1.809.000.000	603.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.000.000	1.809.000.000	603.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.174.000	133.956.100	103.782.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5 1	BELANJA OPERASI	30.174.000	133.956.100	103.782.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.174.000	133.956.100	103.782.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	47.572.600	186.641.935	139.069.335	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5 1	BELANJA OPERASI	47.572.600	92.572.400	44.999.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5 1 01	Belanja Pegawai	0	2.390.000	2.390.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.572.600	90.182.400	42.609.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5 2	BELANJA MODAL	0	94.069.535	94.069.535	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	94.069.535	94.069.535	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	3.813.000.000	3.813.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 1	BELANJA OPERASI	0	2.287.800.000	2.287.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.287.800.000	2.287.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 2	BELANJA MODAL	0	1.525.200.000	1.525.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.525.200.000	1.525.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.927.400	2.303.289.300	2.236.361.900	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	20.000.000	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5 2	BELANJA MODAL	0	20.000.000	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	20.000.000	20.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	17.632.000	217.089.300	199.457.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5 1	BELANJA OPERASI	17.632.000	217.089.300	199.457.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.632.000	217.089.300	199.457.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.095.400	30.095.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13	5 1	BELANJA OPERASI	30.095.400	30.095.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.095.400	30.095.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.200.000	29.304.600	10.104.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5 1	BELANJA OPERASI	19.200.000	29.304.600	10.104.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000	29.304.600	10.104.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	2.006.800.000	2.006.800.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5 1	BELANJA OPERASI	0	1.404.760.000	1.404.760.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.404.760.000	1.404.760.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	2		BELANJA MODAL	0	602.040.000	602.040.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	602.040.000	602.040.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.030.000	265.680.000	165.650.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.030.000	265.680.000	165.650.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.030.000	265.680.000	165.650.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.030.000	265.680.000	165.650.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.030.000	265.680.000	165.650.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.282.734.343	219.775.920.153	493.185.810	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.382.400	45.395.000	35.012.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	15.000.000	15.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	15.000.000	15.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	15.000.000	15.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.882.400	2.882.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.882.400	2.882.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.882.400	2.882.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	27.512.600	20.012.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.500.000	27.512.600	20.012.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	27.512.600	20.012.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	215.130.033.143	215.130.054.153	21.010	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.122.533.143	215.122.554.153	21.010	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	215.122.533.143	215.122.554.153	21.010	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	215.122.533.143	215.122.554.153	21.010	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.745.000	4.745.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.745.000	4.745.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.745.000	4.745.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.755.000	2.755.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.755.000	2.755.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000	2.755.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.854.300	1.418.149.500	638.295.200	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.904.200	12.904.200	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1	BELANJA OPERASI	12.904.200	12.904.200	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.904.200	12.904.200	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.418.500	231.221.700	14.803.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	196.418.500	211.221.700	14.803.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.418.500	211.221.700	14.803.200	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 2	BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.990.000	232.540.000	33.550.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1	BELANJA OPERASI	198.990.000	232.540.000	33.550.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.990.000	232.540.000	33.550.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.264.100	48.264.100	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1	BELANJA OPERASI	48.264.100	48.264.100	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.264.100	48.264.100	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.224.500	3.224.500	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1	BELANJA OPERASI	3.224.500	3.224.500	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.224.500	3.224.500	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.053.000	889.995.000	589.942.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1	BELANJA OPERASI	300.053.000	889.995.000	589.942.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.053.000	889.995.000	589.942.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	39.100.000	39.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	39.100.000	39.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2	BELANJA MODAL	0	39.100.000	39.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	39.100.000	39.100.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.258.717.900	2.988.430.300	(270.287.600)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.281.600	141.744.000	2.462.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1	BELANJA OPERASI	139.281.600	141.744.000	2.462.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.281.600	141.744.000	2.462.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.917.400	31.917.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03 5 1	BELANJA OPERASI	31.917.400	31.917.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.917.400	31.917.400	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.087.518.900	2.814.768.900	(272.750.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1	BELANJA OPERASI	3.087.518.900	2.814.768.900	(272.750.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.087.518.900	2.814.768.900	(272.750.000)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.746.600	154.791.200	51.044.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.393.600	121.438.200	51.044.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02 5 1	BELANJA OPERASI	70.393.600	121.438.200	51.044.600	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.393.600	121.438.200	51.044.600	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.353.000	33.353.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	33.353.000	33.353.000	0	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.353.000	33.353.000	0	
Jumlah Belanja											251.249.403.485	276.777.984.888	25.528.581.403	
Total Surplus/(Defisit)											(229.919.903.485)	(254.624.984.888)	(24.705.081.403)	
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH						
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	951.500.000	951.500.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	951.500.000	951.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.080.062.760	7.080.062.760	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.080.062.760	7.080.062.760	0	
Jumlah Pendapatan								8.031.562.760	8.031.562.760	0			
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA						
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	122.961.149.260	137.040.487.024	14.079.337.764				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.965.116.205	33.119.157.849	13.154.041.644				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.220.277.505	9.787.049.399	6.566.771.894				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	366.800.000	1.669.147.750	1.302.347.750				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	209.815.000	338.500.000	128.685.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	4.080.000	6.690.000	2.610.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.735.000	331.810.000	126.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	156.985.000	1.330.647.750	1.173.662.750		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.985.000	1.330.647.750	1.173.662.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	678.000.000	678.000.000	0				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	78.000.000	78.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	5.190.000	5.190.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.810.000	72.810.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	600.000.000	600.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000	600.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	0	1.906.736.000	1.906.736.000				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.906.736.000	1.906.736.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	3.700.000	3.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.903.036.000	1.903.036.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	90.000.000	90.000.000	0				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	90.000.000	90.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	01	Belanja Pegawai	1.350.000	1.350.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.650.000	88.650.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	1.304.464.000	1.304.464.000				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	BELANJA MODAL	0	1.304.464.000	1.304.464.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.304.464.000	1.304.464.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.085.477.505	2.819.890.749	734.413.244				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	BELANJA OPERASI	2.085.477.505	2.819.890.749	734.413.244		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	01	Belanja Pegawai	5.295.000	5.295.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.182.505	2.814.595.749	734.413.244	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	1.318.810.900	1.318.810.900				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.318.810.900	1.318.810.900		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.318.810.900	1.318.810.900	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.729.612.800	23.316.882.550	6.587.269.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.550.000	107.706.400	70.156.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	37.550.000	107.706.400	70.156.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	37.550.000	107.706.400	70.156.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	112.655.000	163.726.600	51.071.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	112.655.000	163.726.600	51.071.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	112.655.000	163.726.600	51.071.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.140.000	26.840.000	13.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	13.140.000	26.840.000	13.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000	26.840.000	13.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.795.000	11.530.000	(4.265.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA OPERASI	15.795.000	11.530.000	(4.265.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	Belanja Barang dan Jasa	15.795.000	11.530.000	(4.265.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	105.429.200	105.429.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	105.429.200	105.429.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	105.429.200	105.429.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	114.265.000	160.415.000	46.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	BELANJA OPERASI	114.265.000	160.415.000	46.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	Belanja Barang dan Jasa	114.265.000	160.415.000	46.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.987.200	39.812.200	13.825.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	BELANJA OPERASI	25.987.200	39.812.200	13.825.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	Belanja Barang dan Jasa	25.987.200	39.812.200	13.825.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	BELANJA OPERASI	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	BELANJA OPERASI	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000	24.700.000	7.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.200.000	53.200.000	18.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	BELANJA OPERASI	35.200.000	53.200.000	18.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000	53.200.000	18.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	85.933.200	91.333.200	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	BELANJA OPERASI	85.933.200	91.333.200	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	Belanja Barang dan Jasa	85.933.200	91.333.200	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.047.000	83.139.300	10.092.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	BELANJA OPERASI	73.047.000	83.139.300	10.092.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	Belanja Barang dan Jasa	73.047.000	83.139.300	10.092.300	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	127.020.000	127.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5 1	BELANJA OPERASI	0	127.020.000	127.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	127.020.000	127.020.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	220.150.000	1.197.931.100	977.781.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	220.150.000	802.331.100	582.181.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.150.000	802.331.100	582.181.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 2	BELANJA MODAL	0	395.600.000	395.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	395.600.000	395.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45.890.000	40.140.000	(5.750.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	45.890.000	40.140.000	(5.750.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.890.000	40.140.000	(5.750.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	81.749.900	224.149.900	142.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	81.749.900	224.149.900	142.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.749.900	224.149.900	142.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	63.400.000	71.400.000	8.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	5 1	BELANJA OPERASI	63.400.000	71.400.000	8.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000	71.400.000	8.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.420.000	96.242.400	27.822.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 1	BELANJA OPERASI	68.420.000	96.242.400	27.822.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.420.000	96.242.400	27.822.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.900.000	20.800.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5 1	BELANJA OPERASI	16.900.000	20.800.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000	20.800.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	38.575.000	41.075.000	2.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5 1	BELANJA OPERASI	38.575.000	41.075.000	2.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.575.000	41.075.000	2.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	93.777.000	93.777.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 1	BELANJA OPERASI	0	93.777.000	93.777.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	93.777.000	93.777.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250.959.900	683.179.200	432.219.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	250.959.900	683.179.200	432.219.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.959.900	683.179.200	432.219.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.765.560.900	18.609.076.500	3.843.515.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5 1	BELANJA OPERASI	14.746.445.300	18.575.860.900	3.829.415.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.637.925.300	18.575.860.900	3.937.935.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5 1 05	Belanja Hibah	108.520.000	0	(108.520.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5 2	BELANJA MODAL	19.115.600	33.215.600	14.100.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.115.600	33.215.600	14.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	16.900.000	25.750.000	8.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	1		BELANJA OPERASI	16.900.000	25.750.000	8.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000	25.750.000	8.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.010.000	75.010.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	5	1		BELANJA OPERASI	75.010.000	75.010.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.010.000	75.010.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	79.000.000	79.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	5	1		BELANJA OPERASI	0	2.862.000	2.862.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.862.000	2.862.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	5	2		BELANJA MODAL	0	76.138.000	76.138.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	76.138.000	76.138.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas	72.690.000	98.614.750	25.924.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1		BELANJA OPERASI	72.690.000	98.614.750	25.924.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.690.000	98.614.750	25.924.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	360.605.500	691.184.800	330.579.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	360.605.500	691.184.800	330.579.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.605.500	211.184.800	150.579.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1	05	Belanja Hibah	300.000.000	480.000.000	180.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	250.000.000	250.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	0	100.000.000	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	100.000.000	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	2		BELANJA MODAL	0	150.000.000	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	150.000.000	150.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	15.225.900	15.225.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.225.900	15.225.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.225.900	15.225.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.225.900	15.225.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.188.739.200	2.202.839.200	14.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.968.000.000	2.038.200.000	70.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.968.000.000	2.038.200.000	70.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.968.000.000	2.038.200.000	70.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000.000	2.038.200.000	70.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.739.200	164.639.200	(56.100.000)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.739.200	164.639.200	(56.100.000)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	211.181.400	155.081.400	(56.100.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.181.400	155.081.400	(56.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	2	BELANJA MODAL	9.557.800	9.557.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.557.800	9.557.800	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	337.921.300	551.539.500	213.618.200			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.602.900	355.442.200	93.839.300			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	261.602.900	355.442.200	93.839.300			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	261.602.900	355.442.200	93.839.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.602.900	355.442.200	93.839.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.318.400	196.097.300	119.778.900			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76.318.400	196.097.300	119.778.900			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	76.318.400	196.097.300	119.778.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.318.400	196.097.300	119.778.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.432.972.555	101.134.600.475	701.627.920			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.974.900	35.474.800	(36.500.100)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.974.900	35.474.800	(36.500.100)			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	71.974.900	35.474.800	(36.500.100)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.974.900	35.474.800	(36.500.100)

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.748.734.955	98.098.877.625	350.142.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.734.754.955	98.084.897.625	350.142.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	BELANJA OPERASI	97.734.754.955	98.084.897.625	350.142.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Belanja Pegawai	97.734.754.955	98.084.897.625	350.142.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.850.000	2.850.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	BELANJA OPERASI	2.850.000	2.850.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000	2.850.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.130.000	11.130.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	BELANJA OPERASI	11.130.000	11.130.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Belanja Barang dan Jasa	11.130.000	11.130.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.740.318.100	2.190.868.600	450.550.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.398.200	157.954.000	(1.444.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	BELANJA OPERASI	159.398.200	157.954.000	(1.444.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Belanja Barang dan Jasa	159.398.200	157.954.000	(1.444.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.673.700	45.794.900	(130.878.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	BELANJA OPERASI	176.673.700	45.794.900	(130.878.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Belanja Barang dan Jasa	176.673.700	45.794.900	(130.878.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.083.400	22.127.700	5.044.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	BELANJA OPERASI	17.083.400	22.127.700	5.044.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Belanja Barang dan Jasa	17.083.400	22.127.700	5.044.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	1.987.800	0	(1.987.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	BELANJA OPERASI	1.987.800	0	(1.987.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	Belanja Barang dan Jasa	1.987.800	0	(1.987.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.385.175.000	1.964.992.000	579.817.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	BELANJA OPERASI	1.385.175.000	1.964.992.000	579.817.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Belanja Barang dan Jasa	1.385.175.000	1.964.992.000	579.817.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.361.000	184.461.000	21.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.361.000	184.461.000	21.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	BELANJA OPERASI	1.165.300	1.165.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Belanja Barang dan Jasa	655.300	655.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	BELANJA MODAL	162.195.700	183.295.700	21.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.195.700	183.295.700	21.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.053.400	451.818.400	(140.235.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.128.400	201.128.400	(162.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	BELANJA OPERASI	363.128.400	201.128.400	(162.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Belanja Barang dan Jasa	363.128.400	201.128.400	(162.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.925.000	250.690.000	21.765.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	228.925.000	250.690.000	21.765.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.925.000	250.690.000	21.765.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.530.200	173.100.050	56.569.850	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.230.200	132.550.050	34.319.850	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	98.230.200	132.550.050	34.319.850	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.230.200	132.550.050	34.319.850	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.300.000	40.550.000	22.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	18.300.000	40.550.000	22.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000	40.550.000	22.250.000	
Jumlah Belanja								122.961.149.260	137.040.487.024	14.079.337.764		
Total Surplus/(Defisit)								(114.929.586.500)	(129.008.924.264)	(14.079.337.764)		
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Rupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.000.000.000	43.000.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	43.000.000.000	43.000.000.000	0	
Jumlah Pendapatan									43.000.000.000	43.000.000.000	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	80.852.727.400	103.472.045.024	22.619.317.624	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.891.543.400	99.510.861.024	22.619.317.624	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	00			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.791.543.400	23.791.543.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.791.543.400	23.791.543.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	133.977.900	133.977.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1 01	Belanja Pegawai	39.720.000	39.720.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.257.900	94.257.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2	BELANJA MODAL	23.657.565.500	23.657.565.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.657.565.500	23.657.565.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	00			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.100.000.000	75.719.317.624	22.619.317.624	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	53.100.000.000	75.719.317.624	22.619.317.624	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	BELANJA OPERASI	48.271.158.600	58.882.821.915	10.611.663.315	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1 01	Belanja Pegawai	394.520.000	394.520.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.876.638.600	58.488.301.915	10.611.663.315	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2			BELANJA MODAL	4.828.841.400	16.836.495.709	12.007.654.309	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.078.841.400	16.067.940.709	11.989.099.309	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000	703.555.000	203.555.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	65.000.000	(185.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.961.184.000	3.961.184.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.961.184.000	3.961.184.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3.961.184.000	3.961.184.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.961.184.000	3.961.184.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.961.184.000	3.961.184.000	0	
Jumlah Belanja											80.852.727.400	103.472.045.024	22.619.317.624	
Total Surplus/(Defisit)											(37.852.727.400)	(60.472.045.024)	(22.619.317.624)	
0	00	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Puskesmas Tapin Utara

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							1.346.798.572	1.484.698.572	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							0	1.073.124.500	1.073.124.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							1.346.798.572	1.484.698.572	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							0	1.001.124.500	1.001.124.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							1.346.798.572	1.484.698.572	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							0	1.001.124.500	1.001.124.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
							0	71.150.000	71.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5				BELANJA OPERASI
							0	71.150.000	71.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
							0	71.150.000	71.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
							0	14.630.000	14.630.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI
							0	14.630.000	14.630.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
							0	14.630.000	14.630.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
							0	14.300.000	14.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI
							0	14.300.000	14.300.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.000.000.03 Puskesmas Tapin Utara

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	14.300.000	14.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	113.700.000	113.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	113.700.000	113.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	113.700.000	113.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	80.638.500	80.638.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	80.638.500	80.638.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	80.638.500	80.638.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	7.275.000	7.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	7.275.000	7.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.275.000	7.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	56.000.000	56.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	56.000.000	56.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	56.000.000	56.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	82.061.000	82.061.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	82.061.000	82.061.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	82.061.000	82.061.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	29.250.000	29.250.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Puskesmas Tapin Utara

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	29.250.000	29.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	29.250.000	29.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	60.270.000	60.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	60.270.000	60.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	60.270.000	60.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	120.725.000	120.725.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	120.725.000	120.725.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	120.725.000	120.725.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	9.295.000	9.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.295.000	9.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.295.000	9.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	341.830.000	341.830.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	341.830.000	341.830.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	341.830.000	341.830.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.221.548.572	1.221.548.572	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	1.178.639.872	1.153.970.072	(24.669.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.559.872	1.152.890.072	(24.669.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	2	BELANJA MODAL	42.908.700	67.578.500	24.669.800	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Puskesmas Tapin Utara

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.908.700	67.578.500	24.669.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	125.250.000	263.150.000	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	125.250.000	263.150.000	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	125.250.000	263.150.000	137.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	72.000.000	72.000.000	
Jumlah Belanja											1.346.798.572	2.557.823.072	1.211.024.500	
Total Surplus/(Defisit)											(1.346.798.572)	(2.557.823.072)	(1.211.024.500)	
0	00	1.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04 Puskesmas Bakarangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
Jumlah Pendapatan							0	0	0		
0	00	1.02.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5					
										BELANJA	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							0	838.213.000	838.213.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							758.829.610	825.729.610	66.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							0	795.013.000	795.013.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							758.829.610	825.729.610	66.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							0	795.013.000	795.013.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							758.829.610	825.729.610	66.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
							0	74.700.000	74.700.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	74.700.000	74.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	
									0	74.700.000	74.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
								0	17.100.000	17.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	17.100.000	17.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	
									0	17.100.000	17.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
								0	12.600.000	12.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	12.600.000	12.600.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04 Puskesmas Bakarangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	12.600.000	12.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	176.950.000	176.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	176.950.000	176.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	176.950.000	176.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20.700.000	20.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	20.700.000	20.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	20.700.000	20.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	22.100.000	22.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	22.100.000	22.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	22.100.000	22.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	5.515.000	5.515.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	5.515.000	5.515.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.515.000	5.515.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	31.650.000	31.650.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	31.650.000	31.650.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	31.650.000	31.650.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	36.850.000	36.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	36.850.000	36.850.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04 Puskesmas Bakarangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	36.850.000	36.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	35.700.000	35.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	35.700.000	35.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.700.000	35.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	110.203.000	110.203.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	110.203.000	110.203.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	110.203.000	110.203.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	29.320.000	29.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	29.320.000	29.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	29.320.000	29.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	21.510.000	21.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	21.510.000	21.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.510.000	21.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	87.765.000	87.765.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	87.765.000	87.765.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	87.765.000	87.765.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	2.250.000	2.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	20	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.250.000	2.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.250.000	2.250.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04 Puskesmas Bakarangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	110.100.000	110.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	0	110.100.000	110.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	25	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	110.100.000	110.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	638.631.120	638.631.120	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26	5 1	BELANJA OPERASI	576.008.120	586.642.820	10.634.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26	5 1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	574.928.120	585.562.820	10.634.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26	5 2	BELANJA MODAL	62.623.000	51.988.300	(10.634.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	26	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.623.000	51.988.300	(10.634.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	120.198.490	187.098.490	66.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	33	5 1	BELANJA OPERASI	119.070.890	187.098.490	68.027.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	33	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.070.890	187.098.490	68.027.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	33	5 2	BELANJA MODAL	1.127.600	0	(1.127.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	33	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.127.600	0	(1.127.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	43.200.000	43.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	43.200.000	43.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04 Puskesmas Bakarangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	43.200.000	43.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	43.200.000	43.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	43.200.000	43.200.000	
Jumlah Belanja											758.829.610	1.663.942.610	905.113.000	
Total Surplus/(Defisit)											(758.829.610)	(1.663.942.610)	(905.113.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Anfin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05 Puskesmas Banua Padang

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00		698.339.505	858.679.505	160.340.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00		0	633.857.000	633.857.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	0.00	00		0	572.657.000	572.657.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	0.00	00		698.339.505	858.679.505	160.340.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	00		0	572.657.000	572.657.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	00		698.339.505	858.679.505	160.340.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	01		0	38.550.000	38.550.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	01	5	0	38.550.000	38.550.000	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	01	5	0	38.550.000	38.550.000	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02		0	1.500.000	1.500.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02	5	0	1.500.000	1.500.000	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02	5	0	1.500.000	1.500.000	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03		0	3.300.000	3.300.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5	0	3.300.000	3.300.000	
										BELANJA OPERASI

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05 Puskesmas Banua Padang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.300.000	3.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	96.000.000	96.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	96.000.000	96.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	96.000.000	96.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	13.500.000	13.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	13.500.000	13.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	13.500.000	13.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	43.720.000	43.720.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	43.720.000	43.720.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	43.720.000	43.720.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	44.700.000	44.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	44.700.000	44.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.700.000	44.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.000.000	6.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.000.000	6.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.000.000	6.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	10.525.000	10.525.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	10.525.000	10.525.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05 Puskesmas Banua Padang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.525.000	10.525.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	73.557.000	73.557.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	73.557.000	73.557.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	73.557.000	73.557.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	18.250.000	18.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.250.000	18.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.250.000	18.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	32.510.000	32.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	32.510.000	32.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	32.510.000	32.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	19.900.000	19.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	19.900.000	19.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.900.000	19.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	2.220.000	2.220.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05 Puskesmas Banua Padang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.220.000	2.220.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.220.000	2.220.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	15.450.000	15.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	20	5	1	BELANJA OPERASI	0	15.450.000	15.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	15.450.000	15.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	146.375.000	146.375.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	146.375.000	146.375.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	146.375.000	146.375.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	553.751.705	553.751.705	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	522.578.505	522.578.505	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26	5	1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	521.498.505	521.498.505	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26	5	2	BELANJA MODAL	31.173.200	31.173.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	26	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.173.200	31.173.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	144.587.800	304.927.800	160.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	144.587.800	304.927.800	160.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	33	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.587.800	304.927.800	160.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	61.200.000	61.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05 Puskesmas Banua Padang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	61.200.000	61.200.000	
Jumlah Belanja											698.339.505	1.492.536.505	794.197.000	
Total Surplus/(Defisit)											(698.339.505)	(1.492.536.505)	(794.197.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06 Puskesmas Tambaruntung

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							559.811.300	669.041.300	109.230.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00		0	767.413.000	767.413.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	0.00	00		559.811.300	669.041.300	109.230.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	0.00	00		0	688.213.000	688.213.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	00		559.811.300	669.041.300	109.230.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	00		0	688.213.000	688.213.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	01		0	87.265.000	87.265.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	01	5	0	87.265.000	87.265.000	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	01	5	0	87.265.000	87.265.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	02		0	2.420.000	2.420.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	02	5	0	2.420.000	2.420.000	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	02	5	0	2.420.000	2.420.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	04		0	8.400.000	8.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	04	5	0	8.400.000	8.400.000	BELANJA OPERASI

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06 Puskesmas Tambaruntung

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.400.000	8.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	26.100.000	26.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	26.100.000	26.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	26.100.000	26.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	10.150.000	10.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	10.150.000	10.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.150.000	10.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	38.050.000	38.050.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	38.050.000	38.050.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	38.050.000	38.050.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	142.283.000	142.283.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	142.283.000	142.283.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	142.283.000	142.283.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	13.925.000	13.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	13.925.000	13.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	13.925.000	13.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.375.000	8.375.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06 Puskesmas Tambaruntung

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	8.375.000	8.375.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.375.000	8.375.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	56.305.000	56.305.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	56.305.000	56.305.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	56.305.000	56.305.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	10.060.000	10.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	10.060.000	10.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.060.000	10.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	284.880.000	284.880.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	284.880.000	284.880.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	284.880.000	284.880.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	455.011.300	455.011.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	436.382.900	455.011.300	18.628.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26	5	1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.302.900	453.931.300	18.628.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26	5	2	BELANJA MODAL	18.628.400	0	(18.628.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	26	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.628.400	0	(18.628.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	104.800.000	214.030.000	109.230.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	104.800.000	214.030.000	109.230.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06 Puskesmas Tambaruntung

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	33	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.800.000	214.030.000	109.230.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	79.200.000	79.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	00			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	79.200.000	79.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	79.200.000	79.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	79.200.000	79.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	79.200.000	79.200.000	
Jumlah Belanja									559.811.300	1.436.454.300	876.643.000	
Total Surplus/(Defisit)									(559.811.300)	(1.436.454.300)	(876.643.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07 Puskesmas Pandahan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							409.600.000	526.900.000	117.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00		0	555.216.000	555.216.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	0.00	00		0	494.016.000	494.016.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	0.00	00		409.600.000	526.900.000	117.300.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	00		409.600.000	526.900.000	117.300.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	01		0	59.246.100	59.246.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	01	5	0	59.246.100	59.246.100	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	01	5	0	59.246.100	59.246.100	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03		0	9.000.000	9.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03	5	0	9.000.000	9.000.000	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03	5	0	9.000.000	9.000.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	04		0	21.690.000	21.690.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07 Puskesmas Pandahan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	21.690.000	21.690.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.690.000	21.690.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	31.352.000	31.352.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	31.352.000	31.352.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	31.352.000	31.352.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	2.100.000	2.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.100.000	2.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.100.000	2.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	52.500.000	52.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	52.500.000	52.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	52.500.000	52.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.000.000	3.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	3.000.000	3.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.000.000	3.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	4.500.000	4.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.500.000	4.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.500.000	4.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07 Puskesmas Pandahan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	25.800.000	25.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	13	5 1	BELANJA OPERASI	0	25.800.000	25.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.800.000	25.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	56.741.600	56.741.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	0	56.741.600	56.741.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	56.741.600	56.741.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	7.990.000	7.990.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	0	7.990.000	7.990.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.990.000	7.990.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	15.746.700	15.746.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	0	15.746.700	15.746.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	15.746.700	15.746.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	45.274.600	45.274.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	18	5 1	BELANJA OPERASI	0	45.274.600	45.274.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	45.274.600	45.274.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	159.075.000	159.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	0	159.075.000	159.075.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07 Puskesmas Pandahan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	159.075.000	159.075.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	338.100.000	338.100.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26	5	1			BELANJA OPERASI	331.762.000	331.762.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26	5	1	01		Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	330.682.000	330.682.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26	5	2			BELANJA MODAL	6.338.000	6.338.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.338.000	6.338.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	71.500.000	188.800.000	117.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	71.500.000	188.800.000	117.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.500.000	188.800.000	117.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	61.200.000	61.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.07.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	61.200.000	61.200.000	
Jumlah Belanja											409.600.000	1.082.116.000	672.516.000	
Total Surplus/(Defisit)											(409.600.000)	(1.082.116.000)	(672.516.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07 Puskesmas Pandahan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08 Puskesmas Lokpaikat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00		674.598.722	784.513.722	109.915.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	0.00	00		674.598.722	784.513.722	109.915.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	00		674.598.722	784.513.722	109.915.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	00			595.621.515	595.621.515	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	01			63.570.000	63.570.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	01	5		63.570.000	63.570.000	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	01	5		63.570.000	63.570.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	02			21.425.000	21.425.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	02	5		21.425.000	21.425.000	BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	02	5		21.425.000	21.425.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03			32.700.000	32.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08 Puskesmas Lokpaikat

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	32.700.000	32.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	32.700.000	32.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	25.140.000	25.140.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	25.140.000	25.140.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.140.000	25.140.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	21.031.515	21.031.515	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	21.031.515	21.031.515	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.031.515	21.031.515	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	3.900.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	3.900.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.900.000	3.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	20.600.000	20.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	20.600.000	20.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	20.600.000	20.600.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08 Puskesmas Lokpaikat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	30.600.000	30.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	15	BELANJA OPERASI	0	30.600.000	30.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	15	Belanja Barang dan Jasa	0	30.600.000	30.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	12.250.000	12.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	16	BELANJA OPERASI	0	12.250.000	12.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	16	Belanja Barang dan Jasa	0	12.250.000	12.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	62.100.000	62.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	17	BELANJA OPERASI	0	62.100.000	62.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	17	Belanja Barang dan Jasa	0	62.100.000	62.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	72.150.000	72.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	18	BELANJA OPERASI	0	72.150.000	72.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	18	Belanja Barang dan Jasa	0	72.150.000	72.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	3.655.000	3.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	19	BELANJA OPERASI	0	3.655.000	3.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	19	Belanja Barang dan Jasa	0	3.655.000	3.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	203.400.000	203.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	25	BELANJA OPERASI	0	203.400.000	203.400.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08 Puskesmas Lokpaikat

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	203.400.000	203.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	547.148.722	547.148.722	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26	5	1			BELANJA OPERASI	519.621.922	524.268.322	4.646.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26	5	1	01		Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	518.541.922	523.188.322	4.646.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26	5	2			BELANJA MODAL	27.526.800	22.880.400	(4.646.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.526.800	22.880.400	(4.646.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	127.450.000	237.365.000	109.915.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	127.450.000	237.365.000	109.915.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	127.450.000	237.365.000	109.915.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.08.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	36.000.000	36.000.000	
Jumlah Belanja											674.598.722	1.416.135.237	741.536.515	
Total Surplus/(Defisit)											(674.598.722)	(1.416.135.237)	(741.536.515)	
0	00	1.02.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08 Puskesmas Lokpaikat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09 Puskesmas Tambarangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00		849.250.165	982.170.165	132.920.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00		0	816.522.000	816.522.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	0.00	00		0	744.522.000	744.522.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	0.00	00		849.250.165	982.170.165	132.920.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	00		0	744.522.000	744.522.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	00		849.250.165	982.170.165	132.920.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	01		0	78.398.000	78.398.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	01	5	0	78.398.000	78.398.000	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	01	5	0	78.398.000	78.398.000	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	02		0	1.210.000	1.210.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	02	5	0	1.210.000	1.210.000	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	02	5	0	1.210.000	1.210.000	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	04		0	26.475.000	26.475.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09 Puskesmas Tambarangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	26.475.000	26.475.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	26.475.000	26.475.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	27.840.000	27.840.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	27.840.000	27.840.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	27.840.000	27.840.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	57.845.000	57.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	57.845.000	57.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	57.845.000	57.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	60.100.000	60.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	0	60.100.000	60.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	60.100.000	60.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.000.000	9.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.000.000	9.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.000.000	9.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	9.600.000	9.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.600.000	9.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.600.000	9.600.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09 Puskesmas Tambarangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	44.900.000	44.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	13	5 1	BELANJA OPERASI	0	44.900.000	44.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.900.000	44.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	102.032.000	102.032.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	0	102.032.000	102.032.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	102.032.000	102.032.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	28.440.000	28.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	0	28.440.000	28.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	28.440.000	28.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	27.010.000	27.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	0	27.010.000	27.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	27.010.000	27.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	139.975.000	139.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	18	5 1	BELANJA OPERASI	0	139.975.000	139.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	139.975.000	139.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	5.200.000	5.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	19	5 1	BELANJA OPERASI	0	5.200.000	5.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09 Puskesmas Tambarangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	19	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	5.200.000	5.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	126.497.000	126.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	25	5	1			BELANJA OPERASI	0	126.497.000	126.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	126.497.000	126.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	685.900.165	685.900.165	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26	5	1			BELANJA OPERASI	597.844.965	602.916.565	5.071.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26	5	1	01		Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	596.764.965	601.836.565	5.071.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26	5	2			BELANJA MODAL	88.055.200	82.983.600	(5.071.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.055.200	82.983.600	(5.071.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	163.350.000	296.270.000	132.920.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	163.350.000	296.270.000	132.920.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	163.350.000	296.270.000	132.920.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	72.000.000	72.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09 Puskesmas Tambarangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.09.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	72.000.000	72.000.000	
Jumlah Belanja											849.250.165	1.798.692.165	949.442.000	
Total Surplus/(Defisit)											(849.250.165)	(1.798.692.165)	(949.442.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babaris

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00		503.460.265	586.463.265	83.003.000	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00		0	601.312.900	601.312.900	
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	0.00	00		0	547.312.900	547.312.900	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	0.00	00		503.460.265	586.463.265	83.003.000	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	00		503.460.265	586.463.265	83.003.000	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	00		0	547.312.900	547.312.900	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	01		0	12.840.000	12.840.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	01	5	0	12.840.000	12.840.000	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	01	5	0	12.840.000	12.840.000	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	02		0	17.309.300	17.309.300	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	02	5	0	17.309.300	17.309.300	
										BELANJA OPERASI
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	02	5	0	17.309.300	17.309.300	
										Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	04		0	24.840.000	24.840.000	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babaris

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	24.840.000	24.840.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	24.840.000	24.840.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	18.600.000	18.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.600.000	18.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.600.000	18.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	20.250.000	20.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	20.250.000	20.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	20.250.000	20.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	26.060.000	26.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	26.060.000	26.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	26.060.000	26.060.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	46.500.000	46.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	0	46.500.000	46.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	46.500.000	46.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	7.500.000	7.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	7.500.000	7.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.500.000	7.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babaris

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	11	5 1	BELANJA OPERASI	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	9.600.000	9.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	12	5 1	BELANJA OPERASI	0	9.600.000	9.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.600.000	9.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	39.475.000	39.475.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	13	5 1	BELANJA OPERASI	0	39.475.000	39.475.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	39.475.000	39.475.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	52.950.800	52.950.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	0	52.950.800	52.950.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	52.950.800	52.950.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	12.510.000	12.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	0	12.510.000	12.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	12.510.000	12.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	15.500.000	15.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	0	15.500.000	15.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babarisi

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	15.500.000	15.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	18					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	111.937.800	111.937.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	18	5	1			BELANJA OPERASI	0	111.937.800	111.937.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	18	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	111.937.800	111.937.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	19					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	6.320.000	6.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	19	5	1			BELANJA OPERASI	0	6.320.000	6.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	19	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	6.320.000	6.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	20					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	24.300.000	24.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	20	5	1			BELANJA OPERASI	0	24.300.000	24.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	20	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	24.300.000	24.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	90.320.000	90.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	25	5	1			BELANJA OPERASI	0	90.320.000	90.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	90.320.000	90.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	393.231.865	393.231.865	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	1			BELANJA OPERASI	335.158.465	370.575.665	35.417.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	1	01		Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	334.078.465	369.495.665	35.417.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	2			BELANJA MODAL	58.073.400	22.656.200	(35.417.200)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babaris

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.073.400	22.656.200	(35.417.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	54.000.000	54.000.000	
Jumlah Belanja											503.460.265	1.187.776.165	684.315.900	
Total Surplus/(Defisit)											(503.460.265)	(1.187.776.165)	(684.315.900)	
0	00	1.02.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10 Puskesmas Salam Babaris

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.073.400	22.656.200	(35.417.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	110.228.400	193.231.400	83.003.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02					Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.10.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	54.000.000	54.000.000	
Jumlah Belanja											503.460.265	1.187.776.165	684.315.900	
Total Surplus/(Defisit)											(503.460.265)	(1.187.776.165)	(684.315.900)	
0	00	1.02.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11 Puskesmas Piani

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							425.680.000	576.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							0	583.698.000	583.698.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							425.680.000	576.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							0	511.698.000	511.698.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							425.680.000	576.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							0	511.698.000	511.698.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
							0	18.940.000	18.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01	5				BELANJA OPERASI
							0	18.940.000	18.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	18.940.000	18.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
							0	2.320.000	2.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5				BELANJA OPERASI
							0	2.320.000	2.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	02	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	2.320.000	2.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	04					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
							0	40.710.000	40.710.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	04	5				BELANJA OPERASI
							0	40.710.000	40.710.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.000.000.11 Puskesmas Piani

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	40.710.000	40.710.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	34.850.000	34.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	34.850.000	34.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	34.850.000	34.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.200.000	4.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	4.200.000	4.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.200.000	4.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	7.995.000	7.995.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	0	7.995.000	7.995.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.995.000	7.995.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	65.150.000	65.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	0	65.150.000	65.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	65.150.000	65.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	91.373.000	91.373.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	15	5	1		BELANJA OPERASI	0	91.373.000	91.373.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	91.373.000	91.373.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	19.200.000	19.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.000.000.11 Puskesmas Piani

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	19.200.000	19.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.200.000	19.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	18.190.000	18.190.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.190.000	18.190.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.190.000	18.190.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	37.460.000	37.460.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	37.460.000	37.460.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	37.460.000	37.460.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	6.225.000	6.225.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.225.000	6.225.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.225.000	6.225.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	10.145.000	10.145.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	20	5	1	BELANJA OPERASI	0	10.145.000	10.145.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.145.000	10.145.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	154.940.000	154.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	154.940.000	154.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	154.940.000	154.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	308.000.000	308.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	292.809.500	289.809.500	(3.000.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11 Puskesmas Piani

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26	5	1	01		Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	291.729.500	288.729.500	(3.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26	5	2			BELANJA MODAL	15.190.500	18.190.500	3.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	26	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.190.500	18.190.500	3.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas	117.680.000	268.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	33	5	1			BELANJA OPERASI	117.680.000	268.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	33	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	117.680.000	268.360.000	150.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.11.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	72.000.000	72.000.000	
Jumlah Belanja											425.680.000	1.160.058.000	734.378.000	
Total Surplus/(Defisit)											(425.680.000)	(1.160.058.000)	(734.378.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12 Puskesmas Binuang

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
Jumlah Pendapatan							0	0	0		
0	00	1.02.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	5					
										BELANJA	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							1.489.892.720	1.621.867.650	131.974.930		
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00			886.910.000	886.910.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							0	886.910.000	886.910.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	0.00	00			814.910.000	814.910.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							0	814.910.000	814.910.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	0.00	00			1.621.867.650	1.621.867.650	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							1.489.892.720	1.621.867.650	131.974.930	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	00			814.910.000	814.910.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							0	814.910.000	814.910.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	00			1.621.867.650	1.621.867.650	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							1.489.892.720	1.621.867.650	131.974.930	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	01			103.200.000	103.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
							0	103.200.000	103.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	01	5	1		103.200.000	BELANJA OPERASI	
								0	103.200.000	BELANJA OPERASI	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	01	5	1	02	103.200.000	Belanja Barang dan Jasa	
									0	103.200.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	02				19.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
								0	19.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	02	5	1		19.100.000	BELANJA OPERASI	
								0	19.100.000	BELANJA OPERASI	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	02	5	1	02	19.100.000	Belanja Barang dan Jasa	
									0	19.100.000	Belanja Barang dan Jasa
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	03				9.680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
								0	9.680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	03	5	1		9.680.000	BELANJA OPERASI	
								0	9.680.000	BELANJA OPERASI	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12 Puskesmas Binuang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.680.000	9.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	19.800.000	19.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	19.800.000	19.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.800.000	19.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	38.980.000	38.980.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	38.980.000	38.980.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	38.980.000	38.980.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	39.570.000	39.570.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	39.570.000	39.570.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	39.570.000	39.570.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	14.820.000	14.820.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	14.820.000	14.820.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	14.820.000	14.820.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	40.400.000	40.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	40.400.000	40.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	40.400.000	40.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	0	23.100.000	23.100.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.000.000.12 Puskesmas Binuang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	50.925.000	50.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	50.925.000	50.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.925.000	50.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	64.960.000	64.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	64.960.000	64.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	64.960.000	64.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	21.125.000	21.125.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	21.125.000	21.125.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.125.000	21.125.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	11.005.000	11.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	11.005.000	11.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.005.000	11.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	39.805.000	39.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	39.805.000	39.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	39.805.000	39.805.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	35.530.000	35.530.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12 Puskesmas Binuang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	35.530.000	35.530.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.530.000	35.530.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	74.755.000	74.755.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	20	5	1	BELANJA OPERASI	0	74.755.000	74.755.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	74.755.000	74.755.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	208.155.000	208.155.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	208.155.000	208.155.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	208.155.000	208.155.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.281.251.920	1.281.251.850	(70)	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	1.096.406.620	1.059.129.550	(37.277.070)	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26	5	1 01	Belanja Pegawai	1.297.500	1.297.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.109.120	1.057.832.050	(37.277.070)	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26	5	2	BELANJA MODAL	184.845.300	222.122.300	37.277.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	26	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.845.300	222.122.300	37.277.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	208.640.800	340.615.800	131.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	208.640.800	340.615.800	131.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	02	2.02	33	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.640.800	340.615.800	131.975.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	72.000.000	72.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12 Puskesmas Binuang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	0	72.000.000	72.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	72.000.000	72.000.000	
Jumlah Belanja								1.489.892.720	2.508.777.650	1.018.884.930	
Total Surplus/(Defisit)								(1.489.892.720)	(2.508.777.650)	(1.018.884.930)	
0	00	1.02.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13 Puskesmas Hatungun

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
Jumlah Pendapatan							0	0	0		
0	00	1.02.0.00.0.00.13.0000	00	0.00	00	5					
										BELANJA	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							0	626.324.000	626.324.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
							424.000.000	525.923.000	101.923.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							424.000.000	525.923.000	101.923.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
							0	572.324.000	572.324.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							424.000.000	525.923.000	101.923.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							0	572.324.000	572.324.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
							0	46.360.000	46.360.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	46.360.000	46.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	
									0	46.360.000	46.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
								0	8.850.000	8.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	8.850.000	8.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	
									0	8.850.000	8.850.000
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
								0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	
								0	23.100.000	23.100.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13 Puskesmas Hatungun

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	23.100.000	23.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	65.550.000	65.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	65.550.000	65.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	65.550.000	65.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	22.950.000	22.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	22.950.000	22.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	22.950.000	22.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	11.340.000	11.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	11.340.000	11.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.340.000	11.340.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	4.925.000	4.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	4.925.000	4.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.925.000	4.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	600.000	600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	600.000	600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	600.000	600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.850.000	3.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	0	3.850.000	3.850.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13 Puskesmas Hatungun

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.850.000	3.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.350.000	2.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.350.000	2.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.350.000	2.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	34.275.000	34.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	34.275.000	34.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	34.275.000	34.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	59.007.000	59.007.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	59.007.000	59.007.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	59.007.000	59.007.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	36.960.000	36.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	36.960.000	36.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	36.960.000	36.960.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	9.150.000	9.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.150.000	9.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.150.000	9.150.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	84.032.000	84.032.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	84.032.000	84.032.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13 Puskesmas Hatungun

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	84.032.000	84.032.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	6.850.000	6.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.850.000	6.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.850.000	6.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	152.175.000	152.175.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	0	152.175.000	152.175.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	152.175.000	152.175.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	300.000.000	300.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	289.421.800	289.421.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26	5	1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	288.341.800	288.341.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26	5	2	BELANJA MODAL	10.578.200	10.578.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	26	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.578.200	10.578.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	124.000.000	225.923.000	101.923.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	124.000.000	225.923.000	101.923.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	33	5	1 01	Belanja Pegawai	0	100	100	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	02	2.02	33	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000	225.922.900	101.922.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	54.000.000	54.000.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13 Puskesmas Hatungun

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	03	2.02	00					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.13.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	54.000.000	54.000.000	
Jumlah Belanja											424.000.000	1.152.247.000	728.247.000	
Total Surplus/(Defisit)											(424.000.000)	(1.152.247.000)	(728.247.000)	
0	00	1.02.0.00.0.00.13.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14 Puskesmas Baringin

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							916.705.344	1.035.055.344	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							0	849.965.800	849.965.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							916.705.344	1.035.055.344	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							0	813.965.800	813.965.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							0	813.965.800	813.965.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							916.705.344	1.035.055.344	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
							0	75.061.200	75.061.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01	5				BELANJA OPERASI
							0	75.061.200	75.061.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	75.061.200	75.061.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
							0	39.600.000	39.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	02	5				BELANJA OPERASI
							0	39.600.000	39.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	02	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	39.600.000	39.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
							0	80.250.000	80.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	03	5				BELANJA OPERASI
							0	80.250.000	80.250.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14 Puskesmas Baringin

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	80.250.000	80.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	2.400.000	2.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.400.000	2.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.400.000	2.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	27.900.000	27.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	27.900.000	27.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	27.900.000	27.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	30.300.000	30.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	30.300.000	30.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	30.300.000	30.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	58.367.600	58.367.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	58.367.600	58.367.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	58.367.600	58.367.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.600.000	6.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	9.900.000	9.900.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14 Puskesmas Baringin

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.900.000	9.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.900.000	9.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	23.250.000	23.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	23.250.000	23.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	23.250.000	23.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	156.057.000	156.057.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	0	156.057.000	156.057.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	156.057.000	156.057.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	18.950.000	18.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.950.000	18.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.950.000	18.950.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	19.500.000	19.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	0	19.500.000	19.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.500.000	19.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	13.330.000	13.330.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	13.330.000	13.330.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	13.330.000	13.330.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14 Puskesmas Baringin

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	11.000.000	11.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	19	5 1	BELANJA OPERASI	0	11.000.000	11.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	19	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.000.000	11.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	241.500.000	241.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	0	241.500.000	241.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	25	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	241.500.000	241.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	694.505.344	694.505.344	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26	5 1	BELANJA OPERASI	668.019.144	668.019.144	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26	5 1 01	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	666.939.144	666.939.144	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26	5 2	BELANJA MODAL	26.486.200	26.486.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	26	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.486.200	26.486.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	222.200.000	340.550.000	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	33	5 1	BELANJA OPERASI	222.200.000	340.550.000	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	33	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.200.000	340.550.000	118.350.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	36.000.000	36.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14 Puskesmas Baringin

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	03	2.02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	03	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	0	36.000.000	36.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.14.0000	03	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	36.000.000	36.000.000	
Jumlah Belanja								916.705.344	1.885.021.144	968.315.800	
Total Surplus/(Defisit)								(916.705.344)	(1.885.021.144)	(968.315.800)	
0	00	1.02.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	1.02.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							997.220.000	1.131.920.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
							0	715.939.500	715.939.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							0	661.939.500	661.939.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							997.220.000	1.131.920.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							0	661.939.500	661.939.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	00					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							997.220.000	1.131.920.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
							0	92.490.000	92.490.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	01	5				BELANJA OPERASI
							0	92.490.000	92.490.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	01	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	92.490.000	92.490.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
							0	36.240.000	36.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	02	5				BELANJA OPERASI
							0	36.240.000	36.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	02	5				Belanja Barang dan Jasa
							0	36.240.000	36.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	05					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
							0	34.335.000	34.335.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	34.335.000	34.335.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	34.335.000	34.335.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	10.295.000	10.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	10.295.000	10.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.295.000	10.295.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	3.627.500	3.627.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	3.627.500	3.627.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.627.500	3.627.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	78.550.000	78.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	78.550.000	78.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	78.550.000	78.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	5.400.000	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	5.400.000	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.400.000	5.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	15.005.000	15.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	15.005.000	15.005.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	15.005.000	15.005.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.220.000	8.220.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	12	5 1	BELANJA OPERASI	0	8.220.000	8.220.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.220.000	8.220.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	42.450.000	42.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	13	5 1	BELANJA OPERASI	0	42.450.000	42.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	42.450.000	42.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	117.815.000	117.815.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	0	117.815.000	117.815.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	117.815.000	117.815.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	21.845.000	21.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	0	21.845.000	21.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.845.000	21.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.500.000	10.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	35.937.000	35.937.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	18	5 1	BELANJA OPERASI	0	35.937.000	35.937.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.937.000	35.937.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	6.550.000	6.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	19	5	BELANJA OPERASI	0	6.550.000	6.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	19	5	Belanja Barang dan Jasa	0	6.550.000	6.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	142.680.000	142.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	25	5	BELANJA OPERASI	0	142.680.000	142.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	25	5	Belanja Barang dan Jasa	0	142.680.000	142.680.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	885.600.000	885.600.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	26	5	BELANJA OPERASI	885.600.000	885.600.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	26	5	Belanja Pegawai	1.080.000	1.080.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	26	5	Belanja Barang dan Jasa	884.520.000	884.520.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	111.620.000	246.320.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	33	5	BELANJA OPERASI	111.620.000	246.320.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	02	2.02	33	5	Belanja Barang dan Jasa	111.620.000	246.320.000	134.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	54.000.000	54.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	54.000.000	54.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	54.000.000	54.000.000	
Jumlah Belanja											997.220.000	1.847.859.500	850.639.500	
Total Surplus/(Defisit)											(997.220.000)	(1.847.859.500)	(850.639.500)	
0	00	1.02.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15 Puskesmas Margasari

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	54.000.000	54.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	54.000.000	54.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.15.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	54.000.000	54.000.000	
Jumlah Belanja									997.220.000	1.847.859.500	850.639.500		
Total Surplus/(Defisit)									(997.220.000)	(1.847.859.500)	(850.639.500)		
0	00	1.02.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.364.000	259.111.880	(71.252.120)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	330.364.000	259.111.880	(71.252.120)	
Jumlah Pendapatan											330.364.000	259.111.880	(71.252.120)	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	402.760.714.846	548.799.919.355	146.039.204.509	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	56.650.000.000	85.335.346.600	28.685.346.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.875.000.000	73.375.000.000	24.500.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	27.825.000.000	23.925.000.000	(3.900.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	1.675.000.000	1.675.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.675.000.000	1.675.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	2			BELANJA MODAL	26.150.000.000	22.250.000.000	(3.900.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.150.000.000	22.250.000.000	(3.900.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11					Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	5.075.000.000	5.075.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	525.000.000	525.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	525.000.000	525.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2			BELANJA MODAL	4.550.000.000	4.550.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.550.000.000	4.550.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46					Normalisasi/Restorasi Sungai	15.975.000.000	44.375.000.000	28.400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1			BELANJA OPERASI	15.975.000.000	44.375.000.000	28.400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.975.000.000	44.375.000.000	28.400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.775.000.000	11.960.346.600	4.185.346.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.850.000.000	4.050.000.000	(800.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1			BELANJA OPERASI	1.550.000.000	750.000.000	(800.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.550.000.000	750.000.000	(800.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2			BELANJA MODAL	3.300.000.000	3.300.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.300.000.000	3.300.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	4.935.331.000	4.935.331.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2			BELANJA MODAL	0	4.935.331.000	4.935.331.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	4.935.331.000	4.935.331.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.925.000.000	2.975.015.600	50.015.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1			BELANJA OPERASI	2.856.439.800	2.775.716.100	(80.723.700)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	01		Belanja Pegawai	10.000.000	269.960.000	259.960.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.846.439.800	2.505.756.100	(340.683.700)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2			BELANJA MODAL	68.560.200	199.299.500	130.739.300	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.560.200	199.299.500	130.739.300	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.650.000.000	17.947.272.000	9.297.272.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.650.000.000	17.947.272.000	9.297.272.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1.105.000.000	1.465.000.000	360.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.105.000.000	1.465.000.000	360.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	112.790.000	137.780.000	24.990.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	992.210.000	1.327.220.000	335.010.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.680.000.000	3.606.009.000	(73.991.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.680.000.000	3.606.009.000	(73.991.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000.000	3.606.009.000	(73.991.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.865.000.000	12.876.263.000	9.011.263.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	261.263.003	261.263.003		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	261.263.003	261.263.003	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	2	BELANJA MODAL	3.865.000.000	12.614.999.997	8.749.999.997		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.865.000.000	12.614.999.997	8.749.999.997	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.064.000.000	1.453.800.000	(610.200.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.064.000.000	1.453.800.000	(610.200.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	455.000.000	455.000.000	0		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	455.000.000	455.000.000	0		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	90.225.000	90.225.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	364.775.000	364.775.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.609.000.000	998.800.000	(610.200.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	1.609.000.000	998.800.000	(610.200.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.609.000.000	998.800.000	(610.200.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.265.000.000	7.778.429.000	5.513.429.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.265.000.000	7.778.429.000	5.513.429.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	340.000.000	370.000.000	30.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	340.000.000	370.000.000	30.000.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	47.070.000	48.300.000	1.230.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.930.000	321.700.000	28.770.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0	5.083.429.000	5.083.429.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	5.083.429.000	5.083.429.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.083.429.000	5.083.429.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	12		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.925.000.000	2.325.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	12	5 1	BELANJA OPERASI	1.925.000.000	2.325.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000.000	2.325.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	0.00	00		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	119.333.275.000	149.361.954.609	30.028.679.609	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	00		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	119.333.275.000	149.361.954.609	30.028.679.609	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	905.482.900	995.482.900	90.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	905.482.900	985.482.900	80.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	905.482.900	985.482.900	80.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	0	10.000.000	10.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10.000.000	10.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	115.897.792.100	145.571.471.709	29.673.679.609	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	6.530.000.000	7.080.000.000	550.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000.000	4.185.000.000	690.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5 1 05	Belanja Hibah	3.035.000.000	2.895.000.000	(140.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	109.367.792.100	138.491.471.709	29.123.679.609	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.367.792.100	138.491.471.709	29.123.679.609	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.530.000.000	2.795.000.000	265.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	2.530.000.000	2.541.000.000	11.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05	5 1 01	Belanja Pegawai	860.750.000	778.475.000	(82.275.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.669.250.000	1.762.525.000	93.275.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05	5 2	BELANJA MODAL	0	254.000.000	254.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	254.000.000	254.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	0.00	00		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.820.000.000	4.220.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	00		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.820.000.000	4.220.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02		Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	620.000.000	620.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	620.000.000	620.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	70.385.000	70.385.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.615.000	549.615.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03			Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.200.000.000	3.600.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5 1		BELANJA OPERASI	3.200.000.000	3.600.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000.000	3.600.000.000	400.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	191.547.665.600	263.270.176.509	71.722.510.909	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	00			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	191.547.665.600	263.270.176.509	71.722.510.909	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.350.000.000	4.650.000.000	1.300.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 1		BELANJA OPERASI	3.350.000.000	4.650.000.000	1.300.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000.000	4.650.000.000	1.300.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	21.500.000.000	20.925.084.500	(574.915.500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 1		BELANJA OPERASI	0	1.265.084.500	1.265.084.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.265.084.500	1.265.084.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 2		BELANJA MODAL	21.500.000.000	19.660.000.000	(1.840.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 2	01	Belanja Modal Tanah	21.500.000.000	19.660.000.000	(1.840.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.396.945.600	1.736.945.600	340.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1		BELANJA OPERASI	1.396.945.600	1.736.945.600	340.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1	01	Belanja Pegawai	72.000.000	72.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.945.600	1.664.945.600	340.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05			Pembangunan Jalan	47.060.000.000	39.513.840.000	(7.546.160.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 1		BELANJA OPERASI	0	453.840.000	453.840.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 1	01	Belanja Pegawai	0	453.840.000	453.840.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 2		BELANJA MODAL	47.060.000.000	39.060.000.000	(8.000.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.060.000.000	39.060.000.000	(8.000.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08			Rekonstruksi Jalan	71.800.000.000	107.950.000.088	36.150.000.088	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5 2		BELANJA MODAL	71.800.000.000	107.950.000.088	36.150.000.088	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.800.000.000	107.950.000.088	36.150.000.088	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09			Rehabilitasi Jalan	1.600.000.000	41.587.182.079	39.987.182.079	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5 2		BELANJA MODAL	1.600.000.000	41.587.182.079	39.987.182.079	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000	41.587.182.079	39.987.182.079	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.940.720.000	2.843.862.242	(96.857.758)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5 1		BELANJA OPERASI	2.940.720.000	2.843.862.242	(96.857.758)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.720.000	2.843.862.242	(96.857.758)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12			Pembangunan Jembatan	37.900.000.000	39.800.000.000	1.900.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5 2		BELANJA MODAL	37.900.000.000	39.800.000.000	1.900.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.900.000.000	39.800.000.000	1.900.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16			Penggantian Jembatan	400.000.000	400.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5 2		BELANJA MODAL	400.000.000	400.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	400.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0	11.959.000	11.959.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	5 1		BELANJA OPERASI	0	11.959.000	11.959.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.959.000	11.959.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.600.000.000	3.851.303.000	251.303.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5 1		BELANJA OPERASI	3.600.000.000	3.851.303.000	251.303.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000.000	3.851.303.000	251.303.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	285.221.000	285.211.800	(9.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	00			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	120.551.800	(9.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	01			Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	120.551.800	(9.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	01	5 1		BELANJA OPERASI	120.561.000	120.551.800	(9.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	01	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.561.000	120.551.800	(9.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	00			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	164.660.000	164.660.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	164.660.000	164.660.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03	5 1		BELANJA OPERASI	164.660.000	164.660.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	164.660.000	164.660.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.619.106.200	2.893.577.191	274.470.991	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	00			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	502.531.000	809.169.500	306.638.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	502.531.000	809.169.500	306.638.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5 1		BELANJA OPERASI	502.531.000	809.169.500	306.638.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	502.531.000	809.169.500	306.638.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	532.616.000	714.809.000	182.193.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	532.616.000	714.809.000	182.193.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	02	5 1		BELANJA OPERASI	532.616.000	714.809.000	182.193.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	02	5 1	01	Belanja Pegawai	6.560.000	6.560.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	526.056.000	708.249.000	182.193.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	826.683.800	804.434.700	(22.249.100)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	718.170.000	652.170.000	(66.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5 1		BELANJA OPERASI	718.170.000	652.170.000	(66.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5 1	01	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	717.660.000	651.660.000	(66.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02			Sistem Informasi Penataan Ruang	108.513.800	152.264.700	43.750.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5 1		BELANJA OPERASI	108.513.800	59.763.800	(48.750.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5 1	01	Belanja Pegawai	1.370.000	1.370.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.143.800	58.393.800	(48.750.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5 2		BELANJA MODAL	0	92.500.900	92.500.900	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	92.500.900	92.500.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	757.275.400	565.163.991	(192.111.409)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	757.275.400	565.163.991	(192.111.409)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5 1	BELANJA OPERASI	757.275.400	555.388.991	(201.886.409)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5 1 01	Belanja Pegawai	3.030.000	3.030.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	754.245.400	552.358.991	(201.886.409)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5 2	BELANJA MODAL	0	9.775.000	9.775.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.775.000	9.775.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.526.447.046	16.254.151.646	727.704.600	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.460.000	560.460.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560.460.000	560.460.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	560.460.000	560.460.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 01	Belanja Pegawai	14.000.000	14.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	546.460.000	546.460.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.912.497.233	11.912.497.533	300	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.894.287.233	11.894.287.533	300	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	11.894.287.233	11.894.287.533	300	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	11.894.287.233	11.894.287.533	300	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.700.000	11.700.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	11.700.000	11.700.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	11.700.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.510.000	6.510.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.510.000	6.510.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000	6.510.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.414.996.200	2.052.940.900	637.944.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.038.600	200.038.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	200.038.600	200.038.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.038.600	200.038.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.783.000	66.387.400	7.604.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	58.783.000	66.387.400	7.604.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.783.000	66.387.400	7.604.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.496.100	68.114.000	11.617.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	56.496.100	68.114.000	11.617.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.496.100	68.114.000	11.617.900	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.495.000	10.495.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	10.495.000	10.495.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.495.000	10.495.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	203.998.500	266.189.900	62.191.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	203.998.500	263.189.900	59.191.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.998.500	263.189.900	59.191.400	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 2	BELANJA MODAL	0	3.000.000	3.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.000.000	3.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.020.000	9.020.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	9.020.000	9.020.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000	9.020.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	876.165.000	1.432.696.000	556.531.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	876.165.000	1.432.696.000	556.531.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	876.165.000	1.432.696.000	556.531.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.192.200	325.539.000	69.346.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	68.377.000	68.377.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 1	BELANJA OPERASI	885.000	885.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	67.492.000	67.492.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.492.000	67.492.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.815.200	257.162.000	69.346.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.655.000	2.655.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 01	Belanja Pegawai	2.655.000	2.655.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	185.160.200	254.507.000	69.346.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.160.200	254.507.000	69.346.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.348.013	816.518.813	20.170.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	23.200.000	11.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	11.600.000	23.200.000	11.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000	23.200.000	11.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.126.000	386.696.800	8.570.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	378.126.000	378.476.000	350.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.126.000	378.476.000	350.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 2	BELANJA MODAL	0	8.220.800	8.220.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8.220.800	8.220.800	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.622.013	406.622.013	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	406.622.013	406.622.013	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	406.622.013	406.622.013	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.953.400	586.195.400	242.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.374.600	476.616.600	242.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	476.374.600	476.616.600	242.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	476.374.600	476.616.600	242.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.578.800	109.578.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	105.801.100	105.801.100	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.801.100	105.801.100	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 2	BELANJA MODAL	3.777.700	3.777.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.777.700	3.777.700	0	
Jumlah Belanja								402.760.714.846	548.799.919.355	146.039.204.509	
Total Surplus/(Defisit)								(402.430.350.846)	(548.540.807.475)	(146.110.456.629)	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01		95.930.000	191.860.000	95.930.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	95.930.000	191.860.000	95.930.000	BELANJA OPERASI
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	0	1.350.000	1.350.000	Belanja Pegawai
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	95.930.000	190.510.000	94.580.000	Belanja Barang dan Jasa
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	05		25.930.000	25.930.000	0	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	25.930.000	25.930.000	0	BELANJA OPERASI
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	930.000	930.000	0	Belanja Pegawai
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	25.000.000	25.000.000	0	Belanja Barang dan Jasa
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	00					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01		30.900.000	30.900.000	0	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	30.900.000	30.900.000	0	BELANJA OPERASI
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	30.900.000	30.900.000	0	Belanja Barang dan Jasa
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	00					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	01		476.850.000	476.850.000	0	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	476.850.000	476.850.000	0	BELANJA OPERASI
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	476.850.000	476.850.000	0	Belanja Barang dan Jasa
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05		3.471.365.000	0	(3.471.365.000)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1.398.364.600	0	(1.398.364.600)	BELANJA OPERASI
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	2.070.000	0	(2.070.000)	Belanja Pegawai
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1.396.294.600	0	(1.396.294.600)	Belanja Barang dan Jasa
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05	2	2.073.000.400	0	(2.073.000.400)	BELANJA MODAL
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	02	2.03	05	2	2.073.000.400	0	(2.073.000.400)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
							477.810.000	885.160.000	407.350.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000	187.410.000	0			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000	187.410.000	0			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	187.410.000	187.410.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.900.000	186.900.000	0
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	290.400.000	697.750.000	407.350.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	254.600.000	689.100.000	434.500.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	254.600.000	689.100.000	434.500.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	254.600.000	230.100.000	(24.500.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0	459.000.000	459.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000	8.650.000	(27.150.000)			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	35.800.000	8.650.000	(27.150.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000	8.650.000	(27.150.000)
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	0.00	00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	555.400.000	4.675.895.000	4.120.495.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	555.400.000	4.675.895.000	4.120.495.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	505.950.000	3.103.700.000	2.597.750.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	505.950.000	3.103.700.000	2.597.750.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	505.950.000	553.700.000	47.750.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0	2.550.000.000	2.550.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	49.450.000	1.572.195.000	1.522.745.000			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.450.000	72.940.000	23.490.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	0	5.490.000	5.490.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.450.000	67.450.000	18.000.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	0	1.499.255.000	1.499.255.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	1.499.255.000	1.499.255.000
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.547.201.600	18.853.535.001	7.306.333.401			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.547.201.600	18.853.535.001	7.306.333.401			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000	101.860.000	0			
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	101.860.000	101.860.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	840.000	840.000	0

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.020.000	101.020.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.394.411.600	18.700.745.001	7.306.333.401	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.508.323.748	10.193.366.439	2.685.042.691	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	12.960.000	48.510.000	35.550.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.495.363.748	10.144.856.439	2.649.492.691	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	3.886.087.852	8.507.378.562	4.621.290.710	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	13.982.900	5.982.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.878.087.852	8.093.395.662	4.215.307.810	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	400.000.000	400.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000	50.930.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.930.000	50.930.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	420.000	420.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.510.000	50.510.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.485.100.183	5.799.620.876	314.520.693	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000	10.105.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000	2.365.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.365.000	2.365.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000	2.365.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000	1.100.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000	1.150.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.160.000	2.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000	2.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000	1.080.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.080.000	1.080.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000	1.080.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.086.584	2.890.412.377	16.325.793	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.066.584	2.886.392.377	16.325.793	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	2.870.066.584	2.886.392.377	16.325.793	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.870.066.584	2.886.392.377	16.325.793	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1	BELANJA OPERASI	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1	BELANJA OPERASI	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000	2.010.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.633.466.900	1.820.461.800	186.994.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.289.800	338.729.700	107.439.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	69.334.600	74.137.600	4.803.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.860.000	1.860.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.474.600	72.277.600	4.803.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 2	BELANJA MODAL	161.955.200	264.592.100	102.636.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.955.200	264.592.100	102.636.900	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.136.700	201.943.700	51.807.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1	BELANJA OPERASI	150.136.700	201.943.700	51.807.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.136.700	201.943.700	51.807.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.762.400	71.362.400	20.600.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1	BELANJA OPERASI	50.762.400	71.362.400	20.600.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.762.400	71.362.400	20.600.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000	13.435.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1	BELANJA OPERASI	13.435.000	13.435.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.435.000	13.435.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000	2.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1	BELANJA OPERASI	2.750.000	2.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000	2.750.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.185.093.000	1.192.241.000	7.148.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1	BELANJA OPERASI	1.185.093.000	1.192.241.000	7.148.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.093.000	1.192.241.000	7.148.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.352.199	408.352.199	12.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000	46.400.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01 5 1	BELANJA OPERASI	46.400.000	46.400.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000	46.400.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000	85.098.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1	BELANJA OPERASI	85.098.000	85.098.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.098.000	85.098.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199	276.854.199	12.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	264.854.199	276.854.199	12.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	264.854.199	276.854.199	12.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.089.500	670.289.500	99.200.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000	41.490.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	41.490.000	41.490.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.490.000	41.490.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.430.000	202.820.000	(34.610.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	237.430.000	202.820.000	(34.610.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.430.000	202.820.000	(34.610.000)	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500	42.739.500	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	42.739.500	42.739.500	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.739.500	42.739.500	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000	48.550.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	48.550.000	48.550.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.550.000	48.550.000	0	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.880.000	334.690.000	133.810.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	20.880.000	42.690.000	21.810.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 01	Belanja Pegawai	2.880.000	6.690.000	3.810.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	36.000.000	18.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 2	BELANJA MODAL	180.000.000	292.000.000	112.000.000	
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	292.000.000	112.000.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	60.027.574.693	4.962.555.000	(55.065.019.693)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	230.375.000	253.825.000	23.450.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	00		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000	253.825.000	23.450.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000	253.825.000	23.450.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	230.375.000	253.825.000	23.450.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	230.375.000	253.825.000	23.450.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	58.945.584.693	4.121.400.000	(54.824.184.693)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	00		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693	4.121.400.000	(54.824.184.693)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.945.584.693	4.121.400.000	(54.824.184.693)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	1.009.309.850	223.930.000	(785.379.850)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	2.880.000	930.000	(1.950.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.429.850	223.000.000	(783.429.850)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	57.936.274.843	3.897.470.000	(54.038.804.843)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 2 01	Belanja Modal Tanah	57.936.274.843	3.897.470.000	(54.038.804.843)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	0.00	00		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	851.615.000	587.330.000	(264.285.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	00		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	851.615.000	587.330.000	(264.285.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	743.550.000	436.650.000	(306.900.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	743.550.000	436.650.000	(306.900.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	743.550.000	436.650.000	(306.900.000)	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	108.065.000	150.680.000	42.615.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	108.065.000	150.680.000	42.615.000	
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	10	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.065.000	150.680.000	42.615.000	
Jumlah Belanja								82.194.061.476	35.902.305.877	(46.291.755.599)	
Total Surplus/(Defisit)								(82.194.061.476)	(35.902.305.877)	46.291.755.599	
0	00	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.000.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
						Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5					
							BELANJA				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		11.982.956.552	12.379.723.405	396.766.853		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		3.595.799.000	3.337.769.000	(258.030.000)		
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		3.463.699.000	3.205.669.000	(258.030.000)		
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		3.125.799.000	2.822.199.000	(303.600.000)		
							Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	3.125.799.000	2.822.199.000	(303.600.000)	
								BELANJA OPERASI			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	3.125.799.000	2.822.199.000	(303.600.000)	
								Belanja Barang dan Jasa			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		22.500.000	22.500.000	0		
							Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	22.500.000	22.500.000	0	
								BELANJA OPERASI			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	22.500.000	22.500.000	0	
								Belanja Barang dan Jasa			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		8.000.000	8.000.000	0		
							Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	8.000.000	8.000.000	0	
								BELANJA OPERASI			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	8.000.000	8.000.000	0	
								Belanja Barang dan Jasa			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05		283.800.000	329.370.000	45.570.000		
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	283.800.000	329.370.000	45.570.000	
								BELANJA OPERASI			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	283.800.000	329.370.000	45.570.000	
								Belanja Barang dan Jasa			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		8.600.000	8.600.000	0		
							Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	8.600.000	8.600.000	0	
								BELANJA OPERASI			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	8.600.000	8.600.000	0	
								Belanja Barang dan Jasa			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		15.000.000	15.000.000	0		
							Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	15.000.000	15.000.000	0	
								BELANJA MODAL			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	15.000.000	15.000.000	0	
								Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		132.100.000	132.100.000	0		
							Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	31.800.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	31.800.000	31.800.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000	31.800.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	32.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	32.650.000	32.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	32.650.000	32.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	67.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	67.650.000	67.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	Belanja Barang dan Jasa	67.650.000	67.650.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	464.400.100	608.131.100	143.731.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	464.400.100	578.631.100	114.231.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.100.000	390.300.000	(4.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	395.100.000	390.300.000	(4.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	395.100.000	390.300.000	(4.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	28.000.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	28.000.100	28.000.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	28.000.100	28.000.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	8.400.000	8.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000	8.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	23.900.000	142.931.000	119.031.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	2.400.000	8.675.000	6.275.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	Belanja Pegawai	0	885.000	885.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	7.790.000	5.390.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	BELANJA MODAL	21.500.000	134.256.000	112.756.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.500.000	134.256.000	112.756.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	29.500.000	29.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	0	29.500.000	29.500.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	BELANJA OPERASI	0	29.500.000	29.500.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	29.500.000	29.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.922.757.452	8.433.823.305	511.065.853				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.875.000	25.141.000	16.266.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.875.000	25.141.000	16.266.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	8.875.000	25.141.000	16.266.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000	25.141.000	16.266.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.236.013.152	6.255.139.855	19.126.703				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.224.430.952	6.224.432.655	1.703				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.224.430.952	6.224.432.655	1.703	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	6.224.430.952	6.224.432.655	1.703	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.212.000	15.884.000	9.672.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.212.000	15.884.000	9.672.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.212.000	15.884.000	9.672.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.370.200	14.823.200	9.453.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.370.200	14.823.200	9.453.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.370.200	14.823.200	9.453.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.722.900	1.165.660.300	505.937.400				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.515.600	14.500.000	2.984.400				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.515.600	14.500.000	2.984.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.515.600	14.500.000	2.984.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.867.800	49.667.800	5.800.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.867.800	49.667.800	5.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.867.800	49.667.800	5.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.835.300	198.785.300	75.950.000				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	122.835.300	198.785.300	75.950.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.835.300	198.785.300	75.950.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.691.200	25.813.000	3.121.800				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.691.200	25.813.000	3.121.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.691.200	25.813.000	3.121.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.890.000	15.865.200	(24.800)				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	15.890.000	15.865.200	(24.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.890.000	15.865.200	(24.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.923.000	861.029.000	418.106.000				

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	442.923.000	861.029.000	418.106.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	442.923.000	861.029.000	418.106.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386.588.600	452.521.600	65.933.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	130.402.800	32.940.400	(97.462.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 1	BELANJA OPERASI	510.000	0	(510.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 1 01	Belanja Pegawai	510.000	0	(510.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	129.892.800	32.940.400	(96.952.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.892.800	32.940.400	(96.952.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.897.600	359.975.000	160.077.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	510.000	1.875.000	1.365.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 01	Belanja Pegawai	510.000	885.000	375.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	990.000	990.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	199.387.600	358.100.000	158.712.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.387.600	358.100.000	158.712.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.288.200	59.606.200	3.318.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	56.288.200	59.606.200	3.318.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.288.200	59.606.200	3.318.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.203.600	114.517.600	(52.686.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.903.600	24.379.200	(84.524.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	105.600.800	24.379.200	(81.221.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.600.800	24.379.200	(81.221.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 2	BELANJA MODAL	3.302.800	0	(3.302.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.302.800	0	(3.302.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.300.000	90.138.400	31.838.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	58.300.000	90.138.400	31.838.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000	90.138.400	31.838.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.354.200	420.842.950	(43.511.250)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	418.864.600	375.353.350	(43.511.250)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	418.864.600	375.353.350	(43.511.250)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	418.864.600	375.353.350	(43.511.250)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.689.600	30.689.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	30.689.600	30.689.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.689.600	30.689.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	14.800.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	14.800.000	14.800.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000	14.800.000	0	
Jumlah Belanja							11.982.956.552	12.379.723.405	396.766.853		

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit)		(11.982.956.552)	(12.379.723.405)	(396.766.853)	
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit)		(11.982.956.552)	(12.379.723.405)	(396.766.853)	
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
							5.312.126.183	5.270.302.683	(41.823.500)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
							919.745.528	741.634.228	(178.111.300)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	00					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
							39.649.900	39.649.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02		39.649.900	39.649.900	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	39.649.900	39.649.900	0	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	39.649.900	39.649.900	0	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	00					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
							783.476.628	653.674.828	(129.801.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02		13.018.000	213.017.800	199.999.800	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	13.018.000	213.017.800	199.999.800	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	13.018.000	213.017.800	199.999.800	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03		663.489.000	333.689.000	(329.800.000)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	663.489.000	333.689.000	(329.800.000)	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	663.489.000	333.689.000	(329.800.000)	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04		56.039.628	56.039.628	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	56.039.628	56.039.628	0	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	56.039.628	56.039.628	0	Belanja Bantuan Sosial
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	06		24.160.000	24.160.000	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	06	5	24.160.000	24.160.000	0	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	06	5	24.160.000	24.160.000	0	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07		26.770.000	26.768.400	(1.600)	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	26.770.000	26.768.400	(1.600)	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	26.770.000	26.768.400	(1.600)	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	00					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
							96.619.000	48.309.500	(48.309.500)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04		96.619.000	48.309.500	(48.309.500)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	96.619.000	48.309.500	(48.309.500)	BELANJA OPERASI
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	96.619.000	48.309.500	(48.309.500)	Belanja Barang dan Jasa
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
							4.392.380.655	4.528.668.455	136.287.800	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.930.300	2.930.300	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.930.300	2.930.300	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.930.300	2.930.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.930.300	2.930.300	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.082.355	2.829.227.355	145.000			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.216.655	2.825.361.655	145.000			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.825.216.655	2.825.361.655	145.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.825.216.655	2.825.361.655	145.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.900	1.040.900	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.040.900	1.040.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.900	1.040.900	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.824.800	2.824.800	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.824.800	2.824.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.824.800	2.824.800	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.702.900	667.744.000	(42.958.900)			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.428.200	22.219.300	15.791.100			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.428.200	22.219.300	15.791.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.428.200	22.219.300	15.791.100
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.148.500	36.148.500	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.148.500	36.148.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.148.500	36.148.500	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	70.000.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	70.000.000	70.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	28.500.000	(4.500.000)			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	33.000.000	28.500.000	(4.500.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000	28.500.000	(4.500.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	6.086.200	6.086.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	6.086.200	6.086.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.086.200	6.086.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.995.000	5.995.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	5.995.000	5.995.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000	5.995.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.045.000	498.795.000	(54.250.000)			
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	553.045.000	498.795.000	(54.250.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	553.045.000	498.795.000	(54.250.000)

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.000.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.653.300	273.495.000	111.841.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.538.300	258.380.000	111.841.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06 5 1	BELANJA OPERASI	0	1.690.000	1.690.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06 5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.690.000	1.690.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06 5 2	BELANJA MODAL	146.538.300	256.690.000	110.151.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.538.300	256.690.000	110.151.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10 5 2	BELANJA MODAL	15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.260.400	589.660.400	22.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01 5 1	BELANJA OPERASI	2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02 5 1	BELANJA OPERASI	70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04 5 1	BELANJA OPERASI	494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.751.400	165.611.400	44.860.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01 5 1	BELANJA OPERASI	95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.560.200	29.580.200	4.020.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06 5 1	BELANJA OPERASI	25.560.200	29.580.200	4.020.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.560.200	29.580.200	4.020.000	
Jumlah Belanja							5.312.126.183	5.270.302.683	(41.823.500)	
Total Surplus/(Defisit)							(5.312.126.183)	(5.270.302.683)	41.823.500	
0	00	1.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.653.300	273.495.000	111.841.700		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.538.300	258.380.000	111.841.700		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA OPERASI	0	1.690.000	1.690.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1	01	0	1.690.000	1.690.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		146.538.300	256.690.000	110.151.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	146.538.300	256.690.000	110.151.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10				15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2		15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02	15.115.000	15.115.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.260.400	589.660.400	22.400.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	2.366.400	2.366.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	70.194.000	73.194.000	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	494.700.000	514.100.000	19.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.751.400	165.611.400	44.860.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01				95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1		95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	95.191.200	136.031.200	40.840.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06				25.560.200	29.580.200	4.020.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1		25.560.200	29.580.200	4.020.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	25.560.200	29.580.200	4.020.000	
Jumlah Belanja								5.312.126.183	5.270.302.683	(41.823.500)		
Total Surplus/(Defisit)								(5.312.126.183)	(5.270.302.683)	41.823.500		
0	00	1.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
							Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA					
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.403.298.194	19.678.585.487	2.275.287.293		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.304.144.900	1.058.463.200	(245.681.700)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.304.144.900	1.058.463.200	(245.681.700)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	48.790.000	61.330.000	12.540.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA OPERASI	48.790.000	61.330.000	12.540.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	48.790.000	61.330.000	12.540.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	146.630.000	156.045.000	9.415.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	BELANJA OPERASI	146.630.000	156.045.000	9.415.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	02	Belanja Barang dan Jasa	146.630.000	156.045.000	9.415.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.081.254.900	804.803.200	(276.451.700)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	BELANJA OPERASI	1.081.254.900	804.803.200	(276.451.700)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.254.900	804.803.200	(276.451.700)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	27.470.000	36.285.000	8.815.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	BELANJA OPERASI	27.470.000	36.285.000	8.815.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	02	Belanja Barang dan Jasa	27.470.000	36.285.000	8.815.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.071.050.300	4.981.051.400	(89.998.900)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.046.810.300	4.945.811.400	(100.998.900)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Penyediaan Permakanan	4.883.015.000	4.716.615.000	(166.400.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	4.883.015.000	4.716.615.000	(166.400.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	135.815.000	139.815.000	4.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	06	Belanja Bantuan Sosial	4.747.200.000	4.576.800.000	(170.400.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Penyediaan Sandang	13.500.000	28.125.000	14.625.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	13.500.000	28.125.000	14.625.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	28.125.000	14.625.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	24.968.000	30.898.100	5.930.100		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	24.968.000	30.898.100	5.930.100		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	06	Belanja Bantuan Sosial	24.968.000	30.898.100	5.930.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.000.000	21.120.000	8.120.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	13.000.000	21.120.000	8.120.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	21.120.000	8.120.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.327.300	86.677.300	9.350.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	77.327.300	86.677.300	9.350.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.327.300	86.677.300	9.350.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	8.696.000	3.696.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	8.696.000	3.696.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	8.696.000	3.696.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	8.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	8.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	8.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10				Pemberian Layanan Kedaruratan	6.000.000	12.000.000	6.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	12.000.000	6.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	12.000.000	6.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12				Pemberian Layanan Rujukan	6.000.000	15.680.000	9.680.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	15.680.000	9.680.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	15.680.000	9.680.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	24.240.000	35.240.000	11.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.240.000	7.240.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	7.240.000	7.240.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000	7.240.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000	3.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	6.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000	14.000.000	11.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	14.000.000	11.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	14.000.000	11.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.223.170.700	4.274.222.300	3.051.051.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	28.872.500	31.975.000	3.102.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	24.242.500	27.345.000	3.102.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	24.242.500	27.345.000	3.102.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.242.500	27.345.000	3.102.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.630.000	4.630.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	4.630.000	4.630.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000	4.630.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.194.298.200	4.242.247.300	3.047.949.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	258.970.000	811.586.600	552.616.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	258.970.000	811.586.600	552.616.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	258.970.000	811.586.600	552.616.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	265.370.000	294.270.000	28.900.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02 5 1	BELANJA OPERASI	265.370.000	294.270.000	28.900.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	265.370.000	294.270.000	28.900.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	233.958.200	2.686.931.700	2.452.973.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	233.958.200	2.686.931.700	2.452.973.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	233.958.200	388.931.700	154.973.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0	2.298.000.000	2.298.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	436.000.000	449.459.000	13.459.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	04 5 1	BELANJA OPERASI	436.000.000	449.459.000	13.459.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	436.000.000	449.459.000	13.459.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.964.490.500	3.799.530.500	(1.164.960.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.776.614.100	3.560.154.100	(1.216.460.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	195.064.000	80.840.000	(114.224.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	195.064.000	80.840.000	(114.224.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.064.000	80.840.000	(114.224.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	218.050.000	180.550.000	(37.500.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	218.050.000	180.550.000	(37.500.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.050.000	180.550.000	(37.500.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.363.500.100	3.298.764.100	(1.064.736.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04 5 1	BELANJA OPERASI	4.363.500.100	3.298.764.100	(1.064.736.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.363.500.100	3.298.764.100	(1.064.736.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	187.876.400	239.376.400	51.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	16.706.400	15.456.400	(1.250.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	16.706.400	15.456.400	(1.250.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.706.400	15.456.400	(1.250.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	171.170.000	223.920.000	52.750.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02 5 1	BELANJA OPERASI	171.170.000	223.920.000	52.750.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.170.000	223.920.000	52.750.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.545.100	47.545.100	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	47.545.100	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	47.545.100	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	47.545.100	47.545.100	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.545.100	47.545.100	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.792.896.694	5.517.772.987	724.876.293	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.488.600	12.988.600	3.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.488.600	12.988.600	3.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 5 1	BELANJA OPERASI	9.488.600	12.988.600	3.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.488.600	12.988.600	3.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.209.594	3.238.250.287	40.693	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.269.594	3.232.310.287	40.693	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	3.232.269.594	3.232.310.287	40.693	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.232.269.594	3.232.310.287	40.693	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1	BELANJA OPERASI	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1	BELANJA OPERASI	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000	2.970.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.281.200	1.251.107.700	99.826.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.049.000	12.933.000	10.884.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1	BELANJA OPERASI	2.049.000	12.933.000	10.884.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.049.000	12.933.000	10.884.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.286.300	122.805.400	8.519.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	114.286.300	122.805.400	8.519.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.286.300	122.805.400	8.519.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.323.600	83.323.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1	BELANJA OPERASI	83.323.600	83.323.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.323.600	83.323.600	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.090.600	18.509.200	5.418.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA OPERASI	13.090.600	18.509.200	5.418.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	Belanja Barang dan Jasa	13.090.600	18.509.200	5.418.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	1.823.700	3.112.500	1.288.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	BELANJA OPERASI	1.823.700	3.112.500	1.288.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	Belanja Barang dan Jasa	1.823.700	3.112.500	1.288.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.365.000	30.365.000	(18.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	BELANJA OPERASI	48.365.000	30.365.000	(18.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	Belanja Barang dan Jasa	48.365.000	30.365.000	(18.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.343.000	980.059.000	91.716.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA OPERASI	888.343.000	980.059.000	91.716.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	Belanja Barang dan Jasa	888.343.000	980.059.000	91.716.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	536.215.500	536.215.500	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	73.585.000	73.585.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	BELANJA OPERASI	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	Belanja Pegawai	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	BELANJA MODAL	0	72.700.000	72.700.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	72.700.000	72.700.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	139.330.300	139.330.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA OPERASI	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Pegawai	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA MODAL	0	138.445.300	138.445.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	138.445.300	138.445.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	323.300.200	323.300.200	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	BELANJA OPERASI	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	Belanja Pegawai	0	885.000	885.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	BELANJA MODAL	0	322.415.200	322.415.200	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	322.415.200	322.415.200	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.006.800	271.730.500	20.723.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000	580.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA OPERASI	580.000	580.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	Belanja Barang dan Jasa	580.000	580.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.132.000	129.132.000	42.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA OPERASI	87.132.000	129.132.000	42.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	Belanja Barang dan Jasa	87.132.000	129.132.000	42.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.294.800	142.018.500	(21.276.300)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA OPERASI	163.294.800	142.018.500	(21.276.300)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	Belanja Barang dan Jasa	163.294.800	142.018.500	(21.276.300)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.910.500	207.480.400	64.569.900	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.058.000	46.950.900	36.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	10.058.000	25.950.900	15.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.058.000	25.950.900	15.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2	BELANJA MODAL	0	21.000.000	21.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.000.000	21.000.000	
Jumlah Belanja								17.403.298.194	19.678.585.487	2.275.287.293	
Total Surplus/(Defisit)								(17.403.298.194)	(19.678.585.487)	(2.275.287.293)	
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.652.500	146.329.500	27.677.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000	14.200.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.058.000	46.950.900	36.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	10.058.000	25.950.900	15.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.058.000	25.950.900	15.892.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2	BELANJA MODAL	0	21.000.000	21.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.000.000	21.000.000	
Jumlah Belanja								17.403.298.194	19.678.585.487	2.275.287.293	
Total Surplus/(Defisit)								(17.403.298.194)	(19.678.585.487)	(2.275.287.293)	
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
Jumlah Pendapatan							0	0	0			
0	00	2.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00		280.964.104	264.914.100	(16.050.004)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00		268.892.604	252.842.600	(16.050.004)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		268.892.604	252.842.600	(16.050.004)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	268.892.604	252.842.600	(16.050.004)	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	268.892.604	252.842.600	(16.050.004)	Belanja Barang dan Jasa
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		12.071.500	12.071.500	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	12.071.500	12.071.500	0	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	12.071.500	12.071.500	0	Belanja Barang dan Jasa
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		198.490.300	1.732.096.200	1.533.605.900	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		9.942.200	9.942.200	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	9.942.200	9.942.200	0	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	9.942.200	9.942.200	0	Belanja Barang dan Jasa
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		18.182.000	18.182.000	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	18.182.000	18.182.000	0	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	18.182.000	18.182.000	0	Belanja Barang dan Jasa
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		170.366.100	1.703.972.000	1.533.605.900	Perluasan Kesempatan Kerja		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	170.366.100	1.703.972.000	1.533.605.900	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	01	1.020.000	7.140.000	6.120.000	Belanja Pegawai
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	169.346.100	1.696.832.000	1.527.485.900	Belanja Barang dan Jasa
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	00					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02		120.530.900	98.930.900	(21.600.000)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1	120.530.900	98.930.900	(21.600.000)	BELANJA OPERASI	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1	02	120.530.900	98.930.900	(21.600.000)	Belanja Barang dan Jasa

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	88.999.100	390.730.800	301.731.700			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	6.388.500	365.281.000	358.892.500			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.388.500	344.852.500	338.464.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.388.500	344.852.500	338.464.000
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	2	BELANJA MODAL	0	20.428.500	20.428.500	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	20.428.500	20.428.500
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	82.610.600	25.449.800	(57.160.800)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	82.610.600	25.449.800	(57.160.800)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.610.600	25.449.800	(57.160.800)
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	405.252.080	386.014.040	(19.238.040)			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.529.980	229.891.940	2.361.960			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	8.484.000	5.400.000	(3.084.000)			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.484.000	5.400.000	(3.084.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.484.000	5.400.000	(3.084.000)
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	219.045.980	224.491.940	5.445.960			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	219.045.980	224.491.940	5.445.960	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.045.980	224.491.940	5.445.960
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	177.722.100	156.122.100	(21.600.000)			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.491.400	83.491.400	0			
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	83.491.400	83.491.400	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.491.400	83.491.400	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.230.700	72.630.700	(21.600.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.230.700	72.630.700	(21.600.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.230.700	72.630.700	(21.600.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.514.955.711	4.812.312.965	297.357.254	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.250.000	18.590.500	3.340.500	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	18.590.500	3.340.500	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.250.000	18.590.500	3.340.500	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000	18.590.500	3.340.500	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.020.021	3.188.018.915	(1.106)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.970.021	3.184.968.915	(1.106)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.184.970.021	3.184.968.915	(1.106)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.184.970.021	3.184.968.915	(1.106)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.050.000	3.050.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.050.000	3.050.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000	3.050.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	696.567.550	968.344.550	271.777.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.337.550	204.399.550	36.062.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	85.002.200	86.502.200	1.500.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.002.200	86.502.200	1.500.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	83.335.350	117.897.350	34.562.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.335.350	117.897.350	34.562.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.092.000	136.758.000	15.666.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	121.092.000	136.758.000	15.666.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.092.000	136.758.000	15.666.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.700.000	13.700.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	13.700.000	13.700.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000	13.700.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.438.000	613.487.000	220.049.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	393.438.000	613.487.000	220.049.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	393.438.000	613.487.000	220.049.000	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.549.500	227.051.600	56.502.100	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.549.500	227.051.600	56.502.100	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	170.549.500	227.051.600	56.502.100	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.549.500	227.051.600	56.502.100	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.881.440	111.267.400	(20.614.040)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.798.400	68.667.400	(12.131.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	80.798.400	68.667.400	(12.131.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.798.400	68.667.400	(12.131.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.083.040	42.600.000	(8.483.040)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	51.083.040	42.600.000	(8.483.040)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.083.040	42.600.000	(8.483.040)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.687.200	299.040.000	(13.647.200)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.520.000	62.520.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	62.520.000	62.520.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.520.000	62.520.000	0	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	13.500.000	(9.000.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	22.500.000	13.500.000	(9.000.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	13.500.000	(9.000.000)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.667.200	223.020.000	(4.647.200)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	214.067.200	209.420.000	(4.647.200)	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.067.200	209.420.000	(4.647.200)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	13.600.000	13.600.000	0		
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.600.000	13.600.000	0	
Jumlah Belanja									5.609.192.195	7.684.999.005	2.075.806.810		
Total Surplus/(Defisit)									(5.609.192.195)	(7.684.999.005)	(2.075.806.810)		
0	00	2.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.08.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.423.692.961	9.217.682.107	1.793.989.146	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	309.096.780	319.815.280	10.718.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					
						Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.507.000	51.207.000	(300.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	51.507.000	51.207.000	(300.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			
						BELANJA OPERASI	51.507.000	51.207.000	(300.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	51.507.000	51.207.000	(300.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.055.300	30.055.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01					
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.055.300	30.055.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	30.055.300	30.055.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	30.055.300	30.055.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00					
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	227.534.480	238.552.980	11.018.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01					
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.973.100	34.973.100	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	34.973.100	34.973.100	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	34.973.100	34.973.100	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02					
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.833.600	141.852.100	11.018.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	130.833.600	141.852.100	11.018.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	130.833.600	141.852.100	11.018.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03					
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.727.780	61.727.780	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1			
						BELANJA OPERASI	61.727.780	61.727.780	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	61.727.780	61.727.780	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	154.254.300	283.580.000	129.325.700	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.153.800	56.664.500	38.510.700	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.153.800	56.664.500	38.510.700		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	18.153.800	56.664.500	38.510.700		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	18.153.800	56.664.500	38.510.700	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.455.700	207.270.700	90.815.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.480.000	93.480.000	(5.000.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	98.480.000	93.480.000	(5.000.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	98.480.000	93.480.000	(5.000.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.975.700	113.790.700	95.815.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	17.975.700	113.790.700	95.815.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.700	113.790.700	95.815.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.644.800	19.644.800	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.800	19.644.800	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	BELANJA OPERASI	19.644.800	19.644.800	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	02	Belanja Barang dan Jasa	19.644.800	19.644.800	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	484.981.300	477.371.500	(7.609.800)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	361.928.400	335.288.400	(26.640.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.467.300	40.037.300	(15.430.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	55.467.300	40.037.300	(15.430.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	55.467.300	40.037.300	(15.430.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	132.379.900	131.079.900	(1.300.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	132.379.900	131.079.900	(1.300.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	02	Belanja Barang dan Jasa	132.379.900	131.079.900	(1.300.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	174.081.200	164.171.200	(9.910.000)		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	174.081.200	164.171.200	(9.910.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	174.081.200	164.171.200	(9.910.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	123.052.900	142.083.100	19.030.200		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.052.900	142.083.100	19.030.200		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	123.052.900	142.083.100	19.030.200		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.052.900	142.083.100	19.030.200	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	123.135.700	123.395.700	260.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.135.700	123.395.700	260.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.966.000	59.535.800	3.569.800		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	55.966.000	59.535.800	3.569.800		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.966.000	59.535.800	3.569.800	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	67.169.700	63.859.900	(3.309.800)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	67.169.700	63.859.900	(3.309.800)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.169.700	63.859.900	(3.309.800)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	500.933.500	583.350.900	82.417.400		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.811.500	85.341.000	19.529.500		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.892.400	59.892.400	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	59.892.400	59.892.400	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.892.400	59.892.400	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.919.100	25.448.600	19.529.500		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.919.100	25.448.600	19.529.500		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.919.100	25.448.600	19.529.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	435.122.000	498.009.900	62.887.900		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.087.600	36.087.600	0			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.087.600	36.087.600	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.087.600	36.087.600	0
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.610.200	284.570.100	46.959.900			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	237.610.200	284.570.100	46.959.900	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.610.200	284.570.100	46.959.900
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.424.200	177.352.200	15.928.000			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	161.424.200	177.352.200	15.928.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.424.200	177.352.200	15.928.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	87.292.100	365.504.900	278.212.800	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.139.000	87.148.300	70.009.300	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.139.000	87.148.300	70.009.300			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.139.000	87.148.300	70.009.300	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.139.000	87.148.300	70.009.300
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	00			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.289.200	176.095.500	136.806.300	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.321.200	12.298.500	(15.022.700)			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.321.200	12.298.500	(15.022.700)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.321.200	12.298.500	(15.022.700)
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	11.968.000	163.797.000	151.829.000			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	11.968.000	163.797.000	151.829.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.968.000	163.797.000	151.829.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.863.900	102.261.100	71.397.200	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.741.900	87.239.100	67.497.200	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	19.741.900	87.239.100	67.497.200	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.741.900	87.239.100	67.497.200	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.122.000	15.022.000	3.900.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	11.122.000	15.022.000	3.900.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.122.000	15.022.000	3.900.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.763.999.281	7.064.663.827	1.300.664.546	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.027.900	(4.972.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.027.900	(4.972.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000	10.027.900	(4.972.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	10.027.900	(4.972.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.596.833.469	2.597.055.441	221.972	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.586.825.369	2.587.047.341	221.972	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.586.825.369	2.587.047.341	221.972	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	2.586.825.369	2.587.047.341	221.972	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.300	5.000.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	5.000.300	5.000.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.300	5.000.300	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.007.800	5.007.800	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	5.007.800	5.007.800	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.007.800	5.007.800	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.184.598.524	3.508.772.624	1.324.174.100	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.608.224	5.584.124	(3.024.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	8.608.224	5.584.124	(3.024.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.608.224	5.584.124	(3.024.100)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.657.400	56.286.600	(2.370.800)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	58.657.400	56.286.600	(2.370.800)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.657.400	56.286.600	(2.370.800)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.208.300	73.003.300	(7.205.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	80.208.300	73.003.300	(7.205.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.208.300	73.003.300	(7.205.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.623.700	12.623.700	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	12.623.700	12.623.700	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.623.700	12.623.700	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	2.237.900	2.237.900	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.237.900	2.237.900	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.900	2.237.900	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000	2.750.000	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	2.750.000	2.750.000	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000	2.750.000	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.019.513.000	3.356.287.000	1.336.774.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.019.513.000	3.356.287.000	1.336.774.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.513.000	3.356.287.000	1.336.774.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.655.250	174.206.450	(5.448.800)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.614.000	88.248.000	(7.366.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	860.000	860.000	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	860.000	860.000	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	94.754.000	87.388.000	(7.366.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.754.000	87.388.000	(7.366.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.041.250	85.958.450	1.917.200		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	860.000	860.000	0		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	860.000	860.000	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	83.181.250	85.098.450	1.917.200		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.581.250	67.498.450	1.917.200	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.600.000	17.600.000	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.349.100	193.017.100	(19.332.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000	1.624.000	464.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.160.000	1.624.000	464.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000	1.624.000	464.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.452.300	43.456.300	(25.996.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	69.452.300	43.456.300	(25.996.000)		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.452.300	43.456.300	(25.996.000)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.736.800	147.936.800	6.200.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	141.736.800	147.936.800	6.200.000		
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	141.736.800	147.936.800	6.200.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.562.938	581.584.312	6.021.374		

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.850.900	105.144.400	9.293.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	95.850.900	105.144.400	9.293.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.850.900	105.144.400	9.293.500	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.650.000	8.650.000	2.000.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	6.650.000	8.650.000	2.000.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000	8.650.000	2.000.000	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	473.062.038	467.789.912	(5.272.126)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	473.062.038	467.789.912	(5.272.126)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 01	Belanja Pegawai	4.460.000	4.460.000	0	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	468.602.038	463.329.912	(5.272.126)	
Jumlah Belanja								7.423.692.961	9.217.682.107	1.793.989.146	
Total Surplus/(Defisit)								(7.423.692.961)	(9.217.682.107)	(1.793.989.146)	
0	00	2.08.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.000.000.01 Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	2.09.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
							6.119.982.782	8.425.208.411	2.305.225.629	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
							0	2.000.000.000	2.000.000.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
							0	2.000.000.000	2.000.000.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
							0	2.000.000.000	2.000.000.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI
								0	2.000.000.000	2.000.000.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
								0	2.000.000.000	2.000.000.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
							2.041.330.908	2.169.416.108	128.085.200	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
							413.905.508	435.668.008	21.762.500	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
							25.650.100	25.650.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI
								25.650.100	25.650.100	0
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
								25.650.100	25.650.100	0
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
							338.185.308	353.485.308	15.300.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI
								338.185.308	353.485.308	15.300.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
								338.185.308	353.485.308	15.300.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
							26.900.100	26.900.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI
								26.900.100	26.900.100	0
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
								26.900.100	26.900.100	0
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
							6.470.100	12.932.600	6.462.500	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI
								6.470.100	12.932.600	6.462.500
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
								6.470.100	12.932.600	6.462.500
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
							16.699.900	16.699.900	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	16.699.900	16.699.900	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.699.900	16.699.900	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.008.244.000	998.407.100	(9.836.900)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.008.244.000	998.407.100	(9.836.900)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.008.244.000	998.407.100	(9.836.900)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1 01	Belanja Pegawai	3.860.000	3.430.000	(430.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.384.000	994.977.100	(9.406.900)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	619.181.400	735.341.000	116.159.600	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	298.212.600	167.541.200	(130.671.400)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	298.212.600	167.541.200	(130.671.400)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	298.212.600	167.541.200	(130.671.400)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	320.968.800	567.799.800	246.831.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	320.968.800	567.799.800	246.831.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	320.968.800	567.799.800	246.831.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.100.200	75.079.000	(21.200)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	53.600.100	53.600.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.600.100	53.600.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	53.600.100	53.600.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.100	53.600.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.500.100	21.478.900	(21.200)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	21.500.100	21.478.900	(21.200)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	21.500.100	21.478.900	(21.200)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.100	21.478.900	(21.200)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.390.000	75.390.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	75.390.000	0			
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	75.390.000	0			
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	75.390.000	75.390.000	0		
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.390.000	75.390.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.928.161.674	4.105.323.303	177.161.629	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.050.100	61.850.100	(7.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.050.100	61.850.100	(7.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	69.050.100	61.850.100	(7.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.050.100	61.850.100	(7.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.033.378	2.486.107.963	1.074.585	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.733.378	2.446.807.963	1.074.585	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.445.733.378	2.446.807.963	1.074.585	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.445.733.378	2.446.807.963	1.074.585	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.300.000	39.300.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	39.300.000	39.300.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000	39.300.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.096.152.800	1.269.221.800	173.069.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.400	9.999.400	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.999.400	9.999.400	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400	9.999.400	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.137.300	108.511.300	(43.626.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	40.897.000	41.782.000	885.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	0	885.000	885.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.897.000	40.897.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	111.240.300	66.729.300	(44.511.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.240.300	66.729.300	(44.511.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.390.000	92.790.000	(21.600.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	114.390.000	92.790.000	(21.600.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.390.000	92.790.000	(21.600.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.400.100	24.400.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	24.400.100	24.400.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.100	24.400.100	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	3.556.000	5.021.000	1.465.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	3.556.000	5.021.000	1.465.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.556.000	5.021.000	1.465.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.680.000	11.680.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	11.680.000	11.680.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000	11.680.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	779.990.000	1.016.820.000	236.830.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	779.990.000	1.016.820.000	236.830.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	779.990.000	1.016.820.000	236.830.000	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.983.600	108.983.600	(19.000.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.983.600	40.783.600	(13.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	53.983.600	40.783.600	(13.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.983.600	40.783.600	(13.200.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.000.000	68.200.000	(5.800.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	74.000.000	68.200.000	(5.800.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000	68.200.000	(5.800.000)	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.941.796	179.159.840	29.218.044	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.770.900	124.480.100	7.709.200	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	116.770.900	124.480.100	7.709.200	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.770.900	124.480.100	7.709.200	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	13.200.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	13.200.000	13.200.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000	13.200.000	0	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.970.896	41.479.740	21.508.844	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	19.970.896	41.479.740	21.508.844	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.970.896	41.479.740	21.508.844	
Jumlah Belanja									6.119.982.782	8.425.208.411	2.305.225.629	
Total Surplus/(Defisit)									(6.119.982.782)	(8.425.208.411)	(2.305.225.629)	
0	00	2.09.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arfin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.237.880	730.000.000	61.762.120	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	668.237.880	730.000.000	61.762.120	
Jumlah Pendapatan									668.237.880	730.000.000	61.762.120	
0	00	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.657.003.834	26.404.477.432	(1.252.526.402)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	947.909.300	962.909.300	15.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	947.909.300	962.909.300	15.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	900.000.000	900.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	900.000.000	900.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	900.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	47.909.300	62.909.300	15.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	47.909.300	62.909.300	15.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.909.300	62.909.300	15.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.868.073.682	2.778.155.554	910.081.872	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.475.826.182	2.419.424.554	943.598.372	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	205.297.300	146.473.800	(58.823.500)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	205.297.300	146.473.800	(58.823.500)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.200.000	0	(2.200.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.097.300	146.473.800	(56.623.500)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	211.260.600	222.805.200	11.544.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	178.560.600	202.805.200	24.244.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.305.000	1.305.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.255.600	201.500.200	24.244.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	32.700.000	20.000.000	(12.700.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.700.000	20.000.000	(12.700.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.059.268.282	2.050.145.554	990.877.272	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	303.768.282	589.791.454	286.023.172	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	1.880.000	8.525.000	6.645.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	301.888.282	581.266.454	279.378.172	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	755.500.000	1.460.354.100	704.854.100	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	755.500.000	1.460.354.100	704.854.100	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	151.930.000	164.580.000	12.650.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	151.930.000	164.580.000	12.650.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	144.730.000	159.780.000	15.050.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	1.705.000	1.705.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.025.000	158.075.000	15.050.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 2	BELANJA MODAL	7.200.000	4.800.000	(2.400.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.200.000	4.800.000	(2.400.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	240.317.500	194.151.000	(46.166.500)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	64.474.800	60.619.800	(3.855.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 1	BELANJA OPERASI	59.674.800	60.619.800	945.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 1 01	Belanja Pegawai	375.000	0	(375.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.299.800	60.619.800	1.320.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 2	BELANJA MODAL	4.800.000	0	(4.800.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000	0	(4.800.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	175.842.700	133.531.200	(42.311.500)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	5 1	BELANJA OPERASI	78.214.300	60.078.700	(18.135.600)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	5 1 01	Belanja Pegawai	1.305.000	1.305.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.909.300	58.773.700	(18.135.600)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	5 2	BELANJA MODAL	97.628.400	73.452.500	(24.175.900)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.628.400	73.452.500	(24.175.900)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.413.625.652	2.571.478.628	(4.842.147.024)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.413.625.652	2.571.478.628	(4.842.147.024)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.413.625.652	2.571.478.628	(4.842.147.024)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	2.087.172.652	2.194.269.228	107.096.576	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 1 01	Belanja Pegawai	31.090.000	11.125.000	(19.965.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.056.082.652	2.183.144.228	127.061.576	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 2	BELANJA MODAL	5.326.453.000	377.209.400	(4.949.243.600)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.776.000	286.124.400	9.348.400	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.048.592.000	90.000.000	(4.958.592.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.085.000	1.085.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	324.901.400	424.890.000	99.988.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Penyimpanan Sementara Limbah B3	43.397.400	39.306.000	(4.091.400)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	43.397.400	39.306.000	(4.091.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	39.800.800	35.709.400	(4.091.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.800.800	35.709.400	(4.091.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	3.596.600	3.596.600	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.596.600	3.596.600	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	00		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.504.000	385.584.000	104.080.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	281.504.000	385.584.000	104.080.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	236.400.000	309.400.000	73.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	236.400.000	309.400.000	73.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 2	BELANJA MODAL	45.104.000	76.184.000	31.080.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.104.000	76.184.000	31.080.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	129.272.100	129.272.100	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	88.692.200	88.692.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	88.692.200	88.692.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	88.692.200	88.692.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.807.200	87.807.200	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	00	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.579.900	40.579.900	0			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.579.900	40.579.900	0			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	37.079.900	37.079.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.079.900	37.079.900	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	3.500.000	3.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000	3.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52.750.800	52.750.600	(200)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.750.800	52.750.600	(200)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.750.800	52.750.600	(200)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.050.800	43.050.600	(200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.050.800	43.050.600	(200)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	9.700.000	9.700.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.700.000	9.700.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	0.00	00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	468.321.600	468.321.516	(84)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.321.600	468.321.516	(84)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	468.321.600	468.321.516	(84)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	398.721.600	398.721.516	(84)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	750.000	0	(750.000)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	397.971.600	398.721.516	749.916
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	69.600.000	69.600.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.600.000	69.600.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	0.00	00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.347.417.532	9.989.146.728	1.641.729.196			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	00		Pengelolaan Sampah	8.347.417.532	9.989.146.728	1.641.729.196			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.326.035.100	5.308.830.100	(17.205.000)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	5.326.035.100	5.308.830.100	(17.205.000)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	02	Belanja Barang dan Jasa	5.326.035.100	5.308.830.100	(17.205.000)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.975.000	41.975.000	0			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	41.975.000	41.975.000	0			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	02	Belanja Barang dan Jasa	41.975.000	41.975.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	835.038.132	2.328.972.328	1.493.934.196			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	644.622.132	548.556.328	(96.065.804)			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	02	Belanja Barang dan Jasa	644.622.132	548.556.328	(96.065.804)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	190.416.000	1.780.416.000	1.590.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.416.000	1.780.416.000	1.590.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.144.369.300	2.309.369.300	165.000.000			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	BELANJA OPERASI	39.369.300	39.369.300	0			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	01	Belanja Pegawai	2.460.000	2.460.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	02	Belanja Barang dan Jasa	36.909.300	36.909.300	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2	BELANJA MODAL	2.105.000.000	2.270.000.000	165.000.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.105.000.000	2.270.000.000	165.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.033.368.568	8.997.589.806	964.221.238			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.137.300	31.343.700	206.400			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.965.000	3.970.100	5.100			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	3.965.000	3.970.100	5.100			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	3.965.000	3.970.100	5.100		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.237.200	26.405.500	168.300			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	26.237.200	26.405.500	168.300			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	02	Belanja Barang dan Jasa	26.237.200	26.405.500	168.300		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.100	968.100	33.000			
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA OPERASI	935.100	968.100	33.000			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	935.100	968.100	33.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.582.969.556	4.590.183.630	7.214.074	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.184.656	4.520.198.730	14.074	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.520.184.656	4.520.198.730	14.074	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.520.184.656	4.520.198.730	14.074	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.785.100	64.985.100	7.200.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	57.785.100	64.985.100	7.200.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.785.100	64.985.100	7.200.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.099.900	3.099.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.099.900	3.099.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.099.900	3.099.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.899.900	1.899.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.899.900	1.899.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.900	1.899.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.003.930.524	1.417.095.938	413.165.414	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.118.438	25.801.438	6.683.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.718.438	14.401.438	6.683.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.718.438	14.401.438	6.683.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	2		BELANJA MODAL	11.400.000	11.400.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.400.000	11.400.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.937.300	166.952.100	29.014.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	73.623.700	109.738.900	36.115.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.623.700	109.738.900	36.115.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	64.313.600	57.213.200	(7.100.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.313.600	57.213.200	(7.100.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.259.000	73.287.500	1.028.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.259.000	73.287.500	1.028.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.259.000	73.287.500	1.028.500	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.607.200	13.324.100	7.716.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.607.200	13.324.100	7.716.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.607.200	13.324.100	7.716.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07				Penyediaan Bahan/Material	5.293.586	10.279.600	4.986.014	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.293.586	10.279.600	4.986.014	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.586	10.279.600	4.986.014	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.375.000	4.970.000	(3.405.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	8.375.000	4.970.000	(3.405.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000	4.970.000	(3.405.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.340.000	1.122.481.200	367.141.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	755.340.000	1.122.481.200	367.141.200	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	755.340.000	1.122.481.200	367.141.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.557.800	243.543.320	233.985.520	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.557.800	243.543.320	233.985.520	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	9.557.800	243.543.320	233.985.520	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.557.800	243.543.320	233.985.520	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.454.240	247.076.064	9.621.824	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.480.000	94.800.000	(19.680.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	114.480.000	94.800.000	(19.680.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.480.000	94.800.000	(19.680.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.974.240	152.276.064	29.301.824	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	122.974.240	152.276.064	29.301.824	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.974.240	152.276.064	29.301.824	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.168.319.148	2.468.347.154	300.028.006	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.484.000	45.618.600	1.134.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	44.484.000	45.618.600	1.134.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.484.000	45.618.600	1.134.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.524.165.600	1.750.286.200	226.120.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.524.165.600	1.750.286.200	226.120.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.524.165.600	1.750.286.200	226.120.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	160.773.900	221.770.150	60.996.250	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1	BELANJA OPERASI	160.773.900	221.770.150	60.996.250	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.773.900	221.770.150	60.996.250	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.000.000	40.350.000	9.350.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	04	5	1	BELANJA OPERASI	31.000.000	40.350.000	9.350.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000	40.350.000	9.350.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.751.976	150.493.776	1.741.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	148.751.976	150.493.776	1.741.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.751.976	150.493.776	1.741.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.523.356	184.093.540	(12.429.816)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	196.523.356	184.093.540	(12.429.816)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 01	Belanja Pegawai	1.522.500	1.522.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.856	182.571.040	(12.429.816)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.620.316	75.734.888	13.114.572	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	62.620.316	75.734.888	13.114.572	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	62.620.316	75.734.888	13.114.572	
Jumlah Belanja											27.657.003.834	26.404.477.432	(1.252.526.402)	
Total Surplus/(Defisit)											(26.988.765.954)	(25.674.477.432)	1.314.288.522	
0	00	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.12.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							7.153.921.976	8.232.354.023	1.078.432.047	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
							239.764.000	239.764.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pelayanan Pendaftaran Penduduk
							230.714.000	230.714.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		230.714.000	230.714.000	0	
										Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	230.714.000	230.714.000	0	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	230.714.000	230.714.000	0	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					Penataan Pendaftaran Penduduk
							9.050.000	9.050.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		9.050.000	9.050.000	0	
										Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	9.050.000	9.050.000	0	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	9.050.000	9.050.000	0	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENCATATAN SIPIL
							423.346.100	440.706.100	17.360.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Pelayanan Pencatatan Sipil
							423.346.100	440.706.100	17.360.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		86.260.300	87.360.300	1.100.000	
										Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	86.260.300	87.360.300	1.100.000	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	86.260.300	87.360.300	1.100.000	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		247.195.200	263.455.200	16.260.000	
										Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	247.195.200	263.455.200	16.260.000	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	247.195.200	263.455.200	16.260.000	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04		89.890.600	89.890.600	0	
										Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	89.890.600	89.890.600	0	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	89.890.600	89.890.600	0	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
							539.920.000	508.406.800	(31.513.200)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
							108.142.500	155.729.300	47.586.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		108.142.500	155.729.300	47.586.800	
										Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	108.142.500	155.729.300	47.586.800	
						1				BELANJA OPERASI
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	108.142.500	155.729.300	47.586.800	
						1				02
										Belanja Barang dan Jasa
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00					Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							136.850.000	57.750.000	(79.100.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.850.000	57.750.000	(79.100.000)			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	136.850.000	57.750.000	(79.100.000)			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.850.000	57.750.000	(79.100.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	294.927.500	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	294.927.500	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	294.927.500	294.927.500	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	294.927.500	294.927.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.950.891.876	7.043.477.123	1.092.585.247			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.711.800	23.711.800	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.711.800	23.711.800	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	23.711.800	23.711.800	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.711.800	23.711.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.217.907.176	3.218.087.646	180.470			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.215.907.176	3.216.087.646	180.470			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.215.907.176	3.216.087.646	180.470		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.215.907.176	3.216.087.646	180.470	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	0			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.662.500	2.006.230.500	550.568.000			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	808.500	5.189.400	4.380.900			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	808.500	5.189.400	4.380.900		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	808.500	5.189.400	4.380.900	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.233.500	353.420.500	72.187.000			
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	281.233.500	353.420.500	72.187.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.233.500	353.420.500	72.187.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.300.000	145.305.000	10.005.000			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	135.300.000	145.305.000	10.005.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.300.000	145.305.000	10.005.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.594.500	30.582.600	20.988.100		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	9.594.500	30.582.600	20.988.100		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.594.500	30.582.600	20.988.100	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.075.000	4.075.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	4.075.000	4.075.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000	4.075.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.024.651.000	1.467.658.000	443.007.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.024.651.000	1.467.658.000	443.007.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.651.000	1.467.658.000	443.007.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.127.800	1.002.299.527	483.171.727		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	398.473.600	704.876.827	306.403.227		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	398.473.600	704.876.827	306.403.227		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.473.600	704.876.827	306.403.227	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.654.200	297.422.700	176.768.500		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	13.750.000	33.000.000	19.250.000		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000	33.000.000	19.250.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	106.904.200	264.422.700	157.518.500		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.904.200	158.822.700	51.918.500	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	105.600.000	105.600.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.208.200	455.584.800	20.376.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.000.000	211.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	211.000.000	211.000.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.000.000	211.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.208.200	244.584.800	20.376.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	224.208.200	244.584.800	20.376.600		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	224.208.200	244.584.800	20.376.600	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.274.400	337.562.850	38.288.450		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.850.000	54.138.450	14.288.450		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.850.000	54.138.450	14.288.450		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.850.000	54.138.450	14.288.450	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.100.000	23.100.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	23.100.000	23.100.000	0		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000	23.100.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.324.400	260.324.400	24.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	36.324.400	60.324.400	24.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.324.400	60.324.400	24.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2			BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	
Jumlah Belanja											7.153.921.976	8.232.354.023	1.078.432.047	
Total Surplus/(Defisit)											(7.153.921.976)	(8.232.354.023)	(1.078.432.047)	
0	00	2.12.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
						Jumlah Pendapatan	0	0	0			
0	00	2.13.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						
										BELANJA		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
							49.373.972.933	88.284.943.409	38.910.970.476			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENATAAN DESA		
							23.223.000	205.444.900	182.221.900			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Penyelenggaraan Penataan Desa		
							23.223.000	205.444.900	182.221.900			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		23.223.000	205.444.900	182.221.900	Fasilitasi Tata Wilayah Desa		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	23.223.000	205.444.900	182.221.900	BELANJA OPERASI	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	23.223.000	205.444.900	182.221.900	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		
							41.885.260.512	80.018.764.656	38.133.504.144			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Fasilitasi Kerja sama antar Desa		
							41.885.260.512	80.018.764.656	38.133.504.144			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		2.145.260.512	45.747.828.238	43.602.567.726	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	01	0	157.315.000	157.315.000	Belanja Pegawai
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	2.145.260.512	45.590.513.238	43.445.252.726	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2		39.740.000.000	34.270.936.418	(5.469.063.582)	BELANJA MODAL
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	02	0	76.100.000	76.100.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	04	39.740.000.000	34.194.836.418	(5.545.163.582)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
							2.164.112.400	1.988.288.400	(175.824.000)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
							2.164.112.400	1.988.288.400	(175.824.000)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				45.133.000	45.133.000	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		45.133.000	45.133.000	0	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	45.133.000	45.133.000	0	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03				75.889.000	75.889.000	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1		75.889.000	75.889.000	0	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	75.889.000	75.889.000	0	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05				65.261.000	34.911.000	(30.350.000)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1		65.261.000	34.911.000	(30.350.000)	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	65.261.000	34.911.000	(30.350.000)	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08				209.184.500	209.184.500	0	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1		209.184.500	209.184.500	0	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	209.184.500	209.184.500	0	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09				1.478.121.100	1.327.128.500	(150.992.600)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1		1.478.121.100	1.327.128.500	(150.992.600)	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	1.478.121.100	1.327.128.500	(150.992.600)	Belanja Barang dan Jasa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13				180.799.000	179.750.500	(1.048.500)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1		180.799.000	179.750.500	(1.048.500)	BELANJA OPERASI
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1	02	180.799.000	179.750.500	(1.048.500)	Belanja Barang dan Jasa

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24.592.800	13.442.800	(11.150.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5 1	BELANJA OPERASI	24.592.800	13.442.800	(11.150.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.592.800	13.442.800	(11.150.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	85.132.000	102.849.100	17.717.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	5 1	BELANJA OPERASI	85.132.000	102.849.100	17.717.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.132.000	102.849.100	17.717.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.211.457.400	1.103.270.200	(108.187.200)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.211.457.400	1.103.270.200	(108.187.200)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	389.865.100	389.865.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	389.865.100	389.865.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.865.100	389.865.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	363.150.500	285.698.300	(77.452.200)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	363.150.500	285.698.300	(77.452.200)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	363.150.500	285.698.300	(77.452.200)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	234.745.800	204.010.800	(30.735.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	218.894.400	188.159.400	(30.735.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.894.400	188.159.400	(30.735.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 2	BELANJA MODAL	15.851.400	15.851.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.851.400	15.851.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	223.696.000	223.696.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	214.395.000	223.696.000	9.301.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.395.000	223.696.000	9.301.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 2	BELANJA MODAL	9.301.000	0	(9.301.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.301.000	0	(9.301.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.919.621	4.969.175.253	879.255.632			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.548.500	7.548.500	0			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.548.500	7.548.500	0			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.548.500	7.548.500	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.548.500	7.548.500	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.218.521	2.813.390.603	(43.827.918)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.849.001.221	2.805.173.303	(43.827.918)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.849.001.221	2.805.173.303	(43.827.918)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.849.001.221	2.805.173.303	(43.827.918)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.893.400	2.893.400	0			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.893.400	2.893.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.893.400	2.893.400	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.323.900	5.323.900	0			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	5.323.900	5.323.900	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.323.900	5.323.900	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.075.200	1.598.533.400	734.458.200			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.752.600	52.752.600	0			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	52.752.600	52.752.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.752.600	52.752.600	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.493.400	77.768.400	13.275.000			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	64.493.400	77.768.400	13.275.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.493.400	77.768.400	13.275.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.514.200	24.096.400	(4.417.800)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	28.514.200	24.096.400	(4.417.800)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.514.200	24.096.400	(4.417.800)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	3.797.000	1.797.000			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	3.797.000	1.797.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	3.797.000	1.797.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.315.000	1.435.119.000	728.804.000			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	706.315.000	1.435.119.000	728.804.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	706.315.000	1.435.119.000	728.804.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.913.600	241.244.200	147.330.600			
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.500.800	212.831.400	147.330.600			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	65.500.800	212.831.400	147.330.600	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.500.800	212.831.400	147.330.600	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.412.800	28.412.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	28.412.800	28.412.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.412.800	28.412.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.434.000	226.434.000	32.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	4.640.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.640.000	4.640.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000	4.640.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.594.000	60.194.000	3.600.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	56.594.000	60.194.000	3.600.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.594.000	60.194.000	3.600.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.200.000	161.600.000	28.400.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	133.200.000	161.600.000	28.400.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.200.000	161.600.000	28.400.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.729.800	82.024.550	9.294.750	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.379.800	54.674.550	9.294.750	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	45.379.800	54.674.550	9.294.750	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.379.800	54.674.550	9.294.750	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000	17.200.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	17.200.000	17.200.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000	17.200.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	10.150.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	10.150.000	10.150.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000	10.150.000	0	
Jumlah Belanja							49.373.972.933	88.284.943.409	38.910.970.476		
Total Surplus/(Defisit)							(49.373.972.933)	(88.284.943.409)	(38.910.970.476)		
0	00	2.13.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
							Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0	00	2.14.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA					
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.341.085.088	10.761.417.088	4.420.332.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	214.124.600	336.054.600	121.930.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	89.719.200	89.719.200	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	70.374.700	70.374.700	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	70.374.700	70.374.700	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.374.700	70.374.700	0
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.600	14.490.600	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	14.490.600	14.490.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.600	14.490.600	0
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12		Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.900	4.853.900	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	4.853.900	4.853.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.853.900	4.853.900	0
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.405.400	246.335.400	121.930.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	7.663.900	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.663.900	7.663.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.663.900	7.663.900	0
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100	56.000.100	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	56.000.100	56.000.100	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.100	56.000.100	0
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	67.200.000	67.200.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	67.200.000	67.200.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	67.200.000	67.200.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200	37.354.200	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	37.354.200	37.354.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.354.200	37.354.200	0

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	4.330.000	4.330.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11 5 1	BELANJA OPERASI	0	4.330.000	4.330.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.330.000	4.330.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.582.000	55.982.000	50.400.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13 5 1	BELANJA OPERASI	5.582.000	55.982.000	50.400.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.582.000	55.982.000	50.400.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200	17.805.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14 5 1	BELANJA OPERASI	17.805.200	17.805.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.805.200	17.805.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	454.631.000	2.703.601.600	2.248.970.600	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	40.763.100	1.037.350.700	996.587.600	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	37.850.000	225.597.600	187.747.600	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	37.850.000	225.597.600	187.747.600	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000	225.597.600	187.747.600	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	25.000.000	25.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	0	25.000.000	25.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.000.000	25.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100	73.553.100	70.640.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04 5 1	BELANJA OPERASI	2.913.100	73.553.100	70.640.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.913.100	73.553.100	70.640.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	187.200.000	187.200.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06 5 1	BELANJA OPERASI	0	187.200.000	187.200.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	187.200.000	187.200.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0	486.000.000	486.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07 5 1	BELANJA OPERASI	0	486.000.000	486.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	486.000.000	486.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	0	40.000.000	40.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08 5 1	BELANJA OPERASI	0	40.000.000	40.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	40.000.000	40.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	17.640.000	661.290.000	643.650.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	17.640.000	13.290.000	(4.350.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	BELANJA OPERASI	17.640.000	13.290.000	(4.350.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000	13.290.000	(4.350.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	648.000.000	648.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	BELANJA OPERASI	0	648.000.000	648.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Belanja Barang dan Jasa	0	648.000.000	648.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	320.811.400	533.524.400	212.713.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000	41.550.000	11.550.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	BELANJA OPERASI	30.000.000	41.550.000	11.550.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	41.550.000	11.550.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	82.807.900	138.004.900	55.197.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	BELANJA OPERASI	82.807.900	138.004.900	55.197.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Belanja Barang dan Jasa	82.807.900	138.004.900	55.197.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	71.600.200	214.566.200	142.966.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	BELANJA OPERASI	71.600.200	71.600.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Belanja Barang dan Jasa	71.600.200	71.600.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	BELANJA MODAL	0	142.966.000	142.966.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	142.966.000	142.966.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.085.700	33.085.700	3.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	BELANJA OPERASI	30.085.700	33.085.700	3.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	Belanja Barang dan Jasa	30.085.700	33.085.700	3.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.317.600	106.317.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	BELANJA OPERASI	106.317.600	106.317.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	Belanja Barang dan Jasa	106.317.600	106.317.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75.416.500	471.436.500	396.020.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.726.600	36.726.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	BELANJA OPERASI	36.726.600	36.726.600	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	Belanja Barang dan Jasa	36.726.600	36.726.600	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900	434.709.900	396.020.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	BELANJA OPERASI	38.689.900	434.709.900	396.020.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	Belanja Barang dan Jasa	38.689.900	434.709.900	396.020.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	720.450.300	2.587.954.300	1.867.504.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	683.561.500	2.523.810.500	1.840.249.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	76.939.000	76.939.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	BELANJA OPERASI	76.939.000	76.939.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Belanja Barang dan Jasa	76.939.000	76.939.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	794.614.000	794.614.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	BELANJA OPERASI	0	46.879.000	46.879.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Belanja Pegawai	0	2.435.000	2.435.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.444.000	44.444.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	BELANJA MODAL	0	747.735.000	747.735.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	747.735.000	747.735.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	119.993.100	107.243.100	(12.750.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	BELANJA OPERASI	119.993.100	107.243.100	(12.750.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Belanja Barang dan Jasa	119.993.100	107.243.100	(12.750.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	344.571.600	1.385.431.600	1.040.860.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	BELANJA OPERASI	344.571.600	1.385.431.600	1.040.860.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Belanja Barang dan Jasa	344.571.600	1.385.431.600	1.040.860.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.510.900	100.510.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	BELANJA OPERASI	100.510.900	100.510.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	Belanja Barang dan Jasa	100.510.900	100.510.900	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13.300.000	13.300.000	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	13.300.000	13.300.000	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	13.300.000	13.300.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	28.246.900	45.771.900	17.525.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	28.246.900	45.771.900	17.525.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	28.246.900	45.771.900	17.525.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36.888.800	64.143.800	27.255.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.387.800	48.642.800	27.255.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	21.387.800	48.642.800	27.255.000		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	21.387.800	48.642.800	27.255.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.022.900	8.022.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5	1	8.022.900	8.022.900	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5	1	02	8.022.900	8.022.900	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	04			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	7.478.100	7.478.100	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	04	5	1	7.478.100	7.478.100	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	04	5	1	02	7.478.100	7.478.100	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.951.879.188	5.133.806.588	181.927.400	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	5.000.000	5.000.000	0		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	5.000.000	5.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.143	3.133.947.143	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.047.143	3.129.047.143	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	3.129.047.143	3.129.047.143	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	Belanja Pegawai	3.129.047.143	3.129.047.143	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	BELANJA OPERASI	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000	2.450.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.038.500	1.328.378.900	141.340.400	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.161.200	4.161.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA OPERASI	4.161.200	4.161.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	Belanja Barang dan Jasa	4.161.200	4.161.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.098.900	59.336.300	30.237.400	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA OPERASI	29.098.900	59.336.300	30.237.400	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	Belanja Barang dan Jasa	29.098.900	59.336.300	30.237.400	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.914.700	64.864.700	1.950.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA OPERASI	62.914.700	64.864.700	1.950.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	Belanja Barang dan Jasa	62.914.700	64.864.700	1.950.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.274.400	12.361.400	87.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA OPERASI	12.274.400	12.361.400	87.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	Belanja Barang dan Jasa	12.274.400	12.361.400	87.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	4.015.300	4.015.300	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	BELANJA OPERASI	4.015.300	4.015.300	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	Belanja Barang dan Jasa	4.015.300	4.015.300	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	6.270.000	(1.980.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	BELANJA OPERASI	8.250.000	6.270.000	(1.980.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000	6.270.000	(1.980.000)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.324.000	1.177.370.000	111.046.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA OPERASI	1.066.324.000	1.177.370.000	111.046.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	Belanja Barang dan Jasa	1.066.324.000	1.177.370.000	111.046.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.704.545	108.248.745	30.544.200	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.704.545	105.248.745	30.544.200	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA MODAL	74.704.545	105.248.745	30.544.200	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.704.545	105.248.745	30.544.200	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	BELANJA MODAL	3.000.000	3.000.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.613.000	228.613.000	5.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200	1.531.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.531.200	1.531.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.531.200	1.531.200	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.897.400	71.897.400	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	71.897.400	71.897.400	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.897.400	71.897.400	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.184.400	155.184.400	5.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	150.184.400	155.184.400	5.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.184.400	155.184.400	5.000.000	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.576.000	329.618.800	5.042.800	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.091.000	124.133.800	5.042.800	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	119.091.000	124.133.800	5.042.800	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.091.000	124.133.800	5.042.800	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.100.000	5.100.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000	5.100.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	200.385.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	14.385.000	14.385.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	13.500.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	BELANJA MODAL	186.000.000	186.000.000	0	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.000.000	186.000.000	0	
Jumlah Belanja								6.341.085.088	10.761.417.088	4.420.332.000		
Total Surplus/(Defisit)								(6.341.085.088)	(10.761.417.088)	(4.420.332.000)		
0	00	2.14.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.840.000	582.840.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02	Retribusi Daerah	582.840.000	582.840.000	0	
Jumlah Pendapatan							582.840.000	582.840.000	0	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.278.750.769	9.614.946.588	336.195.819	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.855.329.956	3.880.206.778	(975.123.178)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	56.394.532	76.161.112	19.766.580	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12.464.820	32.231.400	19.766.580	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	12.464.820	32.231.400	19.766.580	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.464.820	32.231.400	19.766.580	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.929.712	43.929.712	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04 5 1	BELANJA OPERASI	43.929.712	43.929.712	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.929.712	43.929.712	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	86.963.000	86.963.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	86.963.000	86.963.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 1	BELANJA OPERASI	82.282.000	82.282.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.282.000	82.282.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 2	BELANJA MODAL	4.681.000	4.681.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.681.000	4.681.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	138.633.400	965.049.320	826.415.920	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.826.800	750.642.720	732.815.920	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 1	BELANJA OPERASI	17.826.800	184.492.800	166.666.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.020.000	1.020.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.826.800	183.472.800	165.646.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 2	BELANJA MODAL	0	566.149.920	566.149.920	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	426.319.920	426.319.920	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	139.830.000	139.830.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	120.806.600	214.406.600	93.600.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02 5 1	BELANJA OPERASI	120.806.600	214.406.600	93.600.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.806.600	214.406.600	93.600.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00							
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.097.171.108	466.473.508	(2.630.697.600)			
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.932.227.600	251.530.000	(2.680.697.600)			
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	67.495.000	251.530.000	184.035.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.495.000	1.530.000	(965.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	250.000.000	185.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2		BELANJA MODAL	2.864.732.600	0	(2.864.732.600)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.732.600	0	(2.864.732.600)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000	110.000.000	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	110.000.000	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	110.000.000	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104.943.508	104.943.508	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	104.943.508	104.943.508	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.943.508	104.943.508	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	00				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.250.747.916	1.913.704.838	662.956.922
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8.000.000	27.568.000	19.568.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	27.568.000	19.568.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	27.568.000	19.568.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.011.890.801	1.449.004.723	437.113.922
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	52.520.000	121.070.000	68.550.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	3.570.000	2.550.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000	117.500.000	66.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	959.370.801	1.327.934.723	368.563.922
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	959.370.801	1.327.934.723	368.563.922
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	03				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.056.015	75.056.015	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.649.900	19.649.900	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.649.900	19.649.900	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	55.406.115	55.406.115	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.406.115	55.406.115	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	112.197.700	313.192.700	200.995.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	112.197.700	313.192.700	200.995.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.197.700	313.192.700	200.995.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	43.603.400	48.883.400	5.280.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	43.603.400	48.883.400	5.280.000

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.603.400	48.883.400	5.280.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	00		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	72.590.000	78.530.000	5.940.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	41.200.000	41.200.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02	5 1	BELANJA OPERASI	41.200.000	41.200.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000	41.200.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	31.390.000	37.330.000	5.940.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	03	5 1	BELANJA OPERASI	31.390.000	37.330.000	5.940.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.390.000	37.330.000	5.940.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	00		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	56.030.000	91.750.000	35.720.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	56.030.000	91.750.000	35.720.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	56.030.000	91.750.000	35.720.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.030.000	91.750.000	35.720.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	00		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.800.000	201.575.000	104.775.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	96.800.000	201.575.000	104.775.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5 1	BELANJA OPERASI	96.800.000	201.575.000	104.775.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000	201.575.000	104.775.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	344.394.936	482.594.936	138.200.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.12	00		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	130.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.12	01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	130.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.12	01	5 1	BELANJA OPERASI	130.500.000	130.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.12	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.500.000	130.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	00		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	213.894.936	352.094.936	138.200.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	183.780.000	233.780.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02	5 1	BELANJA OPERASI	26.280.000	76.280.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02	5 1 01	Belanja Pegawai	1.530.000	1.530.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000	74.750.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02	5 2	BELANJA MODAL	157.500.000	157.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.500.000	157.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	30.114.936	118.314.936	88.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1	BELANJA OPERASI	10.314.936	10.314.936	0		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.314.936	10.314.936	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	2	BELANJA MODAL	19.800.000	108.000.000	88.200.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.800.000	108.000.000	88.200.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.079.025.877	5.252.144.874	1.173.118.997		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.772.400	25.322.400	1.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.772.400	25.322.400	1.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	23.772.400	25.322.400	1.550.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.772.400	25.322.400	1.550.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.143.283.915	3.147.396.962	4.113.047		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.049.915	3.097.062.962	13.047		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.097.049.915	3.097.062.962	13.047		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.097.049.915	3.097.062.962	13.047	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.134.000	4.134.000	2.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.134.000	4.134.000	2.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.134.000	4.134.000	2.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.100.000	46.200.000	2.100.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	44.100.000	46.200.000	2.100.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000	46.200.000	2.100.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.814.662	1.563.825.362	977.010.700		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.655.362	11.655.362	4.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.655.362	11.655.362	4.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.655.362	11.655.362	4.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.237.000	495.921.300	370.684.300		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	28.393.000	34.518.600	6.125.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.393.000	34.518.600	6.125.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	96.844.000	461.402.700	364.558.700		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.844.000	461.402.700	364.558.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.072.800	241.231.400	153.158.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	53.072.800	151.231.400	98.158.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.072.800	151.231.400	98.158.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	BELANJA MODAL	35.000.000	0	(35.000.000)		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	0	(35.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	90.000.000	90.000.000		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	0	90.000.000	90.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.046.800	207.546.800	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.108.100	308.053.350	184.945.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
Jumlah Belanja								9.278.750.769	9.614.946.588	336.195.819	
Total Surplus/(Defisit)								(8.695.910.769)	(9.032.106.588)	(336.195.819)	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.112.500	27.072.300	11.959.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.737.000	787.945.000	437.208.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.046.800	207.546.800	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.296.800	122.296.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000	20.750.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000	64.500.000	5.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.108.100	308.053.350	184.945.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.316.100	233.757.350	133.441.250	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.792.000	74.296.000	51.504.000	
Jumlah Belanja								9.278.750.769	9.614.946.588	336.195.819	
Total Surplus/(Defisit)								(8.695.910.769)	(9.032.106.588)	(336.195.819)	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH				
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.000.000	130.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00 4 1 02	Retribusi Daerah	130.000.000	130.000.000	0	
Jumlah Pendapatan							130.000.000	130.000.000	0	
0	00	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA				
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.747.202.800	7.750.896.036	1.003.693.236	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.219.640.800	1.671.137.700	451.496.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.219.640.800	1.671.137.700	451.496.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48.200.000	48.200.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	48.200.000	48.200.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000	48.200.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000	12.600.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05 5 1	BELANJA OPERASI	12.600.000	12.600.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000	12.600.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	29.450.000	29.450.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06 5 1	BELANJA OPERASI	29.450.000	29.450.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000	29.450.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	1.096.432.000	1.547.928.900	451.496.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07 5 1	BELANJA OPERASI	1.096.432.000	1.547.928.900	451.496.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.096.432.000	1.091.432.000	(5.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07 5 1 05	Belanja Hibah	0	456.496.900	456.496.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.958.800	32.958.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12 5 1	BELANJA OPERASI	32.958.800	32.958.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.958.800	32.958.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	619.855.400	921.355.400	301.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	00	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	449.000.000	625.350.000	176.350.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	215.000.000	6.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	209.000.000	215.000.000	6.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.000.000	215.000.000	6.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	240.000.000	410.350.000	170.350.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	240.000.000	210.350.000	(29.650.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	210.350.000	(29.650.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03 5 2	BELANJA MODAL	0	200.000.000	200.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	200.000.000	200.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.855.400	296.005.400	125.150.000			
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82.350.000	210.450.000	128.100.000			
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	82.350.000	210.450.000	128.100.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.350.000	210.450.000	128.100.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	36.360.000	31.560.000	(4.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	36.360.000	31.560.000	(4.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.360.000	31.560.000	(4.800.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	43.895.400	35.545.400	(8.350.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	43.895.400	35.545.400	(8.350.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.895.400	35.545.400	(8.350.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	12			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	8.250.000	18.450.000	10.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	8.250.000	18.450.000	10.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000	18.450.000	10.200.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.907.706.600	5.158.402.936	250.696.336			
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	12.600.000	0			
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000	12.600.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	12.600.000	12.600.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000	12.600.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.176.420	3.431.176.856	436			
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.576.420	3.427.576.856	436	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.427.576.420	3.427.576.856	436	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.427.576.420	3.427.576.856	436
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000	2.050.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.050.000	2.050.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000	2.050.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000	1.550.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.550.000	1.550.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000	1.550.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.582.000	891.467.700	157.885.700			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.656.100	36.829.800	(8.826.300)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	BELANJA OPERASI	45.656.100	36.829.800	(8.826.300)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	Belanja Barang dan Jasa	45.656.100	36.829.800	(8.826.300)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.401.900	76.401.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	BELANJA OPERASI	76.401.900	76.401.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	Belanja Barang dan Jasa	76.401.900	76.401.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	26.300.000	(23.700.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	BELANJA OPERASI	50.000.000	26.300.000	(23.700.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	26.300.000	(23.700.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	5.903.000	(2.097.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	08	BELANJA OPERASI	8.000.000	5.903.000	(2.097.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	08	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	5.903.000	(2.097.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.524.000	746.033.000	192.509.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	BELANJA OPERASI	553.524.000	746.033.000	192.509.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	Belanja Barang dan Jasa	553.524.000	746.033.000	192.509.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412.512.680	461.586.880	49.074.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.512.680	461.586.880	49.074.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	BELANJA OPERASI	4.425.000	4.425.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	Belanja Pegawai	4.425.000	4.425.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	BELANJA MODAL	408.087.680	457.161.880	49.074.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.087.680	457.161.880	49.074.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.331.000	292.927.000	41.596.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.331.000	119.531.000	25.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	BELANJA OPERASI	94.331.000	119.531.000	25.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	Belanja Barang dan Jasa	94.331.000	119.531.000	25.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.000.000	173.396.000	16.396.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	BELANJA OPERASI	157.000.000	173.396.000	16.396.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000	173.396.000	16.396.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.504.500	68.644.500	2.140.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.834.500	45.524.500	10.690.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	BELANJA OPERASI	34.834.500	45.524.500	10.690.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	Belanja Barang dan Jasa	34.834.500	45.524.500	10.690.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.955.000	4.400.000	(8.555.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	BELANJA OPERASI	12.955.000	4.400.000	(8.555.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	Belanja Barang dan Jasa	12.955.000	4.400.000	(8.555.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.715.000	18.720.000	5.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	18.715.000	18.720.000	5.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.715.000	18.720.000	5.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	00			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	39.267.900	39.267.900	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	39.267.900	39.267.900	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	00			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.267.900	39.267.900	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900	39.267.900	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	39.267.900	39.267.900	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.267.900	39.267.900	0	
Jumlah Belanja								6.853.588.600	7.852.291.836	998.703.236		
Total Surplus/(Defisit)								(6.723.588.600)	(7.722.291.836)	(998.703.236)		
0	00	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arfin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4					
PENDAPATAN DAERAH											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	450.000.000	150.000.000	(300.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	(300.000.000)	
Jumlah Pendapatan							450.000.000	150.000.000	(300.000.000)		
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5					
BELANJA											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			6.769.607.007	7.289.233.975	519.626.968	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			23.898.000	23.898.000	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			23.898.000	23.898.000	0	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02			23.898.000	23.898.000	0	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	23.898.000	23.898.000	0	
BELANJA OPERASI											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	23.898.000	23.898.000	0
Belanja Barang dan Jasa											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			38.994.000	44.994.000	6.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			38.994.000	44.994.000	6.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			38.994.000	44.994.000	6.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	38.994.000	44.994.000	6.000.000	
BELANJA OPERASI											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	38.994.000	44.994.000	6.000.000
Belanja Barang dan Jasa											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			830.919.600	891.579.400	60.659.800	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00			830.919.600	891.579.400	60.659.800	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			197.700.000	286.385.000	88.685.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	197.700.000	286.385.000	88.685.000	
BELANJA OPERASI											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	01	0	885.000	885.000
Belanja Pegawai											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	197.700.000	285.500.000	87.800.000
Belanja Barang dan Jasa											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			408.300.000	305.385.000	(102.915.000)	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	408.300.000	305.385.000	(102.915.000)	
BELANJA OPERASI											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	0	885.000	885.000
Belanja Pegawai											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	408.300.000	304.500.000	(103.800.000)
Belanja Barang dan Jasa											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03			38.391.000	110.880.800	72.489.800	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	38.391.000	110.880.800	72.489.800	
BELANJA OPERASI											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	01	0	885.000	885.000
Belanja Pegawai											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	38.391.000	109.995.800	71.604.800
Belanja Barang dan Jasa											

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	186.528.600	188.928.600	2.400.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	186.528.600	188.928.600	2.400.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	186.528.600	188.928.600	2.400.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	74.100.000	448.535.000	374.435.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.100.000	448.535.000	374.435.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	74.100.000	395.735.000	321.635.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	74.100.000	395.735.000	321.635.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000	395.735.000	321.635.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	52.800.000	52.800.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	0	52.800.000	52.800.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	52.800.000	52.800.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.600.000	21.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	21.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.600.000	21.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.780.095.407	5.858.627.575	78.532.168	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.135.000	41.315.000	6.180.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.135.000	41.315.000	6.180.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	35.135.000	41.315.000	6.180.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.135.000	41.315.000	6.180.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.502.026.207	3.509.018.075	6.991.868	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.471.326.307	3.471.448.175	121.868	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.471.326.307	3.471.448.175	121.868	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	3.471.326.307	3.471.448.175	121.868	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.699.900	37.569.900	6.870.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	30.699.900	37.569.900	6.870.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.699.900	37.569.900	6.870.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.144.430.300	1.123.898.600	(20.531.700)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.224.900	140.289.000	29.064.100	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	111.224.900	140.289.000	29.064.100	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.224.900	140.289.000	29.064.100	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.381.600	103.353.800	(27.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	103.381.600	103.353.800	(27.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	103.381.600	103.353.800	(27.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.400.000	14.400.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	14.400.000	14.400.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000	14.400.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	31.576.800	41.156.800	9.580.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	31.576.800	41.156.800	9.580.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.576.800	41.156.800	9.580.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	883.847.000	824.699.000	(59.148.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	883.847.000	824.699.000	(59.148.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	883.847.000	824.699.000	(59.148.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.306.700	642.212.700	98.906.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.084.400	317.754.900	11.670.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	885.000	885.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	305.199.400	316.869.900	11.670.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.199.400	316.869.900	11.670.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.222.300	324.457.800	87.235.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 1	BELANJA OPERASI	885.000	885.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	236.337.300	323.572.800	87.235.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.937.300	209.172.800	87.235.500	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.400.000	114.400.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.459.800	298.959.800	(79.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.726.000	2.726.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.726.000	2.726.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.726.000	2.726.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.518.400	189.518.400	(84.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	273.518.400	189.518.400	(84.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	273.518.400	189.518.400	(84.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.215.400	106.715.400	4.500.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	102.215.400	106.715.400	4.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.215.400	106.715.400	4.500.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.737.400	243.223.400	66.486.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.352.400	91.352.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	91.352.400	91.352.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.352.400	91.352.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000	19.650.000	7.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	12.650.000	19.650.000	7.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000	19.650.000	7.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.735.000	132.221.000	59.486.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	72.735.000	132.221.000	59.486.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.735.000	132.221.000	59.486.000	
Jumlah Belanja								6.769.607.007	7.289.233.975	519.626.968		
Total Surplus/(Defisit)								(6.319.607.007)	(7.139.233.975)	(819.626.968)		
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.150.000	50.000.000	(58.150.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	108.150.000	50.000.000	(58.150.000)	
Jumlah Pendapatan								108.150.000	50.000.000	(58.150.000)	
0	00	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.330.574.994	30.408.076.019	5.077.501.025	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.871.022.600	3.007.435.000	1.136.412.400	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.059.746.200	1.886.258.600	826.512.400	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	21.331.800	18.931.800	(2.400.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 1		BELANJA OPERASI	21.331.800	18.931.800	(2.400.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	21.331.800	18.931.800	(2.400.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	65.255.100	36.830.200	(28.424.900)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1		BELANJA OPERASI	65.255.100	36.830.200	(28.424.900)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	65.255.100	36.830.200	(28.424.900)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	21.331.800	21.331.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 1		BELANJA OPERASI	21.331.800	21.331.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	21.331.800	21.331.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	105.889.800	115.489.800	9.600.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07 5 1		BELANJA OPERASI	105.889.800	115.489.800	9.600.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	105.889.800	115.489.800	9.600.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	31.585.400	29.322.800	(2.262.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1		BELANJA OPERASI	31.585.400	29.322.800	(2.262.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	31.585.400	29.322.800	(2.262.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	814.352.300	1.664.352.200	849.999.900	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09 5 1		BELANJA OPERASI	814.352.300	1.664.352.200	849.999.900	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09 5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	814.352.300	1.664.352.200	849.999.900	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	811.276.400	1.121.176.400	309.900.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	811.276.400	1.121.176.400	309.900.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 1	BELANJA OPERASI	811.276.400	1.121.176.400	309.900.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	261.276.400	571.176.400	309.900.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 1 05	Belanja Hibah	550.000.000	550.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	15.935.195.600	19.807.258.600	3.872.063.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	997.236.800	1.321.948.800	324.712.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	997.236.800	1.321.948.800	324.712.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	985.052.000	1.309.764.000	324.712.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	985.052.000	1.309.764.000	324.712.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03 5 2	BELANJA MODAL	12.184.800	12.184.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.184.800	12.184.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	982.679.300	943.929.300	(38.750.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	630.729.300	630.729.300	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	630.729.300	630.729.300	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	630.729.300	630.729.300	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	351.950.000	313.200.000	(38.750.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	351.950.000	313.200.000	(38.750.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	351.950.000	313.200.000	(38.750.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.328.540.000	1.288.905.000	(39.635.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.328.540.000	1.288.905.000	(39.635.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03 5 1	BELANJA OPERASI	1.328.540.000	1.288.905.000	(39.635.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.540.000	1.288.905.000	(39.635.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.521.320.100	7.991.265.100	2.469.945.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	5.521.320.100	7.991.265.100	2.469.945.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01 5 1	BELANJA OPERASI	5.521.320.100	7.991.265.100	2.469.945.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.320.100	21.320.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01 5 1 05	Belanja Hibah	5.500.000.000	7.969.945.000	2.469.945.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	7.105.419.400	8.261.210.400	1.155.791.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3.203.326.400	3.469.082.000	265.755.600	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	01 5 1	BELANJA OPERASI	3.203.326.400	3.469.082.000	265.755.600	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.326.400	1.469.082.000	265.755.600	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	01 5 1 05	Belanja Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.418.413.600	4.008.449.000	590.035.400	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 1	BELANJA OPERASI	461.223.600	574.769.000	113.545.400	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 1 01	Belanja Pegawai	22.440.000	41.892.500	19.452.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	438.783.600	532.876.500	94.092.900	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 2	BELANJA MODAL	2.957.190.000	3.433.680.000	476.490.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.190.000	58.190.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.899.000.000	3.375.490.000	476.490.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	483.679.400	783.679.400	300.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	04 5 1	BELANJA OPERASI	483.679.400	783.679.400	300.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	483.679.400	783.679.400	300.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	485.264.800	485.264.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	485.264.800	485.264.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000	450.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	450.000.000	450.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02 5 1 05	Belanja Hibah	450.000.000	450.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	35.264.800	35.264.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	35.264.800	35.264.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.264.800	35.264.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.039.091.994	7.108.117.619	69.025.625	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.467.000	14.467.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.467.000	14.467.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 5 1	BELANJA OPERASI	14.467.000	14.467.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.467.000	14.467.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.886.894	3.667.886.819	(75)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.337.094	3.656.337.019	(75)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	3.656.337.094	3.656.337.019	(75)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.656.337.094	3.656.337.019	(75)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.800	6.324.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1	BELANJA OPERASI	6.324.800	6.324.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.324.800	6.324.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.225.000	5.225.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1	BELANJA OPERASI	5.225.000	5.225.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000	5.225.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.738.920.000	1.737.487.600	(1.432.400)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.238.300	100.183.100	(55.200)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	100.238.300	100.183.100	(55.200)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.238.300	100.183.100	(55.200)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.358.800	105.358.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1	BELANJA OPERASI	105.358.800	105.358.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.358.800	105.358.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.905.500	24.588.300	6.682.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1	BELANJA OPERASI	17.905.500	24.588.300	6.682.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.905.500	24.588.300	6.682.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.037.400	23.037.400	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1	BELANJA OPERASI	23.037.400	23.037.400	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.037.400	23.037.400	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.492.380.000	1.484.320.000	(8.060.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1	BELANJA OPERASI	1.492.380.000	1.484.320.000	(8.060.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.380.000	1.484.320.000	(8.060.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.248.100	225.871.300	66.623.200	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.248.100	204.871.300	66.623.200	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2	BELANJA MODAL	138.248.100	204.871.300	66.623.200	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.248.100	204.871.300	66.623.200	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	21.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10 5 2	BELANJA MODAL	21.000.000	21.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000	21.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.320.000	796.540.500	67.220.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.120.000	8.120.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01 5 1	BELANJA OPERASI	8.120.000	8.120.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000	8.120.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.000.000	219.820.500	27.820.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1	BELANJA OPERASI	192.000.000	219.820.500	27.820.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000	219.820.500	27.820.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.200.000	568.600.000	39.400.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1	BELANJA OPERASI	529.200.000	568.600.000	39.400.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	529.200.000	568.600.000	39.400.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.250.000	665.864.400	(63.385.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.728.000	140.312.400	(14.415.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01 5 1	BELANJA OPERASI	154.728.000	140.312.400	(14.415.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	154.728.000	140.312.400	(14.415.600)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.00.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.180.000	17.210.000	(48.970.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	66.180.000	17.210.000	(48.970.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.180.000	17.210.000	(48.970.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.342.000	508.342.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	508.342.000	508.342.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	508.342.000	508.342.000	0	
Jumlah Belanja								25.330.574.994	30.408.076.019	5.077.501.025	
Total Surplus/(Defisit)								(25.222.424.994)	(30.358.076.019)	(5.135.651.025)	
0	00	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH						
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.500.000	53.500.000	0		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	53.500.000	53.500.000	0	
Jumlah Pendapatan								53.500.000	53.500.000	0			
0	00	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA						
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.942.757.960	9.184.001.253	2.241.243.293				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	516.569.400	440.466.300	(76.103.100)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.472.000	39.402.000	(12.070.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	45.506.900	33.436.900	(12.070.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	45.506.900	33.436.900	(12.070.000)		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.506.900	33.436.900	(12.070.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5.965.100	5.965.100	0				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.965.100	5.965.100	0		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.965.100	5.965.100	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.619.400	232.876.300	(5.743.100)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	117.304.400	117.481.300	176.900				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	117.304.400	117.481.300	176.900		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.304.400	117.481.300	176.900	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	57.784.000	42.464.000	(15.320.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	57.784.000	42.464.000	(15.320.000)		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.784.000	42.464.000	(15.320.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	63.531.000	72.931.000	9.400.000				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	63.531.000	72.931.000	9.400.000		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.531.000	72.931.000	9.400.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	226.478.000	168.188.000	(58.290.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	226.478.000	168.188.000	(58.290.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	226.478.000	168.188.000	(58.290.000)		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.478.000	168.188.000	(58.290.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	938.212.000	1.356.156.500	417.944.500				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	938.212.000	1.356.156.500	417.944.500				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	305.114.000	286.114.000	(19.000.000)				
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	305.114.000	286.114.000	(19.000.000)		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	305.114.000	286.114.000	(19.000.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	245.600.000	695.810.000	450.210.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	230.600.000	695.810.000	465.210.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	230.600.000	695.810.000	465.210.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	BELANJA MODAL	15.000.000	0	(15.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	0	(15.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	387.498.000	374.232.500	(13.265.500)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	300.498.000	200.348.000	(100.150.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	498.000	348.000	(150.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	Belanja Hibah	300.000.000	200.000.000	(100.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	BELANJA MODAL	87.000.000	173.884.500	86.884.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	101.884.500	86.884.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72.000.000	72.000.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	191.509.900	262.999.900	71.490.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	00		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	22.069.900	21.859.900	(210.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	22.069.900	21.859.900	(210.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	22.069.900	21.859.900	(210.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	22.069.900	21.859.900	(210.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	00		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	169.440.000	241.140.000	71.700.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01		Pelindungan Cagar Budaya	169.440.000	241.140.000	71.700.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	169.440.000	157.440.000	(12.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	169.440.000	157.440.000	(12.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	BELANJA MODAL	0	83.700.000	83.700.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	83.700.000	83.700.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	187.067.100	0	(187.067.100)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	00		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	187.067.100	0	(187.067.100)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	187.067.100	0	(187.067.100)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	34.717.100	0	(34.717.100)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	Belanja Pegawai	1.875.000	0	(1.875.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	32.842.100	0	(32.842.100)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	BELANJA MODAL	152.350.000	0	(152.350.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.350.000	0	(112.350.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000	0	(40.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.109.399.560	7.124.378.553	2.014.978.993	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.875.000	12.185.000	2.310.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.875.000	12.185.000	2.310.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	9.875.000	12.185.000	2.310.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000	12.185.000	2.310.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.231.357.187	3.232.091.380	734.193	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.857.187	3.224.591.380	734.193	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	3.223.857.187	3.224.591.380	734.193	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.223.857.187	3.224.591.380	734.193	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.02	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	3.750.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.345.101.723	2.382.050.923	1.036.949.200	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.322.700	18.382.200	11.059.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1	BELANJA OPERASI	7.322.700	18.382.200	11.059.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.322.700	18.382.200	11.059.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.683.923	153.683.923	(5.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	158.683.923	153.683.923	(5.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.683.923	153.683.923	(5.000.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.882.500	109.643.500	29.761.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1	BELANJA OPERASI	79.882.500	109.643.500	29.761.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.882.500	109.643.500	29.761.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.909.600	32.352.300	14.442.700	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1	BELANJA OPERASI	17.909.600	32.352.300	14.442.700	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.909.600	32.352.300	14.442.700	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.840.000	8.199.000	4.359.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1	BELANJA OPERASI	3.840.000	8.199.000	4.359.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000	8.199.000	4.359.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	5.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1	BELANJA OPERASI	5.500.000	5.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	5.500.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.071.963.000	2.054.290.000	982.327.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1	BELANJA OPERASI	1.071.963.000	2.054.290.000	982.327.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.06	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.963.000	2.054.290.000	982.327.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.220.750	1.001.917.350	769.696.600	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	339.007.000	339.007.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	02 5 1	BELANJA OPERASI	0	1.530.000	1.530.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	02 5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.530.000	1.530.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	02 5 2	BELANJA MODAL	0	337.477.000	337.477.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	337.477.000	337.477.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.805.550	581.078.050	397.272.500	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 1	BELANJA OPERASI	2.835.000	1.740.000	(1.095.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 1 01	Belanja Pegawai	2.625.000	1.530.000	(1.095.000)	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.000	210.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	180.970.550	579.338.050	398.367.500		
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.970.550	524.968.650	343.998.100	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	54.369.400	54.369.400	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.415.200	81.832.300	33.417.100	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	375.000	375.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	375.000	375.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	48.040.200	81.457.300	33.417.100	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.040.200	81.457.300	33.417.100	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.082.000	269.276.000	47.194.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.482.000	106.476.000	11.994.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.482.000	106.476.000	11.994.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.482.000	106.476.000	11.994.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.600.000	162.800.000	35.200.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	127.600.000	162.800.000	35.200.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.600.000	162.800.000	35.200.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.762.900	226.857.900	158.095.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.338.300	31.098.700	4.760.400	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	26.338.300	31.098.700	4.760.400	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.338.300	31.098.700	4.760.400	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	11.360.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	11.360.000	11.360.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000	11.360.000	0	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.064.600	184.399.200	153.334.600	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	28.064.600	175.399.200	147.334.600	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.064.600	175.399.200	147.334.600	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	3.000.000	9.000.000	6.000.000	
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	9.000.000	6.000.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.004.614.200	2.708.414.100	(2.296.200.100)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.705.115.000	1.219.831.400	(2.485.283.600)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	00				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	14.756.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	14.756.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	14.756.000	14.756.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.756.000	14.756.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	00				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	503.994.300	503.994.300	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	443.799.300	443.799.300	0			
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA OPERASI	253.499.300	253.499.300	0			
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	Belanja Pegawai	885.000	510.000	(375.000)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	252.614.300	252.989.300	375.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	BELANJA MODAL	190.300.000	190.300.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.300.000	190.300.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	06			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	60.195.000	60.195.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	60.195.000	60.195.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.195.000	60.195.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	00			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.113.835.700	628.552.100	(2.485.283.600)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.113.835.700	628.552.100	(2.485.283.600)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	305.878.000	381.055.100	75.177.100		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	01	Belanja Pegawai	6.280.000	6.280.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.598.000	274.775.100	75.177.100	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2	BELANJA MODAL	2.807.957.700	247.497.000	(2.560.460.700)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	63.127.600	(136.872.400)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.607.957.700	152.000.000	(2.455.957.700)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	32.369.400	32.369.400	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.04	00			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	72.529.000	72.529.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.04	04			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.529.000	72.529.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	72.529.000	72.529.000	0		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.529.000	72.529.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.032.291.900	808.786.400	(223.505.500)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.032.291.900	808.786.400	(223.505.500)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	312.902.500	176.204.500	(136.698.000)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	312.902.500	176.204.500	(136.698.000)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	312.902.500	176.204.500	(136.698.000)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02			Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	468.891.900	388.809.900	(80.082.000)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	468.891.900	388.809.900	(80.082.000)		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	468.891.900	388.809.900	(80.082.000)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	84.170.000	140.906.000	56.736.000		
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	84.170.000	140.906.000	56.736.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5 1 01	Belanja Pegawai	0	510.000	510.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.170.000	140.396.000	56.226.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	00		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09	5 1	BELANJA OPERASI	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	208.346.300	620.935.300	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	00		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	185.762.300	598.351.300	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	00		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.584.000	22.584.000	0	
Jumlah Belanja							11.947.372.160	11.892.415.353	(54.956.807)		
Total Surplus/(Defisit)							(11.893.872.160)	(11.838.915.353)	54.956.807		
0	00	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	0	510.000	510.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.170.000	140.396.000	56.226.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	166.327.500	102.866.000	(63.461.500)	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	00				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.861.000	58.861.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	208.346.300	620.935.300	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	00				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	185.762.300	598.351.300	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.762.800	94.762.800	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.161.500	59.161.500	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.838.000	444.427.000	412.589.000	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	00				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.584.000	22.584.000	0	
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.584.000	22.584.000	0	
Jumlah Belanja									11.947.372.160	11.892.415.353	(54.956.807)		
Total Surplus/(Defisit)									(11.893.872.160)	(11.838.915.353)	54.956.807		
0	00	2.22.3.26.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
						Jumlah Pendapatan	0	0	0			
0	00	2.23.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						
										BELANJA		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
							6.668.571.315	7.007.381.749	338.810.434			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
							1.141.621.750	1.310.595.650	168.973.900			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							938.548.950	1.149.370.650	210.821.700			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02		0	332.065.800	332.065.800	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	0	7.600.800	7.600.800	BELANJA OPERASI	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01	0	610.000	610.000	Belanja Pegawai
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	0	6.990.800	6.990.800	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		0	324.465.000	324.465.000	BELANJA MODAL
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	02	0	324.465.000	324.465.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	06				56.529.000	42.279.000	(14.250.000)	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1		56.529.000	42.279.000	(14.250.000)	BELANJA OPERASI
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	56.529.000	42.279.000	(14.250.000)	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07				649.313.250	542.319.150	(106.994.100)	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1		175.168.400	173.315.500	(1.852.900)	BELANJA OPERASI
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	1.922.500	1.147.500	(775.000)	Belanja Pegawai
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	173.245.900	172.168.000	(1.077.900)	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2		474.144.850	369.003.650	(105.141.200)	BELANJA MODAL
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	2	02	474.144.850	369.003.650	(105.141.200)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09				232.706.700	232.706.700	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		47.885.000	47.885.000	0	BELANJA OPERASI
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01	1.285.000	1.020.000	(265.000)	Belanja Pegawai
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	46.600.000	46.865.000	265.000	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2		184.821.700	184.821.700	0	BELANJA MODAL
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	05	184.821.700	184.821.700	0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	00				203.072.800	161.225.000	(41.847.800)	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01				15.598.800	24.016.000	8.417.200	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		15.598.800	24.016.000	8.417.200	BELANJA OPERASI
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	15.598.800	24.016.000	8.417.200	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	03				187.474.000	137.209.000	(50.265.000)	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		187.474.000	137.209.000	(50.265.000)	BELANJA OPERASI
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	187.474.000	137.209.000	(50.265.000)	Belanja Barang dan Jasa
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	0.00	00				5.526.949.565	5.696.786.099	169.836.534	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.339.300	19.339.300	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.339.300	19.339.300	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.339.300	19.339.300	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.339.300	19.339.300	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.866.525	3.047.827.899	(38.626)			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.873.925	3.046.835.299	(38.626)			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.046.873.925	3.046.835.299	(38.626)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.046.873.925	3.046.835.299	(38.626)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	691.600	691.600	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	691.600	691.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	691.600	691.600	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	301.000	301.000	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	301.000	301.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	301.000	301.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.703.100	777.268.700	215.565.600			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.262.500	7.421.900	5.159.400			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.262.500	7.421.900	5.159.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.262.500	7.421.900	5.159.400
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.964.700	42.024.700	1.060.000			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	40.964.700	42.024.700	1.060.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.964.700	42.024.700	1.060.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.081.100	97.321.700	(1.759.400)			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	99.081.100	97.321.700	(1.759.400)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.081.100	97.321.700	(1.759.400)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.616.800	27.616.800	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	27.616.800	27.616.800	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.616.800	27.616.800	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2.133.000	6.971.600	4.838.600			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.133.000	6.971.600	4.838.600	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.000	6.971.600	4.838.600
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.200.000	4.175.000	(5.025.000)			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	9.200.000	4.175.000	(5.025.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000	4.175.000	(5.025.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.445.000	591.737.000	211.292.000			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	380.445.000	591.737.000	211.292.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	380.445.000	591.737.000	211.292.000

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.248.100.500	1.240.934.700	(7.165.800)				
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.775.300	148.639.500	(21.135.800)				
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA OPERASI	1.522.500	1.147.500	(375.000)			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	1.522.500	1.147.500	(375.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	168.252.800	147.492.000	(20.760.800)		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.252.800	147.492.000	(20.760.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.078.325.200	1.092.295.200	13.970.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	70.160.000	72.120.000	1.960.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1	01	Belanja Pegawai	10.160.000	6.120.000	(4.040.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	66.000.000	6.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	BELANJA MODAL	1.008.165.200	1.020.175.200	12.010.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.840.600	107.850.600	12.010.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	912.324.600	912.324.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.765.440	328.745.200	(59.020.240)				
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000	1.740.000	580.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.160.000	1.740.000	580.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000	1.740.000	580.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.026.240	180.015.600	(67.010.640)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	247.026.240	180.015.600	(67.010.640)		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.026.240	180.015.600	(67.010.640)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.579.200	146.989.600	7.410.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	139.579.200	146.989.600	7.410.400		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.579.200	146.989.600	7.410.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.174.700	282.670.300	20.495.600				
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.847.200	46.717.800	10.870.600	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.847.200	46.717.800	10.870.600		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.847.200	46.717.800	10.870.600	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.075.000	20.075.000	(2.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	22.075.000	20.075.000	(2.000.000)		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.075.000	20.075.000	(2.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.252.500	215.877.500	11.625.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	28.132.500	39.757.500	11.625.000		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	4.132.500	3.007.500	(1.125.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	36.750.000	12.750.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	176.120.000	176.120.000	0		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.120.000	176.120.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	445.000.300	405.813.400	(39.186.900)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	338.130.300	308.993.400	(29.136.900)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	00		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	206.788.300	215.063.400	8.275.100	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	87.691.700	116.490.800	28.799.100	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	86.614.000	115.413.100	28.799.100	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Pegawai	1.305.000	930.000	(375.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	85.309.000	114.483.100	29.174.100	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA MODAL	1.077.700	1.077.700	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.077.700	1.077.700	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	76.336.600	57.367.600	(18.969.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	76.336.600	57.367.600	(18.969.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	76.336.600	57.367.600	(18.969.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42.760.000	41.205.000	(1.555.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	28.855.000	28.105.000	(750.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	28.855.000	28.105.000	(750.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA MODAL	13.905.000	13.100.000	(805.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.905.000	13.100.000	(805.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	131.342.000	93.930.000	(37.412.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	131.342.000	93.930.000	(37.412.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	63.305.000	62.330.000	(975.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Pegawai	1.305.000	930.000	(375.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000	61.400.000	(600.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA MODAL	68.037.000	31.600.000	(36.437.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.037.000	31.600.000	(36.437.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	106.870.000	96.820.000	(10.050.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	00		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	106.870.000	96.820.000	(10.050.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	106.870.000	96.820.000	(10.050.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	53.295.000	51.420.000	(1.875.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Pegawai	1.305.000	930.000	(375.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	51.990.000	50.490.000	(1.500.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA MODAL	53.575.000	45.400.000	(8.175.000)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.575.000	45.400.000	(8.175.000)	
Jumlah Belanja								7.113.571.615	7.413.195.149	299.623.534	
Total Surplus/(Defisit)								(7.113.571.615)	(7.413.195.149)	(299.623.534)	
0	00	2.23.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4						
PENDAPATAN DAERAH												
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	43.250.000	43.250.000	0		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							43.250.000	43.250.000	0			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	43.250.000	43.250.000	0
Jumlah Pendapatan							43.250.000	43.250.000	0			
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						
BELANJA												
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			7.389.693.817	8.231.368.493	841.674.676		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.389.693.817	8.231.368.493	841.674.676			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			229.307.200	148.590.700	(80.716.500)		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							229.307.200	148.590.700	(80.716.500)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			160.188.200	96.810.700	(63.377.500)		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							160.188.200	96.810.700	(63.377.500)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			92.988.200	35.050.700	(57.937.500)		
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							92.988.200	35.050.700	(57.937.500)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	77.988.200	35.050.700	(42.937.500)		
BELANJA OPERASI							77.988.200	35.050.700	(42.937.500)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	885.000	510.000	(375.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.103.200	34.540.700	(42.562.500)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	0	(15.000.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	0	(15.000.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03			67.200.000	61.760.000	(5.440.000)		
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap							67.200.000	61.760.000	(5.440.000)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	67.200.000	61.760.000	(5.440.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000	1.700.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	64.615.000	59.175.000	(5.440.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00			69.119.000	51.780.000	(17.339.000)		
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							69.119.000	51.780.000	(17.339.000)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01			69.119.000	51.780.000	(17.339.000)		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							69.119.000	51.780.000	(17.339.000)			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	69.119.000	51.780.000	(17.339.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.119.000	51.780.000	(17.339.000)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			590.237.214	1.447.600.302	857.363.088		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							590.237.214	1.447.600.302	857.363.088			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			15.500.000	15.500.000	0		
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							15.500.000	15.500.000	0			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02			15.500.000	15.500.000	0		
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil							15.500.000	15.500.000	0			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.500.000	15.500.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000	15.500.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00			574.737.214	1.432.100.302	857.363.088		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							574.737.214	1.432.100.302	857.363.088			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02			230.443.864	1.087.806.952	857.363.088		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							230.443.864	1.087.806.952	857.363.088			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	230.443.864	1.087.806.952	857.363.088
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.770.000	3.300.000	1.530.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.673.864	222.613.064	(6.060.800)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	5	1	05	Belanja Hibah	0	861.893.888	861.893.888

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.593.350	327.593.350	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5 1	BELANJA OPERASI	325.748.050	325.748.050	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5 1 01	Belanja Pegawai	2.655.000	2.655.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.093.050	323.093.050	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5 2	BELANJA MODAL	1.845.300	1.845.300	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.845.300	1.845.300	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000	16.700.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	04	5 1	BELANJA OPERASI	16.700.000	16.700.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	04	5 1 01	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.190.000	16.190.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	204.687.800	195.967.800	(8.720.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	204.687.800	195.967.800	(8.720.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	204.687.800	195.967.800	(8.720.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	123.702.800	114.982.800	(8.720.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.702.800	114.982.800	(8.720.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	80.985.000	80.985.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.985.000	55.985.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	206.842.100	194.661.300	(12.180.800)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.400.000	36.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000	36.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	36.400.000	36.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000	36.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	00		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.800.000	4.760.000	(1.040.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.800.000	4.760.000	(1.040.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.800.000	4.760.000	(1.040.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000	4.760.000	(1.040.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	00			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	164.642.100	153.501.300	(11.140.800)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	01			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.894.300	132.253.500	(4.640.800)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	136.894.300	132.253.500	(4.640.800)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.894.300	132.253.500	(4.640.800)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	02			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.747.800	21.247.800	(6.500.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	27.747.800	21.247.800	(6.500.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.247.800	21.247.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.03	02	5	1	05	Belanja Hibah	6.500.000	0	(6.500.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.158.619.503	6.244.548.391	85.928.888		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.350.000	197.600.000	(36.750.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.350.000	197.600.000	(36.750.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	234.350.000	197.600.000	(36.750.000)		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	234.350.000	197.600.000	(36.750.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.302.903	4.060.427.891	124.988		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.800.803	4.000.858.291	57.488		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.800.803	4.000.858.291	57.488		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.000.800.803	4.000.858.291	57.488	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	22.600.000	0		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	22.600.000	22.600.000	0		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000	22.600.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.902.100	36.969.600	67.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	36.902.100	36.969.600	67.500		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.902.100	36.969.600	67.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	767.519.600	945.549.600	178.030.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.889.000	31.889.000	0		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	31.889.000	31.889.000	0		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.889.000	31.889.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.731.000	52.275.000	1.544.000		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.731.000	52.275.000	1.544.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 01	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.221.000	51.765.000	1.544.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.854.600	155.354.600	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	153.854.600	155.354.600	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	153.854.600	155.354.600	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	6.300.000	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000	6.300.000	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	6.300.000	1.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	3.412.000	11.387.000	7.975.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	3.412.000	11.387.000	7.975.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.412.000	11.387.000	7.975.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000	2.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	2.400.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.433.000	685.944.000	165.511.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	520.433.000	685.944.000	165.511.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	520.433.000	685.944.000	165.511.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.400.200	318.086.700	(10.313.500)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.400.200	318.086.700	(10.313.500)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.550.000	2.550.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 01	Belanja Pegawai	2.550.000	2.550.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	325.850.200	315.536.700	(10.313.500)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.850.200	315.536.700	(10.313.500)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.416.400	250.528.400	15.112.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.476.400	172.188.400	1.712.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	170.476.400	172.188.400	1.712.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.476.400	172.188.400	1.712.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.940.000	78.340.000	13.400.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	64.940.000	78.340.000	13.400.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.940.000	78.340.000	13.400.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.630.400	472.355.800	(60.274.600)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.550.400	213.500.400	(3.050.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	216.550.400	213.500.400	(3.050.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.550.400	213.500.400	(3.050.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000	25.775.400	12.175.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	13.600.000	16.520.000	2.920.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000	16.520.000	2.920.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 2	BELANJA MODAL	0	9.255.400	9.255.400	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	393.243.100	393.243.100	0		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	393.243.100	393.243.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.250.000	31.250.000	0		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	31.250.000	31.250.000	0		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000	31.250.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	912.885.000	1.246.457.981	333.572.981		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	294.885.000	370.565.000	75.680.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	2.820.000	5.500.000	2.680.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.065.000	365.065.000	73.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	BELANJA MODAL	618.000.000	875.892.981	257.892.981		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.000.000	875.892.981	257.892.981	
Jumlah Belanja								47.234.275.361	69.175.775.342	21.941.499.981			
Total Surplus/(Defisit)								(47.193.775.361)	(69.135.275.342)	(21.941.499.981)			
0	00	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0			

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.500.000	40.500.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	40.500.000	40.500.000	0	
Jumlah Pendapatan									40.500.000	40.500.000	0	
0	00	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.234.275.361	69.175.775.342	21.941.499.981	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.102.438.345	14.504.667.045	6.402.228.700	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.055.976.400	10.821.718.000	5.765.741.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	5.209.634.000	5.209.634.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	5.209.634.000	5.209.634.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	0	32.905.000	32.905.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	215.315.000	215.315.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	0	4.961.414.000	4.961.414.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.055.976.400	5.612.084.000	556.107.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.021.361.200	5.588.244.800	566.883.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	5.945.000	7.915.000	1.970.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.870.476.200	2.897.369.800	26.893.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	2.144.940.000	2.682.960.000	538.020.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	34.615.200	23.839.200	(10.776.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.615.200	23.839.200	(10.776.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.377.600	189.926.200	61.548.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	128.377.600	189.926.200	61.548.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	88.679.500	189.926.200	101.246.700	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.471.500	167.218.200	102.746.700	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1 05	Belanja Hibah	24.208.000	22.708.000	(1.500.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	2	BELANJA MODAL	39.698.100	0	(39.698.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.698.100	0	(39.698.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.918.084.345	3.493.022.845	574.938.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	2.374.913.300	3.006.973.600	632.060.300	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.531.776.200	2.330.073.600	798.297.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.250.000	9.465.000	7.215.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	495.488.900	588.861.700	93.372.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1 05	Belanja Hibah	1.034.037.300	1.731.746.900	697.709.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	BELANJA MODAL	843.137.100	676.900.000	(166.237.100)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.725.100	216.500.000	(16.225.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	460.400.000	460.400.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.012.000	0	(150.012.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04				Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	306.629.445	257.599.245	(49.030.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	181.054.845	224.134.845	43.080.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	131.730.045	174.810.045	43.080.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1	05	Belanja Hibah	49.324.800	49.324.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	2		BELANJA MODAL	125.574.600	33.464.400	(92.110.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.464.400	33.464.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	92.110.200	0	(92.110.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06				Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	236.541.600	228.450.000	(8.091.600)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06	5	1		BELANJA OPERASI	36.591.600	28.500.000	(8.091.600)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06	5	1	01	Belanja Pegawai	5.040.000	6.060.000	1.020.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.551.600	22.440.000	(9.111.600)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06	5	2		BELANJA MODAL	199.950.000	199.950.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.950.000	199.950.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.265.992.950	27.110.534.530	16.844.541.580	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00				Pengembangan Prasarana Pertanian	93.450.500	93.450.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	93.450.500	93.450.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	93.450.500	93.450.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.450.500	93.450.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00				Pembangunan Prasarana Pertanian	10.172.542.450	27.017.084.030	16.844.541.580	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.638.433.950	2.878.953.450	1.240.519.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.638.433.950	2.878.953.450	1.240.519.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.765.000	9.765.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.350.000	215.605.000	52.255.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	1.465.318.950	2.653.583.450	1.188.264.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.661.961.880	9.910.303.880	2.248.342.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.661.961.880	9.910.303.880	2.248.342.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	58.800.000	52.990.000	(5.810.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	477.425.000	107.425.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	7.233.161.880	9.379.888.880	2.146.727.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0	6.850.000.000	6.850.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	342.430.000	342.430.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	0	13.280.000	13.280.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	329.150.000	329.150.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	2		BELANJA MODAL	0	6.507.570.000	6.507.570.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	748.196.700	748.196.700	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	5.759.373.300	5.759.373.300	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	872.146.620	7.377.826.700	6.505.680.080	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	827.905.020	1.678.475.100	850.570.080	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1	01	Belanja Pegawai	0	16.810.000	16.810.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	527.905.100	866.665.100	338.760.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1	05	Belanja Hibah	299.999.920	795.000.000	495.000.080	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	2		BELANJA MODAL	44.241.600	5.699.351.600	5.655.110.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.241.600	857.141.600	812.900.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	4.842.210.000	4.842.210.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	402.112.200	702.101.450	299.989.250	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.475.400	315.464.850	149.989.450	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	165.475.400	315.464.850	149.989.450	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	152.475.400	293.731.850	141.256.450	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.475.400	293.731.850	141.256.450	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	13.000.000	21.733.000	8.733.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000	21.733.000	8.733.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	9.066.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03				Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	9.066.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.066.100	9.066.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.066.100	9.066.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	00				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.108.100	189.108.100	150.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	39.108.100	189.108.100	150.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.040.000	182.040.000	150.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000	182.040.000	150.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	7.068.100	7.068.100	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.830.700	1.830.700	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.237.400	5.237.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	188.462.600	188.462.400	(200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	188.462.600	188.462.400	(200)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	188.462.600	188.462.400	(200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.462.600	188.462.400	(200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	823.425.000	790.855.000	(32.570.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	823.425.000	790.855.000	(32.570.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	823.425.000	790.855.000	(32.570.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	798.525.000	778.855.000	(19.670.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	1.125.000	1.125.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	497.400.000	477.730.000	(19.670.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	300.000.000	300.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	2	BELANJA MODAL	24.900.000	12.000.000	(12.900.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.900.000	12.000.000	(12.900.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.751.947.900	6.012.147.900	2.260.200.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.751.947.900	6.012.147.900	2.260.200.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	633.562.200	879.623.700	246.061.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	633.562.200	879.623.700	246.061.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	633.562.200	879.623.700	246.061.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	449.821.900	776.701.500	326.879.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	449.821.900	776.701.500	326.879.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	449.821.900	476.798.700	26.976.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	0	299.902.800	299.902.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	281.454.700	1.969.158.700	1.687.704.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	281.454.700	259.158.700	(22.296.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	0	8.445.000	8.445.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	281.454.700	250.713.700	(30.741.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	0	1.710.000.000	1.710.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.710.000.000	1.710.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	04			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	75.715.100	75.270.000	(445.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	75.715.100	75.270.000	(445.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.715.100	75.270.000	(445.100)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.311.394.000	2.311.394.000	0			
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.311.394.000	2.233.394.000	(78.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	2.000.000	0	(2.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.309.394.000	2.233.394.000	(76.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	0	78.000.000	78.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	78.000.000	78.000.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.808.568.966	19.981.729.417	(3.826.839.549)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.808.000	82.808.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.808.000	82.808.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	82.808.000	82.808.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.808.000	82.808.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.192.506.226	13.200.045.996	7.539.770	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.115.631.226	13.115.670.996	39.770	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.115.631.226	13.115.670.996	39.770	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.115.631.226	13.115.670.996	39.770
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	39.600.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	39.600.000	39.600.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000	39.600.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.475.000	5.475.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.475.000	5.475.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000	5.475.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.800.000	39.300.000	7.500.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	31.800.000	39.300.000	7.500.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000	39.300.000	7.500.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.802.089.840	1.999.061.640	196.971.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.984.600	129.984.600	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	129.984.600	129.984.600	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.984.600	129.984.600	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.460.100	243.960.100	6.500.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	237.460.100	243.960.100	6.500.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.460.100	243.960.100	6.500.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.353.300	52.353.300	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	52.353.300	52.353.300	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.353.300	52.353.300	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	49.006.840	53.825.640	4.818.800	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	49.006.840	53.825.640	4.818.800		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.006.840	53.825.640	4.818.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.400.000	24.350.000	7.950.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	16.400.000	24.350.000	7.950.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000	24.350.000	7.950.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.316.885.000	1.494.588.000	177.703.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.316.885.000	1.494.588.000	177.703.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.885.000	1.494.588.000	177.703.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.816.454.000	2.397.134.700	(4.419.319.300)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	927.725.400	931.266.100	3.540.700		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	927.725.400	931.266.100	3.540.700		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	927.725.400	931.266.100	3.540.700	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.498.610.000	0	(4.498.610.000)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1	BELANJA OPERASI	793.610.000	0	(793.610.000)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1	01	Belanja Pegawai	18.610.000	0	(18.610.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	775.000.000	0	(775.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	2	BELANJA MODAL	3.705.000.000	0	(3.705.000.000)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000	0	(180.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.525.000.000	0	(3.525.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.390.118.600	1.465.868.600	75.750.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	5.210.000	39.885.000	34.675.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	5.210.000	15.885.000	10.675.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	24.000.000	24.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	1.384.908.600	1.425.983.600	41.075.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.783.600	668.783.600	241.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	757.200.000	757.200.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.925.000	0	(199.925.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.332.800	631.728.000	54.395.200		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.332.800	310.728.000	20.395.200		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	290.332.800	310.728.000	20.395.200		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	290.332.800	310.728.000	20.395.200	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.000.000	321.000.000	34.000.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	287.000.000	321.000.000	34.000.000		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	287.000.000	321.000.000	34.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.378.100	1.670.951.081	333.572.981		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.243.100	393.243.100	0		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.255.400	9.255.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	302.480.000	233.080.000	(69.400.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	1.530.000	1.530.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 01	Belanja Pegawai	1.530.000	1.530.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2	BELANJA MODAL	300.950.000	231.550.000	(69.400.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.950.000	231.550.000	(69.400.000)	
Jumlah Belanja								7.389.693.817	8.231.368.493	841.674.676	
Total Surplus/(Defisit)								(7.346.443.817)	(8.188.118.493)	(841.674.676)	
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.075.000.000	1.425.000.000	350.000.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	Retribusi Daerah	1.075.000.000	1.425.000.000	350.000.000	
Jumlah Pendapatan								1.075.000.000	1.425.000.000	350.000.000	
0	00	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.790.460.472	12.953.140.061	2.162.679.589	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	49.268.800	47.152.400	(2.116.400)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	37.018.800	47.152.400	10.133.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.018.800	47.152.400	10.133.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	37.018.800	47.152.400	10.133.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	37.018.800	47.152.400	10.133.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12.250.000	0	(12.250.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	12.250.000	0	(12.250.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	BELANJA OPERASI	12.250.000	0	(12.250.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000	0	(12.250.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.976.730.540	5.744.725.540	767.995.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.912.884.000	5.533.674.400	620.790.400	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.773.437.900	2.802.351.300	28.913.400	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	605.247.900	440.014.900	(165.233.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Pegawai	12.580.000	22.220.000	9.640.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	592.667.900	417.794.900	(174.873.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA MODAL	2.168.190.000	2.362.336.400	194.146.400	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.168.190.000	2.362.336.400	194.146.400	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.139.446.100	2.731.323.100	591.877.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	2.043.201.100	2.635.078.100	591.877.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	Belanja Pegawai	930.000	1.055.000	125.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	2.042.271.100	2.634.023.100	591.752.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	BELANJA MODAL	96.245.000	96.245.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.245.000	96.245.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	63.846.540	211.051.140	147.204.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	63.846.540	211.051.140	147.204.600	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	63.846.540	211.051.140	147.204.600		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.846.540	211.051.140	147.204.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47.280.800	1.325.560.200	1.278.279.400		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42.497.800	1.239.847.000	1.197.349.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.497.800	1.239.847.000	1.197.349.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.497.800	1.239.847.000	1.197.349.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.497.800	1.239.847.000	1.197.349.200	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.783.000	85.713.200	80.930.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.783.000	85.713.200	80.930.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.783.000	85.713.200	80.930.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.783.000	85.713.200	80.930.200	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	119.326.152	131.195.352	11.869.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.326.152	131.195.352	11.869.200		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	19.820.000	20.120.000	300.000		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.820.000	20.120.000	300.000		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.820.000	20.120.000	300.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02			Pameran Dagang Nasional	54.887.100	66.022.800	11.135.700		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	54.887.100	66.022.800	11.135.700		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.887.100	66.022.800	11.135.700	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03			Pameran Dagang Lokal	44.619.052	45.052.552	433.500		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	44.619.052	45.052.552	433.500		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.619.052	45.052.552	433.500	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	211.672.300	163.632.300	(48.040.000)		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	211.672.300	163.632.300	(48.040.000)		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	189.503.900	144.563.900	(44.940.000)		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	63.212.700	58.272.700	(4.940.000)		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	1.080.000	60.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.192.700	57.192.700	(5.000.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	2	BELANJA MODAL	126.291.200	86.291.200	(40.000.000)		
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.291.200	86.291.200	(40.000.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	22.168.400	19.068.400	(3.100.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	22.168.400	19.068.400	(3.100.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.168.400	19.068.400	(3.100.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.047.699.849	5.288.342.038	240.642.189	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.949.900	8.949.900	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.949.900	8.949.900	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	8.949.900	8.949.900	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.949.900	8.949.900	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.719.849.499	3.719.859.058	9.559	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.709.797.299	3.709.806.858	9.559	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.709.797.299	3.709.806.858	9.559	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	3.709.797.299	3.709.806.858	9.559	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.952.200	3.952.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	3.952.200	3.952.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.952.200	3.952.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.100.000	6.100.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.100.000	6.100.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000	6.100.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.361.100	829.285.700	163.924.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.664.700	17.664.700	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	17.664.700	17.664.700	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.664.700	17.664.700	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.562.600	67.690.200	1.127.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	66.562.600	66.562.600	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.562.600	66.562.600	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 2	BELANJA MODAL	0	1.127.600	1.127.600	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan


Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.127.600	1.127.600	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.052.200	91.052.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	91.052.200	91.052.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.052.200	91.052.200	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.724.800	23.724.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	23.724.800	23.724.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.724.800	23.724.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07				Penyediaan Bahan/Material	3.128.800	3.128.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1		BELANJA OPERASI	3.128.800	3.128.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.128.800	3.128.800	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.228.000	623.025.000	165.797.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	457.228.000	623.025.000	165.797.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.228.000	623.025.000	165.797.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.240.950	236.070.050	67.829.100	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.811.550	194.818.350	63.006.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.147.500	2.377.500	1.230.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.230.000	1.230.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.500	1.147.500	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	130.664.050	192.440.850	61.776.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.664.050	192.440.850	61.776.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.429.400	41.251.700	4.822.300	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	36.429.400	41.251.700	4.822.300	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.429.400	41.251.700	4.822.300	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.210.800	328.926.600	2.715.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.040.800	136.456.600	3.415.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	133.040.800	136.456.600	3.415.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.040.800	136.456.600	3.415.800	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.170.000	192.470.000	(700.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	193.170.000	192.470.000	(700.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	193.170.000	192.470.000	(700.000)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.087.600	165.250.730	6.163.130	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.807.600	88.978.000	(1.829.600)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	90.807.600	88.978.000	(1.829.600)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.807.600	88.978.000	(1.829.600)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
 Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.850.000	19.850.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	19.850.000	19.850.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.850.000	19.850.000	0	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.510.000	14.510.000	8.000.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	08	5	1			BELANJA OPERASI	6.510.000	14.510.000	8.000.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.510.000	14.510.000	8.000.000	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.920.000	41.912.730	(7.270)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	41.920.000	41.912.730	(7.270)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	41.920.000	41.912.730	(7.270)	
Jumlah Belanja											10.790.460.472	12.953.140.061	2.162.679.589	
Total Surplus/(Defisit)											(9.715.460.472)	(11.528.140.061)	(1.812.679.589)	
0	00	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01 Dinas Perindustrian

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	3.31.2.17.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	00	0.00	00					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	778.476.200	213.829.700	(564.646.500)	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	0.00	00					
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.372.200	30.372.200	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	00					
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30.372.200	30.372.200	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01					
						Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.372.200	30.372.200	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	30.372.200	30.372.200	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	30.372.200	30.372.200	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	05	0.00	00					
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	17.767.000	17.767.000	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	05	2.01	00					
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.767.000	17.767.000	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	05	2.01	01					
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	17.767.000	17.767.000	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	17.767.000	17.767.000	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	17.767.000	17.767.000	0	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	06	0.00	00					
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	39.368.100	60.572.600	21.204.500	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	06	2.01	00					
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.368.100	60.572.600	21.204.500	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	06	2.01	01					
						Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.368.100	60.572.600	21.204.500	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	39.368.100	60.572.600	21.204.500	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	39.368.100	60.572.600	21.204.500	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	0.00	00					
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	690.968.900	105.117.900	(585.851.000)	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	00					
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	690.968.900	105.117.900	(585.851.000)	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	01					
						Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	690.968.900	105.117.900	(585.851.000)	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	665.918.900	80.067.900	(585.851.000)	
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	665.918.900	80.067.900	(585.851.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01 Dinas Perindustrian

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2	BELANJA MODAL	25.050.000	25.050.000	0		
2	17	3.31.2.17.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.050.000	25.050.000	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.071.356.292	5.991.336.644	(80.019.648)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.302.719.900	1.045.794.600	(256.925.300)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	00			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.302.719.900	1.045.794.600	(256.925.300)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	11.000.000	111.000.000	100.000.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	11.000.000	111.000.000	100.000.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	111.000.000	100.000.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	108.796.300	133.796.100	24.999.800		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	108.796.300	133.796.100	24.999.800		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.796.300	133.796.100	24.999.800	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	151.153.700	369.228.600	218.074.900		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	135.944.600	369.228.600	233.284.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.944.600	369.228.600	233.284.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	15.209.100	0	(15.209.100)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.209.100	0	(15.209.100)	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.031.769.900	431.769.900	(600.000.000)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.031.769.900	431.769.900	(600.000.000)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.769.900	431.769.900	(600.000.000)	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	63.995.400	63.995.400	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	00			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	63.995.400	63.995.400	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.995.400	63.995.400	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	63.995.400	63.995.400	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.995.400	63.995.400	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143.351.000	143.351.000	0		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01 Dinas Perindustrian

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	143.351.000	143.351.000	0			
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	98.616.900	98.616.900	0			
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	98.616.900	98.616.900	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.616.900	98.616.900	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	02				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	35.401.500	35.401.500	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.401.500	35.401.500	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.401.500	35.401.500	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	03				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.332.600	9.332.600	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.332.600	9.332.600	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.332.600	9.332.600	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.561.289.992	4.738.195.644	176.905.652
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.500.000	7.500.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.948.545.292	2.948.600.820	55.528
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.045.292	2.941.100.820	55.528
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.941.045.292	2.941.100.820	55.528
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.941.045.292	2.941.100.820	55.528
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.000	4.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.250.000	4.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000	4.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000	3.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	3.250.000	3.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000	3.250.000	0
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247.363.600	1.207.675.600	(39.688.000)
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.833.400	3.833.400	0

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01 Dinas Perindustrian

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.833.400	3.833.400	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.833.400	3.833.400	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.575.800	55.575.800	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	55.575.800	55.575.800	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.575.800	55.575.800	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.214.200	80.614.200	1.400.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	79.214.200	80.614.200	1.400.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.214.200	80.614.200	1.400.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.493.200	18.493.200	1.000.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	17.493.200	18.493.200	1.000.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.493.200	18.493.200	1.000.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	1.352.000	3.867.000	2.515.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.352.000	3.867.000	2.515.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.000	3.867.000	2.515.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.085.395.000	1.040.792.000	(44.603.000)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.085.395.000	1.040.792.000	(44.603.000)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.395.000	1.040.792.000	(44.603.000)	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.152.000	371.926.100	227.774.100		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.152.000	371.926.100	227.774.100		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	885.000	51.570.000	50.685.000		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	885.000	1.770.000	885.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	49.800.000	49.800.000	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	143.267.000	320.356.100	177.089.100		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.267.000	320.356.100	177.089.100	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.800.000	157.566.224	(11.233.776)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	66.000.000	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	66.000.000	66.000.000	0		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000	66.000.000	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.800.000	91.566.224	(11.233.776)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	102.800.000	91.566.224	(11.233.776)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.800.000	91.566.224	(11.233.776)	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.929.100	44.926.900	(2.200)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.349.100	30.346.900	(2.200)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.349.100	30.346.900	(2.200)		
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.349.100	30.346.900	(2.200)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01 Dinas Perindustrian

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	14.580.000	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	14.580.000	14.580.000	0	
3	31	3.31.2.17.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.580.000	14.580.000	0	
Jumlah Belanja											6.849.832.492	6.205.166.344	(644.666.148)	
Total Surplus/(Defisit)											(6.849.832.492)	(6.205.166.344)	644.666.148	
0	00	3.31.2.17.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		SEKRETARIAT DAERAH	85.593.948.197	101.043.323.697	15.449.375.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.695.867.900	24.760.065.400	4.064.197.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Administrasi Tata Pemerintahan	641.560.600	602.302.300	(39.258.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	128.403.500	186.726.400	58.322.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	128.403.500	186.726.400	58.322.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	128.403.500	186.726.400	58.322.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	257.015.700	173.625.700	(83.390.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	257.015.700	173.625.700	(83.390.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	257.015.700	173.625.700	(83.390.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	256.141.400	241.950.200	(14.191.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	256.141.400	241.950.200	(14.191.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	256.141.400	241.950.200	(14.191.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.102.225.400	23.382.161.200	4.279.935.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.892.943.000	4.732.178.800	839.235.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	3.892.943.000	4.732.178.800	839.235.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Pegawai	8.850.000	8.850.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	3.884.093.000	4.723.328.800	839.235.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	15.209.282.400	18.649.982.400	3.440.700.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	15.209.282.400	18.649.982.400	3.440.700.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	778.037.400	1.088.737.400	310.700.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Hibah	14.431.245.000	17.561.245.000	3.130.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	952.081.900	775.601.900	(176.480.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	238.684.000	201.884.000	(36.800.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA OPERASI	231.184.000	194.384.000	(36.800.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	Belanja Barang dan Jasa	231.184.000	194.384.000	(36.800.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA MODAL	7.500.000	7.500.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000	7.500.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	485.580.900	258.700.900	(226.880.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	BELANJA OPERASI	485.580.900	258.700.900	(226.880.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	Belanja Barang dan Jasa	485.580.900	258.700.900	(226.880.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	227.817.000	315.017.000	87.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	BELANJA OPERASI	227.817.000	315.017.000	87.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	Belanja Barang dan Jasa	227.817.000	315.017.000	87.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.049.599.600	1.826.677.500	777.077.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	234.520.000	105.300.000	(129.220.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	167.670.000	38.450.000	(129.220.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	167.670.000	38.450.000	(129.220.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.020.000	0	(1.020.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	166.650.000	38.450.000	(128.200.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.650.000	53.650.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.650.000	53.650.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.650.000	53.650.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	13.200.000	13.200.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	13.200.000	13.200.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000	13.200.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	44.200.000	44.845.000	645.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4.800.000	5.100.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.800.000	5.100.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	5.100.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	29.150.000	29.450.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.150.000	29.450.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000	29.450.000	300.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10.250.000	10.295.000	45.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.250.000	10.295.000	45.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000	10.295.000	45.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	709.609.600	1.616.687.500	907.077.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	447.911.000	532.711.000	84.800.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	447.911.000	430.921.400	(16.989.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	48.000.000	48.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.911.000	382.921.400	(16.989.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	2		BELANJA MODAL	0	101.789.600	101.789.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	101.789.600	101.789.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	204.762.600	1.064.496.800	859.734.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	204.762.600	336.294.600	131.532.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	204.762.600	336.294.600	131.532.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	0	728.202.200	728.202.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	728.202.200	728.202.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	56.936.000	19.479.700	(37.456.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	56.936.000	19.479.700	(37.456.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.936.000	19.479.700	(37.456.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	61.270.000	59.845.000	(1.425.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	43.175.000	43.175.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.175.000	43.175.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.175.000	43.175.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.895.000	5.895.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	BELANJA OPERASI	5.895.000	5.895.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	Belanja Barang dan Jasa	5.895.000	5.895.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.200.000	10.775.000	(1.425.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	BELANJA OPERASI	12.200.000	10.775.000	(1.425.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000	10.775.000	(1.425.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.848.480.697	74.456.580.797	10.608.100.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.046.200	38.046.200	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.046.200	38.046.200	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	38.046.200	38.046.200	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	38.046.200	38.046.200	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.409.659.901	17.398.694.395	(10.965.506)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.242.369.101	17.242.369.695	594	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	17.242.369.101	17.242.369.695	594	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	Belanja Pegawai	17.242.369.101	17.242.369.695	594	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.478.800	151.324.700	(10.154.100)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	150.378.800	151.324.700	945.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	Belanja Barang dan Jasa	150.378.800	151.324.700	945.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA MODAL	11.100.000	0	(11.100.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.100.000	0	(11.100.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	BELANJA OPERASI	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000	2.500.000	(406.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.109.814.300	2.983.634.200	(126.180.100)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.936.614.300	2.810.418.300	(126.196.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA OPERASI	2.936.614.300	2.810.418.300	(126.196.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	Belanja Barang dan Jasa	2.936.614.300	2.810.418.300	(126.196.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	173.200.000	173.215.900	15.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03	5	BELANJA OPERASI	173.200.000	173.215.900	15.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	03	5	Belanja Barang dan Jasa	173.200.000	173.215.900	15.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.185.230.500	15.350.606.800	4.165.376.300	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.997.400	244.631.600	129.634.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA OPERASI	114.997.400	244.631.600	129.634.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	Belanja Barang dan Jasa	114.997.400	244.631.600	129.634.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.522.000	507.532.700	55.010.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA OPERASI	452.522.000	507.532.700	55.010.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	Belanja Barang dan Jasa	452.522.000	507.532.700	55.010.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.500.000	342.375.000	130.875.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA OPERASI	211.500.000	342.375.000	130.875.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	Belanja Barang dan Jasa	211.500.000	342.375.000	130.875.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.600.000	74.600.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA OPERASI	74.600.000	74.600.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000	74.600.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	10.210.200	35.291.000	25.080.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	BELANJA OPERASI	10.210.200	35.291.000	25.080.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	Belanja Barang dan Jasa	10.210.200	35.291.000	25.080.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.518.384.500	3.578.124.500	1.059.740.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	BELANJA OPERASI	2.518.384.500	3.578.124.500	1.059.740.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	Belanja Barang dan Jasa	2.518.384.500	3.578.124.500	1.059.740.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.803.016.400	10.568.052.000	2.765.035.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA OPERASI	7.803.016.400	10.568.052.000	2.765.035.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	Belanja Barang dan Jasa	7.803.016.400	10.568.052.000	2.765.035.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.426.877.800	15.614.793.506	4.187.915.706	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.553.837.500	3.133.478.000	(420.359.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	BELANJA OPERASI	52.275.000	53.250.000	975.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	Belanja Pegawai	6.365.000	6.365.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	Belanja Barang dan Jasa	45.910.000	46.885.000	975.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	BELANJA MODAL	3.501.562.500	3.080.228.000	(421.334.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.501.562.500	3.080.228.000	(421.334.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	2.897.746.800	3.050.977.500	153.230.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	BELANJA OPERASI	74.874.000	287.357.000	212.483.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	Belanja Pegawai	3.860.000	4.370.000	510.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	Belanja Barang dan Jasa	71.014.000	82.987.000	11.973.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	Belanja Hibah	0	200.000.000	200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	BELANJA MODAL	2.822.872.800	2.763.620.500	(59.252.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.822.872.800	2.763.620.500	(59.252.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.829.468.500	9.284.513.006	4.455.044.506	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA OPERASI	177.652.500	2.991.262.406	2.813.609.906	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Pegawai	7.355.000	9.905.000	2.550.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Barang dan Jasa	170.297.500	365.286.500	194.989.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Hibah	0	2.616.070.906	2.616.070.906	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA MODAL	4.651.816.000	6.293.250.600	1.641.434.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.651.816.000	6.193.250.600	1.541.434.600	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	100.000.000	100.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.825.000	145.825.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1		BELANJA OPERASI	145.825.000	145.825.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1	01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	144.940.000	144.940.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.482.271.900	5.636.168.200	153.896.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	161.700.000	161.700.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	161.700.000	161.700.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.700.000	161.700.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.573.204.600	2.634.104.600	60.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.573.204.600	2.634.104.600	60.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.573.204.600	2.634.104.600	60.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.001.844.900	1.803.918.600	802.073.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.001.844.900	1.803.918.600	802.073.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	01	Belanja Pegawai	8.850.000	8.850.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	992.994.900	1.795.068.600	802.073.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.745.522.400	1.036.445.000	(709.077.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.745.522.400	1.036.445.000	(709.077.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.745.522.400	1.036.445.000	(709.077.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.519.398.390	7.507.983.590	1.988.585.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.838.318.100	2.008.450.800	170.132.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.838.318.100	2.008.450.800	170.132.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.318.100	2.008.450.800	170.132.700	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.209.290	621.491.490	(83.717.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	705.209.290	621.491.490	(83.717.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	705.209.290	621.491.490	(83.717.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.660.221.000	4.562.391.300	1.902.170.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.626.621.000	2.807.351.300	1.180.730.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.550.000	10.710.000	8.160.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.071.000	2.796.641.300	1.172.570.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.033.600.000	1.755.040.000	721.440.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	904.000.000	1.755.040.000	851.040.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.600.000	0	(129.600.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	12				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	315.650.000	315.650.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	12	5	1		BELANJA OPERASI	315.650.000	315.650.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	12	5	1	01	Belanja Pegawai	510.000	510.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	315.140.000	315.140.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	00				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.323.134.306	1.823.226.406	500.092.100	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.541.206	168.541.206	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	BELANJA OPERASI	168.541.206	168.541.206	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	Belanja Pegawai	168.541.206	168.541.206	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	754.593.100	1.254.685.200	500.092.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02	5	BELANJA OPERASI	754.593.100	1.254.685.200	500.092.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	02	5	Belanja Barang dan Jasa	754.593.100	1.254.685.200	500.092.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	BELANJA OPERASI	400.000.000	400.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	Belanja Pegawai	400.000.000	400.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	00		Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	2.363.571.800	2.112.952.000	(250.619.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.448.636.000	1.296.857.000	(151.779.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	BELANJA OPERASI	841.151.000	845.823.000	4.672.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	Belanja Pegawai	3.300.000	0	(3.300.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	Belanja Barang dan Jasa	837.851.000	845.823.000	7.972.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	BELANJA MODAL	607.485.000	451.034.000	(156.451.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607.485.000	451.034.000	(156.451.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	717.935.800	622.495.000	(95.440.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	BELANJA OPERASI	517.334.800	514.454.000	(2.880.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	Belanja Barang dan Jasa	517.334.800	514.454.000	(2.880.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	BELANJA MODAL	200.601.000	108.041.000	(92.560.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.601.000	108.041.000	(92.560.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	197.000.000	193.600.000	(3.400.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	BELANJA OPERASI	72.000.000	72.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	72.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	BELANJA MODAL	125.000.000	121.600.000	(3.400.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000	121.600.000	(3.400.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	00		Penataan Organisasi	860.903.000	860.903.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	199.178.600	199.178.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	BELANJA OPERASI	199.178.600	199.178.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	Belanja Barang dan Jasa	199.178.600	199.178.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.345.400	113.345.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	BELANJA OPERASI	113.345.400	113.345.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	Belanja Barang dan Jasa	113.345.400	113.345.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	548.379.000	548.379.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	BELANJA OPERASI	548.379.000	548.379.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	Belanja Barang dan Jasa	548.379.000	548.379.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	00		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.129.572.600	5.129.572.500	(100)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	393.099.000	539.899.000	146.800.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	BELANJA OPERASI	393.099.000	539.899.000	146.800.000		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	393.099.000	539.899.000	146.800.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.913.278.000	2.111.077.900	197.799.900		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.913.278.000	2.111.077.900	197.799.900		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.913.278.000	2.111.077.900	197.799.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.823.195.600	2.478.595.600	(344.600.000)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.823.195.600	2.478.595.600	(344.600.000)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1	01	Belanja Pegawai	12.600.000	0	(12.600.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.595.600	2.478.595.600	(332.000.000)	
Jumlah Belanja								85.593.948.197	101.043.323.697	15.449.375.500			
Total Surplus/(Defisit)								(85.593.948.197)	(101.043.323.697)	(15.449.375.500)			
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0			

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		SEKRETARIAT DPRD	49.805.990.873	56.367.015.998	6.561.025.125	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.744.321.500	24.104.634.800	4.360.313.300	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	803.051.000	601.857.600	(201.193.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	138.301.400	137.108.000	(1.193.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	138.301.400	137.108.000	(1.193.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	138.301.400	137.108.000	(1.193.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	344.749.800	244.749.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	344.749.800	244.749.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	344.749.800	244.749.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	319.999.800	219.999.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	319.999.800	219.999.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	319.999.800	219.999.800	(100.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Pembahasan Kebijakan Anggaran	187.900.000	190.500.000	2.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	41.400.000	37.275.000	(4.125.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	41.400.000	37.275.000	(4.125.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000	37.275.000	(4.125.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.650.000	20.775.000	(6.875.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	27.650.000	20.775.000	(6.875.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000	20.775.000	(6.875.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pembahasan APBD	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	Belanja Barang dan Jasa	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA OPERASI	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	Belanja Barang dan Jasa	34.525.000	35.900.000	1.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Pembahasan Laporan Semester	22.150.000	0	(22.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	22.150.000	0	(22.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000	0	(22.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	27.650.000	60.650.000	33.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	BELANJA OPERASI	27.650.000	60.650.000	33.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000	60.650.000	33.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00		Peningkatan Kapasitas DPRD	918.354.500	1.243.542.200	325.187.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	314.667.500	471.855.200	157.187.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	BELANJA OPERASI	314.667.500	471.855.200	157.187.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	Belanja Barang dan Jasa	314.667.500	471.855.200	157.187.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	306.000.000	306.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	BELANJA OPERASI	306.000.000	306.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	Belanja Barang dan Jasa	306.000.000	306.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07		Penyusunan Program Kerja DPRD	297.687.000	465.687.000	168.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	BELANJA OPERASI	297.687.000	465.687.000	168.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.687.000	465.687.000	168.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	392.400.000	351.150.000	(41.250.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01			Kunjungan Kerja dalam Daerah	19.500.000	11.250.000	(8.250.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.500.000	11.250.000	(8.250.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000	11.250.000	(8.250.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.575.000	4.575.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.575.000	4.575.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000	4.575.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03			Pelaksanaan Reses	368.325.000	335.325.000	(33.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	BELANJA OPERASI	368.325.000	335.325.000	(33.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	368.325.000	335.325.000	(33.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	00			Pembahasan Kerja Sama Daerah	30.000.000	30.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	30.000.000	30.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	00			Fasilitasi Tugas DPRD	17.412.616.000	21.687.585.000	4.274.969.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.681.062.000	16.244.426.000	1.563.364.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	14.681.062.000	16.244.426.000	1.563.364.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.681.062.000	16.244.426.000	1.563.364.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.731.554.000	5.443.159.000	2.711.605.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.731.554.000	5.443.159.000	2.711.605.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.731.554.000	5.443.159.000	2.711.605.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.061.669.373	32.262.381.198	2.200.711.825		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.400.000	90.600.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.400.000	90.600.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	89.400.000	90.600.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000	90.600.000	1.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.454.700.369	5.459.200.494	4.500.125		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.265.700.369	5.265.700.494	125		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.265.700.369	5.265.700.494	125		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.265.700.369	5.265.700.494	125	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.800.000	105.000.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	103.800.000	105.000.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000	105.000.000	1.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	4.200.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000	4.200.000	1.200.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	4.200.000	1.200.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	82.200.000	84.300.000	2.100.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	82.200.000	84.300.000	2.100.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000	84.300.000	2.100.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.502.459.800	5.551.810.800	1.049.351.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.581.500	32.581.500	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	32.581.500	32.581.500	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.581.500	32.581.500	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.107.800	87.406.500	25.298.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	62.107.800	87.406.500	25.298.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.107.800	87.406.500	25.298.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.972.400	282.533.000	94.560.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	187.972.400	282.533.000	94.560.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.972.400	282.533.000	94.560.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.924.600	137.243.300	55.318.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	81.924.600	137.243.300	55.318.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.924.600	137.243.300	55.318.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	126.000.000	126.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	126.000.000	126.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000	126.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	17.615.500	23.115.500	5.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	17.615.500	23.115.500	5.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.615.500	23.115.500	5.500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.450.000	110.000.000	22.550.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	87.450.000	110.000.000	22.550.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.450.000	110.000.000	22.550.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.906.808.000	4.752.931.000	846.123.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	3.906.808.000	4.752.931.000	846.123.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.906.808.000	4.752.931.000	846.123.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.065.180.000	1.380.730.800	315.550.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	575.180.000	668.730.800	93.550.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	575.180.000	668.730.800	93.550.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.180.000	668.730.800	93.550.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	490.000.000	712.000.000	222.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	490.000.000	712.000.000	222.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.000.000	712.000.000	222.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.200.000	514.000.000	102.800.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	17.400.000	5.800.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.600.000	17.400.000	5.800.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000	17.400.000	5.800.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	252.000.000	54.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	198.000.000	252.000.000	54.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000	252.000.000	54.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.600.000	244.600.000	43.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	201.600.000	244.600.000	43.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	201.600.000	244.600.000	43.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.045.986.504	2.760.023.004	714.036.500		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.993.800	460.010.000	132.016.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	327.993.800	460.010.000	132.016.200		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.993.800	460.010.000	132.016.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.851.600	303.663.600	117.812.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	185.851.600	303.663.600	117.812.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.851.600	303.663.600	117.812.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.643.200	43.643.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	43.643.200	43.643.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.643.200	43.643.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.488.497.904	1.952.706.204	464.208.300		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	897.997.904	1.158.054.204	260.056.300		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	897.997.904	1.158.054.204	260.056.300	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	590.500.000	794.652.000	204.152.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	590.500.000	794.652.000	204.152.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	00			Penataan Organisasi	61.950.000	75.223.400	13.273.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.950.000	75.223.400	13.273.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	BELANJA OPERASI	61.950.000	75.223.400	13.273.400		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000	75.223.400	13.273.400	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	00			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700	16.430.792.700	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200	15.983.657.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.983.657.200	15.983.657.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	01	Belanja Pegawai	15.983.657.200	15.983.657.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500	372.135.500	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	BELANJA OPERASI	372.135.500	372.135.500	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.725.000	1.725.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	370.410.500	370.410.500	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	75.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0		

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1	01		Belanja Pegawai	75.000.000	75.000.000	0	
Jumlah Belanja											49.805.990.873	56.367.015.998	6.561.025.125	
Total Surplus/(Defisit)											(49.805.990.873)	(56.367.015.998)	(6.561.025.125)	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Anfin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00		PERENCANAAN	11.804.997.199	11.539.365.045	(265.632.154)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.165.491.700	1.788.882.900	(376.608.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	00		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.336.991.700	1.175.412.600	(161.579.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	135.846.700	17.246.000	(118.600.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	135.846.700	17.246.000	(118.600.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	135.846.700	17.246.000	(118.600.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	62.750.000	37.213.600	(25.536.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	62.750.000	37.213.600	(25.536.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000	37.213.600	(25.536.400)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	173.150.000	139.528.000	(33.622.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	173.150.000	139.528.000	(33.622.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	Belanja Barang dan Jasa	173.150.000	139.528.000	(33.622.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	06		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	250.505.000	225.578.800	(24.926.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	250.505.000	225.578.800	(24.926.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	250.505.000	225.578.800	(24.926.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	714.740.000	755.846.200	41.106.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	BELANJA OPERASI	714.740.000	755.846.200	41.106.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	Belanja Pegawai	0	5.100.000	5.100.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	Belanja Barang dan Jasa	714.740.000	750.746.200	36.006.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	00		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	551.410.000	416.480.300	(134.929.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	194.500.000	214.500.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	194.500.000	214.500.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	194.500.000	214.500.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	356.910.000	201.980.300	(154.929.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA OPERASI	356.910.000	201.980.300	(154.929.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	Belanja Barang dan Jasa	356.910.000	201.980.300	(154.929.700)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	00		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	277.090.000	196.990.000	(80.100.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	141.080.000	104.480.000	(36.600.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA OPERASI	141.080.000	104.480.000	(36.600.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	Belanja Barang dan Jasa	141.080.000	104.480.000	(36.600.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	136.010.000	92.510.000	(43.500.000)				
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	136.010.000	92.510.000	(43.500.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	136.010.000	92.510.000	(43.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.225.381.500	1.138.771.500	(86.610.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	468.089.800	422.864.800	(45.225.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.125.000	77.350.000	(27.775.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	105.125.000	77.350.000	(27.775.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.125.000	77.350.000	(27.775.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.850.000	69.850.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	69.850.000	69.850.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.850.000	69.850.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.700.000	43.700.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	43.700.000	43.700.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000	43.700.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.044.800	103.594.800	(17.450.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	121.044.800	103.594.800	(17.450.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.044.800	103.594.800	(17.450.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79.820.000	79.820.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	79.820.000	79.820.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.820.000	79.820.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.550.000	48.550.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	48.550.000	48.550.000	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.550.000	48.550.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	328.891.700	311.991.700	(16.900.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.674.800	59.562.300	(19.112.500)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	78.674.800	59.562.300	(19.112.500)		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.674.800	59.562.300	(19.112.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72.970.000	75.182.500	2.212.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	72.970.000	75.182.500	2.212.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.970.000	75.182.500	2.212.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.635.000	41.635.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.635.000	41.635.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.635.000	41.635.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.611.900	135.611.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	135.611.900	135.611.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.611.900	135.611.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	00				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	428.400.000	403.915.000	(24.485.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.900.000	77.415.000	(24.485.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	101.900.000	77.415.000	(24.485.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.900.000	77.415.000	(24.485.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61.950.000	61.950.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	61.950.000	61.950.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000	61.950.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.450.000	47.450.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	47.450.000	47.450.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.450.000	47.450.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	217.100.000	217.100.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	217.100.000	217.100.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.100.000	217.100.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.414.123.999	8.611.710.645	197.586.646	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.500.000	46.700.000	(9.800.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.300.000	32.050.000	4.750.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.300.000	32.050.000	4.750.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000	32.050.000	4.750.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.200.000	14.650.000	(14.550.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	29.200.000	14.650.000	(14.550.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000	14.650.000	(14.550.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.938.811.683	4.938.811.729	46	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.907.407.783	4.907.407.829	46	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.907.407.783	4.907.407.829	46	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	4.907.407.783	4.907.407.829	46	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.803.900	24.803.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	24.803.900	24.803.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.803.900	24.803.900	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.600.000	6.600.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000	6.600.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.056.774.200	2.525.763.600	468.989.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.380.500	18.389.600	9.100	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	18.380.500	18.389.600	9.100	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.380.500	18.389.600	9.100	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	763.322.200	455.887.900	(307.434.300)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	129.275.400	154.352.300	25.076.900	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.530.000	1.530.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.275.400	152.822.300	23.546.900	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 2	BELANJA MODAL	634.046.800	301.535.600	(332.511.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634.046.800	301.535.600	(332.511.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.618.500	161.618.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	161.618.500	161.618.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	161.618.500	161.618.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.325.000	29.218.400	13.893.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	15.325.000	29.218.400	13.893.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.325.000	29.218.400	13.893.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	17.079.000	27.626.200	10.547.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	17.079.000	27.626.200	10.547.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.079.000	27.626.200	10.547.200	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.750.000	18.750.000	5.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	13.750.000	18.750.000	5.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000	18.750.000	5.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.067.299.000	1.814.273.000	746.974.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	1.067.299.000	1.814.273.000	746.974.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.067.299.000	1.814.273.000	746.974.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.870.100	320.073.300	(41.796.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.870.100	320.073.300	(41.796.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 1	BELANJA OPERASI	1.530.000	1.530.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 1 01	Belanja Pegawai	1.530.000	1.530.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2	BELANJA MODAL	360.340.100	318.543.300	(41.796.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.970.700	286.173.900	(41.796.800)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.369.400	32.369.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.201.116	594.793.616	(118.407.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.620.000	487.612.500	(100.007.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1	BELANJA OPERASI	587.620.000	487.612.500	(100.007.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	587.620.000	487.612.500	(100.007.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.107.116	14.207.116	(15.900.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03 5 1	BELANJA OPERASI	30.107.116	14.207.116	(15.900.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.107.116	14.207.116	(15.900.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.474.000	92.974.000	(2.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1	BELANJA OPERASI	95.474.000	92.974.000	(2.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.474.000	92.974.000	(2.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.966.900	185.568.400	(101.398.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.193.700	144.595.200	(75.598.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01 5 1	BELANJA OPERASI	220.193.700	144.595.200	(75.598.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.193.700	144.595.200	(75.598.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.773.200	40.973.200	(25.800.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06 5 1	BELANJA OPERASI	66.773.200	40.973.200	(25.800.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.773.200	40.973.200	(25.800.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	889.815.000	1.293.829.000	404.014.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	889.815.000	1.293.829.000	404.014.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.835.000	166.385.000	(6.450.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	172.835.000	166.385.000	(6.450.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	09 5 1	BELANJA OPERASI	172.835.000	166.385.000	(6.450.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	09 5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.950.000	165.500.000	(6.450.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	451.520.000	310.905.000	(140.615.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	143.135.000	121.235.000	(21.900.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 1	BELANJA OPERASI	143.135.000	121.235.000	(21.900.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04 5 1 01	Belanja Pegawai	885.000	885.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.250.000	120.350.000	(21.900.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	07			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	308.385.000	189.670.000	(118.715.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	BELANJA OPERASI	308.385.000	189.670.000	(118.715.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1 01	Belanja Pegawai	885.000	1.770.000	885.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	307.500.000	187.900.000	(119.600.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	00			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	265.460.000	816.539.000	551.079.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	176.650.000	686.559.000	509.909.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	176.650.000	656.559.000	479.909.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1 01	Belanja Pegawai	0	1.770.000	1.770.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	176.650.000	654.789.000	478.139.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	2	BELANJA MODAL	0	30.000.000	30.000.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	30.000.000	30.000.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	88.810.000	129.980.000	41.170.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	88.810.000	129.980.000	41.170.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.810.000	129.980.000	41.170.000	
Jumlah Belanja								12.694.812.199	12.833.194.045	138.381.846		
Total Surplus/(Defisit)								(12.694.812.199)	(12.833.194.045)	(138.381.846)		
0	00	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.000.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		KEUANGAN	14.830.976.532	14.994.753.143	163.776.611	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.733.306.600	2.224.596.800	(508.709.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.475.842.600	1.157.438.600	(318.404.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.000.000	66.660.000	(5.340.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	72.000.000	66.660.000	(5.340.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	66.660.000	(5.340.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.800.000	58.500.000	(11.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	69.800.000	58.500.000	(11.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000	58.500.000	(11.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.020.000	9.020.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	9.020.000	9.020.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000	9.020.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8.980.000	8.980.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	8.980.000	8.980.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000	8.980.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.230.000	36.230.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	36.230.000	36.230.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	Belanja Barang dan Jasa	36.230.000	36.230.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.270.000	36.270.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	36.270.000	36.270.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	36.270.000	36.270.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	836.332.600	442.332.600	(394.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	BELANJA OPERASI	836.332.600	442.332.600	(394.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	Belanja Barang dan Jasa	836.332.600	442.332.600	(394.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.510.100	140.510.100	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	BELANJA OPERASI	140.510.100	140.510.100	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	Belanja Barang dan Jasa	140.510.100	140.510.100	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	266.699.900	358.935.900	92.236.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	BELANJA OPERASI	266.699.900	358.935.900	92.236.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	Belanja Barang dan Jasa	266.699.900	358.935.900	92.236.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	719.464.000	699.464.000	(20.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	78.420.000	78.020.000	(400.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	78.420.000	78.020.000	(400.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	78.420.000	78.020.000	(400.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43.212.000	43.212.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	43.212.000	43.212.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.212.000	43.212.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.100.000	15.100.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	15.100.000	15.100.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000	15.100.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	147.040.000	43.440.000	(103.600.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	147.040.000	43.440.000	(103.600.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.040.000	43.440.000	(103.600.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.100.000	35.100.000	25.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5 1	BELANJA OPERASI	10.100.000	35.100.000	25.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000	35.100.000	25.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	81.152.000	81.152.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5 1	BELANJA OPERASI	81.152.000	81.152.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.152.000	81.152.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	127.560.000	156.560.000	29.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 1	BELANJA OPERASI	127.560.000	156.560.000	29.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.560.000	156.560.000	29.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	216.880.000	246.880.000	30.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5 1	BELANJA OPERASI	216.880.000	246.880.000	30.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.880.000	246.880.000	30.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	538.000.000	367.694.200	(170.305.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	47.090.000	52.250.000	5.160.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	47.090.000	52.250.000	5.160.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.090.000	52.250.000	5.160.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	32.290.000	38.750.000	6.460.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	32.290.000	38.750.000	6.460.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.290.000	38.750.000	6.460.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	121.610.000	22.823.600	(98.786.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	BELANJA OPERASI	121.610.000	22.823.600	(98.786.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Belanja Barang dan Jasa	121.610.000	22.823.600	(98.786.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	196.250.000	37.050.000	(159.200.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	BELANJA OPERASI	196.250.000	37.050.000	(159.200.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Belanja Barang dan Jasa	196.250.000	37.050.000	(159.200.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	59.580.000	60.345.600	765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	BELANJA OPERASI	59.580.000	60.345.600	765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Belanja Barang dan Jasa	59.580.000	60.345.600	765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	27.220.000	61.050.000	33.830.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	BELANJA OPERASI	27.220.000	61.050.000	33.830.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	Belanja Barang dan Jasa	27.220.000	61.050.000	33.830.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	27.220.000	62.300.000	35.080.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	BELANJA OPERASI	27.220.000	62.300.000	35.080.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	Belanja Barang dan Jasa	27.220.000	62.300.000	35.080.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.740.000	33.125.000	6.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	BELANJA OPERASI	26.740.000	33.125.000	6.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	Belanja Barang dan Jasa	26.740.000	33.125.000	6.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.109.119.500	959.269.500	(149.850.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.109.119.500	959.269.500	(149.850.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	286.781.000	241.375.000	(45.406.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	BELANJA OPERASI	286.781.000	241.375.000	(45.406.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Belanja Barang dan Jasa	286.781.000	241.375.000	(45.406.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.630.000	0	(6.630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	BELANJA OPERASI	6.630.000	0	(6.630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000	0	(6.630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.592.900	25.893.900	(79.699.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	BELANJA OPERASI	105.592.900	25.893.900	(79.699.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Belanja Barang dan Jasa	105.592.900	25.893.900	(79.699.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	179.085.000	59.380.000	(119.705.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	BELANJA OPERASI	179.085.000	59.380.000	(119.705.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.085.000	59.380.000	(119.705.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06				Inventarisasi Barang Milik Daerah	12.697.900	1.722.900	(10.975.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	12.697.900	1.722.900	(10.975.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.697.900	1.722.900	(10.975.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	34.032.000	34.507.000	475.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	34.032.000	34.507.000	475.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.032.000	34.507.000	475.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08				Penilaian Barang Milik Daerah	112.185.900	112.185.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	112.185.900	112.185.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.185.900	112.185.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	262.351.400	277.581.400	15.230.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	262.351.400	277.581.400	15.230.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	262.351.400	277.581.400	15.230.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.781.400	35.781.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	35.781.400	35.781.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.781.400	35.781.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.780.000	15.780.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	15.780.000	15.780.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000	15.780.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58.202.000	155.062.000	96.860.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	58.202.000	155.062.000	96.860.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.202.000	155.062.000	96.860.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.988.550.432	11.810.886.843	822.336.411	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.345.000	30.345.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.545.000	28.545.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	28.545.000	28.545.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.545.000	28.545.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.477.504.202	6.477.847.963	343.761	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.440.650.202	6.440.993.963	343.761	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.440.650.202	6.440.993.963	343.761	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	6.440.650.202	6.440.993.963	343.761	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.809.000	3.809.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.809.000	3.809.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.809.000	3.809.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.045.000	33.045.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	33.045.000	33.045.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.045.000	33.045.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.094.450	54.094.450	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.094.450	54.094.450	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	54.094.450	54.094.450	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.094.450	54.094.450	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.418.762.340	2.881.113.540	462.351.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.493.340	124.993.340	(4.500.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	129.493.340	124.993.340	(4.500.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.493.340	124.993.340	(4.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	833.679.600	902.231.800	68.552.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	398.716.700	438.298.900	39.582.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	398.716.700	438.298.900	39.582.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	434.962.900	463.932.900	28.970.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.962.900	463.932.900	28.970.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.028.600	10.028.600	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	10.028.600	10.028.600	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.028.600	10.028.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.266.200	235.757.200	(25.509.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	261.266.200	235.757.200	(25.509.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.266.200	235.757.200	(25.509.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.810.000	101.068.600	1.258.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	99.810.000	101.068.600	1.258.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.810.000	101.068.600	1.258.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	49.409.600	6.191.000	(43.218.600)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	49.409.600	6.191.000	(43.218.600)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.409.600	6.191.000	(43.218.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.974.000	53.853.000	23.879.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	29.974.000	53.853.000	23.879.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.974.000	53.853.000	23.879.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.005.101.000	1.446.990.000	441.889.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.005.101.000	1.446.990.000	441.889.000		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.101.000	1.446.990.000	441.889.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	819.748.000	937.416.200	117.668.200		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	819.748.000	937.416.200	117.668.200		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	819.748.000	937.416.200	117.668.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.748.000	937.416.200	117.668.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.653.040	836.823.040	14.170.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.700.000	8.120.000	(580.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	8.700.000	8.120.000	(580.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000	8.120.000	(580.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.330.000	365.080.000	20.750.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	344.330.000	365.080.000	20.750.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	344.330.000	365.080.000	20.750.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.623.040	463.623.040	(6.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	469.623.040	463.623.040	(6.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	469.623.040	463.623.040	(6.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.443.400	593.246.650	227.803.250	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.007.900	84.209.150	6.201.250	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	78.007.900	84.209.150	6.201.250	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.007.900	84.209.150	6.201.250	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.470.000	60.620.000	23.150.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	37.470.000	60.620.000	23.150.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.470.000	60.620.000	23.150.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.965.500	448.417.500	198.452.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	249.965.500	249.017.500	(948.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.965.500	249.017.500	(948.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2	BELANJA MODAL	0	199.400.000	199.400.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	20.000.000	20.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	179.400.000	179.400.000	
Jumlah Belanja							14.830.976.532	14.994.753.143	163.776.611		
Total Surplus/(Defisit)							(14.830.976.532)	(14.994.753.143)	(163.776.611)		
0	00	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00 5	BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	KEUANGAN	197.435.681.608	196.874.153.815	(561.527.793)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	197.435.681.608	196.874.153.815	(561.527.793)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	197.435.681.608	196.874.153.815	(561.527.793)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.782.683.508	7.782.683.508	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04 5 1	BELANJA OPERASI	7.782.683.508	7.782.683.508	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04 5 1 03	Belanja Bunga	7.782.683.508	7.782.683.508	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	162.250.951.600	162.911.580.900	660.629.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08 5 4	BELANJA TRANSFER	162.250.951.600	162.911.580.900	660.629.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08 5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	162.250.951.600	162.911.580.900	660.629.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000	23.387.342.907	(1.612.657.093)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09 5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	23.387.342.907	(1.612.657.093)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	5	3	01		Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	23.387.342.907	(1.612.657.093)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.402.046.500	2.792.546.500	390.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10	5	4			BELANJA TRANSFER	2.402.046.500	2.792.546.500	390.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10	5	4	01		Belanja Bagi Hasil	2.402.046.500	2.792.546.500	390.500.000	
Jumlah Belanja											197.435.681.608	196.874.153.815	(561.527.793)	
Total Surplus/(Defisit)											(197.435.681.608)	(196.874.153.815)	561.527.793	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	661.045.895.844	172.029.069.911	(489.016.825.933)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	636.888.330.844	132.792.517.161	(504.095.813.683)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	04		Penerimaan Pinjaman Daerah	23.657.565.000	38.736.552.750	15.078.987.750	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	05		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											661.045.895.844	172.029.069.911	(489.016.825.933)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.500.000.000	8.500.000.000	(70.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000	8.000.000.000	(70.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	04		Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											78.500.000.000	8.500.000.000	(70.000.000.000)	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.514.813.320	33.617.329.235	4.102.515.915	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 01	Pajak Daerah	19.450.000.000	23.355.000.000	3.905.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	127.123.120	144.763.120	17.640.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	5.179.875.915	179.875.915	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	4.937.690.200	4.937.690.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2	PENDAPATAN TRANSFER	988.012.669.000	1.252.087.482.225	264.074.813.225	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	837.218.848.000	946.578.546.527	109.359.698.527	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.793.821.000	305.508.935.698	154.715.114.698	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.624.725.300	442.498.664.551	434.873.939.251	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3 01	Pendapatan Hibah	7.624.725.300	442.498.664.551	434.873.939.251	
Jumlah Pendapatan									1.025.152.207.620	1.728.203.476.011	703.051.268.391	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00			KEUANGAN	11.441.812.762	12.035.557.395	593.744.633	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.530.905.232	2.454.811.965	(76.093.267)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	00			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.530.905.232	2.454.811.965	(76.093.267)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	208.324.900	284.054.900	75.730.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	208.324.900	284.054.900	75.730.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.324.900	284.054.900	75.730.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.999.800	109.799.800	34.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	74.999.800	109.799.800	34.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.800	109.799.800	34.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	294.816.600	146.925.000	(147.891.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	294.816.600	146.925.000	(147.891.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	294.816.600	146.925.000	(147.891.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	713.360.204	810.948.537	97.588.333	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	713.360.204	810.948.537	97.588.333	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1 01	Belanja Pegawai	261.035.268	355.153.376	94.118.108	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	452.324.936	455.795.161	3.470.225	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728	389.933.728	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	389.933.728	389.933.728	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.933.728	389.933.728	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000	267.295.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	267.295.000	267.295.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.295.000	267.295.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000	38.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	38.500.000	38.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000	38.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11			Penagihan Pajak Daerah	186.000.000	186.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	186.000.000	186.000.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000	186.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	357.675.000	221.355.000	(136.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	357.675.000	221.355.000	(136.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	357.675.000	221.355.000	(136.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.910.907.530	9.580.745.430	669.837.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400	13.015.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400	5.015.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.015.400	5.015.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.400	5.015.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.878.430	5.673.142.530	(149.735.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530	5.578.342.530	(3.125.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.581.467.530	5.578.342.530	(3.125.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.581.467.530	5.578.342.530	(3.125.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.810.900	89.200.000	(146.610.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	235.810.900	89.200.000	(146.610.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.810.900	89.200.000	(146.610.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000	2.800.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.097.778.000	2.572.856.200	475.078.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000	79.901.000	12.600.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	67.301.000	79.901.000	12.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.301.000	79.901.000	12.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.000	343.894.000	40.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	303.694.000	343.894.000	40.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	303.694.000	343.894.000	40.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500	119.111.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	119.111.500	119.111.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.111.500	119.111.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.355.600	600.588.800	29.233.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	571.355.600	600.588.800	29.233.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	571.355.600	600.588.800	29.233.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	6.140.900	6.140.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	6.140.900	6.140.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.140.900	6.140.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	7.150.000	1.650.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	5.500.000	7.150.000	1.650.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	7.150.000	1.650.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.024.675.000	1.416.070.000	391.395.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.024.675.000	1.416.070.000	391.395.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.675.000	1.416.070.000	391.395.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.652.700	335.036.100	135.383.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	46.278.200	125.235.000	78.956.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	46.278.200	125.235.000	78.956.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.278.200	125.235.000	78.956.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.374.500	209.801.100	56.426.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	200.000	200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	200.000	200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	153.174.500	209.601.100	56.426.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.174.500	209.601.100	56.426.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.306.000	811.820.000	356.514.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.506.000	768.020.000	351.514.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	416.506.000	768.020.000	351.514.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	416.506.000	768.020.000	351.514.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.800.000	43.800.000	5.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	38.800.000	43.800.000	5.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000	43.800.000	5.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.277.000	174.875.200	(147.401.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.387.000	101.089.200	33.702.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	67.387.000	101.089.200	33.702.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.387.000	101.089.200	33.702.200	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000	54.970.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	54.970.000	54.970.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.970.000	54.970.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	18.816.000	(181.104.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	199.920.000	18.816.000	(181.104.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.920.000	18.816.000	(181.104.000)	
Jumlah Belanja									11.441.812.762	12.035.557.395	593.744.633	
Total Surplus/(Defisit)									1.013.710.394.858	1.716.167.918.616	702.457.523.758	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
								Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
								Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH				
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	10.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02	Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	0	
Jumlah Pendapatan							10.000.000	10.000.000	0	
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA				
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	KEPEGAWAIAN	9.440.945.367	9.439.563.022	(1.382.345)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.548.968.600	2.792.652.400	(756.316.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	927.729.000	886.401.800	(41.327.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.300.000	3.300.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 1	BELANJA OPERASI	3.300.000	3.300.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000	3.300.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	743.715.000	741.209.800	(2.505.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	743.715.000	741.209.800	(2.505.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	743.715.000	741.209.800	(2.505.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	52.232.000	52.232.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 1	BELANJA OPERASI	52.232.000	52.232.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.232.000	52.232.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.282.000	15.060.000	(5.222.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1	BELANJA OPERASI	20.282.000	15.060.000	(5.222.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.282.000	15.060.000	(5.222.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.700.000	52.700.000	(30.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10 5 1	BELANJA OPERASI	82.700.000	52.700.000	(30.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.700.000	52.700.000	(30.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.500.000	21.900.000	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11 5 1	BELANJA OPERASI	25.500.000	21.900.000	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000	21.900.000	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	00	Mutasi dan Promosi ASN	574.261.700	569.066.700	(5.195.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	3.580.000	3.580.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01 5 1	BELANJA OPERASI	3.580.000	3.580.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000	3.580.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	129.999.800	126.399.800	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 1	BELANJA OPERASI	129.999.800	126.399.800	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.999.800	126.399.800	(3.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	440.681.900	439.086.900	(1.595.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	440.681.900	439.086.900	(1.595.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	440.681.900	439.086.900	(1.595.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	00	Pengembangan Kompetensi ASN	1.706.262.900	991.246.900	(715.016.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	82.775.000	58.775.000	(24.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01 5 1	BELANJA OPERASI	82.775.000	58.775.000	(24.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.775.000	58.775.000	(24.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.900.000	100.900.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	100.900.000	100.900.000	0		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.900.000	100.900.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	05			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.503.888.000	812.872.000	(691.016.000)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.503.888.000	812.872.000	(691.016.000)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.503.888.000	812.872.000	(691.016.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	18.699.900	18.699.900	0		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	BELANJA OPERASI	18.699.900	18.699.900	0		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.699.900	18.699.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	00			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	340.715.000	345.937.000	5.222.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.390.000	208.612.000	36.222.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	172.390.000	208.612.000	36.222.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.390.000	208.612.000	36.222.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	16.075.000	16.075.000	0		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	16.075.000	16.075.000	0		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.075.000	16.075.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07			Pembinaan Disiplin ASN	152.250.000	121.250.000	(31.000.000)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	BELANJA OPERASI	152.250.000	121.250.000	(31.000.000)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.250.000	121.250.000	(31.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.891.976.767	6.646.910.622	754.933.855		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.769.100	58.830.800	11.061.700		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.943.200	7.743.200	800.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	6.943.200	7.743.200	800.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.943.200	7.743.200	800.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.650.000	4.650.000	2.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.650.000	4.650.000	2.000.000		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000	4.650.000	2.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.175.900	46.437.600	8.261.700		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	38.175.900	46.437.600	8.261.700		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.175.900	46.437.600	8.261.700	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.801.380.397	3.803.359.592	1.979.195		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.827.097	3.768.827.192	95		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.768.827.097	3.768.827.192	95		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.768.827.097	3.768.827.192	95	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.299.800	2.749.900	(1.549.900)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.299.800	2.749.900	(1.549.900)		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.299.800	2.749.900	(1.549.900)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.703.500	25.868.500	2.165.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	23.703.500	25.868.500	2.165.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.703.500	25.868.500	2.165.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.550.000	5.914.000	1.364.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	08	5 1	BELANJA OPERASI	4.550.000	5.914.000	1.364.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000	5.914.000	1.364.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.675.000	65.675.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.675.000	65.675.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.05	10	5 1	BELANJA OPERASI	65.675.000	65.675.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.05	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.675.000	65.675.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.322.615.845	1.972.601.505	649.985.660	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.501.445	57.349.950	21.848.505	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	35.501.445	57.349.950	21.848.505	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.501.445	57.349.950	21.848.505	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.442.200	430.409.355	181.967.155	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	117.770.000	157.095.355	39.325.355	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.770.000	157.095.355	39.325.355	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 2	BELANJA MODAL	130.672.200	273.314.000	142.641.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.672.200	273.314.000	142.641.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.310.200	29.310.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	29.310.200	29.310.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.310.200	29.310.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.450.000	97.950.000	(19.500.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	117.450.000	97.950.000	(19.500.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.450.000	97.950.000	(19.500.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.150.000	39.150.000	12.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	27.150.000	39.150.000	12.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000	39.150.000	12.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864.762.000	1.318.432.000	453.670.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	864.762.000	1.318.432.000	453.670.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	864.762.000	1.318.432.000	453.670.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.628.800	438.100.000	(13.528.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.428.800	164.200.000	(28.228.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	192.428.800	164.200.000	(28.228.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.428.800	164.200.000	(28.228.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.200.000	273.900.000	14.700.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	259.200.000	273.900.000	14.700.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	259.200.000	273.900.000	14.700.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.907.625	308.343.725	105.436.100	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.919.500	41.595.000	7.675.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	33.919.500	41.595.000	7.675.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.919.500	41.595.000	7.675.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.850.000	111.410.000	47.560.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	63.850.000	111.410.000	47.560.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.850.000	111.410.000	47.560.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.138.125	155.338.725	50.200.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	105.138.125	155.338.725	50.200.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.138.125	155.338.725	50.200.600	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	517.710.000	517.710.000	0	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	517.710.000	517.710.000	0	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	00			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	517.710.000	517.710.000	0	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	517.710.000	517.710.000	0	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	517.710.000	517.710.000	0	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	517.710.000	517.710.000	0	
Jumlah Belanja								9.958.655.367	9.957.273.022	(1.382.345)		
Total Surplus/(Defisit)								(9.948.655.367)	(9.947.273.022)	1.382.345		
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin


 M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					
						INSPEKTORAT DAERAH	14.229.496.522	16.162.792.332	1.933.295.810	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.289.162.200	4.805.982.200	1.516.820.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.777.992.200	3.838.392.200	1.060.400.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		1.091.762.200	1.397.162.200	305.400.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1	1.091.762.200	1.397.162.200	305.400.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1 02	1.091.762.200	1.397.162.200	305.400.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		459.170.000	633.170.000	174.000.000	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1	459.170.000	633.170.000	174.000.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1 02	459.170.000	633.170.000	174.000.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		146.900.000	172.700.000	25.800.000	
						Reviu Laporan Kinerja				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5 1	146.900.000	172.700.000	25.800.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5 1 02	146.900.000	172.700.000	25.800.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		199.575.000	508.775.000	309.200.000	
						Reviu Laporan Keuangan				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5 1	199.575.000	508.775.000	309.200.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5 1 02	199.575.000	508.775.000	309.200.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05		335.350.000	559.750.000	224.400.000	
						Pengawasan Desa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5 1	335.350.000	559.750.000	224.400.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5 1 02	335.350.000	559.750.000	224.400.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		545.235.000	566.835.000	21.600.000	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5 1	545.235.000	566.835.000	21.600.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5 1 02	545.235.000	566.835.000	21.600.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	511.170.000	967.590.000	456.420.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		17.625.000	21.225.000	3.600.000	
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1	17.625.000	21.225.000	3.600.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1 02	17.625.000	21.225.000	3.600.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		493.545.000	946.365.000	452.820.000	
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1	493.545.000	946.365.000	452.820.000	
						BELANJA OPERASI				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 02	493.545.000	946.365.000	452.820.000	
						Belanja Barang dan Jasa				

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.066.714.000	857.752.300	(208.961.700)				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	57.812.100	57.812.100	0				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	56.383.600	56.383.600	0				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	56.383.600	56.383.600	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.383.600	56.383.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.428.500	1.428.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.428.500	1.428.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.428.500	1.428.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00	Pendampingan dan Asistensi	1.008.901.900	799.940.200	(208.961.700)				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	190.890.000	190.890.000	0				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	190.890.000	190.890.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.890.000	190.890.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	358.000.000	198.880.000	(159.120.000)				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	358.000.000	198.880.000	(159.120.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	358.000.000	198.880.000	(159.120.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	410.170.200	410.170.200	0				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	410.170.200	410.170.200	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	410.170.200	410.170.200	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.841.700	0	(49.841.700)				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	49.841.700	0	(49.841.700)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.841.700	0	(49.841.700)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.873.620.322	10.499.057.832	625.437.510				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.956.700	12.956.700	0				

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.900	1.000.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.900	1.000.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.900	1.000.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.856.900	6.856.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	6.856.900	6.856.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.856.900	6.856.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.900	1.098.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	1.098.900	1.098.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.900	1.098.900	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.596.157.222	7.571.273.532	(24.883.690)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.594.657.222	7.567.273.532	(27.383.690)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	7.594.657.222	7.567.273.532	(27.383.690)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	7.594.657.222	7.567.273.532	(27.383.690)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	2.000.000	1.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	750.000	2.000.000	1.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000	2.000.000	1.250.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000	2.000.000	1.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	750.000	2.000.000	1.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000	2.000.000	1.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.726.200	219.435.400	(12.290.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.500.000	71.500.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	71.500.000	71.500.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000	71.500.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.226.200	147.935.400	(12.290.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	160.226.200	147.935.400	(12.290.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.226.200	147.935.400	(12.290.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.069.500	1.984.787.800	581.718.300	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.189.800	19.189.800	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	29.189.800	19.189.800	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.189.800	19.189.800	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.498.700	94.551.000	10.052.300	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	84.498.700	94.551.000	10.052.300	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.498.700	94.551.000	10.052.300	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.865.500	119.890.500	29.025.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	90.865.500	119.890.500	29.025.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.865.500	119.890.500	29.025.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.248.500	36.328.500	(17.920.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	54.248.500	36.328.500	(17.920.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.248.500	36.328.500	(17.920.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.750.000	26.000.000	12.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	13.750.000	26.000.000	12.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000	26.000.000	12.250.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.130.517.000	1.688.828.000	558.311.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.130.517.000	1.688.828.000	558.311.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.517.000	1.688.828.000	558.311.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.041.000	255.000.000	66.959.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.041.000	255.000.000	66.959.000		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.395.000	1.395.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	1.395.000	1.395.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	186.646.000	253.605.000	66.959.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.646.000	253.605.000	66.959.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.924.800	162.924.800	20.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.724.800	99.724.800	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	99.724.800	99.724.800	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.724.800	99.724.800	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	63.200.000	20.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	43.200.000	63.200.000	20.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000	63.200.000	20.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.744.900	292.679.600	(6.065.300)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.272.900	62.928.200	(22.344.700)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	85.272.900	62.928.200	(22.344.700)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.272.900	62.928.200	(22.344.700)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.022.000	122.818.700	(3.203.300)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	126.022.000	122.818.700	(3.203.300)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.022.000	122.818.700	(3.203.300)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.900.000	70.400.000	2.500.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	67.900.000	70.400.000	2.500.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.900.000	70.400.000	2.500.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.550.000	36.532.700	16.982.700
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	19.550.000	36.532.700	16.982.700

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.550.000	36.532.700	16.982.700	
Jumlah Belanja											14.229.496.522	16.162.792.332	1.933.295.810	
Total Surplus/(Defisit)											(14.229.496.522)	(16.162.792.332)	(1.933.295.810)	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Piani

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	2.293.652.863	2.349.963.963	56.311.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.132.762.863	2.173.315.863	40.553.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	2.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.600.000	2.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.600.000	2.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.271.688	1.374.271.988	300	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.372.958.488	1.372.958.788	300	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.372.958.488	1.372.958.788	300	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.372.958.488	1.372.958.788	300	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	689.000	689.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	689.000	689.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	689.000	689.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	624.200	624.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	624.200	624.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	624.200	624.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.826.675	365.432.375	22.605.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.548.375	3.360.975	(1.187.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.548.375	3.360.975	(1.187.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	4.548.375	3.360.975	(1.187.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.435.400	23.437.500	1.002.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	22.435.400	23.437.500	1.002.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	22.435.400	23.437.500	1.002.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.316.700	35.373.700	1.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	34.316.700	35.373.700	1.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	34.316.700	35.373.700	1.057.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.883.200	12.572.200	689.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	11.883.200	12.572.200	689.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	11.883.200	12.572.200	689.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.643.000	290.688.000	21.045.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			
						BELANJA OPERASI	269.643.000	290.688.000	21.045.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	269.643.000	290.688.000	21.045.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Piani

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.993.100	100.493.100	(11.500.000)			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.193.100	85.193.100	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	85.193.100	85.193.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.193.100	85.193.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.800.000	15.300.000	(11.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	BELANJA MODAL	26.800.000	15.300.000	(11.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.800.000	15.300.000	(11.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.740.000	75.840.000	14.100.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	1.740.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.740.000	1.740.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000	1.740.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	10.200.000	(6.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	16.800.000	10.200.000	(6.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000	10.200.000	(6.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	63.900.000	20.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	43.200.000	63.900.000	20.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000	63.900.000	20.700.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.331.400	254.678.400	15.347.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.264.400	60.289.400	7.025.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	53.264.400	60.289.400	7.025.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.264.400	60.289.400	7.025.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000	12.520.000	7.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.520.000	12.520.000	7.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000	12.520.000	7.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.547.000	181.869.000	1.322.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	180.547.000	181.869.000	1.322.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.435.000	1.435.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.112.000	180.434.000	1.322.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.200.000	69.700.000	26.500.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.200.000	69.700.000	26.500.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	43.200.000	69.700.000	26.500.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Piani

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	43.200.000	69.700.000	26.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000	69.700.000	26.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.740.000	36.340.100	2.600.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.740.000	36.340.100	2.600.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750.000	3.750.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.750.000	3.750.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	3.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.990.000	32.590.100	2.600.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	29.990.000	32.590.100	2.600.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.990.000	32.590.100	2.600.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.250.000	1.908.000	(10.342.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.250.000	1.908.000	(10.342.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.250.000	1.908.000	(10.342.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.250.000	1.908.000	(10.342.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000	1.908.000	(10.342.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.700.000	68.700.000	(3.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.700.000	68.700.000	(3.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39.750.000	36.750.000	(3.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.750.000	36.750.000	(3.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000	36.750.000	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.300.000	4.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.300.000	4.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000	4.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.300.000	4.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.300.000	4.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000	4.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.550.000	3.550.000	0		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Piani

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	3.550.000	3.550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000	3.550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.400.000	5.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	5.400.000	5.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	5.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.400.000	14.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	14.400.000	14.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000	14.400.000	0	
Jumlah Belanja								2.293.652.863	2.349.963.963	56.311.100		
Total Surplus/(Defisit)								(2.293.652.863)	(2.349.963.963)	(56.311.100)		
0	00	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tapin Selatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	5.446.612.086	5.550.362.086	103.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.782.912.286	4.855.922.286	73.010.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.894.500	5.894.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.894.500	5.894.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	5.894.500	5.894.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	5.894.500	5.894.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.372.016	2.824.529.366	(4.842.650)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.207.016	2.820.364.366	(4.842.650)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.825.207.016	2.820.364.366	(4.842.650)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	2.825.207.016	2.820.364.366	(4.842.650)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.365.000	2.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.365.000	2.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.365.000	2.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.671.900	415.364.550	67.692.650	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.337.700	6.386.200	4.048.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.337.700	6.386.200	4.048.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.337.700	6.386.200	4.048.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.586.900	46.526.650	30.939.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	15.586.900	18.362.900	2.776.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	15.586.900	18.362.900	2.776.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2			
						BELANJA MODAL	0	28.163.750	28.163.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	2	02		
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	28.163.750	28.163.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.714.200	41.754.200	3.040.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	38.714.200	41.754.200	3.040.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	38.714.200	41.754.200	3.040.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.151.100	7.565.500	414.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	7.151.100	7.565.500	414.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	7.151.100	7.565.500	414.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.882.000	313.132.000	29.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1			
						BELANJA OPERASI	283.882.000	313.132.000	29.250.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tapin Selatan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	283.882.000	313.132.000	29.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.804.200	75.606.700	(49.197.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.804.200	75.606.700	(49.197.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	124.804.200	75.606.700	(49.197.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.804.200	75.606.700	(49.197.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.447.000	197.866.800	53.419.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.914.000	1.914.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.914.000	1.914.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.914.000	1.914.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.133.000	30.100.200	3.967.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.133.000	30.100.200	3.967.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.133.000	30.100.200	3.967.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.400.000	165.852.600	49.452.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	116.400.000	165.852.600	49.452.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000	165.852.600	49.452.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.330.722.670	1.336.660.370	5.937.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.979.000	43.916.700	5.937.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.979.000	43.916.700	5.937.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.979.000	43.916.700	5.937.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000	4.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.100.000	4.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000	4.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.288.643.670	1.288.643.670	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.288.643.670	1.288.643.670	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.643.670	1.288.643.670	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.800.000	65.550.000	36.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	00				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28.800.000	65.550.000	36.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	28.800.000	65.550.000	36.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.800.000	65.550.000	36.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	65.550.000	36.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	593.049.800	598.939.700	5.889.900	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tapin Selatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.549.800	55.539.700	7.989.900			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.150.000	4.150.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.150.000	4.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	4.150.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.399.800	51.389.700	7.989.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	43.399.800	51.389.700	7.989.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.399.800	51.389.700	7.989.900
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	545.500.000	543.400.000	(2.100.000)			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	355.000.000	355.000.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	355.000.000	355.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	355.000.000	355.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190.500.000	188.400.000	(2.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	190.500.000	188.400.000	(2.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.500.000	188.400.000	(2.100.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.030.000	3.130.100	(11.899.900)			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.030.000	3.130.100	(11.899.900)			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.030.000	3.130.100	(11.899.900)			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.030.000	3.130.100	(11.899.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000	3.130.100	(11.899.900)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	0.00	00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.820.000	26.820.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.820.000	26.820.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.990.000	3.990.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.990.000	3.990.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000	3.990.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.980.000	4.980.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.980.000	4.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000	4.980.000	0

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tapin Selatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.650.000	3.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	07	BELANJA OPERASI	3.650.000	3.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	07	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000	3.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.720.000	3.720.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	BELANJA OPERASI	3.720.000	3.720.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000	3.720.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.480.000	10.480.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	17	BELANJA OPERASI	10.480.000	10.480.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	17	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000	10.480.000	0	
Jumlah Belanja							5.446.612.086	5.550.362.086	103.750.000	
Total Surplus/(Defisit)							(5.446.612.086)	(5.550.362.086)	(103.750.000)	
0	00	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Binuang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							Jumlah Pendapatan	0	0	0			
0	00	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5	BELANJA						
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00		KECAMATAN	6.515.895.249	6.617.088.049	101.192.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.545.764.849	4.564.868.849	19.104.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	4.150.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.150.000	4.150.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	4.150.000	4.150.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	4.150.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.699.140.629	3.701.540.729	2.400.100			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.696.140.629	3.696.140.729	100			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.696.140.629	3.696.140.729	100		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.696.140.629	3.696.140.729	100	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	2.700.000	1.050.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.650.000	2.700.000	1.050.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000	2.700.000	1.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000	2.700.000	1.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.350.000	2.700.000	1.350.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	2.700.000	1.350.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.211.600	507.279.700	4.068.100			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.585.600	5.355.600	770.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.585.600	5.355.600	770.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.585.600	5.355.600	770.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.546.700	26.546.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	26.546.700	26.546.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.546.700	26.546.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.444.000	65.629.000	(2.815.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	68.444.000	65.629.000	(2.815.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.444.000	65.629.000	(2.815.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.124.300	13.647.400	3.523.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	10.124.300	13.647.400	3.523.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.124.300	13.647.400	3.523.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.511.000	396.101.000	2.590.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	393.511.000	396.101.000	2.590.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	393.511.000	396.101.000	2.590.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.104.820	150.558.020	2.453.200			

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Binuang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.570.100	114.963.100	18.393.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	1.285.000	0	(1.285.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 1 01	Belanja Pegawai	1.285.000	0	(1.285.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	95.285.100	114.963.100	19.678.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.285.100	114.963.100	19.678.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.689.800	20.750.000	(15.939.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 1	BELANJA OPERASI	0	1.750.000	1.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.750.000	1.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	36.689.800	19.000.000	(17.689.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.689.800	19.000.000	(17.689.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.844.920	14.844.920	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	5 1	BELANJA OPERASI	14.844.920	14.844.920	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.844.920	14.844.920	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.700.800	114.930.600	1.229.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000	2.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.900.000	2.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000	2.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.200.800	35.830.600	(17.370.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	53.200.800	35.830.600	(17.370.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.200.800	35.830.600	(17.370.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	76.200.000	18.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	57.600.000	76.200.000	18.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000	76.200.000	18.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.457.000	86.409.800	8.952.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.481.300	77.434.100	8.952.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	68.481.300	77.434.100	8.952.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.481.300	77.434.100	8.952.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.975.000	2.975.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.975.000	2.975.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000	2.975.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.700	6.000.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	6.000.700	6.000.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.700	6.000.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	77.192.800	41.192.800	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Binuang

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	77.192.800	41.192.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	77.192.800	41.192.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000	77.192.800	41.192.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	77.192.800	41.192.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	0.00	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.887.871.900	1.929.911.900	42.040.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.422.700	66.922.700	28.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.150.000	2.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	2.150.000	2.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000	2.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.272.700	64.772.700	28.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03 5 1	BELANJA OPERASI	36.272.700	64.772.700	28.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.272.700	64.772.700	28.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.849.449.200	1.862.989.200	13.540.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.182.249.200	1.158.789.200	(23.460.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 1	BELANJA OPERASI	986.109.200	11.210.000	(974.899.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000	11.210.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 1 05	Belanja Hibah	974.899.200	0	(974.899.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 2	BELANJA MODAL	196.140.000	1.147.579.200	951.439.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.140.000	382.940.000	186.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	764.639.200	764.639.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	667.200.000	704.200.000	37.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03 5 1	BELANJA OPERASI	667.200.000	704.200.000	37.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	667.200.000	704.200.000	37.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.569.000	24.425.000	(1.144.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.569.000	24.425.000	(1.144.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.569.000	24.425.000	(1.144.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	25.569.000	24.425.000	(1.144.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.569.000	24.425.000	(1.144.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Binuang

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.689.500	20.689.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.689.500	20.689.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.970.000	1.970.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	1.970.000	1.970.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000	1.970.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.985.000	1.985.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	07	5	BELANJA OPERASI	1.985.000	1.985.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	07	5	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000	1.985.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.734.500	2.734.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	11	5	BELANJA OPERASI	2.734.500	2.734.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	11	5	Belanja Barang dan Jasa	2.734.500	2.734.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	17	5	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	17	5	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
Jumlah Belanja								6.515.895.249	6.617.088.049	101.192.800	
Total Surplus/(Defisit)								(6.515.895.249)	(6.617.088.049)	(101.192.800)	
0	00	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Bungur

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	3.021.363.405	3.082.863.405	61.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.875.406.105	2.919.026.105	43.620.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.080.000	5.080.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.080.000	5.080.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	5.080.000	5.080.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	5.080.000	5.080.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.857.327.145	1.857.327.145	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.854.102.145	1.854.102.145	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.854.102.145	1.854.102.145	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.854.102.145	1.854.102.145	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.848.500	1.848.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.848.500	1.848.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.848.500	1.848.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.376.500	1.376.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.376.500	1.376.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.376.500	1.376.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.225.000	385.199.300	21.974.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.675.600	13.124.800	7.449.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	5.675.600	13.124.800	7.449.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	5.675.600	13.124.800	7.449.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.196.900	20.434.900	238.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	20.196.900	20.434.900	238.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	20.196.900	20.434.900	238.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.694.700	52.274.700	3.580.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	48.694.700	52.274.700	3.580.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	48.694.700	52.274.700	3.580.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.343.800	10.866.900	1.523.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	9.343.800	10.866.900	1.523.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	9.343.800	10.866.900	1.523.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.314.000	288.498.000	9.184.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1			
						BELANJA OPERASI	279.314.000	288.498.000	9.184.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	279.314.000	288.498.000	9.184.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Bungur

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.480.200	160.129.800	(6.350.400)			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.890.600	75.954.500	(5.936.100)			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	81.890.600	75.954.500	(5.936.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.890.600	75.954.500	(5.936.100)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.589.600	84.175.300	(414.300)			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	84.589.600	84.175.300	(414.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.589.600	84.175.300	(414.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.760.860	90.740.160	23.979.300			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3.480.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.480.000	3.480.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000	3.480.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.480.860	34.480.860	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	34.480.860	34.480.860	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.480.860	34.480.860	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	52.779.300	23.979.300			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	28.800.000	52.779.300	23.979.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	52.779.300	23.979.300
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.532.900	420.549.700	4.016.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.916.900	26.933.700	1.016.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	25.916.900	26.933.700	1.016.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.916.900	26.933.700	1.016.800
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	9.000.000	3.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.000.000	9.000.000	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	9.000.000	3.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	384.616.000	384.616.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	384.616.000	384.616.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	384.616.000	384.616.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.600.000	72.600.000	33.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.600.000	72.600.000	33.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	39.600.000	72.600.000	33.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.600.000	72.600.000	33.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Bungur

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000	72.600.000	33.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.749.900	46.549.900	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	00				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.749.900	46.549.900	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.149.900	42.949.900	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	38.149.900	42.949.900	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.149.900	42.949.900	4.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.920.000	0	(19.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	00				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.920.000	0	(19.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.920.000	0	(19.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.920.000	0	(19.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000	0	(19.920.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.687.400	44.687.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	00				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.687.400	44.687.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	01				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.900.000	6.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	6.900.000	6.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000	6.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	04				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.292.400	4.292.400	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Bungur

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.650.000	10.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	10.650.000	10.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000	10.650.000	0	
Jumlah Belanja								3.021.363.405	3.082.863.405	61.500.000		
Total Surplus/(Defisit)								(3.021.363.405)	(3.082.863.405)	(61.500.000)		
0	00	7.01.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Bungur

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000	4.290.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000	5.140.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.650.000	10.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	10.650.000	10.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000	10.650.000	0	
Jumlah Belanja								3.021.363.405	3.082.863.405	61.500.000		
Total Surplus/(Defisit)								(3.021.363.405)	(3.082.863.405)	(61.500.000)		
0	00	7.01.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Tapin Utara

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	8.123.182.504	8.259.484.604	136.302.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.500.352.391	5.539.352.391	39.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.445.000	6.445.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.445.000	6.445.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.445.000	6.445.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.445.000	6.445.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.967.035.991	4.967.035.991	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.485.991	4.964.485.991	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.964.485.991	4.964.485.991	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	4.964.485.991	4.964.485.991	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.275.000	1.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.725.700	329.363.800	35.638.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.469.100	3.469.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	3.469.100	3.469.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	3.469.100	3.469.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.621.400	19.321.400	2.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	16.621.400	19.321.400	2.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	16.621.400	19.321.400	2.700.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.345.000	27.600.000	(1.745.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	29.345.000	27.600.000	(1.745.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	29.345.000	27.600.000	(1.745.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.565.300	9.505.500	940.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	8.565.300	9.505.500	940.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	8.565.300	9.505.500	940.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	07					
						Penyediaan Bahan/Material	6.236.900	5.619.800	(617.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.236.900	5.619.800	(617.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.236.900	5.619.800	(617.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.488.000	263.848.000	34.360.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Tapin Utara

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	229.488.000	263.848.000	34.360.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	229.488.000	263.848.000	34.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.535.100	43.828.800	(2.706.300)		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.535.100	43.828.800	(2.706.300)		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	46.535.100	43.828.800	(2.706.300)		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.535.100	43.828.800	(2.706.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.122.100	85.622.100	2.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.116.900	31.116.900	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	31.116.900	31.116.900	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.116.900	31.116.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.005.200	54.505.200	2.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	52.005.200	54.505.200	2.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.005.200	54.505.200	2.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.488.500	107.056.700	3.568.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.528.500	21.096.700	3.568.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	17.528.500	21.096.700	3.568.200		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.528.500	21.096.700	3.568.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.040.000	6.040.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.040.000	6.040.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000	6.040.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.920.000	79.920.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	79.920.000	79.920.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.920.000	79.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.600.000	105.902.100	66.302.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.600.000	105.902.100	66.302.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.600.000	105.902.100	66.302.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	39.600.000	105.902.100	66.302.100		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000	105.902.100	66.302.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.552.750.113	2.589.150.113	36.400.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	00			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.545.000	53.745.000	13.200.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Tapin Utara

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.900.000	3.900.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.900.000	3.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	3.900.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.645.000	49.845.000	13.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	36.645.000	49.845.000	13.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.645.000	49.845.000	13.200.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	00			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.512.205.113	2.535.405.113	23.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.215.600	1.215.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.215.600	1.215.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.600	1.215.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.523.705.413	1.503.705.413	(20.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.667.900	49.667.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	11.565.000	11.565.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.102.900	38.102.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	1.474.037.513	1.454.037.513	(20.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000	0	(20.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.454.037.513	1.454.037.513	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	984.084.100	1.028.084.100	44.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	984.084.100	1.028.084.100	44.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	984.084.100	1.028.084.100	44.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	3.200.000	2.400.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	3.200.000	2.400.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000	2.400.000	(800.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.480.000	25.080.000	(5.400.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.480.000	25.080.000	(5.400.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Tapin Utara

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	04			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	2.380.000	(800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	10.800.000	(600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	11.400.000	10.800.000	(600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000	10.800.000	(600.000)	
Jumlah Belanja								8.123.182.504	8.259.484.604	136.302.100		
Total Surplus/(Defisit)								(8.123.182.504)	(8.259.484.604)	(136.302.100)		
0	00	7.01.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bakarangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	3.010.492.166	3.177.442.166	166.950.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.890.987.466	3.044.179.966	153.192.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.260.000	29.420.000	160.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.260.000	29.420.000	160.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	29.260.000	29.420.000	160.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	29.260.000	29.420.000	160.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.115.666	1.909.534.766	419.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.715.666	1.906.134.766	419.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.905.715.666	1.906.134.766	419.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.905.715.666	1.906.134.766	419.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.525.000	2.525.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.525.000	2.525.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.525.000	2.525.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	875.000	875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	875.000	875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	875.000	875.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.057.800	419.214.900	120.157.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.705.500	6.705.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.705.500	6.705.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.705.500	6.705.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.845.700	15.845.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	15.845.700	15.845.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	15.845.700	15.845.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.938.600	62.441.900	8.503.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	44.352.600	37.997.600	(6.355.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	44.352.600	37.997.600	(6.355.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2			
						BELANJA MODAL	9.586.000	24.444.300	14.858.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	2	02		
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.586.000	24.444.300	14.858.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.028.000	9.179.800	1.151.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	8.028.000	9.179.800	1.151.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	8.028.000	9.179.800	1.151.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.540.000	325.042.000	110.502.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1			
						BELANJA OPERASI	214.540.000	325.042.000	110.502.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bakarangan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.540.000	325.042.000	110.502.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.511.000	108.690.900	18.179.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	17.464.700	15.644.600	(1.820.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	17.464.700	15.644.600	(1.820.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.464.700	15.644.600	(1.820.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.046.300	93.046.300	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	73.046.300	93.046.300	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.046.300	93.046.300	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.861.200	78.227.900	21.366.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.660.800	2.320.000	(3.340.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.660.800	2.320.000	(3.340.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.660.800	2.320.000	(3.340.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.400.400	25.400.400	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	22.400.400	25.400.400	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.400	25.400.400	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	50.507.500	21.707.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	28.800.000	50.507.500	21.707.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	50.507.500	21.707.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.181.800	499.091.500	(7.090.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.839.800	43.523.500	4.683.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	38.839.800	43.523.500	4.683.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.839.800	43.523.500	4.683.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	10.900.000	4.690.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.210.000	10.900.000	4.690.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000	10.900.000	4.690.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	461.132.000	444.668.000	(16.464.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	461.132.000	444.668.000	(16.464.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	461.132.000	444.668.000	(16.464.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	60.000.000	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	00				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	60.000.000	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	60.000.000	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.000.000	60.000.000	24.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bakarangan

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	60.000.000	24.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.684.700	41.684.700	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	00				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.684.700	41.684.700	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.684.700	41.684.700	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.684.700	41.684.700	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.684.700	41.684.700	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.470.000	3.227.500	(15.242.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	00				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.470.000	3.227.500	(15.242.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.470.000	3.227.500	(15.242.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.470.000	3.227.500	(15.242.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.470.000	3.227.500	(15.242.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.350.000	28.350.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	00				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.350.000	28.350.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	01				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	3.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	07				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000	4.280.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.550.000	4.550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	4.550.000	4.550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000	4.550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	17				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.640.000	11.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	11.640.000	11.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000	11.640.000	0	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bakarangan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Belanja	3.010.492.166	3.177.442.166	166.950.000	
	Total Surplus/(Defisit)	(3.010.492.166)	(3.177.442.166)	(166.950.000)	
0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Tapin


M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Usuran Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	3.337.529.843	3.410.944.643	73.414.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.912.635.343	3.056.299.143	143.663.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.300	6.250.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.300	6.250.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.250.300	6.250.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.250.300	6.250.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.703.243	1.837.703.243	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.834.235.143	1.834.235.143	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.834.235.143	1.834.235.143	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.834.235.143	1.834.235.143	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.007.700	2.007.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.007.700	2.007.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.007.700	2.007.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.460.400	1.460.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.460.400	1.460.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.460.400	1.460.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.474.200	489.794.600	139.320.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.600	8.414.600	(1.530.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	9.944.600	8.414.600	(1.530.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	9.944.600	8.414.600	(1.530.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.975.400	40.991.800	16.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	40.975.400	40.991.800	16.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	40.975.400	40.991.800	16.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.299.300	54.609.300	1.310.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	53.299.300	54.609.300	1.310.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	53.299.300	54.609.300	1.310.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.142.900	21.916.900	2.774.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	19.142.900	21.916.900	2.774.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	19.142.900	21.916.900	2.774.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	08					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	08	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	08	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.612.000	359.362.000	136.750.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	222.612.000	359.362.000	136.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.612.000	359.362.000	136.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.775.700	131.203.500	(29.572.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.348.600	61.776.400	(29.572.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	91.348.600	61.776.400	(29.572.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.348.600	61.776.400	(29.572.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.427.100	69.427.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	69.427.100	69.427.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.427.100	69.427.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.873.600	65.375.200	16.501.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.507.600	6.809.200	301.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.507.600	6.809.200	301.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.507.600	6.809.200	301.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.366.000	18.366.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	18.366.000	18.366.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.366.000	18.366.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	40.200.000	16.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	24.000.000	40.200.000	16.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	40.200.000	16.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.558.300	525.972.300	17.414.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.238.300	70.613.100	24.374.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	46.238.300	70.613.100	24.374.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.238.300	70.613.100	24.374.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.320.000	11.360.000	(6.960.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	18.320.000	11.360.000	(6.960.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.320.000	11.360.000	(6.960.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	444.000.000	443.999.200	(800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	444.000.000	443.999.200	(800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000	443.999.200	(800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.219.200	80.634.000	43.414.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	37.219.200	80.634.000	43.414.800	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.219.200	80.634.000	43.414.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	37.219.200	80.634.000	43.414.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.219.200	80.634.000	43.414.800
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.272.600	92.022.600	(6.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	00			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98.272.600	92.022.600	(6.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.600	6.599.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.599.600	6.599.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.599.600	6.599.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.673.000	85.423.000	(6.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	91.673.000	85.423.000	(6.250.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.673.000	85.423.000	(6.250.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.707.400	4.893.600	(23.813.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.707.400	4.893.600	(23.813.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.707.400	4.893.600	(23.813.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	28.707.400	4.893.600	(23.813.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.707.400	4.893.600	(23.813.800)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.695.300	177.095.300	(83.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260.695.300	177.095.300	(83.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	26.476.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	26.476.400	26.476.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.476.400	26.476.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	12.144.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	12.144.800	12.144.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.144.800	12.144.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.163.200	18.663.200	(5.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	24.163.200	18.663.200	(5.500.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.163.200	18.663.200	(5.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	06				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	07				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	09				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90.600.000	49.900.000	(40.700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	90.600.000	49.900.000	(40.700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000	49.900.000	(40.700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.384.500	6.384.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	6.384.500	6.384.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.384.500	6.384.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	17				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	86.800.000	49.400.000	(37.400.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	86.800.000	49.400.000	(37.400.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	06	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.800.000	49.400.000	(37.400.000)	
Jumlah Belanja									3.337.529.843	3.410.944.643	73.414.800		
Total Surplus/(Defisit)									(3.337.529.843)	(3.410.944.643)	(73.414.800)		
0	00	7.01.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arlin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	2.994.741.757	3.087.640.957	92.899.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.596.990.557	2.787.365.557	190.375.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.150.000	5.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.150.000	5.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	5.150.000	5.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	5.150.000	5.150.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.049.144.557	2.050.157.479	1.012.922	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.045.711.657	2.046.724.579	1.012.922	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.045.711.657	2.046.724.579	1.012.922	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	2.045.711.657	2.046.724.579	1.012.922	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.617.900	1.617.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.617.900	1.617.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.617.900	1.617.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.815.000	1.815.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.815.000	1.815.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.815.000	1.815.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.561.700	376.371.200	39.809.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.081.900	6.081.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	6.081.900	6.081.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	6.081.900	6.081.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.772.100	15.772.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	15.772.100	15.772.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	15.772.100	15.772.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.688.600	73.658.100	13.969.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	59.688.600	73.658.100	13.969.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	59.688.600	73.658.100	13.969.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.753.100	11.753.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.916.300	4.916.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	4.916.300	4.916.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	2			
						BELANJA MODAL	6.836.800	6.836.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	2	02		
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.836.800	6.836.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	08					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	08	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.766.000	264.606.000	25.840.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	238.766.000	264.606.000	25.840.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.766.000	264.606.000	25.840.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.601.100	163.118.828	60.517.728	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	10.148.400	10.148.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	10.148.400	10.148.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.148.400	10.148.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.152.900	52.652.900	2.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	50.152.900	52.652.900	2.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.152.900	52.652.900	2.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.750.000	20.000.000	(3.750.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	23.750.000	20.000.000	(3.750.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.750.000	20.000.000	(3.750.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.549.800	80.317.528	61.767.728	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11	5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000	66.767.728	61.767.728	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	66.767.728	61.767.728	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11	5 2	BELANJA MODAL	13.549.800	13.549.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.549.800	13.549.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.254.000	102.249.700	43.995.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.176.000	4.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.176.000	4.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.176.000	4.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.078.000	27.686.400	9.608.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	18.078.000	27.686.400	9.608.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.078.000	27.686.400	9.608.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	70.387.300	34.387.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000	70.387.300	34.387.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	70.387.300	34.387.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.279.200	90.318.350	45.039.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.523.900	56.463.050	21.939.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.523.900	56.463.050	21.939.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.523.900	56.463.050	21.939.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.755.300	33.855.300	23.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5 2	BELANJA MODAL	4.755.300	27.855.300	23.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.755.300	27.855.300	23.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.092.000	176.066.200	67.974.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	00		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	28.892.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	28.892.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	28.892.000	28.892.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.892.000	28.892.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	79.200.000	147.174.200	67.974.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.200.000	147.174.200	67.974.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	79.200.000	147.174.200	67.974.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000	147.174.200	67.974.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.788.200	66.931.500	(38.856.700)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	00		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105.788.200	66.931.500	(38.856.700)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.800	0	(6.599.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	6.599.800	0	(6.599.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.599.800	0	(6.599.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.188.400	66.931.500	(32.256.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	99.188.400	66.931.500	(32.256.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.188.400	66.931.500	(32.256.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.773.600	3.304.000	(25.469.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.773.600	3.304.000	(25.469.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.773.600	3.304.000	(25.469.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	28.773.600	3.304.000	(25.469.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.773.600	3.304.000	(25.469.600)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	0.00	00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155.097.400	53.973.700	(101.123.700)				
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155.097.400	53.973.700	(101.123.700)				
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)				
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)			
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
Jumlah Belanja							2.994.741.757	3.087.640.957	92.899.200				
Total Surplus/(Defisit)							(2.994.741.757)	(3.087.640.957)	(92.899.200)				
0	00	7.01.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0				
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0				

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	0.00	00					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155.097.400	53.973.700	(101.123.700)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	00					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155.097.400	53.973.700	(101.123.700)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.476.400	5.919.000	(20.557.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.144.800	10.872.500	(1.272.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.413.200	6.429.000	(14.984.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.613.200	6.613.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.513.200	7.513.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09	5	1			BELANJA OPERASI	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.300.000	2.288.400	(27.011.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.338.400	5.338.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17	5	1			BELANJA OPERASI	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	46.298.200	9.000.000	(37.298.200)	
Jumlah Belanja											2.994.741.757	3.087.640.957	92.899.200	
Total Surplus/(Defisit)											(2.994.741.757)	(3.087.640.957)	(92.899.200)	
0	00	7.01.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Hatungun

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	5				
										BELANJA
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00					KECAMATAN
							2.951.359.069	3.011.359.069	60.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
							2.818.859.069	2.858.959.069	40.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							6.500.000	10.000.000	3.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06		6.500.000	10.000.000	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	6.500.000	10.000.000	3.500.000	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	6.500.000	10.000.000	3.500.000	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							1.801.874.269	1.801.874.269	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01		1.799.874.269	1.799.874.269	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1.799.874.269	1.799.874.269	0	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1.799.874.269	1.799.874.269	0	Belanja Pegawai
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05		1.000.000	1.000.000	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1.000.000	1.000.000	0	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1.000.000	1.000.000	0	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	07		1.000.000	1.000.000	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	07	5	1.000.000	1.000.000	0	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	07	5	1.000.000	1.000.000	0	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah
							383.980.800	406.877.900	22.897.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01		10.000.000	10.000.000	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	10.000.000	10.000.000	0	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	10.000.000	10.000.000	0	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02		20.000.000	20.000.000	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	20.000.000	20.000.000	0	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	20.000.000	20.000.000	0	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04		40.390.800	48.177.900	7.787.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	40.390.800	48.177.900	7.787.100	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	04	5	40.390.800	48.177.900	7.787.100	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05		6.000.000	8.000.000	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	6.000.000	8.000.000	2.000.000	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	6.000.000	8.000.000	2.000.000	Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09		307.590.000	320.700.000	13.110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	307.590.000	320.700.000	13.110.000	BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	307.590.000	320.700.000	13.110.000	Belanja Barang dan Jasa

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Hatungun

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.213.000	97.528.900	(11.684.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.213.000	97.528.900	(11.684.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	(11.684.100)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(11.684.100)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.897.200	70.497.200	20.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.097.200	3.097.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	49.400.000	20.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	20.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.393.800	472.180.800	4.787.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.373.800	62.160.800	4.787.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.787.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.787.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.020.000	10.020.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	66.000.000	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	66.000.000	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	66.000.000	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	0.00	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000	50.000.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	50.000.000	5.000.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Hatungun

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.500.000	2.500.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.500.000	47.500.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.500.000	47.500.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000	47.500.000	5.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	9.900.000	(15.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	9.900.000	(15.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	9.900.000	(15.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	25.000.000	9.900.000	(15.100.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	9.900.000	(15.100.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.000	26.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000	26.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	09			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Hatungun

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.500.000	0	
Jumlah Belanja								2.951.359.069	3.011.359.069	60.000.000		
Total Surplus/(Defisit)								(2.951.359.069)	(3.011.359.069)	(60.000.000)		
0	00	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Salam Babaris

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	2.971.053.441	3.031.053.441	60.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.770.259.441	2.857.663.941	87.404.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.300	16.550.300	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	02		2.050.000	2.050.000	0	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	02	5	2.050.000	2.050.000	0	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	02	5	2.050.000	2.050.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	03		1.960.000	1.960.000	0	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	03	5	1.960.000	1.960.000	0	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	03	5	1.960.000	1.960.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06		6.540.300	12.540.300	6.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	6.540.300	12.540.300	6.000.000	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	6.540.300	12.540.300	6.000.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.413.141	1.845.333.141	(80.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01		1.838.703.441	1.838.703.441	0	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1.838.703.441	1.838.703.441	0	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1.838.703.441	1.838.703.441	0	
						Belanja Pegawai				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05		2.874.700	2.794.700	(80.000)	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5	2.874.700	2.794.700	(80.000)	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5	2.874.700	2.794.700	(80.000)	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	07		3.835.000	3.835.000	0	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	07	5	3.835.000	3.835.000	0	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	07	5	3.835.000	3.835.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.927.200	350.880.000	(13.047.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01		4.303.300	5.878.300	1.575.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	4.303.300	5.878.300	1.575.000	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	4.303.300	5.878.300	1.575.000	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02		32.352.600	38.351.100	5.998.500	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	32.352.600	38.351.100	5.998.500	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	32.352.600	38.351.100	5.998.500	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04		78.657.000	39.357.000	(39.300.000)	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5	78.657.000	39.357.000	(39.300.000)	
						BELANJA OPERASI				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5	78.657.000	39.357.000	(39.300.000)	
						Belanja Barang dan Jasa				
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05		6.540.300	7.335.600	795.300	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Salam Babaris

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	6.540.300	7.335.600	795.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.300	7.335.600	795.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.074.000	259.958.000	17.884.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	242.074.000	259.958.000	17.884.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.074.000	259.958.000	17.884.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.346.400	97.616.800	44.270.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.346.400	97.616.800	44.270.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	53.346.400	97.616.800	44.270.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.346.400	97.616.800	44.270.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.938.000	80.241.000	25.303.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	4.640.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.640.000	4.640.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000	4.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	11.100.000	300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	10.800.000	11.100.000	300.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000	11.100.000	300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.498.000	64.501.000	25.003.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	39.498.000	64.501.000	25.003.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.498.000	64.501.000	25.003.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.084.400	467.042.700	24.958.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.432.400	47.126.700	11.694.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.432.400	47.126.700	11.694.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.432.400	47.126.700	11.694.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.460.000	8.210.000	1.750.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.460.000	8.210.000	1.750.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000	8.210.000	1.750.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.192.000	411.706.000	11.514.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	400.192.000	411.706.000	11.514.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	400.192.000	411.706.000	11.514.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	94.130.600	20.130.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	00			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	1.840.000	(160.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	1.840.000	(160.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	1.840.000	(160.000)		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Salam Babarisi

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.840.000	(160.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72.000.000	92.290.600	20.290.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	92.290.600	20.290.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	72.000.000	92.290.600	20.290.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	92.290.600	20.290.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.604.000	56.603.900	4.999.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	00		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.604.000	56.603.900	4.999.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.840.000	2.840.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.840.000	2.840.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000	2.840.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.764.000	53.763.900	4.999.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	48.764.000	53.763.900	4.999.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.764.000	53.763.900	4.999.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.160.000	2.625.000	(52.535.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.160.000	2.625.000	(52.535.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.160.000	2.625.000	(52.535.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	55.160.000	2.625.000	(52.535.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.160.000	2.625.000	(52.535.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.030.000	20.030.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.030.000	20.030.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.270.000	2.270.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.270.000	2.270.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000	2.270.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.360.000	6.360.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Salam Babaris

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	6.360.000	6.360.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000	6.360.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	11.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	11.400.000	11.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000	11.400.000	0	
Jumlah Belanja								2.971.053.441	3.031.053.441	60.000.000		
Total Surplus/(Defisit)								(2.971.053.441)	(3.031.053.441)	(60.000.000)		
0	00	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tapin Tengah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00					
						KECAMATAN	2.971.705.968	3.032.305.968	60.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	0.00	00					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.015.968	2.861.575.968	46.560.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	00					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.850.000	11.241.000	1.391.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.850.000	11.241.000	1.391.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	9.850.000	11.241.000	1.391.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	9.850.000	11.241.000	1.391.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	00					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.642.968	1.934.643.303	335	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.017.968	1.926.018.303	335	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.926.017.968	1.926.018.303	335	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.926.017.968	1.926.018.303	335	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.675.000	3.675.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	3.675.000	3.675.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	3.675.000	3.675.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	07					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.950.000	4.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	07	5	1			
						BELANJA OPERASI	4.950.000	4.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	07	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	4.950.000	4.950.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	00					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.131.700	452.983.300	59.851.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.600	5.106.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	5.106.600	5.106.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	5.106.600	5.106.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.285.900	40.570.300	3.284.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	37.285.900	40.570.300	3.284.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	37.285.900	40.570.300	3.284.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.266.300	49.266.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	49.266.300	49.266.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	49.266.300	49.266.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.320.900	11.366.100	1.045.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	10.320.900	11.366.100	1.045.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	10.320.900	11.366.100	1.045.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	08					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.475.000	2.475.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	08	5	1			
						BELANJA OPERASI	2.475.000	2.475.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	08	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	2.475.000	2.475.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.677.000	344.199.000	55.522.000	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tapin Tengah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	288.677.000	344.199.000	55.522.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	288.677.000	344.199.000	55.522.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.213.400	290.722.500	(37.490.900)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.213.400	290.722.500	(37.490.900)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.400.000	5.400.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	5.400.000	5.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	322.813.400	285.322.500	(37.490.900)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.838.800	271.038.800	(24.800.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.974.600	14.283.700	(12.690.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.122.400	126.522.365	18.399.965		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.322.400	1.821.200	498.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.322.400	1.821.200	498.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.322.400	1.821.200	498.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000	22.482.000	(12.318.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	34.800.000	22.482.000	(12.318.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000	22.482.000	(12.318.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	102.219.165	30.219.165		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	72.000.000	102.219.165	30.219.165		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	102.219.165	30.219.165	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.055.500	45.463.500	4.408.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.865.500	33.413.500	548.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	32.865.500	33.413.500	548.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.865.500	33.413.500	548.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.190.000	12.050.000	3.860.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.190.000	12.050.000	3.860.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.190.000	12.050.000	3.860.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.600.000	57.600.000	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.600.000	57.600.000	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.600.000	57.600.000	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	21.600.000	57.600.000	36.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	57.600.000	36.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.498.000	58.863.000	10.365.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tapin Tengah

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.598.000	45.963.000	10.365.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.960.000	5.960.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	5.960.000	5.960.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000	5.960.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.638.000	40.003.000	10.365.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	29.638.000	40.003.000	10.365.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.638.000	40.003.000	10.365.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.03	00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.900.000	12.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.900.000	12.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.03	04	5 1	BELANJA OPERASI	12.900.000	12.900.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.03	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000	12.900.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.792.000	2.467.000	(32.325.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.792.000	2.467.000	(32.325.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.792.000	2.467.000	(32.325.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.792.000	2.467.000	(32.325.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.792.000	2.467.000	(32.325.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	0.00	00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.800.000	51.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.800.000	51.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.300.000	7.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	7.300.000	7.300.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000	7.300.000	0

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Tapin Tengah

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5 1	BELANJA OPERASI	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000	15.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	17	5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
Jumlah Belanja								2.971.705.968	3.032.305.968	60.600.000	
Total Surplus/(Defisit)								(2.971.705.968)	(3.032.305.968)	(60.600.000)	
0	00	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Usuran Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12 Kecamatan Lokpaikat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan							0	0	0	
0	00	7.01.7.01.0.00.12.0000	00	0.00	00	5				BELANJA
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	00	0.00	00					KECAMATAN
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12 Kecamatan Lokpaikat

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	177.179.900	177.179.900	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.179.900	177.179.900	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.197.700	41.197.700	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	41.197.700	41.197.700	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.197.700	41.197.700	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.236.200	123.636.200	18.400.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3.480.000	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.480.000	3.480.000	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000	3.480.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.156.200	44.156.200	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	44.156.200	44.156.200	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.156.200	44.156.200	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	76.000.000	18.400.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	57.600.000	76.000.000	18.400.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000	76.000.000	18.400.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.234.835	324.779.635	6.544.800		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.472.400	41.457.200	1.984.800		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.472.400	41.457.200	1.984.800		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.472.400	41.457.200	1.984.800	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	7.450.000	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.450.000	7.450.000	0		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000	7.450.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.312.435	275.872.435	4.560.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	271.312.435	275.872.435	4.560.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	271.312.435	275.872.435	4.560.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.200.000	75.728.000	32.528.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.200.000	75.728.000	32.528.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	02	2.02	01			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	43.200.000	75.728.000	32.528.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	43.200.000	75.728.000	32.528.000		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000	75.728.000	32.528.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	629.863.500	620.486.900	(9.376.600)		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	00			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.064.500	63.564.500	7.500.000		

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12 Kecamatan Lokpaikat

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.835.000	5.835.000	0			
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.835.000	5.835.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.835.000	5.835.000	0
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.229.500	57.729.500	7.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.229.500	57.729.500	7.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.229.500	57.729.500	7.500.000
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	00			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	573.799.000	556.922.400	(16.876.600)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.599.000	1.599.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.599.000	1.599.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.599.000	1.599.000	0
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	382.400.000	358.023.400	(24.376.600)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	134.280.000	0	(134.280.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	134.280.000	0	(134.280.000)
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	248.120.000	358.023.400	109.903.400	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.120.000	223.743.400	(24.376.600)
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	134.280.000	134.280.000
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.100.000	196.600.000	7.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	189.100.000	196.600.000	7.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.100.000	196.600.000	7.500.000
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.608.800	1.650.000	(20.958.800)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.608.800	1.650.000	(20.958.800)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.608.800	1.650.000	(20.958.800)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	22.608.800	1.650.000	(20.958.800)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.608.800	1.650.000	(20.958.800)
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.410.000	44.060.000	(4.350.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.410.000	44.060.000	(4.350.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.350.000	4.350.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12 Kecamatan Lokpaikat

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.350.000	4.350.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000	4.350.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.150.000	4.150.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.150.000	4.150.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	4.150.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000	4.350.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.350.000	4.350.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000	4.350.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	04			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.350.000	0	(4.350.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.350.000	0	(4.350.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000	0	(4.350.000)	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	05			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000	4.275.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.900.000	1.900.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.900.000	1.900.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000	1.900.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	07			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.850.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	4.200.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	4.200.000	4.200.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.985.000	15.985.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	15.985.000	15.985.000	0	
7	01	7.01.7.01.0.00.12.0000	06	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.985.000	15.985.000	0	
Jumlah Belanja								4.335.176.660	4.407.704.660	72.528.000		
Total Surplus/(Defisit)								(4.335.176.660)	(4.407.704.660)	(72.528.000)		
0	00	7.01.7.01.0.00.12.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

Bupati Tapin

M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				
						BELANJA				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					
						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.579.666.378	8.547.550.378	2.967.884.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					
						PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200.778.700	2.534.168.200	2.333.389.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200.778.700	2.534.168.200	2.333.389.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	159.688.700	2.500.478.200	2.340.789.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			
						BELANJA OPERASI	159.688.700	2.500.478.200	2.340.789.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	159.688.700	450.478.200	290.789.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	05		
						Belanja Hibah	0	2.050.000.000	2.050.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04					
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.090.000	33.690.000	(7.400.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	41.090.000	33.690.000	(7.400.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	41.090.000	33.690.000	(7.400.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					
						PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.241.286.500	1.190.583.800	(50.702.700)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.241.286.500	1.190.583.800	(50.702.700)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.092.770.000	1.092.770.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.092.770.000	1.092.770.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	05		
						Belanja Hibah	1.092.770.000	1.092.770.000	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	79.911.800	48.912.200	(30.999.600)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	79.911.800	48.912.200	(30.999.600)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	02	Belanja Barang dan Jasa	79.911.800	48.912.200	(30.999.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47.999.900	38.499.900	(9.500.000)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	47.999.900	38.499.900	(9.500.000)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	02	Belanja Barang dan Jasa	47.999.900	38.499.900	(9.500.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.604.800	10.401.700	(10.203.100)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	20.604.800	10.401.700	(10.203.100)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	02	Belanja Barang dan Jasa	20.604.800	10.401.700	(10.203.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	80.649.300	112.049.300	31.400.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.649.300	112.049.300	31.400.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.349.400	81.349.400	35.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	46.349.400	81.349.400	35.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	02	Belanja Barang dan Jasa	46.349.400	46.349.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	05	Belanja Hibah	0	35.000.000	35.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.299.900	30.699.900	(3.600.000)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	34.299.900	30.699.900	(3.600.000)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	02	Belanja Barang dan Jasa	34.299.900	30.699.900	(3.600.000)	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	182.929.400	82.729.200	(100.200.200)			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	182.929.400	82.729.200	(100.200.200)			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	142.199.400	53.349.200	(88.850.200)			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	142.199.400	53.349.200	(88.850.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.199.400	53.349.200	(88.850.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.730.000	29.380.000	(11.350.000)			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	40.730.000	29.380.000	(11.350.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.730.000	29.380.000	(11.350.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	223.497.200	240.292.200	16.795.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	223.497.200	240.292.200	16.795.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	156.647.400	121.967.400	(34.680.000)			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	156.647.400	121.967.400	(34.680.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.647.400	121.967.400	(34.680.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17.999.900	17.999.900	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	17.999.900	17.999.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.999.900	17.999.900	0

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21.324.900	21.324.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	21.324.900	21.324.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.324.900	21.324.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	27.525.000	79.000.000	51.475.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	27.525.000	79.000.000	51.475.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.525.000	79.000.000	51.475.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.650.525.278	4.387.727.678	737.202.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.925.000	6.925.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.925.000	6.925.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	6.925.000	6.925.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000	6.925.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.884.078	2.625.062.446	178.368	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.324.078	2.620.502.446	178.368	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.620.324.078	2.620.502.446	178.368	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	2.620.324.078	2.620.502.446	178.368	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.060.000	3.060.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	3.060.000	3.060.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000	3.060.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.881.400	993.369.900	372.488.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.791.200	7.791.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	7.791.200	7.791.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.791.200	7.791.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.901.700	60.397.700	4.496.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	55.901.700	60.397.700	4.496.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.901.700	60.397.700	4.496.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.191.700	49.191.700	0	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	49.191.700	49.191.700	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.191.700	49.191.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.663.300	12.663.300	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	12.663.300	12.663.300	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.663.300	12.663.300	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	13.938.500	23.325.000	9.386.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	13.938.500	23.325.000	9.386.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.938.500	23.325.000	9.386.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.450.000	6.450.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	6.450.000	6.450.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000	6.450.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.945.000	833.551.000	358.606.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	474.945.000	833.551.000	358.606.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	474.945.000	833.551.000	358.606.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.773.200	115.143.200	2.370.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.773.200	115.143.200	2.370.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	112.773.200	115.143.200	2.370.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.773.200	115.143.200	2.370.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.906.500	233.721.600	19.815.100		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	2.320.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.320.000	2.320.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000	2.320.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.983.500	41.383.600	4.400.100		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.983.500	41.383.600	4.400.100		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.983.500	41.383.600	4.400.100	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.603.000	190.018.000	15.415.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	174.603.000	190.018.000	15.415.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	174.603.000	190.018.000	15.415.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.155.100	413.505.532	342.350.432		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.981.200	41.881.400	900.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.981.200	41.881.400	900.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.981.200	41.881.400	900.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.020.000	22.040.000	11.020.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	11.020.000	22.040.000	11.020.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.020.000	22.040.000	11.020.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.243.500	324.568.000	319.324.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	5.243.500	52.000.000	46.756.500		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.243.500	52.000.000	46.756.500	

KABUPATEN TAPIN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	0	272.568.000	272.568.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	0	272.568.000	272.568.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				13.910.400	25.016.132	11.105.732
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		2.229.600	867.600	(1.362.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	2.229.600	867.600	(1.362.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2		11.680.800	24.148.532	12.467.732
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	02	11.680.800	24.148.532	12.467.732
Jumlah Belanja								5.579.666.378	8.547.550.378	2.967.884.000	
Total Surplus/(Defisit)								(5.579.666.378)	(8.547.550.378)	(2.967.884.000)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	539.904.957.712	384.838.091.194	0	0	924.743.048.906	624.621.936.862	530.926.301.229	0	0	1.155.548.238.091	230.805.189.185
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	232.733.978.143	18.515.425.342	0	0	251.249.403.485	239.481.490.653	37.296.494.235	0	0	276.777.984.888	25.528.581.403
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	232.733.978.143	18.515.425.342	0	0	251.249.403.485	239.481.490.653	37.296.494.235	0	0	276.777.984.888	25.528.581.403
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.262.734.343	20.000.000	0	0	219.282.734.343	219.716.820.153	59.100.000	0	0	219.775.920.153	493.185.810
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.382.400	0	0	0	10.382.400	45.395.000	0	0	0	45.395.000	35.012.600
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.882.400	0	0	0	2.882.400	2.882.400	0	0	0	2.882.400	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	0	0	0	7.500.000	27.512.600	0	0	0	27.512.600	20.012.600
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	215.130.033.143	0	0	0	215.130.033.143	215.130.054.153	0	0	0	215.130.054.153	21.010
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.122.533.143	0	0	0	215.122.533.143	215.122.554.153	0	0	0	215.122.554.153	21.010
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.745.000	0	0	0	4.745.000	4.745.000	0	0	0	4.745.000	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.755.000	0	0	0	2.755.000	2.755.000	0	0	0	2.755.000	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.854.300	20.000.000	0	0	779.854.300	1.398.149.500	20.000.000	0	0	1.418.149.500	638.295.200
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.904.200	0	0	0	12.904.200	12.904.200	0	0	0	12.904.200	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.418.500	20.000.000	0	0	216.418.500	211.221.700	20.000.000	0	0	231.221.700	14.803.200
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.990.000	0	0	0	198.990.000	232.540.000	0	0	0	232.540.000	33.550.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.264.100	0	0	0	48.264.100	48.264.100	0	0	0	48.264.100	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material	3.224.500	0	0	0	3.224.500	3.224.500	0	0	0	3.224.500	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.053.000	0	0	0	300.053.000	889.995.000	0	0	0	889.995.000	589.942.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	39.100.000	0	0	39.100.000	39.100.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	39.100.000	0	0	39.100.000	39.100.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.258.717.900	0	0	0	3.258.717.900	2.988.430.300	0	0	0	2.988.430.300	(270.287.600)
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.281.600	0	0	0	139.281.600	141.744.000	0	0	0	141.744.000	2.462.400
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.917.400	0	0	0	31.917.400	31.917.400	0	0	0	31.917.400	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.087.518.900	0	0	0	3.087.518.900	2.814.768.900	0	0	0	2.814.768.900	(272.750.000)
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.746.600	0	0	0	103.746.600	154.791.200	0	0	0	154.791.200	51.044.600
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.393.600	0	0	0	70.393.600	121.438.200	0	0	0	121.438.200	51.044.600
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.353.000	0	0	0	33.353.000	33.353.000	0	0	0	33.353.000	0
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.371.213.800	18.495.425.342	0	0	31.866.639.142	19.498.990.500	37.237.394.235	0	0	56.736.384.735	24.869.745.593
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.780.241.000	15.875.984.982	0	0	25.656.225.982	10.402.912.344	24.294.964.070	0	0	34.697.876.414	9.041.650.432
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0	0	0	24.087.200	175.912.800	0	0	200.000.000	200.000.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25.097.300	199.999.800	0	0	225.097.100	49.172.200	399.999.800	0	0	449.172.000	224.074.900
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15.459.800	99.976.520	0	0	115.436.320	31.328.800	190.075.520	0	0	221.404.320	105.968.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0	0	0	23.022.500	226.656.000	0	0	249.678.500	249.678.500
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	585.659.000	4.550.210.462	0	0	5.135.869.462	789.361.200	6.126.704.154	0	0	6.916.065.354	1.780.195.892
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	178.564.600	1.449.509.040	0	0	1.628.073.640	226.714.400	1.820.099.723	0	0	2.046.814.123	418.740.483
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25.214.800	200.000.000	0	0	225.214.800	25.214.800	200.000.000	0	0	225.214.800	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	99.715.700	775.759.160	0	0	875.474.860	99.715.700	775.759.160	0	0	875.474.860	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0	0	0	3.585.800	146.414.000	0	0	149.999.800	149.999.800
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0	0	0	5.120.000	5.495.242.968	0	0	5.500.362.968	5.500.362.968
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	122.500.000	0	0	0	122.500.000	220.000.000	0	0	220.000.000	97.500.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.199.000	0	0	0	18.199.000	33.189.000	0	0	33.189.000	14.990.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	16.800.900	0	0	0	16.800.900	16.800.900	0	0	16.800.900	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.499.900	0	0	0	22.499.900	22.499.900	0	0	22.499.900	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.600.530.000	8.600.530.000	0	0	17.201.060.000	8.738.099.944	8.738.099.945	0	0	17.476.199.889	275.139.889
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.000.000	0	0	0	70.000.000	95.000.000	0	0	95.000.000	25.000.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.164.217.700	2.064.220.000	0	0	4.228.437.700	2.788.468.356	7.328.660.800	0	0	10.117.129.156	5.888.691.456
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	0	0	65.503.800	1.015.210.000	0	0	1.080.713.800	1.080.713.800
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	0	0	21.000.000	472.296.000	0	0	493.296.000	493.296.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0	0	0	21.800.000	492.630.200	0	0	514.430.200	514.430.200
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	0	0	0	0	0	71.200.000	1.763.990.000	0	0	1.835.190.000	1.835.190.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0	0	0	123.921.000	1.057.179.245	0	0	1.181.100.245	1.181.100.245
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0	0	0	16.645.700	188.955.300	0	0	205.601.000	205.601.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.738.300	0	0	0	54.738.300	54.738.300	0	0	54.738.300	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45.259.400	0	0	0	45.259.400	4.000.000	0	0	4.000.000	(41.259.400)	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0	0	0	0	0	31.259.500	0	0	31.259.500	31.259.500	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.064.220.000	2.064.220.000	0	0	4.128.440.000	2.338.400.056	2.338.400.055	0	0	4.676.800.111	548.360.111
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.359.827.700	555.220.360	0	0	1.915.048.060	4.626.360.500	4.991.729.365	0	0	9.618.089.865	7.703.041.805
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	25.214.800	199.999.800	0	0	225.214.600	109.100.900	1.232.347.800	0	0	1.341.448.700	1.116.234.100
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.866.300	330.220.560	0	0	381.086.860	185.955.700	1.854.167.730	0	0	2.040.123.430	1.659.036.570
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	0	0	0	0	0	7.975.400	85.944.300	0	0	93.919.700	93.919.700
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	0	0	0	0	0	175.000.000	0	0	175.000.000	175.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.206.000.000	0	0	0	1.206.000.000	1.809.000.000	0	0	1.809.000.000	603.000.000	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.174.000	0	0	0	30.174.000	133.956.100	0	0	133.956.100	103.782.100	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	47.572.600	0	0	0	47.572.600	92.572.400	94.069.535	0	0	186.641.935	139.069.335
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	0	0	0	0	2.287.800.000	1.525.200.000	0	0	3.813.000.000	3.813.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.927.400	0	0	0	66.927.400	1.681.249.300	622.040.000	0	0	2.303.289.300	2.236.361.900
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	17.632.000	0	0	0	17.632.000	217.089.300	0	0	217.089.300	199.457.300	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.095.400	0	0	0	30.095.400	30.095.400	0	0	30.095.400	0	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.200.000	0	0	0	19.200.000	29.304.600	0	0	29.304.600	10.104.600	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	0	0	0	0	1.404.760.000	602.040.000	0	0	2.006.800.000	2.006.800.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.030.000	0	0	0	100.030.000	265.680.000	0	0	265.680.000	165.650.000	

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.030.000	0	0	0	100.030.000	265.680.000	0	0	0	265.680.000	165.650.000
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.030.000	0	0	0	100.030.000	265.680.000	0	0	0	265.680.000	165.650.000
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	183.860.247.363	30.007.815.500	0	0	213.868.062.863	216.562.015.937	45.139.955.459	0	0	261.701.971.396	47.833.908.533
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	122.013.295.160	947.854.100	0	0	122.961.149.260	132.957.568.174	4.082.918.850	0	0	137.040.487.024	14.079.337.764
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.270.776.855	162.195.700	0	0	100.432.972.555	100.951.304.775	183.295.700	0	0	101.134.600.475	701.627.920
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.974.900	0	0	0	71.974.900	35.474.800	0	0	0	35.474.800	(36.500.100)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.974.900	0	0	0	71.974.900	35.474.800	0	0	0	35.474.800	(36.500.100)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.748.734.955	0	0	0	97.748.734.955	98.098.877.625	0	0	0	98.098.877.625	350.142.670
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.734.754.955	0	0	0	97.734.754.955	98.084.897.625	0	0	0	98.084.897.625	350.142.670
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.850.000	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.130.000	0	0	0	11.130.000	11.130.000	0	0	0	11.130.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.740.318.100	0	0	0	1.740.318.100	2.190.868.600	0	0	0	2.190.868.600	450.550.500
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.398.200	0	0	0	159.398.200	157.954.000	0	0	0	157.954.000	(1.444.200)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.673.700	0	0	0	176.673.700	45.794.900	0	0	0	45.794.900	(130.878.800)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.083.400	0	0	0	17.083.400	22.127.700	0	0	0	22.127.700	5.044.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1.987.800	0	0	0	1.987.800	0	0	0	0	0	(1.987.800)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.385.175.000	0	0	0	1.385.175.000	1.964.992.000	0	0	0	1.964.992.000	579.817.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.165.300	162.195.700	0	0	163.361.000	1.165.300	183.295.700	0	0	184.461.000	21.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.165.300	162.195.700	0	0	163.361.000	1.165.300	183.295.700	0	0	184.461.000	21.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.053.400	0	0	0	592.053.400	451.818.400	0	0	0	451.818.400	(140.235.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.128.400	0	0	0	363.128.400	201.128.400	0	0	0	201.128.400	(162.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.925.000	0	0	0	228.925.000	250.690.000	0	0	0	250.690.000	21.765.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.530.200	0	0	0	116.530.200	173.100.050	0	0	0	173.100.050	56.569.850
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.230.200	0	0	0	98.230.200	132.550.050	0	0	0	132.550.050	34.319.850
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.300.000	0	0	0	18.300.000	40.550.000	0	0	0	40.550.000	22.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.189.015.605	776.100.600	0	0	19.965.116.205	29.229.092.499	3.890.065.350	0	0	33.119.157.849	13.154.041.644
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.463.292.505	756.985.000	0	0	3.220.277.505	6.551.937.649	3.235.111.750	0	0	9.787.049.399	6.566.771.894
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	209.815.000	156.985.000	0	0	366.800.000	338.500.000	1.330.647.750	0	0	1.669.147.750	1.302.347.750
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	78.000.000	600.000.000	0	0	678.000.000	78.000.000	600.000.000	0	0	678.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	0	0	0	0	0	1.906.736.000	0	0	0	1.906.736.000	1.906.736.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	1.304.464.000	0	0	1.304.464.000	1.304.464.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.085.477.505	0	0	0	2.085.477.505	2.819.890.749	0	0	0	2.819.890.749	734.413.244
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	0	0	0	0	1.318.810.900	0	0	0	1.318.810.900	1.318.810.900

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.710.497.200	19.115.600	0	0	16.729.612.800	22.661.928.950	654.953.600	0	0	23.316.882.550	6.587.269.750
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.550.000	0	0	0	37.550.000	107.706.400	0	0	0	107.706.400	70.156.400
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	112.655.000	0	0	0	112.655.000	163.726.600	0	0	0	163.726.600	51.071.600
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.140.000	0	0	0	13.140.000	26.840.000	0	0	0	26.840.000	13.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.795.000	0	0	0	15.795.000	11.530.000	0	0	0	11.530.000	(4.265.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	105.429.200	0	0	0	105.429.200	105.429.200	0	0	0	105.429.200	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	114.265.000	0	0	0	114.265.000	160.415.000	0	0	0	160.415.000	46.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.987.200	0	0	0	25.987.200	39.812.200	0	0	0	39.812.200	13.825.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.900.000	0	0	0	16.900.000	24.700.000	0	0	0	24.700.000	7.800.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.900.000	0	0	0	16.900.000	24.700.000	0	0	0	24.700.000	7.800.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.200.000	0	0	0	35.200.000	53.200.000	0	0	0	53.200.000	18.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	85.933.200	0	0	0	85.933.200	91.333.200	0	0	0	91.333.200	5.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.047.000	0	0	0	73.047.000	83.139.300	0	0	0	83.139.300	10.092.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	127.020.000	0	0	0	127.020.000	127.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	220.150.000	0	0	0	220.150.000	802.331.100	395.600.000	0	0	1.197.931.100	977.781.100
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45.890.000	0	0	0	45.890.000	40.140.000	0	0	0	40.140.000	(5.750.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	81.749.900	0	0	0	81.749.900	224.149.900	0	0	0	224.149.900	142.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	63.400.000	0	0	0	63.400.000	71.400.000	0	0	0	71.400.000	8.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.420.000	0	0	0	68.420.000	96.242.400	0	0	0	96.242.400	27.822.400
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.900.000	0	0	0	16.900.000	20.800.000	0	0	0	20.800.000	3.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	38.575.000	0	0	0	38.575.000	41.075.000	0	0	0	41.075.000	2.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	0	0	0	0	93.777.000	0	0	0	93.777.000	93.777.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250.959.900	0	0	0	250.959.900	683.179.200	0	0	0	683.179.200	432.219.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.746.445.300	19.115.600	0	0	14.765.560.900	18.575.860.900	33.215.600	0	0	18.609.076.500	3.843.515.600
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	16.900.000	0	0	0	16.900.000	25.750.000	0	0	0	25.750.000	8.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.010.000	0	0	0	75.010.000	75.010.000	0	0	0	75.010.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	0	2.862.000	76.138.000	0	0	79.000.000	79.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	72.690.000	0	0	0	72.690.000	98.614.750	0	0	0	98.614.750	25.924.750
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	360.605.500	0	0	0	360.605.500	691.184.800	0	0	0	691.184.800	330.579.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	0	0	0	0	100.000.000	150.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	15.225.900	0	0	0	15.225.900	15.225.900	0	0	0	15.225.900	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.225.900	0	0	0	15.225.900	15.225.900	0	0	0	15.225.900	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.179.181.400	9.557.800	0	0	2.188.739.200	2.193.281.400	9.557.800	0	0	2.202.839.200	14.100.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.968.000.000	0	0	0	1.968.000.000	2.038.200.000	0	0	0	2.038.200.000	70.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.968.000.000	0	0	0	1.968.000.000	2.038.200.000	0	0	0	2.038.200.000	70.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.181.400	9.557.800	0	0	220.739.200	155.081.400	9.557.800	0	0	164.639.200	(56.100.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.181.400	9.557.800	0	0	220.739.200	155.081.400	9.557.800	0	0	164.639.200	(56.100.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	36.400.000	0	0	0	36.400.000	32.350.000	0	0	0	32.350.000	(4.050.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.400.000	0	0	0	36.400.000	32.350.000	0	0	0	32.350.000	(4.050.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.400.000	0	0	0	36.400.000	32.350.000	0	0	0	32.350.000	(4.050.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	337.921.300	0	0	0	337.921.300	551.539.500	0	0	0	551.539.500	213.618.200
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.602.900	0	0	0	261.602.900	355.442.200	0	0	0	355.442.200	93.839.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	261.602.900	0	0	0	261.602.900	355.442.200	0	0	0	355.442.200	93.839.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.318.400	0	0	0	76.318.400	196.097.300	0	0	0	196.097.300	119.778.900
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76.318.400	0	0	0	76.318.400	196.097.300	0	0	0	196.097.300	119.778.900
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	52.366.320.500	28.486.406.900	0	0	80.852.727.400	62.977.983.815	40.494.061.209	0	0	103.472.045.024	22.619.317.624
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.405.136.500	28.486.406.900	0	0	76.891.543.400	59.016.799.815	40.494.061.209	0	0	99.510.861.024	22.619.317.624
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	133.977.900	23.657.565.500	0	0	23.791.543.400	133.977.900	23.657.565.500	0	0	23.791.543.400	0
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	133.977.900	23.657.565.500	0	0	23.791.543.400	133.977.900	23.657.565.500	0	0	23.791.543.400	0
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.271.158.600	4.828.841.400	0	0	53.100.000.000	58.882.821.915	16.836.495.709	0	0	75.719.317.624	22.619.317.624
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	48.271.158.600	4.828.841.400	0	0	53.100.000.000	58.882.821.915	16.836.495.709	0	0	75.719.317.624	22.619.317.624
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	3.961.184.000	0	0	0	3.961.184.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000	Puskesmas Tapin Utara	1.303.889.872	42.908.700	0	0	1.346.798.572	2.490.244.572	67.578.500	0	0	2.557.823.072	1.211.024.500
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.303.889.872	42.908.700	0	0	1.346.798.572	2.418.244.572	67.578.500	0	0	2.485.823.072	1.139.024.500
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.303.889.872	42.908.700	0	0	1.346.798.572	2.418.244.572	67.578.500	0	0	2.485.823.072	1.139.024.500
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	71.150.000	0	0	0	71.150.000	71.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	14.630.000	0	0	0	14.630.000	14.630.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	14.300.000	0	0	0	14.300.000	14.300.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	113.700.000	0	0	0	113.700.000	113.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	80.638.500	0	0	0	80.638.500	80.638.500
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	7.275.000	0	0	0	7.275.000	7.275.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	56.000.000	0	0	0	56.000.000	56.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	82.061.000	0	0	0	82.061.000	82.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	29.250.000	0	0	0	29.250.000	29.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	60.270.000	0	0	0	60.270.000	60.270.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	120.725.000	0	0	0	120.725.000	120.725.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	9.295.000	0	0	0	9.295.000	9.295.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	341.830.000	0	0	0	341.830.000	341.830.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.178.639.872	42.908.700	0	0	1.221.548.572	1.153.970.072	67.578.500	0	0	1.221.548.572	0
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	125.250.000	0	0	0	125.250.000	263.150.000	0	0	0	263.150.000	137.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000	Puskesmas Bakarangan	695.079.010	63.750.600	0	0	758.829.610	1.611.954.310	51.988.300	0	0	1.663.942.610	905.113.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.079.010	63.750.600	0	0	758.829.610	1.568.754.310	51.988.300	0	0	1.620.742.610	861.913.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.079.010	63.750.600	0	0	758.829.610	1.568.754.310	51.988.300	0	0	1.620.742.610	861.913.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	74.700.000	0	0	0	74.700.000	74.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	17.100.000	0	0	0	17.100.000	17.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	12.600.000	0	0	0	12.600.000	12.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	176.950.000	0	0	0	176.950.000	176.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	20.700.000	0	0	0	20.700.000	20.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	22.100.000	0	0	0	22.100.000	22.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	5.515.000	0	0	0	5.515.000	5.515.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	31.650.000	0	0	0	31.650.000	31.650.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	36.850.000	0	0	0	36.850.000	36.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	35.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	110.203.000	0	0	0	110.203.000	110.203.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	29.320.000	0	0	0	29.320.000	29.320.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	21.510.000	0	0	0	21.510.000	21.510.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	87.765.000	0	0	0	87.765.000	87.765.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000	2.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	110.100.000	0	0	0	110.100.000	110.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	576.008.120	62.623.000	0	0	638.631.120	586.642.820	51.988.300	0	0	638.631.120	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.070.890	1.127.600	0	0	120.198.490	187.098.490	0	0	0	187.098.490	66.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	43.200.000	0	0	0	43.200.000	43.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	43.200.000	0	0	0	43.200.000	43.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	43.200.000	0	0	0	43.200.000	43.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000	Puskesmas Banua Padang	667.166.305	31.173.200	0	0	698.339.505	1.461.363.305	31.173.200	0	0	1.492.536.505	794.197.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	667.166.305	31.173.200	0	0	698.339.505	1.400.163.305	31.173.200	0	0	1.431.336.505	732.997.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	667.166.305	31.173.200	0	0	698.339.505	1.400.163.305	31.173.200	0	0	1.431.336.505	732.997.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	38.550.000	0	0	0	38.550.000	38.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000	3.300.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	96.000.000	0	0	0	96.000.000	96.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	43.720.000	0	0	0	43.720.000	43.720.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	44.700.000	0	0	0	44.700.000	44.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	10.525.000	0	0	0	10.525.000	10.525.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	73.557.000	0	0	0	73.557.000	73.557.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	18.250.000	0	0	0	18.250.000	18.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	32.510.000	0	0	0	32.510.000	32.510.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	19.900.000	0	0	0	19.900.000	19.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000	2.220.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	15.450.000	0	0	0	15.450.000	15.450.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	146.375.000	0	0	0	146.375.000	146.375.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	522.578.505	31.173.200	0	0	553.751.705	522.578.505	31.173.200	0	0	553.751.705	0
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.587.800	0	0	0	144.587.800	304.927.800	0	0	0	304.927.800	160.340.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000	Puskesmas Tambaruntung	541.182.900	18.628.400	0	0	559.811.300	1.436.454.300	0	0	0	1.436.454.300	876.643.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	541.182.900	18.628.400	0	0	559.811.300	1.357.254.300	0	0	0	1.357.254.300	797.443.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	541.182.900	18.628.400	0	0	559.811.300	1.357.254.300	0	0	0	1.357.254.300	797.443.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	87.265.000	0	0	0	87.265.000	87.265.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	2.420.000	2.420.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	8.400.000	8.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	26.100.000	0	0	0	26.100.000	26.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	10.150.000	0	0	0	10.150.000	10.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	38.050.000	0	0	0	38.050.000	38.050.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	142.283.000	0	0	0	142.283.000	142.283.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	13.925.000	0	0	0	13.925.000	13.925.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	8.375.000	0	0	0	8.375.000	8.375.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	56.305.000	0	0	0	56.305.000	56.305.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	10.060.000	0	0	0	10.060.000	10.060.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	284.880.000	0	0	0	284.880.000	284.880.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	436.382.900	18.628.400	0	0	455.011.300	455.011.300	0	0	0	455.011.300	0
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.800.000	0	0	0	104.800.000	214.030.000	0	0	0	214.030.000	109.230.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	79.200.000	0	0	0	79.200.000	79.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	79.200.000	0	0	0	79.200.000	79.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	79.200.000	0	0	0	79.200.000	79.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000	Puskesmas Pandahan	403.262.000	6.338.000	0	0	409.600.000	1.075.778.000	6.338.000	0	0	1.082.116.000	672.516.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	403.262.000	6.338.000	0	0	409.600.000	1.014.578.000	6.338.000	0	0	1.020.916.000	611.316.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	403.262.000	6.338.000	0	0	409.600.000	1.014.578.000	6.338.000	0	0	1.020.916.000	611.316.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	59.246.100	0	0	0	59.246.100	59.246.100
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	21.690.000	0	0	0	21.690.000	21.690.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	31.352.000	0	0	0	31.352.000	31.352.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	52.500.000	0	0	0	52.500.000	52.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	25.800.000	0	0	0	25.800.000	25.800.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	56.741.600	0	0	0	56.741.600	56.741.600
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	7.990.000	0	0	0	7.990.000	7.990.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	15.746.700	0	0	0	15.746.700	15.746.700
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	45.274.600	0	0	0	45.274.600	45.274.600
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	159.075.000	0	0	0	159.075.000	159.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	331.762.000	6.338.000	0	0	338.100.000	331.762.000	6.338.000	0	0	338.100.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	71.500.000	0	0	0	71.500.000	188.800.000	0	0	0	188.800.000	117.300.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	61.200.000	0	0	0	61.200.000	61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000	Puskesmas Lokpaikat	647.071.922	27.526.800	0	0	674.598.722	1.393.254.837	22.880.400	0	0	1.416.135.237	741.536.515
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	647.071.922	27.526.800	0	0	674.598.722	1.357.254.837	22.880.400	0	0	1.380.135.237	705.536.515
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	647.071.922	27.526.800	0	0	674.598.722	1.357.254.837	22.880.400	0	0	1.380.135.237	705.536.515
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	63.570.000	0	0	0	63.570.000	63.570.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	21.425.000	0	0	0	21.425.000	21.425.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	32.700.000	0	0	0	32.700.000	32.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	25.140.000	0	0	0	25.140.000	25.140.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	21.031.515	0	0	0	21.031.515	21.031.515
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	3.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	20.600.000	0	0	0	20.600.000	20.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	30.600.000	0	0	0	30.600.000	30.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	12.250.000	0	0	0	12.250.000	12.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	62.100.000	0	0	0	62.100.000	62.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	72.150.000	0	0	0	72.150.000	72.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	3.655.000	0	0	0	3.655.000	3.655.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	203.400.000	0	0	0	203.400.000	203.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	519.621.922	27.526.800	0	0	547.148.722	524.268.322	22.880.400	0	0	547.148.722	0
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	127.450.000	0	0	0	127.450.000	237.365.000	0	0	0	237.365.000	109.915.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000	Puskesmas Tambarangan	761.194.965	88.055.200	0	0	849.250.165	1.715.708.565	82.983.600	0	0	1.798.692.165	949.442.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761.194.965	88.055.200	0	0	849.250.165	1.643.708.565	82.983.600	0	0	1.726.692.165	877.442.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	761.194.965	88.055.200	0	0	849.250.165	1.643.708.565	82.983.600	0	0	1.726.692.165	877.442.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	78.398.000	0	0	0	78.398.000	78.398.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	1.210.000	0	0	0	1.210.000	1.210.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	26.475.000	0	0	0	26.475.000	26.475.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	27.840.000	0	0	0	27.840.000	27.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	57.845.000	0	0	0	57.845.000	57.845.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	0	0	0	0	60.100.000	0	0	0	0	60.100.000	60.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	44.900.000	0	0	0	0	44.900.000	44.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	102.032.000	0	0	0	0	102.032.000	102.032.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	28.440.000	0	0	0	0	28.440.000	28.440.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	27.010.000	0	0	0	0	27.010.000	27.010.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	139.975.000	0	0	0	0	139.975.000	139.975.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	126.497.000	0	0	0	0	126.497.000	126.497.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	597.844.965	88.055.200	0	0	685.900.165	602.916.565	82.983.600	0	0	0	685.900.165	0
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.350.000	0	0	0	163.350.000	296.270.000	0	0	0	0	296.270.000	132.920.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000	Puskesmas Salam Babaris	445.386.865	58.073.400	0	0	503.460.265	1.165.119.965	22.656.200	0	0	0	1.187.776.165	684.315.900
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	445.386.865	58.073.400	0	0	503.460.265	1.111.119.965	22.656.200	0	0	0	1.133.776.165	630.315.900
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445.386.865	58.073.400	0	0	503.460.265	1.111.119.965	22.656.200	0	0	0	1.133.776.165	630.315.900
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	12.840.000	0	0	0	0	12.840.000	12.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	17.309.300	0	0	0	0	17.309.300	17.309.300
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	24.840.000	0	0	0	0	24.840.000	24.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	18.600.000	0	0	0	0	18.600.000	18.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	20.250.000	0	0	0	0	20.250.000	20.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	26.060.000	0	0	0	0	26.060.000	26.060.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	0	0	0	0	46.500.000	0	0	0	0	46.500.000	46.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	39.475.000	0	0	0	0	39.475.000	39.475.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	52.950.800	0	0	0	0	52.950.800	52.950.800
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	12.510.000	0	0	0	0	12.510.000	12.510.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	15.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	111.937.800	0	0	0	0	111.937.800	111.937.800

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	6.320.000	0	0	0	6.320.000	6.320.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	24.300.000	0	0	0	24.300.000	24.300.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	90.320.000	0	0	0	90.320.000	90.320.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	335.158.465	58.073.400	0	0	393.231.865	370.575.665	22.656.200	0	0	393.231.865	0
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.228.400	0	0	0	110.228.400	193.231.400	0	0	0	193.231.400	83.003.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000	Puskesmas Piani	410.489.500	15.190.500	0	0	425.680.000	1.141.867.500	18.190.500	0	0	1.160.058.000	734.378.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	410.489.500	15.190.500	0	0	425.680.000	1.069.867.500	18.190.500	0	0	1.088.058.000	662.378.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	410.489.500	15.190.500	0	0	425.680.000	1.069.867.500	18.190.500	0	0	1.088.058.000	662.378.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	18.940.000	0	0	0	18.940.000	18.940.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	2.320.000	0	0	0	2.320.000	2.320.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	40.710.000	0	0	0	40.710.000	40.710.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	34.850.000	0	0	0	34.850.000	34.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	7.995.000	0	0	0	7.995.000	7.995.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	65.150.000	0	0	0	65.150.000	65.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	91.373.000	0	0	0	91.373.000	91.373.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	19.200.000	0	0	0	19.200.000	19.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	18.190.000	0	0	0	18.190.000	18.190.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	37.460.000	0	0	0	37.460.000	37.460.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	6.225.000	0	0	0	6.225.000	6.225.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	10.145.000	0	0	0	10.145.000	10.145.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	154.940.000	0	0	0	154.940.000	154.940.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	292.809.500	15.190.500	0	0	308.000.000	289.809.500	18.190.500	0	0	308.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	117.680.000	0	0	0	117.680.000	268.360.000	0	0	0	268.360.000	150.680.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000	Puskesmas Binuang	1.305.047.420	184.845.300	0	0	1.489.892.720	2.286.655.350	222.122.300	0	0	2.508.777.650	1.018.884.930
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.305.047.420	184.845.300	0	0	1.489.892.720	2.214.655.350	222.122.300	0	0	2.436.777.650	946.884.930
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.305.047.420	184.845.300	0	0	1.489.892.720	2.214.655.350	222.122.300	0	0	2.436.777.650	946.884.930

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	103.200.000	0	0	0	103.200.000	103.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	19.100.000	0	0	0	19.100.000	19.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	9.680.000	0	0	0	9.680.000	9.680.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	19.800.000	0	0	0	19.800.000	19.800.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	38.980.000	0	0	0	38.980.000	38.980.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	39.570.000	0	0	0	39.570.000	39.570.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	14.820.000	0	0	0	14.820.000	14.820.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	40.400.000	0	0	0	40.400.000	40.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	50.925.000	0	0	0	50.925.000	50.925.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	64.960.000	0	0	0	64.960.000	64.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	21.125.000	0	0	0	21.125.000	21.125.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	11.005.000	0	0	0	11.005.000	11.005.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	39.805.000	0	0	0	39.805.000	39.805.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	35.530.000	0	0	0	35.530.000	35.530.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	74.755.000	0	0	0	74.755.000	74.755.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	208.155.000	0	0	0	208.155.000	208.155.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.096.406.620	184.845.300	0	0	1.281.251.920	1.059.129.550	222.122.300	0	0	1.281.251.850	(70)
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.640.800	0	0	0	208.640.800	340.615.800	0	0	0	340.615.800	131.975.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000	Puskesmas Hatungun	413.421.800	10.578.200	0	0	424.000.000	1.141.668.800	10.578.200	0	0	1.152.247.000	728.247.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	413.421.800	10.578.200	0	0	424.000.000	1.087.668.800	10.578.200	0	0	1.098.247.000	674.247.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	413.421.800	10.578.200	0	0	424.000.000	1.087.668.800	10.578.200	0	0	1.098.247.000	674.247.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	46.360.000	0	0	0	46.360.000	46.360.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	8.850.000	0	0	0	8.850.000	8.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	65.550.000	0	0	0	65.550.000	65.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	22.950.000	0	0	0	22.950.000	22.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	11.340.000	0	0	0	11.340.000	11.340.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	4.925.000	0	0	0	4.925.000	4.925.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	2.350.000	0	0	0	2.350.000	2.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	34.275.000	0	0	0	34.275.000	34.275.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	59.007.000	0	0	0	59.007.000	59.007.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	36.960.000	0	0	0	36.960.000	36.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	9.150.000	0	0	0	9.150.000	9.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	84.032.000	0	0	0	84.032.000	84.032.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	6.850.000	0	0	0	6.850.000	6.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	152.175.000	0	0	0	152.175.000	152.175.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	289.421.800	10.578.200	0	0	300.000.000	289.421.800	10.578.200	0	0	300.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	124.000.000	0	0	0	124.000.000	225.923.000	0	0	0	225.923.000	101.923.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000	Puskesmas Baringin	890.219.144	26.486.200	0	0	916.705.344	1.858.534.944	26.486.200	0	0	1.885.021.144	968.315.800
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	890.219.144	26.486.200	0	0	916.705.344	1.822.534.944	26.486.200	0	0	1.849.021.144	932.315.800
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	890.219.144	26.486.200	0	0	916.705.344	1.822.534.944	26.486.200	0	0	1.849.021.144	932.315.800
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	75.061.200	0	0	0	75.061.200	75.061.200
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	39.600.000	0	0	0	39.600.000	39.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0	0	0	80.250.000	0	0	0	80.250.000	80.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	27.900.000	0	0	0	27.900.000	27.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	30.300.000	0	0	0	30.300.000	30.300.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	58.367.600	0	0	0	58.367.600	58.367.600
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	9.900.000	0	0	0	9.900.000	9.900.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	23.250.000	0	0	0	23.250.000	23.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	156.057.000	0	0	0	156.057.000	156.057.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	18.950.000	0	0	0	18.950.000	18.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	19.500.000	0	0	0	19.500.000	19.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	13.330.000	0	0	0	13.330.000	13.330.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	241.500.000	0	0	0	241.500.000	241.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	668.019.144	26.486.200	0	0	694.505.344	668.019.144	26.486.200	0	0	694.505.344	0
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	222.200.000	0	0	0	222.200.000	340.550.000	0	0	0	340.550.000	118.350.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000	Puskesmas Margasari	997.220.000	0	0	0	997.220.000	1.847.859.500	0	0	0	1.847.859.500	850.639.500
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	997.220.000	0	0	0	997.220.000	1.793.859.500	0	0	0	1.793.859.500	796.639.500
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	997.220.000	0	0	0	997.220.000	1.793.859.500	0	0	0	1.793.859.500	796.639.500
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	0	0	0	92.490.000	0	0	0	92.490.000	92.490.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	0	0	0	0	36.240.000	0	0	0	36.240.000	36.240.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	34.335.000	0	0	0	34.335.000	34.335.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	10.295.000	0	0	0	10.295.000	10.295.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	3.627.500	0	0	0	3.627.500	3.627.500
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	0	0	0	0	78.550.000	0	0	0	78.550.000	78.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	15.005.000	0	0	0	15.005.000	15.005.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	8.220.000	0	0	0	8.220.000	8.220.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	42.450.000	0	0	0	42.450.000	42.450.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	0	117.815.000	0	0	0	117.815.000	117.815.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	0	21.845.000	0	0	0	21.845.000	21.845.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	35.937.000	0	0	0	35.937.000	35.937.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	0	6.550.000	0	0	0	6.550.000	6.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	0	142.680.000	0	0	0	142.680.000	142.680.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	885.600.000	0	0	0	885.600.000	885.600.000	0	0	0	885.600.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.620.000	0	0	0	111.620.000	246.320.000	0	0	0	246.320.000	134.700.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.333.932.646	329.426.782.200	0	0	402.760.714.846	112.299.561.582	436.500.357.773	0	0	548.799.919.355	146.039.204.509
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.333.932.646	329.426.782.200	0	0	402.760.714.846	112.299.561.582	436.500.357.773	0	0	548.799.919.355	146.039.204.509
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.270.017.146	256.429.900	0	0	15.526.447.046	15.917.154.146	336.997.500	0	0	16.254.151.646	727.704.600
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.460.000	0	0	0	560.460.000	560.460.000	0	0	0	560.460.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560.460.000	0	0	0	560.460.000	560.460.000	0	0	0	560.460.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.912.497.233	0	0	0	11.912.497.233	11.912.497.533	0	0	0	11.912.497.533	300
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.894.287.233	0	0	0	11.894.287.233	11.894.287.533	0	0	0	11.894.287.533	300
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.700.000	0	0	0	11.700.000	11.700.000	0	0	0	11.700.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.510.000	0	0	0	6.510.000	6.510.000	0	0	0	6.510.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.414.996.200	0	0	0	1.414.996.200	2.049.940.900	3.000.000	0	0	2.052.940.900	637.944.700
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.038.600	0	0	0	200.038.600	200.038.600	0	0	0	200.038.600	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.783.000	0	0	0	58.783.000	66.387.400	0	0	0	66.387.400	7.604.400
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.496.100	0	0	0	56.496.100	68.114.000	0	0	0	68.114.000	11.617.900
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.495.000	0	0	0	10.495.000	10.495.000	0	0	0	10.495.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	203.998.500	0	0	0	203.998.500	263.189.900	3.000.000	0	0	266.189.900	62.191.400
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.020.000	0	0	0	9.020.000	9.020.000	0	0	0	9.020.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	876.165.000	0	0	0	876.165.000	1.432.696.000	0	0	0	1.432.696.000	556.531.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.540.000	252.652.200	0	0	256.192.200	3.540.000	321.999.000	0	0	325.539.000	69.346.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	885.000	67.492.000	0	0	68.377.000	885.000	67.492.000	0	0	68.377.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.655.000	185.160.200	0	0	187.815.200	2.655.000	254.507.000	0	0	257.162.000	69.346.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.348.013	0	0	0	796.348.013	808.298.013	8.220.800	0	0	816.518.813	20.170.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	0	0	0	11.600.000	23.200.000	0	0	0	23.200.000	11.600.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.126.000	0	0	0	378.126.000	378.476.000	8.220.800	0	0	386.696.800	8.570.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.622.013	0	0	0	406.622.013	406.622.013	0	0	0	406.622.013	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.175.700	3.777.700	0	0	585.953.400	582.417.700	3.777.700	0	0	586.195.400	242.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.374.600	0	0	0	476.374.600	476.616.600	0	0	0	476.616.600	242.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.801.100	3.777.700	0	0	109.578.800	105.801.100	3.777.700	0	0	109.578.800	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.581.439.800	34.068.560.200	0	0	56.650.000.000	50.100.716.100	35.234.630.500	0	0	85.335.346.600	28.685.346.600
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.175.000.000	30.700.000.000	0	0	48.875.000.000	46.575.000.000	26.800.000.000	0	0	73.375.000.000	24.500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.675.000.000	26.150.000.000	0	0	27.825.000.000	1.675.000.000	22.250.000.000	0	0	23.925.000.000	(3.900.000.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	525.000.000	4.550.000.000	0	0	5.075.000.000	525.000.000	4.550.000.000	0	0	5.075.000.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	15.975.000.000	0	0	0	15.975.000.000	44.375.000.000	0	0	0	44.375.000.000	28.400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.406.439.800	3.368.560.200	0	0	7.775.000.000	3.525.716.100	8.434.630.500	0	0	11.960.346.600	4.185.346.600
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.550.000.000	3.300.000.000	0	0	4.850.000.000	750.000.000	3.300.000.000	0	0	4.050.000.000	(800.000.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	0	0	0	0	4.935.331.000	0	0	4.935.331.000	4.935.331.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.856.439.800	68.560.200	0	0	2.925.000.000	2.775.716.100	199.299.500	0	0	2.975.015.600	50.015.600
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.785.000.000	3.865.000.000	0	0	8.650.000.000	5.332.272.003	12.614.999.997	0	0	17.947.272.000	9.297.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.785.000.000	3.865.000.000	0	0	8.650.000.000	5.332.272.003	12.614.999.997	0	0	17.947.272.000	9.297.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1.105.000.000	0	0	0	1.105.000.000	1.465.000.000	0	0	0	1.465.000.000	360.000.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.680.000.000	0	0	0	3.680.000.000	3.606.009.000	0	0	0	3.606.009.000	(73.991.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0	3.865.000.000	0	0	3.865.000.000	261.263.003	12.614.999.997	0	0	12.876.263.000	9.011.263.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	455.000.000	1.609.000.000	0	0	2.064.000.000	455.000.000	998.800.000	0	0	1.453.800.000	(610.200.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	455.000.000	1.609.000.000	0	0	2.064.000.000	455.000.000	998.800.000	0	0	1.453.800.000	(610.200.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	455.000.000	0	0	0	455.000.000	455.000.000	0	0	0	455.000.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0	1.609.000.000	0	0	1.609.000.000	0	998.800.000	0	0	998.800.000	(610.200.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.265.000.000	0	0	0	2.265.000.000	7.778.429.000	0	0	0	7.778.429.000	5.513.429.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.265.000.000	0	0	0	2.265.000.000	7.778.429.000	0	0	0	7.778.429.000	5.513.429.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	340.000.000	0	0	0	340.000.000	370.000.000	0	0	0	370.000.000	30.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0	0	0	0	0	5.083.429.000	0	0	0	5.083.429.000	5.083.429.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.925.000.000	0	0	0	1.925.000.000	2.325.000.000	0	0	0	2.325.000.000	400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.965.482.900	109.367.792.100	0	0	119.333.275.000	10.606.482.900	138.755.471.709	0	0	149.361.954.609	30.028.679.609
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.965.482.900	109.367.792.100	0	0	119.333.275.000	10.606.482.900	138.755.471.709	0	0	149.361.954.609	30.028.679.609
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	905.482.900	0	0	0	905.482.900	985.482.900	10.000.000	0	0	995.482.900	90.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.530.000.000	109.367.792.100	0	0	115.897.792.100	7.080.000.000	138.491.471.709	0	0	145.571.471.709	29.673.679.609
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.530.000.000	0	0	0	2.530.000.000	2.541.000.000	254.000.000	0	0	2.795.000.000	265.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.820.000.000	0	0	0	3.820.000.000	4.220.000.000	0	0	0	4.220.000.000	400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.820.000.000	0	0	0	3.820.000.000	4.220.000.000	0	0	0	4.220.000.000	400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	620.000.000	0	0	0	620.000.000	620.000.000	0	0	0	620.000.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.200.000.000	0	0	0	3.200.000.000	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000	400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11.287.665.600	180.260.000.000	0	0	191.547.665.600	14.812.994.342	248.457.182.167	0	0	263.270.176.509	71.722.510.909
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	11.287.665.600	180.260.000.000	0	0	191.547.665.600	14.812.994.342	248.457.182.167	0	0	263.270.176.509	71.722.510.909
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.350.000.000	0	0	0	3.350.000.000	4.650.000.000	0	0	0	4.650.000.000	1.300.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	0	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000	1.265.084.500	19.660.000.000	0	0	20.925.084.500	(574.915.500)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.396.945.600	0	0	0	1.396.945.600	1.736.945.600	0	0	0	1.736.945.600	340.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	0	47.060.000.000	0	0	47.060.000.000	453.840.000	39.060.000.000	0	0	39.513.840.000	(7.546.160.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	0	71.800.000.000	0	0	71.800.000.000	0	107.950.000.088	0	0	107.950.000.088	36.150.000.088
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	41.587.182.079	0	0	41.587.182.079	39.987.182.079
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.940.720.000	0	0	0	2.940.720.000	2.843.862.242	0	0	0	2.843.862.242	(96.857.758)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	0	37.900.000.000	0	0	37.900.000.000	0	39.800.000.000	0	0	39.800.000.000	1.900.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0	0	0	0	0	11.959.000	0	0	0	11.959.000	11.959.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000	3.851.303.000	0	0	0	3.851.303.000	251.303.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	285.221.000	0	0	0	285.221.000	285.211.800	0	0	0	285.211.800	(9.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	0	0	0	120.561.000	120.551.800	0	0	0	120.551.800	(9.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	11 2.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	0	0	0	120.561.000	120.551.800	0	0	0	120.551.800	(9.200)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	164.660.000	0	0	0	164.660.000	164.660.000	0	0	0	164.660.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	164.660.000	0	0	0	164.660.000	164.660.000	0	0	0	164.660.000	0
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.619.106.200	0	0	0	2.619.106.200	2.791.301.291	102.275.900	0	0	2.893.577.191	274.470.991
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	502.531.000	0	0	0	502.531.000	809.169.500	0	0	0	809.169.500	306.638.500
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	502.531.000	0	0	0	502.531.000	809.169.500	0	0	0	809.169.500	306.638.500
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	532.616.000	0	0	0	532.616.000	714.809.000	0	0	0	714.809.000	182.193.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	532.616.000	0	0	0	532.616.000	714.809.000	0	0	0	714.809.000	182.193.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	826.683.800	0	0	0	826.683.800	711.933.800	92.500.900	0	0	804.434.700	(22.249.100)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	718.170.000	0	0	0	718.170.000	652.170.000	0	0	0	652.170.000	(66.000.000)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang	108.513.800	0	0	0	108.513.800	59.763.800	92.500.900	0	0	152.264.700	43.750.900
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	757.275.400	0	0	0	757.275.400	555.388.991	9.775.000	0	0	565.163.991	(192.111.409)
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	757.275.400	0	0	0	757.275.400	555.388.991	9.775.000	0	0	565.163.991	(192.111.409)
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.865.443.331	6.301.043.452	0	0	22.166.486.783	20.376.525.215	10.563.225.662	0	0	30.939.750.877	8.773.264.094
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.865.443.331	6.301.043.452	0	0	22.166.486.783	20.376.525.215	10.563.225.662	0	0	30.939.750.877	8.773.264.094
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.143.144.983	341.955.200	0	0	5.485.100.183	5.243.028.776	556.592.100	0	0	5.799.620.876	314.520.693
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000	0	0	0	10.105.000	10.105.000	0	0	0	10.105.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000	0	0	0	2.365.000	2.365.000	0	0	0	2.365.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000	0	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.086.584	0	0	0	2.874.086.584	2.890.412.377	0	0	0	2.890.412.377	16.325.793
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.066.584	0	0	0	2.870.066.584	2.886.392.377	0	0	0	2.886.392.377	16.325.793
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000	0	0	0	2.010.000	2.010.000	0	0	0	2.010.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.000	0	0	0	2.010.000	2.010.000	0	0	0	2.010.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.471.511.700	161.955.200	0	0	1.633.466.900	1.555.869.700	264.592.100	0	0	1.820.461.800	186.994.900

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.334.600	161.955.200	0	0	231.289.800	74.137.600	264.592.100	0	0	338.729.700	107.439.900
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.136.700	0	0	0	150.136.700	201.943.700	0	0	0	201.943.700	51.807.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.762.400	0	0	0	50.762.400	71.362.400	0	0	0	71.362.400	20.600.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000	0	0	0	13.435.000	13.435.000	0	0	0	13.435.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	2.750.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.185.093.000	0	0	0	1.185.093.000	1.192.241.000	0	0	0	1.192.241.000	7.148.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.352.199	0	0	0	396.352.199	408.352.199	0	0	0	408.352.199	12.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000	0	0	0	46.400.000	46.400.000	0	0	0	46.400.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000	0	0	0	85.098.000	85.098.000	0	0	0	85.098.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199	0	0	0	264.854.199	276.854.199	0	0	0	276.854.199	12.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.089.500	180.000.000	0	0	571.089.500	378.289.500	292.000.000	0	0	670.289.500	99.200.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000	0	0	0	41.490.000	41.490.000	0	0	0	41.490.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.430.000	0	0	0	237.430.000	202.820.000	0	0	0	202.820.000	(34.610.000)
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500	0	0	0	42.739.500	42.739.500	0	0	0	42.739.500	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000	0	0	0	48.550.000	48.550.000	0	0	0	48.550.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.880.000	180.000.000	0	0	200.880.000	42.690.000	292.000.000	0	0	334.690.000	133.810.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.027.974.600	2.073.000.400	0	0	4.100.975.000	725.540.000	0	0	0	725.540.000	(3.375.435.000)
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000	0	0	0	121.860.000	217.790.000	0	0	0	217.790.000	95.930.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000	0	0	0	95.930.000	191.860.000	0	0	0	191.860.000	95.930.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000	0	0	0	25.930.000	25.930.000	0	0	0	25.930.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000	0	0	0	30.900.000	30.900.000	0	0	0	30.900.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000	0	0	0	30.900.000	30.900.000	0	0	0	30.900.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.875.214.600	2.073.000.400	0	0	3.948.215.000	476.850.000	0	0	0	476.850.000	(3.471.365.000)
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000	0	0	0	476.850.000	476.850.000	0	0	0	476.850.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.398.364.600	2.073.000.400	0	0	3.471.365.000	0	0	0	0	0	(3.471.365.000)
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	477.810.000	0	0	0	477.810.000	885.160.000	0	0	0	885.160.000	407.350.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000	0	0	0	187.410.000	187.410.000	0	0	0	187.410.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000	0	0	0	187.410.000	187.410.000	0	0	0	187.410.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	290.400.000	0	0	0	290.400.000	697.750.000	0	0	0	697.750.000	407.350.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	254.600.000	0	0	0	254.600.000	689.100.000	0	0	0	689.100.000	434.500.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000	0	0	0	35.800.000	8.650.000	0	0	0	8.650.000	(27.150.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	555.400.000	0	0	0	555.400.000	3.176.640.000	1.499.255.000	0	0	4.675.895.000	4.120.495.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	555.400.000	0	0	0	555.400.000	3.176.640.000	1.499.255.000	0	0	4.675.895.000	4.120.495.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	505.950.000	0	0	0	505.950.000	3.103.700.000	0	0	0	3.103.700.000	2.597.750.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	49.450.000	0	0	0	49.450.000	72.940.000	1.499.255.000	0	0	1.572.195.000	1.522.745.000
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.661.113.748	3.886.087.852	0	0	11.547.201.600	10.346.156.439	8.507.378.562	0	0	18.853.535.001	7.306.333.401
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.661.113.748	3.886.087.852	0	0	11.547.201.600	10.346.156.439	8.507.378.562	0	0	18.853.535.001	7.306.333.401
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000	0	0	0	101.860.000	101.860.000	0	0	0	101.860.000	0
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.508.323.748	3.886.087.852	0	0	11.394.411.600	10.193.366.439	8.507.378.562	0	0	18.700.745.001	7.306.333.401
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000	0	0	0	50.930.000	50.930.000	0	0	0	50.930.000	0
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.708.058.035	587.024.700	0	0	17.295.082.735	16.778.318.488	871.707.600	0	0	17.650.026.088	354.943.353
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	11.557.585.152	425.371.400	0	0	11.982.956.552	11.779.820.805	599.902.600	0	0	12.379.723.405	396.766.853
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.533.886.052	388.871.400	0	0	7.922.757.452	7.983.176.705	450.646.600	0	0	8.433.823.305	511.065.853
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.875.000	0	0	0	8.875.000	25.141.000	0	0	0	25.141.000	16.266.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.875.000	0	0	0	8.875.000	25.141.000	0	0	0	25.141.000	16.266.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.236.013.152	0	0	0	6.236.013.152	6.255.139.855	0	0	0	6.255.139.855	19.126.703
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.224.430.952	0	0	0	6.224.430.952	6.224.432.655	0	0	0	6.224.432.655	1.703
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.212.000	0	0	0	6.212.000	15.884.000	0	0	0	15.884.000	9.672.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.370.200	0	0	0	5.370.200	14.823.200	0	0	0	14.823.200	9.453.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.722.900	0	0	0	659.722.900	1.165.660.300	0	0	0	1.165.660.300	505.937.400
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.515.600	0	0	0	11.515.600	14.500.000	0	0	0	14.500.000	2.984.400
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.867.800	0	0	0	43.867.800	49.667.800	0	0	0	49.667.800	5.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.835.300	0	0	0	122.835.300	198.785.300	0	0	0	198.785.300	75.950.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.691.200	0	0	0	22.691.200	25.813.000	0	0	0	25.813.000	3.121.800
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.890.000	0	0	0	15.890.000	15.865.200	0	0	0	15.865.200	(24.800)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.923.000	0	0	0	442.923.000	861.029.000	0	0	0	861.029.000	418.106.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.020.000	385.568.600	0	0	386.588.600	1.875.000	450.646.600	0	0	452.521.600	65.933.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	510.000	129.892.800	0	0	130.402.800	0	32.940.400	0	0	32.940.400	(97.462.400)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510.000	199.387.600	0	0	199.897.600	1.875.000	358.100.000	0	0	359.975.000	160.077.400
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	56.288.200	0	0	56.288.200	0	59.606.200	0	0	59.606.200	3.318.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.900.800	3.302.800	0	0	167.203.600	114.517.600	0	0	0	114.517.600	(52.686.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.800	3.302.800	0	0	108.903.600	24.379.200	0	0	0	24.379.200	(84.524.400)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.300.000	0	0	0	58.300.000	90.138.400	0	0	0	90.138.400	31.838.400
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.354.200	0	0	0	464.354.200	420.842.950	0	0	0	420.842.950	(43.511.250)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	418.864.600	0	0	0	418.864.600	375.353.350	0	0	0	375.353.350	(43.511.250)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.689.600	0	0	0	30.689.600	30.689.600	0	0	0	30.689.600	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	0	0	0	14.800.000	14.800.000	0	0	0	14.800.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.580.799.000	15.000.000	0	0	3.595.799.000	3.322.769.000	15.000.000	0	0	3.337.769.000	(258.030.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.448.699.000	15.000.000	0	0	3.463.699.000	3.190.669.000	15.000.000	0	0	3.205.669.000	(258.030.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.125.799.000	0	0	0	3.125.799.000	2.822.199.000	0	0	0	2.822.199.000	(303.600.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	0	0	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	283.800.000	0	0	0	283.800.000	329.370.000	0	0	0	329.370.000	45.570.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.600.000	0	0	0	8.600.000	8.600.000	0	0	0	8.600.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	132.100.000	0	0	0	132.100.000	132.100.000	0	0	0	132.100.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	0	0	0	31.800.000	31.800.000	0	0	0	31.800.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	0	0	0	32.650.000	32.650.000	0	0	0	32.650.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	0	0	0	67.650.000	67.650.000	0	0	0	67.650.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	442.900.100	21.500.000	0	0	464.400.100	473.875.100	134.256.000	0	0	608.131.100	143.731.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	442.900.100	21.500.000	0	0	464.400.100	444.375.100	134.256.000	0	0	578.631.100	114.231.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.100.000	0	0	0	395.100.000	390.300.000	0	0	0	390.300.000	(4.800.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	0	0	0	28.000.100	28.000.100	0	0	0	28.000.100	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	0	0	0	8.400.000	8.400.000	0	0	0	8.400.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.400.000	21.500.000	0	0	23.900.000	8.675.000	134.256.000	0	0	142.931.000	119.031.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	0	0	0	0	29.500.000	0	0	0	29.500.000	29.500.000
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	29.500.000	0	0	0	29.500.000	29.500.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.150.472.883	161.653.300	0	0	5.312.126.183	4.998.497.683	271.805.000	0	0	5.270.302.683	(41.823.500)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.727.355	161.653.300	0	0	4.392.380.655	4.256.863.455	271.805.000	0	0	4.528.668.455	136.287.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.930.300	0	0	0	2.930.300	2.930.300	0	0	0	2.930.300	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.930.300	0	0	0	2.930.300	2.930.300	0	0	0	2.930.300	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.082.355	0	0	0	2.829.082.355	2.829.227.355	0	0	0	2.829.227.355	145.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.216.655	0	0	0	2.825.216.655	2.825.361.655	0	0	0	2.825.361.655	145.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.900	0	0	0	1.040.900	1.040.900	0	0	0	1.040.900	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.824.800	0	0	0	2.824.800	2.824.800	0	0	0	2.824.800	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.702.900	0	0	0	710.702.900	667.744.000	0	0	0	667.744.000	(42.958.900)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.428.200	0	0	0	6.428.200	22.219.300	0	0	0	22.219.300	15.791.100
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.148.500	0	0	0	36.148.500	36.148.500	0	0	0	36.148.500	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	0	0	0	33.000.000	28.500.000	0	0	0	28.500.000	(4.500.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6.086.200	0	0	0	6.086.200	6.086.200	0	0	0	6.086.200	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.995.000	0	0	0	5.995.000	5.995.000	0	0	0	5.995.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.045.000	0	0	0	553.045.000	498.795.000	0	0	0	498.795.000	(54.250.000)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	161.653.300	0	0	161.653.300	1.690.000	271.805.000	0	0	273.495.000	111.841.700
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	146.538.300	0	0	146.538.300	1.690.000	256.690.000	0	0	258.380.000	111.841.700
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	15.115.000	0	0	15.115.000	0	15.115.000	0	0	15.115.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.260.400	0	0	0	567.260.400	589.660.400	0	0	0	589.660.400	22.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.366.400	0	0	0	2.366.400	2.366.400	0	0	0	2.366.400	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.194.000	0	0	0	70.194.000	73.194.000	0	0	0	73.194.000	3.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.700.000	0	0	0	494.700.000	514.100.000	0	0	0	514.100.000	19.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.751.400	0	0	0	120.751.400	165.611.400	0	0	0	165.611.400	44.860.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.191.200	0	0	0	95.191.200	136.031.200	0	0	0	136.031.200	40.840.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.560.200	0	0	0	25.560.200	29.580.200	0	0	0	29.580.200	4.020.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	919.745.528	0	0	0	919.745.528	741.634.228	0	0	0	741.634.228	(178.111.300)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	39.649.900	0	0	0	39.649.900	39.649.900	0	0	0	39.649.900	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	39.649.900	0	0	0	39.649.900	39.649.900	0	0	0	39.649.900	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	783.476.628	0	0	0	783.476.628	653.674.828	0	0	0	653.674.828	(129.801.800)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	13.018.000	0	0	0	13.018.000	213.017.800	0	0	0	213.017.800	199.999.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	663.489.000	0	0	0	663.489.000	333.689.000	0	0	0	333.689.000	(329.800.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	56.039.628	0	0	0	56.039.628	56.039.628	0	0	0	56.039.628	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.160.000	0	0	0	24.160.000	24.160.000	0	0	0	24.160.000	0
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26.770.000	0	0	0	26.770.000	26.768.400	0	0	0	26.768.400	(1.600)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96.619.000	0	0	0	96.619.000	48.309.500	0	0	0	48.309.500	(48.309.500)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	96.619.000	0	0	0	96.619.000	48.309.500	0	0	0	48.309.500	(48.309.500)
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.403.298.194	0	0	0	17.403.298.194	19.124.024.987	554.560.500	0	0	19.678.585.487	2.275.287.293
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	17.403.298.194	0	0	0	17.403.298.194	19.124.024.987	554.560.500	0	0	19.678.585.487	2.275.287.293
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.792.896.694	0	0	0	4.792.896.694	4.963.212.487	554.560.500	0	0	5.517.772.987	724.876.293
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.488.600	0	0	0	9.488.600	12.988.600	0	0	0	12.988.600	3.500.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.488.600	0	0	0	9.488.600	12.988.600	0	0	0	12.988.600	3.500.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.209.594	0	0	0	3.238.209.594	3.238.250.287	0	0	0	3.238.250.287	40.693
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.269.594	0	0	0	3.232.269.594	3.232.310.287	0	0	0	3.232.310.287	40.693
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.970.000	0	0	0	2.970.000	2.970.000	0	0	0	2.970.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.970.000	0	0	0	2.970.000	2.970.000	0	0	0	2.970.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.281.200	0	0	0	1.151.281.200	1.251.107.700	0	0	0	1.251.107.700	99.826.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.049.000	0	0	0	2.049.000	12.933.000	0	0	0	12.933.000	10.884.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.286.300	0	0	0	114.286.300	122.805.400	0	0	0	122.805.400	8.519.100
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.323.600	0	0	0	83.323.600	83.323.600	0	0	0	83.323.600	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.090.600	0	0	0	13.090.600	18.509.200	0	0	0	18.509.200	5.418.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1.823.700	0	0	0	1.823.700	3.112.500	0	0	0	3.112.500	1.288.800
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	48.365.000	0	0	0	48.365.000	30.365.000	0	0	0	30.365.000	(18.000.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.343.000	0	0	0	888.343.000	980.059.000	0	0	0	980.059.000	91.716.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	2.655.000	533.560.500	0	0	536.215.500	536.215.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	885.000	72.700.000	0	0	73.585.000	73.585.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	885.000	138.445.300	0	0	139.330.300	139.330.300
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	885.000	322.415.200	0	0	323.300.200	323.300.200
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.006.800	0	0	0	251.006.800	271.730.500	0	0	0	271.730.500	20.723.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000	0	0	0	580.000	580.000	0	0	0	580.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.132.000	0	0	0	87.132.000	129.132.000	0	0	0	129.132.000	42.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.294.800	0	0	0	163.294.800	142.018.500	0	0	0	142.018.500	(21.276.300)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.910.500	0	0	0	142.910.500	186.480.400	21.000.000	0	0	207.480.400	64.569.900
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.652.500	0	0	0	118.652.500	146.329.500	0	0	0	146.329.500	27.677.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	0	0	0	14.200.000	14.200.000	0	0	0	14.200.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.058.000	0	0	0	10.058.000	25.950.900	21.000.000	0	0	46.950.900	36.892.900

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.304.144.900	0	0	0	1.304.144.900	1.058.463.200	0	0	0	1.058.463.200	(245.681.700)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.304.144.900	0	0	0	1.304.144.900	1.058.463.200	0	0	0	1.058.463.200	(245.681.700)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	48.790.000	0	0	0	48.790.000	61.330.000	0	0	0	61.330.000	12.540.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	146.630.000	0	0	0	146.630.000	156.045.000	0	0	0	156.045.000	9.415.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.081.254.900	0	0	0	1.081.254.900	804.803.200	0	0	0	804.803.200	(276.451.700)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	27.470.000	0	0	0	27.470.000	36.285.000	0	0	0	36.285.000	8.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.071.050.300	0	0	0	5.071.050.300	4.981.051.400	0	0	0	4.981.051.400	(89.998.900)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.046.810.300	0	0	0	5.046.810.300	4.945.811.400	0	0	0	4.945.811.400	(100.998.900)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	4.883.015.000	0	0	0	4.883.015.000	4.716.615.000	0	0	0	4.716.615.000	(166.400.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	13.500.000	0	0	0	13.500.000	28.125.000	0	0	0	28.125.000	14.625.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	24.968.000	0	0	0	24.968.000	30.898.100	0	0	0	30.898.100	5.930.100
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.000.000	0	0	0	13.000.000	21.120.000	0	0	0	21.120.000	8.120.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.327.300	0	0	0	77.327.300	86.677.300	0	0	0	86.677.300	9.350.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.000.000	0	0	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	0	0	0	5.000.000	8.696.000	0	0	0	8.696.000	3.696.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	0	0	0	6.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.000.000	0	0	0	6.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	6.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	0	0	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	6.000.000	0	0	0	6.000.000	15.680.000	0	0	0	15.680.000	9.680.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	24.240.000	0	0	0	24.240.000	35.240.000	0	0	0	35.240.000	11.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.240.000	0	0	0	7.240.000	7.240.000	0	0	0	7.240.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000	0	0	0	3.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	11.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.223.170.700	0	0	0	1.223.170.700	4.274.222.300	0	0	0	4.274.222.300	3.051.051.600
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	28.872.500	0	0	0	28.872.500	31.975.000	0	0	0	31.975.000	3.102.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	24.242.500	0	0	0	24.242.500	27.345.000	0	0	0	27.345.000	3.102.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.630.000	0	0	0	4.630.000	4.630.000	0	0	0	4.630.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.194.298.200	0	0	0	1.194.298.200	4.242.247.300	0	0	0	4.242.247.300	3.047.949.100
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	258.970.000	0	0	0	258.970.000	811.586.600	0	0	0	811.586.600	552.616.600

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	265.370.000	0	0	0	265.370.000	294.270.000	0	0	0	294.270.000	28.900.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	233.958.200	0	0	0	233.958.200	2.686.931.700	0	0	0	2.686.931.700	2.452.973.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	436.000.000	0	0	0	436.000.000	449.459.000	0	0	0	449.459.000	13.459.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.964.490.500	0	0	0	4.964.490.500	3.799.530.500	0	0	0	3.799.530.500	(1.164.960.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.776.614.100	0	0	0	4.776.614.100	3.560.154.100	0	0	0	3.560.154.100	(1.216.460.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	195.064.000	0	0	0	195.064.000	80.840.000	0	0	0	80.840.000	(114.224.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	218.050.000	0	0	0	218.050.000	180.550.000	0	0	0	180.550.000	(37.500.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.363.500.100	0	0	0	4.363.500.100	3.298.764.100	0	0	0	3.298.764.100	(1.064.736.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	187.876.400	0	0	0	187.876.400	239.376.400	0	0	0	239.376.400	51.500.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	16.706.400	0	0	0	16.706.400	15.456.400	0	0	0	15.456.400	(1.250.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	171.170.000	0	0	0	171.170.000	223.920.000	0	0	0	223.920.000	52.750.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.545.100	0	0	0	47.545.100	47.545.100	0	0	0	47.545.100	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	0	0	0	47.545.100	47.545.100	0	0	0	47.545.100	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	0	0	0	47.545.100	47.545.100	0	0	0	47.545.100	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	113.785.108.823	118.988.644.784	0	0	232.773.753.607	176.746.720.147	59.112.490.848	90.000.000	0	235.949.210.995	3.175.457.388
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.341.707.345	267.484.850	0	0	5.609.192.195	7.306.021.555	378.977.450	0	0	7.684.999.005	2.075.806.810
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.341.707.345	267.484.850	0	0	5.609.192.195	7.306.021.555	378.977.450	0	0	7.684.999.005	2.075.806.810
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.247.470.861	267.484.850	0	0	4.514.955.711	4.453.764.015	358.548.950	0	0	4.812.312.965	297.357.254
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.250.000	0	0	0	15.250.000	18.590.500	0	0	0	18.590.500	3.340.500
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	0	0	0	15.250.000	18.590.500	0	0	0	18.590.500	3.340.500
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.020.021	0	0	0	3.188.020.021	3.188.018.915	0	0	0	3.188.018.915	(1.106)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.970.021	0	0	0	3.184.970.021	3.184.968.915	0	0	0	3.184.968.915	(1.106)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.050.000	0	0	0	3.050.000	3.050.000	0	0	0	3.050.000	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.232.200	83.335.350	0	0	696.567.550	850.447.200	117.897.350	0	0	968.344.550	271.777.000
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.002.200	83.335.350	0	0	168.337.550	86.502.200	117.897.350	0	0	204.399.550	36.062.000
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.092.000	0	0	0	121.092.000	136.758.000	0	0	0	136.758.000	15.666.000
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.700.000	0	0	0	13.700.000	13.700.000	0	0	0	13.700.000	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.438.000	0	0	0	393.438.000	613.487.000	0	0	0	613.487.000	220.049.000
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	170.549.500	0	0	170.549.500	0	227.051.600	0	0	227.051.600	56.502.100
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	170.549.500	0	0	170.549.500	0	227.051.600	0	0	227.051.600	56.502.100
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.881.440	0	0	0	131.881.440	111.267.400	0	0	0	111.267.400	(20.614.040)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.798.400	0	0	0	80.798.400	68.667.400	0	0	0	68.667.400	(12.131.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.083.040	0	0	0	51.083.040	42.600.000	0	0	0	42.600.000	(8.483.040)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.087.200	13.600.000	0	0	312.687.200	285.440.000	13.600.000	0	0	299.040.000	(13.647.200)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.520.000	0	0	0	62.520.000	62.520.000	0	0	0	62.520.000	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	0	0	0	22.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	(9.000.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.067.200	13.600.000	0	0	227.667.200	209.420.000	13.600.000	0	0	223.020.000	(4.647.200)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	280.964.104	0	0	0	280.964.104	264.914.100	0	0	0	264.914.100	(16.050.004)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	268.892.604	0	0	0	268.892.604	252.842.600	0	0	0	252.842.600	(16.050.004)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	268.892.604	0	0	0	268.892.604	252.842.600	0	0	0	252.842.600	(16.050.004)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500	0	0	0	12.071.500	12.071.500	0	0	0	12.071.500	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500	0	0	0	12.071.500	12.071.500	0	0	0	12.071.500	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	408.020.300	0	0	0	408.020.300	2.201.329.400	20.428.500	0	0	2.221.757.900	1.813.737.600
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	198.490.300	0	0	0	198.490.300	1.732.096.200	0	0	0	1.732.096.200	1.533.605.900
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	9.942.200	0	0	0	9.942.200	9.942.200	0	0	0	9.942.200	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18.182.000	0	0	0	18.182.000	18.182.000	0	0	0	18.182.000	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	170.366.100	0	0	0	170.366.100	1.703.972.000	0	0	0	1.703.972.000	1.533.605.900
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	120.530.900	0	0	0	120.530.900	98.930.900	0	0	0	98.930.900	(21.600.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	120.530.900	0	0	0	120.530.900	98.930.900	0	0	0	98.930.900	(21.600.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	88.999.100	0	0	0	88.999.100	370.302.300	20.428.500	0	0	390.730.800	301.731.700
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	6.388.500	0	0	0	6.388.500	344.852.500	20.428.500	0	0	365.281.000	358.892.500
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	82.610.600	0	0	0	82.610.600	25.449.800	0	0	0	25.449.800	(57.160.800)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	405.252.080	0	0	0	405.252.080	386.014.040	0	0	0	386.014.040	(19.238.040)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.529.980	0	0	0	227.529.980	229.891.940	0	0	0	229.891.940	2.361.960
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	8.484.000	0	0	0	8.484.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	(3.084.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	219.045.980	0	0	0	219.045.980	224.491.940	0	0	0	224.491.940	5.445.960
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	177.722.100	0	0	0	177.722.100	156.122.100	0	0	0	156.122.100	(21.600.000)
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.491.400	0	0	0	83.491.400	83.491.400	0	0	0	83.491.400	0
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.230.700	0	0	0	94.230.700	72.630.700	0	0	0	72.630.700	(21.600.000)
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.245.757.711	177.935.250	0	0	7.423.692.961	9.045.195.657	172.486.450	0	0	9.217.682.107	1.793.989.146
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.245.757.711	177.935.250	0	0	7.423.692.961	9.045.195.657	172.486.450	0	0	9.217.682.107	1.793.989.146
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.586.064.031	177.935.250	0	0	5.763.999.281	6.892.177.377	172.486.450	0	0	7.064.663.827	1.300.664.546
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.027.900	0	0	0	10.027.900	(4.972.100)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.027.900	0	0	0	10.027.900	(4.972.100)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.596.833.469	0	0	0	2.596.833.469	2.597.055.441	0	0	0	2.597.055.441	221.972

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.586.825.369	0	0	0	2.586.825.369	2.587.047.341	0	0	0	2.587.047.341	221.972
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.300	0	0	0	5.000.300	5.000.300	0	0	0	5.000.300	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.007.800	0	0	0	5.007.800	5.007.800	0	0	0	5.007.800	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.184.598.524	0	0	0	2.184.598.524	3.508.772.624	0	0	0	3.508.772.624	1.324.174.100
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.608.224	0	0	0	8.608.224	5.584.124	0	0	0	5.584.124	(3.024.100)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.657.400	0	0	0	58.657.400	56.286.600	0	0	0	56.286.600	(2.370.800)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.208.300	0	0	0	80.208.300	73.003.300	0	0	0	73.003.300	(7.205.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.623.700	0	0	0	12.623.700	12.623.700	0	0	0	12.623.700	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2.237.900	0	0	0	2.237.900	2.237.900	0	0	0	2.237.900	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	2.750.000	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.019.513.000	0	0	0	2.019.513.000	3.356.287.000	0	0	0	3.356.287.000	1.336.774.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.720.000	177.935.250	0	0	179.655.250	1.720.000	172.486.450	0	0	174.206.450	(5.448.800)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	860.000	94.754.000	0	0	95.614.000	860.000	87.388.000	0	0	88.248.000	(7.366.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	860.000	83.181.250	0	0	84.041.250	860.000	85.098.450	0	0	85.958.450	1.917.200
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.349.100	0	0	0	212.349.100	193.017.100	0	0	0	193.017.100	(19.332.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000	0	0	0	1.160.000	1.624.000	0	0	0	1.624.000	464.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.452.300	0	0	0	69.452.300	43.456.300	0	0	0	43.456.300	(25.996.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.736.800	0	0	0	141.736.800	147.936.800	0	0	0	147.936.800	6.200.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.562.938	0	0	0	575.562.938	581.584.312	0	0	0	581.584.312	6.021.374
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.850.900	0	0	0	95.850.900	105.144.400	0	0	0	105.144.400	9.293.500
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.650.000	0	0	0	6.650.000	8.650.000	0	0	0	8.650.000	2.000.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	473.062.038	0	0	0	473.062.038	467.789.912	0	0	0	467.789.912	(5.272.126)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	309.096.780	0	0	0	309.096.780	319.815.280	0	0	0	319.815.280	10.718.500
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.507.000	0	0	0	51.507.000	51.207.000	0	0	0	51.207.000	(300.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	51.507.000	0	0	0	51.507.000	51.207.000	0	0	0	51.207.000	(300.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.055.300	0	0	0	30.055.300	30.055.300	0	0	0	30.055.300	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.055.300	0	0	0	30.055.300	30.055.300	0	0	0	30.055.300	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	227.534.480	0	0	0	227.534.480	238.552.980	0	0	0	238.552.980	11.018.500
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.973.100	0	0	0	34.973.100	34.973.100	0	0	0	34.973.100	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.833.600	0	0	0	130.833.600	141.852.100	0	0	0	141.852.100	11.018.500

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.727.780	0	0	0	61.727.780	61.727.780	0	0	0	61.727.780	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	154.254.300	0	0	0	154.254.300	283.580.000	0	0	0	283.580.000	129.325.700
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.153.800	0	0	0	18.153.800	56.664.500	0	0	0	56.664.500	38.510.700
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	18.153.800	0	0	0	18.153.800	56.664.500	0	0	0	56.664.500	38.510.700
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.455.700	0	0	0	116.455.700	207.270.700	0	0	0	207.270.700	90.815.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.480.000	0	0	0	98.480.000	93.480.000	0	0	0	93.480.000	(5.000.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.975.700	0	0	0	17.975.700	113.790.700	0	0	0	113.790.700	95.815.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.644.800	0	0	0	19.644.800	19.644.800	0	0	0	19.644.800	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.800	0	0	0	19.644.800	19.644.800	0	0	0	19.644.800	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	484.981.300	0	0	0	484.981.300	477.371.500	0	0	0	477.371.500	(7.609.800)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	361.928.400	0	0	0	361.928.400	335.288.400	0	0	0	335.288.400	(26.640.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.467.300	0	0	0	55.467.300	40.037.300	0	0	0	40.037.300	(15.430.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	132.379.900	0	0	0	132.379.900	131.079.900	0	0	0	131.079.900	(1.300.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	174.081.200	0	0	0	174.081.200	164.171.200	0	0	0	164.171.200	(9.910.000)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	123.052.900	0	0	0	123.052.900	142.083.100	0	0	0	142.083.100	19.030.200
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.052.900	0	0	0	123.052.900	142.083.100	0	0	0	142.083.100	19.030.200
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	123.135.700	0	0	0	123.135.700	123.395.700	0	0	0	123.395.700	260.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.135.700	0	0	0	123.135.700	123.395.700	0	0	0	123.395.700	260.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.966.000	0	0	0	55.966.000	59.535.800	0	0	0	59.535.800	3.569.800
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	67.169.700	0	0	0	67.169.700	63.859.900	0	0	0	63.859.900	(3.309.800)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	500.933.500	0	0	0	500.933.500	583.350.900	0	0	0	583.350.900	82.417.400
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.811.500	0	0	0	65.811.500	85.341.000	0	0	0	85.341.000	19.529.500
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.892.400	0	0	0	59.892.400	59.892.400	0	0	0	59.892.400	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.919.100	0	0	0	5.919.100	25.448.600	0	0	0	25.448.600	19.529.500
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	435.122.000	0	0	0	435.122.000	498.009.900	0	0	0	498.009.900	62.887.900
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.087.600	0	0	0	36.087.600	36.087.600	0	0	0	36.087.600	0
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.610.200	0	0	0	237.610.200	284.570.100	0	0	0	284.570.100	46.959.900
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.424.200	0	0	0	161.424.200	177.352.200	0	0	0	177.352.200	15.928.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	87.292.100	0	0	0	87.292.100	365.504.900	0	0	0	365.504.900	278.212.800
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.139.000	0	0	0	17.139.000	87.148.300	0	0	0	87.148.300	70.009.300
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.139.000	0	0	0	17.139.000	87.148.300	0	0	0	87.148.300	70.009.300
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.289.200	0	0	0	39.289.200	176.095.500	0	0	0	176.095.500	136.806.300
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.321.200	0	0	0	27.321.200	12.298.500	0	0	0	12.298.500	(15.022.700)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	11.968.000	0	0	0	11.968.000	163.797.000	0	0	0	163.797.000	151.829.000
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.863.900	0	0	0	30.863.900	102.261.100	0	0	0	102.261.100	71.397.200
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.741.900	0	0	0	19.741.900	87.239.100	0	0	0	87.239.100	67.497.200
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.122.000	0	0	0	11.122.000	15.022.000	0	0	0	15.022.000	3.900.000
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.008.742.482	111.240.300	0	0	6.119.982.782	8.358.479.111	66.729.300	0	0	8.425.208.411	2.305.225.629
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6.008.742.482	111.240.300	0	0	6.119.982.782	8.358.479.111	66.729.300	0	0	8.425.208.411	2.305.225.629
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.816.921.374	111.240.300	0	0	3.928.161.674	4.038.594.003	66.729.300	0	0	4.105.323.303	177.161.629
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.050.100	0	0	0	69.050.100	61.850.100	0	0	0	61.850.100	(7.200.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.050.100	0	0	0	69.050.100	61.850.100	0	0	0	61.850.100	(7.200.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.033.378	0	0	0	2.485.033.378	2.486.107.963	0	0	0	2.486.107.963	1.074.585
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.733.378	0	0	0	2.445.733.378	2.446.807.963	0	0	0	2.446.807.963	1.074.585
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.300.000	0	0	0	39.300.000	39.300.000	0	0	0	39.300.000	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	984.912.500	111.240.300	0	0	1.096.152.800	1.202.492.500	66.729.300	0	0	1.269.221.800	173.069.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.400	0	0	0	9.999.400	9.999.400	0	0	0	9.999.400	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.897.000	111.240.300	0	0	152.137.300	41.782.000	66.729.300	0	0	108.511.300	(43.626.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.390.000	0	0	0	114.390.000	92.790.000	0	0	0	92.790.000	(21.600.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.400.100	0	0	0	24.400.100	24.400.100	0	0	0	24.400.100	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	3.556.000	0	0	0	3.556.000	5.021.000	0	0	0	5.021.000	1.465.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.680.000	0	0	0	11.680.000	11.680.000	0	0	0	11.680.000	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	779.990.000	0	0	0	779.990.000	1.016.820.000	0	0	0	1.016.820.000	236.830.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.983.600	0	0	0	127.983.600	108.983.600	0	0	0	108.983.600	(19.000.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.983.600	0	0	0	53.983.600	40.783.600	0	0	0	40.783.600	(13.200.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.000.000	0	0	0	74.000.000	68.200.000	0	0	0	68.200.000	(5.800.000)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.941.796	0	0	0	149.941.796	179.159.840	0	0	0	179.159.840	29.218.044
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.770.900	0	0	0	116.770.900	124.480.100	0	0	0	124.480.100	7.709.200
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.970.896	0	0	0	19.970.896	41.479.740	0	0	0	41.479.740	21.508.844
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.041.330.908	0	0	0	2.041.330.908	2.169.416.108	0	0	0	2.169.416.108	128.085.200
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	413.905.508	0	0	0	413.905.508	435.668.008	0	0	0	435.668.008	21.762.500
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.650.100	0	0	0	25.650.100	25.650.100	0	0	0	25.650.100	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	338.185.308	0	0	0	338.185.308	353.485.308	0	0	0	353.485.308	15.300.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	26.900.100	0	0	0	26.900.100	26.900.100	0	0	0	26.900.100	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	6.470.100	0	0	0	6.470.100	12.932.600	0	0	0	12.932.600	6.462.500
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	16.699.900	0	0	0	16.699.900	16.699.900	0	0	0	16.699.900	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.008.244.000	0	0	0	1.008.244.000	998.407.100	0	0	0	998.407.100	(9.836.900)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.008.244.000	0	0	0	1.008.244.000	998.407.100	0	0	0	998.407.100	(9.836.900)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	619.181.400	0	0	0	619.181.400	735.341.000	0	0	0	735.341.000	116.159.600
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	298.212.600	0	0	0	298.212.600	167.541.200	0	0	0	167.541.200	(130.671.400)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	320.968.800	0	0	0	320.968.800	567.799.800	0	0	0	567.799.800	246.831.000
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.100.200	0	0	0	75.100.200	75.079.000	0	0	0	75.079.000	(21.200)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	53.600.100	0	0	0	53.600.100	53.600.100	0	0	0	53.600.100	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.600.100	0	0	0	53.600.100	53.600.100	0	0	0	53.600.100	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.500.100	0	0	0	21.500.100	21.478.900	0	0	0	21.478.900	(21.200)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	21.500.100	0	0	0	21.500.100	21.478.900	0	0	0	21.478.900	(21.200)
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.390.000	0	0	0	75.390.000	75.390.000	0	0	0	75.390.000	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	0	0	0	75.390.000	75.390.000	0	0	0	75.390.000	0
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	0	0	0	75.390.000	75.390.000	0	0	0	75.390.000	0
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.091.299.850	57.936.274.843	0	0	60.027.574.693	1.065.085.000	3.897.470.000	0	0	4.962.555.000	(55.065.019.693)
1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.091.299.850	57.936.274.843	0	0	60.027.574.693	1.065.085.000	3.897.470.000	0	0	4.962.555.000	(55.065.019.693)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	230.375.000	0	0	0	230.375.000	253.825.000	0	0	0	253.825.000	23.450.000
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000	0	0	0	230.375.000	253.825.000	0	0	0	253.825.000	23.450.000
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.375.000	0	0	0	230.375.000	253.825.000	0	0	0	253.825.000	23.450.000
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.009.309.850	57.936.274.843	0	0	58.945.584.693	223.930.000	3.897.470.000	0	0	4.121.400.000	(54.824.184.693)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.009.309.850	57.936.274.843	0	0	58.945.584.693	223.930.000	3.897.470.000	0	0	4.121.400.000	(54.824.184.693)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.009.309.850	57.936.274.843	0	0	58.945.584.693	223.930.000	3.897.470.000	0	0	4.121.400.000	(54.824.184.693)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	851.615.000	0	0	0	851.615.000	587.330.000	0	0	0	587.330.000	(264.285.000)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	851.615.000	0	0	0	851.615.000	587.330.000	0	0	0	587.330.000	(264.285.000)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	743.550.000	0	0	0	743.550.000	436.650.000	0	0	0	436.650.000	(306.900.000)
2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	108.065.000	0	0	0	108.065.000	150.680.000	0	0	0	150.680.000	42.615.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.920.534.434	8.736.469.400	0	0	27.657.003.834	19.943.508.312	6.460.969.120	0	0	26.404.477.432	(1.252.526.402)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	18.920.534.434	8.736.469.400	0	0	27.657.003.834	19.943.508.312	6.460.969.120	0	0	26.404.477.432	(1.252.526.402)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.948.097.168	85.271.400	0	0	8.033.368.568	8.685.433.286	312.156.520	0	0	8.997.589.806	964.221.238
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.137.300	0	0	0	31.137.300	31.343.700	0	0	0	31.343.700	206.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.965.000	0	0	0	3.965.000	3.970.100	0	0	0	3.970.100	5.100
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.237.200	0	0	0	26.237.200	26.405.500	0	0	0	26.405.500	168.300
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.100	0	0	0	935.100	968.100	0	0	0	968.100	33.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.582.969.556	0	0	0	4.582.969.556	4.590.183.630	0	0	0	4.590.183.630	7.214.074
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.184.656	0	0	0	4.520.184.656	4.520.198.730	0	0	0	4.520.198.730	14.074
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.785.100	0	0	0	57.785.100	64.985.100	0	0	0	64.985.100	7.200.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.099.900	0	0	0	3.099.900	3.099.900	0	0	0	3.099.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.899.900	0	0	0	1.899.900	1.899.900	0	0	0	1.899.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	928.216.924	75.713.600	0	0	1.003.930.524	1.348.482.738	68.613.200	0	0	1.417.095.938	413.165.414
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.718.438	11.400.000	0	0	19.118.438	14.401.438	11.400.000	0	0	25.801.438	6.683.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.623.700	64.313.600	0	0	137.937.300	109.738.900	57.213.200	0	0	166.952.100	29.014.800

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.259.000	0	0	0	72.259.000	73.287.500	0	0	0	73.287.500	1.028.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.607.200	0	0	0	5.607.200	13.324.100	0	0	0	13.324.100	7.716.900
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	5.293.586	0	0	0	5.293.586	10.279.600	0	0	0	10.279.600	4.986.014
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.375.000	0	0	0	8.375.000	4.970.000	0	0	0	4.970.000	(3.405.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.340.000	0	0	0	755.340.000	1.122.481.200	0	0	0	1.122.481.200	367.141.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	9.557.800	0	0	9.557.800	0	243.543.320	0	0	243.543.320	233.985.520
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	9.557.800	0	0	9.557.800	0	243.543.320	0	0	243.543.320	233.985.520
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.454.240	0	0	0	237.454.240	247.076.064	0	0	0	247.076.064	9.621.824
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.480.000	0	0	0	114.480.000	94.800.000	0	0	0	94.800.000	(19.680.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.974.240	0	0	0	122.974.240	152.276.064	0	0	0	152.276.064	29.301.824
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.168.319.148	0	0	0	2.168.319.148	2.468.347.154	0	0	0	2.468.347.154	300.028.006
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.484.000	0	0	0	44.484.000	45.618.600	0	0	0	45.618.600	1.134.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.524.165.600	0	0	0	1.524.165.600	1.750.286.200	0	0	0	1.750.286.200	226.120.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	160.773.900	0	0	0	160.773.900	221.770.150	0	0	0	221.770.150	60.996.250
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.000.000	0	0	0	31.000.000	40.350.000	0	0	0	40.350.000	9.350.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.751.976	0	0	0	148.751.976	150.493.776	0	0	0	150.493.776	1.741.800
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.523.356	0	0	0	196.523.356	184.093.540	0	0	0	184.093.540	(12.429.816)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.620.316	0	0	0	62.620.316	75.734.888	0	0	0	75.734.888	13.114.572
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	947.909.300	0	0	0	947.909.300	962.909.300	0	0	0	962.909.300	15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	947.909.300	0	0	0	947.909.300	962.909.300	0	0	0	962.909.300	15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/ RPJMD	900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	47.909.300	0	0	0	47.909.300	62.909.300	0	0	0	62.909.300	15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	970.245.282	897.828.400	0	0	1.868.073.682	1.219.548.954	1.558.606.600	0	0	2.778.155.554	910.081.872
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	687.626.182	788.200.000	0	0	1.475.826.182	939.070.454	1.480.354.100	0	0	2.419.424.554	943.598.372
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	205.297.300	0	0	0	205.297.300	146.473.800	0	0	0	146.473.800	(58.823.500)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	178.560.600	32.700.000	0	0	211.260.600	202.805.200	20.000.000	0	0	222.805.200	11.544.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	303.768.282	755.500.000	0	0	1.059.268.282	589.791.454	1.460.354.100	0	0	2.050.145.554	990.877.272
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	144.730.000	7.200.000	0	0	151.930.000	159.780.000	4.800.000	0	0	164.580.000	12.650.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	144.730.000	7.200.000	0	0	151.930.000	159.780.000	4.800.000	0	0	164.580.000	12.650.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	137.889.100	102.428.400	0	0	240.317.500	120.698.500	73.452.500	0	0	194.151.000	(46.166.500)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	59.674.800	4.800.000	0	0	64.474.800	60.619.800	0	0	0	60.619.800	(3.855.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	78.214.300	97.628.400	0	0	175.842.700	60.078.700	73.452.500	0	0	133.531.200	(42.311.500)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.087.172.652	5.326.453.000	0	0	7.413.625.652	2.194.269.228	377.209.400	0	0	2.571.478.628	(4.842.147.024)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.087.172.652	5.326.453.000	0	0	7.413.625.652	2.194.269.228	377.209.400	0	0	2.571.478.628	(4.842.147.024)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.087.172.652	5.326.453.000	0	0	7.413.625.652	2.194.269.228	377.209.400	0	0	2.571.478.628	(4.842.147.024)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	276.200.800	48.700.600	0	0	324.901.400	345.109.400	79.780.600	0	0	424.890.000	99.988.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.800.800	3.596.600	0	0	43.397.400	35.709.400	3.596.600	0	0	39.306.000	(4.091.400)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.800.800	3.596.600	0	0	43.397.400	35.709.400	3.596.600	0	0	39.306.000	(4.091.400)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	236.400.000	45.104.000	0	0	281.504.000	309.400.000	76.184.000	0	0	385.584.000	104.080.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	236.400.000	45.104.000	0	0	281.504.000	309.400.000	76.184.000	0	0	385.584.000	104.080.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.944.200	0	0	0	29.944.200	9.484.200	0	0	0	9.484.200	(20.460.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	0	0	0	29.944.200	9.484.200	0	0	0	9.484.200	(20.460.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	0	0	0	29.944.200	9.484.200	0	0	0	9.484.200	(20.460.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	125.772.100	3.500.000	0	0	129.272.100	125.772.100	3.500.000	0	0	129.272.100	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	88.692.200	0	0	0	88.692.200	88.692.200	0	0	0	88.692.200	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	88.692.200	0	0	0	88.692.200	88.692.200	0	0	0	88.692.200	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	37.079.900	3.500.000	0	0	40.579.900	37.079.900	3.500.000	0	0	40.579.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	37.079.900	3.500.000	0	0	40.579.900	37.079.900	3.500.000	0	0	40.579.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.050.800	9.700.000	0	0	52.750.800	43.050.600	9.700.000	0	0	52.750.600	(200)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.050.800	9.700.000	0	0	52.750.800	43.050.600	9.700.000	0	0	52.750.600	(200)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	43.050.800	9.700.000	0	0	52.750.800	43.050.600	9.700.000	0	0	52.750.600	(200)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	398.721.600	69.600.000	0	0	468.321.600	398.721.516	69.600.000	0	0	468.321.516	(84)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	398.721.600	69.600.000	0	0	468.321.600	398.721.516	69.600.000	0	0	468.321.516	(84)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	398.721.600	69.600.000	0	0	468.321.600	398.721.516	69.600.000	0	0	468.321.516	(84)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.419.000	0	0	0	41.419.000	20.479.000	0	0	0	20.479.000	(20.940.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41.419.000	0	0	0	41.419.000	20.479.000	0	0	0	20.479.000	(20.940.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	41.419.000	0	0	0	41.419.000	20.479.000	0	0	0	20.479.000	(20.940.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.052.001.532	2.295.416.000	0	0	8.347.417.532	5.938.730.728	4.050.416.000	0	0	9.989.146.728	1.641.729.196
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01	Pengelolaan Sampah	6.052.001.532	2.295.416.000	0	0	8.347.417.532	5.938.730.728	4.050.416.000	0	0	9.989.146.728	1.641.729.196
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.326.035.100	0	0	0	5.326.035.100	5.308.830.100	0	0	0	5.308.830.100	(17.205.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.975.000	0	0	0	41.975.000	41.975.000	0	0	0	41.975.000	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	644.622.132	190.416.000	0	0	835.038.132	548.556.328	1.780.416.000	0	0	2.328.972.328	1.493.934.196
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	39.369.300	2.105.000.000	0	0	2.144.369.300	39.369.300	2.270.000.000	0	0	2.309.369.300	165.000.000
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.448.544.176	705.377.800	0	0	7.153.921.976	7.063.054.496	1.169.299.527	0	0	8.232.354.023	1.078.432.047
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.448.544.176	705.377.800	0	0	7.153.921.976	7.063.054.496	1.169.299.527	0	0	8.232.354.023	1.078.432.047
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.245.514.076	705.377.800	0	0	5.950.891.876	5.874.177.596	1.169.299.527	0	0	7.043.477.123	1.092.585.247
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.711.800	0	0	0	23.711.800	23.711.800	0	0	0	23.711.800	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.711.800	0	0	0	23.711.800	23.711.800	0	0	0	23.711.800	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.217.907.176	0	0	0	3.217.907.176	3.218.087.646	0	0	0	3.218.087.646	180.470
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.215.907.176	0	0	0	3.215.907.176	3.216.087.646	0	0	0	3.216.087.646	180.470
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.662.500	0	0	0	1.455.662.500	2.006.230.500	0	0	0	2.006.230.500	550.568.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	808.500	0	0	0	808.500	5.189.400	0	0	0	5.189.400	4.380.900
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.233.500	0	0	0	281.233.500	353.420.500	0	0	0	353.420.500	72.187.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.300.000	0	0	0	135.300.000	145.305.000	0	0	0	145.305.000	10.005.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.594.500	0	0	0	9.594.500	30.582.600	0	0	0	30.582.600	20.988.100
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.075.000	0	0	0	4.075.000	4.075.000	0	0	0	4.075.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.024.651.000	0	0	0	1.024.651.000	1.467.658.000	0	0	0	1.467.658.000	443.007.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.750.000	505.377.800	0	0	519.127.800	33.000.000	969.299.527	0	0	1.002.299.527	483.171.727
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	398.473.600	0	0	398.473.600	0	704.876.827	0	0	704.876.827	306.403.227
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.750.000	106.904.200	0	0	120.654.200	33.000.000	264.422.700	0	0	297.422.700	176.768.500
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.208.200	0	0	0	435.208.200	455.584.800	0	0	0	455.584.800	20.376.600
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.000.000	0	0	0	211.000.000	211.000.000	0	0	0	211.000.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.208.200	0	0	0	224.208.200	244.584.800	0	0	0	244.584.800	20.376.600

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.274.400	200.000.000	0	0	299.274.400	137.562.850	200.000.000	0	0	337.562.850	38.288.450
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.850.000	0	0	0	39.850.000	54.138.450	0	0	0	54.138.450	14.288.450
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000	0	0	0	23.100.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.324.400	200.000.000	0	0	236.324.400	60.324.400	200.000.000	0	0	260.324.400	24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	239.764.000	0	0	0	239.764.000	239.764.000	0	0	0	239.764.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	230.714.000	0	0	0	230.714.000	230.714.000	0	0	0	230.714.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	230.714.000	0	0	0	230.714.000	230.714.000	0	0	0	230.714.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.050.000	0	0	0	9.050.000	9.050.000	0	0	0	9.050.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	9.050.000	0	0	0	9.050.000	9.050.000	0	0	0	9.050.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	423.346.100	0	0	0	423.346.100	440.706.100	0	0	0	440.706.100	17.360.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	423.346.100	0	0	0	423.346.100	440.706.100	0	0	0	440.706.100	17.360.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	86.260.300	0	0	0	86.260.300	87.360.300	0	0	0	87.360.300	1.100.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	247.195.200	0	0	0	247.195.200	263.455.200	0	0	0	263.455.200	16.260.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	89.890.600	0	0	0	89.890.600	89.890.600	0	0	0	89.890.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	539.920.000	0	0	0	539.920.000	508.406.800	0	0	0	508.406.800	(31.513.200)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	108.142.500	0	0	0	108.142.500	155.729.300	0	0	0	155.729.300	47.586.800
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	108.142.500	0	0	0	108.142.500	155.729.300	0	0	0	155.729.300	47.586.800
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.850.000	0	0	0	136.850.000	57.750.000	0	0	0	57.750.000	(79.100.000)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.850.000	0	0	0	136.850.000	57.750.000	0	0	0	57.750.000	(79.100.000)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	0	0	0	294.927.500	294.927.500	0	0	0	294.927.500	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	0	0	0	294.927.500	294.927.500	0	0	0	294.927.500	0
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.514.906.933	39.859.066.000	0	0	49.373.972.933	53.756.911.391	34.528.032.018	0	0	88.284.943.409	38.910.970.476
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.514.906.933	39.859.066.000	0	0	49.373.972.933	53.756.911.391	34.528.032.018	0	0	88.284.943.409	38.910.970.476
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.996.006.021	93.913.600	0	0	4.089.919.621	4.727.931.053	241.244.200	0	0	4.969.175.253	879.255.632
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.548.500	0	0	0	7.548.500	7.548.500	0	0	0	7.548.500	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.548.500	0	0	0	7.548.500	7.548.500	0	0	0	7.548.500	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.218.521	0	0	0	2.857.218.521	2.813.390.603	0	0	0	2.813.390.603	(43.827.918)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.849.001.221	0	0	0	2.849.001.221	2.805.173.303	0	0	0	2.805.173.303	(43.827.918)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.893.400	0	0	0	2.893.400	2.893.400	0	0	0	2.893.400	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.323.900	0	0	0	5.323.900	5.323.900	0	0	0	5.323.900	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.075.200	0	0	0	864.075.200	1.598.533.400	0	0	0	1.598.533.400	734.458.200
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.752.600	0	0	0	52.752.600	52.752.600	0	0	0	52.752.600	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.493.400	0	0	0	64.493.400	77.768.400	0	0	0	77.768.400	13.275.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.514.200	0	0	0	28.514.200	24.096.400	0	0	0	24.096.400	(4.417.800)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	0	0	0	2.000.000	3.797.000	0	0	0	3.797.000	1.797.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	0	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(5.000.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.315.000	0	0	0	706.315.000	1.435.119.000	0	0	0	1.435.119.000	728.804.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	93.913.600	0	0	93.913.600	0	241.244.200	0	0	241.244.200	147.330.600
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	65.500.800	0	0	65.500.800	0	212.831.400	0	0	212.831.400	147.330.600
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	28.412.800	0	0	28.412.800	0	28.412.800	0	0	28.412.800	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.434.000	0	0	0	194.434.000	226.434.000	0	0	0	226.434.000	32.000.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	0	0	0	4.640.000	4.640.000	0	0	0	4.640.000	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.594.000	0	0	0	56.594.000	60.194.000	0	0	0	60.194.000	3.600.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.200.000	0	0	0	133.200.000	161.600.000	0	0	0	161.600.000	28.400.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.729.800	0	0	0	72.729.800	82.024.550	0	0	0	82.024.550	9.294.750
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.379.800	0	0	0	45.379.800	54.674.550	0	0	0	54.674.550	9.294.750
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000	0	0	0	17.200.000	17.200.000	0	0	0	17.200.000	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	0	0	0	10.150.000	10.150.000	0	0	0	10.150.000	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENATAAN DESA	23.223.000	0	0	0	23.223.000	205.444.900	0	0	0	205.444.900	182.221.900
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	23.223.000	0	0	0	23.223.000	205.444.900	0	0	0	205.444.900	182.221.900
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	23.223.000	0	0	0	23.223.000	205.444.900	0	0	0	205.444.900	182.221.900
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.145.260.512	39.740.000.000	0	0	41.885.260.512	45.747.828.238	34.270.936.418	0	0	80.018.764.656	38.133.504.144
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2.145.260.512	39.740.000.000	0	0	41.885.260.512	45.747.828.238	34.270.936.418	0	0	80.018.764.656	38.133.504.144
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2.145.260.512	39.740.000.000	0	0	41.885.260.512	45.747.828.238	34.270.936.418	0	0	80.018.764.656	38.133.504.144
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.164.112.400	0	0	0	2.164.112.400	1.988.288.400	0	0	0	1.988.288.400	(175.824.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.164.112.400	0	0	0	2.164.112.400	1.988.288.400	0	0	0	1.988.288.400	(175.824.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.000	0	0	0	45.133.000	45.133.000	0	0	0	45.133.000	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75.889.000	0	0	0	75.889.000	75.889.000	0	0	0	75.889.000	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	65.261.000	0	0	0	65.261.000	34.911.000	0	0	0	34.911.000	(30.350.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	209.184.500	0	0	0	209.184.500	209.184.500	0	0	0	209.184.500	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.478.121.100	0	0	0	1.478.121.100	1.327.128.500	0	0	0	1.327.128.500	(150.992.600)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.799.000	0	0	0	180.799.000	179.750.500	0	0	0	179.750.500	(1.048.500)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24.592.800	0	0	0	24.592.800	13.442.800	0	0	0	13.442.800	(11.150.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	85.132.000	0	0	0	85.132.000	102.849.100	0	0	0	102.849.100	17.717.100

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.186.305.000	25.152.400	0	0	1.211.457.400	1.087.418.800	15.851.400	0	0	1.103.270.200	(108.187.200)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.186.305.000	25.152.400	0	0	1.211.457.400	1.087.418.800	15.851.400	0	0	1.103.270.200	(108.187.200)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	389.865.100	0	0	0	389.865.100	389.865.100	0	0	0	389.865.100	0
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	363.150.500	0	0	0	363.150.500	285.698.300	0	0	0	285.698.300	(77.452.200)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	218.894.400	15.851.400	0	0	234.745.800	188.159.400	15.851.400	0	0	204.010.800	(30.735.000)
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	214.395.000	9.301.000	0	0	223.696.000	223.696.000	0	0	0	223.696.000	0
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.077.380.543	263.704.545	0	0	6.341.085.088	9.576.467.343	1.184.949.745	0	0	10.761.417.088	4.420.332.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.077.380.543	263.704.545	0	0	6.341.085.088	9.576.467.343	1.184.949.745	0	0	10.761.417.088	4.420.332.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.688.174.643	263.704.545	0	0	4.951.879.188	4.839.557.843	294.248.745	0	0	5.133.806.588	181.927.400
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.143	0	0	0	3.133.947.143	3.133.947.143	0	0	0	3.133.947.143	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.047.143	0	0	0	3.129.047.143	3.129.047.143	0	0	0	3.129.047.143	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.038.500	0	0	0	1.187.038.500	1.328.378.900	0	0	0	1.328.378.900	141.340.400
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.161.200	0	0	0	4.161.200	4.161.200	0	0	0	4.161.200	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.098.900	0	0	0	29.098.900	59.336.300	0	0	0	59.336.300	30.237.400
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.914.700	0	0	0	62.914.700	64.864.700	0	0	0	64.864.700	1.950.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.274.400	0	0	0	12.274.400	12.361.400	0	0	0	12.361.400	87.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	4.015.300	0	0	0	4.015.300	4.015.300	0	0	0	4.015.300	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	0	0	0	8.250.000	6.270.000	0	0	0	6.270.000	(1.980.000)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.324.000	0	0	0	1.066.324.000	1.177.370.000	0	0	0	1.177.370.000	111.046.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	77.704.545	0	0	77.704.545	0	108.248.745	0	0	108.248.745	30.544.200
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	74.704.545	0	0	74.704.545	0	105.248.745	0	0	105.248.745	30.544.200
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.613.000	0	0	0	223.613.000	228.613.000	0	0	0	228.613.000	5.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200	0	0	0	1.531.200	1.531.200	0	0	0	1.531.200	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.897.400	0	0	0	71.897.400	71.897.400	0	0	0	71.897.400	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.184.400	0	0	0	150.184.400	155.184.400	0	0	0	155.184.400	5.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.576.000	186.000.000	0	0	324.576.000	143.618.800	186.000.000	0	0	329.618.800	5.042.800
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.091.000	0	0	0	119.091.000	124.133.800	0	0	0	124.133.800	5.042.800
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	0	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.385.000	186.000.000	0	0	200.385.000	14.385.000	186.000.000	0	0	200.385.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	214.124.600	0	0	0	214.124.600	336.054.600	0	0	0	336.054.600	121.930.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	89.719.200	0	0	0	89.719.200	89.719.200	0	0	0	89.719.200	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	70.374.700	0	0	0	70.374.700	70.374.700	0	0	0	70.374.700	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.600	0	0	0	14.490.600	14.490.600	0	0	0	14.490.600	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.900	0	0	0	4.853.900	4.853.900	0	0	0	4.853.900	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.405.400	0	0	0	124.405.400	246.335.400	0	0	0	246.335.400	121.930.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	0	0	0	7.663.900	7.663.900	0	0	0	7.663.900	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100	0	0	0	56.000.100	56.000.100	0	0	0	56.000.100	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	0	0	0	0	67.200.000	0	0	0	67.200.000	67.200.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200	0	0	0	37.354.200	37.354.200	0	0	0	37.354.200	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	0	0	0	4.330.000	0	0	0	4.330.000	4.330.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.582.000	0	0	0	5.582.000	55.982.000	0	0	0	55.982.000	50.400.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200	0	0	0	17.805.200	17.805.200	0	0	0	17.805.200	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	454.631.000	0	0	0	454.631.000	2.560.635.600	142.966.000	0	0	2.703.601.600	2.248.970.600
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	40.763.100	0	0	0	40.763.100	1.037.350.700	0	0	0	1.037.350.700	996.587.600
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	37.850.000	0	0	0	37.850.000	225.597.600	0	0	0	225.597.600	187.747.600
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100	0	0	0	2.913.100	73.553.100	0	0	0	73.553.100	70.640.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	0	0	0	187.200.000	0	0	0	187.200.000	187.200.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0	0	0	0	0	486.000.000	0	0	0	486.000.000	486.000.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	17.640.000	0	0	0	17.640.000	661.290.000	0	0	0	661.290.000	643.650.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	17.640.000	0	0	0	17.640.000	13.290.000	0	0	0	13.290.000	(4.350.000)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	0	0	0	0	648.000.000	0	0	0	648.000.000	648.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	320.811.400	0	0	0	320.811.400	390.558.400	142.966.000	0	0	533.524.400	212.713.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000	0	0	0	30.000.000	41.550.000	0	0	0	41.550.000	11.550.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	82.807.900	0	0	0	82.807.900	138.004.900	0	0	0	138.004.900	55.197.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	71.600.200	0	0	0	71.600.200	71.600.200	142.966.000	0	0	214.566.200	142.966.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.085.700	0	0	0	30.085.700	33.085.700	0	0	0	33.085.700	3.000.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.317.600	0	0	0	106.317.600	106.317.600	0	0	0	106.317.600	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75.416.500	0	0	0	75.416.500	471.436.500	0	0	0	471.436.500	396.020.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.726.600	0	0	0	36.726.600	36.726.600	0	0	0	36.726.600	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900	0	0	0	38.689.900	434.709.900	0	0	0	434.709.900	396.020.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	720.450.300	0	0	0	720.450.300	1.840.219.300	747.735.000	0	0	2.587.954.300	1.867.504.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	683.561.500	0	0	0	683.561.500	1.776.075.500	747.735.000	0	0	2.523.810.500	1.840.249.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	76.939.000	0	0	0	76.939.000	76.939.000	0	0	0	76.939.000	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0	0	0	46.879.000	747.735.000	0	0	794.614.000	794.614.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	119.993.100	0	0	0	119.993.100	107.243.100	0	0	0	107.243.100	(12.750.000)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	344.571.600	0	0	0	344.571.600	1.385.431.600	0	0	0	1.385.431.600	1.040.860.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.510.900	0	0	0	100.510.900	100.510.900	0	0	0	100.510.900	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13.300.000	0	0	0	13.300.000	13.300.000	0	0	0	13.300.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	28.246.900	0	0	0	28.246.900	45.771.900	0	0	0	45.771.900	17.525.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36.888.800	0	0	0	36.888.800	64.143.800	0	0	0	64.143.800	27.255.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.387.800	0	0	0	21.387.800	48.642.800	0	0	0	48.642.800	27.255.000
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.022.900	0	0	0	8.022.900	8.022.900	0	0	0	8.022.900	0
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	7.478.100	0	0	0	7.478.100	7.478.100	0	0	0	7.478.100	0
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.085.416.253	4.193.334.516	0	0	9.278.750.769	6.843.872.130	2.681.074.458	90.000.000	0	9.614.946.588	336.195.819
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	5.085.416.253	4.193.334.516	0	0	9.278.750.769	6.843.872.130	2.681.074.458	90.000.000	0	9.614.946.588	336.195.819
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.947.181.877	131.844.000	0	0	4.079.025.877	4.700.742.174	461.402.700	90.000.000	0	5.252.144.874	1.173.118.997
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.772.400	0	0	0	23.772.400	25.322.400	0	0	0	25.322.400	1.550.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.772.400	0	0	0	23.772.400	25.322.400	0	0	0	25.322.400	1.550.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.143.283.915	0	0	0	3.143.283.915	3.147.396.962	0	0	0	3.147.396.962	4.113.047
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.049.915	0	0	0	3.097.049.915	3.097.062.962	0	0	0	3.097.062.962	13.047
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.134.000	0	0	0	2.134.000	4.134.000	0	0	0	4.134.000	2.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.100.000	0	0	0	44.100.000	46.200.000	0	0	0	46.200.000	2.100.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.970.662	131.844.000	0	0	586.814.662	1.012.422.662	461.402.700	90.000.000	0	1.563.825.362	977.010.700
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.655.362	0	0	0	7.655.362	11.655.362	0	0	0	11.655.362	4.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.393.000	96.844.000	0	0	125.237.000	34.518.600	461.402.700	0	0	495.921.300	370.684.300
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.072.800	35.000.000	0	0	88.072.800	151.231.400	0	90.000.000	0	241.231.400	153.158.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.112.500	0	0	0	15.112.500	27.072.300	0	0	0	27.072.300	11.959.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.737.000	0	0	0	350.737.000	787.945.000	0	0	0	787.945.000	437.208.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.046.800	0	0	0	202.046.800	207.546.800	0	0	0	207.546.800	5.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.296.800	0	0	0	122.296.800	122.296.800	0	0	0	122.296.800	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.750.000	0	0	0	20.750.000	20.750.000	0	0	0	20.750.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000	0	0	0	59.000.000	64.500.000	0	0	0	64.500.000	5.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.108.100	0	0	0	123.108.100	308.053.350	0	0	0	308.053.350	184.945.250
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.316.100	0	0	0	100.316.100	233.757.350	0	0	0	233.757.350	133.441.250
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.792.000	0	0	0	22.792.000	74.296.000	0	0	0	74.296.000	51.504.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	971.139.440	3.884.190.516	0	0	4.855.329.956	1.926.035.020	1.954.171.758	0	0	3.880.206.778	(975.123.178)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	56.394.532	0	0	0	56.394.532	76.161.112	0	0	0	76.161.112	19.766.580

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12.464.820	0	0	0	12.464.820	32.231.400	0	0	0	32.231.400	19.766.580
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.929.712	0	0	0	43.929.712	43.929.712	0	0	0	43.929.712	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	82.282.000	4.681.000	0	0	86.963.000	82.282.000	4.681.000	0	0	86.963.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	82.282.000	4.681.000	0	0	86.963.000	82.282.000	4.681.000	0	0	86.963.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	138.633.400	0	0	0	138.633.400	398.899.400	566.149.920	0	0	965.049.320	826.415.920
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.826.800	0	0	0	17.826.800	184.492.800	566.149.920	0	0	750.642.720	732.815.920
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	120.806.600	0	0	0	120.806.600	214.406.600	0	0	0	214.406.600	93.600.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	232.438.508	2.864.732.600	0	0	3.097.171.108	466.473.508	0	0	0	466.473.508	(2.630.697.600)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	67.495.000	2.864.732.600	0	0	2.932.227.600	251.530.000	0	0	0	251.530.000	(2.680.697.600)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000	0	0	0	60.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104.943.508	0	0	0	104.943.508	104.943.508	0	0	0	104.943.508	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	235.971.000	1.014.776.916	0	0	1.250.747.916	530.364.000	1.383.340.838	0	0	1.913.704.838	662.956.922
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8.000.000	0	0	0	8.000.000	27.568.000	0	0	0	27.568.000	19.568.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	52.520.000	959.370.801	0	0	1.011.890.801	121.070.000	1.327.934.723	0	0	1.449.004.723	437.113.922
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19.649.900	55.406.115	0	0	75.056.015	19.649.900	55.406.115	0	0	75.056.015	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	112.197.700	0	0	0	112.197.700	313.192.700	0	0	0	313.192.700	200.995.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	43.603.400	0	0	0	43.603.400	48.883.400	0	0	0	48.883.400	5.280.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	72.590.000	0	0	0	72.590.000	78.530.000	0	0	0	78.530.000	5.940.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	41.200.000	0	0	0	41.200.000	41.200.000	0	0	0	41.200.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	31.390.000	0	0	0	31.390.000	37.330.000	0	0	0	37.330.000	5.940.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	56.030.000	0	0	0	56.030.000	91.750.000	0	0	0	91.750.000	35.720.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	56.030.000	0	0	0	56.030.000	91.750.000	0	0	0	91.750.000	35.720.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.800.000	0	0	0	96.800.000	201.575.000	0	0	0	201.575.000	104.775.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	96.800.000	0	0	0	96.800.000	201.575.000	0	0	0	201.575.000	104.775.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	167.094.936	177.300.000	0	0	344.394.936	217.094.936	265.500.000	0	0	482.594.936	138.200.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	0	0	0	130.500.000	130.500.000	0	0	0	130.500.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	0	0	0	130.500.000	130.500.000	0	0	0	130.500.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	36.594.936	177.300.000	0	0	213.894.936	86.594.936	265.500.000	0	0	352.094.936	138.200.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	26.280.000	157.500.000	0	0	183.780.000	76.280.000	157.500.000	0	0	233.780.000	50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	10.314.936	19.800.000	0	0	30.114.936	10.314.936	108.000.000	0	0	118.314.936	88.200.000
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.339.115.120	408.087.680	0	0	6.747.202.800	7.093.734.156	657.161.880	0	0	7.750.896.036	1.003.693.236
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.339.115.120	408.087.680	0	0	6.747.202.800	7.093.734.156	657.161.880	0	0	7.750.896.036	1.003.693.236
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.499.618.920	408.087.680	0	0	4.907.706.600	4.701.241.056	457.161.880	0	0	5.158.402.936	250.696.336
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	0	0	0	12.600.000	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000	0	0	0	12.600.000	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.176.420	0	0	0	3.431.176.420	3.431.176.856	0	0	0	3.431.176.856	436
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.576.420	0	0	0	3.427.576.420	3.427.576.856	0	0	0	3.427.576.856	436
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000	0	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.582.000	0	0	0	733.582.000	891.467.700	0	0	0	891.467.700	157.885.700
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.656.100	0	0	0	45.656.100	36.829.800	0	0	0	36.829.800	(8.826.300)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.401.900	0	0	0	76.401.900	76.401.900	0	0	0	76.401.900	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	26.300.000	0	0	0	26.300.000	(23.700.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000	0	0	0	8.000.000	5.903.000	0	0	0	5.903.000	(2.097.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.524.000	0	0	0	553.524.000	746.033.000	0	0	0	746.033.000	192.509.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.425.000	408.087.680	0	0	412.512.680	4.425.000	457.161.880	0	0	461.586.880	49.074.200
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.425.000	408.087.680	0	0	412.512.680	4.425.000	457.161.880	0	0	461.586.880	49.074.200
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.331.000	0	0	0	251.331.000	292.927.000	0	0	0	292.927.000	41.596.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.331.000	0	0	0	94.331.000	119.531.000	0	0	0	119.531.000	25.200.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.000.000	0	0	0	157.000.000	173.396.000	0	0	0	173.396.000	16.396.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.504.500	0	0	0	66.504.500	68.644.500	0	0	0	68.644.500	2.140.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.834.500	0	0	0	34.834.500	45.524.500	0	0	0	45.524.500	10.690.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.955.000	0	0	0	12.955.000	4.400.000	0	0	0	4.400.000	(8.555.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.715.000	0	0	0	18.715.000	18.720.000	0	0	0	18.720.000	5.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.219.640.800	0	0	0	1.219.640.800	1.671.137.700	0	0	0	1.671.137.700	451.496.900
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.219.640.800	0	0	0	1.219.640.800	1.671.137.700	0	0	0	1.671.137.700	451.496.900
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48.200.000	0	0	0	48.200.000	48.200.000	0	0	0	48.200.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000	0	0	0	12.600.000	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	29.450.000	0	0	0	29.450.000	29.450.000	0	0	0	29.450.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	1.096.432.000	0	0	0	1.096.432.000	1.547.928.900	0	0	0	1.547.928.900	451.496.900
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.958.800	0	0	0	32.958.800	32.958.800	0	0	0	32.958.800	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	619.855.400	0	0	0	619.855.400	721.355.400	200.000.000	0	0	921.355.400	301.500.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	449.000.000	0	0	0	449.000.000	425.350.000	200.000.000	0	0	625.350.000	176.350.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	0	0	0	209.000.000	215.000.000	0	0	0	215.000.000	6.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	240.000.000	0	0	0	240.000.000	210.350.000	200.000.000	0	0	410.350.000	170.350.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.855.400	0	0	0	170.855.400	296.005.400	0	0	0	296.005.400	125.150.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82.350.000	0	0	0	82.350.000	210.450.000	0	0	0	210.450.000	128.100.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	36.360.000	0	0	0	36.360.000	31.560.000	0	0	0	31.560.000	(4.800.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	43.895.400	0	0	0	43.895.400	35.545.400	0	0	0	35.545.400	(8.350.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	8.250.000	0	0	0	8.250.000	18.450.000	0	0	0	18.450.000	10.200.000
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	753.426.200	25.050.000	0	0	778.476.200	188.779.700	25.050.000	0	0	213.829.700	(564.646.500)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	753.426.200	25.050.000	0	0	778.476.200	188.779.700	25.050.000	0	0	213.829.700	(564.646.500)
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.372.200	0	0	0	30.372.200	30.372.200	0	0	0	30.372.200	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30.372.200	0	0	0	30.372.200	30.372.200	0	0	0	30.372.200	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.372.200	0	0	0	30.372.200	30.372.200	0	0	0	30.372.200	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	17.767.000	0	0	0	17.767.000	17.767.000	0	0	0	17.767.000	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.767.000	0	0	0	17.767.000	17.767.000	0	0	0	17.767.000	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	17.767.000	0	0	0	17.767.000	17.767.000	0	0	0	17.767.000	0
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	39.368.100	0	0	0	39.368.100	60.572.600	0	0	0	60.572.600	21.204.500
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.368.100	0	0	0	39.368.100	60.572.600	0	0	0	60.572.600	21.204.500
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.368.100	0	0	0	39.368.100	60.572.600	0	0	0	60.572.600	21.204.500
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	665.918.900	25.050.000	0	0	690.968.900	80.067.900	25.050.000	0	0	105.117.900	(585.851.000)
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	665.918.900	25.050.000	0	0	690.968.900	80.067.900	25.050.000	0	0	105.117.900	(585.851.000)
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	665.918.900	25.050.000	0	0	690.968.900	80.067.900	25.050.000	0	0	105.117.900	(585.851.000)
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.228.070.307	541.536.700	0	0	6.769.607.007	6.648.791.275	640.442.700	0	0	7.289.233.975	519.626.968
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.228.070.307	541.536.700	0	0	6.769.607.007	6.648.791.275	640.442.700	0	0	7.289.233.975	519.626.968
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.238.558.707	541.536.700	0	0	5.780.095.407	5.218.184.875	640.442.700	0	0	5.858.627.575	78.532.168
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.135.000	0	0	0	35.135.000	41.315.000	0	0	0	41.315.000	6.180.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.135.000	0	0	0	35.135.000	41.315.000	0	0	0	41.315.000	6.180.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.502.026.207	0	0	0	3.502.026.207	3.509.018.075	0	0	0	3.509.018.075	6.991.868
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.471.326.307	0	0	0	3.471.326.307	3.471.448.175	0	0	0	3.471.448.175	121.868
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.699.900	0	0	0	30.699.900	37.569.900	0	0	0	37.569.900	6.870.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.144.430.300	0	0	0	1.144.430.300	1.123.898.600	0	0	0	1.123.898.600	(20.531.700)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.224.900	0	0	0	111.224.900	140.289.000	0	0	0	140.289.000	29.064.100
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.381.600	0	0	0	103.381.600	103.353.800	0	0	0	103.353.800	(27.800)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.400.000	0	0	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	31.576.800	0	0	0	31.576.800	41.156.800	0	0	0	41.156.800	9.580.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	883.847.000	0	0	0	883.847.000	824.699.000	0	0	0	824.699.000	(59.148.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.770.000	541.536.700	0	0	543.306.700	1.770.000	640.442.700	0	0	642.212.700	98.906.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	885.000	305.199.400	0	0	306.084.400	885.000	316.869.900	0	0	317.754.900	11.670.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	885.000	236.337.300	0	0	237.222.300	885.000	323.572.800	0	0	324.457.800	87.235.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.459.800	0	0	0	378.459.800	298.959.800	0	0	0	298.959.800	(79.500.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.726.000	0	0	0	2.726.000	2.726.000	0	0	0	2.726.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.518.400	0	0	0	273.518.400	189.518.400	0	0	0	189.518.400	(84.000.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.215.400	0	0	0	102.215.400	106.715.400	0	0	0	106.715.400	4.500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.737.400	0	0	0	176.737.400	243.223.400	0	0	0	243.223.400	66.486.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.352.400	0	0	0	91.352.400	91.352.400	0	0	0	91.352.400	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000	0	0	0	12.650.000	19.650.000	0	0	0	19.650.000	7.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.735.000	0	0	0	72.735.000	132.221.000	0	0	0	132.221.000	59.486.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	23.898.000	0	0	0	23.898.000	23.898.000	0	0	0	23.898.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.898.000	0	0	0	23.898.000	23.898.000	0	0	0	23.898.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	23.898.000	0	0	0	23.898.000	23.898.000	0	0	0	23.898.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.994.000	0	0	0	38.994.000	44.994.000	0	0	0	44.994.000	6.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.994.000	0	0	0	38.994.000	44.994.000	0	0	0	44.994.000	6.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.994.000	0	0	0	38.994.000	44.994.000	0	0	0	44.994.000	6.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	830.919.600	0	0	0	830.919.600	891.579.400	0	0	0	891.579.400	60.659.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	830.919.600	0	0	0	830.919.600	891.579.400	0	0	0	891.579.400	60.659.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	197.700.000	0	0	0	197.700.000	286.385.000	0	0	0	286.385.000	88.685.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	408.300.000	0	0	0	408.300.000	305.385.000	0	0	0	305.385.000	(102.915.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	38.391.000	0	0	0	38.391.000	110.880.800	0	0	0	110.880.800	72.489.800

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	186.528.600	0	0	0	186.528.600	188.928.600	0	0	0	188.928.600	2.400.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	74.100.000	0	0	0	74.100.000	448.535.000	0	0	0	448.535.000	374.435.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.100.000	0	0	0	74.100.000	448.535.000	0	0	0	448.535.000	374.435.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	74.100.000	0	0	0	74.100.000	395.735.000	0	0	0	395.735.000	321.635.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	52.800.000	0	0	0	52.800.000	52.800.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.201.952.094	3.128.622.900	0	0	25.330.574.994	26.736.339.919	3.671.736.100	0	0	30.408.076.019	5.077.501.025
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.201.952.094	3.128.622.900	0	0	25.330.574.994	26.736.339.919	3.671.736.100	0	0	30.408.076.019	5.077.501.025
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.879.843.894	159.248.100	0	0	7.039.091.994	6.882.246.319	225.871.300	0	0	7.108.117.619	69.025.625
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.467.000	0	0	0	14.467.000	14.467.000	0	0	0	14.467.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.467.000	0	0	0	14.467.000	14.467.000	0	0	0	14.467.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.886.894	0	0	0	3.667.886.894	3.667.886.819	0	0	0	3.667.886.819	(75)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.337.094	0	0	0	3.656.337.094	3.656.337.019	0	0	0	3.656.337.019	(75)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.800	0	0	0	6.324.800	6.324.800	0	0	0	6.324.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.225.000	0	0	0	5.225.000	5.225.000	0	0	0	5.225.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.738.920.000	0	0	0	1.738.920.000	1.737.487.600	0	0	0	1.737.487.600	(1.432.400)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.238.300	0	0	0	100.238.300	100.183.100	0	0	0	100.183.100	(55.200)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.358.800	0	0	0	105.358.800	105.358.800	0	0	0	105.358.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.905.500	0	0	0	17.905.500	24.588.300	0	0	0	24.588.300	6.682.800
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.037.400	0	0	0	23.037.400	23.037.400	0	0	0	23.037.400	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.492.380.000	0	0	0	1.492.380.000	1.484.320.000	0	0	0	1.484.320.000	(8.060.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	159.248.100	0	0	159.248.100	0	225.871.300	0	0	225.871.300	66.623.200
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	138.248.100	0	0	138.248.100	0	204.871.300	0	0	204.871.300	66.623.200
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.320.000	0	0	0	729.320.000	796.540.500	0	0	0	796.540.500	67.220.500
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.120.000	0	0	0	8.120.000	8.120.000	0	0	0	8.120.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.000.000	0	0	0	192.000.000	219.820.500	0	0	0	219.820.500	27.820.500
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.200.000	0	0	0	529.200.000	568.600.000	0	0	0	568.600.000	39.400.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.250.000	0	0	0	729.250.000	665.864.400	0	0	0	665.864.400	(63.385.600)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.728.000	0	0	0	154.728.000	140.312.400	0	0	0	140.312.400	(14.415.600)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.180.000	0	0	0	66.180.000	17.210.000	0	0	0	17.210.000	(48.970.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.342.000	0	0	0	508.342.000	508.342.000	0	0	0	508.342.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.871.022.600	0	0	0	1.871.022.600	3.007.435.000	0	0	0	3.007.435.000	1.136.412.400
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.059.746.200	0	0	0	1.059.746.200	1.886.258.600	0	0	0	1.886.258.600	826.512.400
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	21.331.800	0	0	0	21.331.800	18.931.800	0	0	0	18.931.800	(2.400.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	65.255.100	0	0	0	65.255.100	36.830.200	0	0	0	36.830.200	(28.424.900)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	21.331.800	0	0	0	21.331.800	21.331.800	0	0	0	21.331.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	105.889.800	0	0	0	105.889.800	115.489.800	0	0	0	115.489.800	9.600.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	31.585.400	0	0	0	31.585.400	29.322.800	0	0	0	29.322.800	(2.262.600)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	814.352.300	0	0	0	814.352.300	1.664.352.200	0	0	0	1.664.352.200	849.999.900
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	811.276.400	0	0	0	811.276.400	1.121.176.400	0	0	0	1.121.176.400	309.900.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	811.276.400	0	0	0	811.276.400	1.121.176.400	0	0	0	1.121.176.400	309.900.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.965.820.800	2.969.374.800	0	0	15.935.195.600	16.361.393.800	3.445.864.800	0	0	19.807.258.600	3.872.063.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	985.052.000	12.184.800	0	0	997.236.800	1.309.764.000	12.184.800	0	0	1.321.948.800	324.712.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	985.052.000	12.184.800	0	0	997.236.800	1.309.764.000	12.184.800	0	0	1.321.948.800	324.712.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	982.679.300	0	0	0	982.679.300	943.929.300	0	0	0	943.929.300	(38.750.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	630.729.300	0	0	0	630.729.300	630.729.300	0	0	0	630.729.300	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	351.950.000	0	0	0	351.950.000	313.200.000	0	0	0	313.200.000	(38.750.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.328.540.000	0	0	0	1.328.540.000	1.288.905.000	0	0	0	1.288.905.000	(39.635.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.328.540.000	0	0	0	1.328.540.000	1.288.905.000	0	0	0	1.288.905.000	(39.635.000)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.521.320.100	0	0	0	5.521.320.100	7.991.265.100	0	0	0	7.991.265.100	2.469.945.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	5.521.320.100	0	0	0	5.521.320.100	7.991.265.100	0	0	0	7.991.265.100	2.469.945.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4.148.229.400	2.957.190.000	0	0	7.105.419.400	4.827.530.400	3.433.680.000	0	0	8.261.210.400	1.155.791.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3.203.326.400	0	0	0	3.203.326.400	3.469.082.000	0	0	0	3.469.082.000	265.755.600

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	461.223.600	2.957.190.000	0	0	3.418.413.600	574.769.000	3.433.680.000	0	0	4.008.449.000	590.035.400
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	483.679.400	0	0	0	483.679.400	783.679.400	0	0	0	783.679.400	300.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	485.264.800	0	0	0	485.264.800	485.264.800	0	0	0	485.264.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	485.264.800	0	0	0	485.264.800	485.264.800	0	0	0	485.264.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	35.264.800	0	0	0	35.264.800	35.264.800	0	0	0	35.264.800	0
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.456.397.210	486.360.750	0	0	6.942.757.960	7.919.144.403	1.264.856.850	0	0	9.184.001.253	2.241.243.293
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.456.397.210	486.360.750	0	0	6.942.757.960	7.919.144.403	1.264.856.850	0	0	9.184.001.253	2.241.243.293
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.877.388.810	232.010.750	0	0	5.109.399.560	6.117.106.203	1.007.272.350	0	0	7.124.378.553	2.014.978.993
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.875.000	0	0	0	9.875.000	12.185.000	0	0	0	12.185.000	2.310.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.875.000	0	0	0	9.875.000	12.185.000	0	0	0	12.185.000	2.310.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.231.357.187	0	0	0	3.231.357.187	3.232.091.380	0	0	0	3.232.091.380	734.193
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.857.187	0	0	0	3.223.857.187	3.224.591.380	0	0	0	3.224.591.380	734.193
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.750.000	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.750.000	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.345.101.723	0	0	0	1.345.101.723	2.382.050.923	0	0	0	2.382.050.923	1.036.949.200
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.322.700	0	0	0	7.322.700	18.382.200	0	0	0	18.382.200	11.059.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.683.923	0	0	0	158.683.923	153.683.923	0	0	0	153.683.923	(5.000.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.882.500	0	0	0	79.882.500	109.643.500	0	0	0	109.643.500	29.761.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.909.600	0	0	0	17.909.600	32.352.300	0	0	0	32.352.300	14.442.700
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	3.840.000	0	0	0	3.840.000	8.199.000	0	0	0	8.199.000	4.359.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.071.963.000	0	0	0	1.071.963.000	2.054.290.000	0	0	0	2.054.290.000	982.327.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.210.000	229.010.750	0	0	232.220.750	3.645.000	998.272.350	0	0	1.001.917.350	769.696.600
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	1.530.000	337.477.000	0	0	339.007.000	339.007.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.835.000	180.970.550	0	0	183.805.550	1.740.000	579.338.050	0	0	581.078.050	397.272.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	375.000	48.040.200	0	0	48.415.200	375.000	81.457.300	0	0	81.832.300	33.417.100
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.082.000	0	0	0	222.082.000	269.276.000	0	0	0	269.276.000	47.194.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.482.000	0	0	0	94.482.000	106.476.000	0	0	0	106.476.000	11.994.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.600.000	0	0	0	127.600.000	162.800.000	0	0	0	162.800.000	35.200.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.762.900	3.000.000	0	0	68.762.900	217.857.900	9.000.000	0	0	226.857.900	158.095.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.338.300	0	0	0	26.338.300	31.098.700	0	0	0	31.098.700	4.760.400
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	0	0	0	11.360.000	11.360.000	0	0	0	11.360.000	0
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.064.600	3.000.000	0	0	31.064.600	175.399.200	9.000.000	0	0	184.399.200	153.334.600
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	516.569.400	0	0	0	516.569.400	440.466.300	0	0	0	440.466.300	(76.103.100)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.472.000	0	0	0	51.472.000	39.402.000	0	0	0	39.402.000	(12.070.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	45.506.900	0	0	0	45.506.900	33.436.900	0	0	0	33.436.900	(12.070.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5.965.100	0	0	0	5.965.100	5.965.100	0	0	0	5.965.100	0
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.619.400	0	0	0	238.619.400	232.876.300	0	0	0	232.876.300	(5.743.100)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	117.304.400	0	0	0	117.304.400	117.481.300	0	0	0	117.481.300	176.900
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	57.784.000	0	0	0	57.784.000	42.464.000	0	0	0	42.464.000	(15.320.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	63.531.000	0	0	0	63.531.000	72.931.000	0	0	0	72.931.000	9.400.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	226.478.000	0	0	0	226.478.000	168.188.000	0	0	0	168.188.000	(58.290.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	226.478.000	0	0	0	226.478.000	168.188.000	0	0	0	168.188.000	(58.290.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	836.212.000	102.000.000	0	0	938.212.000	1.182.272.000	173.884.500	0	0	1.356.156.500	417.944.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	836.212.000	102.000.000	0	0	938.212.000	1.182.272.000	173.884.500	0	0	1.356.156.500	417.944.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	305.114.000	0	0	0	305.114.000	286.114.000	0	0	0	286.114.000	(19.000.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	230.600.000	15.000.000	0	0	245.600.000	695.810.000	0	0	0	695.810.000	450.210.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	300.498.000	87.000.000	0	0	387.498.000	200.348.000	173.884.500	0	0	374.232.500	(13.265.500)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	191.509.900	0	0	0	191.509.900	179.299.900	83.700.000	0	0	262.999.900	71.490.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	22.069.900	0	0	0	22.069.900	21.859.900	0	0	0	21.859.900	(210.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	22.069.900	0	0	0	22.069.900	21.859.900	0	0	0	21.859.900	(210.000)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	169.440.000	0	0	0	169.440.000	157.440.000	83.700.000	0	0	241.140.000	71.700.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	169.440.000	0	0	0	169.440.000	157.440.000	83.700.000	0	0	241.140.000	71.700.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	34.717.100	152.350.000	0	0	187.067.100	0	0	0	0	0	(187.067.100)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	34.717.100	152.350.000	0	0	187.067.100	0	0	0	0	0	(187.067.100)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	34.717.100	152.350.000	0	0	187.067.100	0	0	0	0	0	(187.067.100)
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.657.066.765	2.011.504.550	0	0	6.668.571.315	4.785.304.199	2.222.077.550	0	0	7.007.381.749	338.810.434
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.657.066.765	2.011.504.550	0	0	6.668.571.315	4.785.304.199	2.222.077.550	0	0	7.007.381.749	338.810.434
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.174.411.565	1.352.538.000	0	0	5.526.949.565	4.352.998.899	1.343.787.200	0	0	5.696.786.099	169.836.534
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.339.300	0	0	0	19.339.300	19.339.300	0	0	0	19.339.300	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.339.300	0	0	0	19.339.300	19.339.300	0	0	0	19.339.300	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.866.525	0	0	0	3.047.866.525	3.047.827.899	0	0	0	3.047.827.899	(38.626)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.873.925	0	0	0	3.046.873.925	3.046.835.299	0	0	0	3.046.835.299	(38.626)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	691.600	0	0	0	691.600	691.600	0	0	0	691.600	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	301.000	0	0	0	301.000	301.000	0	0	0	301.000	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.703.100	0	0	0	561.703.100	777.268.700	0	0	0	777.268.700	215.565.600
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.262.500	0	0	0	2.262.500	7.421.900	0	0	0	7.421.900	5.159.400
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.964.700	0	0	0	40.964.700	42.024.700	0	0	0	42.024.700	1.060.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.081.100	0	0	0	99.081.100	97.321.700	0	0	0	97.321.700	(1.759.400)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.616.800	0	0	0	27.616.800	27.616.800	0	0	0	27.616.800	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2.133.000	0	0	0	2.133.000	6.971.600	0	0	0	6.971.600	4.838.600
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.200.000	0	0	0	9.200.000	4.175.000	0	0	0	4.175.000	(5.025.000)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.445.000	0	0	0	380.445.000	591.737.000	0	0	0	591.737.000	211.292.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.682.500	1.176.418.000	0	0	1.248.100.500	73.267.500	1.167.667.200	0	0	1.240.934.700	(7.165.800)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.522.500	168.252.800	0	0	169.775.300	1.147.500	147.492.000	0	0	148.639.500	(21.135.800)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.160.000	1.008.165.200	0	0	1.078.325.200	72.120.000	1.020.175.200	0	0	1.092.295.200	13.970.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.765.440	0	0	0	387.765.440	328.745.200	0	0	0	328.745.200	(59.020.240)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000	0	0	0	1.160.000	1.740.000	0	0	0	1.740.000	580.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.026.240	0	0	0	247.026.240	180.015.600	0	0	0	180.015.600	(67.010.640)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.579.200	0	0	0	139.579.200	146.989.600	0	0	0	146.989.600	7.410.400
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.054.700	176.120.000	0	0	262.174.700	106.550.300	176.120.000	0	0	282.670.300	20.495.600
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.847.200	0	0	0	35.847.200	46.717.800	0	0	0	46.717.800	10.870.600
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.075.000	0	0	0	22.075.000	20.075.000	0	0	0	20.075.000	(2.000.000)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.132.500	176.120.000	0	0	204.252.500	39.757.500	176.120.000	0	0	215.877.500	11.625.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	482.655.200	658.966.550	0	0	1.141.621.750	432.305.300	878.290.350	0	0	1.310.595.650	168.973.900
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	279.582.400	658.966.550	0	0	938.548.950	271.080.300	878.290.350	0	0	1.149.370.650	210.821.700
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	7.600.800	324.465.000	0	0	332.065.800	332.065.800

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.529.000	0	0	0	56.529.000	42.279.000	0	0	0	42.279.000	(14.250.000)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	175.168.400	474.144.850	0	0	649.313.250	173.315.500	369.003.650	0	0	542.319.150	(106.994.100)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.885.000	184.821.700	0	0	232.706.700	47.885.000	184.821.700	0	0	232.706.700	0
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.072.800	0	0	0	203.072.800	161.225.000	0	0	0	161.225.000	(41.847.800)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.598.800	0	0	0	15.598.800	24.016.000	0	0	0	24.016.000	8.417.200
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	187.474.000	0	0	0	187.474.000	137.209.000	0	0	0	137.209.000	(50.265.000)
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	308.405.600	136.594.700	0	0	445.000.300	314.635.700	91.177.700	0	0	405.813.400	(39.186.900)
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	308.405.600	136.594.700	0	0	445.000.300	314.635.700	91.177.700	0	0	405.813.400	(39.186.900)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	255.110.600	83.019.700	0	0	338.130.300	263.215.700	45.777.700	0	0	308.993.400	(29.136.900)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	191.805.600	14.982.700	0	0	206.788.300	200.885.700	14.177.700	0	0	215.063.400	8.275.100
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	86.614.000	1.077.700	0	0	87.691.700	115.413.100	1.077.700	0	0	116.490.800	28.799.100
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	76.336.600	0	0	0	76.336.600	57.367.600	0	0	0	57.367.600	(18.969.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	28.855.000	13.905.000	0	0	42.760.000	28.105.000	13.100.000	0	0	41.205.000	(1.555.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	63.305.000	68.037.000	0	0	131.342.000	62.330.000	31.600.000	0	0	93.930.000	(37.412.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	63.305.000	68.037.000	0	0	131.342.000	62.330.000	31.600.000	0	0	93.930.000	(37.412.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	53.295.000	53.575.000	0	0	106.870.000	51.420.000	45.400.000	0	0	96.820.000	(10.050.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	53.295.000	53.575.000	0	0	106.870.000	51.420.000	45.400.000	0	0	96.820.000	(10.050.000)
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	53.295.000	53.575.000	0	0	106.870.000	51.420.000	45.400.000	0	0	96.820.000	(10.050.000)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	62.083.397.492	14.407.002.650	0	0	76.490.400.142	76.679.997.409	22.380.037.231	0	0	99.060.034.640	22.569.634.498
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.665.063.317	724.630.500	0	0	7.389.693.817	7.592.196.093	639.172.400	0	0	8.231.368.493	841.674.676
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	6.665.063.317	724.630.500	0	0	7.389.693.817	7.592.196.093	639.172.400	0	0	8.231.368.493	841.674.676
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.531.819.303	626.800.200	0	0	6.158.619.503	5.688.206.291	556.342.100	0	0	6.244.548.391	85.928.888
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.350.000	0	0	0	234.350.000	197.600.000	0	0	0	197.600.000	(36.750.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.350.000	0	0	0	234.350.000	197.600.000	0	0	0	197.600.000	(36.750.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.302.903	0	0	0	4.060.302.903	4.060.427.891	0	0	0	4.060.427.891	124.988
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.800.803	0	0	0	4.000.800.803	4.000.858.291	0	0	0	4.000.858.291	57.488
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	0	0	0	22.600.000	22.600.000	0	0	0	22.600.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.902.100	0	0	0	36.902.100	36.969.600	0	0	0	36.969.600	67.500
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	767.519.600	0	0	0	767.519.600	945.549.600	0	0	0	945.549.600	178.030.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.889.000	0	0	0	31.889.000	31.889.000	0	0	0	31.889.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.731.000	0	0	0	50.731.000	52.275.000	0	0	0	52.275.000	1.544.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.854.600	0	0	0	153.854.600	155.354.600	0	0	0	155.354.600	1.500.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	0	0	0	4.800.000	6.300.000	0	0	0	6.300.000	1.500.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	3.412.000	0	0	0	3.412.000	11.387.000	0	0	0	11.387.000	7.975.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.433.000	0	0	0	520.433.000	685.944.000	0	0	0	685.944.000	165.511.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.550.000	325.850.200	0	0	328.400.200	2.550.000	315.536.700	0	0	318.086.700	(10.313.500)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000	325.850.200	0	0	328.400.200	2.550.000	315.536.700	0	0	318.086.700	(10.313.500)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.416.400	0	0	0	235.416.400	250.528.400	0	0	0	250.528.400	15.112.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.476.400	0	0	0	170.476.400	172.188.400	0	0	0	172.188.400	1.712.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.940.000	0	0	0	64.940.000	78.340.000	0	0	0	78.340.000	13.400.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.680.400	300.950.000	0	0	532.630.400	231.550.400	240.805.400	0	0	472.355.800	(60.274.600)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.550.400	0	0	0	216.550.400	213.500.400	0	0	0	213.500.400	(3.050.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000	0	0	0	13.600.000	16.520.000	9.255.400	0	0	25.775.400	12.175.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.530.000	300.950.000	0	0	302.480.000	1.530.000	231.550.000	0	0	233.080.000	(69.400.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	214.307.200	15.000.000	0	0	229.307.200	148.590.700	0	0	0	148.590.700	(80.716.500)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	145.188.200	15.000.000	0	0	160.188.200	96.810.700	0	0	0	96.810.700	(63.377.500)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	77.988.200	15.000.000	0	0	92.988.200	35.050.700	0	0	0	35.050.700	(57.937.500)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	67.200.000	0	0	0	67.200.000	61.760.000	0	0	0	61.760.000	(5.440.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.119.000	0	0	0	69.119.000	51.780.000	0	0	0	51.780.000	(17.339.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	69.119.000	0	0	0	69.119.000	51.780.000	0	0	0	51.780.000	(17.339.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	588.391.914	1.845.300	0	0	590.237.214	1.445.755.002	1.845.300	0	0	1.447.600.302	857.363.088
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	0	0	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0	15.500.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	0	0	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0	15.500.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	572.891.914	1.845.300	0	0	574.737.214	1.430.255.002	1.845.300	0	0	1.432.100.302	857.363.088
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.443.864	0	0	0	230.443.864	1.087.806.952	0	0	0	1.087.806.952	857.363.088
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.748.050	1.845.300	0	0	327.593.350	325.748.050	1.845.300	0	0	327.593.350	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000	0	0	0	16.700.000	16.700.000	0	0	0	16.700.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	123.702.800	80.985.000	0	0	204.687.800	114.982.800	80.985.000	0	0	195.967.800	(8.720.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	123.702.800	80.985.000	0	0	204.687.800	114.982.800	80.985.000	0	0	195.967.800	(8.720.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	123.702.800	80.985.000	0	0	204.687.800	114.982.800	80.985.000	0	0	195.967.800	(8.720.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	206.842.100	0	0	0	206.842.100	194.661.300	0	0	0	194.661.300	(12.180.800)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.400.000	0	0	0	36.400.000	36.400.000	0	0	0	36.400.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000	0	0	0	36.400.000	36.400.000	0	0	0	36.400.000	0
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.800.000	0	0	0	5.800.000	4.760.000	0	0	0	4.760.000	(1.040.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.800.000	0	0	0	5.800.000	4.760.000	0	0	0	4.760.000	(1.040.000)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	164.642.100	0	0	0	164.642.100	153.501.300	0	0	0	153.501.300	(11.140.800)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.894.300	0	0	0	136.894.300	132.253.500	0	0	0	132.253.500	(4.640.800)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.747.800	0	0	0	27.747.800	21.247.800	0	0	0	21.247.800	(6.500.000)
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.006.356.500	2.998.257.700	0	0	5.004.614.200	2.270.617.100	437.797.000	0	0	2.708.414.100	(2.296.200.100)
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.006.356.500	2.998.257.700	0	0	5.004.614.200	2.270.617.100	437.797.000	0	0	2.708.414.100	(2.296.200.100)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	706.857.300	2.998.257.700	0	0	3.705.115.000	782.034.400	437.797.000	0	0	1.219.831.400	(2.485.283.600)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	0	0	0	14.756.000	14.756.000	0	0	0	14.756.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	0	0	0	14.756.000	14.756.000	0	0	0	14.756.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	313.694.300	190.300.000	0	0	503.994.300	313.694.300	190.300.000	0	0	503.994.300	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	253.499.300	190.300.000	0	0	443.799.300	253.499.300	190.300.000	0	0	443.799.300	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	60.195.000	0	0	0	60.195.000	60.195.000	0	0	0	60.195.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	305.878.000	2.807.957.700	0	0	3.113.835.700	381.055.100	247.497.000	0	0	628.552.100	(2.485.283.600)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	305.878.000	2.807.957.700	0	0	3.113.835.700	381.055.100	247.497.000	0	0	628.552.100	(2.485.283.600)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	72.529.000	0	0	0	72.529.000	72.529.000	0	0	0	72.529.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.529.000	0	0	0	72.529.000	72.529.000	0	0	0	72.529.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.032.291.900	0	0	0	1.032.291.900	808.786.400	0	0	0	808.786.400	(223.505.500)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.032.291.900	0	0	0	1.032.291.900	808.786.400	0	0	0	808.786.400	(223.505.500)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	312.902.500	0	0	0	312.902.500	176.204.500	0	0	0	176.204.500	(136.698.000)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	468.891.900	0	0	0	468.891.900	388.809.900	0	0	0	388.809.900	(80.082.000)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	84.170.000	0	0	0	84.170.000	140.906.000	0	0	0	140.906.000	56.736.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	166.327.500	0	0	0	166.327.500	102.866.000	0	0	0	102.866.000	(63.461.500)
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	58.861.000	0	0	0	58.861.000	58.861.000	0	0	0	58.861.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	58.861.000	0	0	0	58.861.000	58.861.000	0	0	0	58.861.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	58.861.000	0	0	0	58.861.000	58.861.000	0	0	0	58.861.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	208.346.300	0	0	0	208.346.300	620.935.300	0	0	0	620.935.300	412.589.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	185.762.300	0	0	0	185.762.300	598.351.300	0	0	0	598.351.300	412.589.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	94.762.800	0	0	0	94.762.800	94.762.800	0	0	0	94.762.800	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	59.161.500	0	0	0	59.161.500	59.161.500	0	0	0	59.161.500	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	31.838.000	0	0	0	31.838.000	444.427.000	0	0	0	444.427.000	412.589.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	22.584.000	0	0	0	22.584.000	22.584.000	0	0	0	22.584.000	0
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	22.584.000	0	0	0	22.584.000	22.584.000	0	0	0	22.584.000	0
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	39.266.456.661	7.967.818.700	0	0	47.234.275.361	50.972.756.361	18.203.018.981	0	0	69.175.775.342	21.941.499.981
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	39.266.456.661	7.967.818.700	0	0	47.234.275.361	50.972.756.361	18.203.018.981	0	0	69.175.775.342	21.941.499.981
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.172.934.966	6.635.634.000	0	0	23.808.568.966	16.748.586.736	3.233.142.681	0	0	19.981.729.417	(3.826.839.549)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.808.000	0	0	0	82.808.000	82.808.000	0	0	0	82.808.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.808.000	0	0	0	82.808.000	82.808.000	0	0	0	82.808.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.192.506.226	0	0	0	13.192.506.226	13.200.045.996	0	0	0	13.200.045.996	7.539.770
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.115.631.226	0	0	0	13.115.631.226	13.115.670.996	0	0	0	13.115.670.996	39.770
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	0	0	0	39.600.000	39.600.000	0	0	0	39.600.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.475.000	0	0	0	5.475.000	5.475.000	0	0	0	5.475.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.800.000	0	0	0	31.800.000	39.300.000	0	0	0	39.300.000	7.500.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.802.089.840	0	0	0	1.802.089.840	1.999.061.640	0	0	0	1.999.061.640	196.971.800
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.984.600	0	0	0	129.984.600	129.984.600	0	0	0	129.984.600	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.460.100	0	0	0	237.460.100	243.960.100	0	0	0	243.960.100	6.500.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.353.300	0	0	0	52.353.300	52.353.300	0	0	0	52.353.300	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	49.006.840	0	0	0	49.006.840	53.825.640	0	0	0	53.825.640	4.818.800
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.400.000	0	0	0	16.400.000	24.350.000	0	0	0	24.350.000	7.950.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.316.885.000	0	0	0	1.316.885.000	1.494.588.000	0	0	0	1.494.588.000	177.703.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	798.820.000	6.017.634.000	0	0	6.816.454.000	39.885.000	2.357.249.700	0	0	2.397.134.700	(4.419.319.300)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	927.725.400	0	0	927.725.400	0	931.266.100	0	0	931.266.100	3.540.700
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	793.610.000	3.705.000.000	0	0	4.498.610.000	0	0	0	0	0	(4.498.610.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.210.000	1.384.908.600	0	0	1.390.118.600	39.885.000	1.425.983.600	0	0	1.465.868.600	75.750.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.332.800	0	0	0	577.332.800	631.728.000	0	0	0	631.728.000	54.395.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.332.800	0	0	0	290.332.800	310.728.000	0	0	0	310.728.000	20.395.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.000.000	0	0	0	287.000.000	321.000.000	0	0	0	321.000.000	34.000.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.378.100	618.000.000	0	0	1.337.378.100	795.058.100	875.892.981	0	0	1.670.951.081	333.572.981
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.243.100	0	0	0	393.243.100	393.243.100	0	0	0	393.243.100	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.250.000	0	0	0	31.250.000	31.250.000	0	0	0	31.250.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	294.885.000	618.000.000	0	0	912.885.000	370.565.000	875.892.981	0	0	1.246.457.981	333.572.981
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.859.463.345	1.242.975.000	0	0	8.102.438.345	13.570.513.445	934.153.600	0	0	14.504.667.045	6.402.228.700
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.021.361.200	34.615.200	0	0	5.055.976.400	10.797.878.800	23.839.200	0	0	10.821.718.000	5.765.741.600

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	0	0	0	0	5.209.634.000	0	0	0	5.209.634.000	5.209.634.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.021.361.200	34.615.200	0	0	5.055.976.400	5.588.244.800	23.839.200	0	0	5.612.084.000	556.107.600
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.679.500	39.698.100	0	0	128.377.600	189.926.200	0	0	0	189.926.200	61.548.600
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	88.679.500	39.698.100	0	0	128.377.600	189.926.200	0	0	0	189.926.200	61.548.600
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.749.422.645	1.168.661.700	0	0	2.918.084.345	2.582.708.445	910.314.400	0	0	3.493.022.845	574.938.500
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.531.776.200	843.137.100	0	0	2.374.913.300	2.330.073.600	676.900.000	0	0	3.006.973.600	632.060.300
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	181.054.845	125.574.600	0	0	306.629.445	224.134.845	33.464.400	0	0	257.599.245	(49.030.200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	36.591.600	199.950.000	0	0	236.541.600	28.500.000	199.950.000	0	0	228.450.000	(8.091.600)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.221.751.350	44.241.600	0	0	10.265.992.950	14.903.612.930	12.206.921.600	0	0	27.110.534.530	16.844.541.580
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	93.450.500	0	0	0	93.450.500	93.450.500	0	0	0	93.450.500	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	93.450.500	0	0	0	93.450.500	93.450.500	0	0	0	93.450.500	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	10.128.300.850	44.241.600	0	0	10.172.542.450	14.810.162.430	12.206.921.600	0	0	27.017.084.030	16.844.541.580
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.638.433.950	0	0	0	1.638.433.950	2.878.953.450	0	0	0	2.878.953.450	1.240.519.500
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.661.961.880	0	0	0	7.661.961.880	9.910.303.880	0	0	0	9.910.303.880	2.248.342.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0	0	0	0	0	342.430.000	6.507.570.000	0	0	6.850.000.000	6.850.000.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	827.905.020	44.241.600	0	0	872.146.620	1.678.475.100	5.699.351.600	0	0	7.377.826.700	6.505.680.080
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	382.044.100	20.068.100	0	0	402.112.200	673.300.350	28.801.100	0	0	702.101.450	299.989.250
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	152.475.400	13.000.000	0	0	165.475.400	293.731.850	21.733.000	0	0	315.464.850	149.989.450
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	152.475.400	13.000.000	0	0	165.475.400	293.731.850	21.733.000	0	0	315.464.850	149.989.450
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	0	0	0	9.066.100	9.066.100	0	0	0	9.066.100	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	0	0	0	9.066.100	9.066.100	0	0	0	9.066.100	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.040.000	7.068.100	0	0	39.108.100	182.040.000	7.068.100	0	0	189.108.100	150.000.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	32.040.000	7.068.100	0	0	39.108.100	182.040.000	7.068.100	0	0	189.108.100	150.000.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	188.462.600	0	0	0	188.462.600	188.462.400	0	0	0	188.462.400	(200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	188.462.600	0	0	0	188.462.600	188.462.400	0	0	0	188.462.400	(200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	798.525.000	24.900.000	0	0	823.425.000	778.855.000	12.000.000	0	0	790.855.000	(32.570.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	798.525.000	24.900.000	0	0	823.425.000	778.855.000	12.000.000	0	0	790.855.000	(32.570.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	798.525.000	24.900.000	0	0	823.425.000	778.855.000	12.000.000	0	0	790.855.000	(32.570.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	79.790.000	0	0	0	79.790.000	73.740.000	0	0	0	73.740.000	(6.050.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.790.000	0	0	0	79.790.000	73.740.000	0	0	0	73.740.000	(6.050.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	79.790.000	0	0	0	79.790.000	73.740.000	0	0	0	73.740.000	(6.050.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.751.947.900	0	0	0	3.751.947.900	4.224.147.900	1.788.000.000	0	0	6.012.147.900	2.260.200.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.751.947.900	0	0	0	3.751.947.900	4.224.147.900	1.788.000.000	0	0	6.012.147.900	2.260.200.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	633.562.200	0	0	0	633.562.200	879.623.700	0	0	0	879.623.700	246.061.500
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	449.821.900	0	0	0	449.821.900	776.701.500	0	0	0	776.701.500	326.879.600
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	281.454.700	0	0	0	281.454.700	259.158.700	1.710.000.000	0	0	1.969.158.700	1.687.704.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	75.715.100	0	0	0	75.715.100	75.270.000	0	0	0	75.270.000	(445.100)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.311.394.000	0	0	0	2.311.394.000	2.233.394.000	78.000.000	0	0	2.311.394.000	0
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.232.640.822	2.557.819.650	0	0	10.790.460.472	10.173.447.311	2.779.692.750	0	0	12.953.140.061	2.162.679.589
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	8.232.640.822	2.557.819.650	0	0	10.790.460.472	10.173.447.311	2.779.692.750	0	0	12.953.140.061	2.162.679.589
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.880.606.399	167.093.450	0	0	5.047.699.849	5.053.521.888	234.820.150	0	0	5.288.342.038	240.642.189
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.949.900	0	0	0	8.949.900	8.949.900	0	0	0	8.949.900	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.949.900	0	0	0	8.949.900	8.949.900	0	0	0	8.949.900	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.719.849.499	0	0	0	3.719.849.499	3.719.859.058	0	0	0	3.719.859.058	9.559
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.709.797.299	0	0	0	3.709.797.299	3.709.806.858	0	0	0	3.709.806.858	9.559
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.952.200	0	0	0	3.952.200	3.952.200	0	0	0	3.952.200	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.100.000	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	0	6.100.000	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.361.100	0	0	0	665.361.100	828.158.100	1.127.600	0	0	829.285.700	163.924.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.664.700	0	0	0	17.664.700	17.664.700	0	0	0	17.664.700	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.562.600	0	0	0	66.562.600	66.562.600	1.127.600	0	0	67.690.200	1.127.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.052.200	0	0	0	91.052.200	91.052.200	0	0	0	91.052.200	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.724.800	0	0	0	23.724.800	23.724.800	0	0	0	23.724.800	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	3.128.800	0	0	0	3.128.800	3.128.800	0	0	0	3.128.800	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(3.000.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.228.000	0	0	0	457.228.000	623.025.000	0	0	0	623.025.000	165.797.000
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.147.500	167.093.450	0	0	168.240.950	2.377.500	233.692.550	0	0	236.070.050	67.829.100
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.147.500	130.664.050	0	0	131.811.550	2.377.500	192.440.850	0	0	194.818.350	63.006.800
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	36.429.400	0	0	36.429.400	0	41.251.700	0	0	41.251.700	4.822.300
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.210.800	0	0	0	326.210.800	328.926.600	0	0	0	328.926.600	2.715.800
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.040.800	0	0	0	133.040.800	136.456.600	0	0	0	136.456.600	3.415.800
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.170.000	0	0	0	193.170.000	192.470.000	0	0	0	192.470.000	(700.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.087.600	0	0	0	159.087.600	165.250.730	0	0	0	165.250.730	6.163.130

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.807.600	0	0	0	90.807.600	88.978.000	0	0	0	88.978.000	(1.829.600)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.850.000	0	0	0	19.850.000	19.850.000	0	0	0	19.850.000	0
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.510.000	0	0	0	6.510.000	14.510.000	0	0	0	14.510.000	8.000.000
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.920.000	0	0	0	41.920.000	41.912.730	0	0	0	41.912.730	(7.270)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	49.268.800	0	0	0	49.268.800	47.152.400	0	0	0	47.152.400	(2.116.400)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	37.018.800	0	0	0	37.018.800	47.152.400	0	0	0	47.152.400	10.133.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.018.800	0	0	0	37.018.800	47.152.400	0	0	0	47.152.400	10.133.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12.250.000	0	0	0	12.250.000	0	0	0	0	0	(12.250.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	12.250.000	0	0	0	12.250.000	0	0	0	0	0	(12.250.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.712.295.540	2.264.435.000	0	0	4.976.730.540	3.286.144.140	2.458.581.400	0	0	5.744.725.540	767.995.000
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.648.449.000	2.264.435.000	0	0	4.912.884.000	3.075.093.000	2.458.581.400	0	0	5.533.674.400	620.790.400
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	605.247.900	2.168.190.000	0	0	2.773.437.900	440.014.900	2.362.336.400	0	0	2.802.351.300	28.913.400
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.043.201.100	96.245.000	0	0	2.139.446.100	2.635.078.100	96.245.000	0	0	2.731.323.100	591.877.000
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	63.846.540	0	0	0	63.846.540	211.051.140	0	0	0	211.051.140	147.204.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	63.846.540	0	0	0	63.846.540	211.051.140	0	0	0	211.051.140	147.204.600
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47.280.800	0	0	0	47.280.800	1.325.560.200	0	0	0	1.325.560.200	1.278.279.400
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42.497.800	0	0	0	42.497.800	1.239.847.000	0	0	0	1.239.847.000	1.197.349.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.497.800	0	0	0	42.497.800	1.239.847.000	0	0	0	1.239.847.000	1.197.349.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.783.000	0	0	0	4.783.000	85.713.200	0	0	0	85.713.200	80.930.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.783.000	0	0	0	4.783.000	85.713.200	0	0	0	85.713.200	80.930.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	119.326.152	0	0	0	119.326.152	131.195.352	0	0	0	131.195.352	11.869.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.326.152	0	0	0	119.326.152	131.195.352	0	0	0	131.195.352	11.869.200
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	19.820.000	0	0	0	19.820.000	20.120.000	0	0	0	20.120.000	300.000
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	54.887.100	0	0	0	54.887.100	66.022.800	0	0	0	66.022.800	11.135.700
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	44.619.052	0	0	0	44.619.052	45.052.552	0	0	0	45.052.552	433.500
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	85.381.100	126.291.200	0	0	211.672.300	77.341.100	86.291.200	0	0	163.632.300	(48.040.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	85.381.100	126.291.200	0	0	211.672.300	77.341.100	86.291.200	0	0	163.632.300	(48.040.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	63.212.700	126.291.200	0	0	189.503.900	58.272.700	86.291.200	0	0	144.563.900	(44.940.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	22.168.400	0	0	0	22.168.400	19.068.400	0	0	0	19.068.400	(3.100.000)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	338.482.031	0	0	0	338.482.031	252.532.231	0	0	0	252.532.231	(85.949.800)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	338.482.031	0	0	0	338.482.031	252.532.231	0	0	0	252.532.231	(85.949.800)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	338.482.031	0	0	0	338.482.031	252.532.231	0	0	0	252.532.231	(85.949.800)
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.912.880.192	158.476.100	0	0	6.071.356.292	5.670.980.544	320.356.100	0	0	5.991.336.644	(80.019.648)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	5.912.880.192	158.476.100	0	0	6.071.356.292	5.670.980.544	320.356.100	0	0	5.991.336.644	(80.019.648)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.022.992	143.267.000	0	0	4.561.289.992	4.417.839.544	320.356.100	0	0	4.738.195.644	176.905.652
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.948.545.292	0	0	0	2.948.545.292	2.948.600.820	0	0	0	2.948.600.820	55.528
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.045.292	0	0	0	2.941.045.292	2.941.100.820	0	0	0	2.941.100.820	55.528
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.000	0	0	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0	4.250.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000	0	0	0	3.250.000	3.250.000	0	0	0	3.250.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247.363.600	0	0	0	1.247.363.600	1.207.675.600	0	0	0	1.207.675.600	(39.688.000)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.833.400	0	0	0	3.833.400	3.833.400	0	0	0	3.833.400	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.575.800	0	0	0	55.575.800	55.575.800	0	0	0	55.575.800	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.214.200	0	0	0	79.214.200	80.614.200	0	0	0	80.614.200	1.400.000
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.493.200	0	0	0	17.493.200	18.493.200	0	0	0	18.493.200	1.000.000
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1.352.000	0	0	0	1.352.000	3.867.000	0	0	0	3.867.000	2.515.000
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.085.395.000	0	0	0	1.085.395.000	1.040.792.000	0	0	0	1.040.792.000	(44.603.000)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	885.000	143.267.000	0	0	144.152.000	51.570.000	320.356.100	0	0	371.926.100	227.774.100
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	885.000	143.267.000	0	0	144.152.000	51.570.000	320.356.100	0	0	371.926.100	227.774.100
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.800.000	0	0	0	168.800.000	157.566.224	0	0	0	157.566.224	(11.233.776)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	0	0	0	66.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.800.000	0	0	0	102.800.000	91.566.224	0	0	0	91.566.224	(11.233.776)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.929.100	0	0	0	44.929.100	44.926.900	0	0	0	44.926.900	(2.200)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.349.100	0	0	0	30.349.100	30.346.900	0	0	0	30.346.900	(2.200)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	0	0	0	14.580.000	14.580.000	0	0	0	14.580.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.287.510.800	15.209.100	0	0	1.302.719.900	1.045.794.600	0	0	0	1.045.794.600	(256.925.300)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.287.510.800	15.209.100	0	0	1.302.719.900	1.045.794.600	0	0	0	1.045.794.600	(256.925.300)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	11.000.000	0	0	0	11.000.000	111.000.000	0	0	0	111.000.000	100.000.000
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	108.796.300	0	0	0	108.796.300	133.796.100	0	0	0	133.796.100	24.999.800

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	135.944.600	15.209.100	0	0	151.153.700	369.228.600	0	0	0	369.228.600	218.074.900
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.031.769.900	0	0	0	1.031.769.900	431.769.900	0	0	0	431.769.900	(600.000.000)
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	63.995.400	0	0	0	63.995.400	63.995.400	0	0	0	63.995.400	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	63.995.400	0	0	0	63.995.400	63.995.400	0	0	0	63.995.400	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.995.400	0	0	0	63.995.400	63.995.400	0	0	0	63.995.400	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143.351.000	0	0	0	143.351.000	143.351.000	0	0	0	143.351.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	143.351.000	0	0	0	143.351.000	143.351.000	0	0	0	143.351.000	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	98.616.900	0	0	0	98.616.900	98.616.900	0	0	0	98.616.900	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	35.401.500	0	0	0	35.401.500	35.401.500	0	0	0	35.401.500	0
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.332.600	0	0	0	9.332.600	9.332.600	0	0	0	9.332.600	0
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	120.782.721.770	14.617.217.300	0	0	135.399.939.070	139.824.650.995	17.585.688.700	0	0	157.410.339.695	22.010.400.625
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	72.632.410.897	12.961.537.300	0	0	85.593.948.197	85.633.017.797	15.410.305.900	0	0	101.043.323.697	15.449.375.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	72.632.410.897	12.961.537.300	0	0	85.593.948.197	85.633.017.797	15.410.305.900	0	0	101.043.323.697	15.449.375.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.894.443.397	12.954.037.300	0	0	63.848.480.697	59.883.766.697	14.572.814.100	0	0	74.456.580.797	10.608.100.100
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.046.200	0	0	0	38.046.200	38.046.200	0	0	0	38.046.200	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.046.200	0	0	0	38.046.200	38.046.200	0	0	0	38.046.200	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.398.559.901	11.100.000	0	0	17.409.659.901	17.398.694.395	0	0	0	17.398.694.395	(10.965.506)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.242.369.101	0	0	0	17.242.369.101	17.242.369.695	0	0	0	17.242.369.695	594
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.378.800	11.100.000	0	0	161.478.800	151.324.700	0	0	0	151.324.700	(10.154.100)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.906.000	0	0	0	2.906.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(406.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.906.000	0	0	0	2.906.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(406.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.109.814.300	0	0	0	3.109.814.300	2.983.634.200	0	0	0	2.983.634.200	(126.180.100)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.936.614.300	0	0	0	2.936.614.300	2.810.418.300	0	0	0	2.810.418.300	(126.196.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	173.200.000	0	0	0	173.200.000	173.215.900	0	0	0	173.215.900	15.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.185.230.500	0	0	0	11.185.230.500	15.350.606.800	0	0	0	15.350.606.800	4.165.376.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.997.400	0	0	0	114.997.400	244.631.600	0	0	0	244.631.600	129.634.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.522.000	0	0	0	452.522.000	507.532.700	0	0	0	507.532.700	55.010.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.500.000	0	0	0	211.500.000	342.375.000	0	0	0	342.375.000	130.875.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.600.000	0	0	0	74.600.000	74.600.000	0	0	0	74.600.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	10.210.200	0	0	0	10.210.200	35.291.000	0	0	0	35.291.000	25.080.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.518.384.500	0	0	0	2.518.384.500	3.578.124.500	0	0	0	3.578.124.500	1.059.740.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.803.016.400	0	0	0	7.803.016.400	10.568.052.000	0	0	0	10.568.052.000	2.765.035.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.626.500	10.976.251.300	0	0	11.426.877.800	3.477.694.406	12.137.099.100	0	0	15.614.793.506	4.187.915.706
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.275.000	3.501.562.500	0	0	3.553.837.500	53.250.000	3.080.228.000	0	0	3.133.478.000	(420.359.500)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	74.874.000	2.822.872.800	0	0	2.897.746.800	287.357.000	2.763.620.500	0	0	3.050.977.500	153.230.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.652.500	4.651.816.000	0	0	4.829.468.500	2.991.262.406	6.293.250.600	0	0	9.284.513.006	4.455.044.506
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.825.000	0	0	0	145.825.000	145.825.000	0	0	0	145.825.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.482.271.900	0	0	0	5.482.271.900	5.636.168.200	0	0	0	5.636.168.200	153.896.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	161.700.000	0	0	0	161.700.000	161.700.000	0	0	0	161.700.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.573.204.600	0	0	0	2.573.204.600	2.634.104.600	0	0	0	2.634.104.600	60.900.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.001.844.900	0	0	0	1.001.844.900	1.803.918.600	0	0	0	1.803.918.600	802.073.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.745.522.400	0	0	0	1.745.522.400	1.036.445.000	0	0	0	1.036.445.000	(709.077.400)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.485.798.390	1.033.600.000	0	0	5.519.398.390	5.752.943.590	1.755.040.000	0	0	7.507.983.590	1.988.585.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.838.318.100	0	0	0	1.838.318.100	2.008.450.800	0	0	0	2.008.450.800	170.132.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.209.290	0	0	0	705.209.290	621.491.490	0	0	0	621.491.490	(83.717.800)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.626.621.000	1.033.600.000	0	0	2.660.221.000	2.807.351.300	1.755.040.000	0	0	4.562.391.300	1.902.170.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	315.650.000	0	0	0	315.650.000	315.650.000	0	0	0	315.650.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.323.134.306	0	0	0	1.323.134.306	1.823.226.406	0	0	0	1.823.226.406	500.092.100
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.541.206	0	0	0	168.541.206	168.541.206	0	0	0	168.541.206	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	754.593.100	0	0	0	754.593.100	1.254.685.200	0	0	0	1.254.685.200	500.092.100
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.430.485.800	933.086.000	0	0	2.363.571.800	1.432.277.000	680.675.000	0	0	2.112.952.000	(250.619.800)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	841.151.000	607.485.000	0	0	1.448.636.000	845.823.000	451.034.000	0	0	1.296.857.000	(151.779.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	517.334.800	200.601.000	0	0	717.935.800	514.454.000	108.041.000	0	0	622.495.000	(95.440.800)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	72.000.000	125.000.000	0	0	197.000.000	72.000.000	121.600.000	0	0	193.600.000	(3.400.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13	Penataan Organisasi	860.903.000	0	0	0	860.903.000	860.903.000	0	0	0	860.903.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	199.178.600	0	0	0	199.178.600	199.178.600	0	0	0	199.178.600	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.345.400	0	0	0	113.345.400	113.345.400	0	0	0	113.345.400	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	548.379.000	0	0	0	548.379.000	548.379.000	0	0	0	548.379.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.129.572.600	0	0	0	5.129.572.600	5.129.572.500	0	0	0	5.129.572.500	(100)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01	Fasilitas Keprotokolan	393.099.000	0	0	0	393.099.000	539.899.000	0	0	0	539.899.000	146.800.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.913.278.000	0	0	0	1.913.278.000	2.111.077.900	0	0	0	2.111.077.900	197.799.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.823.195.600	0	0	0	2.823.195.600	2.478.595.600	0	0	0	2.478.595.600	(344.600.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.688.367.900	7.500.000	0	0	20.695.867.900	24.752.565.400	7.500.000	0	0	24.760.065.400	4.064.197.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	641.560.600	0	0	0	641.560.600	602.302.300	0	0	0	602.302.300	(39.258.300)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	128.403.500	0	0	0	128.403.500	186.726.400	0	0	0	186.726.400	58.322.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	257.015.700	0	0	0	257.015.700	173.625.700	0	0	0	173.625.700	(83.390.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	256.141.400	0	0	0	256.141.400	241.950.200	0	0	0	241.950.200	(14.191.200)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.102.225.400	0	0	0	19.102.225.400	23.382.161.200	0	0	0	23.382.161.200	4.279.935.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.892.943.000	0	0	0	3.892.943.000	4.732.178.800	0	0	0	4.732.178.800	839.235.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	15.209.282.400	0	0	0	15.209.282.400	18.649.982.400	0	0	0	18.649.982.400	3.440.700.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	944.581.900	7.500.000	0	0	952.081.900	768.101.900	7.500.000	0	0	775.601.900	(176.480.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	231.184.000	7.500.000	0	0	238.684.000	194.384.000	7.500.000	0	0	201.884.000	(36.800.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	485.580.900	0	0	0	485.580.900	258.700.900	0	0	0	258.700.900	(226.880.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	227.817.000	0	0	0	227.817.000	315.017.000	0	0	0	315.017.000	87.200.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.049.599.600	0	0	0	1.049.599.600	996.685.700	829.991.800	0	0	1.826.677.500	777.077.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	234.520.000	0	0	0	234.520.000	105.300.000	0	0	0	105.300.000	(129.220.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	167.670.000	0	0	0	167.670.000	38.450.000	0	0	0	38.450.000	(129.220.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.650.000	0	0	0	53.650.000	53.650.000	0	0	0	53.650.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	44.200.000	0	0	0	44.200.000	44.845.000	0	0	0	44.845.000	645.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4.800.000	0	0	0	4.800.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	29.150.000	0	0	0	29.150.000	29.450.000	0	0	0	29.450.000	300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10.250.000	0	0	0	10.250.000	10.295.000	0	0	0	10.295.000	45.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	709.609.600	0	0	0	709.609.600	786.695.700	829.991.800	0	0	1.616.687.500	907.077.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	447.911.000	0	0	0	447.911.000	430.921.400	101.789.600	0	0	532.711.000	84.800.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	204.762.600	0	0	0	204.762.600	336.294.600	728.202.200	0	0	1.064.496.800	859.734.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	56.936.000	0	0	0	56.936.000	19.479.700	0	0	0	19.479.700	(37.456.300)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	61.270.000	0	0	0	61.270.000	59.845.000	0	0	0	59.845.000	(1.425.000)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	43.175.000	0	0	0	43.175.000	43.175.000	0	0	0	43.175.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.895.000	0	0	0	5.895.000	5.895.000	0	0	0	5.895.000	0
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.200.000	0	0	0	12.200.000	10.775.000	0	0	0	10.775.000	(1.425.000)
4 02	SEKRETARIAT DPRD	48.150.310.873	1.655.680.000	0	0	49.805.990.873	54.191.633.198	2.175.382.800	0	0	56.367.015.998	6.561.025.125
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	48.150.310.873	1.655.680.000	0	0	49.805.990.873	54.191.633.198	2.175.382.800	0	0	56.367.015.998	6.561.025.125
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.405.989.373	1.655.680.000	0	0	30.061.669.373	30.086.998.398	2.175.382.800	0	0	32.262.381.198	2.200.711.825
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.400.000	0	0	0	89.400.000	90.600.000	0	0	0	90.600.000	1.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.400.000	0	0	0	89.400.000	90.600.000	0	0	0	90.600.000	1.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.454.700.369	0	0	0	5.454.700.369	5.459.200.494	0	0	0	5.459.200.494	4.500.125
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.265.700.369	0	0	0	5.265.700.369	5.265.700.494	0	0	0	5.265.700.494	125
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.800.000	0	0	0	103.800.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	1.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	1.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	82.200.000	0	0	0	82.200.000	84.300.000	0	0	0	84.300.000	2.100.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.502.459.800	0	0	0	4.502.459.800	5.551.810.800	0	0	0	5.551.810.800	1.049.351.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.581.500	0	0	0	32.581.500	32.581.500	0	0	0	32.581.500	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.107.800	0	0	0	62.107.800	87.406.500	0	0	0	87.406.500	25.298.700
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.972.400	0	0	0	187.972.400	282.533.000	0	0	0	282.533.000	94.560.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.924.600	0	0	0	81.924.600	137.243.300	0	0	0	137.243.300	55.318.700
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	126.000.000	0	0	0	126.000.000	126.000.000	0	0	0	126.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	17.615.500	0	0	0	17.615.500	23.115.500	0	0	0	23.115.500	5.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	87.450.000	0	0	0	87.450.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	22.550.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.906.808.000	0	0	0	3.906.808.000	4.752.931.000	0	0	0	4.752.931.000	846.123.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.065.180.000	0	0	1.065.180.000	0	1.380.730.800	0	0	1.380.730.800	315.550.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	575.180.000	0	0	575.180.000	0	668.730.800	0	0	668.730.800	93.550.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	490.000.000	0	0	490.000.000	0	712.000.000	0	0	712.000.000	222.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.200.000	0	0	0	411.200.000	514.000.000	0	0	0	514.000.000	102.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	0	0	0	11.600.000	17.400.000	0	0	0	17.400.000	5.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	0	0	0	198.000.000	252.000.000	0	0	0	252.000.000	54.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.600.000	0	0	0	201.600.000	244.600.000	0	0	0	244.600.000	43.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.455.486.504	590.500.000	0	0	2.045.986.504	1.965.371.004	794.652.000	0	0	2.760.023.004	714.036.500
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.993.800	0	0	0	327.993.800	460.010.000	0	0	0	460.010.000	132.016.200
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.851.600	0	0	0	185.851.600	303.663.600	0	0	0	303.663.600	117.812.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.643.200	0	0	0	43.643.200	43.643.200	0	0	0	43.643.200	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	897.997.904	590.500.000	0	0	1.488.497.904	1.158.054.204	794.652.000	0	0	1.952.706.204	464.208.300
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13	Penataan Organisasi	61.950.000	0	0	0	61.950.000	75.223.400	0	0	0	75.223.400	13.273.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.950.000	0	0	0	61.950.000	75.223.400	0	0	0	75.223.400	13.273.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700	0	0	0	16.430.792.700	16.430.792.700	0	0	0	16.430.792.700	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200	0	0	0	15.983.657.200	15.983.657.200	0	0	0	15.983.657.200	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500	0	0	0	372.135.500	372.135.500	0	0	0	372.135.500	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.744.321.500	0	0	0	19.744.321.500	24.104.634.800	0	0	0	24.104.634.800	4.360.313.300
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	803.051.000	0	0	0	803.051.000	601.857.600	0	0	0	601.857.600	(201.193.400)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	138.301.400	0	0	0	138.301.400	137.108.000	0	0	0	137.108.000	(1.193.400)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	344.749.800	0	0	0	344.749.800	244.749.800	0	0	0	244.749.800	(100.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	319.999.800	0	0	0	319.999.800	219.999.800	0	0	0	219.999.800	(100.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	187.900.000	0	0	0	187.900.000	190.500.000	0	0	0	190.500.000	2.600.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	41.400.000	0	0	0	41.400.000	37.275.000	0	0	0	37.275.000	(4.125.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.650.000	0	0	0	27.650.000	20.775.000	0	0	0	20.775.000	(6.875.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pembahasan APBD	34.525.000	0	0	0	34.525.000	35.900.000	0	0	0	35.900.000	1.375.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	34.525.000	0	0	0	34.525.000	35.900.000	0	0	0	35.900.000	1.375.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	22.150.000	0	0	0	22.150.000	0	0	0	0	0	(22.150.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	27.650.000	0	0	0	27.650.000	60.650.000	0	0	0	60.650.000	33.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	918.354.500	0	0	0	918.354.500	1.243.542.200	0	0	0	1.243.542.200	325.187.700
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	314.667.500	0	0	0	314.667.500	471.855.200	0	0	0	471.855.200	157.187.700
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	306.000.000	0	0	0	306.000.000	306.000.000	0	0	0	306.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	297.687.000	0	0	0	297.687.000	465.687.000	0	0	0	465.687.000	168.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	392.400.000	0	0	0	392.400.000	351.150.000	0	0	0	351.150.000	(41.250.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	19.500.000	0	0	0	19.500.000	11.250.000	0	0	0	11.250.000	(8.250.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.575.000	0	0	0	4.575.000	4.575.000	0	0	0	4.575.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	368.325.000	0	0	0	368.325.000	335.325.000	0	0	0	335.325.000	(33.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	17.412.616.000	0	0	0	17.412.616.000	21.687.585.000	0	0	0	21.687.585.000	4.274.969.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.681.062.000	0	0	0	14.681.062.000	16.244.426.000	0	0	0	16.244.426.000	1.563.364.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.731.554.000	0	0	0	2.731.554.000	5.443.159.000	0	0	0	5.443.159.000	2.711.605.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	54.129.717.668	2.579.222.700	25.000.000.000	164.652.998.100	246.361.938.468	54.744.483.013	2.858.978.100	23.387.342.907	165.704.127.400	246.694.931.420	332.992.952
5 01	PERENCANAAN	10.810.610.299	994.386.900	0	0	11.804.997.199	10.919.286.145	620.078.900	0	0	11.539.365.045	(265.632.154)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	10.810.610.299	994.386.900	0	0	11.804.997.199	10.919.286.145	620.078.900	0	0	11.539.365.045	(265.632.154)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.419.737.099	994.386.900	0	0	8.414.123.999	7.991.631.745	620.078.900	0	0	8.611.710.645	197.586.646
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.500.000	0	0	0	56.500.000	46.700.000	0	0	0	46.700.000	(9.800.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.300.000	0	0	0	27.300.000	32.050.000	0	0	0	32.050.000	4.750.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.200.000	0	0	0	29.200.000	14.650.000	0	0	0	14.650.000	(14.550.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.938.811.683	0	0	0	4.938.811.683	4.938.811.729	0	0	0	4.938.811.729	46
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.907.407.783	0	0	0	4.907.407.783	4.907.407.829	0	0	0	4.907.407.829	46
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.803.900	0	0	0	24.803.900	24.803.900	0	0	0	24.803.900	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.422.727.400	634.046.800	0	0	2.056.774.200	2.224.228.000	301.535.600	0	0	2.525.763.600	468.989.400
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.380.500	0	0	0	18.380.500	18.389.600	0	0	0	18.389.600	9.100
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.275.400	634.046.800	0	0	763.322.200	154.352.300	301.535.600	0	0	455.887.900	(307.434.300)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.618.500	0	0	0	161.618.500	161.618.500	0	0	0	161.618.500	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.325.000	0	0	0	15.325.000	29.218.400	0	0	0	29.218.400	13.893.400
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	17.079.000	0	0	0	17.079.000	27.626.200	0	0	0	27.626.200	10.547.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.750.000	0	0	0	13.750.000	18.750.000	0	0	0	18.750.000	5.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.067.299.000	0	0	0	1.067.299.000	1.814.273.000	0	0	0	1.814.273.000	746.974.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.530.000	360.340.100	0	0	361.870.100	1.530.000	318.543.300	0	0	320.073.300	(41.796.800)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.530.000	360.340.100	0	0	361.870.100	1.530.000	318.543.300	0	0	320.073.300	(41.796.800)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.201.116	0	0	0	713.201.116	594.793.616	0	0	0	594.793.616	(118.407.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.620.000	0	0	0	587.620.000	487.612.500	0	0	0	487.612.500	(100.007.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.107.116	0	0	0	30.107.116	14.207.116	0	0	0	14.207.116	(15.900.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.474.000	0	0	0	95.474.000	92.974.000	0	0	0	92.974.000	(2.500.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.966.900	0	0	0	286.966.900	185.568.400	0	0	0	185.568.400	(101.398.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.193.700	0	0	0	220.193.700	144.595.200	0	0	0	144.595.200	(75.598.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.773.200	0	0	0	66.773.200	40.973.200	0	0	0	40.973.200	(25.800.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.165.491.700	0	0	0	2.165.491.700	1.788.882.900	0	0	0	1.788.882.900	(376.608.800)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.336.991.700	0	0	0	1.336.991.700	1.175.412.600	0	0	0	1.175.412.600	(161.579.100)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	135.846.700	0	0	0	135.846.700	17.246.000	0	0	0	17.246.000	(118.600.700)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	62.750.000	0	0	0	62.750.000	37.213.600	0	0	0	37.213.600	(25.536.400)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	173.150.000	0	0	0	173.150.000	139.528.000	0	0	0	139.528.000	(33.622.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	250.505.000	0	0	0	250.505.000	225.578.800	0	0	0	225.578.800	(24.926.200)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	714.740.000	0	0	0	714.740.000	755.846.200	0	0	0	755.846.200	41.106.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	551.410.000	0	0	0	551.410.000	416.480.300	0	0	0	416.480.300	(134.929.700)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	194.500.000	0	0	0	194.500.000	214.500.000	0	0	0	214.500.000	20.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	356.910.000	0	0	0	356.910.000	201.980.300	0	0	0	201.980.300	(154.929.700)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	277.090.000	0	0	0	277.090.000	196.990.000	0	0	0	196.990.000	(80.100.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	141.080.000	0	0	0	141.080.000	104.480.000	0	0	0	104.480.000	(36.600.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	136.010.000	0	0	0	136.010.000	92.510.000	0	0	0	92.510.000	(43.500.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.225.381.500	0	0	0	1.225.381.500	1.138.771.500	0	0	0	1.138.771.500	(86.610.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	468.089.800	0	0	0	468.089.800	422.864.800	0	0	0	422.864.800	(45.225.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.125.000	0	0	0	105.125.000	77.350.000	0	0	0	77.350.000	(27.775.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.850.000	0	0	0	69.850.000	69.850.000	0	0	0	69.850.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.700.000	0	0	0	43.700.000	43.700.000	0	0	0	43.700.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.044.800	0	0	0	121.044.800	103.594.800	0	0	0	103.594.800	(17.450.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79.820.000	0	0	0	79.820.000	79.820.000	0	0	0	79.820.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.550.000	0	0	0	48.550.000	48.550.000	0	0	0	48.550.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	328.891.700	0	0	0	328.891.700	311.991.700	0	0	0	311.991.700	(16.900.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	78.674.800	0	0	0	78.674.800	59.562.300	0	0	0	59.562.300	(19.112.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72.970.000	0	0	0	72.970.000	75.182.500	0	0	0	75.182.500	2.212.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.635.000	0	0	0	41.635.000	41.635.000	0	0	0	41.635.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	135.611.900	0	0	0	135.611.900	135.611.900	0	0	0	135.611.900	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	428.400.000	0	0	0	428.400.000	403.915.000	0	0	0	403.915.000	(24.485.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	101.900.000	0	0	0	101.900.000	77.415.000	0	0	0	77.415.000	(24.485.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61.950.000	0	0	0	61.950.000	61.950.000	0	0	0	61.950.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.450.000	0	0	0	47.450.000	47.450.000	0	0	0	47.450.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	217.100.000	0	0	0	217.100.000	217.100.000	0	0	0	217.100.000	0
5 02	KEUANGAN	32.601.309.202	1.454.163.600	25.000.000.000	164.652.998.100	223.708.470.902	32.877.408.846	1.935.585.200	23.387.342.907	165.704.127.400	223.904.464.353	195.993.451
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.576.265.632	1.254.710.900	0	0	14.830.976.532	13.394.004.043	1.600.749.100	0	0	14.994.753.143	163.776.611
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.733.839.532	1.254.710.900	0	0	10.988.550.432	10.210.137.743	1.600.749.100	0	0	11.810.886.843	822.336.411
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.345.000	0	0	0	30.345.000	30.345.000	0	0	0	30.345.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.545.000	0	0	0	28.545.000	28.545.000	0	0	0	28.545.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.477.504.202	0	0	0	6.477.504.202	6.477.847.963	0	0	0	6.477.847.963	343.761
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.440.650.202	0	0	0	6.440.650.202	6.440.993.963	0	0	0	6.440.993.963	343.761
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.809.000	0	0	0	3.809.000	3.809.000	0	0	0	3.809.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.045.000	0	0	0	33.045.000	33.045.000	0	0	0	33.045.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.094.450	0	0	0	54.094.450	54.094.450	0	0	0	54.094.450	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.094.450	0	0	0	54.094.450	54.094.450	0	0	0	54.094.450	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.983.799.440	434.962.900	0	0	2.418.762.340	2.417.180.640	463.932.900	0	0	2.881.113.540	462.351.200
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.493.340	0	0	0	129.493.340	124.993.340	0	0	0	124.993.340	(4.500.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	398.716.700	434.962.900	0	0	833.679.600	438.298.900	463.932.900	0	0	902.231.800	68.552.200
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.028.600	0	0	0	10.028.600	10.028.600	0	0	0	10.028.600	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.266.200	0	0	0	261.266.200	235.757.200	0	0	0	235.757.200	(25.509.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.810.000	0	0	0	99.810.000	101.068.600	0	0	0	101.068.600	1.258.600
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	49.409.600	0	0	0	49.409.600	6.191.000	0	0	0	6.191.000	(43.218.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.974.000	0	0	0	29.974.000	53.853.000	0	0	0	53.853.000	23.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.005.101.000	0	0	0	1.005.101.000	1.446.990.000	0	0	0	1.446.990.000	441.889.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	819.748.000	0	0	819.748.000	0	937.416.200	0	0	937.416.200	117.668.200
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	819.748.000	0	0	819.748.000	0	937.416.200	0	0	937.416.200	117.668.200
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.653.040	0	0	0	822.653.040	836.823.040	0	0	0	836.823.040	14.170.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.700.000	0	0	0	8.700.000	8.120.000	0	0	0	8.120.000	(580.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.330.000	0	0	0	344.330.000	365.080.000	0	0	0	365.080.000	20.750.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.623.040	0	0	0	469.623.040	463.623.040	0	0	0	463.623.040	(6.000.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.443.400	0	0	0	365.443.400	393.846.650	199.400.000	0	0	593.246.650	227.803.250
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.007.900	0	0	0	78.007.900	84.209.150	0	0	0	84.209.150	6.201.250
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.470.000	0	0	0	37.470.000	60.620.000	0	0	0	60.620.000	23.150.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.965.500	0	0	0	249.965.500	249.017.500	199.400.000	0	0	448.417.500	198.452.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.733.306.600	0	0	0	2.733.306.600	2.224.596.800	0	0	0	2.224.596.800	(508.709.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.475.842.600	0	0	0	1.475.842.600	1.157.438.600	0	0	0	1.157.438.600	(318.404.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.000.000	0	0	0	72.000.000	66.660.000	0	0	0	66.660.000	(5.340.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.800.000	0	0	0	69.800.000	58.500.000	0	0	0	58.500.000	(11.300.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.020.000	0	0	0	9.020.000	9.020.000	0	0	0	9.020.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8.980.000	0	0	0	8.980.000	8.980.000	0	0	0	8.980.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.230.000	0	0	0	36.230.000	36.230.000	0	0	0	36.230.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.270.000	0	0	0	36.270.000	36.270.000	0	0	0	36.270.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	836.332.600	0	0	0	836.332.600	442.332.600	0	0	0	442.332.600	(394.000.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.510.100	0	0	0	140.510.100	140.510.100	0	0	0	140.510.100	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	266.699.900	0	0	0	266.699.900	358.935.900	0	0	0	358.935.900	92.236.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	719.464.000	0	0	0	719.464.000	699.464.000	0	0	0	699.464.000	(20.000.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	78.420.000	0	0	0	78.420.000	78.020.000	0	0	0	78.020.000	(400.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43.212.000	0	0	0	43.212.000	43.212.000	0	0	0	43.212.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.100.000	0	0	0	15.100.000	15.100.000	0	0	0	15.100.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	147.040.000	0	0	0	147.040.000	43.440.000	0	0	0	43.440.000	(103.600.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.100.000	0	0	0	10.100.000	35.100.000	0	0	0	35.100.000	25.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	81.152.000	0	0	0	81.152.000	81.152.000	0	0	0	81.152.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	127.560.000	0	0	0	127.560.000	156.560.000	0	0	0	156.560.000	29.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	216.880.000	0	0	0	216.880.000	246.880.000	0	0	0	246.880.000	30.000.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	538.000.000	0	0	0	538.000.000	367.694.200	0	0	0	367.694.200	(170.305.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	47.090.000	0	0	0	47.090.000	52.250.000	0	0	0	52.250.000	5.160.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	32.290.000	0	0	0	32.290.000	38.750.000	0	0	0	38.750.000	6.460.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	121.610.000	0	0	0	121.610.000	22.823.600	0	0	0	22.823.600	(98.786.400)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	196.250.000	0	0	0	196.250.000	37.050.000	0	0	0	37.050.000	(159.200.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	59.580.000	0	0	0	59.580.000	60.345.600	0	0	0	60.345.600	765.600
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	27.220.000	0	0	0	27.220.000	61.050.000	0	0	0	61.050.000	33.830.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	27.220.000	0	0	0	27.220.000	62.300.000	0	0	0	62.300.000	35.080.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.740.000	0	0	0	26.740.000	33.125.000	0	0	0	33.125.000	6.385.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.109.119.500	0	0	0	1.109.119.500	959.269.500	0	0	0	959.269.500	(149.850.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.109.119.500	0	0	0	1.109.119.500	959.269.500	0	0	0	959.269.500	(149.850.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	286.781.000	0	0	0	286.781.000	241.375.000	0	0	0	241.375.000	(45.406.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.630.000	0	0	0	6.630.000	0	0	0	0	0	(6.630.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.592.900	0	0	0	105.592.900	25.893.900	0	0	0	25.893.900	(79.699.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	179.085.000	0	0	0	179.085.000	59.380.000	0	0	0	59.380.000	(119.705.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	12.697.900	0	0	0	12.697.900	1.722.900	0	0	0	1.722.900	(10.975.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	34.032.000	0	0	0	34.032.000	34.507.000	0	0	0	34.507.000	475.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	112.185.900	0	0	0	112.185.900	112.185.900	0	0	0	112.185.900	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	262.351.400	0	0	0	262.351.400	277.581.400	0	0	0	277.581.400	15.230.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.781.400	0	0	0	35.781.400	35.781.400	0	0	0	35.781.400	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.780.000	0	0	0	15.780.000	15.780.000	0	0	0	15.780.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58.202.000	0	0	0	58.202.000	155.062.000	0	0	0	155.062.000	96.860.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	7.782.683.508	0	25.000.000.000	164.652.998.100	197.435.681.608	7.782.683.508	0	23.387.342.907	165.704.127.400	196.874.153.815	(561.527.793)
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.782.683.508	0	25.000.000.000	164.652.998.100	197.435.681.608	7.782.683.508	0	23.387.342.907	165.704.127.400	196.874.153.815	(561.527.793)
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.782.683.508	0	25.000.000.000	164.652.998.100	197.435.681.608	7.782.683.508	0	23.387.342.907	165.704.127.400	196.874.153.815	(561.527.793)
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.782.683.508	0	0	0	7.782.683.508	7.782.683.508	0	0	0	7.782.683.508	0
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	162.250.951.600	162.250.951.600	0	0	0	162.911.580.900	162.911.580.900	660.629.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000	0	0	23.387.342.907	0	23.387.342.907	(1.612.657.093)
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	2.402.046.500	2.402.046.500	0	0	0	2.792.546.500	2.792.546.500	390.500.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	11.242.360.062	199.452.700	0	0	11.441.812.762	11.700.721.295	334.836.100	0	0	12.035.557.395	593.744.633
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.711.454.830	199.452.700	0	0	8.910.907.530	9.245.909.330	334.836.100	0	0	9.580.745.430	669.837.900

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400	0	0	0	13.015.400	13.015.400	0	0	0	13.015.400	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400	0	0	0	5.015.400	5.015.400	0	0	0	5.015.400	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.878.430	0	0	0	5.822.878.430	5.673.142.530	0	0	0	5.673.142.530	(149.735.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530	0	0	0	5.581.467.530	5.578.342.530	0	0	0	5.578.342.530	(3.125.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.810.900	0	0	0	235.810.900	89.200.000	0	0	0	89.200.000	(146.610.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.097.778.000	0	0	0	2.097.778.000	2.572.856.200	0	0	0	2.572.856.200	475.078.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000	0	0	0	67.301.000	79.901.000	0	0	0	79.901.000	12.600.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.000	0	0	0	303.694.000	343.894.000	0	0	0	343.894.000	40.200.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500	0	0	0	119.111.500	119.111.500	0	0	0	119.111.500	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.355.600	0	0	0	571.355.600	600.588.800	0	0	0	600.588.800	29.233.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6.140.900	0	0	0	6.140.900	6.140.900	0	0	0	6.140.900	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000	0	0	0	5.500.000	7.150.000	0	0	0	7.150.000	1.650.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.024.675.000	0	0	0	1.024.675.000	1.416.070.000	0	0	0	1.416.070.000	391.395.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000	199.452.700	0	0	199.652.700	200.000	334.836.100	0	0	335.036.100	135.383.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	46.278.200	0	0	46.278.200	0	125.235.000	0	0	125.235.000	78.956.800
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000	153.174.500	0	0	153.374.500	200.000	209.601.100	0	0	209.801.100	56.426.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.306.000	0	0	0	455.306.000	811.820.000	0	0	0	811.820.000	356.514.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.506.000	0	0	0	416.506.000	768.020.000	0	0	0	768.020.000	351.514.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.800.000	0	0	0	38.800.000	43.800.000	0	0	0	43.800.000	5.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.277.000	0	0	0	322.277.000	174.875.200	0	0	0	174.875.200	(147.401.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.387.000	0	0	0	67.387.000	101.089.200	0	0	0	101.089.200	33.702.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000	0	0	0	54.970.000	54.970.000	0	0	0	54.970.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	0	0	0	199.920.000	18.816.000	0	0	0	18.816.000	(181.104.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.530.905.232	0	0	0	2.530.905.232	2.454.811.965	0	0	0	2.454.811.965	(76.093.267)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.530.905.232	0	0	0	2.530.905.232	2.454.811.965	0	0	0	2.454.811.965	(76.093.267)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	208.324.900	0	0	0	208.324.900	284.054.900	0	0	0	284.054.900	75.730.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.999.800	0	0	0	74.999.800	109.799.800	0	0	0	109.799.800	34.800.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	294.816.600	0	0	0	294.816.600	146.925.000	0	0	0	146.925.000	(147.891.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	713.360.204	0	0	0	713.360.204	810.948.537	0	0	0	810.948.537	97.588.333

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728	0	0	0	389.933.728	389.933.728	0	0	0	389.933.728	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000	0	0	0	267.295.000	267.295.000	0	0	0	267.295.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000	0	0	0	38.500.000	38.500.000	0	0	0	38.500.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	186.000.000	0	0	0	186.000.000	186.000.000	0	0	0	186.000.000	0
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	357.675.000	0	0	0	357.675.000	221.355.000	0	0	0	221.355.000	(136.320.000)
5 03	KEPEGAWAIAN	9.310.273.167	130.672.200	0	0	9.440.945.367	9.166.249.022	273.314.000	0	0	9.439.563.022	(1.382.345)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.310.273.167	130.672.200	0	0	9.440.945.367	9.166.249.022	273.314.000	0	0	9.439.563.022	(1.382.345)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.761.304.567	130.672.200	0	0	5.891.976.767	6.373.596.622	273.314.000	0	0	6.646.910.622	754.933.855
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.769.100	0	0	0	47.769.100	58.830.800	0	0	0	58.830.800	11.061.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.943.200	0	0	0	6.943.200	7.743.200	0	0	0	7.743.200	800.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.650.000	0	0	0	2.650.000	4.650.000	0	0	0	4.650.000	2.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.175.900	0	0	0	38.175.900	46.437.600	0	0	0	46.437.600	8.261.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.801.380.397	0	0	0	3.801.380.397	3.803.359.592	0	0	0	3.803.359.592	1.979.195
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.827.097	0	0	0	3.768.827.097	3.768.827.192	0	0	0	3.768.827.192	95
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.299.800	0	0	0	4.299.800	2.749.900	0	0	0	2.749.900	(1.549.900)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.703.500	0	0	0	23.703.500	25.868.500	0	0	0	25.868.500	2.165.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.550.000	0	0	0	4.550.000	5.914.000	0	0	0	5.914.000	1.364.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.675.000	0	0	0	65.675.000	65.675.000	0	0	0	65.675.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.675.000	0	0	0	65.675.000	65.675.000	0	0	0	65.675.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.943.645	130.672.200	0	0	1.322.615.845	1.699.287.505	273.314.000	0	0	1.972.601.505	649.985.660
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.501.445	0	0	0	35.501.445	57.349.950	0	0	0	57.349.950	21.848.505
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.770.000	130.672.200	0	0	248.442.200	157.095.355	273.314.000	0	0	430.409.355	181.967.155
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.310.200	0	0	0	29.310.200	29.310.200	0	0	0	29.310.200	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.450.000	0	0	0	117.450.000	97.950.000	0	0	0	97.950.000	(19.500.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.150.000	0	0	0	27.150.000	39.150.000	0	0	0	39.150.000	12.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864.762.000	0	0	0	864.762.000	1.318.432.000	0	0	0	1.318.432.000	453.670.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.628.800	0	0	0	451.628.800	438.100.000	0	0	0	438.100.000	(13.528.800)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.428.800	0	0	0	192.428.800	164.200.000	0	0	0	164.200.000	(28.228.800)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.200.000	0	0	0	259.200.000	273.900.000	0	0	0	273.900.000	14.700.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.907.625	0	0	0	202.907.625	308.343.725	0	0	0	308.343.725	105.436.100
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.919.500	0	0	0	33.919.500	41.595.000	0	0	0	41.595.000	7.675.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.850.000	0	0	0	63.850.000	111.410.000	0	0	0	111.410.000	47.560.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.138.125	0	0	0	105.138.125	155.338.725	0	0	0	155.338.725	50.200.600
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.548.968.600	0	0	0	3.548.968.600	2.792.652.400	0	0	0	2.792.652.400	(756.316.200)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	927.729.000	0	0	0	927.729.000	886.401.800	0	0	0	886.401.800	(41.327.200)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.300.000	0	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	743.715.000	0	0	0	743.715.000	741.209.800	0	0	0	741.209.800	(2.505.200)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	52.232.000	0	0	0	52.232.000	52.232.000	0	0	0	52.232.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.282.000	0	0	0	20.282.000	15.060.000	0	0	0	15.060.000	(5.222.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.700.000	0	0	0	82.700.000	52.700.000	0	0	0	52.700.000	(30.000.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.500.000	0	0	0	25.500.000	21.900.000	0	0	0	21.900.000	(3.600.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	574.261.700	0	0	0	574.261.700	569.066.700	0	0	0	569.066.700	(5.195.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	3.580.000	0	0	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0	3.580.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	129.999.800	0	0	0	129.999.800	126.399.800	0	0	0	126.399.800	(3.600.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	440.681.900	0	0	0	440.681.900	439.086.900	0	0	0	439.086.900	(1.595.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.706.262.900	0	0	0	1.706.262.900	991.246.900	0	0	0	991.246.900	(715.016.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	82.775.000	0	0	0	82.775.000	58.775.000	0	0	0	58.775.000	(24.000.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.900.000	0	0	0	100.900.000	100.900.000	0	0	0	100.900.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.503.888.000	0	0	0	1.503.888.000	812.872.000	0	0	0	812.872.000	(691.016.000)
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	18.699.900	0	0	0	18.699.900	18.699.900	0	0	0	18.699.900	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	340.715.000	0	0	0	340.715.000	345.937.000	0	0	0	345.937.000	5.222.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.390.000	0	0	0	172.390.000	208.612.000	0	0	0	208.612.000	36.222.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	16.075.000	0	0	0	16.075.000	16.075.000	0	0	0	16.075.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	152.250.000	0	0	0	152.250.000	121.250.000	0	0	0	121.250.000	(31.000.000)
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	889.815.000	0	0	0	889.815.000	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000	404.014.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	889.815.000	0	0	0	889.815.000	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000	404.014.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	889.815.000	0	0	0	889.815.000	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000	404.014.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.835.000	0	0	0	172.835.000	166.385.000	0	0	0	166.385.000	(6.450.000)
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	172.835.000	0	0	0	172.835.000	166.385.000	0	0	0	166.385.000	(6.450.000)
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	451.520.000	0	0	0	451.520.000	310.905.000	0	0	0	310.905.000	(140.615.000)
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	143.135.000	0	0	0	143.135.000	121.235.000	0	0	0	121.235.000	(21.900.000)
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	308.385.000	0	0	0	308.385.000	189.670.000	0	0	0	189.670.000	(118.715.000)
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	265.460.000	0	0	0	265.460.000	786.539.000	30.000.000	0	0	816.539.000	551.079.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	176.650.000	0	0	0	176.650.000	656.559.000	30.000.000	0	0	686.559.000	509.909.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	88.810.000	0	0	0	88.810.000	129.980.000	0	0	0	129.980.000	41.170.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.042.850.522	186.646.000	0	0	14.229.496.522	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332	1.933.295.810
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	14.042.850.522	186.646.000	0	0	14.229.496.522	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332	1.933.295.810
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	14.042.850.522	186.646.000	0	0	14.229.496.522	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332	1.933.295.810

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.686.974.322	186.646.000	0	0	9.873.620.322	10.245.452.832	253.605.000	0	0	10.499.057.832	625.437.510
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.956.700	0	0	0	12.956.700	12.956.700	0	0	0	12.956.700	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.900	0	0	0	1.000.900	1.000.900	0	0	0	1.000.900	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.856.900	0	0	0	6.856.900	6.856.900	0	0	0	6.856.900	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.900	0	0	0	1.098.900	1.098.900	0	0	0	1.098.900	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.596.157.222	0	0	0	7.596.157.222	7.571.273.532	0	0	0	7.571.273.532	(24.883.690)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.594.657.222	0	0	0	7.594.657.222	7.567.273.532	0	0	0	7.567.273.532	(27.383.690)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	0	0	0	750.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.250.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000	0	0	0	750.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.250.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.726.200	0	0	0	231.726.200	219.435.400	0	0	0	219.435.400	(12.290.800)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.500.000	0	0	0	71.500.000	71.500.000	0	0	0	71.500.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.226.200	0	0	0	160.226.200	147.935.400	0	0	0	147.935.400	(12.290.800)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.069.500	0	0	0	1.403.069.500	1.984.787.800	0	0	0	1.984.787.800	581.718.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.189.800	0	0	0	29.189.800	19.189.800	0	0	0	19.189.800	(10.000.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.498.700	0	0	0	84.498.700	94.551.000	0	0	0	94.551.000	10.052.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.865.500	0	0	0	90.865.500	119.890.500	0	0	0	119.890.500	29.025.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.248.500	0	0	0	54.248.500	36.328.500	0	0	0	36.328.500	(17.920.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.750.000	0	0	0	13.750.000	26.000.000	0	0	0	26.000.000	12.250.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.130.517.000	0	0	0	1.130.517.000	1.688.828.000	0	0	0	1.688.828.000	558.311.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.395.000	186.646.000	0	0	188.041.000	1.395.000	253.605.000	0	0	255.000.000	66.959.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.395.000	186.646.000	0	0	188.041.000	1.395.000	253.605.000	0	0	255.000.000	66.959.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.924.800	0	0	0	142.924.800	162.924.800	0	0	0	162.924.800	20.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.724.800	0	0	0	99.724.800	99.724.800	0	0	0	99.724.800	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	0	0	0	43.200.000	63.200.000	0	0	0	63.200.000	20.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.744.900	0	0	0	298.744.900	292.679.600	0	0	0	292.679.600	(6.065.300)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.272.900	0	0	0	85.272.900	62.928.200	0	0	0	62.928.200	(22.344.700)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.022.000	0	0	0	126.022.000	122.818.700	0	0	0	122.818.700	(3.203.300)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.900.000	0	0	0	67.900.000	70.400.000	0	0	0	70.400.000	2.500.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.550.000	0	0	0	19.550.000	36.532.700	0	0	0	36.532.700	16.982.700
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.289.162.200	0	0	0	3.289.162.200	4.805.982.200	0	0	0	4.805.982.200	1.516.820.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.777.992.200	0	0	0	2.777.992.200	3.838.392.200	0	0	0	3.838.392.200	1.060.400.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.091.762.200	0	0	0	1.091.762.200	1.397.162.200	0	0	0	1.397.162.200	305.400.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	459.170.000	0	0	0	459.170.000	633.170.000	0	0	0	633.170.000	174.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	146.900.000	0	0	0	146.900.000	172.700.000	0	0	0	172.700.000	25.800.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	199.575.000	0	0	0	199.575.000	508.775.000	0	0	0	508.775.000	309.200.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pengawasan Desa	335.350.000	0	0	0	335.350.000	559.750.000	0	0	0	559.750.000	224.400.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	545.235.000	0	0	0	545.235.000	566.835.000	0	0	0	566.835.000	21.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	511.170.000	0	0	0	511.170.000	967.590.000	0	0	0	967.590.000	456.420.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17.625.000	0	0	0	17.625.000	21.225.000	0	0	0	21.225.000	3.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	493.545.000	0	0	0	493.545.000	946.365.000	0	0	0	946.365.000	452.820.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.066.714.000	0	0	0	1.066.714.000	857.752.300	0	0	0	857.752.300	(208.961.700)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57.812.100	0	0	0	57.812.100	57.812.100	0	0	0	57.812.100	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	56.383.600	0	0	0	56.383.600	56.383.600	0	0	0	56.383.600	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.428.500	0	0	0	1.428.500	1.428.500	0	0	0	1.428.500	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.008.901.900	0	0	0	1.008.901.900	799.940.200	0	0	0	799.940.200	(208.961.700)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	190.890.000	0	0	0	190.890.000	190.890.000	0	0	0	190.890.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	358.000.000	0	0	0	358.000.000	198.880.000	0	0	0	198.880.000	(159.120.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	410.170.200	0	0	0	410.170.200	410.170.200	0	0	0	410.170.200	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.841.700	0	0	0	49.841.700	0	0	0	0	0	(49.841.700)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	44.043.863.698	3.928.901.313	0	0	47.972.765.011	44.067.159.948	4.951.053.063	0	0	49.018.213.011	1.045.448.000
7 01	KECAMATAN	44.043.863.698	3.928.901.313	0	0	47.972.765.011	44.067.159.948	4.951.053.063	0	0	49.018.213.011	1.045.448.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Piani	2.181.659.763	111.993.100	0	0	2.293.652.863	2.249.470.863	100.493.100	0	0	2.349.963.963	56.311.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.020.769.763	111.993.100	0	0	2.132.762.863	2.072.822.763	100.493.100	0	0	2.173.315.863	40.553.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.271.688	0	0	0	1.374.271.688	1.374.271.988	0	0	0	1.374.271.988	300
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.372.958.488	0	0	0	1.372.958.488	1.372.958.788	0	0	0	1.372.958.788	300
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	689.000	0	0	0	689.000	689.000	0	0	0	689.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	624.200	0	0	0	624.200	624.200	0	0	0	624.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.826.675	0	0	0	342.826.675	365.432.375	0	0	0	365.432.375	22.605.700
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.548.375	0	0	0	4.548.375	3.360.975	0	0	0	3.360.975	(1.187.400)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.435.400	0	0	0	22.435.400	23.437.500	0	0	0	23.437.500	1.002.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.316.700	0	0	0	34.316.700	35.373.700	0	0	0	35.373.700	1.057.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.883.200	0	0	0	11.883.200	12.572.200	0	0	0	12.572.200	689.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.643.000	0	0	0	269.643.000	290.688.000	0	0	0	290.688.000	21.045.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	111.993.100	0	0	111.993.100	0	100.493.100	0	0	100.493.100	(11.500.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	85.193.100	0	0	85.193.100	0	85.193.100	0	0	85.193.100	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	26.800.000	0	0	26.800.000	0	15.300.000	0	0	15.300.000	(11.500.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.740.000	0	0	0	61.740.000	75.840.000	0	0	0	75.840.000	14.100.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	0	0	0	1.740.000	1.740.000	0	0	0	1.740.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	0	0	0	16.800.000	10.200.000	0	0	0	10.200.000	(6.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	0	0	0	43.200.000	63.900.000	0	0	0	63.900.000	20.700.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.331.400	0	0	0	239.331.400	254.678.400	0	0	0	254.678.400	15.347.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.264.400	0	0	0	53.264.400	60.289.400	0	0	0	60.289.400	7.025.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000	0	0	0	5.520.000	12.520.000	0	0	0	12.520.000	7.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.547.000	0	0	0	180.547.000	181.869.000	0	0	0	181.869.000	1.322.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.200.000	0	0	0	43.200.000	69.700.000	0	0	0	69.700.000	26.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.200.000	0	0	0	43.200.000	69.700.000	0	0	0	69.700.000	26.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	43.200.000	0	0	0	43.200.000	69.700.000	0	0	0	69.700.000	26.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.740.000	0	0	0	33.740.000	36.340.100	0	0	0	36.340.100	2.600.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.740.000	0	0	0	33.740.000	36.340.100	0	0	0	36.340.100	2.600.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750.000	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.990.000	0	0	0	29.990.000	32.590.100	0	0	0	32.590.100	2.600.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.250.000	0	0	0	12.250.000	1.908.000	0	0	0	1.908.000	(10.342.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.250.000	0	0	0	12.250.000	1.908.000	0	0	0	1.908.000	(10.342.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.250.000	0	0	0	12.250.000	1.908.000	0	0	0	1.908.000	(10.342.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.700.000	0	0	0	71.700.000	68.700.000	0	0	0	68.700.000	(3.000.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.700.000	0	0	0	71.700.000	68.700.000	0	0	0	68.700.000	(3.000.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39.750.000	0	0	0	39.750.000	36.750.000	0	0	0	36.750.000	(3.000.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.300.000	0	0	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	4.300.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.300.000	0	0	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	4.300.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.550.000	0	0	0	3.550.000	3.550.000	0	0	0	3.550.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.400.000	0	0	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tapin Selatan	4.966.807.886	479.804.200	0	0	5.446.612.086	5.091.591.636	458.770.450	0	0	5.550.362.086	103.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.658.108.086	124.804.200	0	0	4.782.912.286	4.752.151.836	103.770.450	0	0	4.855.922.286	73.010.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.894.500	0	0	0	5.894.500	5.894.500	0	0	0	5.894.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.894.500	0	0	0	5.894.500	5.894.500	0	0	0	5.894.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.372.016	0	0	0	2.829.372.016	2.824.529.366	0	0	0	2.824.529.366	(4.842.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.207.016	0	0	0	2.825.207.016	2.820.364.366	0	0	0	2.820.364.366	(4.842.650)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.365.000	0	0	0	2.365.000	2.365.000	0	0	0	2.365.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.671.900	0	0	0	347.671.900	387.200.800	28.163.750	0	0	415.364.550	67.692.650
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.337.700	0	0	0	2.337.700	6.386.200	0	0	0	6.386.200	4.048.500
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.586.900	0	0	0	15.586.900	18.362.900	28.163.750	0	0	46.526.650	30.939.750
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.714.200	0	0	0	38.714.200	41.754.200	0	0	0	41.754.200	3.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.151.100	0	0	0	7.151.100	7.565.500	0	0	0	7.565.500	414.400
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.882.000	0	0	0	283.882.000	313.132.000	0	0	0	313.132.000	29.250.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	124.804.200	0	0	124.804.200	0	75.606.700	0	0	75.606.700	(49.197.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	124.804.200	0	0	124.804.200	0	75.606.700	0	0	75.606.700	(49.197.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.447.000	0	0	0	144.447.000	197.866.800	0	0	0	197.866.800	53.419.800
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.914.000	0	0	0	1.914.000	1.914.000	0	0	0	1.914.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.133.000	0	0	0	26.133.000	30.100.200	0	0	0	30.100.200	3.967.200
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.400.000	0	0	0	116.400.000	165.852.600	0	0	0	165.852.600	49.452.600
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.330.722.670	0	0	0	1.330.722.670	1.336.660.370	0	0	0	1.336.660.370	5.937.700
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.979.000	0	0	0	37.979.000	43.916.700	0	0	0	43.916.700	5.937.700
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.288.643.670	0	0	0	1.288.643.670	1.288.643.670	0	0	0	1.288.643.670	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.800.000	0	0	0	28.800.000	65.550.000	0	0	0	65.550.000	36.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28.800.000	0	0	0	28.800.000	65.550.000	0	0	0	65.550.000	36.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	28.800.000	0	0	0	28.800.000	65.550.000	0	0	0	65.550.000	36.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	238.049.800	355.000.000	0	0	593.049.800	243.939.700	355.000.000	0	0	598.939.700	5.889.900
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.549.800	0	0	0	47.549.800	55.539.700	0	0	0	55.539.700	7.989.900
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.150.000	0	0	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	4.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.399.800	0	0	0	43.399.800	51.389.700	0	0	0	51.389.700	7.989.900
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	190.500.000	355.000.000	0	0	545.500.000	188.400.000	355.000.000	0	0	543.400.000	(2.100.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	355.000.000	0	0	355.000.000	0	355.000.000	0	0	355.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190.500.000	0	0	0	190.500.000	188.400.000	0	0	0	188.400.000	(2.100.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.030.000	0	0	0	15.030.000	3.130.100	0	0	0	3.130.100	(11.899.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.030.000	0	0	0	15.030.000	3.130.100	0	0	0	3.130.100	(11.899.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.030.000	0	0	0	15.030.000	3.130.100	0	0	0	3.130.100	(11.899.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.820.000	0	0	0	26.820.000	26.820.000	0	0	0	26.820.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.820.000	0	0	0	26.820.000	26.820.000	0	0	0	26.820.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.990.000	0	0	0	3.990.000	3.990.000	0	0	0	3.990.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.980.000	0	0	0	4.980.000	4.980.000	0	0	0	4.980.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.650.000	0	0	0	3.650.000	3.650.000	0	0	0	3.650.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.720.000	0	0	0	3.720.000	3.720.000	0	0	0	3.720.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.480.000	0	0	0	10.480.000	10.480.000	0	0	0	10.480.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Binuang	6.187.780.349	328.114.900	0	0	6.515.895.249	5.335.545.749	1.281.542.300	0	0	6.617.088.049	101.192.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.413.789.949	131.974.900	0	0	4.545.764.849	4.430.905.749	133.963.100	0	0	4.564.868.849	19.104.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	0	0	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	4.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.150.000	0	0	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	4.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.699.140.629	0	0	0	3.699.140.629	3.701.540.729	0	0	0	3.701.540.729	2.400.100
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.696.140.629	0	0	0	3.696.140.629	3.696.140.729	0	0	0	3.696.140.729	100
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	0	0	0	1.650.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	1.050.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	1.350.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.211.600	0	0	0	503.211.600	507.279.700	0	0	0	507.279.700	4.068.100
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.585.600	0	0	0	4.585.600	5.355.600	0	0	0	5.355.600	770.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.546.700	0	0	0	26.546.700	26.546.700	0	0	0	26.546.700	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.444.000	0	0	0	68.444.000	65.629.000	0	0	0	65.629.000	(2.815.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.124.300	0	0	0	10.124.300	13.647.400	0	0	0	13.647.400	3.523.100
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.511.000	0	0	0	393.511.000	396.101.000	0	0	0	396.101.000	2.590.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.129.920	131.974.900	0	0	148.104.820	16.594.920	133.963.100	0	0	150.558.020	2.453.200
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.285.000	95.285.100	0	0	96.570.100	0	114.963.100	0	0	114.963.100	18.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	36.689.800	0	0	36.689.800	1.750.000	19.000.000	0	0	20.750.000	(15.939.800)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.844.920	0	0	0	14.844.920	14.844.920	0	0	0	14.844.920	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.700.800	0	0	0	113.700.800	114.930.600	0	0	0	114.930.600	1.229.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.200.800	0	0	0	53.200.800	35.830.600	0	0	0	35.830.600	(17.370.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	0	0	0	57.600.000	76.200.000	0	0	0	76.200.000	18.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.457.000	0	0	0	77.457.000	86.409.800	0	0	0	86.409.800	8.952.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.481.300	0	0	0	68.481.300	77.434.100	0	0	0	77.434.100	8.952.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.975.000	0	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.700	0	0	0	6.000.700	6.000.700	0	0	0	6.000.700	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	0	0	0	36.000.000	77.192.800	0	0	0	77.192.800	41.192.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	77.192.800	0	0	0	77.192.800	41.192.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	77.192.800	0	0	0	77.192.800	41.192.800
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.691.731.900	196.140.000	0	0	1.887.871.900	782.332.700	1.147.579.200	0	0	1.929.911.900	42.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.422.700	0	0	0	38.422.700	66.922.700	0	0	0	66.922.700	28.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.150.000	0	0	0	2.150.000	2.150.000	0	0	0	2.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.272.700	0	0	0	36.272.700	64.772.700	0	0	0	64.772.700	28.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.653.309.200	196.140.000	0	0	1.849.449.200	715.410.000	1.147.579.200	0	0	1.862.989.200	13.540.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	986.109.200	196.140.000	0	0	1.182.249.200	11.210.000	1.147.579.200	0	0	1.158.789.200	(23.460.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	667.200.000	0	0	0	667.200.000	704.200.000	0	0	0	704.200.000	37.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.569.000	0	0	0	25.569.000	24.425.000	0	0	0	24.425.000	(1.144.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.569.000	0	0	0	25.569.000	24.425.000	0	0	0	24.425.000	(1.144.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.569.000	0	0	0	25.569.000	24.425.000	0	0	0	24.425.000	(1.144.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.689.500	0	0	0	20.689.500	20.689.500	0	0	0	20.689.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.689.500	0	0	0	20.689.500	20.689.500	0	0	0	20.689.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.970.000	0	0	0	1.970.000	1.970.000	0	0	0	1.970.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.985.000	0	0	0	1.985.000	1.985.000	0	0	0	1.985.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.734.500	0	0	0	2.734.500	2.734.500	0	0	0	2.734.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungur	2.854.883.205	166.480.200	0	0	3.021.363.405	2.922.733.605	160.129.800	0	0	3.082.863.405	61.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.708.925.905	166.480.200	0	0	2.875.406.105	2.758.896.305	160.129.800	0	0	2.919.026.105	43.620.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.080.000	0	0	0	5.080.000	5.080.000	0	0	0	5.080.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.080.000	0	0	0	5.080.000	5.080.000	0	0	0	5.080.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.857.327.145	0	0	0	1.857.327.145	1.857.327.145	0	0	0	1.857.327.145	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.854.102.145	0	0	0	1.854.102.145	1.854.102.145	0	0	0	1.854.102.145	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.848.500	0	0	0	1.848.500	1.848.500	0	0	0	1.848.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.376.500	0	0	0	1.376.500	1.376.500	0	0	0	1.376.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.225.000	0	0	0	363.225.000	385.199.300	0	0	0	385.199.300	21.974.300
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.675.600	0	0	0	5.675.600	13.124.800	0	0	0	13.124.800	7.449.200
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.196.900	0	0	0	20.196.900	20.434.900	0	0	0	20.434.900	238.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.694.700	0	0	0	48.694.700	52.274.700	0	0	0	52.274.700	3.580.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.343.800	0	0	0	9.343.800	10.866.900	0	0	0	10.866.900	1.523.100
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.314.000	0	0	0	279.314.000	288.498.000	0	0	0	288.498.000	9.184.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	166.480.200	0	0	166.480.200	0	160.129.800	0	0	160.129.800	(6.350.400)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	81.890.600	0	0	81.890.600	0	75.954.500	0	0	75.954.500	(5.936.100)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	84.589.600	0	0	84.589.600	0	84.175.300	0	0	84.175.300	(414.300)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.760.860	0	0	0	66.760.860	90.740.160	0	0	0	90.740.160	23.979.300
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.480.860	0	0	0	34.480.860	34.480.860	0	0	0	34.480.860	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	0	0	0	28.800.000	52.779.300	0	0	0	52.779.300	23.979.300
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.532.900	0	0	0	416.532.900	420.549.700	0	0	0	420.549.700	4.016.800
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.916.900	0	0	0	25.916.900	26.933.700	0	0	0	26.933.700	1.016.800
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	0	0	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	384.616.000	0	0	0	384.616.000	384.616.000	0	0	0	384.616.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.600.000	0	0	0	39.600.000	72.600.000	0	0	0	72.600.000	33.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.600.000	0	0	0	39.600.000	72.600.000	0	0	0	72.600.000	33.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	39.600.000	0	0	0	39.600.000	72.600.000	0	0	0	72.600.000	33.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.749.900	0	0	0	41.749.900	46.549.900	0	0	0	46.549.900	4.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.749.900	0	0	0	41.749.900	46.549.900	0	0	0	46.549.900	4.800.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.149.900	0	0	0	38.149.900	42.949.900	0	0	0	42.949.900	4.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.920.000	0	0	0	19.920.000	0	0	0	0	0	(19.920.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.920.000	0	0	0	19.920.000	0	0	0	0	0	(19.920.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.920.000	0	0	0	19.920.000	0	0	0	0	0	(19.920.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.687.400	0	0	0	44.687.400	44.687.400	0	0	0	44.687.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.687.400	0	0	0	44.687.400	44.687.400	0	0	0	44.687.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.275.000	0	0	0	4.275.000	4.275.000	0	0	0	4.275.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.290.000	0	0	0	4.290.000	4.290.000	0	0	0	4.290.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.900.000	0	0	0	6.900.000	6.900.000	0	0	0	6.900.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.292.400	0	0	0	4.292.400	4.292.400	0	0	0	4.292.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.290.000	0	0	0	4.290.000	4.290.000	0	0	0	4.290.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	0	0	0	4.850.000	4.850.000	0	0	0	4.850.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.140.000	0	0	0	5.140.000	5.140.000	0	0	0	5.140.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.650.000	0	0	0	10.650.000	10.650.000	0	0	0	10.650.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tapin Utara	6.602.609.891	1.520.572.613	0	0	8.123.182.504	6.761.618.291	1.497.866.313	0	0	8.259.484.604	136.302.100
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.453.817.291	46.535.100	0	0	5.500.352.391	5.495.523.591	43.828.800	0	0	5.539.352.391	39.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.445.000	0	0	0	6.445.000	6.445.000	0	0	0	6.445.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.445.000	0	0	0	6.445.000	6.445.000	0	0	0	6.445.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.967.035.991	0	0	0	4.967.035.991	4.967.035.991	0	0	0	4.967.035.991	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.485.991	0	0	0	4.964.485.991	4.964.485.991	0	0	0	4.964.485.991	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.275.000	0	0	0	1.275.000	1.275.000	0	0	0	1.275.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.275.000	0	0	0	1.275.000	1.275.000	0	0	0	1.275.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.725.700	0	0	0	293.725.700	329.363.800	0	0	0	329.363.800	35.638.100
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.469.100	0	0	0	3.469.100	3.469.100	0	0	0	3.469.100	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.621.400	0	0	0	16.621.400	19.321.400	0	0	0	19.321.400	2.700.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.345.000	0	0	0	29.345.000	27.600.000	0	0	0	27.600.000	(1.745.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.565.300	0	0	0	8.565.300	9.505.500	0	0	0	9.505.500	940.200

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6.236.900	0	0	0	6.236.900	5.619.800	0	0	0	5.619.800	(617.100)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.488.000	0	0	0	229.488.000	263.848.000	0	0	0	263.848.000	34.360.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	46.535.100	0	0	46.535.100	0	43.828.800	0	0	43.828.800	(2.706.300)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	46.535.100	0	0	46.535.100	0	43.828.800	0	0	43.828.800	(2.706.300)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.122.100	0	0	0	83.122.100	85.622.100	0	0	0	85.622.100	2.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.116.900	0	0	0	31.116.900	31.116.900	0	0	0	31.116.900	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.005.200	0	0	0	52.005.200	54.505.200	0	0	0	54.505.200	2.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.488.500	0	0	0	103.488.500	107.056.700	0	0	0	107.056.700	3.568.200
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.528.500	0	0	0	17.528.500	21.096.700	0	0	0	21.096.700	3.568.200
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.040.000	0	0	0	6.040.000	6.040.000	0	0	0	6.040.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.920.000	0	0	0	79.920.000	79.920.000	0	0	0	79.920.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.600.000	0	0	0	39.600.000	105.902.100	0	0	0	105.902.100	66.302.100
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.600.000	0	0	0	39.600.000	105.902.100	0	0	0	105.902.100	66.302.100
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.600.000	0	0	0	39.600.000	105.902.100	0	0	0	105.902.100	66.302.100
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.078.712.600	1.474.037.513	0	0	2.552.750.113	1.135.112.600	1.454.037.513	0	0	2.589.150.113	36.400.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.545.000	0	0	0	40.545.000	53.745.000	0	0	0	53.745.000	13.200.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.900.000	0	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.645.000	0	0	0	36.645.000	49.845.000	0	0	0	49.845.000	13.200.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.038.167.600	1.474.037.513	0	0	2.512.205.113	1.081.367.600	1.454.037.513	0	0	2.535.405.113	23.200.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.215.600	0	0	0	1.215.600	1.215.600	0	0	0	1.215.600	0
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	49.667.900	1.474.037.513	0	0	1.523.705.413	49.667.900	1.454.037.513	0	0	1.503.705.413	(20.000.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	984.084.100	0	0	0	984.084.100	1.028.084.100	0	0	0	1.028.084.100	44.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	3.200.000	0	0	0	3.200.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.480.000	0	0	0	30.480.000	25.080.000	0	0	0	25.080.000	(5.400.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.480.000	0	0	0	30.480.000	25.080.000	0	0	0	25.080.000	(5.400.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.180.000	0	0	0	3.180.000	2.380.000	0	0	0	2.380.000	(800.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	0	0	0	11.400.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	(600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bakarangan	2.910.395.166	100.097.000	0	0	3.010.492.166	3.044.306.966	133.135.200	0	0	3.177.442.166	166.950.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.790.890.466	100.097.000	0	0	2.890.987.466	2.911.044.766	133.135.200	0	0	3.044.179.966	153.192.500
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.260.000	0	0	0	29.260.000	29.420.000	0	0	0	29.420.000	160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.260.000	0	0	0	29.260.000	29.420.000	0	0	0	29.420.000	160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.115.666	0	0	0	1.909.115.666	1.909.534.766	0	0	0	1.909.534.766	419.100
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.715.666	0	0	0	1.905.715.666	1.906.134.766	0	0	0	1.906.134.766	419.100
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.525.000	0	0	0	2.525.000	2.525.000	0	0	0	2.525.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	875.000	0	0	0	875.000	875.000	0	0	0	875.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.471.800	9.586.000	0	0	299.057.800	394.770.600	24.444.300	0	0	419.214.900	120.157.100
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.705.500	0	0	0	6.705.500	6.705.500	0	0	0	6.705.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.845.700	0	0	0	15.845.700	15.845.700	0	0	0	15.845.700	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.352.600	9.586.000	0	0	53.938.600	37.997.600	24.444.300	0	0	62.441.900	8.503.300
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.028.000	0	0	0	8.028.000	9.179.800	0	0	0	9.179.800	1.151.800
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.540.000	0	0	0	214.540.000	325.042.000	0	0	0	325.042.000	110.502.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	90.511.000	0	0	90.511.000	0	108.690.900	0	0	108.690.900	18.179.900
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	17.464.700	0	0	17.464.700	0	15.644.600	0	0	15.644.600	(1.820.100)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	73.046.300	0	0	73.046.300	0	93.046.300	0	0	93.046.300	20.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.861.200	0	0	0	56.861.200	78.227.900	0	0	0	78.227.900	21.366.700
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.660.800	0	0	0	5.660.800	2.320.000	0	0	0	2.320.000	(3.340.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.400.400	0	0	0	22.400.400	25.400.400	0	0	0	25.400.400	3.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	0	0	0	28.800.000	50.507.500	0	0	0	50.507.500	21.707.500
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.181.800	0	0	0	506.181.800	499.091.500	0	0	0	499.091.500	(7.090.300)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.839.800	0	0	0	38.839.800	43.523.500	0	0	0	43.523.500	4.683.700
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	0	0	0	6.210.000	10.900.000	0	0	0	10.900.000	4.690.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	461.132.000	0	0	0	461.132.000	444.668.000	0	0	0	444.668.000	(16.464.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	0	0	0	36.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	24.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	24.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	24.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.684.700	0	0	0	36.684.700	41.684.700	0	0	0	41.684.700	5.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.684.700	0	0	0	36.684.700	41.684.700	0	0	0	41.684.700	5.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.684.700	0	0	0	36.684.700	41.684.700	0	0	0	41.684.700	5.000.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.470.000	0	0	0	18.470.000	3.227.500	0	0	0	3.227.500	(15.242.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.470.000	0	0	0	18.470.000	3.227.500	0	0	0	3.227.500	(15.242.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.470.000	0	0	0	18.470.000	3.227.500	0	0	0	3.227.500	(15.242.500)
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.350.000	0	0	0	28.350.000	28.350.000	0	0	0	28.350.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.350.000	0	0	0	28.350.000	28.350.000	0	0	0	28.350.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.280.000	0	0	0	4.280.000	4.280.000	0	0	0	4.280.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.280.000	0	0	0	4.280.000	4.280.000	0	0	0	4.280.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.550.000	0	0	0	4.550.000	4.550.000	0	0	0	4.550.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.640.000	0	0	0	11.640.000	11.640.000	0	0	0	11.640.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Candi Laras Selatan	3.176.754.143	160.775.700	0	0	3.337.529.843	3.279.741.143	131.203.500	0	0	3.410.944.643	73.414.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.751.859.643	160.775.700	0	0	2.912.635.343	2.925.095.643	131.203.500	0	0	3.056.299.143	143.663.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.300	0	0	0	6.250.300	6.250.300	0	0	0	6.250.300	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.300	0	0	0	6.250.300	6.250.300	0	0	0	6.250.300	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.703.243	0	0	0	1.837.703.243	1.837.703.243	0	0	0	1.837.703.243	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.834.235.143	0	0	0	1.834.235.143	1.834.235.143	0	0	0	1.834.235.143	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.007.700	0	0	0	2.007.700	2.007.700	0	0	0	2.007.700	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.460.400	0	0	0	1.460.400	1.460.400	0	0	0	1.460.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.474.200	0	0	0	350.474.200	489.794.600	0	0	0	489.794.600	139.320.400
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.600	0	0	0	9.944.600	8.414.600	0	0	0	8.414.600	(1.530.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.975.400	0	0	0	40.975.400	40.991.800	0	0	0	40.991.800	16.400
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.299.300	0	0	0	53.299.300	54.609.300	0	0	0	54.609.300	1.310.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.142.900	0	0	0	19.142.900	21.916.900	0	0	0	21.916.900	2.774.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.612.000	0	0	0	222.612.000	359.362.000	0	0	0	359.362.000	136.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	160.775.700	0	0	160.775.700	0	131.203.500	0	0	131.203.500	(29.572.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	91.348.600	0	0	91.348.600	0	61.776.400	0	0	61.776.400	(29.572.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	69.427.100	0	0	69.427.100	0	69.427.100	0	0	69.427.100	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.873.600	0	0	0	48.873.600	65.375.200	0	0	0	65.375.200	16.501.600
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.507.600	0	0	0	6.507.600	6.809.200	0	0	0	6.809.200	301.600

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.366.000	0	0	0	18.366.000	18.366.000	0	0	0	18.366.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	0	0	0	24.000.000	40.200.000	0	0	0	40.200.000	16.200.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.558.300	0	0	0	508.558.300	525.972.300	0	0	0	525.972.300	17.414.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.238.300	0	0	0	46.238.300	70.613.100	0	0	0	70.613.100	24.374.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.320.000	0	0	0	18.320.000	11.360.000	0	0	0	11.360.000	(6.960.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	444.000.000	0	0	0	444.000.000	443.999.200	0	0	0	443.999.200	(800)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.219.200	0	0	0	37.219.200	80.634.000	0	0	0	80.634.000	43.414.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	37.219.200	0	0	0	37.219.200	80.634.000	0	0	0	80.634.000	43.414.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.219.200	0	0	0	37.219.200	80.634.000	0	0	0	80.634.000	43.414.800
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.272.600	0	0	0	98.272.600	92.022.600	0	0	0	92.022.600	(6.250.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98.272.600	0	0	0	98.272.600	92.022.600	0	0	0	92.022.600	(6.250.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.600	0	0	0	6.599.600	6.599.600	0	0	0	6.599.600	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.673.000	0	0	0	91.673.000	85.423.000	0	0	0	85.423.000	(6.250.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.707.400	0	0	0	28.707.400	4.893.600	0	0	0	4.893.600	(23.813.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.707.400	0	0	0	28.707.400	4.893.600	0	0	0	4.893.600	(23.813.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.707.400	0	0	0	28.707.400	4.893.600	0	0	0	4.893.600	(23.813.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.695.300	0	0	0	260.695.300	177.095.300	0	0	0	177.095.300	(83.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260.695.300	0	0	0	260.695.300	177.095.300	0	0	0	177.095.300	(83.600.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	0	0	0	26.476.400	26.476.400	0	0	0	26.476.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	0	0	0	12.144.800	12.144.800	0	0	0	12.144.800	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.163.200	0	0	0	24.163.200	18.663.200	0	0	0	18.663.200	(5.500.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	0	0	0	6.613.200	6.613.200	0	0	0	6.613.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	0	0	0	7.513.200	7.513.200	0	0	0	7.513.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90.600.000	0	0	0	90.600.000	49.900.000	0	0	0	49.900.000	(40.700.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.384.500	0	0	0	6.384.500	6.384.500	0	0	0	6.384.500	0
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	86.800.000	0	0	0	86.800.000	49.400.000	0	0	0	49.400.000	(37.400.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Candi Laras Utara	2.885.548.557	109.193.200	0	0	2.994.741.757	2.956.597.757	131.043.200	0	0	3.087.640.957	92.899.200

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.487.797.357	109.193.200	0	0	2.596.990.557	2.656.322.357	131.043.200	0	0	2.787.365.557	190.375.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.150.000	0	0	0	5.150.000	5.150.000	0	0	0	5.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.150.000	0	0	0	5.150.000	5.150.000	0	0	0	5.150.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.049.144.557	0	0	0	2.049.144.557	2.050.157.479	0	0	0	2.050.157.479	1.012.922
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.045.711.657	0	0	0	2.045.711.657	2.046.724.579	0	0	0	2.046.724.579	1.012.922
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.617.900	0	0	0	1.617.900	1.617.900	0	0	0	1.617.900	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.815.000	0	0	0	1.815.000	1.815.000	0	0	0	1.815.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.724.900	6.836.800	0	0	336.561.700	369.534.400	6.836.800	0	0	376.371.200	39.809.500
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.081.900	0	0	0	6.081.900	6.081.900	0	0	0	6.081.900	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.772.100	0	0	0	15.772.100	15.772.100	0	0	0	15.772.100	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.688.600	0	0	0	59.688.600	73.658.100	0	0	0	73.658.100	13.969.500
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.916.300	6.836.800	0	0	11.753.100	4.916.300	6.836.800	0	0	11.753.100	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.766.000	0	0	0	238.766.000	264.606.000	0	0	0	264.606.000	25.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	97.601.100	0	0	102.601.100	66.767.728	96.351.100	0	0	163.118.828	60.517.728
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	10.148.400	0	0	10.148.400	0	10.148.400	0	0	10.148.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	50.152.900	0	0	50.152.900	0	52.652.900	0	0	52.652.900	2.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	23.750.000	0	0	23.750.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	(3.750.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	13.549.800	0	0	18.549.800	66.767.728	13.549.800	0	0	80.317.528	61.767.728
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.254.000	0	0	0	58.254.000	102.249.700	0	0	0	102.249.700	43.995.700
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.176.000	0	0	0	4.176.000	4.176.000	0	0	0	4.176.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.078.000	0	0	0	18.078.000	27.686.400	0	0	0	27.686.400	9.608.400
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	0	0	0	36.000.000	70.387.300	0	0	0	70.387.300	34.387.300
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.523.900	4.755.300	0	0	45.279.200	62.463.050	27.855.300	0	0	90.318.350	45.039.150
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.523.900	0	0	0	34.523.900	56.463.050	0	0	0	56.463.050	21.939.150
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	4.755.300	0	0	10.755.300	6.000.000	27.855.300	0	0	33.855.300	23.100.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.092.000	0	0	0	108.092.000	176.066.200	0	0	0	176.066.200	67.974.200
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	0	0	0	28.892.000	28.892.000	0	0	0	28.892.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	0	0	0	28.892.000	28.892.000	0	0	0	28.892.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	79.200.000	0	0	0	79.200.000	147.174.200	0	0	0	147.174.200	67.974.200
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.200.000	0	0	0	79.200.000	147.174.200	0	0	0	147.174.200	67.974.200

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.788.200	0	0	0	105.788.200	66.931.500	0	0	0	66.931.500	(38.856.700)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105.788.200	0	0	0	105.788.200	66.931.500	0	0	0	66.931.500	(38.856.700)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.800	0	0	0	6.599.800	0	0	0	0	0	(6.599.800)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.188.400	0	0	0	99.188.400	66.931.500	0	0	0	66.931.500	(32.256.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.773.600	0	0	0	28.773.600	3.304.000	0	0	0	3.304.000	(25.469.600)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.773.600	0	0	0	28.773.600	3.304.000	0	0	0	3.304.000	(25.469.600)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.773.600	0	0	0	28.773.600	3.304.000	0	0	0	3.304.000	(25.469.600)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155.097.400	0	0	0	155.097.400	53.973.700	0	0	0	53.973.700	(101.123.700)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	155.097.400	0	0	0	155.097.400	53.973.700	0	0	0	53.973.700	(101.123.700)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	0	0	0	26.476.400	5.919.000	0	0	0	5.919.000	(20.557.400)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	0	0	0	12.144.800	10.872.500	0	0	0	10.872.500	(1.272.300)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.413.200	0	0	0	21.413.200	6.429.000	0	0	0	6.429.000	(14.984.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	0	0	0	6.613.200	6.613.200	0	0	0	6.613.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	0	0	0	7.513.200	7.513.200	0	0	0	7.513.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.300.000	0	0	0	29.300.000	2.288.400	0	0	0	2.288.400	(27.011.600)
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.338.400	0	0	0	5.338.400	5.338.400	0	0	0	5.338.400	0
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	46.298.200	0	0	0	46.298.200	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(37.298.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Hatungun	2.842.146.069	109.213.000	0	0	2.951.359.069	2.913.830.169	97.528.900	0	0	3.011.359.069	60.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.709.646.069	109.213.000	0	0	2.818.859.069	2.761.430.169	97.528.900	0	0	2.858.959.069	40.100.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	0	0	0	6.500.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	0	0	0	6.500.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.874.269	0	0	0	1.801.874.269	1.801.874.269	0	0	0	1.801.874.269	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.874.269	0	0	0	1.799.874.269	1.799.874.269	0	0	0	1.799.874.269	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.980.800	0	0	0	383.980.800	406.877.900	0	0	0	406.877.900	22.897.100
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.390.800	0	0	0	40.390.800	48.177.900	0	0	0	48.177.900	7.787.100
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	0	0	0	6.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.590.000	0	0	0	307.590.000	320.700.000	0	0	0	320.700.000	13.110.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	109.213.000	0	0	109.213.000	0	97.528.900	0	0	97.528.900	(11.684.100)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	109.213.000	0	0	109.213.000	0	97.528.900	0	0	97.528.900	(11.684.100)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.897.200	0	0	0	49.897.200	70.497.200	0	0	0	70.497.200	20.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.097.200	0	0	0	3.097.200	3.097.200	0	0	0	3.097.200	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	0	0	0	28.800.000	49.400.000	0	0	0	49.400.000	20.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.393.800	0	0	0	467.393.800	472.180.800	0	0	0	472.180.800	4.787.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.373.800	0	0	0	57.373.800	62.160.800	0	0	0	62.160.800	4.787.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.020.000	0	0	0	10.020.000	10.020.000	0	0	0	10.020.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000	0	0	0	36.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000	30.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000	30.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000	30.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000	0	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	0	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.500.000	0	0	0	42.500.000	47.500.000	0	0	0	47.500.000	5.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	0	0	0	25.000.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(15.100.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(15.100.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	0	0	0	25.000.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(15.100.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.000	0	0	0	26.500.000	26.500.000	0	0	0	26.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000	0	0	0	26.500.000	26.500.000	0	0	0	26.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Salam Babaris	2.917.707.041	53.346.400	0	0	2.971.053.441	2.933.436.641	97.616.800	0	0	3.031.053.441	60.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.716.913.041	53.346.400	0	0	2.770.259.441	2.760.047.141	97.616.800	0	0	2.857.663.941	87.404.500
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.300	0	0	0	10.550.300	16.550.300	0	0	0	16.550.300	6.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.050.000	0	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.960.000	0	0	0	1.960.000	1.960.000	0	0	0	1.960.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.540.300	0	0	0	6.540.300	12.540.300	0	0	0	12.540.300	6.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.413.141	0	0	0	1.845.413.141	1.845.333.141	0	0	0	1.845.333.141	(80.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.838.703.441	0	0	0	1.838.703.441	1.838.703.441	0	0	0	1.838.703.441	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.874.700	0	0	0	2.874.700	2.794.700	0	0	0	2.794.700	(80.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.835.000	0	0	0	3.835.000	3.835.000	0	0	0	3.835.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.927.200	0	0	0	363.927.200	350.880.000	0	0	0	350.880.000	(13.047.200)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.303.300	0	0	0	4.303.300	5.878.300	0	0	0	5.878.300	1.575.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.352.600	0	0	0	32.352.600	38.351.100	0	0	0	38.351.100	5.998.500
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.657.000	0	0	0	78.657.000	39.357.000	0	0	0	39.357.000	(39.300.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.540.300	0	0	0	6.540.300	7.335.600	0	0	0	7.335.600	795.300
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.074.000	0	0	0	242.074.000	259.958.000	0	0	0	259.958.000	17.884.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	53.346.400	0	0	53.346.400	0	97.616.800	0	0	97.616.800	44.270.400
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	53.346.400	0	0	53.346.400	0	97.616.800	0	0	97.616.800	44.270.400
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.938.000	0	0	0	54.938.000	80.241.000	0	0	0	80.241.000	25.303.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	0	0	0	4.640.000	4.640.000	0	0	0	4.640.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	0	0	0	10.800.000	11.100.000	0	0	0	11.100.000	300.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.498.000	0	0	0	39.498.000	64.501.000	0	0	0	64.501.000	25.003.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.084.400	0	0	0	442.084.400	467.042.700	0	0	0	467.042.700	24.958.300
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.432.400	0	0	0	35.432.400	47.126.700	0	0	0	47.126.700	11.694.300
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.460.000	0	0	0	6.460.000	8.210.000	0	0	0	8.210.000	1.750.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.192.000	0	0	0	400.192.000	411.706.000	0	0	0	411.706.000	11.514.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	0	0	0	74.000.000	94.130.600	0	0	0	94.130.600	20.130.600
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.840.000	0	0	0	1.840.000	(160.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.840.000	0	0	0	1.840.000	(160.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72.000.000	0	0	0	72.000.000	92.290.600	0	0	0	92.290.600	20.290.600
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	0	0	0	72.000.000	92.290.600	0	0	0	92.290.600	20.290.600
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.604.000	0	0	0	51.604.000	56.603.900	0	0	0	56.603.900	4.999.900
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.604.000	0	0	0	51.604.000	56.603.900	0	0	0	56.603.900	4.999.900
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.840.000	0	0	0	2.840.000	2.840.000	0	0	0	2.840.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.764.000	0	0	0	48.764.000	53.763.900	0	0	0	53.763.900	4.999.900
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.160.000	0	0	0	55.160.000	2.625.000	0	0	0	2.625.000	(52.535.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.160.000	0	0	0	55.160.000	2.625.000	0	0	0	2.625.000	(52.535.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.160.000	0	0	0	55.160.000	2.625.000	0	0	0	2.625.000	(52.535.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.030.000	0	0	0	20.030.000	20.030.000	0	0	0	20.030.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.030.000	0	0	0	20.030.000	20.030.000	0	0	0	20.030.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.270.000	0	0	0	2.270.000	2.270.000	0	0	0	2.270.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.360.000	0	0	0	6.360.000	6.360.000	0	0	0	6.360.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	0	0	0	11.400.000	11.400.000	0	0	0	11.400.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tapin Tengah	2.648.892.568	322.813.400	0	0	2.971.705.968	2.746.983.468	285.322.500	0	0	3.032.305.968	60.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.492.202.568	322.813.400	0	0	2.815.015.968	2.576.253.468	285.322.500	0	0	2.861.575.968	46.560.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.850.000	0	0	0	9.850.000	11.241.000	0	0	0	11.241.000	1.391.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.850.000	0	0	0	9.850.000	11.241.000	0	0	0	11.241.000	1.391.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.642.968	0	0	0	1.934.642.968	1.934.643.303	0	0	0	1.934.643.303	335
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.017.968	0	0	0	1.926.017.968	1.926.018.303	0	0	0	1.926.018.303	335
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.675.000	0	0	0	3.675.000	3.675.000	0	0	0	3.675.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.950.000	0	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.131.700	0	0	0	393.131.700	452.983.300	0	0	0	452.983.300	59.851.600
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.600	0	0	0	5.106.600	5.106.600	0	0	0	5.106.600	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.285.900	0	0	0	37.285.900	40.570.300	0	0	0	40.570.300	3.284.400
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.266.300	0	0	0	49.266.300	49.266.300	0	0	0	49.266.300	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.320.900	0	0	0	10.320.900	11.366.100	0	0	0	11.366.100	1.045.200
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.475.000	0	0	0	2.475.000	2.475.000	0	0	0	2.475.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.677.000	0	0	0	288.677.000	344.199.000	0	0	0	344.199.000	55.522.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.400.000	322.813.400	0	0	328.213.400	5.400.000	285.322.500	0	0	290.722.500	(37.490.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	322.813.400	0	0	328.213.400	5.400.000	285.322.500	0	0	290.722.500	(37.490.900)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.122.400	0	0	0	108.122.400	126.522.365	0	0	0	126.522.365	18.399.965
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.322.400	0	0	0	1.322.400	1.821.200	0	0	0	1.821.200	498.800
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000	0	0	0	34.800.000	22.482.000	0	0	0	22.482.000	(12.318.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	0	0	0	72.000.000	102.219.165	0	0	0	102.219.165	30.219.165
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.055.500	0	0	0	41.055.500	45.463.500	0	0	0	45.463.500	4.408.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.865.500	0	0	0	32.865.500	33.413.500	0	0	0	33.413.500	548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.190.000	0	0	0	8.190.000	12.050.000	0	0	0	12.050.000	3.860.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.600.000	0	0	0	21.600.000	57.600.000	0	0	0	57.600.000	36.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	57.600.000	0	0	0	57.600.000	36.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	57.600.000	0	0	0	57.600.000	36.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.498.000	0	0	0	48.498.000	58.863.000	0	0	0	58.863.000	10.365.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.598.000	0	0	0	35.598.000	45.963.000	0	0	0	45.963.000	10.365.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.960.000	0	0	0	5.960.000	5.960.000	0	0	0	5.960.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.638.000	0	0	0	29.638.000	40.003.000	0	0	0	40.003.000	10.365.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.900.000	0	0	0	12.900.000	12.900.000	0	0	0	12.900.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.900.000	0	0	0	12.900.000	12.900.000	0	0	0	12.900.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.792.000	0	0	0	34.792.000	2.467.000	0	0	0	2.467.000	(32.325.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.792.000	0	0	0	34.792.000	2.467.000	0	0	0	2.467.000	(32.325.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.792.000	0	0	0	34.792.000	2.467.000	0	0	0	2.467.000	(32.325.000)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.800.000	0	0	0	51.800.000	51.800.000	0	0	0	51.800.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.800.000	0	0	0	51.800.000	51.800.000	0	0	0	51.800.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.300.000	0	0	0	7.300.000	7.300.000	0	0	0	7.300.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000	Kecamatan Lokpaikat	3.868.679.060	466.497.600	0	0	4.335.176.660	3.831.303.660	576.401.000	0	0	4.407.704.660	72.528.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.372.716.760	218.377.600	0	0	3.591.094.360	3.447.402.160	218.377.600	0	0	3.665.779.760	74.685.400
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000	0	0	0	5.250.000	7.787.100	0	0	0	7.787.100	2.537.100
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.250.000	0	0	0	5.250.000	7.787.100	0	0	0	7.787.100	2.537.100
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.640.993.325	0	0	0	2.640.993.325	2.640.993.325	0	0	0	2.640.993.325	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.543.325	0	0	0	2.638.543.325	2.638.543.325	0	0	0	2.638.543.325	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.002.400	0	0	0	303.002.400	350.205.900	0	0	0	350.205.900	47.203.500
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.068.800	0	0	0	5.068.800	5.068.800	0	0	0	5.068.800	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.158.700	0	0	0	15.158.700	15.158.700	0	0	0	15.158.700	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.920.800	0	0	0	58.920.800	65.720.800	0	0	0	65.720.800	6.800.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.327.100	0	0	0	14.327.100	20.481.600	0	0	0	20.481.600	6.154.500
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.527.000	0	0	0	209.527.000	243.776.000	0	0	0	243.776.000	34.249.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	218.377.600	0	0	218.377.600	0	218.377.600	0	0	218.377.600	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	177.179.900	0	0	177.179.900	0	177.179.900	0	0	177.179.900	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	41.197.700	0	0	41.197.700	0	41.197.700	0	0	41.197.700	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.236.200	0	0	0	105.236.200	123.636.200	0	0	0	123.636.200	18.400.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.156.200	0	0	0	44.156.200	44.156.200	0	0	0	44.156.200	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	0	0	0	57.600.000	76.000.000	0	0	0	76.000.000	18.400.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.234.835	0	0	0	318.234.835	324.779.635	0	0	0	324.779.635	6.544.800
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.472.400	0	0	0	39.472.400	41.457.200	0	0	0	41.457.200	1.984.800
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	0	0	0	7.450.000	7.450.000	0	0	0	7.450.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.312.435	0	0	0	271.312.435	275.872.435	0	0	0	275.872.435	4.560.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.200.000	0	0	0	43.200.000	75.728.000	0	0	0	75.728.000	32.528.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.200.000	0	0	0	43.200.000	75.728.000	0	0	0	75.728.000	32.528.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	43.200.000	0	0	0	43.200.000	75.728.000	0	0	0	75.728.000	32.528.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	381.743.500	248.120.000	0	0	629.863.500	262.463.500	358.023.400	0	0	620.486.900	(9.376.600)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.064.500	0	0	0	56.064.500	63.564.500	0	0	0	63.564.500	7.500.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.835.000	0	0	0	5.835.000	5.835.000	0	0	0	5.835.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.229.500	0	0	0	50.229.500	57.729.500	0	0	0	57.729.500	7.500.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	325.679.000	248.120.000	0	0	573.799.000	198.899.000	358.023.400	0	0	556.922.400	(16.876.600)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.599.000	0	0	0	1.599.000	1.599.000	0	0	0	1.599.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.280.000	248.120.000	0	0	382.400.000	0	358.023.400	0	0	358.023.400	(24.376.600)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.100.000	0	0	0	189.100.000	196.600.000	0	0	0	196.600.000	7.500.000
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.608.800	0	0	0	22.608.800	1.650.000	0	0	0	1.650.000	(20.958.800)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.608.800	0	0	0	22.608.800	1.650.000	0	0	0	1.650.000	(20.958.800)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.608.800	0	0	0	22.608.800	1.650.000	0	0	0	1.650.000	(20.958.800)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.410.000	0	0	0	48.410.000	44.060.000	0	0	0	44.060.000	(4.350.000)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.410.000	0	0	0	48.410.000	44.060.000	0	0	0	44.060.000	(4.350.000)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.350.000	0	0	0	4.350.000	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.150.000	0	0	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	4.150.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000	0	0	0	4.350.000	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0	0	0	0	0	(4.350.000)
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.275.000	0	0	0	4.275.000	4.275.000	0	0	0	4.275.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	0	0	0	4.850.000	4.850.000	0	0	0	4.850.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
7 01 7.01.7.01.0.00.12.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.985.000	0	0	0	15.985.000	15.985.000	0	0	0	15.985.000	0
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378	2.967.884.000
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378	2.967.884.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378	2.967.884.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.526.071.278	124.454.000	0	0	3.650.525.278	3.975.867.946	411.859.732	0	0	4.387.727.678	737.202.400
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.925.000	0	0	0	6.925.000	6.925.000	0	0	0	6.925.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.925.000	0	0	0	6.925.000	6.925.000	0	0	0	6.925.000	0

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.884.078	0	0	0	2.624.884.078	2.625.062.446	0	0	0	2.625.062.446	178.368
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.324.078	0	0	0	2.620.324.078	2.620.502.446	0	0	0	2.620.502.446	178.368
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.060.000	0	0	0	3.060.000	3.060.000	0	0	0	3.060.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.881.400	0	0	0	620.881.400	993.369.900	0	0	0	993.369.900	372.488.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.791.200	0	0	0	7.791.200	7.791.200	0	0	0	7.791.200	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.901.700	0	0	0	55.901.700	60.397.700	0	0	0	60.397.700	4.496.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.191.700	0	0	0	49.191.700	49.191.700	0	0	0	49.191.700	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.663.300	0	0	0	12.663.300	12.663.300	0	0	0	12.663.300	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	13.938.500	0	0	0	13.938.500	23.325.000	0	0	0	23.325.000	9.386.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.450.000	0	0	0	6.450.000	6.450.000	0	0	0	6.450.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.945.000	0	0	0	474.945.000	833.551.000	0	0	0	833.551.000	358.606.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	112.773.200	0	0	112.773.200	0	115.143.200	0	0	115.143.200	2.370.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	112.773.200	0	0	112.773.200	0	115.143.200	0	0	115.143.200	2.370.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.906.500	0	0	0	213.906.500	233.721.600	0	0	0	233.721.600	19.815.100
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	0	0	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0	2.320.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.983.500	0	0	0	36.983.500	41.383.600	0	0	0	41.383.600	4.400.100
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.603.000	0	0	0	174.603.000	190.018.000	0	0	0	190.018.000	15.415.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.474.300	11.680.800	0	0	71.155.100	116.789.000	296.716.532	0	0	413.505.532	342.350.432
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.981.200	0	0	0	40.981.200	41.881.400	0	0	0	41.881.400	900.200
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.020.000	0	0	0	11.020.000	22.040.000	0	0	0	22.040.000	11.020.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.243.500	0	0	0	5.243.500	52.000.000	272.568.000	0	0	324.568.000	319.324.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.229.600	11.680.800	0	0	13.910.400	867.600	24.148.532	0	0	25.016.132	11.105.732
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200.778.700	0	0	0	200.778.700	2.534.168.200	0	0	0	2.534.168.200	2.333.389.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200.778.700	0	0	0	200.778.700	2.534.168.200	0	0	0	2.534.168.200	2.333.389.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	159.688.700	0	0	0	159.688.700	2.500.478.200	0	0	0	2.500.478.200	2.340.789.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.090.000	0	0	0	41.090.000	33.690.000	0	0	0	33.690.000	(7.400.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.241.286.500	0	0	0	1.241.286.500	1.190.583.800	0	0	0	1.190.583.800	(50.702.700)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.241.286.500	0	0	0	1.241.286.500	1.190.583.800	0	0	0	1.190.583.800	(50.702.700)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.092.770.000	0	0	0	1.092.770.000	1.092.770.000	0	0	0	1.092.770.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	79.911.800	0	0	0	79.911.800	48.912.200	0	0	0	48.912.200	(30.999.600)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47.999.900	0	0	0	47.999.900	38.499.900	0	0	0	38.499.900	(9.500.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.604.800	0	0	0	20.604.800	10.401.700	0	0	0	10.401.700	(10.203.100)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	80.649.300	0	0	0	80.649.300	112.049.300	0	0	0	112.049.300	31.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.649.300	0	0	0	80.649.300	112.049.300	0	0	0	112.049.300	31.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.349.400	0	0	0	46.349.400	81.349.400	0	0	0	81.349.400	35.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.299.900	0	0	0	34.299.900	30.699.900	0	0	0	30.699.900	(3.600.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	182.929.400	0	0	0	182.929.400	82.729.200	0	0	0	82.729.200	(100.200.200)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	182.929.400	0	0	0	182.929.400	82.729.200	0	0	0	82.729.200	(100.200.200)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	142.199.400	0	0	0	142.199.400	53.349.200	0	0	0	53.349.200	(88.850.200)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.730.000	0	0	0	40.730.000	29.380.000	0	0	0	29.380.000	(11.350.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	223.497.200	0	0	0	223.497.200	240.292.200	0	0	0	240.292.200	16.795.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	223.497.200	0	0	0	223.497.200	240.292.200	0	0	0	240.292.200	16.795.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	156.647.400	0	0	0	156.647.400	121.967.400	0	0	0	121.967.400	(34.680.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17.999.900	0	0	0	17.999.900	17.999.900	0	0	0	17.999.900	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21.324.900	0	0	0	21.324.900	21.324.900	0	0	0	21.324.900	0
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	27.525.000	0	0	0	27.525.000	79.000.000	0	0	0	79.000.000	51.475.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	954.227.830.063	539.670.179.941	25.000.000.000	164.652.998.100	1.683.551.008.104	1.140.729.826.352	638.480.013.903	23.477.342.907	165.704.127.400	1.968.391.310.562	284.840.302.458

Bupati Tapin



M. Arifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			
01	PELAYANAN UMUM												
01 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	219.262.734.343	20.000.000	0	0	219.282.734.343	219.716.820.153	59.100.000	0	0	219.775.920.153	493.185.810	
01 02 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	100.270.776.855	162.195.700	0	0	100.432.972.555	100.951.304.775	183.295.700	0	0	101.134.600.475	701.627.920	
01 03 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.270.017.146	256.429.900	0	0	15.526.447.046	15.917.154.146	336.997.500	0	0	16.254.151.646	727.704.600	
01 04 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.143.144.983	341.955.200	0	0	5.485.100.183	5.243.028.776	556.592.100	0	0	5.799.620.876	314.520.693	
01 05 1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.764.613.407	550.524.700	0	0	12.315.138.107	12.240.040.160	722.451.600	0	0	12.962.491.760	647.353.653	
01 06 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.792.896.694	0	0	0	4.792.896.694	4.963.212.487	554.560.500	0	0	5.517.772.987	724.876.293	
01 07 2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.247.470.861	267.484.850	0	0	4.514.955.711	4.453.764.015	358.548.950	0	0	4.812.312.965	297.357.254	
01 08 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.586.064.031	177.935.250	0	0	5.763.999.281	6.892.177.377	172.486.450	0	0	7.064.663.827	1.300.664.546	
01 09 2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.816.921.374	111.240.300	0	0	3.928.161.674	4.038.594.003	66.729.300	0	0	4.105.323.303	177.161.629	
01 10 2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.948.097.168	85.271.400	0	0	8.033.368.568	8.685.433.286	312.156.520	0	0	8.997.589.806	964.221.238	
01 11 2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.448.544.176	705.377.800	0	0	7.153.921.976	7.063.054.496	1.169.299.527	0	0	8.232.354.023	1.078.432.047	
01 12 2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.514.906.933	39.859.066.000	0	0	49.373.972.933	53.756.911.391	34.528.032.018	0	0	88.284.943.409	38.910.970.476	
01 13 2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.688.174.643	263.704.545	0	0	4.951.879.188	4.839.557.843	294.248.745	0	0	5.133.806.588	181.927.400	
01 14 2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.947.181.877	131.844.000	0	0	4.079.025.877	4.700.742.174	461.402.700	90.000.000	0	5.252.144.874	1.173.118.997	
01 15 2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.499.618.920	408.087.680	0	0	4.907.706.600	4.701.241.056	457.161.880	0	0	5.158.402.936	250.696.336	
01 16 2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.238.558.707	541.536.700	0	0	5.780.095.407	5.218.184.875	640.442.700	0	0	5.858.627.575	78.532.168	
01 17 2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.879.843.894	159.248.100	0	0	7.039.091.994	6.882.246.319	225.871.300	0	0	7.108.117.619	69.025.625	
01 18 2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	67.117.900	0	0	0	67.117.900	62.127.900	0	0	0	62.127.900	(4.990.000)	
01 19 2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.877.388.810	232.010.750	0	0	5.109.399.560	6.117.106.203	1.007.272.350	0	0	7.124.378.553	2.014.978.993	
01 20 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.174.411.565	1.352.538.000	0	0	5.526.949.565	4.352.998.899	1.343.787.200	0	0	5.696.786.099	169.836.534	
01 21 2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	308.405.600	136.594.700	0	0	445.000.300	314.635.700	91.177.700	0	0	405.813.400	(39.186.900)	
01 22 3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.531.819.303	626.800.200	0	0	6.158.619.503	5.688.206.291	556.342.100	0	0	6.244.548.391	85.928.888	
01 23 3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.172.934.966	6.635.634.000	0	0	23.808.568.966	16.748.586.736	3.233.142.681	0	0	19.981.729.417	(3.826.839.549)	
01 24 3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.880.606.399	167.093.450	0	0	5.047.699.849	5.053.521.888	234.820.150	0	0	5.288.342.038	240.642.189	
01 25 3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.418.022.992	143.267.000	0	0	4.561.289.992	4.417.839.544	320.356.100	0	0	4.738.195.644	176.905.652	
01 26 4 01	SEKRETARIAT DAERAH	72.632.410.897	12.961.537.300	0	0	85.593.948.197	85.633.017.797	15.410.305.900	0	0	101.043.323.697	15.449.375.500	
01 27 4 02	SEKRETARIAT DPRD	48.150.310.873	1.655.680.000	0	0	49.805.990.873	54.191.633.198	2.175.382.800	0	0	56.367.015.998	6.561.025.125	
01 28 5 01	PERENCANAAN	10.810.610.299	994.386.900	0	0	11.804.997.199	10.919.286.145	620.078.900	0	0	11.539.365.045	(265.632.154)	
01 29 5 02	KEUANGAN	32.601.309.202	1.454.163.600	25.000.000.000	164.652.998.100	223.708.470.902	32.877.408.846	1.935.585.200	23.387.342.907	165.704.127.400	223.904.464.353	195.993.451	
01 30 5 03	KEPEGAWAIAN	9.310.273.167	130.672.200	0	0	9.440.945.367	9.166.249.022	273.314.000	0	0	9.439.563.022	(1.382.345)	
01 31 5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	517.710.000	0	0	0	517.710.000	517.710.000	0	0	0	517.710.000	0	
01 32 5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	889.815.000	0	0	0	889.815.000	1.263.829.000	30.000.000	0	0	1.293.829.000	404.014.000	
01 33 6 01	INSPEKTORAT DAERAH	14.042.850.522	186.646.000	0	0	14.229.496.522	15.909.187.332	253.605.000	0	0	16.162.792.332	1.933.295.810	

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian				Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01	34	7	01	KECAMATAN	44.043.863.698	3.928.901.313	0	0	47.972.765.011	44.067.159.948	4.951.053.063	0	0	49.018.213.011	1.045.448.000
01	35	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.455.212.378	124.454.000	0	0	5.579.666.378	8.135.690.646	411.859.732	0	0	8.547.550.378	2.967.884.000
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN											
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.943.444.628	36.500.000	0	0	4.979.944.628	4.538.278.328	149.256.000	0	0	4.687.534.328	(292.410.300)
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.964.490.500	0	0	0	4.964.490.500	3.799.530.500	0	0	0	3.799.530.500	(1.164.960.000)
04				EKONOMI											
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.939.809.300	323.696.352.300	0	0	371.636.161.600	80.025.405.142	422.447.284.376	0	0	502.472.689.518	130.836.527.918
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.094.236.484	0	0	0	1.094.236.484	2.852.257.540	20.428.500	0	0	2.872.686.040	1.778.449.556
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.191.821.108	0	0	0	2.191.821.108	4.319.885.108	0	0	0	4.319.885.108	2.128.064.000
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.138.234.376	4.061.490.516	0	0	5.199.724.892	2.143.129.956	2.219.671.758	0	0	4.362.801.714	(836.923.178)
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.839.496.200	0	0	0	1.839.496.200	2.392.493.100	200.000.000	0	0	2.592.493.100	752.996.900
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	753.426.200	25.050.000	0	0	778.476.200	188.779.700	25.050.000	0	0	213.829.700	(564.646.500)
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	989.511.600	0	0	0	989.511.600	1.430.606.400	0	0	0	1.430.606.400	441.094.800
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	39.267.900	0	0	0	39.267.900	39.267.900	0	0	0	39.267.900	0
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.133.244.014	97.830.300	0	0	1.231.074.314	1.903.989.802	82.830.300	0	0	1.986.820.102	755.745.788
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.093.521.695	1.332.184.700	0	0	23.425.706.395	34.224.169.625	14.969.876.300	0	0	49.194.045.925	25.768.339.530
04	11	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.352.034.423	2.390.726.200	0	0	5.742.760.623	5.119.925.423	2.544.872.600	0	0	7.664.798.023	1.922.037.400
04	12	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.494.857.200	15.209.100	0	0	1.510.066.300	1.253.141.000	0	0	0	1.253.141.000	(256.925.300)
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP											
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.339.106.200	1.609.000.000	0	0	6.948.106.200	11.024.730.291	1.101.075.900	0	0	12.125.806.191	5.177.699.991
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.091.299.850	57.936.274.843	0	0	60.027.574.693	1.065.085.000	3.897.470.000	0	0	4.962.555.000	(55.065.019.693)
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.972.437.266	8.651.198.000	0	0	19.623.635.266	11.258.075.026	6.148.812.600	0	0	17.406.887.626	(2.216.747.640)
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM											
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.785.000.000	3.865.000.000	0	0	8.650.000.000	5.332.272.003	12.614.999.997	0	0	17.947.272.000	9.297.272.000
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.722.298.348	5.959.088.252	0	0	16.681.386.600	15.133.496.439	10.006.633.562	0	0	25.140.130.001	8.458.743.401
07				KESEHATAN											
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	83.589.470.508	29.845.619.800	0	0	113.435.090.308	115.610.711.162	44.956.659.759	0	0	160.567.370.921	47.132.280.613
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.389.205.900	0	0	0	1.389.205.900	4.736.909.500	890.701.000	0	0	5.627.610.500	4.238.404.600
08				PARIWISATA											
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.006.356.500	2.998.257.700	0	0	5.004.614.200	2.270.617.100	437.797.000	0	0	2.708.414.100	(2.296.200.100)
10				PENDIDIKAN											
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	13.471.243.800	18.495.425.342	0	0	31.966.669.142	19.764.670.500	37.237.394.235	0	0	57.002.064.735	25.035.395.593
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.322.108.200	2.969.374.800	0	0	18.291.483.000	19.854.093.600	3.445.864.800	0	0	23.299.958.400	5.008.475.400
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.579.008.400	254.350.000	0	0	1.833.358.400	1.802.038.200	257.584.500	0	0	2.059.622.700	226.264.300

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	482.655.200	658.966.550	0	0	1.141.621.750	432.305.300	878.290.350	0	0	1.310.595.650	168.973.900
11	PERLINDUNGAN SOSIAL											
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.645.911.000	0	0	0	7.645.911.000	10.361.282.000	0	0	0	10.361.282.000	2.715.371.000
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.659.693.680	0	0	0	1.659.693.680	2.153.018.280	0	0	0	2.153.018.280	493.324.600
TOTAL		954.227.830.063	539.670.179.941	25.000.000.000	164.652.998.100	1.683.551.008.104	1.140.729.826.352	638.480.013.903	23.477.342.907	165.704.127.400	1.968.391.310.562	284.840.302.458

Bupati Tapin



M. A. ifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
A SPM Bidang Pendidikan						
Pendidikan Dasar						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	200.000.000	200.000.000
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.097.100	449.172.000	224.074.900
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	115.436.320	221.404.320	105.968.000
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	249.678.500	249.678.500
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.135.869.462	6.916.065.354	1.780.195.892
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.628.073.640	2.046.814.123	418.740.483
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.214.800	225.214.800	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	875.474.860	875.474.860	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0	0
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	149.999.800	149.999.800
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	5.500.362.968	5.500.362.968
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	122.500.000	220.000.000	97.500.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.199.000	33.189.000	14.990.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	16.800.900	16.800.900	0
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0	0	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.499.900	22.499.900	0
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.201.060.000	17.476.199.889	275.139.889
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.000.000	95.000.000	25.000.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.656.225.982	34.697.876.414	9.041.650.432
			Jumlah Pendidikan Dasar	25.656.225.982	34.697.876.414	9.041.650.432
Pendidikan Kesetaraan						
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	20.000.000	20.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	17.632.000	217.089.300	199.457.300
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.095.400	30.095.400	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.200.000	29.304.600	10.104.600
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	2.006.800.000	2.006.800.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.927.400	2.303.289.300	2.236.361.900
			Jumlah Pendidikan Kesetaraan	66.927.400	2.303.289.300	2.236.361.900
Pendidikan Anak Usia Dini						
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	225.214.600	1.341.448.700	1.116.234.100
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	381.086.860	2.040.123.430	1.659.036.570
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0
			Pengadaan Mebel PAUD	0	93.919.700	93.919.700
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	175.000.000	175.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	25.000.000	25.000.000	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.206.000.000	1.809.000.000	603.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.174.000	133.956.100	103.782.100

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	47.572.600	186.641.935	139.069.335
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	3.813.000.000	3.813.000.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.915.048.060	9.618.089.865	7.703.041.805
			Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	1.915.048.060	9.618.089.865	7.703.041.805
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	27.638.201.442	46.619.255.579	18.981.054.137
B SPM Bidang Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.550.000	929.476.700	891.926.700
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.550.000	929.476.700	891.926.700
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.550.000	929.476.700	891.926.700
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	112.655.000	344.401.700	231.746.700
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.655.000	344.401.700	231.746.700
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	112.655.000	344.401.700	231.746.700
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.140.000	211.770.000	198.630.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.140.000	211.770.000	198.630.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.140.000	211.770.000	198.630.000
Pelayanan Kesehatan Balita						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.795.000	631.985.000	616.190.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.795.000	631.985.000	616.190.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	15.795.000	631.985.000	616.190.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	105.429.200	430.416.215	324.987.015
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.429.200	430.416.215	324.987.015
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	105.429.200	430.416.215	324.987.015
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	114.265.000	402.780.000	288.515.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.265.000	402.780.000	288.515.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	114.265.000	402.780.000	288.515.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.987.200	339.172.300	313.185.100
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.987.200	339.172.300	313.185.100
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	25.987.200	339.172.300	313.185.100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.900.000	131.300.000	114.400.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.900.000	131.300.000	114.400.000

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.900.000	131.300.000	114.400.000
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.900.000	103.250.000	86.350.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.900.000	103.250.000	86.350.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.900.000	103.250.000	86.350.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.200.000	171.450.000	136.250.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.200.000	171.450.000	136.250.000
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	35.200.000	171.450.000	136.250.000
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	85.933.200	204.963.200	119.030.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.933.200	204.963.200	119.030.000
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	85.933.200	204.963.200	119.030.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.047.000	127.804.300	54.757.300
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.047.000	127.804.300	54.757.300
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	73.047.000	127.804.300	54.757.300
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	652.801.600	4.028.769.415	3.375.967.815
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1.105.000.000	1.465.000.000	360.000.000
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.680.000.000	3.606.009.000	(73.991.000)
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.865.000.000	12.876.263.000	9.011.263.000
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.650.000.000	17.947.272.000	9.297.272.000
			Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.650.000.000	17.947.272.000	9.297.272.000
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	340.000.000	370.000.000	30.000.000
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0	5.083.429.000	5.083.429.000
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.925.000.000	2.325.000.000	400.000.000
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.265.000.000	7.778.429.000	5.513.429.000
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.265.000.000	7.778.429.000	5.513.429.000
			Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.915.000.000	25.725.701.000	14.810.701.000
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota					
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000	476.850.000	0
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.471.365.000	0	(3.471.365.000)
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.948.215.000	476.850.000	(3.471.365.000)
			Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	3.948.215.000	476.850.000	(3.471.365.000)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000	191.860.000	95.930.000
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000	25.930.000	0
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000	217.790.000	95.930.000
			Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	121.860.000	217.790.000	95.930.000
			Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.070.075.000	694.640.000	(3.375.435.000)
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.125.799.000	2.822.199.000	(303.600.000)
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	22.500.000	0
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000	0
			Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.163.299.000	2.859.699.000	(303.600.000)
			Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	3.163.299.000	2.859.699.000	(303.600.000)
	Pelayanan informasi rawan bencana					
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	39.649.900	39.649.900	0
			Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	39.649.900	39.649.900	0
			Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana	39.649.900	39.649.900	0
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	13.018.000	213.017.800	199.999.800
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	663.489.000	333.689.000	(329.800.000)
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	56.039.628	56.039.628	0
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.160.000	24.160.000	0
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26.770.000	26.768.400	(1.600)
			Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	783.476.628	653.674.828	(129.801.800)
			Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	783.476.628	653.674.828	(129.801.800)
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	96.619.000	48.309.500	(48.309.500)
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96.619.000	48.309.500	(48.309.500)
			Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	96.619.000	48.309.500	(48.309.500)
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.100.000	390.300.000	(4.800.000)
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	28.000.100	0
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	0
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	23.900.000	142.931.000	119.031.000
			Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	464.400.100	578.631.100	114.231.000
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	464.400.100	578.631.100	114.231.000
			Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.547.444.628	4.179.964.328	(367.480.300)

KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	482.655.200	658.966.550	0	0	1.141.621.750	432.305.300	878.290.350	0	0	1.310.595.650	168.973.900
11	PERLINDUNGAN SOSIAL											
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.645.911.000	0	0	0	7.645.911.000	10.361.282.000	0	0	0	10.361.282.000	2.715.371.000
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.659.693.680	0	0	0	1.659.693.680	2.153.018.280	0	0	0	2.153.018.280	493.324.600
TOTAL		954.227.830.063	539.670.179.941	25.000.000.000	164.652.998.100	1.683.551.008.104	1.140.729.826.352	638.480.013.903	23.477.342.907	165.704.127.400	1.968.391.310.562	284.840.302.458

Bupati Tapin



M. A. ifin Arpan

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	273.345.418.901	924.743.048.906	1.155.548.238.091	230.805.189.185	25 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.623.220.643	251.249.403.485	276.777.984.888	25.528.581.403	10 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	219.282.734.343	219.775.920.153	493.185.810	0 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2	31.866.639.142	56.736.384.735	24.869.745.593	78 %
1	01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	100.030.000	265.680.000	165.650.000	166 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.176.986.000	213.868.062.863	261.701.971.396	47.833.908.533	22 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	100.432.972.555	101.134.600.475	701.627.920	1 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	106.910.845.808	153.052.658.221	46.141.812.413	43 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	6.149.923.200	6.509.623.200	359.700.000	6 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	36.400.000	32.350.000	(4.050.000)	11 %
1	02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	337.921.300	551.539.500	213.618.200	63 %
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	257.743.287.246	402.760.714.846	548.799.919.355	146.039.204.509	36 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	15.526.447.046	16.254.151.646	727.704.600	5 %
1	03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	56.650.000.000	85.335.346.600	28.685.346.600	51 %
1	03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.668.680.514	8.650.000.000	17.947.272.000	9.297.272.000	107 %
1	03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	2.064.000.000	1.453.800.000	(610.200.000)	30 %
1	03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	2.265.000.000	7.778.429.000	5.513.429.000	243 %
1	03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	119.333.275.000	149.361.954.609	30.028.679.609	25 %
1	03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	3.820.000.000	4.220.000.000	400.000.000	10 %
1	03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	191.547.665.600	263.270.176.509	71.722.510.909	37 %
1	03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	285.221.000	285.211.800	(9.200)	0 %
1	03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	2.619.106.200	2.893.577.191	274.470.991	10 %
1	04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.526.367.920	22.166.486.783	30.939.750.877	8.773.264.094	40 %
1	04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.485.100.183	5.799.620.876	314.520.693	6 %
1	04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0	4.100.975.000	725.540.000	(3.375.435.000)	82 %
1	04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0	477.810.000	885.160.000	407.350.000	85 %
1	04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0	555.400.000	4.675.895.000	4.120.495.000	742 %
1	04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.940.178.920	11.547.201.600	18.853.535.001	7.306.333.401	63 %
1	05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.359.414.503	17.295.082.735	17.650.026.088	354.943.353	2 %
1	05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	12.315.138.107	12.962.491.760	647.353.653	5 %
1	05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	956.642.781	3.595.799.000	3.337.769.000	(258.030.000)	7 %
1	05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	446.128.941	919.745.528	741.634.228	(178.111.300)	19 %
1	05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	956.642.781	464.400.100	608.131.100	143.731.000	31 %
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.916.142.589	17.403.298.194	19.678.585.487	2.275.287.293	13 %
1	06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.792.896.694	5.517.772.987	724.876.293	15 %
1	06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.182.817.125	1.304.144.900	1.058.463.200	(245.681.700)	19 %
1	06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.594.208.454	5.071.050.300	4.981.051.400	(89.998.900)	2 %
1	06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	538.399.885	1.223.170.700	4.274.222.300	3.051.051.600	249 %
1	06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	417.900.000	4.964.490.500	3.799.530.500	(1.164.960.000)	23 %
1	06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.182.817.125	47.545.100	47.545.100	0	0 %
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	193.147.625.650	232.773.753.607	235.949.210.995	3.175.457.388	1 %
2	07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.277.120.000	5.609.192.195	7.684.999.005	2.075.806.810	37 %
2	07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.514.955.711	4.812.312.965	297.357.254	7 %
2	07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	612.980.000	280.964.104	264.914.100	(16.050.004)	6 %

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%	
2	07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	549.930.000	408.020.300	2.221.757.900	1.813.737.600	445 %
2	07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	114.210.000	405.252.080	386.014.040	(19.238.040)	5 %
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.190.890.783	7.423.692.961	9.217.682.107	1.793.989.146	24 %
2	08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.763.999.281	7.064.663.827	1.300.664.546	23 %
2	08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	309.096.780	319.815.280	10.718.500	3 %
2	08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0	154.254.300	283.580.000	129.325.700	84 %
2	08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.696.727.749	484.981.300	477.371.500	(7.609.800)	2 %
2	08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	184.406.245	123.135.700	123.395.700	260.000	0 %
2	08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	4.765.725.440	500.933.500	583.350.900	82.417.400	16 %
2	08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	452.837.830	87.292.100	365.504.900	278.212.800	319 %
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.364.325.892	6.119.982.782	8.425.208.411	2.305.225.629	38 %
2	09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.928.161.674	4.105.323.303	177.161.629	5 %
2	09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	234.434.498	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
2	09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	2.041.330.908	2.169.416.108	128.085.200	6 %
2	09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	234.434.498	75.100.200	75.079.000	(21.200)	0 %
2	09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	75.390.000	75.390.000	0	0 %
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	60.027.574.693	4.962.555.000	(55.065.019.693)	92 %
2	10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0	230.375.000	253.825.000	23.450.000	10 %
2	10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	58.945.584.693	4.121.400.000	(54.824.184.693)	93 %
2	10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0	851.615.000	587.330.000	(264.285.000)	31 %
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	109.135.367.287	27.657.003.834	26.404.477.432	(1.252.526.402)	5 %
2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	8.033.368.568	8.997.589.806	964.221.238	12 %
2	11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	7.696.105.842	947.909.300	962.909.300	15.000.000	2 %
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0	1.868.073.682	2.778.155.554	910.081.872	49 %
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	7.413.625.652	2.571.478.628	(4.842.147.024)	65 %
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	324.901.400	424.890.000	99.988.600	31 %
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	29.944.200	9.484.200	(20.460.000)	68 %
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	129.272.100	129.272.100	0	0 %
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	52.750.800	52.750.600	(200)	0 %
2	11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	468.321.600	468.321.516	(84)	0 %
2	11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	41.419.000	20.479.000	(20.940.000)	51 %
2	11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	8.347.417.532	9.989.146.728	1.641.729.196	20 %
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.570.957.483	7.153.921.976	8.232.354.023	1.078.432.047	15 %
2	12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.950.891.876	7.043.477.123	1.092.585.247	18 %
2	12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	239.764.000	239.764.000	0	0 %
2	12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0	423.346.100	440.706.100	17.360.000	4 %
2	12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0	539.920.000	508.406.800	(31.513.200)	6 %
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.286.081.523	49.373.972.933	88.284.943.409	38.910.970.476	79 %
2	13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.089.919.621	4.969.175.253	879.255.632	21 %
2	13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	4.729.422.056	23.223.000	205.444.900	182.221.900	785 %
2	13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	4.231.179.522	41.885.260.512	80.018.764.656	38.133.504.144	91 %
2	13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.896.786.104	2.164.112.400	1.988.288.400	(175.824.000)	8 %

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.428.693.841	1.211.457.400	1.103.270.200	(108.187.200)	9 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.841.661.256	6.341.085.088	10.761.417.088	4.420.332.000	70 %
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.951.879.188	5.133.806.588	181.927.400	4 %
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	214.124.600	336.054.600	121.930.000	57 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0	454.631.000	2.703.601.600	2.248.970.600	495 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0	720.450.300	2.587.954.300	1.867.504.000	259 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.634.820.650	9.278.750.769	9.614.946.588	336.195.819	4 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.079.025.877	5.252.144.874	1.173.118.997	29 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.543.345.650	4.855.329.956	3.880.206.778	(975.123.178)	20 %
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.091.475.000	344.394.936	482.594.936	138.200.000	40 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.444.959.958	6.747.202.800	7.750.896.036	1.003.693.236	15 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.907.706.600	5.158.402.936	250.696.336	5 %
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0	1.219.640.800	1.671.137.700	451.496.900	37 %
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	0	619.855.400	921.355.400	301.500.000	49 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	778.476.200	213.829.700	(564.646.500)	73 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	30.372.200	30.372.200	0	0 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	17.767.000	17.767.000	0	0 %
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	39.368.100	60.572.600	21.204.500	54 %
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	690.968.900	105.117.900	(585.851.000)	85 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.448.704.150	6.769.607.007	7.289.233.975	519.626.968	8 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.780.095.407	5.858.627.575	78.532.168	1 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	269.994.564	23.898.000	23.898.000	0	0 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.653.934	38.994.000	44.994.000	6.000.000	15 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	830.919.600	891.579.400	60.659.800	7 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.129.221.244	74.100.000	448.535.000	374.435.000	505 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	21.600.000	21.600.000	0	0 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21.132.856.128	25.330.574.994	30.408.076.019	5.077.501.025	20 %
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	7.039.091.994	7.108.117.619	69.025.625	1 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.552.749.707	1.871.022.600	3.007.435.000	1.136.412.400	61 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0	15.935.195.600	19.807.258.600	3.872.063.000	24 %
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.425.654.622	485.264.800	485.264.800	0	0 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	7 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0	67.117.900	62.127.900	(4.990.000)	7 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	39.267.900	39.267.900	0	0 %
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	39.267.900	39.267.900	0	0 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.110.419.790	6.942.757.960	9.184.001.253	2.241.243.293	32 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.109.399.560	7.124.378.553	2.014.978.993	39 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.467.741.345	516.569.400	440.466.300	(76.103.100)	15 %
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	540.772.100	938.212.000	1.356.156.500	417.944.500	45 %
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	738.236.245	191.509.900	262.999.900	71.490.000	37 %
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	187.067.100	0	(187.067.100)	100 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	713.714.750	6.668.571.315	7.007.381.749	338.810.434	5 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.526.949.565	5.696.786.099	169.836.534	3 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	1.141.621.750	1.310.595.650	168.973.900	15 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	995.746.000	445.000.300	405.813.400	(39.186.900)	9 %

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	338.130.300	308.993.400	(29.136.900)	9 %
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	106.870.000	96.820.000	(10.050.000)	9 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	347.345.672.926	76.490.400.142	99.060.034.640	22.569.634.498	30 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.847.827.754	7.389.693.817	8.231.368.493	841.674.676	11 %
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	6.158.619.503	6.244.548.391	85.928.888	1 %
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.546.144.624	229.307.200	148.590.700	(80.716.500)	35 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.236.792.214	590.237.214	1.447.600.302	857.363.088	145 %
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.064.890.916	204.687.800	195.967.800	(8.720.000)	4 %
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	206.842.100	194.661.300	(12.180.800)	6 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.104.071.245	5.004.614.200	2.708.414.100	(2.296.200.100)	46 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0	3.705.115.000	1.219.831.400	(2.485.283.600)	67 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	365.835.000	1.032.291.900	808.786.400	(223.505.500)	22 %
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	58.861.000	58.861.000	0	0 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	738.236.245	208.346.300	620.935.300	412.589.000	198 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	281.748.121.861	47.234.275.361	69.175.775.342	21.941.499.981	46 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	23.808.568.966	19.981.729.417	(3.826.839.549)	16 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	75.890.955.109	8.102.438.345	14.504.667.045	6.402.228.700	79 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	116.810.206.554	10.265.992.950	27.110.534.530	16.844.541.580	164 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25.556.516.870	402.112.200	702.101.450	299.989.250	75 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0	823.425.000	790.855.000	(32.570.000)	4 %
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	5.717.110.025	79.790.000	73.740.000	(6.050.000)	8 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.134.109.674	3.751.947.900	6.012.147.900	2.260.200.000	60 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	53.782.340.000	10.790.460.472	12.953.140.061	2.162.679.589	20 %
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.047.699.849	5.288.342.038	240.642.189	5 %
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	902.000.000	49.268.800	47.152.400	(2.116.400)	4 %
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25.344.780.000	4.976.730.540	5.744.725.540	767.995.000	15 %
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	25.344.780.000	47.280.800	1.325.560.200	1.278.279.400	2.704 %
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.202.000.000	119.326.152	131.195.352	11.869.200	10 %
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	688.780.000	211.672.300	163.632.300	(48.040.000)	23 %
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	300.000.000	338.482.031	252.532.231	(85.949.800)	25 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.863.312.066	6.071.356.292	5.991.336.644	(80.019.648)	1 %
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.561.289.992	4.738.195.644	176.905.652	4 %
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	1.302.719.900	1.045.794.600	(256.925.300)	20 %
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	391.904.022	63.995.400	63.995.400	0	0 %
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	391.904.022	143.351.000	143.351.000	0	0 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	46.862.220.778	135.399.939.070	157.410.339.695	22.010.400.625	16 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	29.631.303.301	85.593.948.197	101.043.323.697	15.449.375.500	18 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	63.848.480.697	74.456.580.797	10.608.100.100	17 %
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.179.395.616	20.695.867.900	24.760.065.400	4.064.197.500	20 %
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	1.049.599.600	1.826.677.500	777.077.900	74 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	17.230.917.477	49.805.990.873	56.367.015.998	6.561.025.125	13 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	30.061.669.373	32.262.381.198	2.200.711.825	7 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0	19.744.321.500	24.104.634.800	4.360.313.300	22 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	48.586.988.613	246.361.938.468	246.694.931.420	332.992.952	0 %
5	01		PERENCANAAN	12.505.258.170	11.804.997.199	11.539.365.045	(265.632.154)	2 %

KABUPATEN TAPIN
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	8.414.123.999	8.611.710.645	197.586.646	2 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.505.258.169	2.165.491.700	1.788.882.900	(376.608.800)	17 %
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1.225.381.500	1.138.771.500	(86.610.000)	7 %
5	02		KEUANGAN	21.588.214.082	223.708.470.902	223.904.464.353	195.993.451	0 %
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	19.899.457.962	21.391.632.273	1.492.174.311	7 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	200.168.988.208	199.098.750.615	(1.070.237.593)	1 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.257.878.770	1.109.119.500	959.269.500	(149.850.000)	14 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	2.530.905.232	2.454.811.965	(76.093.267)	3 %
5	03		KEPEGAWAIAN	1.836.780.611	9.440.945.367	9.439.563.022	(1.382.345)	0 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.891.976.767	6.646.910.622	754.933.855	13 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.836.780.611	3.548.968.600	2.792.652.400	(756.316.200)	21 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	740.251.065	517.710.000	517.710.000	0	0 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	740.251.065	517.710.000	517.710.000	0	0 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.916.484.685	889.815.000	1.293.829.000	404.014.000	45 %
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.916.484.685	889.815.000	1.293.829.000	404.014.000	45 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	32.199.736.237	14.229.496.522	16.162.792.332	1.933.295.810	14 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	32.199.736.237	14.229.496.522	16.162.792.332	1.933.295.810	14 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	9.873.620.322	10.499.057.832	625.437.510	6 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	3.289.162.200	4.805.982.200	1.516.820.000	46 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	1.066.714.000	857.752.300	(208.961.700)	20 %
7			UNSUR KEWILAYAHAN	10.760.433.973	47.972.765.011	49.018.213.011	1.045.448.000	2 %
7	01		KECAMATAN	10.760.433.973	47.972.765.011	49.018.213.011	1.045.448.000	2 %
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	40.233.040.698	41.184.308.898	951.268.200	2 %
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	543.311.200	1.001.103.700	457.792.500	84 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.087.125.484	6.124.872.713	6.187.484.313	62.611.600	1 %
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	286.280.800	57.530.200	(228.750.600)	80 %
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	673.308.489	785.259.600	587.785.900	(197.473.700)	25 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	671.825.000	5.579.666.378	8.547.550.378	2.967.884.000	53 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	671.825.000	5.579.666.378	8.547.550.378	2.967.884.000	53 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.650.525.278	4.387.727.678	737.202.400	20 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	115.350.000	200.778.700	2.534.168.200	2.333.389.500	1.162 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	185.350.000	1.241.286.500	1.190.583.800	(50.702.700)	4 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	104.200.000	80.649.300	112.049.300	31.400.000	39 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	173.200.000	182.929.400	82.729.200	(100.200.200)	55 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	93.725.000	223.497.200	240.292.200	16.795.000	8 %

Bupati Tapin



M. Arifin Appan

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan	272.432.984.888	276.167.984.888	276.777.984.888
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	272.432.984.888	276.167.984.888	276.777.984.888
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	272.432.984.888	276.167.984.888	276.777.984.888
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.912.084.343	219.775.912.613	219.775.920.153
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.382.400	45.395.000	45.395.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	15.000.000	15.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.882.400	2.882.400	2.882.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	27.512.600	27.512.600
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	215.130.033.143	215.130.033.213	215.130.054.153
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.122.533.143	215.122.533.213	215.122.554.153
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.745.000	4.745.000	4.745.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.755.000	2.755.000	2.755.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.571.900	1.453.087.500	1.418.149.500
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.904.200	12.904.200	12.904.200
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.418.500	231.221.700	231.221.700
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.540.000	232.540.000	232.540.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.264.100	48.264.100	48.264.100
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.224.500	3.224.500	3.224.500
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.150.220.600	924.933.000	889.995.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	39.100.000	39.100.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	39.100.000	39.100.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.922.230.300	2.988.430.300	2.988.430.300
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.744.000	141.744.000	141.744.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.917.400	31.917.400	31.917.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.748.568.900	2.814.768.900	2.814.768.900
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.866.600	119.866.600	154.791.200
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.513.600	86.513.600	121.438.200
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.353.000	33.353.000	33.353.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.285.220.545	56.126.392.275	56.736.384.735
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.064.875.339	34.237.882.854	34.697.876.414

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.097.100	449.172.000	449.172.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	221.404.320	221.404.320	221.404.320
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	249.678.500	249.678.500	249.678.500
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.135.869.462	6.606.071.594	6.916.065.354
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.628.073.640	2.046.814.123	2.046.814.123
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.214.800	225.214.800	225.214.800
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	875.474.860	875.474.860	875.474.860
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	149.999.800
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.500.362.968	5.500.362.968	5.500.362.968
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	200.000.000	220.000.000	220.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.199.000	33.189.000	33.189.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	16.800.900	16.800.900	16.800.900
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.499.900	22.499.900	22.499.900
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.476.199.889	17.476.199.889	17.476.199.889
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.000.000	95.000.000	95.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.270.146.211	10.117.129.156	10.117.129.156
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.080.713.800	1.080.713.800	1.080.713.800
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	493.296.000	493.296.000	493.296.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	514.430.200	514.430.200	514.430.200
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	1.835.190.000	1.835.190.000	1.835.190.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	364.117.400	1.181.100.245	1.181.100.245
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	205.601.000	205.601.000	205.601.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	0	40.000.000	40.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.738.300	54.738.300	54.738.300
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45.259.400	4.000.000	4.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0	31.259.500	31.259.500
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.676.800.111	4.676.800.111	4.676.800.111
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.651.471.595	9.468.090.965	9.618.089.865
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.341.448.700	1.341.448.700	1.341.448.700
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.690.135.760	1.890.124.530	2.040.123.430
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	93.919.700	93.919.700	93.919.700
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	175.000.000	175.000.000	175.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.206.000.000	1.809.000.000	1.809.000.000
1.01.000.000.01.0000	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.174.000	133.956.100	133.956.100

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	251.793.435	186.641.935	186.641.935
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.813.000.000	3.813.000.000	3.813.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.000.000	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.298.727.400	2.303.289.300	2.303.289.300
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	20.000.000	20.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	217.632.000	217.089.300	217.089.300
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.095.400	30.095.400	30.095.400
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.200.000	29.304.600	29.304.600
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.006.800.000	2.006.800.000	2.006.800.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	235.680.000	265.680.000	265.680.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	235.680.000	265.680.000	265.680.000
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	235.680.000	265.680.000	265.680.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	223.562.413.582	228.400.723.557	251.909.318.181
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.562.413.582	228.400.723.557	251.909.318.181
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	223.562.413.582	228.400.723.557	251.909.318.181
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.650.894.555	100.942.314.625	101.134.600.475
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.974.900	35.474.800	35.474.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.974.900	35.474.800	35.474.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.748.734.955	98.098.735.025	98.098.877.625
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.734.754.955	98.084.755.025	98.084.897.625
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.850.000	2.850.000	2.850.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.130.000	11.130.000	11.130.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.057.511.300	2.008.921.600	2.190.868.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.059.200	159.398.200	157.954.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.674.900	45.794.900	45.794.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.083.400	39.627.500	22.127.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	1.987.800	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.821.706.000	1.764.101.000	1.964.992.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.361.000	184.461.000	184.461.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.361.000	184.461.000	184.461.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.053.400	444.618.400	451.818.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.128.400	201.128.400	201.128.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.925.000	243.490.000	250.690.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.259.000	170.103.800	173.100.050

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.959.000	129.553.800	132.550.050
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.300.000	40.550.000	40.550.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	116.133.661.327	120.674.551.232	144.026.805.006
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.104.288.424	33.508.592.799	33.578.592.799
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	1.305.143.375	1.599.147.750	1.669.147.750
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	678.000.000	678.000.000	678.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	1.796.436.000	1.906.736.000	1.906.736.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.096.007.400	25.096.007.400	25.096.007.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.819.890.749	2.819.890.749	2.819.890.749
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.318.810.900	1.318.810.900	1.318.810.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.014.147.003	87.150.732.533	110.432.986.307
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	122.496.400	122.496.400	107.706.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	165.826.600	165.826.600	163.726.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.840.000	26.840.000	26.840.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.530.000	11.530.000	11.530.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	105.429.200	105.429.200	105.429.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	160.415.000	160.415.000	160.415.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.812.200	39.812.200	39.812.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24.700.000	24.700.000	24.700.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	24.700.000	24.700.000	24.700.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	53.200.000	53.200.000	53.200.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	91.333.200	91.333.200	91.333.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	83.139.300	83.139.300	83.139.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	127.020.000	127.020.000	127.020.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.019.969.700	1.019.969.700	1.197.931.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	66.265.000	66.265.000	40.140.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	191.374.900	230.374.900	224.149.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	71.420.000	71.400.000	71.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96.242.400	96.242.400	96.242.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20.800.000	20.800.000	20.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	41.075.000	41.075.000	41.075.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	93.777.000	93.777.000	93.777.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	398.279.200	683.179.200	683.179.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.959.721.613	27.036.527.143	26.911.757.143
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	25.750.000	25.750.000	25.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.010.000	75.010.000	75.010.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79.000.000	79.000.000	79.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	53.100.000.000	53.125.000.000	75.719.317.624

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.677.835.490	2.688.735.490	3.192.720.240
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	811.184.800	511.184.800	691.184.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	15.225.900	15.225.900	15.225.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.225.900	15.225.900	15.225.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.149.023.200	6.155.023.200	6.164.023.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.984.384.000	5.990.384.000	5.999.384.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	5.984.384.000	5.990.384.000	5.999.384.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.639.200	164.639.200	164.639.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.639.200	164.639.200	164.639.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	32.350.000	32.350.000	32.350.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	32.350.000	32.350.000	32.350.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	32.350.000	32.350.000	32.350.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	596.484.500	596.484.500	551.539.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.387.200	400.387.200	355.442.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	400.387.200	400.387.200	355.442.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.097.300	196.097.300	196.097.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	196.097.300	196.097.300	196.097.300
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	50.000.000	0	0
1.02.0.00.0.00.03.0000						Puskesmas Tapin Utara	1.070.028.500	1.070.028.500	1.073.124.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.070.028.500	1.070.028.500	1.073.124.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.070.028.500	1.070.028.500	1.073.124.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	998.028.500	998.028.500	1.001.124.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	998.028.500	998.028.500	1.001.124.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.150.000	71.150.000	71.150.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.630.000	14.630.000	14.630.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.300.000	14.300.000	14.300.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.700.000	113.700.000	113.700.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.638.500	80.638.500	80.638.500
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.275.000	7.275.000	7.275.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	121.500.000	121.500.000	56.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.465.000	13.465.000	82.061.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.250.000	29.250.000	29.250.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.270.000	60.270.000	60.270.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120.725.000	120.725.000	120.725.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.295.000	9.295.000	9.295.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	341.830.000	341.830.000	341.830.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.04.0000						Puskesmas Bakarangan	742.020.000	742.020.000	838.213.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	742.020.000	742.020.000	838.213.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	742.020.000	742.020.000	838.213.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	698.820.000	698.820.000	795.013.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	698.820.000	698.820.000	795.013.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.700.000	74.700.000	74.700.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.100.000	17.100.000	17.100.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000	12.600.000	12.600.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	176.950.000	176.950.000	176.950.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.700.000	20.700.000	20.700.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.100.000	22.100.000	22.100.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.515.000	5.515.000	5.515.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	31.650.000	31.650.000	31.650.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36.850.000	36.850.000	36.850.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	35.700.000	35.700.000	35.700.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.010.000	14.010.000	110.203.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.320.000	29.320.000	29.320.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.510.000	21.510.000	21.510.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	87.765.000	87.765.000	87.765.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.250.000	2.250.000	2.250.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.100.000	110.100.000	110.100.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	43.200.000	43.200.000	43.200.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	43.200.000	43.200.000	43.200.000
1.02.0.00.0.00.04.0000	1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	43.200.000	43.200.000	43.200.000
1.02.0.00.0.00.05.0000					Puskesmas Banua Padang	628.790.000	628.790.000	686.597.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	628.790.000	628.790.000	686.597.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	628.790.000	628.790.000	686.597.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	567.590.000	567.590.000	625.397.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	567.590.000	567.590.000	625.397.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.550.000	38.550.000	38.550.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.300.000	3.300.000	3.300.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	94.800.000	94.800.000	94.800.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.800.000	7.800.000	7.800.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	43.720.000	43.720.000	43.720.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.300.000	36.300.000	36.300.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.525.000	10.525.000	10.525.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	6.600.000	6.600.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.750.000	15.750.000	73.557.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.250.000	18.250.000	18.250.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.860.000	30.860.000	30.860.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.900.000	19.900.000	19.900.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.220.000	2.220.000	2.220.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	89.640.000	89.640.000	89.640.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.875.000	141.875.000	141.875.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.05.0000	1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.06.0000					Puskesmas Tambaruntung	714.050.000	714.050.000	824.163.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	714.050.000	714.050.000	824.163.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	714.050.000	714.050.000	824.163.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	634.850.000	634.850.000	744.963.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	634.850.000	634.850.000	744.963.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.265.000	87.265.000	87.265.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.420.000	2.420.000	2.420.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.400.000	8.400.000	8.400.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.100.000	26.100.000	26.100.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.150.000	10.150.000	10.150.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	94.800.000	94.800.000	94.800.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.170.000	32.170.000	142.283.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.925.000	13.925.000	13.925.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.375.000	8.375.000	8.375.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	56.305.000	56.305.000	56.305.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	10.060.000	10.060.000	10.060.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	284.880.000	284.880.000	284.880.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79.200.000	79.200.000	79.200.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	79.200.000	79.200.000	79.200.000
1.02.0.00.0.00.06.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	79.200.000	79.200.000	79.200.000
1.02.0.00.0.00.07.0000						Puskesmas Pandahan	605.616.000	605.616.000	555.216.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	605.616.000	605.616.000	555.216.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	605.616.000	605.616.000	555.216.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	544.416.000	544.416.000	494.016.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	544.416.000	544.416.000	494.016.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.246.100	59.246.100	59.246.100
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.690.000	21.690.000	21.690.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.352.000	31.352.000	31.352.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	52.500.000	52.500.000	52.500.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	76.200.000	76.200.000	25.800.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.741.600	56.741.600	56.741.600
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.990.000	7.990.000	7.990.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.746.700	15.746.700	15.746.700
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.274.600	45.274.600	45.274.600
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159.075.000	159.075.000	159.075.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.07.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	61.200.000	61.200.000	61.200.000
1.02.0.00.0.00.08.0000						Puskesmas Lokpaikat	700.336.515	700.336.515	631.621.515

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian				Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.08.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	700.336.515	700.336.515	631.621.515
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	700.336.515	700.336.515	631.621.515
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.336.515	664.336.515	595.621.515
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.336.515	664.336.515	595.621.515
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.570.000	63.570.000	63.570.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.425.000	21.425.000	21.425.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32.700.000	32.700.000	32.700.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.140.000	25.140.000	25.140.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.031.515	21.031.515	21.031.515
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.800.000	19.800.000	23.100.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.900.000	3.900.000	3.900.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	129.875.000	129.875.000	20.600.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.600.000	30.600.000	30.600.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.250.000	12.250.000	12.250.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62.100.000	62.100.000	62.100.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	43.690.000	43.690.000	72.150.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.655.000	3.655.000	3.655.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	194.600.000	194.600.000	203.400.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.08.0000	1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.09.0000					Puskesmas Tambarangan	833.235.000	833.235.000	816.522.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	833.235.000	833.235.000	816.522.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	833.235.000	833.235.000	816.522.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761.235.000	761.235.000	744.522.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	761.235.000	761.235.000	744.522.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.655.000	77.655.000	78.398.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.210.000	1.210.000	1.210.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.475.000	26.475.000	26.475.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.340.000	10.340.000	27.840.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	57.845.000	57.845.000	57.845.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48.600.000	48.600.000	60.100.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000	9.600.000	9.600.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	176.400.000	176.400.000	44.900.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47.780.000	47.780.000	102.032.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.690.000	9.690.000	28.440.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.010.000	27.010.000	27.010.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	129.880.000	129.880.000	139.975.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.550.000	124.550.000	126.497.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.09.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.10.0000						Puskesmas Salam Babaris	652.635.900	652.635.900	652.635.900
1.02.0.00.0.00.10.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	652.635.900	652.635.900	652.635.900
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	652.635.900	652.635.900	652.635.900
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	598.635.900	598.635.900	598.635.900
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	598.635.900	598.635.900	598.635.900
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.840.000	12.840.000	12.840.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.280.100	16.280.100	16.280.100
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.840.000	24.840.000	24.840.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000	13.200.000	13.200.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.250.000	20.250.000	20.250.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.935.000	24.935.000	24.935.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.500.000	46.500.000	46.500.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.200.000	10.200.000	10.200.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.600.000	9.600.000	9.600.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	119.800.000	119.800.000	119.800.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.950.800	52.950.800	52.950.800
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.550.000	10.550.000	10.550.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.500.000	15.500.000	15.500.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92.900.000	92.900.000	92.900.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.320.000	6.320.000	6.320.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.150.000	24.150.000	24.150.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90.320.000	90.320.000	90.320.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.10.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.11.0000						Puskesmas Piani	565.245.000	565.245.000	583.698.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	565.245.000	565.245.000	583.698.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian				Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02				565.245.000	565.245.000	583.698.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02			493.245.000	493.245.000	511.698.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02		493.245.000	493.245.000	511.698.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	01	18.940.000	18.940.000	18.940.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	02	2.320.000	2.320.000	2.320.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	04	19.610.000	19.610.000	40.710.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	06	34.850.000	34.850.000	34.850.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	10	4.200.000	4.200.000	4.200.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	12	7.995.000	7.995.000	7.995.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	13	156.200.000	156.200.000	65.150.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	15	15.980.000	15.980.000	91.373.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	16	19.200.000	19.200.000	19.200.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	17	18.110.000	18.110.000	18.190.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	18	37.460.000	37.460.000	37.460.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	19	6.225.000	6.225.000	6.225.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	20	10.145.000	10.145.000	10.145.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	25	142.010.000	142.010.000	154.940.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	02	2.02	33	0	0	0
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	03			72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	03	2.02		72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.11.0000	1	02	03	2.02	02	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.12.0000						942.785.000	942.785.000	886.910.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1					942.785.000	942.785.000	886.910.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02				942.785.000	942.785.000	886.910.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02			870.785.000	870.785.000	814.910.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02		870.785.000	870.785.000	814.910.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	01	103.200.000	103.200.000	103.200.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	02	19.100.000	19.100.000	19.100.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	03	9.680.000	9.680.000	9.680.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	04	19.800.000	19.800.000	19.800.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	05	38.980.000	38.980.000	38.980.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	06	39.570.000	39.570.000	39.570.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	07	14.820.000	14.820.000	14.820.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	10	40.400.000	40.400.000	40.400.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	11	23.100.000	23.100.000	23.100.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	13	106.800.000	106.800.000	50.925.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	15	64.960.000	64.960.000	64.960.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.125.000	21.125.000	21.125.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.005.000	11.005.000	11.005.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	39.805.000	39.805.000	39.805.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	35.530.000	35.530.000	35.530.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	74.755.000	74.755.000	74.755.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	208.155.000	208.155.000	208.155.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.12.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	72.000.000	72.000.000	72.000.000
1.02.0.00.0.00.13.0000						Puskesmas Hatungun	639.440.000	639.440.000	678.047.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	639.440.000	639.440.000	678.047.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	639.440.000	639.440.000	678.047.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	585.440.000	585.440.000	624.047.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	585.440.000	585.440.000	624.047.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.360.000	46.360.000	46.360.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.850.000	8.850.000	8.850.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.100.000	23.100.000	23.100.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	65.550.000	65.550.000	65.550.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.950.000	22.950.000	22.950.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.340.000	11.340.000	11.340.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.925.000	4.925.000	4.925.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	600.000	600.000	600.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.850.000	3.850.000	3.850.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.350.000	2.350.000	2.350.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	118.110.000	118.110.000	118.110.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.400.000	20.400.000	59.007.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.960.000	36.960.000	36.960.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.150.000	9.150.000	9.150.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	51.920.000	51.920.000	51.920.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.850.000	6.850.000	6.850.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.175.000	152.175.000	152.175.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.13.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.14.0000						Puskesmas Baringin	867.008.800	867.008.800	849.965.800
1.02.0.00.0.00.14.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	867.008.800	867.008.800	849.965.800

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian				Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	867.008.800	867.008.800	849.965.800
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	831.008.800	831.008.800	813.965.800
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.008.800	831.008.800	813.965.800
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.061.200	75.061.200	75.061.200
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.600.000	39.600.000	39.600.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80.250.000	80.250.000	80.250.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.900.000	27.900.000	27.900.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.300.000	30.300.000	30.300.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	58.367.600	58.367.600	58.367.600
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.600.000	6.600.000	6.600.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.900.000	9.900.000	9.900.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	90.900.000	90.900.000	23.250.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.450.000	105.450.000	156.057.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.950.000	18.950.000	18.950.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.500.000	19.500.000	19.500.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.330.000	13.330.000	13.330.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	241.500.000	241.500.000	241.500.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.14.0000	1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.000.000	36.000.000	36.000.000
1.02.0.00.0.00.15.0000					Puskesmas Margasari	779.539.500	779.539.500	715.939.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	779.539.500	779.539.500	715.939.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	779.539.500	779.539.500	715.939.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	725.539.500	725.539.500	661.939.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	725.539.500	725.539.500	661.939.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92.490.000	92.490.000	92.490.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.240.000	36.240.000	36.240.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.335.000	34.335.000	34.335.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.295.000	10.295.000	10.295.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.627.500	3.627.500	3.627.500
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	0	0
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	78.550.000	78.550.000	78.550.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000	5.400.000	5.400.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.005.000	15.005.000	15.005.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.220.000	8.220.000	8.220.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	107.250.000	107.250.000	42.450.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.815.000	117.815.000	117.815.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.845.000	21.845.000	21.845.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.500.000	10.500.000	10.500.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.937.000	35.937.000	35.937.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.550.000	6.550.000	6.550.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.480.000	141.480.000	142.680.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.15.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.889.381.204	535.572.737.276	548.799.919.355
1.03.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	487.889.381.204	535.572.737.276	548.799.919.355
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	487.889.381.204	535.572.737.276	548.799.919.355
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.576.447.046	15.601.431.446	16.254.151.646
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.460.000	560.460.000	560.460.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560.460.000	560.460.000	560.460.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.912.497.233	11.912.497.233	11.912.497.533
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.894.287.233	11.894.287.233	11.894.287.533
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.700.000	11.700.000	11.700.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.510.000	6.510.000	6.510.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.596.200	1.440.930.600	2.052.940.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.038.600	200.038.600	200.038.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.783.000	63.783.000	66.387.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.496.100	58.069.100	68.114.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.495.000	10.495.000	10.495.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	213.598.500	223.359.900	266.189.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.020.000	9.020.000	9.020.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	876.165.000	876.165.000	1.432.696.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.192.200	305.242.200	325.539.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	68.377.000	68.377.000	68.377.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.815.200	236.865.200	257.162.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.525.713	796.348.013	816.518.813
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	11.600.000	23.200.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.807.805	378.126.000	386.696.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.117.908	406.622.013	406.622.013
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.175.700	585.953.400	586.195.400

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.374.600	476.374.600	476.616.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.801.100	109.578.800	109.578.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	61.585.331.000	69.235.346.600	85.335.346.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.875.000.000	57.275.000.000	73.375.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	27.825.000.000	24.025.000.000	23.925.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	5.075.000.000	5.075.000.000	5.075.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	15.975.000.000	28.175.000.000	44.375.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.710.331.000	11.960.346.600	11.960.346.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.850.000.000	4.050.000.000	4.050.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.935.331.000	4.935.331.000	4.935.331.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.925.000.000	2.975.015.600	2.975.015.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.237.272.000	17.962.272.000	17.947.272.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.237.272.000	17.962.272.000	17.947.272.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1.105.000.000	1.550.000.000	1.465.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.306.009.000	3.806.009.000	3.606.009.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.826.263.000	12.606.263.000	12.876.263.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.064.000.000	2.064.000.000	1.453.800.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.064.000.000	2.064.000.000	1.453.800.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	455.000.000	455.000.000	455.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.609.000.000	1.609.000.000	998.800.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.418.429.000	7.348.429.000	7.778.429.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.418.429.000	7.348.429.000	7.778.429.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	410.000.000	340.000.000	370.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.083.429.000	5.083.429.000	5.083.429.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.925.000.000	1.925.000.000	2.325.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	140.163.275.000	148.406.754.609	149.361.954.609
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	140.163.275.000	148.406.754.609	149.361.954.609
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	995.482.900	995.482.900	995.482.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	136.592.792.100	144.616.271.709	145.571.471.709
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.575.000.000	2.795.000.000	2.795.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.820.000.000	4.480.000.000	4.220.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.820.000.000	4.480.000.000	4.220.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	620.000.000	680.000.000	620.000.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.200.000.000	3.800.000.000	3.600.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	238.120.299.958	267.570.176.421	263.270.176.509
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	238.120.299.958	267.570.176.421	263.270.176.509
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.650.000.000	4.150.000.000	4.650.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	20.925.084.500	20.925.084.500	20.925.084.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.736.945.600	1.736.945.600	1.736.945.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	76.273.212.358	39.513.840.000	39.513.840.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0	0	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	90.200.000.000	108.650.000.000	107.950.000.088
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	1.600.000.000	45.810.000.000	41.587.182.079
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.021.795.500	2.671.044.321	2.843.862.242
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	37.900.000.000	39.800.000.000	39.800.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	0	0	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11.959.000	11.959.000	11.959.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.401.303.000	3.901.303.000	3.851.303.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	285.221.000	285.221.000	285.211.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	120.561.000	120.551.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.561.000	120.561.000	120.551.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	164.660.000	164.660.000	164.660.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	164.660.000	164.660.000	164.660.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.619.106.200	2.619.106.200	2.893.577.191
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	823.931.000	802.969.500	809.169.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	823.931.000	802.969.500	809.169.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	365.016.000	365.475.000	714.809.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	365.016.000	365.475.000	714.809.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	754.683.800	806.024.300	804.434.700
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	646.170.000	646.170.000	652.170.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	108.513.800	159.854.300	152.264.700
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	675.475.400	644.637.400	565.163.991
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	675.475.400	644.637.400	565.163.991
1.04.2.10.0.00.01.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	83.811.139.676	45.836.139.676	35.902.305.877
1.04.2.10.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.465.803.983	39.495.991.676	30.939.750.877
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.465.803.983	39.495.991.676	30.939.750.877
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.789.724.183	7.010.341.076	5.799.620.876
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.105.000	10.105.000	10.105.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000	2.365.000	2.365.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.160.000	2.160.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000	1.080.000	1.080.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.874.086.584	2.890.412.377	2.890.412.377
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.066.584	2.886.392.377	2.886.392.377
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.010.000	2.010.000	2.010.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.000	2.010.000	2.010.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.779.320.900	2.843.092.000	1.820.461.800
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.289.800	1.211.359.900	338.729.700
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.136.700	201.943.700	201.943.700
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.762.400	71.362.400	71.362.400
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	13.435.000	13.435.000	13.435.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000	2.750.000	2.750.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.280.947.000	1.342.241.000	1.192.241.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.352.199	396.352.199	408.352.199
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.400.000	46.400.000	46.400.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.098.000	85.098.000	85.098.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199	264.854.199	276.854.199
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.859.500	870.379.500	670.289.500
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000	41.490.000	41.490.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.320.000	202.820.000	202.820.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.500	42.739.500	42.739.500
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000	48.550.000	48.550.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396.760.000	534.780.000	334.690.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.100.975.000	4.297.835.000	725.540.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	121.860.000	217.790.000	217.790.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000	191.860.000	191.860.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	0	0	0
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.930.000	25.930.000	25.930.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.900.000	30.900.000	30.900.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30.900.000	30.900.000	30.900.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.948.215.000	4.049.145.000	476.850.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.850.000	476.850.000	476.850.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.471.365.000	3.572.295.000	0

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	477.810.000	1.165.360.000	885.160.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	187.410.000	187.410.000	187.410.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	187.410.000	187.410.000	187.410.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	290.400.000	977.950.000	697.750.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	254.600.000	960.900.000	689.100.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000	17.050.000	8.650.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	555.400.000	6.085.680.000	4.675.895.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	555.400.000	6.085.680.000	4.675.895.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	01 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	505.950.000	5.961.500.000	3.103.700.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	02 Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	49.450.000	124.180.000	1.572.195.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.541.894.800	20.936.775.600	18.853.535.001
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	13.541.894.800	20.936.775.600	18.853.535.001
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.860.000	101.860.000	101.860.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	13.389.104.800	20.783.985.600	18.700.745.001
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000	50.930.000	50.930.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	59.345.335.693	6.340.148.000	4.962.555.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	59.345.335.693	6.340.148.000	4.962.555.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	166.636.000	253.825.000	253.825.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.636.000	253.825.000	253.825.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	04	2.01	02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	166.636.000	253.825.000	253.825.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	58.770.584.693	5.694.557.000	4.121.400.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.770.584.693	5.694.557.000	4.121.400.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	05	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.770.584.693	5.694.557.000	4.121.400.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	408.115.000	391.766.000	587.330.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	408.115.000	391.766.000	587.330.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	10	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	343.050.000	260.050.000	436.650.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	10	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	65.065.000	131.716.000	150.680.000
1.05.0.00.0.00.01.0000					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	12.032.956.552	12.407.956.552	12.379.723.405
1.05.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.032.956.552	12.407.956.552	12.379.723.405
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.032.956.552	12.407.956.552	12.379.723.405
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.310.180.452	8.397.756.452	8.433.823.305

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.075.000	25.141.000	25.141.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.075.000	25.141.000	25.141.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.242.013.152	6.255.138.152	6.255.139.855
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.224.430.952	6.224.430.952	6.224.432.655
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.212.000	15.884.000	15.884.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.370.200	14.823.200	14.823.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.587.713	1.181.707.500	1.165.660.300
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.515.600	14.500.000	14.500.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.867.800	49.667.800	49.667.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.797.300	198.785.300	198.785.300
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.191.200	25.520.200	25.813.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	15.890.000	15.865.200	15.865.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	773.325.813	877.369.000	861.029.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.773.300	409.007.600	452.521.600
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	27.406.800	32.940.400
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.697.200	332.654.600	359.975.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.076.100	48.946.200	59.606.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.183.487	105.917.600	114.517.600
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.678.087	24.379.200	24.379.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.505.400	81.538.400	90.138.400
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.547.800	420.844.600	420.842.950
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	531.058.200	375.355.000	375.353.350
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.689.600	30.689.600	30.689.600
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	14.800.000	14.800.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.159.074.000	3.402.069.000	3.337.769.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.026.974.000	3.269.969.000	3.205.669.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.651.404.000	2.886.499.000	2.822.199.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	22.500.000	22.500.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	336.470.000	329.370.000	329.370.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.600.000	8.600.000	8.600.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	15.000.000	15.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	132.100.000	132.100.000	132.100.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.800.000	31.800.000	31.800.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	32.650.000	32.650.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	67.650.000	67.650.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	563.702.100	608.131.100	608.131.100
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	510.702.100	578.631.100	578.631.100
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	394.646.000	390.300.000	390.300.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	28.000.100	28.000.100
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	8.400.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	70.656.000	142.931.000	142.931.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.000.000	29.500.000	29.500.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	53.000.000	29.500.000	29.500.000
1.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.562.126.183	5.337.126.183	5.270.302.683
1.05.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.562.126.183	5.337.126.183	5.270.302.683
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.562.126.183	5.337.126.183	5.270.302.683
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.820.490.155	4.795.491.755	4.528.668.455
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.930.300	2.930.300	2.930.300
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.930.300	2.930.300	2.930.300
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.082.355	2.829.227.155	2.829.227.355
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.216.655	2.825.361.455	2.825.361.655
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.900	1.040.900	1.040.900
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.824.800	2.824.800	2.824.800
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.202.900	667.744.000	667.744.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.428.200	22.219.300	22.219.300
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.148.500	36.148.500	36.148.500
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.500.000	28.500.000	28.500.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	6.086.200	6.086.200	6.086.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.995.000	5.995.000	5.995.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.045.000	498.795.000	498.795.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	527.262.800	554.718.500	273.495.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.609.500	281.223.500	0
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.538.300	258.380.000	258.380.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.115.000	15.115.000	15.115.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.260.400	575.260.400	589.660.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.366.400	2.366.400	2.366.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.194.000	73.194.000	73.194.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.700.000	499.700.000	514.100.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.751.400	165.611.400	165.611.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.191.200	136.031.200	136.031.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.560.200	29.580.200	29.580.200
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	741.636.028	541.634.428	741.634.228
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	39.649.900	39.649.900	39.649.900
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	39.649.900	39.649.900	39.649.900
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	653.676.628	453.675.028	653.674.828
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	213.018.000	13.018.000	213.017.800
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	333.689.000	333.689.000	333.689.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	56.039.628	56.039.628	56.039.628
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.160.000	24.160.000	24.160.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26.770.000	26.768.400	26.768.400
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	48.309.500	48.309.500	48.309.500
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	48.309.500	48.309.500	48.309.500
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	17.453.298.194	17.428.298.194	19.678.585.487
1.06.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.453.298.194	17.428.298.194	19.678.585.487
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.453.298.194	17.428.298.194	19.678.585.487
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.329.147.794	5.394.345.194	5.517.772.987
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.988.600	12.988.600	12.988.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.988.600	12.988.600	12.988.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.209.594	3.238.212.294	3.238.250.287
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.269.594	3.232.272.294	3.232.310.287
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.970.000	2.970.000	2.970.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.970.000	2.970.000	2.970.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.192.161.900	1.190.282.000	1.251.107.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.683.000	12.933.000	12.933.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.299.700	120.385.700	122.805.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.323.600	83.323.600	83.323.600

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.259.200	18.259.200	18.509.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.112.500	3.112.500	3.112.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	48.365.000	48.365.000	30.365.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	896.118.900	903.903.000	980.059.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.446.000	481.415.400	536.215.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.885.000	73.585.000	73.585.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.630.400	139.330.300	139.330.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.930.600	268.500.100	323.300.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.630.500	271.730.500	271.730.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000	580.000	580.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.632.000	129.132.000	129.132.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.418.500	142.018.500	142.018.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.711.200	199.716.400	207.480.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.560.300	138.565.500	146.329.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	14.200.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.950.900	46.950.900	46.950.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.192.160.700	1.058.463.200	1.058.463.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.192.160.700	1.058.463.200	1.058.463.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	61.330.000	61.330.000	61.330.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.045.000	156.045.000	156.045.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	938.500.700	804.803.200	804.803.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	36.285.000	36.285.000	36.285.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.108.610.300	5.151.451.400	4.981.051.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.073.370.300	5.116.211.400	4.945.811.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	4.887.015.000	4.887.015.000	4.716.615.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	13.500.000	28.125.000	28.125.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	27.068.000	30.898.100	30.898.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	23.000.000	21.120.000	21.120.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.327.300	86.677.300	86.677.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.000.000	9.000.000	9.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15.460.000	8.696.000	8.696.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	8.000.000	8.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.000.000	12.000.000	12.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	9.000.000	9.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	6.000.000	15.680.000	15.680.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	35.240.000	35.240.000	35.240.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.240.000	7.240.000	7.240.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.000.000	14.000.000	14.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.817.543.800	1.817.738.800	4.274.222.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	31.780.000	31.975.000	31.975.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.01	01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	27.150.000	27.345.000	27.345.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.01	02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.630.000	4.630.000	4.630.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.785.763.800	1.785.763.800	4.242.247.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	792.576.600	792.576.600	811.586.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	306.370.000	306.370.000	294.270.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	237.358.200	237.358.200	2.686.931.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	449.459.000	449.459.000	449.459.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.958.290.500	3.958.754.500	3.799.530.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.718.914.100	3.719.378.100	3.560.154.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	01 Penyediaan Makanan	202.100.000	202.564.000	80.840.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	02 Penyediaan Sandang	218.050.000	218.050.000	180.550.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.298.764.100	3.298.764.100	3.298.764.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	239.376.400	239.376.400	239.376.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02	01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15.456.400	15.456.400	15.456.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02	02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	223.920.000	223.920.000	223.920.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.545.100	47.545.100	47.545.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	47.545.100	47.545.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	47.545.100	47.545.100
2.07.0.00.0.00.01.0000					Dinas Tenaga Kerja	6.059.192.195	7.102.432.195	7.684.999.005
2.07.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.059.192.195	7.102.432.195	7.684.999.005
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.059.192.195	7.102.432.195	7.684.999.005
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.812.694.591	4.828.246.151	4.812.312.965
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000	18.555.400	18.590.500
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.000.000	18.555.400	18.590.500
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.020.021	3.188.020.101	3.188.018.915
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.184.970.021	3.184.970.101	3.184.968.915
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.050.000	3.050.000	3.050.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.056.170	971.194.550	968.344.550
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000	204.399.550	204.399.550
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.325.270	136.758.000	136.758.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.700.000	13.700.000	13.700.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.030.900	616.337.000	613.487.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.000.000	226.036.700	227.051.600
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.000.000	226.036.700	227.051.600
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.598.400	125.399.400	111.267.400
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.798.400	73.799.400	68.667.400
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.800.000	51.600.000	42.600.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.020.000	299.040.000	299.040.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.520.000	62.520.000	62.520.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	223.020.000	223.020.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	264.014.104	264.914.104	264.914.100
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	251.942.604	252.842.604	252.842.600
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	251.942.604	252.842.604	252.842.600
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500	12.071.500	12.071.500
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	03	2.02	01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.071.500	12.071.500	12.071.500
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	596.377.400	1.623.257.900	2.221.757.900
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	92.776.200	1.133.596.200	1.732.096.200
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	9.942.200	9.942.200	9.942.200
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18.182.000	18.182.000	18.182.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	05 Perluasan Kesempatan Kerja	64.652.000	1.105.472.000	1.703.972.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	120.530.900	98.930.900	98.930.900
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.03	02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	120.530.900	98.930.900	98.930.900
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	383.070.300	390.730.800	390.730.800
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.04	01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	357.620.500	365.281.000	365.281.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	2.04	02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	25.449.800	25.449.800	25.449.800
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	386.106.100	386.014.040	386.014.040
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.984.000	229.891.940	229.891.940
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.400.000	5.400.000	5.400.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	224.584.000	224.491.940	224.491.940
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	156.122.100	156.122.100	156.122.100
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.491.400	83.491.400	83.491.400
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.630.700	72.630.700	72.630.700
2.08.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.804.655.761	8.577.621.761	9.217.682.107
2.08.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.804.655.761	8.577.621.761	9.217.682.107
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.804.655.761	8.577.621.761	9.217.682.107

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.596.521.881	6.506.081.781	7.064.663.827
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.886.900	10.027.900	10.027.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.886.900	10.027.900	10.027.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.596.833.469	2.596.906.745	2.597.055.441
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.586.825.369	2.586.898.645	2.587.047.341
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.300	5.000.300	5.000.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.007.800	5.007.800	5.007.800
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.976.998.124	2.946.356.424	3.508.772.624
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.608.224	5.584.124	5.584.124
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.657.400	58.657.400	56.286.600
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.308.300	73.003.300	73.003.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.623.700	12.623.700	12.623.700
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	2.237.900	2.237.900	2.237.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.810.812.600	2.791.500.000	3.356.287.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.655.250	181.572.450	174.206.450
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.614.000	95.614.000	88.248.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.041.250	85.958.450	85.958.450
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.107.500	192.553.100	193.017.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000	1.160.000	1.624.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.010.700	43.456.300	43.456.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.936.800	147.936.800	147.936.800
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.040.638	578.665.162	581.584.312
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.328.600	95.850.900	105.144.400
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.650.000	8.650.000	8.650.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	473.062.038	474.164.262	467.789.912
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	307.096.780	308.796.780	319.815.280
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.507.000	51.207.000	51.207.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	51.507.000	51.207.000	51.207.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.055.300	30.055.300	30.055.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.055.300	30.055.300	30.055.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.534.480	227.534.480	238.552.980
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.973.100	34.973.100	34.973.100

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.833.600	130.833.600	141.852.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.727.780	61.727.780	61.727.780
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	307.680.000	294.280.000	283.580.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.364.500	67.364.500	56.664.500
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.364.500	67.364.500	56.664.500
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	220.670.700	207.270.700	207.270.700
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.480.000	93.480.000	93.480.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.190.700	113.790.700	113.790.700
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.644.800	19.644.800	19.644.800
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.800	19.644.800	19.644.800
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	493.671.300	470.621.300	477.371.500
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	351.968.400	348.518.400	335.288.400
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.467.300	55.467.300	40.037.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130.679.900	131.079.900	131.079.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	165.821.200	161.971.200	164.171.200
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.702.900	122.102.900	142.083.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.702.900	122.102.900	142.083.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	119.565.900	123.395.700	123.395.700
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.565.900	123.395.700	123.395.700
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.966.000	59.535.800	59.535.800
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	63.599.900	63.859.900	63.859.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	597.802.300	508.941.300	583.350.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.672.500	65.811.500	85.341.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.892.400	59.892.400	59.892.400
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	94.780.100	5.919.100	25.448.600
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	443.129.800	443.129.800	498.009.900

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.087.600	36.087.600	36.087.600
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.618.000	245.618.000	284.570.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.424.200	161.424.200	177.352.200
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	382.317.600	365.504.900	365.504.900
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.628.300	87.148.300	87.148.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84.628.300	87.148.300	87.148.300
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.118.200	176.095.500	176.095.500
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.321.200	12.298.500	12.298.500
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	169.797.000	163.797.000	163.797.000
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.571.100	102.261.100	102.261.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.239.100	87.239.100	87.239.100
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.332.000	15.022.000	15.022.000
2.09.0.00.0.00.01.0000						Dinas Ketahanan Pangan	8.319.982.782	8.294.982.782	8.425.208.411
2.09.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.319.982.782	8.294.982.782	8.425.208.411
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.319.982.782	8.294.982.782	8.425.208.411
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.951.430.974	3.924.544.374	4.105.323.303
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.850.100	61.850.100	61.850.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.850.100	61.850.100	61.850.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.033.378	2.485.632.234	2.486.107.963
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.733.378	2.446.332.234	2.446.807.963
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.300.000	39.300.000	39.300.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.130.422.100	1.096.627.800	1.269.221.800
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.400	9.999.400	9.999.400
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.137.300	152.137.300	108.511.300
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.790.000	92.790.000	92.790.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.400.100	24.400.100	24.400.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.556.000	5.021.000	5.021.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.680.000	11.680.000	11.680.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	785.859.300	800.600.000	1.016.820.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.183.600	108.983.600	108.983.600
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.983.600	40.783.600	40.783.600

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.200.000	68.200.000	68.200.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.941.796	171.450.640	179.159.840
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.770.900	116.770.900	124.480.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	13.200.000	13.200.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.970.896	41.479.740	41.479.740
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.218.330.908	2.219.969.408	2.169.416.108
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	433.955.508	435.668.008	435.668.008
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.650.100	25.650.100	25.650.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	353.485.308	353.485.308	353.485.308
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	26.900.100	26.900.100	26.900.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	11.220.100	12.932.600	12.932.600
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	16.699.900	16.699.900	16.699.900
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.030.494.000	1.030.493.900	998.407.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.030.494.000	1.030.493.900	998.407.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	753.881.400	753.807.500	735.341.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	186.007.700	186.007.700	167.541.200
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	567.873.700	567.799.800	567.799.800
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	74.830.900	75.079.000	75.079.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	53.600.100	53.600.100	53.600.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.600.100	53.600.100	53.600.100
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.230.800	21.478.900	21.478.900
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	21.230.800	21.478.900	21.478.900
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.390.000	75.390.000	75.390.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	75.390.000	75.390.000
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.390.000	75.390.000	75.390.000
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	28.007.003.834	25.082.003.834	26.404.477.432
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.007.003.834	25.082.003.834	26.404.477.432
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.007.003.834	25.082.003.834	26.404.477.432
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.168.450.440	9.022.916.708	8.997.589.806
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.977.300	31.628.100	31.343.700

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.965.000	3.970.100	3.970.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.077.200	26.692.900	26.405.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.100	965.100	968.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.590.211.084	4.590.181.382	4.590.183.630
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.226.184	4.520.196.482	4.520.198.730
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	64.985.100	64.985.100	64.985.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.099.900	3.099.900	3.099.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.899.900	1.899.900	1.899.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.262.038	1.413.881.438	1.417.095.938
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.118.438	25.801.438	25.801.438
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.387.500	160.599.500	166.952.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.421.500	72.924.000	73.287.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.462.200	13.324.100	13.324.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	6.392.200	9.992.200	10.279.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.970.000	4.970.000	4.970.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.510.200	1.126.270.200	1.122.481.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.795.700	256.438.520	243.543.320
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.795.700	256.438.520	243.543.320
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.197.664	234.116.064	247.076.064
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.801.600	94.800.000	94.800.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.396.064	139.316.064	152.276.064
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.155.006.654	2.496.671.204	2.468.347.154
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.981.450	44.484.000	45.618.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.525.362.900	1.750.656.850	1.750.286.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	160.773.900	221.770.150	221.770.150
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.000.000	40.350.000	40.350.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.554.676	150.493.776	150.493.776
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.761.940	183.761.940	184.093.540
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.571.788	105.154.488	75.734.888
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	977.433.200	962.909.300	962.909.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	977.433.200	962.909.300	962.909.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	914.523.900	900.000.000	900.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	62.909.300	62.909.300	62.909.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.906.772.710	2.802.812.854	2.778.155.554
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.524.895.310	2.420.935.454	2.419.424.554
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	146.473.800	146.473.800	146.473.800

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	245.605.200	222.805.200	222.805.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.132.816.310	2.051.656.454	2.050.145.554
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.580.000	164.580.000	164.580.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	164.580.000	164.580.000	164.580.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	217.297.400	217.297.400	194.151.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	60.619.800	60.619.800	60.619.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	156.677.600	156.677.600	133.531.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.498.520.852	2.573.020.828	2.571.478.628
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.498.520.852	2.573.020.828	2.571.478.628
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.498.520.852	2.573.020.828	2.571.478.628
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	393.901.400	424.890.000	424.890.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.397.400	39.306.000	39.306.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.397.400	39.306.000	39.306.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	354.504.000	385.584.000	385.584.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	354.504.000	385.584.000	385.584.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.944.200	9.484.200	9.484.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	9.484.200	9.484.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.200	9.484.200	9.484.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	129.272.100	129.272.100	129.272.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	88.692.200	88.692.200	88.692.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	88.692.200	88.692.200	88.692.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.579.900	40.579.900	40.579.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.579.900	40.579.900	40.579.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52.750.800	52.750.600	52.750.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.750.800	52.750.600	52.750.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.750.800	52.750.600	52.750.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	468.321.600	468.321.516	468.321.516

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.321.600	468.321.516	468.321.516
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	468.321.600	468.321.516	468.321.516
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.419.000	20.479.000	20.479.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41.419.000	20.479.000	20.479.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	41.419.000	20.479.000	20.479.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.340.217.532	8.615.146.728	9.989.146.728
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	8.340.217.532	8.615.146.728	9.989.146.728
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.318.835.100	5.308.830.100	5.308.830.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.975.000	41.975.000	41.975.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	835.038.132	954.972.328	2.328.972.328
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.144.369.300	2.309.369.300	2.309.369.300
2.12.0.00.0.00.01.0000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.262.702.976	8.287.702.976	8.232.354.023
2.12.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.262.702.976	8.287.702.976	8.232.354.023
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.262.702.976	8.287.702.976	8.232.354.023
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.073.962.876	7.098.962.876	7.043.477.123
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.711.800	23.711.800	23.711.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.711.800	23.711.800	23.711.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.217.908.549	3.218.074.049	3.218.087.646
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.215.908.549	3.216.074.049	3.216.087.646
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.824.500	2.001.717.500	2.006.230.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	808.500	808.500	5.189.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.075.500	353.420.500	353.420.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.685.000	140.685.000	145.305.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.798.500	27.233.500	30.582.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	4.075.000	4.075.000	4.075.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.382.000	1.475.495.000	1.467.658.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	949.999.527	1.062.299.527	1.002.299.527
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	766.576.827	764.876.827	704.876.827
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.422.700	297.422.700	297.422.700
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.893.300	455.584.800	455.584.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.000.000	211.000.000	211.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.893.300	244.584.800	244.584.800

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.625.200	337.575.200	337.562.850
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.600.800	54.150.800	54.138.450
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.100.000	23.100.000	23.100.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	365.924.400	260.324.400	260.324.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	239.764.000	239.764.000	239.764.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	230.714.000	230.714.000	230.714.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	230.714.000	230.714.000	230.714.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.050.000	9.050.000	9.050.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	9.050.000	9.050.000	9.050.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	440.706.100	440.706.100	440.706.100
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	440.706.100	440.706.100	440.706.100
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	87.360.300	87.360.300	87.360.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	263.455.200	263.455.200	263.455.200
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	04 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	89.890.600	89.890.600	89.890.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	508.270.000	508.270.000	508.406.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	155.592.500	155.592.500	155.729.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	155.592.500	155.592.500	155.729.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57.750.000	57.750.000	57.750.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.02	01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57.750.000	57.750.000	57.750.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	294.927.500	294.927.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500	294.927.500	294.927.500
2.13.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.973.972.933	49.448.972.933	88.284.943.409
2.13.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.973.972.933	49.448.972.933	88.284.943.409
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49.973.972.933	49.448.972.933	88.284.943.409
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.980.069.821	4.481.783.977	4.969.175.253
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.548.500	7.548.500	7.548.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.548.500	7.548.500	7.548.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.218.521	2.812.534.677	2.813.390.603
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.849.001.221	2.804.317.377	2.805.173.303
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.893.400	2.893.400	2.893.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.323.900	5.323.900	5.323.900
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.544.725.400	1.123.648.400	1.598.533.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.752.600	52.752.600	52.752.600

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.993.400	77.768.400	77.768.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.514.200	24.096.400	24.096.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000	3.797.000	3.797.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.329.465.200	960.234.000	1.435.119.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.213.600	233.878.000	241.244.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.800	205.465.200	212.831.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.212.800	28.412.800	28.412.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.634.000	226.434.000	226.434.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	4.640.000	4.640.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.594.000	60.194.000	60.194.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.400.000	161.600.000	161.600.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.729.800	77.740.400	82.024.550
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.379.800	50.390.400	54.674.550
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000	17.200.000	17.200.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	10.150.000	10.150.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	135.253.000	133.753.000	205.444.900
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	135.253.000	133.753.000	205.444.900
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	135.253.000	133.753.000	205.444.900
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	41.694.763.112	41.694.808.856	80.018.764.656
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitas Kerja sama antar Desa	41.694.763.112	41.694.808.856	80.018.764.656
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	41.694.763.112	41.694.808.856	80.018.764.656
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.033.779.800	2.035.356.900	1.988.288.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.033.779.800	2.035.356.900	1.988.288.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.000	45.133.000	45.133.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75.889.000	75.889.000	75.889.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	65.261.000	65.261.000	34.911.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	209.184.500	209.184.500	209.184.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.336.188.500	1.336.188.500	1.327.128.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	184.399.000	184.399.000	179.750.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24.592.800	24.592.800	13.442.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	93.132.000	94.709.100	102.849.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.130.107.200	1.103.270.200	1.103.270.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.130.107.200	1.103.270.200	1.103.270.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	389.865.100	389.865.100	389.865.100

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	281.800.300	285.698.300	285.698.300
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	234.745.800	204.010.800	204.010.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	223.696.000	223.696.000	223.696.000
2.14.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.736.417.088	10.411.417.088	10.761.417.088
2.14.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.736.417.088	10.411.417.088	10.761.417.088
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.736.417.088	10.411.417.088	10.761.417.088
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.286.188	4.967.179.188	5.133.806.588
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.143	3.133.947.143	3.133.947.143
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.047.143	3.129.047.143	3.129.047.143
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	2.450.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000	2.450.000	2.450.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.292.797.500	1.161.751.500	1.328.378.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.161.200	4.161.200	4.161.200
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.098.900	36.458.900	59.336.300
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.059.700	64.864.700	64.864.700
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.581.400	12.337.400	12.361.400
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	4.015.300	4.015.300	4.015.300
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.105.000	6.270.000	6.270.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.168.776.000	1.033.644.000	1.177.370.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.352.545	108.248.745	108.248.745
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.352.545	105.248.745	105.248.745
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000	3.000.000	3.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.613.000	228.613.000	228.613.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200	1.531.200	1.531.200
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.897.400	71.897.400	71.897.400
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.184.400	155.184.400	155.184.400
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.576.000	329.618.800	329.618.800
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.091.000	124.133.800	124.133.800
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	5.100.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	200.385.000	200.385.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	336.054.600	336.054.600	336.054.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	89.719.200	89.719.200	89.719.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	70.374.700	70.374.700	70.374.700
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.600	14.490.600	14.490.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.900	4.853.900	4.853.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	246.335.400	246.335.400	246.335.400
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	7.663.900	7.663.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100	56.000.100	56.000.100
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	67.200.000	67.200.000	67.200.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200	37.354.200	37.354.200
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4.330.000	4.330.000	4.330.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	55.982.000	55.982.000	55.982.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200	17.805.200	17.805.200
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.592.559.000	2.520.229.000	2.703.601.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	853.786.900	853.978.100	1.037.350.700
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	42.033.800	42.225.000	225.597.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	73.553.100	73.553.100	73.553.100
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	0	0	0
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000	187.200.000	187.200.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	486.000.000	486.000.000	486.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	665.640.000	661.290.000	661.290.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	17.640.000	13.290.000	13.290.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	0	0
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	648.000.000	648.000.000	648.000.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	584.724.800	533.524.400	533.524.400
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41.550.000	41.550.000	41.550.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	139.204.900	138.004.900	138.004.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	214.566.200	214.566.200	214.566.200
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.153.700	33.085.700	33.085.700

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	0	0
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	131.250.000	106.317.600	106.317.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	488.407.300	471.436.500	471.436.500
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.529.400	36.726.600	36.726.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	451.877.900	434.709.900	434.709.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	0	0
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.622.517.300	2.587.954.300	2.587.954.300
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.536.560.500	2.523.810.500	2.523.810.500
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	76.939.000	76.939.000	76.939.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	794.614.000	794.614.000	794.614.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0	0
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	119.993.100	107.243.100	107.243.100
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.385.431.600	1.385.431.600	1.385.431.600
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.510.900	100.510.900	100.510.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13.300.000	13.300.000	13.300.000
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	45.771.900	45.771.900	45.771.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85.956.800	64.143.800	64.143.800
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	48.642.800	48.642.800	48.642.800
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	29.835.900	8.022.900	8.022.900
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	7.478.100	7.478.100	7.478.100
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	9.278.750.769	9.403.750.769	9.614.946.588
2.15.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.278.750.769	9.403.750.769	9.614.946.588
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.278.750.769	9.403.750.769	9.614.946.588

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.902.180.677	4.955.985.726	5.252.144.874
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.772.400	23.772.400	25.322.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.772.400	23.772.400	25.322.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.143.283.915	3.143.285.214	3.147.396.962
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.049.915	3.097.051.214	3.097.062.962
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.134.000	2.134.000	4.134.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.100.000	44.100.000	46.200.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.223.627.162	1.274.827.962	1.563.825.362
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.655.362	7.655.362	11.655.362
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.128.500	495.921.300	495.921.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.116.800	116.226.800	241.231.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.112.500	21.112.500	27.072.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634.614.000	633.912.000	787.945.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.046.800	206.046.800	207.546.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.296.800	122.296.800	122.296.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.750.000	20.750.000	20.750.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	63.000.000	64.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.450.400	308.053.350	308.053.350
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.266.400	233.757.350	233.757.350
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.184.000	74.296.000	74.296.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.987.175.156	3.965.170.107	3.880.206.778
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.394.532	76.161.112	76.161.112
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	32.464.820	32.231.400	32.231.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.929.712	43.929.712	43.929.712
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	86.963.000	86.963.000	86.963.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	86.963.000	86.963.000	86.963.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	979.101.120	1.069.721.200	965.049.320
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	764.694.520	855.314.600	750.642.720
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	214.406.600	214.406.600	214.406.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	514.783.817	466.473.508	466.473.508
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	299.840.309	251.530.000	251.530.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104.943.508	104.943.508	104.943.508
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.957.637.687	1.893.996.287	1.913.704.838

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	27.568.000	27.568.000	27.568.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.464.422.572	1.429.296.172	1.449.004.723
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.056.015	75.056.015	75.056.015
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	341.707.700	313.192.700	313.192.700
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	48.883.400	48.883.400	48.883.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	78.860.000	78.530.000	78.530.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	41.200.000	41.200.000	41.200.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	37.660.000	37.330.000	37.330.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	91.750.000	91.750.000	91.750.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	91.750.000	91.750.000	91.750.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	201.685.000	201.575.000	201.575.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	201.685.000	201.575.000	201.575.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	389.394.936	482.594.936	482.594.936
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	130.500.000	130.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	130.500.000	130.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	258.894.936	352.094.936	352.094.936
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	228.780.000	233.780.000	233.780.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	30.114.936	118.314.936	118.314.936
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	7.373.588.600	7.735.085.500	7.852.291.836
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.373.588.600	7.735.085.500	7.852.291.836
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.267.202.800	7.628.699.700	7.750.896.036
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.096.846.837	5.071.306.600	5.158.402.936
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	12.600.000	12.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000	12.600.000	12.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.176.657	3.431.176.420	3.431.176.856
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.576.657	3.427.576.420	3.427.576.856
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000	2.050.000	2.050.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000	1.550.000	1.550.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	841.682.000	809.452.000	891.467.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.661.100	45.661.100	36.829.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.401.900	76.401.900	76.401.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.000.000	45.400.000	26.300.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000	5.903.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	668.619.000	633.989.000	746.033.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	456.512.680	456.512.680	461.586.880
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.512.680	456.512.680	461.586.880
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.231.000	292.921.000	292.927.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.631.000	119.531.000	119.531.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.600.000	173.390.000	173.396.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.644.500	68.644.500	68.644.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.524.500	45.524.500	45.524.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000	4.400.000	4.400.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.720.000	18.720.000	18.720.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.225.040.800	1.681.537.700	1.671.137.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.225.040.800	1.681.537.700	1.671.137.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48.200.000	48.200.000	48.200.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000	12.600.000	12.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	06 Pelayanan Informasi Publik	29.450.000	29.450.000	29.450.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	07 Layanan Hubungan Media	1.101.832.000	1.558.328.900	1.547.928.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.958.800	32.958.800	32.958.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	945.315.163	875.855.400	921.355.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	624.809.763	677.000.000	625.350.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000	209.000.000	215.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	409.809.763	468.000.000	410.350.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	320.505.400	198.855.400	296.005.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	245.450.000	110.350.000	210.450.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	31.560.000	36.360.000	31.560.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.545.400	43.895.400	35.545.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	7.950.000	8.250.000	18.450.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	67.117.900	67.117.900	62.127.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	67.117.900	67.117.900	62.127.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.117.900	67.117.900	62.127.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	67.117.900	67.117.900	62.127.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	39.267.900	39.267.900	39.267.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	39.267.900	39.267.900	39.267.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.267.900	39.267.900	39.267.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900	39.267.900	39.267.900
2.18.0.00.0.00.01.0000					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.694.042.007	7.169.042.007	7.289.233.975

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian				Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.694.042.007	7.169.042.007	7.289.233.975
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.694.042.007	7.169.042.007	7.289.233.975
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.263.266.407	5.744.435.607	5.858.627.575
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.115.000	34.115.000	41.315.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.115.000	34.115.000	41.315.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.509.059.007	3.508.957.007	3.509.018.075
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.471.489.107	3.471.387.107	3.471.448.175
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.569.900	37.569.900	37.569.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.157.851.500	1.164.636.600	1.123.898.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.646.100	140.289.000	140.289.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.381.600	103.353.800	103.353.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.400.000	14.400.000	14.400.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	31.576.800	32.976.800	41.156.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.847.000	873.617.000	824.699.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.091.043.700	558.529.800	642.212.700
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	341.321.400	317.754.900	317.754.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.749.722.300	240.774.900	324.457.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.459.800	294.459.800	298.959.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.726.000	2.726.000	2.726.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.518.400	189.518.400	189.518.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.215.400	102.215.400	106.715.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.737.400	183.737.400	243.223.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.352.400	91.352.400	91.352.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000	19.650.000	19.650.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.735.000	72.735.000	132.221.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	26.298.000	23.898.000	23.898.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.298.000	23.898.000	23.898.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	26.298.000	23.898.000	23.898.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.994.000	38.994.000	44.994.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.994.000	38.994.000	44.994.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.994.000	38.994.000	44.994.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	895.348.600	891.579.400	891.579.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	895.348.600	891.579.400	891.579.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	285.875.000	286.385.000	286.385.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	304.875.000	305.385.000	305.385.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	115.670.000	110.880.800	110.880.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	188.928.600	188.928.600	188.928.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	448.535.000	448.535.000	448.535.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	448.535.000	448.535.000	448.535.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	395.735.000	395.735.000	395.735.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.800.000	52.800.000	52.800.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.600.000	21.600.000	21.600.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	21.600.000	21.600.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.600.000	21.600.000	21.600.000
2.19.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemuda dan Olahraga	25.380.574.994	28.142.574.994	30.408.076.019
2.19.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.380.574.994	28.142.574.994	30.408.076.019
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.380.574.994	28.142.574.994	30.408.076.019
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.142.696.719	7.206.374.594	7.108.117.619
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.467.000	14.467.000	14.467.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.467.000	14.467.000	14.467.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.886.894	3.667.886.894	3.667.886.819
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.337.094	3.656.337.094	3.656.337.019
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.800	6.324.800	6.324.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.225.000	5.225.000	5.225.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.805.465.725	1.835.744.500	1.737.487.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.238.300	100.249.700	100.183.100
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.358.800	105.358.800	105.358.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.605.500	24.588.600	24.588.300
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.037.400	23.037.400	23.037.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.552.225.725	1.582.510.000	1.484.320.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.116.600	225.871.300	225.871.300
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.916.600	204.871.300	204.871.300
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.200.000	21.000.000	21.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.540.500	796.540.500	796.540.500
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.120.000	8.120.000	8.120.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.820.500	219.820.500	219.820.500
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.600.000	568.600.000	568.600.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.220.000	665.864.400	665.864.400

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.828.000	140.312.400	140.312.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.050.000	17.210.000	17.210.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.342.000	508.342.000	508.342.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.829.186.000	3.007.435.000	3.007.435.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.046.459.600	1.886.258.600	1.886.258.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	18.931.800	18.931.800	18.931.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	36.831.100	36.830.200	36.830.200
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	21.331.800	21.331.800	21.331.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	115.689.800	115.489.800	115.489.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	29.322.800	29.322.800	29.322.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	824.352.300	1.664.352.200	1.664.352.200
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	782.726.400	1.121.176.400	1.121.176.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	782.726.400	1.121.176.400	1.121.176.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	15.923.427.475	17.443.500.600	19.807.258.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.044.290.697	1.321.948.800	1.321.948.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.044.290.697	1.321.948.800	1.321.948.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	970.911.175	943.929.300	943.929.300
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	630.729.300	630.729.300	630.729.300
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	340.181.875	313.200.000	313.200.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.301.405.200	1.288.905.000	1.288.905.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.301.405.200	1.288.905.000	1.288.905.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.521.320.100	5.521.320.100	7.991.265.100
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	5.521.320.100	5.521.320.100	7.991.265.100
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	7.085.500.303	8.367.397.400	8.261.210.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3.230.461.200	3.480.269.000	3.469.082.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.371.359.703	4.103.449.000	4.008.449.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	483.679.400	783.679.400	783.679.400
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	485.264.800	485.264.800	485.264.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	485.264.800	485.264.800	485.264.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	35.264.800	35.264.800	35.264.800
2.22.3.26.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.997.372.160	11.972.372.160	11.892.415.353
2.22.3.26.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.117.067.060	8.096.115.160	9.184.001.253
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.117.067.060	8.096.115.160	9.184.001.253
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.482.208.660	6.508.456.960	7.124.378.553
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.875.000	9.875.000	12.185.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.875.000	9.875.000	12.185.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.231.357.187	3.231.546.887	3.232.091.380
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.857.187	3.224.046.887	3.224.591.380
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.750.000	3.750.000	3.750.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.750.000	3.750.000	3.750.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.104.610.723	2.095.641.823	2.382.050.923
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.322.700	14.382.200	18.382.200
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.683.923	153.683.923	153.683.923
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.002.500	87.202.500	109.643.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.909.600	28.314.200	32.352.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.840.000	5.440.000	8.199.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.821.352.000	1.801.119.000	2.054.290.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	686.743.650	717.661.950	1.001.917.350
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.792.900	179.906.500	339.007.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.704.550	464.923.150	581.078.050
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.246.200	72.832.300	81.832.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.648.800	262.876.000	269.276.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.048.800	106.476.000	106.476.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.600.000	156.400.000	162.800.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.973.300	190.855.300	226.857.900
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.598.700	31.098.700	31.098.700
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	11.360.000	11.360.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.014.600	148.396.600	184.399.200
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	433.766.500	440.466.300	440.466.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.652.000	39.402.000	39.402.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	33.436.900	33.436.900	33.436.900
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5.215.100	5.965.100	5.965.100
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	222.426.500	232.876.300	232.876.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	117.531.500	117.481.300	117.481.300

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	31.964.000	42.464.000	42.464.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	72.931.000	72.931.000	72.931.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	172.688.000	168.188.000	168.188.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	172.688.000	168.188.000	168.188.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	938.092.000	884.192.000	1.356.156.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	938.092.000	884.192.000	1.356.156.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	314.514.000	286.114.000	286.114.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	267.050.000	267.550.000	695.810.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	356.528.000	330.528.000	374.232.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	262.999.900	262.999.900	262.999.900
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21.859.900	21.859.900	21.859.900
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	21.859.900	21.859.900	21.859.900
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	241.140.000	241.140.000	241.140.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	241.140.000	241.140.000	241.140.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.880.305.100	3.876.257.000	2.708.414.100
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.880.305.100	3.876.257.000	2.708.414.100
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.862.867.000	2.961.539.100	1.219.831.400
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	14.756.000	14.756.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.756.000	14.756.000	14.756.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	503.994.300	503.994.300	503.994.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	443.799.300	443.799.300	443.799.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	60.195.000	60.195.000	60.195.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.271.587.700	2.370.259.800	628.552.100
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.271.587.700	2.370.259.800	628.552.100
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	72.529.000	72.529.000	72.529.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.529.000	72.529.000	72.529.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	750.230.800	647.510.600	808.786.400
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	750.230.800	647.510.600	808.786.400
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	296.902.500	176.204.500	176.204.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	266.588.300	283.760.100	388.809.900

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	84.170.000	84.680.000	140.906.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	102.570.000	102.866.000	102.866.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	58.861.000	58.861.000	58.861.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	58.861.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	58.861.000	58.861.000	58.861.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	208.346.300	208.346.300	620.935.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	185.762.300	185.762.300	598.351.300
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	0
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	94.762.800	94.762.800	94.762.800
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	59.161.500	59.161.500	59.161.500
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	31.838.000	31.838.000	444.427.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	22.584.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	22.584.000	22.584.000	22.584.000
2.23.2.24.0.00.01.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.488.036.615	7.463.036.615	7.413.195.149
2.23.2.24.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.488.036.615	7.463.036.615	7.413.195.149
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.042.418.385	7.026.038.115	7.007.381.749
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.736.744.135	5.715.442.465	5.696.786.099
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.339.300	19.339.300	19.339.300
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.339.300	19.339.300	19.339.300
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.866.525	3.047.884.265	3.047.827.899
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.873.925	3.046.891.665	3.046.835.299
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	691.600	691.600	691.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	301.000	301.000	301.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.762.803	795.868.700	777.268.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.745.460	7.421.900	7.421.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.948.800	42.024.700	42.024.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.766.100	97.321.700	97.321.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.616.800	27.616.800	27.616.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	7.605.685	6.971.600	6.971.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.175.000	4.175.000	4.175.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.904.958	610.337.000	591.737.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.319.525.207	1.240.934.700	1.240.934.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.040.007	148.639.500	148.639.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.085.485.200	1.092.295.200	1.092.295.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.334.800	328.745.200	328.745.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	1.740.000	1.740.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.015.600	180.015.600	180.015.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.579.200	146.989.600	146.989.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.915.500	282.670.300	282.670.300
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.713.000	46.717.800	46.717.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.075.000	20.075.000	20.075.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.127.500	215.877.500	215.877.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.305.674.250	1.310.595.650	1.310.595.650
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.149.360.250	1.149.370.650	1.149.370.650
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.055.400	332.065.800	332.065.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.279.000	42.279.000	42.279.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	542.319.150	542.319.150	542.319.150
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	232.706.700	232.706.700	232.706.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.314.000	161.225.000	161.225.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	20.340.000	24.016.000	24.016.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	135.974.000	137.209.000	137.209.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	445.618.230	436.998.500	405.813.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	348.798.230	340.178.500	308.993.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	254.868.230	246.248.500	215.063.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	125.052.520	116.490.900	116.490.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	88.610.710	88.552.600	57.367.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	41.205.000	41.205.000	41.205.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	93.930.000	93.930.000	93.930.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	93.930.000	93.930.000	93.930.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	96.820.000	96.820.000	96.820.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	96.820.000	96.820.000	96.820.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	96.820.000	96.820.000	96.820.000
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perikanan	8.389.693.817	7.984.693.817	8.231.368.493
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.389.693.817	7.984.693.817	8.231.368.493
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.389.693.817	7.984.693.817	8.231.368.493
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.140.299.503	6.256.270.328	6.244.548.391
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.500.000	197.600.000	197.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.500.000	197.600.000	197.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.302.903	4.060.360.128	4.060.427.891
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.800.803	4.000.858.028	4.000.858.291
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	22.600.000	22.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.902.100	36.902.100	36.969.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	825.932.100	949.055.600	945.549.600

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.889.000	31.889.000	31.889.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.731.000	57.731.000	52.275.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.854.600	155.354.600	155.354.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.300.000	6.300.000	6.300.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.412.000	11.387.000	11.387.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	576.345.500	683.994.000	685.944.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345.400.200	332.370.400	318.086.700
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.400.200	332.370.400	318.086.700
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.416.400	244.528.400	250.528.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.476.400	166.188.400	172.188.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.940.000	78.340.000	78.340.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.747.900	472.355.800	472.355.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.550.400	213.500.400	213.500.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000	25.775.400	25.775.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.597.500	233.080.000	233.080.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	624.627.200	168.804.700	148.590.700
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	553.008.200	97.185.700	96.810.700
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	491.248.200	35.425.700	35.050.700
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	61.760.000	61.760.000	61.760.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.619.000	71.619.000	51.780.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	71.619.000	71.619.000	51.780.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.203.237.214	1.156.750.489	1.447.600.302
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	15.500.000	15.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.500.000	15.500.000	15.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.187.737.214	1.141.250.489	1.432.100.302
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	843.443.864	797.632.139	1.087.806.952
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.593.350	326.918.350	327.593.350
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000	16.700.000	16.700.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	214.687.800	206.907.000	195.967.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	214.687.800	206.907.000	195.967.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	214.687.800	206.907.000	195.967.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	206.842.100	195.961.300	194.661.300
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.400.000	36.400.000	36.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.000	36.400.000	36.400.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.600.000	4.760.000	4.760.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.02	01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	4.600.000	4.760.000	4.760.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	165.842.100	154.801.300	153.501.300
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	138.094.300	133.553.500	132.253.500
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.747.800	21.247.800	21.247.800
3.27.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pertanian	65.840.189.361	67.715.189.361	69.175.775.342
3.27.0.00.0.00.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.840.189.361	67.715.189.361	69.175.775.342
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	65.840.189.361	67.715.189.361	69.175.775.342
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.356.688.966	19.885.390.686	19.981.729.417
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.808.000	82.808.000	82.808.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.808.000	82.808.000	82.808.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.192.506.226	13.200.045.046	13.200.045.996
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.115.631.226	13.115.670.046	13.115.670.996
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	39.600.000	39.600.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.475.000	5.475.000	5.475.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.800.000	39.300.000	39.300.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.802.089.840	2.002.361.840	1.999.061.640
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.984.600	129.984.600	129.984.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.460.100	243.960.100	243.960.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.353.300	52.353.300	52.353.300
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	49.006.840	53.825.840	53.825.640
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	16.400.000	24.350.000	24.350.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.316.885.000	1.497.888.000	1.494.588.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.364.574.000	2.408.734.700	2.397.134.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	977.725.400	931.266.100	931.266.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	996.730.000	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.390.118.600	1.477.468.600	1.465.868.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.332.800	607.728.000	631.728.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.332.800	310.728.000	310.728.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.000.000	297.000.000	321.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.378.100	1.583.713.100	1.670.951.081
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.243.100	393.243.100	393.243.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.250.000	31.250.000	31.250.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	912.885.000	1.159.220.000	1.246.457.981
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.948.152.345	13.557.739.245	14.504.667.045
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.901.690.400	9.836.908.100	10.821.718.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.845.714.000	4.845.714.000	5.209.634.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.055.976.400	4.991.194.100	5.612.084.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.377.600	89.926.800	189.926.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	128.377.600	89.926.800	189.926.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.918.084.345	3.630.904.345	3.493.022.845
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	2.374.913.300	2.940.015.100	3.006.973.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	306.629.445	263.959.245	257.599.245
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	236.541.600	426.930.000	228.450.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25.142.872.950	26.910.534.530	27.110.534.530
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	93.450.500	93.450.500	93.450.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	93.450.500	93.450.500	93.450.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	25.049.422.450	26.817.084.030	27.017.084.030
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.688.433.950	2.878.953.450	2.878.953.450
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.811.961.880	9.710.303.880	9.910.303.880
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	6.850.000.000	6.850.000.000	6.850.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7.699.026.620	7.377.826.700	7.377.826.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	552.112.200	552.112.000	702.101.450
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.475.400	165.475.400	315.464.850
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	165.475.400	165.475.400	315.464.850
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	9.066.100	9.066.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.066.100	9.066.100	9.066.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	189.108.100	189.108.100	189.108.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	189.108.100	189.108.100	189.108.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	188.462.600	188.462.400	188.462.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	188.462.600	188.462.400	188.462.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	823.425.000	798.525.000	790.855.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	823.425.000	798.525.000	790.855.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	823.425.000	798.525.000	790.855.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	79.790.000	73.740.000	73.740.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.790.000	73.740.000	73.740.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	79.790.000	73.740.000	73.740.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.937.147.900	5.937.147.900	6.012.147.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.937.147.900	5.937.147.900	6.012.147.900

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	718.762.200	879.623.700	879.623.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	749.821.900	701.701.500	776.701.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.081.454.700	1.969.158.700	1.969.158.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	75.715.100	75.270.000	75.270.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.311.394.000	2.311.394.000	2.311.394.000
3.30.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perdagangan	10.840.460.472	11.802.160.472	12.953.140.061
3.30.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.840.460.472	11.802.160.472	12.953.140.061
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.840.460.472	11.802.160.472	12.953.140.061
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.136.896.849	5.288.341.964	5.288.342.038
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.949.900	8.949.900	8.949.900
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.949.900	8.949.900	8.949.900
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.719.849.499	3.719.851.684	3.719.859.058
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.709.797.299	3.709.799.484	3.709.806.858
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.952.200	3.952.200	3.952.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.100.000	6.100.000	6.100.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.558.100	829.285.700	829.285.700
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.664.700	17.664.700	17.664.700
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.759.600	67.690.200	67.690.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.052.200	91.052.200	91.052.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.724.800	23.724.800	23.724.800
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	3.128.800	3.128.800	3.128.800
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.228.000	623.025.000	623.025.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.840.950	234.247.750	236.070.050
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.411.550	194.818.350	194.818.350
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.429.400	39.429.400	41.251.700
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.610.800	328.926.600	328.926.600
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.040.800	136.456.600	136.456.600
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.570.000	192.470.000	192.470.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.087.600	167.080.330	165.250.730
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.807.600	90.807.600	88.978.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.850.000	19.850.000	19.850.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.510.000	14.510.000	14.510.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.920.000	41.912.730	41.912.730
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	47.152.400	47.152.400	47.152.400
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	47.152.400	47.152.400	47.152.400

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	47.152.400	47.152.400	47.152.400
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0	0	0
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0	0	0
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.958.730.540	5.731.095.225	5.744.725.540
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.874.884.000	5.503.674.400	5.533.674.400
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.703.437.900	2.793.351.300	2.802.351.300
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.171.446.100	2.710.323.100	2.731.323.100
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	83.846.540	227.420.825	211.051.140
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	83.846.540	227.420.825	211.051.140
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	47.280.800	128.211.000	1.325.560.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42.497.800	42.497.800	1.239.847.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.497.800	42.497.800	1.239.847.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.783.000	85.713.200	85.713.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.783.000	85.713.200	85.713.200
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	132.195.352	131.195.352	131.195.352
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.195.352	131.195.352	131.195.352
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	20.120.000	20.120.000	20.120.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	66.022.800	66.022.800	66.022.800
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	46.052.552	45.052.552	45.052.552
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	211.672.300	163.632.300	163.632.300
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	211.672.300	163.632.300	163.632.300
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	189.503.900	144.563.900	144.563.900
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	22.168.400	19.068.400	19.068.400
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	306.532.231	312.532.231	252.532.231
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	306.532.231	312.532.231	252.532.231
3.30.0.00.0.00.01.0000	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	306.532.231	312.532.231	252.532.231
3.31.2.17.0.00.01.0000						Dinas Perindustrian	6.049.832.492	6.281.350.016	6.205.166.344
3.31.2.17.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	218.476.200	213.829.700	213.829.700
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	218.476.200	213.829.700	213.829.700
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.372.200	30.372.200	30.372.200
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30.372.200	30.372.200	30.372.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.372.200	30.372.200	30.372.200
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	17.767.000	17.767.000	17.767.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.767.000	17.767.000	17.767.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	17.767.000	17.767.000	17.767.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	64.368.100	60.572.600	60.572.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.368.100	60.572.600	60.572.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	64.368.100	60.572.600	60.572.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	105.968.900	105.117.900	105.117.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	105.968.900	105.117.900	105.117.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	105.968.900	105.117.900	105.117.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.831.356.292	6.067.520.316	5.991.336.644
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.831.356.292	6.067.520.316	5.991.336.644
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.741.379.992	4.914.559.316	4.738.195.644
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.948.545.292	2.948.545.292	2.948.600.820
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.045.292	2.941.045.292	2.941.100.820
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.000	4.250.000	4.250.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000	3.250.000	3.250.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.262.453.600	1.267.072.600	1.207.675.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.833.400	4.333.400	3.833.400
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.575.800	60.545.800	55.575.800
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.214.200	80.614.200	80.614.200
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.493.200	18.493.200	18.493.200
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	1.352.000	5.219.000	3.867.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.485.000	1.093.367.000	1.040.792.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.152.000	462.046.100	371.926.100
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.152.000	462.046.100	371.926.100
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.800.000	184.466.224	157.566.224
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.800.000	118.466.224	91.566.224
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.929.100	44.929.100	44.926.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.349.100	30.349.100	30.346.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	14.580.000	14.580.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	882.629.900	945.614.600	1.045.794.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	882.629.900	945.614.600	1.045.794.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	11.000.000	11.000.000	111.000.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	133.796.300	133.796.100	133.796.100
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	271.153.700	369.048.600	369.228.600
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	466.679.900	431.769.900	431.769.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	63.995.400	63.995.400	63.995.400
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	63.995.400	63.995.400	63.995.400
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	03	2.01	01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.995.400	63.995.400	63.995.400
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143.351.000	143.351.000	143.351.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	143.351.000	143.351.000	143.351.000
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	04	2.01	01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	98.616.900	98.616.900	98.616.900
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	04	2.01	02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	35.401.500	35.401.500	35.401.500
3.31.2.17.0.00.01.0000	3	31	04	2.01	03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.332.600	9.332.600	9.332.600
4.01.0.00.0.00.01.0000					Sekretariat Daerah	99.535.971.197	96.587.100.197	101.043.323.697
4.01.0.00.0.00.01.0000	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	99.535.971.197	96.587.100.197	101.043.323.697
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01			SEKRETARIAT DAERAH	99.535.971.197	96.587.100.197	101.043.323.697
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.440.503.697	71.108.771.997	74.456.580.797
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.046.200	38.046.200	38.046.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.046.200	38.046.200	38.046.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.409.659.901	17.409.793.801	17.398.694.395
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.242.369.101	17.242.369.101	17.242.369.695
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.478.800	162.424.700	151.324.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.906.000	2.500.000	2.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.906.000	2.500.000	2.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.159.814.300	3.179.838.800	2.983.634.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.986.598.400	3.006.622.900	2.810.418.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	173.215.900	173.215.900	173.215.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.036.630.500	14.666.490.500	15.350.606.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	136.397.400	197.539.600	244.631.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.547.000	477.547.000	507.532.700

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.375.000	342.375.000	342.375.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.600.000	74.600.000	74.600.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	40.210.200	35.291.000	35.291.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.018.384.500	3.518.339.500	3.578.124.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.972.116.400	10.020.798.400	10.568.052.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.919.739.400	14.764.155.500	15.614.793.506
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.443.837.500	3.946.590.300	3.133.478.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	3.640.846.800	2.823.447.500	3.050.977.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.689.230.100	7.848.292.700	9.284.513.006
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.825.000	145.825.000	145.825.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.753.163.300	4.740.831.900	5.636.168.200
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	161.700.000	161.700.000	161.700.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.634.096.000	2.634.104.600	2.634.104.600
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.651.844.900	1.148.704.900	1.803.918.600
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.305.522.400	796.322.400	1.036.445.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.146.268.390	6.379.561.390	7.507.983.590
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.338.318.100	1.884.318.100	2.008.450.800
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.209.290	629.894.290	621.491.490
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.787.091.000	3.549.699.000	4.562.391.300
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	315.650.000	315.650.000	315.650.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.623.134.306	1.823.226.406	1.823.226.406
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.541.206	168.541.206	168.541.206
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.054.593.100	1.254.685.200	1.254.685.200
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	2.363.571.800	2.116.352.000	2.112.952.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.448.636.000	1.296.857.000	1.296.857.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	717.935.800	622.495.000	622.495.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	197.000.000	197.000.000	193.600.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	860.903.000	860.903.000	860.903.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	199.178.600	199.178.600	199.178.600
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.345.400	113.345.400	113.345.400
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	548.379.000	548.379.000	548.379.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.129.572.600	5.129.572.500	5.129.572.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokolan	393.099.000	539.899.000	539.899.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.913.278.000	2.111.077.900	2.111.077.900
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.823.195.600	2.478.595.600	2.478.595.600
4.01.000.000.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.045.867.900	23.569.150.700	24.760.065.400
4.01.000.000.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	641.560.600	617.387.500	602.302.300
4.01.000.000.01.0000	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	128.403.500	180.326.500	186.726.400
4.01.000.000.01.0000	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	257.015.700	180.940.700	173.625.700
4.01.000.000.01.0000	4	01	02	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	256.141.400	256.120.300	241.950.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.452.225.400	22.176.161.300	23.382.161.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.342.943.000	4.206.178.900	4.732.178.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	17.109.282.400	17.969.982.400	18.649.982.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	952.081.900	775.601.900	775.601.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	238.684.000	201.884.000	201.884.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	02 Fasilitas Bantuan Hukum	485.580.900	258.700.900	258.700.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	227.817.000	315.017.000	315.017.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.049.599.600	1.909.177.500	1.826.677.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	234.520.000	113.500.000	105.300.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	167.670.000	46.650.000	38.450.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.650.000	53.650.000	53.650.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	13.200.000	13.200.000	13.200.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	44.200.000	95.220.000	44.845.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	4.800.000	5.100.000	5.100.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	29.150.000	29.450.000	29.450.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10.250.000	60.670.000	10.295.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	709.609.600	1.639.187.500	1.616.687.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	447.911.000	555.211.000	532.711.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	204.762.600	1.064.496.800	1.064.496.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	56.936.000	19.479.700	19.479.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	61.270.000	61.270.000	59.845.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	43.175.000	43.175.000	43.175.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.895.000	5.895.000	5.895.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.200.000	12.200.000	10.775.000
4.02.0.00.0.00.01.0000					Sekretariat DPRD	49.855.990.873	56.745.990.873	56.367.015.998
4.02.0.00.0.00.01.0000	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	49.855.990.873	56.745.990.873	56.367.015.998
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02			SEKRETARIAT DPRD	49.855.990.873	56.745.990.873	56.367.015.998
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.146.444.373	32.245.959.073	32.262.381.198
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.400.000	90.600.000	90.600.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.400.000	90.600.000	90.600.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.454.700.369	5.459.340.133	5.459.200.494
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.265.700.369	5.265.840.133	5.265.700.494
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.800.000	105.000.000	105.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	4.200.000	4.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	82.200.000	84.300.000	84.300.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.562.756.239	5.589.906.000	5.551.810.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.581.500	32.581.500	32.581.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.107.800	87.612.800	87.406.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.768.839	284.365.200	282.533.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.924.600	127.100.000	137.243.300

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	126.000.000	126.000.000	126.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	17.615.500	23.115.500	23.115.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	87.450.000	110.000.000	110.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.916.308.000	4.799.131.000	4.752.931.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.075.180.000	1.344.500.000	1.380.730.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	625.180.000	632.500.000	668.730.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000	712.000.000	712.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.200.000	514.000.000	514.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	17.400.000	17.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	252.000.000	252.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.600.000	244.600.000	244.600.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.060.465.065	2.754.870.240	2.760.023.004
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.993.800	460.010.000	460.010.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.851.600	298.563.600	303.663.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.643.200	43.643.200	43.643.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.502.976.465	1.952.653.440	1.952.706.204
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.13		Penataan Organisasi	61.950.000	61.950.000	75.223.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.950.000	61.950.000	75.223.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700	16.430.792.700	16.430.792.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200	15.983.657.200	15.983.657.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500	372.135.500	372.135.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.709.546.500	24.500.031.800	24.104.634.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	583.051.000	601.857.600	601.857.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	118.301.400	137.108.000	137.108.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	244.749.800	244.749.800	244.749.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	219.999.800	219.999.800	219.999.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	200.125.000	200.125.000	190.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	37.275.000	37.275.000	37.275.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.775.000	20.775.000	20.775.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	35.900.000	35.900.000	35.900.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	35.900.000	35.900.000	35.900.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	70.275.000	70.275.000	60.650.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.138.354.500	1.156.342.200	1.243.542.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	384.667.500	384.655.200	471.855.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	306.000.000	306.000.000	306.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	447.687.000	465.687.000	465.687.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	345.400.000	346.650.000	351.150.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.000.000	11.250.000	11.250.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.575.000	4.575.000	4.575.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	330.825.000	330.825.000	335.325.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.07	02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	17.412.616.000	22.165.057.000	21.687.585.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.681.062.000	16.473.138.000	16.244.426.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.731.554.000	5.691.919.000	5.443.159.000
5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	12.944.812.199	12.969.812.199	12.833.194.045
5.01.5.05.0.00.01.0000	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.944.812.199	12.969.812.199	12.833.194.045
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01			PERENCANAAN	11.580.550.499	11.570.550.499	11.539.365.045
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.519.682.999	8.521.696.399	8.611.710.645
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.300.000	46.700.000	46.700.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.300.000	32.050.000	32.050.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	14.650.000	14.650.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.938.811.683	4.938.811.683	4.938.811.729
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.907.407.783	4.907.407.783	4.907.407.829
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.803.900	24.803.900	24.803.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.600.000	6.600.000	6.600.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.363.730.000	2.345.950.900	2.525.763.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.380.500	18.380.500	18.389.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.776.600	455.887.900	455.887.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.618.500	161.618.500	161.618.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.325.000	18.152.000	29.218.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	22.079.000	22.079.000	27.626.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.750.000	18.750.000	18.750.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.669.800.400	1.651.083.000	1.814.273.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.073.300	320.073.300	320.073.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.073.300	320.073.300	320.073.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.801.116	573.193.616	594.793.616
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.620.000	487.612.500	487.612.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.207.116	22.607.116	14.207.116
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.974.000	62.974.000	92.974.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.966.900	296.966.900	185.568.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.193.700	230.193.700	144.595.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.773.200	66.773.200	40.973.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.835.486.000	1.823.472.600	1.788.882.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.167.791.000	1.159.842.600	1.175.412.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	55.700.000	55.700.000	17.246.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	37.213.000	37.213.600	37.213.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	137.153.000	139.028.000	139.528.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	225.578.800	225.578.800	225.578.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	712.146.200	702.322.200	755.846.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	473.700.000	471.700.000	416.480.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	216.500.000	214.500.000	214.500.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	257.200.000	257.200.000	201.980.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	193.995.000	191.930.000	196.990.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	101.485.000	99.420.000	104.480.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92.510.000	92.510.000	92.510.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.225.381.500	1.225.381.500	1.138.771.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	468.089.800	468.089.800	422.864.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.125.000	105.125.000	77.350.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.850.000	69.850.000	69.850.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.700.000	43.700.000	43.700.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.044.800	121.044.800	103.594.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79.820.000	79.820.000	79.820.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.550.000	48.550.000	48.550.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	328.891.700	348.951.700	311.991.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.674.800	98.734.800	59.562.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72.970.000	72.970.000	75.182.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.635.000	41.635.000	41.635.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.611.900	135.611.900	135.611.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	428.400.000	408.340.000	403.915.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.900.000	81.840.000	77.415.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61.950.000	61.950.000	61.950.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.450.000	47.450.000	47.450.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	217.100.000	217.100.000	217.100.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.364.261.700	1.399.261.700	1.293.829.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.364.261.700	1.399.261.700	1.293.829.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	167.323.700	167.323.700	166.385.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	167.323.700	167.323.700	166.385.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	343.628.000	474.268.800	310.905.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	131.443.000	127.421.900	121.235.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	212.185.000	346.846.900	189.670.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	853.310.000	757.669.200	816.539.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	765.250.000	624.609.200	686.559.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	88.060.000	133.060.000	129.980.000
5.02.0.00.0.00.01.0000					Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.803.476.532	14.954.276.532	14.994.753.143
5.02.0.00.0.00.01.0000	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.803.476.532	14.954.276.532	14.994.753.143
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02			KEUANGAN	14.803.476.532	14.954.276.532	14.994.753.143
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.601.125.432	11.741.986.232	11.810.886.843
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.345.000	30.345.000	30.345.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.545.000	28.545.000	28.545.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.477.504.202	6.477.666.602	6.477.847.963
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.440.650.202	6.440.812.602	6.440.993.963
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.809.000	3.809.000	3.809.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.045.000	33.045.000	33.045.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.094.450	54.094.450	54.094.450
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.094.450	54.094.450	54.094.450
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.880.266.540	2.882.342.940	2.881.113.540
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.493.340	124.993.340	124.993.340
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	902.231.800	902.231.800	902.231.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.028.600	10.028.600	10.028.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.236.200	220.157.200	235.757.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.758.000	99.258.000	101.068.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	49.409.600	38.581.000	6.191.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	35.974.000	40.103.000	53.853.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.393.135.000	1.446.990.000	1.446.990.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	937.016.800	908.616.800	937.416.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	937.016.800	908.616.800	937.416.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.403.040	836.823.040	836.823.040
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.700.000	8.120.000	8.120.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.080.000	365.080.000	365.080.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.623.040	463.623.040	463.623.040
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.495.400	552.097.400	593.246.650
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.007.900	83.609.900	84.209.150
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.470.000	37.470.000	60.620.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	269.017.500	431.017.500	448.417.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.209.261.600	2.219.200.800	2.224.596.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.176.042.600	1.152.042.600	1.157.438.600

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.000.000	72.000.000	66.660.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.800.000	69.800.000	58.500.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.020.000	9.020.000	9.020.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8.980.000	8.980.000	8.980.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.230.000	36.230.000	36.230.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.270.000	36.270.000	36.270.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	466.332.600	442.332.600	442.332.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.510.100	140.510.100	140.510.100
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	336.899.900	336.899.900	358.935.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	669.464.000	699.464.000	699.464.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	78.020.000	78.020.000	78.020.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43.212.000	43.212.000	43.212.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.100.000	15.100.000	15.100.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	43.440.000	43.440.000	43.440.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	35.100.000	35.100.000	35.100.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	81.152.000	81.152.000	81.152.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	156.560.000	156.560.000	156.560.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	216.880.000	246.880.000	246.880.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	363.755.000	367.694.200	367.694.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	52.250.000	52.250.000	52.250.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38.750.000	38.750.000	38.750.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19.650.000	22.823.600	22.823.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37.050.000	37.050.000	37.050.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	59.580.000	60.345.600	60.345.600
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	61.050.000	61.050.000	61.050.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	62.300.000	62.300.000	62.300.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33.125.000	33.125.000	33.125.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	993.089.500	993.089.500	959.269.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	993.089.500	993.089.500	959.269.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	260.050.000	241.375.000	241.375.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	0	0

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.893.900	25.893.900	25.893.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	59.380.000	59.380.000	59.380.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.722.900	1.722.900	1.722.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	15.832.000	34.507.000	34.507.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	112.185.900	112.185.900	112.185.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	277.581.400	277.581.400	277.581.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.781.400	35.781.400	35.781.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.780.000	15.780.000	15.780.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	188.882.000	188.882.000	155.062.000
5.02.0.00.0.00.02.0000						Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	194.019.550.008	198.248.899.288	196.874.153.815
5.02.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	194.019.550.008	198.248.899.288	196.874.153.815
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	194.019.550.008	198.248.899.288	196.874.153.815
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	194.019.550.008	198.248.899.288	196.874.153.815
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	194.019.550.008	198.248.899.288	196.874.153.815
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.782.683.508	7.782.683.508	7.782.683.508
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	162.250.951.600	162.911.580.900	162.911.580.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.583.868.400	24.826.437.268	23.387.342.907
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.402.046.500	2.728.197.612	2.792.546.500
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	12.141.812.762	12.166.812.762	12.035.557.395
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.141.812.762	12.166.812.762	12.035.557.395
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	12.141.812.762	12.166.812.762	12.035.557.395
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.711.707.030	9.715.129.430	9.580.745.430
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.015.400	13.015.400	13.015.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.400	5.015.400	5.015.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.816.228.430	5.676.267.530	5.673.142.530
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.581.467.530	5.581.467.530	5.578.342.530
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.160.900	89.200.000	89.200.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.381.164.000	2.523.011.200	2.572.856.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.301.000	79.901.000	79.901.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.894.000	343.894.000	343.894.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.111.500	119.111.500	119.111.500
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.641.600	600.588.800	600.588.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	6.140.900	6.140.900	6.140.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.150.000	7.150.000	7.150.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.236.925.000	1.366.225.000	1.416.070.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335.020.200	335.036.100	335.036.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	135.367.500	125.235.000	125.235.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.652.700	209.801.100	209.801.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.306.000	811.820.000	811.820.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	766.506.000	768.020.000	768.020.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000	43.800.000	43.800.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.973.000	355.979.200	174.875.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.083.000	101.089.200	101.089.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000	54.970.000	54.970.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	199.920.000	18.816.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.430.105.732	2.451.683.332	2.454.811.965
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.430.105.732	2.451.683.332	2.454.811.965
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	284.054.900	284.054.900	284.054.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	108.899.800	109.799.800	109.799.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	146.925.000	146.925.000	146.925.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	787.142.304	807.819.904	810.948.537
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.933.728	389.933.728	389.933.728
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000	267.295.000	267.295.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000	38.500.000	38.500.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	186.000.000	186.000.000	186.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	221.355.000	221.355.000	221.355.000
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.008.655.367	10.044.255.367	9.957.273.022
5.03.5.04.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.008.655.367	10.044.255.367	9.957.273.022
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	9.490.945.367	9.526.545.367	9.439.563.022
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.524.676.767	6.491.370.967	6.646.910.622
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.569.100	57.068.900	58.830.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.743.200	7.743.200	7.743.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.650.000	4.650.000	4.650.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.175.900	44.675.700	46.437.600
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.803.980.397	3.803.360.192	3.803.359.592
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.827.097	3.768.827.792	3.768.827.192
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.299.800	2.749.900	2.749.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.503.500	25.868.500	25.868.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.350.000	5.914.000	5.914.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.675.000	65.675.000	65.675.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.675.000	65.675.000	65.675.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.841.515.845	1.825.307.650	1.972.601.505
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.501.445	57.349.950	57.349.950
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	465.442.200	409.406.500	430.409.355

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.310.200	29.310.200	29.310.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.450.000	97.950.000	97.950.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	0	24.978.000	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.050.000	27.150.000	39.150.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.139.762.000	1.179.163.000	1.318.432.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.628.800	450.900.000	438.100.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.428.800	175.200.000	164.200.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.200.000	275.700.000	273.900.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.307.625	289.059.225	308.343.725
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.319.500	41.731.100	41.595.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.850.000	92.190.000	111.410.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.138.125	155.138.125	155.338.725
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.966.268.600	3.035.174.400	2.792.652.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	890.529.000	886.401.800	886.401.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	740.115.000	741.209.800	741.209.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	52.232.000	52.232.000	52.232.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	20.282.000	15.060.000	15.060.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.700.000	52.700.000	52.700.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	21.900.000	21.900.000	21.900.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	570.661.700	569.066.700	569.066.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	3.580.000	3.580.000	3.580.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	126.399.800	126.399.800	126.399.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	440.681.900	439.086.900	439.086.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.164.362.900	1.233.768.900	991.246.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	58.775.000	58.775.000	58.775.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.900.000	100.900.000	100.900.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	985.988.000	1.055.394.000	812.872.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	18.699.900	18.699.900	18.699.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	340.715.000	345.937.000	345.937.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.390.000	208.612.000	208.612.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	16.075.000	16.075.000	16.075.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	152.250.000	121.250.000	121.250.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	517.710.000	517.710.000	517.710.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	517.710.000	517.710.000	517.710.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	517.710.000	517.710.000	517.710.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	517.710.000	517.710.000	517.710.000
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	16.279.496.522	14.284.496.522	16.162.792.332
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.279.496.522	14.284.496.522	16.162.792.332
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	16.279.496.522	14.284.496.522	16.162.792.332
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.408.820.322	9.910.062.022	10.499.057.832

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.956.700	12.956.700	12.956.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.900	1.000.900	1.000.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.856.900	6.856.900	6.856.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.900	1.098.900	1.098.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.533.857.222	7.533.857.222	7.571.273.532
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.529.857.222	7.529.857.222	7.567.273.532
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.435.400	222.435.400	219.435.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.500.000	71.500.000	71.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.935.400	150.935.400	147.935.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.933.899.500	1.446.199.500	1.984.787.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.189.800	19.189.800	19.189.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.498.700	84.498.700	94.551.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.865.500	113.890.500	119.890.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.328.500	36.328.500	36.328.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	26.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.665.017.000	1.172.292.000	1.688.828.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.041.000	255.000.000	255.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.041.000	255.000.000	255.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.924.800	162.924.800	162.924.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.724.800	99.724.800	99.724.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	63.200.000	63.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.705.700	276.688.400	292.679.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.933.700	67.933.700	62.928.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.822.000	122.822.000	122.818.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.400.000	60.400.000	70.400.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.550.000	25.532.700	36.532.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.853.803.900	3.357.562.200	4.805.982.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.904.333.900	2.842.792.200	3.838.392.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.396.562.200	1.113.362.200	1.397.162.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	633.170.000	480.770.000	633.170.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	03 Reviu Laporan Kinerja	172.700.000	146.900.000	172.700.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	04 Reviu Laporan Keuangan	550.316.700	199.575.000	508.775.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	05 Pengawasan Desa	584.750.000	335.350.000	559.750.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	566.835.000	566.835.000	566.835.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	949.470.000	514.770.000	967.590.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	21.225.000	21.225.000	21.225.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	928.245.000	493.545.000	946.365.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.016.872.300	1.016.872.300	857.752.300
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57.812.100	57.812.100	57.812.100
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	56.383.600	56.383.600	56.383.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.428.500	1.428.500	1.428.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	959.060.200	959.060.200	799.940.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	190.890.000	190.890.000	190.890.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	358.000.000	358.000.000	198.880.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	410.170.200	410.170.200	410.170.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Piani	2.569.963.963	2.318.652.863	2.349.963.963
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.569.963.963	2.318.652.863	2.349.963.963
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	2.569.963.963	2.318.652.863	2.349.963.963
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.386.773.963	2.142.507.863	2.173.315.863
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.271.688	1.374.271.953	1.374.271.988
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.372.958.488	1.372.958.753	1.372.958.788
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	689.000	689.000	689.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	624.200	624.200	624.200
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.726.675	334.624.410	365.432.375
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.651.975	2.173.710	3.360.975
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.039.800	15.082.700	23.437.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.479.200	35.373.700	35.373.700
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.909.200	10.456.300	12.572.200
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.646.500	271.538.000	290.688.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.993.100	100.493.100	100.493.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.193.100	85.193.100	85.193.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.800.000	15.300.000	15.300.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.740.000	75.840.000	75.840.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	1.740.000	1.740.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	10.200.000	10.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	63.900.000	63.900.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.442.500	254.678.400	254.678.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.375.500	60.289.400	60.289.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.520.000	12.520.000	12.520.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	310.547.000	181.869.000	181.869.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.700.000	74.200.000	69.700.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.700.000	74.200.000	69.700.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	69.700.000	74.200.000	69.700.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.540.000	31.340.000	36.340.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.540.000	31.340.000	36.340.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750.000	3.750.000	3.750.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.790.000	27.590.000	32.590.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.250.000	1.905.000	1.908.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.250.000	1.905.000	1.908.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.250.000	1.905.000	1.908.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.700.000	68.700.000	68.700.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.700.000	68.700.000	68.700.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36.750.000	36.750.000	36.750.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.300.000	4.300.000	4.300.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.300.000	4.300.000	4.300.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.550.000	3.550.000	3.550.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.400.000	5.400.000	5.400.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.400.000	14.400.000	14.400.000
7.01.0.00.0.00.02.0000					Kecamatan Tapin Selatan	5.763.362.086	5.498.612.086	5.550.362.086
7.01.0.00.0.00.02.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	5.763.362.086	5.498.612.086	5.550.362.086
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01			KECAMATAN	5.763.362.086	5.498.612.086	5.550.362.086
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.042.512.286	4.819.902.286	4.855.922.286
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.894.500	5.894.500	5.894.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.894.500	5.894.500	5.894.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.372.016	2.829.372.116	2.824.529.366
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.207.016	2.825.207.116	2.820.364.366
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.365.000	2.365.000	2.365.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.671.900	344.809.700	415.364.550
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.337.700	2.673.700	6.386.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.586.900	18.362.900	46.526.650

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.714.200	41.754.200	41.754.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.151.100	7.546.900	7.565.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.882.000	274.472.000	313.132.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.804.200	109.882.700	75.606.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.804.200	109.882.700	75.606.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.447.000	193.899.600	197.866.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.914.000	1.914.000	1.914.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.133.000	26.133.000	30.100.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.400.000	165.852.600	165.852.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.322.670	1.336.043.670	1.336.660.370
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.579.000	43.300.000	43.916.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.288.643.670	1.288.643.670	1.288.643.670
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.550.000	65.550.000	65.550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	65.550.000	65.550.000	65.550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	65.550.000	65.550.000	65.550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	613.449.800	583.449.800	598.939.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.549.800	47.549.800	55.539.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.150.000	4.150.000	4.150.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.399.800	43.399.800	51.389.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	565.900.000	535.900.000	543.400.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	355.000.000	355.000.000	355.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.900.000	180.900.000	188.400.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.030.000	2.890.000	3.130.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.030.000	2.890.000	3.130.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.030.000	2.890.000	3.130.100
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.820.000	26.820.000	26.820.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.820.000	26.820.000	26.820.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.990.000	3.990.000	3.990.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.980.000	4.980.000	4.980.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.650.000	3.650.000	3.650.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.720.000	3.720.000	3.720.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.480.000	10.480.000	10.480.000
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Binuang	6.897.088.049	6.540.895.249	6.617.088.049
7.01.0.00.0.00.03.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	6.897.088.049	6.540.895.249	6.617.088.049
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01				KECAMATAN	6.897.088.049	6.540.895.249	6.617.088.049
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.878.971.249	4.543.251.049	4.564.868.849
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	4.150.000	4.150.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.150.000	4.150.000	4.150.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.699.140.629	3.701.540.629	3.701.540.729
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.696.140.629	3.696.140.629	3.696.140.729
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	2.700.000	2.700.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000	2.700.000	2.700.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.282.300	505.105.200	507.279.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.585.600	5.355.600	5.355.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.546.700	26.546.700	26.546.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.444.000	65.629.000	65.629.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.494.000	13.462.900	13.647.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.212.000	394.111.000	396.101.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	437.160.320	131.114.820	150.558.020
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.139.100	95.519.900	114.963.100
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.176.300	20.750.000	20.750.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.844.920	14.844.920	14.844.920
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.781.000	114.930.600	114.930.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.281.000	35.830.600	35.830.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	76.200.000	76.200.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.457.000	86.409.800	86.409.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.481.300	77.434.100	77.434.100
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.975.000	2.975.000	2.975.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.700	6.000.700	6.000.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.192.800	77.192.800	77.192.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	77.192.800	77.192.800	77.192.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.192.800	77.192.800	77.192.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.873.472.700	1.894.911.900	1.929.911.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.422.700	54.422.700	66.922.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.150.000	2.150.000	2.150.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.272.700	52.272.700	64.772.700

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.820.050.000	1.840.489.200	1.862.989.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.010.950.000	1.158.789.200	1.158.789.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	809.100.000	681.700.000	704.200.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.761.800	4.850.000	24.425.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.761.800	4.850.000	24.425.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	46.761.800	4.850.000	24.425.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.689.500	20.689.500	20.689.500
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.689.500	20.689.500	20.689.500
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.970.000	1.970.000	1.970.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.985.000	1.985.000	1.985.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.734.500	2.734.500	2.734.500
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000					Kecamatan Bungur	3.302.863.405	3.046.363.405	3.082.863.405
7.01.0.00.0.00.04.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	3.302.863.405	3.046.363.405	3.082.863.405
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01			KECAMATAN	3.302.863.405	3.046.363.405	3.082.863.405
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.906.105	2.883.976.105	2.919.026.105
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.080.000	5.080.000	5.080.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.080.000	5.080.000	5.080.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.857.327.145	1.857.327.145	1.857.327.145
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.854.102.145	1.854.102.145	1.854.102.145
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.848.500	1.848.500	1.848.500
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.376.500	1.376.500	1.376.500
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.217.793	379.914.900	385.199.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.173.200	13.124.800	13.124.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.196.900	20.196.900	20.434.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.213.893	50.674.700	52.274.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.579.800	10.864.500	10.866.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.054.000	285.054.000	288.498.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345.987.407	132.364.200	160.129.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.315.700	54.354.500	75.954.500
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.671.707	78.009.700	84.175.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.760.860	90.740.160	90.740.160
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3.480.000	3.480.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.480.860	34.480.860	34.480.860

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	52.779.300	52.779.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.532.900	418.549.700	420.549.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.916.900	26.933.700	26.933.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	7.000.000	9.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	429.616.000	384.616.000	384.616.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.600.000	72.600.000	72.600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72.600.000	72.600.000	72.600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	72.600.000	72.600.000	72.600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.749.900	41.749.900	46.549.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.749.900	41.749.900	46.549.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.149.900	38.149.900	42.949.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.920.000	3.350.000	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.920.000	3.350.000	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.920.000	3.350.000	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.687.400	44.687.400	44.687.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.687.400	44.687.400	44.687.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.275.000	4.275.000	4.275.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.290.000	4.290.000	4.290.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.900.000	6.900.000	6.900.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.292.400	4.292.400	4.292.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.290.000	4.290.000	4.290.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	4.850.000	4.850.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.140.000	5.140.000	5.140.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.650.000	10.650.000	10.650.000
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Tapin Utara	8.559.484.604	8.148.182.504	8.259.484.604
7.01.0.00.0.00.05.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	8.559.484.604	8.148.182.504	8.259.484.604
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01				KECAMATAN	8.559.484.604	8.148.182.504	8.259.484.604
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.763.152.391	5.480.530.291	5.539.352.391
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.445.000	6.445.000	6.445.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.445.000	6.445.000	6.445.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.967.035.991	4.967.035.991	4.967.035.991

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.485.991	4.964.485.991	4.964.485.991
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.275.000	1.275.000	1.275.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.275.000	1.275.000	1.275.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.225.700	274.109.900	329.363.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.469.100	3.469.100	3.469.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.321.400	19.321.400	19.321.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.600.000	27.600.000	27.600.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.565.300	8.631.600	9.505.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	6.236.900	5.619.800	5.619.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.033.000	209.468.000	263.848.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.595.100	43.828.800	43.828.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	25.255.900	0	0
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.339.200	43.828.800	43.828.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.122.100	85.622.100	85.622.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.116.900	31.116.900	31.116.900
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.005.200	54.505.200	54.505.200
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.728.500	103.488.500	107.056.700
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.528.500	17.528.500	21.096.700
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.040.000	6.040.000	6.040.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.160.000	79.920.000	79.920.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.902.100	105.902.100	105.902.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	105.902.100	105.902.100	105.902.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.902.100	105.902.100	105.902.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.664.750.113	2.538.450.113	2.589.150.113
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.545.000	35.445.000	53.745.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.900.000	3.900.000	3.900.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.645.000	31.545.000	49.845.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.624.205.113	2.503.005.113	2.535.405.113
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.215.600	1.215.600	1.215.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.523.705.413	1.503.705.413	1.503.705.413
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.098.084.100	998.084.100	1.028.084.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	1.200.000	0	2.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.680.000	23.300.000	25.080.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.680.000	23.300.000	25.080.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.380.000	2.380.000	2.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.380.000	2.380.000	2.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.380.000	2.380.000	2.380.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2.380.000	2.380.000	2.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.380.000	2.380.000	2.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.380.000	0	2.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	11.400.000	10.800.000
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Bakarangan	3.260.492.166	3.135.492.166	3.177.442.166
7.01.0.00.0.00.06.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.260.492.166	3.135.492.166	3.177.442.166
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01				KECAMATAN	3.260.492.166	3.135.492.166	3.177.442.166
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.116.987.466	3.004.682.466	3.044.179.966
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.260.000	29.260.000	29.420.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.260.000	29.260.000	29.420.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.115.666	1.909.618.066	1.909.534.766
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.715.666	1.906.218.066	1.906.134.766
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.525.000	2.525.000	2.525.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	875.000	875.000	875.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.680.700	398.085.800	419.214.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.705.500	6.705.500	6.705.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.845.700	15.845.700	15.845.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.658.600	52.376.600	62.441.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.028.000	9.328.000	9.179.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.442.900	313.830.000	325.042.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.690.900	107.190.900	108.690.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	6.644.600	14.144.600	15.644.600
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.046.300	93.046.300	93.046.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.520.400	75.227.900	78.227.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	2.320.000	2.320.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.400.400	22.400.400	25.400.400
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	50.507.500	50.507.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.719.800	485.299.800	499.091.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.879.800	30.879.800	43.523.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.210.000	10.900.000	10.900.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	443.630.000	443.520.000	444.668.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.684.700	36.684.700	41.684.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.684.700	36.684.700	41.684.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.684.700	36.684.700	41.684.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.470.000	5.775.000	3.227.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.470.000	5.775.000	3.227.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.470.000	5.775.000	3.227.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.350.000	28.350.000	28.350.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.350.000	28.350.000	28.350.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.280.000	4.280.000	4.280.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.280.000	4.280.000	4.280.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.550.000	4.550.000	4.550.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.640.000	11.640.000	11.640.000
7.01.0.00.0.00.07.0000					Kecamatan Candi Laras Selatan	3.630.944.643	3.362.529.843	3.410.944.643
7.01.0.00.0.00.07.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	3.630.944.643	3.362.529.843	3.410.944.643
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01			KECAMATAN	3.630.944.643	3.362.529.843	3.410.944.643
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.162.635.343	2.975.234.343	3.056.299.143
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.300	6.250.300	6.250.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.300	6.250.300	6.250.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.703.243	1.837.703.243	1.837.703.243
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.834.235.143	1.834.235.143	1.834.235.143
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.007.700	2.007.700	2.007.700
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.460.400	1.460.400	1.460.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.889.000	461.817.800	489.794.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.600	8.414.600	8.414.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.975.400	40.975.400	40.991.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.299.300	59.799.300	54.609.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.142.900	21.446.500	21.916.900
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.026.800	326.682.000	359.362.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.775.700	125.871.500	131.203.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.348.600	56.444.400	61.776.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.427.100	69.427.100	69.427.100
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.873.600	65.073.600	65.375.200

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.507.600	6.507.600	6.809.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.366.000	18.366.000	18.366.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	40.200.000	40.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.143.500	478.517.900	525.972.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.238.300	59.612.700	70.613.100
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.320.000	18.320.000	11.360.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	580.585.200	400.585.200	443.999.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.634.000	80.634.000	80.634.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80.634.000	80.634.000	80.634.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.634.000	80.634.000	80.634.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.272.600	98.272.600	92.022.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98.272.600	98.272.600	92.022.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.600	6.599.600	6.599.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.673.000	91.673.000	85.423.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.707.400	11.493.600	4.893.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.707.400	11.493.600	4.893.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.707.400	11.493.600	4.893.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.695.300	196.895.300	177.095.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260.695.300	196.895.300	177.095.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.400	26.476.400	26.476.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.800	12.144.800	12.144.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.163.200	24.163.200	18.663.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.613.200	6.613.200	6.613.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	7.513.200	7.513.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90.600.000	64.200.000	49.900.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.384.500	6.384.500	6.384.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	86.800.000	49.400.000	49.400.000
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Candi Laras Utara	3.244.741.757	3.019.741.757	3.087.640.957
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.244.741.757	3.019.741.757	3.087.640.957
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				KECAMATAN	3.244.741.757	3.019.741.757	3.087.640.957
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.929.084.957	2.697.098.057	2.787.365.557
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.150.000	5.150.000	5.150.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.150.000	5.150.000	5.150.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.049.144.557	2.050.144.757	2.050.157.479
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.045.711.657	2.046.711.857	2.046.724.579
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.617.900	1.617.900	1.617.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.815.000	1.815.000	1.815.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.080.300	356.595.200	376.371.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.081.900	6.081.900	6.081.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.772.100	15.772.100	15.772.100
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.148.200	62.663.100	73.658.100
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.753.100	11.753.100	11.753.100
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.825.000	255.825.000	264.606.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.601.100	102.601.100	163.118.828
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	10.148.400	10.148.400	10.148.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.152.900	50.152.900	52.652.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.750.000	23.750.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.549.800	18.549.800	80.317.528
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.864.400	92.862.400	102.249.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.176.000	4.176.000	4.176.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.688.400	27.686.400	27.686.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	61.000.000	70.387.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.244.600	89.744.600	90.318.350
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.389.300	55.889.300	56.463.050
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.855.300	33.855.300	33.855.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170.991.200	170.991.200	176.066.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	28.892.000	28.892.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.892.000	28.892.000	28.892.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	142.099.200	142.099.200	147.174.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	142.099.200	142.099.200	147.174.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.795.000	71.795.000	66.931.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.795.000	71.795.000	66.931.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.943.500	3.943.500	0
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.851.500	67.851.500	66.931.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.373.600	30.747.300	3.304.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.373.600	30.747.300	3.304.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.373.600	30.747.300	3.304.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.497.000	49.110.200	53.973.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.497.000	49.110.200	53.973.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.919.000	5.919.000	5.919.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.009.000	6.009.000	10.872.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.429.000	6.429.000	6.429.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	6.613.200	6.613.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.513.200	7.513.200	7.513.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.288.400	2.288.400	2.288.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.338.400	5.338.400	5.338.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Hatungun	3.201.359.069	2.976.359.069	3.011.359.069
7.01.0.00.0.00.09.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.201.359.069	2.976.359.069	3.011.359.069
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01				KECAMATAN	3.201.359.069	2.976.359.069	3.011.359.069
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.038.859.069	2.828.959.069	2.858.959.069
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.874.269	1.801.874.269	1.801.874.269
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.874.269	1.799.874.269	1.799.874.269
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.244.700	406.877.900	406.877.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.390.800	48.177.900	48.177.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	8.000.000	8.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.853.900	320.700.000	320.700.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.949.100	97.528.900	97.528.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.949.100	97.528.900	97.528.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.897.200	70.497.200	70.497.200
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.097.200	3.097.200	3.097.200
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	49.400.000	49.400.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.393.800	442.180.800	472.180.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.373.800	62.160.800	62.160.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.020.000	10.020.000	10.020.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	570.000.000	370.000.000	400.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.000.000	66.000.000	66.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	66.000.000	66.000.000	66.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.000.000	66.000.000	66.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000	45.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	45.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.500.000	42.500.000	47.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	9.900.000	9.900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	9.900.000	9.900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	9.900.000	9.900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.000	26.500.000	26.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000	26.500.000	26.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Salam Babaris	3.221.053.441	2.996.053.441	3.031.053.441
7.01.0.00.0.00.10.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.221.053.441	2.996.053.441	3.031.053.441
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01				KECAMATAN	3.221.053.441	2.996.053.441	3.031.053.441
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.020.259.441	2.822.063.841	2.857.663.941
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.300	14.950.300	16.550.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.960.000	1.960.000	1.960.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.540.300	10.940.300	12.540.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.413.141	1.845.333.141	1.845.333.141
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.838.703.441	1.838.703.441	1.838.703.441
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.874.700	2.794.700	2.794.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.835.000	3.835.000	3.835.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.927.200	331.628.800	350.880.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.303.300	5.878.300	5.878.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.352.600	36.551.100	38.351.100
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.657.000	39.357.000	39.357.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.540.300	6.764.400	7.335.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.074.000	243.078.000	259.958.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.346.400	97.826.200	97.616.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.346.400	97.826.200	97.616.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.938.000	80.241.000	80.241.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	4.640.000	4.640.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	11.100.000	11.100.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.498.000	64.501.000	64.501.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.084.400	452.084.400	467.042.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.432.400	45.432.400	47.126.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.460.000	6.460.000	8.210.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.192.000	400.192.000	411.706.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	94.130.600	94.130.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	1.840.000	1.840.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	1.840.000	1.840.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72.000.000	92.290.600	92.290.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	92.290.600	92.290.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.604.000	51.604.000	56.603.900
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.604.000	51.604.000	56.603.900
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.840.000	2.840.000	2.840.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.764.000	48.764.000	53.763.900
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.160.000	8.225.000	2.625.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.160.000	8.225.000	2.625.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.160.000	8.225.000	2.625.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.030.000	20.030.000	20.030.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.030.000	20.030.000	20.030.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.360.000	6.360.000	6.360.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.400.000	11.400.000	11.400.000
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Tapin Tengah	3.252.305.968	2.996.705.968	3.032.305.968
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.252.305.968	2.996.705.968	3.032.305.968
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				KECAMATAN	3.252.305.968	2.996.705.968	3.032.305.968
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.015.968	2.837.180.968	2.861.575.968
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.850.000	11.241.000	11.241.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.850.000	11.241.000	11.241.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.642.968	1.934.643.303	1.934.643.303
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.017.968	1.926.018.303	1.926.018.303
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.675.000	3.675.000	3.675.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.950.000	4.950.000	4.950.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.481.700	428.588.300	452.983.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.600	5.106.600	5.106.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.285.900	40.570.300	40.570.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.266.300	49.266.300	49.266.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.320.900	11.321.100	11.366.100
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.475.000	2.475.000	2.475.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.027.000	319.849.000	344.199.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	347.613.400	290.722.500	290.722.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	347.613.400	290.722.500	290.722.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.722.400	126.522.365	126.522.365
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.922.400	1.821.200	1.821.200
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.800.000	22.482.000	22.482.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	102.219.165	102.219.165
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.705.500	45.463.500	45.463.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.865.500	33.413.500	33.413.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.840.000	12.050.000	12.050.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.200.000	52.200.000	57.600.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	52.200.000	52.200.000	57.600.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	52.200.000	52.200.000	57.600.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.498.000	51.663.000	58.863.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.598.000	38.763.000	45.963.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.960.000	5.960.000	5.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.638.000	32.803.000	40.003.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.900.000	12.900.000	12.900.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.900.000	12.900.000	12.900.000

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.792.000	3.862.000	2.467.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.792.000	3.862.000	2.467.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.792.000	3.862.000	2.467.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.800.000	51.800.000	51.800.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.800.000	51.800.000	51.800.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.300.000	7.300.000	7.300.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7.01.7.01.0.00.12.0000					Kecamatan Lokpaikat	4.647.704.660	4.360.176.660	4.407.704.660
7.01.7.01.0.00.12.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	4.647.704.660	4.360.176.660	4.407.704.660
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01			KECAMATAN	4.647.704.660	4.360.176.660	4.407.704.660
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.869.820.960	3.633.251.760	3.665.779.760
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000	7.787.100	7.787.100
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.250.000	7.787.100	7.787.100
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.640.993.325	2.640.993.325	2.640.993.325
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.543.325	2.638.543.325	2.638.543.325
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.729.000	319.666.900	350.205.900
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.068.800	5.068.800	5.068.800
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.158.700	15.158.700	15.158.700
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.920.800	60.120.800	65.720.800
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.333.700	17.202.600	20.481.600
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.247.000	222.116.000	243.776.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.377.600	218.377.600	218.377.600
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.179.900	177.179.900	177.179.900
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.197.700	41.197.700	41.197.700
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.236.200	123.636.200	123.636.200
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3.480.000	3.480.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.156.200	44.156.200	44.156.200
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	76.000.000	76.000.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.234.835	322.790.635	324.779.635

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.472.400	39.468.200	41.457.200
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.450.000	7.450.000	7.450.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	451.312.435	275.872.435	275.872.435
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.728.000	75.728.000	75.728.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	75.728.000	75.728.000	75.728.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	75.728.000	75.728.000	75.728.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	635.486.900	605.486.900	620.486.900
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.064.500	56.064.500	63.564.500
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.835.000	5.835.000	5.835.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.229.500	50.229.500	57.729.500
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	579.422.400	549.422.400	556.922.400
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.599.000	1.599.000	1.599.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	358.023.400	358.023.400	358.023.400
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.100.000	189.100.000	196.600.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	700.000	700.000	700.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.608.800	1.650.000	1.650.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.608.800	1.650.000	1.650.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.608.800	1.650.000	1.650.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.060.000	44.060.000	44.060.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.060.000	44.060.000	44.060.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.350.000	4.350.000	4.350.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.150.000	4.150.000	4.150.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000	4.350.000	4.350.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.275.000	4.275.000	4.275.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.850.000	4.850.000	4.850.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	4.200.000	4.200.000
7.01.7.01.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.985.000	15.985.000	15.985.000
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.629.666.378	6.847.856.378	8.547.550.378
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.629.666.378	6.847.856.378	8.547.550.378
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.629.666.378	6.847.856.378	8.547.550.378
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.775.025.478	4.460.530.478	4.387.727.678

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.925.000	6.925.000	6.925.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.925.000	6.925.000	6.925.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.884.078	2.624.903.478	2.625.062.446
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.324.078	2.620.343.478	2.620.502.446
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.060.000	3.060.000	3.060.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.561.500	839.876.900	993.369.900
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.791.200	7.791.200	7.791.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.916.900	60.397.700	60.397.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.191.700	49.191.700	49.191.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.663.300	12.663.300	12.663.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	11.060.000	11.484.000	23.325.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	6.450.000	6.450.000	6.450.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.488.400	691.899.000	833.551.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.596.000	115.143.200	115.143.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.596.000	115.143.200	115.143.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.357.300	222.388.300	233.721.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	2.320.000	2.320.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.948.800	42.050.300	41.383.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.088.500	178.018.000	190.018.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.701.600	651.293.600	413.505.532
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.981.200	41.831.200	41.881.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.310.000	22.040.000	22.040.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	574.874.000	324.568.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.410.400	12.548.400	25.016.132
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	181.478.700	591.468.700	2.534.168.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	181.478.700	591.468.700	2.534.168.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	147.788.700	557.778.700	2.500.478.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	33.690.000	33.690.000	33.690.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.222.536.500	1.220.386.500	1.190.583.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.222.536.500	1.220.386.500	1.190.583.800

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.092.770.000	1.092.770.000	1.092.770.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	61.161.800	64.911.800	48.912.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47.999.900	47.999.900	38.499.900
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.604.800	14.704.800	10.401.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	80.649.300	115.649.300	112.049.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80.649.300	115.649.300	112.049.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.349.400	81.349.400	81.349.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.299.900	34.299.900	30.699.900
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	168.979.200	168.979.200	82.729.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	168.979.200	168.979.200	82.729.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	139.599.200	139.599.200	53.349.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.380.000	29.380.000	29.380.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	200.997.200	290.842.200	240.292.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200.997.200	290.842.200	240.292.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	134.147.400	159.117.400	121.967.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17.999.900	17.999.900	17.999.900

KABUPATEN TAPIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.000.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21.324.900	21.324.900	21.324.900
8.01.000.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	27.525.000	92.400.000	79.000.000
8.01.000.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	0	0
8.01.000.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	0	0

Bupati Tapin



M. Anfin Arpan

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor : 08 TAHUN 2022
 Tanggal : 05 Oktober 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	2	0	3
Golongan IV/c	0	25	4	0	0	5	0	34
Golongan IV/b	0	8	28	0	0	97	0	133
Golongan IV/a	0	3	86	33	0	485	1	608
JUMLAH GOLONGAN IV	0	37	118	33	0	589	1	778
Golongan III/d	0	0	52	205	1	292	10	560
Golongan III/c	0	0	3	146	3	359	9	520
Golongan III/b	0	0	0	64	7	592	122	785
Golongan III/a	0	0	0	13	0	265	256	534
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	55	428	11	1.508	397	2.399
Golongan II/d	0	0	0	0	0	74	103	177
Golongan II/c	0	0	0	0	0	14	120	134
Golongan II/b	0	0	0	0	0	16	31	47
Golongan II/a	0	0	0	0	0	5	22	27
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	109	276	385
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	12	12
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	37	173	461	11	2.206	694	3.582

Bupati Tapin,

M. ARIFIN ARPAN

KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	44.340.991.477,83	157,51
4.1.1	Pajak Daerah	18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	11.409.686.762,34	163,28
4.1.2	Retribusi Daerah	3.257.812.120,00	2.337.412.375,00	- 920.399.745,00	71,75
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	3,00	100
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	51.112.942.192,00	84.964.646.649,49	33.851.704.457,49	166,23
4.2	Pendapatan Transfer	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	- 133.415.011.633,00	88,73
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	- 67.184.219.405,00	93,57
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	- 66.230.792.228,00	52,45
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.174.969.200,00	30.466.329.121,00	- 11.708.640.079,00	72,24
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.845.469.200,00	9.109.587.121,00	- 11.735.882.079,00	43,7
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	0
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	21.329.500.000,00	21.356.742.000,00	27.242.000,00	100,13
	Jumlah Pendapatan	1.302.922.624.512,00	1.202.139.964.277,83	- 100.782.660.234,17	92,26
5	Belanja				

1	2	3	4	5	6	
5.1	Belanja Operasi	954.383.644.132,00	873.848.686.477,00	-	80.534.957.655,00	91,56
5.1.1	Belanja Pegawai	432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	-	10.653.692.243,00	97,54
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	-	59.392.218.295,00	86,53
5.1.3	Belanja Bunga	5.940.375.000,00	1.948.221.349,00	-	3.992.153.651,00	32,8
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	0
5.1.5	Belanja Hibah	69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	-	6.285.043.466,00	91,02
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	-	211.850.000,00	95,65
5.2	Belanja Modal	629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	-	187.148.264.392,00	70,26
5.2.1	Belanja Modal Tanah	101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	-	87.453.141.465,00	13,61
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	-	30.937.368.047,00	63,85
5.2.3	Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	-	51.417.939.541,00	81,6
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	-	14.097.024.174,00	91,04
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.456.033.334,00	2.463.242.169,00	-	2.992.791.165,00	45,15
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	-	3.174.848.613,00	81,52
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	-	3.174.848.613,00	81,52
5.4	Belanja Transfer	176.467.756.112,00	176.034.539.570,00	-	433.216.542,00	99,75
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	-	89.468.808,00	95,8
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	-	343.747.734,00	99,8
	Jumlah Belanja	1.777.416.499.244,00	1.506.125.212.042,00	-	271.291.287.202,00	84,74
	Surplus / (Defisit)	474.493.874.732,00	303.985.247.764,17	-	170.508.626.967,83	64,07
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	-	39.216.109.806,73	91,76
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	326.836.309.232,00	326.836.309.232,27	-	0,27	100
		-	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	148.657.565.500,00	109.921.012.750,00	38.736.552.750,00	73,94
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	20.442.943,00	479.557.057,00	4,09
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	39.216.109.806,73	91,76
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0
	Pembiayaan Netto	474.493.874.732,00	436.777.764.925,27	37.716.109.806,73	92,05
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	132.792.517.161,10	132.792.517.161,10	0

Bupati Kabupaten Tapin

M. ARIFIN ARPAN

Lampiran X : Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin
Nomor : 08 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

**KABUPATEN TAPIN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas di Kas Daerah	97.948.848.794,42
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00
6	Kas di BLUD	32.694.317.624,24
7	Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00
8	Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44
10	Kas Lainnya	0,00
11	Setara Kas	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00
13	Piutang Pendapatan	61.847.267.994,10
14	Piutang Lainnya	825.550.494,00
15	Penyisihan Piutang	(16.854.552.946,00)
16	Beban Dibayar Dimuka	0,00
17	Persediaan	17.784.971.980,49
18	JUMLAH ASET LANCAR	196.395.754.683,69
19	INVESTASI JANGKA PANJANG	
20	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
21	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00
22	Investasi dalam Obligasi	0,00
23	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
24	Dana Bergulir	0,00
25	Deposito Jangka Panjang	0,00
26	Investasi Non Permanen Lainnya	44.850.000,00
27	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	44.850.000,00
28	Investasi Jangka Panjang Permanen	
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	124.322.505.884,78
30	Investasi Permanen Lainnya	0,00
31	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	124.322.505.884,78
32	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	124.367.355.884,78
33	ASET TETAP	
34	Tanah	459.531.680.582,68
35	Peralatan dan Mesin	384.302.483.962,49
36	Gedung dan Bangunan	1.115.184.145.989,58
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.806.019.963.294,51
38	Aset Tetap Lainnya	22.713.071.083,00

1	2	3
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	254.795.701.634,47
40	Akumulasi Penyusutan	(1.957.757.460.932,07)
41	JUMLAH ASET TETAP	2.084.789.585.614,66
42	DANA CADANGAN	
43	Dana Cadangan	0,00
44	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
45	ASET LAINNYA	
46	Tagihan Jangka Panjang	2.225.392.206,00
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
48	Aset Tidak Berwujud	1.755.626.995,00
49	Aset Lain-lain	9.298.876.406,67
50	JUMLAH ASET LAINNYA	13.279.895.607,67
51	JUMLAH ASET	2.418.832.591.790,80
52	KEWAJIBAN	
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
55	Utang Bunga	0,00
56	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
57	Pendapatan Diterima Dimuka	181.439.855,53
58	Utang Beban	380.498.201,00
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	58.888.884.550,00
60	Utang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	59.450.822.606,53
62	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
63	Utang Dalam Negeri	0,00
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	109.921.012.750,00
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	109.921.012.750,00
66	JUMLAH KEWAJIBAN	169.371.835.356,53
67	EKUITAS	
68	EKUITAS	2.249.460.756.434,27
69	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.418.832.591.790,80

Bupati Kabupaten Tapin

M. ARIFIN ARPAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
2	Arus Kas Masuk	
3	Penerimaan Pajak Daerah	29.439.686.762,34
4	Penerimaan Retribusi Daerah	2.337.412.375,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.701.395.003,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	84.964.646.649,49
7	Penerimaan Dana Perimbangan	811.326.553.141,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah	63.219.134.000,00
9	Penerimaan Dana Desa	102.630.432.454,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil	73.054.374.772,00
11	Penerimaan Hibah	9.109.587.121,00
12	Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.349.600.000,00
16	Jumlah Arus Kas Masuk	1.202.132.822.277,83
17	Arus Kas Keluar	
18	Pembayaran Pegawai	422.170.852.450,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	381.394.334.514,00
20	Pembayaran Bunga	1.948.221.349,00
21	Pembayaran Hibah	63.673.128.164,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial	4.662.150.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga	14.008.130.387,00
24	Pembayaran Bagi Hasil	2.039.312.404,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan	173.995.227.166,00
28	Jumlah Arus Kas Keluar	1.063.891.356.434,00
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	138.241.465.843,83
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	
31	Arus Masuk Kas	
32	Hasil Penjualan Peralatan Mesin	1.892.000,00
33	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.250.000,00
34	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-
35	Jumlah Arus Kas Masuk	7.142.000,00
36	Arus Keluar Kas	
37	Perolehan Tanah	13.781.914.000,00
38	Perolehan Peralatan dan Mesin	54.642.456.139,00
39	Perolehan Gedung dan Bangunan	228.023.651.539,00
40	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.322.591.761,00
41	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.463.242.169,00
42	Perolehan Aset Lainnya	-
44	Jumlah Arus Kas Keluar	442.233.855.608,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	- 442.226.713.608,00
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
47	ARUS KAS MASUK	
48	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi / Penyertaan Modal	-
49	Penerimaan Pinjaman Daerah	109.921.012.750,00

1	2	3
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	20.442.943,00
50	Jumlah Arus Kas Masuk	109.941.455.693,00
51	Arus Keluar Kas	
52	Pembayaran Pokok Utang	-
53	Pemberian Pinjaman Daerah	-
54	Jumlah Arus Kas Keluar	-
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	109.941.455.693,00
56	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	
57	Arus Masuk Kas	
58	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	842.435.358.324,00
59	Penerimaan transfer	-
61	Jumlah Arus Kas Masuk	842.435.358.324,00
62	Arus Keluar Kas	
63	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	842.435.358.324,00
64	Pengeluaran transfer	-
65	Jumlah Arus Kas Keluar	842.435.358.324,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-
67	Kenaikan/(Penurunan Kas)	- 194.043.792.071,17
68	Saldo Awal Kas	
69	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP, dan Bendahara BOS	326.836.309.232,27
76	Saldo Akhir Kas	132.792.517.161,10
77	Terdiri dari :	
78	Kas di BUD (Kas Daerah)	97.948.848.794,42
79	Kas di Bendahara Penerimaan	-
80	Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00
81	Kas di BLUD	32.694.317.624,24
82	Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00
83	Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44
84	Saldo Akhir Kas	132.792.517.161,10

Bupati Kabupaten Tapin

M. ARIFIN ARPAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan seluruh sumber daya yang dikuasainya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam melakukan reformasi sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Perundang-Undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; dan



- h. memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- p. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua;



- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021;
- r. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam enam bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA/SiKPA)



- 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Dana Cadangan
 - 5.3.5 Aset Lainnya
 - 5.3.6 Kewajiban
 - 5.3.7 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/Defisit
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
 - 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.6 Saldo Awal Kas
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi regional merupakan serangkaian aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional antar daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi regional yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baiknya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif *Covid-19* rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Dari sisi *demand*, komitmen Pemerintah dalam PC-PEN (Penanganan Covid – Pemulihan Ekonomi Nasional) mendorong konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12%. Pembentukan Modal Tetap Bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54% seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% disusul dengan impor yang tumbuh 31,22%.

Selanjutnya dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 21,58%.

Beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi *Covid-19* juga melanjutkan penguatan pertumbuhan, seperti sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Kami juga melihat, sektor pertanian masih konsisten tumbuh selama pandemi dan berperan penting terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Pemulihan ekonomi global yang terjadi sepanjang semester I-2021 juga mendorong perbaikan ekonomi domestik serta menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Tren pemulihan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga akhir 2021.

Dukungan ekonomi global ini berpotensi melanjutkan surplus neraca perdagangan yang telah terjadi selama 14 bulan berturut-turut dan menambah pemasukan devisa. Hal ini juga berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan nikel. Transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkendali dengan baik turut berkontribusi positif terhadap ketahanan sektor eksternal. Kinerja yang baik dari sektor eksternal tersebut diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian.

Beberapa indikator utama juga menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Efek pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir ini diyakini hanya bersifat sementara, tidak sedalam seperti di awal pandemi 2020. Permintaan domestik diharapkan akan tetap menguat hingga akhir tahun 2021, seperti yang tercermin dari IKK yang berada pada level optimis, serta penjualan kendaraan bermotor yang tetap tumbuh. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga diperkirakan membaik, tercermin dari peningkatan PMA dan PMDN, konsumsi semen, serta impor barang modal dan bahan baku.

Prospek perbaikan juga terlihat dari UMKM, tercermin dari peningkatan permintaan atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Semester-I 2021. Realisasi KUR pada periode Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 mencapai Rp148,08 triliun atau sudah mencapai 51,96% dari target terbaru di 2021 yang sebesar Rp285 triliun.

Merebaknya varian *Delta Covid-19* di awal Triwulan III-2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia.

Sejak 1 Juli sampai dengan sekarang, rata-rata kasus aktif mencapai 462.647 kasus, namun apabila bisa segera diturunkan kembali ke level 100 ribu-an, maka mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa secara bertahap dibuka mulai September 2021. Kemudian, dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, diharapkan ekonomi akan bisa terjaga di Triwulan IV-2021.

Pemerintah telah merespon peningkatan kasus aktif melalui pengetatan dalam kebijakan PPKM sehingga diharapkan kasus aktif dan *positivity rate* dapat segera turun. Kebijakan PPKM juga telah efektif menurunkan mobilitas masyarakat, sehingga peningkatan kasus *Covid-19* dapat ditekan. Penurunan mobilitas yang terjadi menyebabkan kontraksi terhadap belanja masyarakat, terlihat dari indeks belanja yang melambat sejak Juni 2021. Perlambatan ini tidak sedalam seperti pada awal pandemi pada tahun 2020 dan diyakini hanya bersifat sementara.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengendalian *Covid-19*, karena strategi ini merupakan *necessary condition* untuk percepatan pemulihan ekonomi ke depan. Angka kasus aktif akan ditekan lagi dan perekonomian bisa digenjot ke arah positif kembali (di triwulan selanjutnya).



Seluruh upaya Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran *Covid-19* diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. *Counter policy* yang dilakukan Pemerintah serta tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan menjaga pertumbuhan Triwulan III-2021 tidak turun terlalu dalam.

Selain itu, pemulihan ekonomi mitra dagang utama Indonesia akan memberikan dorongan terhadap peningkatan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Potensi normalisasi konsumsi masyarakat paska pelanggaran PPKM juga akan memacu pemulihan ekonomi yang lebih baik pada Triwulan IV-2021.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi regional yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baiknya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, diperlukan beberapa tahapan mulai dari kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat. Dalam tahapan perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi kebijakan. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif berguna untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa sekarang, serta sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Salah satu indikator statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga pada periode penghitungan, bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dengan tujuan mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 191.801 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk miskinnya mengalami kenaikan sebesar 1,026 ribu jiwa dibanding tahun 2020 menjadi 6.925 ribu jiwa pada tahun 2021, demikian juga dengan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 3,60% pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,06%.

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut perkembangan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021.

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
1	2	3	4
2014	314.696	6.520	3,63
2015	330.033	7.010	3,88
2016	369.153	6.810	3,70
2017	390.488	7.010	3,77
2018	405.591	6.980	3,70
2019	406.367	6.507	3,41
2020	446.577	5.899	3,06
2021	459.160	6.925	3,60

Sumber : BPS Kabupaten Tapin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 sebesar 3,06% dan pada Tahun 2021 sebesar 3,60% atau mengalami kenaikan sebesar 0,54%.

Sedangkan Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 3,45 ke Tahun 2021 menjadi sebesar 0,28 atau mengalami penurunan sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Tahun	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2012	0,48	0,08
2013	0,34	0,05
2014	0,37	0,06
2015	0,46	0,08
2016	0,25	0,03
2017	0,40	0,08
2018	0,35	0,06
2019	0,46	0,09
2020	0,45	0,12
2021	0,28	0,04

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Pusat



Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (a) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha; dan (c) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebesar 4,96%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,73%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,96% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin untuk Tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tapin yang diukur oleh Gini Ratio tidak tersedia

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:



- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebesar 70,31 dengan kategori tinggi dan Tahun 2020 adalah sebesar 70,11 dengan kategori yang masih tinggi.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebesar 70,31, yang jika dibandingkan dengan pencapaian IPM Tahun 2020 sebesar 70,11 mengalami kenaikan sebesar 0,20. Berikut realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021.

Tahun	IPM
2010	64,89
2011	65,41
2012	65,92
2013	66,48
2014	66,99
2015	67,67
2016	68,05
2017	68,70
2018	69,53
2019	70,13
2020	70,11
2021	70,31

Sumber: BPS Kabupaten Tapin

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Tapin rata-rata mengalami percepatan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan sektor utama Kabupaten Tapin yaitu sektor pertambangan. Pada periode Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin sebesar 4,24%, Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin turun menjadi sebesar minus 1,49% serta pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin naik menjadi sebesar 3,41%.



2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (Nasional), tingkat inflasi Kabupaten Tapin Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak tersedia (*not available*).

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Tapin

Struktur perekonomian di Tapin Tahun 2021 didominasi oleh beberapa sektor besar yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini tercermin dari sumbangan ketiga sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yang cukup besar.

Struktur perekonomian Kabupaten Tapin dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam jutaan rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.625.550	1.642.880	1.777.050	1.715.850	1.712.990
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2.066.270	2.289.030	2.293.860	2.236.350	2.574.050
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	522.240	545.990	573.730	561.280	617.210
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6.840	7.870	8.440	9.060	9.700



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	23.410	25.810	27.260	27.280	28.410
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	420.320	456.460	491.500	491.170	529.370
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	732.860	813.700	892.400	906.920	961.510
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	237.330	260.080	278.940	278.410	294.750
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	171.360	188.920	201.220	204.950	222.950
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	263.650	290.080	312.180	333.830	360.470
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	85.130	94.390	103.730	109.510	114.610
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	104.310	112.720	120.230	126.640	134.470
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8.630	9.300	10.140	10.150	10.990
14	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	572.360	617.210	661.340	678.640	709.610
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	383.560	419.090	445.700	456.540	490.030
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	136.520	148.080	158.680	166.330	190.390
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	70.460	77.550	80.880	82.800	85.800
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	7.430.810	7.999.160	8.437.290	8.395.700	9.047.330

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Pusat

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2018	1.217.203.758.037,35	1.230.096.574.939,00
2019	1.198.415.255.115,33	1.291.524.486.921,94
2020	1.116.864.597.728,00	1.534.525.280.796,08
2021	1.302.922.624.512,00	1.777.416.499.244,00

Sumber : KUA dan PPA series 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Mengalami Perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pendapatan Daerah tahun 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah tahun 2021 dialokasikan untuk menunjang Prioritas Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan Pemerintahan Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini.

Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



Penanganan Pandemi *Covid-19*. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi *Covid-19*. *Refocusing* anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi *Covid-19* dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021. Penerimaan dalam rencana pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Dalam mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Tapin, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:

- Dana perimbangan meliputi dana transfer umum; dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.
- Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik. Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mendapat dukungan dari Pemerintah untuk bisa pulih.

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan *Indonesia Care/I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata. Dukungan juga telah diberikan kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

Pemerintah melalui dana PEN juga mengalokasikan sebesar 7,67 triliun rupiah pada tahun ini, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata.

Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi 60 miliar rupiah. Ini berarti meningkat hampir 3 kali lipat dibanding tahun 2020 yang anggarannya 24 miliar rupiah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, secara virtual pada Senin (27/09). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sasaran peserta BIP adalah tujuh subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata.



Hibah ini mekanismenya ditransfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata di 101 kabupaten/kota berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut definisi dari Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib untuk Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dirinci atas jenis belanja modal, sedangkan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dirinci atas jenis belanja tidak terduga, serta Belanja merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dirinci atas jenis:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Untuk penanganan pandemi akibat virus *Covid-19* ini didasarkan pada Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor: SE-2/PK/2021 guna mendukung Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro. Perhitungan *Refocussing* dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum sebesar Rp426.224.950,00. Terhadap DAU ini terjadi pengurangan sebesar 2,23% sehingga alokasi DAU Kabupaten Tapin hanya akan terealisasi sebesar Rp426.224.950,00 dikurangi Rp9.525.115.000,00 yaitu sebesar Rp416.699.835.000,00.

Dari perkiraan DAU untuk Kabupaten Tapin yang akan diterima sebesar Rp416.699.835.000,00 akan dilakukan *refocusing* minimal 8% untuk penanganan *Covid-19*, khusus untuk pelaksanaan vaksin dan pasca vaksin yaitu sebesar Rp33.335.986.800,00.

Untuk ketentuan *refocusing* lainnya terhadap belanja yang bersumber dari:

- a. Dana Insentif Daerah (DID)
Minimal 30% dari Dana Insentif Daerah yaitu sebesar Rp63.219.134.000,00 x 30% atau sebesar Rp18.965.740.200,00;
- b. Dana Desa (DD)
Minimal 8% dari Dana Desa atau sebesar Rp102.973.891.000,00 x 8% atau sebesar Rp8.237.911.280,00;
- c. Dana Kelurahan
Dari dana kelurahan yang telah dialokasikan pada APBD TA. 2021 sebesar Rp500.000.000,00 dapat dilakukan Realokasi Belanja atau Penambahan Belanja.

Total perkiraan *refocusing* Belanja Daerah untuk penanganan *Covid-19* sesuai Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021 untuk Kabupaten Tapin sebesar Rp61.826.842.000,00, yang bersumber dari :

1. Pengurangan alokasi DAU sebesar Rp9.525.115.000,00
2. DAU/Dana Bagi Hasil sebesar Rp33.335.986.800,00
3. Dana Insentif Daerah sebesar Rp18.965.740.200,00



2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dilakukan pada tahun 2021 antara lain Pemberian Pinjaman Daerah untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2021. Secara ringkas capaian kinerja keuangan pada masing-masing urusan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.119.561.451.822,00	954.615.843.098,00	85,27
1	Pendidikan	268.363.847.190,00	259.868.903.114,00	96,83
2	Kesehatan	256.855.943.139,00	204.609.880.272,00	79,66
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	524.111.217.375,00	430.714.563.355,00	82,18
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	24.966.456.177,00	20.077.963.391,00	80,42
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	28.683.454.016,00	25.953.768.325,00	90,48
6	Sosial	16.580.533.925,00	13.390.764.641,00	80,76
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	179.998.751.425,00	113.838.804.396,00	63,24
1	Tenaga Kerja	5.120.600.856,00	5.009.410.868,00	97,83
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.168.698.061,00	4.804.563.971,00	92,96
3	Pangan	6.661.431.585,00	6.484.632.257,00	97,35
4	Pertanahan	75.136.870.107,00	14.398.949.400,00	19,16
5	Lingkungan Hidup	17.771.561.167,00	16.550.016.530,00	93,13
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.734.008.757,00	5.408.457.756,00	94,32
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.070.479.514,00	7.788.149.177,00	96,50
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.174.271.476,00	8.898.828.028,00	87,46
9	Perhubungan	6.595.641.875,00	6.369.329.522,00	96,57
10	Komunikasi dan Informatika	5.457.579.656,00	5.344.527.352,00	97,93
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.646.900,00	46.809.300,00	46,98
12	Penanaman Modal	5.947.653.498,00	5.455.782.896,00	91,73
13	Kepemudaan dan Olah Raga	17.937.356.250,00	17.765.630.096,00	99,04
14	Kebudayaan	4.858.119.815,00	4.407.531.382,00	90,73
15	Perpustakaan	5.152.409.358,00	4.994.219.061,00	96,93
16	Kearsipan	112.422.550,00	111.966.800,00	99,59
	URUSAN PILIHAN	59.459.267.602,00	54.032.090.358,00	90,87
1	Kelautan dan Perikanan	6.774.539.663,00	6.605.042.785,00	97,50
2	Pariwisata	2.944.666.872,00	2.777.437.810,00	94,32
3	Pertanian	36.127.705.767,00	33.015.123.547,00	91,38
4	Perdagangan	8.658.880.926,00	7.621.108.220,00	88,01
5	Perindustrian	4.953.474.374,00	4.013.377.996,00	81,02
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	418.397.028.395,00	383.638.474.190,00	91,69
1	Administrasi Pemerintahan	72.906.420.459,00	66.467.699.948,00	91,17
2	Pengawasan	11.662.284.016,00	10.249.604.200,00	87,89
3	Perencanaan	8.376.194.398,00	7.658.588.536,00	91,43
4	Keuangan	220.886.289.250,00	209.319.169.396,00	94,76
5	Kepegawaian	7.578.180.397,00	6.969.258.492,00	91,96
6	Pendidikan dan Pelatihan	376.014.000,00	247.588.000,00	65,85
7	Penelitian dan Pengembangan	742.962.600,00	665.498.350,00	89,57
8	Sekretariat DPRD	41.427.808.602,00	32.478.174.152,00	78,40
9	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	47.929.163.623,00	43.495.271.672,00	90,75
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.511.711.050,00	6.087.621.444,00	93,49



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengukuran aset lancar sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 4) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu dengan cara mengurangi nilai nominal (bruto) piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih. Karena Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai piutang dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a) Penilaian Kualitas Piutang; dan
- b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan kualitas piutang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Untuk taksiran piutang tak tertagih Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (limapuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan lebih sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu diatas tiga bulan sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu tiga bulan atau kurang dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan non permanen.

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
 - b) Investasi jangka panjang non permanen
 - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- e) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
- f) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan/tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 6) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat/pihak lain; dan
- 7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya perencanaan;
- 2) biaya lelang;
- 3) biaya pengawasan;
- 4) biaya persiapan tempat;
- 5) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 6) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 7) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 8) biaya konstruksi.



Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
- 2) Peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
- 3) Bangunan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00;
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
- 5) Aset tetap lainnya:
 - a) Barang bercorak budaya/kesenian dan aset tetap lainnya sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00;
 - b) Hewan/ternak dan tanaman dikapitalisasi tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut;
 - (1) Untuk hewan/ternak yang digolongkan dalam aset tetap lainnya adalah jenis ternak besar dan ternak kecil;
 - (2) Tanaman pertanian yang digolongkan dalam aset tetap lainnya yaitu jenis tanaman hortikultura;
 - (3) Sedangkan untuk tanaman perkebunan yaitu jenis tanaman keras (tahunan).
 - c) Buku perpustakaan sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan aset tetap dihitung secara bulanan sejak tanggal pembukuan dari aset tetap dimaksud. Oleh karena aset milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah maka nilai sisa/residu tidak diakui.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dengan demikian setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	8
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	7
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	5
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	6
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	4
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	7
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	30
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	6
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
1	3	2	11	Alat Ukur	4
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	7
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	4
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	8
1	3	2	21	Alat Kedokteran	7
1	3	2	22	Alat Kesehatan	7
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	4
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	8
1	3	2	28	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	2	31	Senjata Api	8
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10
1	3	3	03	Bangunan Menara	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	05	Tugu Peringatan	25



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	06	Candi	25
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	25
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	25
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10
1	3	3	10	Rambu-Rambu	10
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	15
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	10
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	10
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	10

Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan agar ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang agar dilakukan penyesuaian.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.



Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi dan menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus, jika setelah Perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Namun demikian pada prakteknya banyak satuan kerja yang melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya, jika hal ini terjadi renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (Aset Tetap Renovasi).

Renovasi aset tetap berdasarkan obyeknya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi seperti ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap. Namun jika renovasi tersebut belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal pelaporan maka akan dicatat sebagai KDP.



- 2) Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkungan entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir tahun anggaran aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/menyewa gedung milik K/L). Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

- 3) Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/menyewa gedung milik K/L) Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.



Pengukuran Aset Lainnya

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- 2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 4) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- 5) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
- 6) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Penyajian Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti *software*, *website*, *database*, hasil kajian/penelitian dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- barang yang dibeli sudah diterima, atau
- jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau



- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), kecuali pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LRA dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan-LRA juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LRA.

Pengungkapan Pendapatan-LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan – LRA adalah:

- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten, dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah kabupaten.



Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) rincian belanja per SKPD;
- 2) penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.



Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

h. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.

Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Penyajian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda; dan



- 3) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

i. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO;
- 2) Pendapatan Transfer-LO;
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- 4) Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- 5) Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak pemerintah daerah atas suatu pendapatan (*earned*); atau
- 2) Telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan; dan
- 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.



Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. PPK-SKPD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap "Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)"; dan
- 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- 1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara



pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak



Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

- 2) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- 3) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.



Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah-LO;
- b. Dana Darurat-LO; dan
- c. Pendapatan Lainnya-LO.

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan yang Sah-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini diterima di RKUD.

Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat diterima di RKUD.

Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas).

Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:

- 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO;
- 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan
- 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.



Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.

Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).



j. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban



dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- 2) Beban Transfer;
- 3) Beban Non Operasional;
- 4) Beban Luar Biasa.



Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.



Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Pengakuan Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- 2) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 3) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 4) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- 7) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- 8) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- 9) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 10) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



11) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.302.922.624.512,00	1.202.139.964.277,83	1.187.334.462.928,80

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan secara keseluruhan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.202.139.964.277,83 atau mencapai 92,26% dari anggaran Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp1.302.922.624.512,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	98.887.171.699,80
2	Pendapatan Transfer	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	1.061.166.426.882,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.174.969.200,00	30.466.329.121,00	27.280.864.347,00
	Jumlah	1.302.922.624.512,00	1.202.139.964.277,83	1.187.334.462.928,80

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	98.887.171.699,80

Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp121.443.140.789,83 dari anggaran PAD Tahun 2021 sebesar Rp77.102.149.312,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	17.108.196.842,51
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.257.812.120,00	2.337.412.375,00	2.594.001.024,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	3.698.384.878,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	51.112.942.192,00	84.964.646.649,49	75.486.588.955,29
	Jumlah	77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	98.887.171.699,80



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	17.108.196.842,51

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp29.439.686.762,34 merupakan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	110.000.000,00	90.850.500,00	80.862.380,00
2	Pajak Restoran	2.550.000.000,00	2.382.450.493,50	2.285.703.184,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	6.216.000,00	5.761.700,00
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	602.070.579,07	518.127.312,69
5	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.744.049.854,06	9.504.025.830,13
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	44.858.700,00	33.175.200,00
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.837.400,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	14.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	6.397.749.261,71	2.718.131.882,59
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000.000,00	1.000.288.796,00	908.928.504,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000.000,00	9.160.315.178,00	1.039.480.849,10
Jumlah		18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	17.108.196.842,51

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.257.812.120,00	2.337.412.375,00	2.594.001.024,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.337.412.375,00 merupakan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang terdiri dari:

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	865.000.000,00	625.428.202,00	703.179.521,00
	Dinas Kesehatan	865.000.000,00	625.428.202,00	703.179.521,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.250.000,00	48.391.000,00	2.400.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	26.250.000,00	48.391.000,00	2.400.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.400.000,00	37.600.000,00	680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
	Dinas Perhubungan	15.400.000,00	37.600.000,00	680.000,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	7.300.000,00	206.660.000,00
	Dinas Perdagangan	-	7.300.000,00	-
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000,00	134.043.000,00	152.160.900,00
	Dinas Komunikasi & Informatika	50.000.000,00	134.043.000,00	152.160.900,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	545.712.120,00	456.171.000,00	286.448.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	78.225.000,00	37.880.000,00	3.750.000,00
	Dinas Perhubungan	-	39.690.000,00	17.640.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	330.364.000,00	292.100.000,00	231.250.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	11.080.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	127.123.120,00	61.851.000,00	18.528.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	10.550.000,00	4.200.000,00
	Dinas Pertanian	-	2.100.000,00	-
	Dinas Perdagangan	-	12.000.000,00	-
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	650.000.000,00	556.745.000,00	563.930.000,00
	Dinas Perdagangan	650.000.000,00	556.745.000,00	563.930.000,00
8	Retribusi Terminal	393.000.000,00	156.682.000,00	3.200.000,00
	Dinas Perhubungan	24.000.000,00	-	3.200.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.000.000,00	24.202.000,00	-
	Dinas Perdagangan	330.000.000,00	132.480.000,00	-
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.200.000,00	89.200.000,00	105.282.000,00
	Dinas Perhubungan	62.200.000,00	89.200.000,00	87.620.000,00
	RSUD Datu Sanggul	-	-	17.662.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	15.500.000,00	9.700.000,00	10.725.000,00
	Dinas Pertanian	15.500.000,00	9.700.000,00	10.725.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	59.000.000,00	2.442.500,00	3.198.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.000.000,00	2.442.500,00	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	-	3.198.000,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	65.750.000,00	63.937.500,00	43.050.000,00
	Dinas Perikanan	40.750.000,00	40.750.000,00	13.500.000,00
	Dinas Pertanian	25.000.000,00	23.187.500,00	29.550.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	149.522.173,00	431.005.103,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450.000.000,00	149.522.173,00	431.005.103,00
14	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	250.000,00	1.350.000,00
	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	250.000,00	1.350.000,00
15	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	-	80.732.500,00
	Dinas Perhubungan	55.000.000,00	-	80.732.500,00
	Jumlah	3.257.812.120,00	2.337.412.375,00	2.594.001.024,00

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	3.698.384.878,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.701.395.003,00 merupakan realisasi penerimaan Bagian Laba (deviden) Tahun 2021 atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada BUMD, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Setoran Deviden Bank Kalsel	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	3.698.384.878,00
	Jumlah	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	3.698.384.878,00

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
51.112.942.192,00	84.964.646.649,49	75.486.588.955,29

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp84.964.646.649,49 merupakan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	7.142.000,00	6.717.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.250.000.000,00	10.244.600.686,33	14.715.035.358,00
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	41.547.609,82	4.977.975,00
4	Pendapatan denda Pajak Daerah	0,00	104.760.181,00	86.782.786,00
5	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	1.063.945.475,00	2.590.732.052,37
6	Pendapatan BLUD	38.000.000.000,00	64.508.029.500,13	49.753.442.609,92
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.862.942.192,00	5.889.268.129,00	6.034.994.138,00
8	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht)	0,00	522.749.819,00	0,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.582.603.249,21	2.281.907.036,00
10	Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	12.000.000,00
	Jumlah	51.112.942.192,00	84.964.646.649,49	75.486.588.955,29

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp7.142.000,00 merupakan hasil penjualan aset daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	
	Penjualan bahan bangunansisa pembongkaran atap kantor Setda lama	2.000.000,00
	Penjualan bahan bangunansisa pembongkaran kantor PKM Tambaruntung	3.250.000,00
	Sub Jumlah	5.250.000,00
2.	Hasil Penjualan Peralatan Mesin	
	Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai pada Disdukcapil	642.000,00
	Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai pada Inspektorat	200.000,00
	Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai pada DPMD	800.000,00
	Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai pada Kecamatan Binuang	100.000,00
	Penjualan perlengkapan kantor yang tidak terpakai pada Dinas Perindustrian	150.000,00
	Sub Jumlah	1.892.000,00
	Jumlah	7.142.000,00

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	6.250.000.000,00	10.071.861.385,54	14.044.385.783,00
2	Jasa Giro Bendahara	0,00	102.905.385,01	90.969.338,00
3	Jasa Giro JKN	0,00	13.552.233,00	17.794.527,00
4	Jasa Giro BOS	0,00	56.281.682,78	60.144.843,00
5	Jasa Giro Optima	0,00	0,00	501.740.867,00
	Jumlah	6.250.000.000,00	10.244.600.686,33	14.715.035.358,00

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	0,00	41.547.609,82	4.977.975,00
	Jumlah	0,00	41.547.609,82	4.977.975,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan denda PBB - P2	0,00	104.760.181,00	86.782.786,00
	Jumlah	0,00	104.760.181,00	86.782.786,00

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	5.690.468,00	24.001.795,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	0,00	627.945.980,00	167.451.668,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	4.210.000,00	605.000,00
4	Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Dana Hibah	0,00	426.099.027,00	1.508.911.136,00
5	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fisik	0,00	0,00	889.762.453,37
	Jumlah	0,00	1.063.945.475,00	2.590.732.052,37

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Umum BLUD	38.000.000.000,00	64.508.029.500,13	49.753.442.609,92
	Jumlah	38.000.000.000,00	64.508.029.500,13	49.753.442.609,92

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp64.508.029.500,13 dan Rp49.753.442.609,92 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Triwulan I	8.662.046.532,37	10.729.316.437,94
2	Triwulan II	6.625.747.565,85	10.378.790.275,45
3	Triwulan III	24.577.498.598,00	13.773.960.430,40
4	Triwulan IV	24.642.736.803,91	14.871.375.466,13
	Jumlah	64.508.029.500,13	49.753.442.609,92



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.862.942.192,00	5.889.268.129,00	6.034.994.138,00
	Jumlah	6.862.942.192,00	5.889.268.129,00	6.034.994.138,00

Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA Tahun 2021 dan 2020 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Puskesmas Tapin Utara	927.701.506,00	938.525.400,00
2	Puskesmas Binuang	820.416.600,00	901.114.200,00
3	Puskesmas Hatungun	259.059.989,00	235.889.232,00
4	Puskesmas Tambarangan	526.513.342,00	500.599.000,00
5	Puskesmas Salam Babaris	269.692.500,00	264.029.756,00
6	Puskesmas Banua Padang	369.448.000,00	427.901.400,00
7	Puskesmas Bakarangan	481.603.800,00	467.770.050,00
8	Puskesmas Pandahan	241.123.818,00	240.858.450,00
9	Puskesmas Tambaruntung	398.978.499,00	381.820.500,00
10	Puskesmas Baringin	520.108.450,00	480.237.150,00
11	Puskesmas Margasari	524.919.600,00	619.713.900,00
12	Puskesmas Lokpaikat	327.260.250,00	335.466.500,00
13	Puskesmas Piani	222.441.775,00	241.068.600,00
	Jumlah	5.889.268.129,00	6.034.994.138,00

Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht) Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht)	0,00	522.749.819,00	0,00
	Jumlah	0,00	522.749.819,00	0,00

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bea Balik Nama Toko	0,00	11.562.500,00	42.438.500,00
2	Kurang Setor S3TU PKM Lokpaikat	0,00	0,00	60.000,00
3	Pendapatan Dari Lebih Salur kepada Pemerintah Desa	0,00	1.294.926,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Daerah melalui KPKNL	0,00	27.249.524,00	0,00
5	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fisik	0,00	2.517.126.595,21	0,00
6	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Non Fisik	0,00	14.825.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
7	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi	0,00	655.802,00	0,00
8	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	9.888.902,00	2.239.408.536,00
	Jumlah	0,00	2.582.603.249,21	2.281.907.036,00

Realisasi Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Sewa Pakai Ruang Disamping Kantor UPT Pasar Keraton BPR Tapin Utara Tapin Mandiri Sejahtera	0,00	0,00	12.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	12.000.000,00

5.1.1.2. Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	1.061.166.426.882,00

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.050.230.494.367,00 atau mencapai 88.73% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.183.645.506.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	987.559.906.109,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	73.606.520.773,00
	Jumlah	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	1.061.166.426.882,00

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	987.559.906.109,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp977.176.119.595,00 merupakan realisasi penerimaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	878.167.314.000,00	811.326.553.141,00	835.353.328.109,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	50.002.203.000,00
3	Dana Desa	102.973.891.000,00	102.630.432.454,00	102.204.375.000,00
	Jumlah	1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	987.559.906.109,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
878.167.314.000,00	811.326.553.141,00	835.353.328.109,00

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp811.326.553.141,00 merupakan realisasi penerimaan selama Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	283.163.639.000,00	245.007.552.390,00	271.607.654.107,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	430.487.200.000,00	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00
3	Dana Akokasi Khusus (DAK)	164.516.475.000,00	149.619.165.751,00	141.901.104.002,00
	Jumlah	878.167.314.000,00	811.326.553.141,00	835.353.328.109,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
283.163.639.000,00	245.007.552.390,00	271.607.654.107,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021 sebesar Rp245.007.552.390,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	70.773.879.299,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.624.717.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	327.929.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	624,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	68.554.300,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	165.547.842.703,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	307.010.314,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619.150,00
	Jumlah	245.007.552.390,00

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
430.487.200.000,00	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp416.699.835.000,00 merupakan realisasi penerimaan Kabupaten Tapin selama Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
164.516.475.000,00	149.619.165.751,00	141.901.104.002,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp149.619.165.751,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	23.216.340.000,00	18.932.462.966,00	11.170.098.570,00
2	DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
3	DAK Reguler Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Air minum dan Sanitasi	13.109.997.000,00	12.802.274.865,00	15.440.632.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (DAK Reguler)	9.359.467.000,00	9.258.185.000,00	0,00
5	DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler)	26.351.985.000,00	25.891.252.690,00	26.365.334.022,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK Reguler)	6.667.500.000,00	6.543.687.000,00	7.257.583.750,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler)	1.097.089.000,00	1.092.136.000,00	1.024.547.900,00
8	DAK Bidang Pertanian (DAK Reguler)	2.467.341.000,00	2.934.457.048,00	1.437.629.850,00
9	DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00
10	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.162.800.000,00	3.866.468.000,00	4.198.946.475,00
12	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	55.302.213.000,00	55.302.213.000,00	50.589.267.000,00
13	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	726.000.000,00	1.080.938.000,00	706.500.000,00
14	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	733.465.000,00	594.075.145,00	2.978.000,00
15	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	11.431.172.000,00	4.497.844.536,00	14.837.159.140,00
16	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	3.588.897.000,00	2.896.853.391,00	3.326.306.325,00
17	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	984.193.000,00	938.526.110,00	777.338.670,00
18	DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	0,00	0,00	2.103.039.000,00
19	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	861.464.000,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	405.196.000,00	0,00	0,00
21	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.737.400.000,00	2.652.619.000,00	2.663.743.300,00
22	DAK Non Fisik Pengawasan Obat Dan Makanan	978.783.000,00	0,00	0,00
23	DAK Non Fisik PK2UKM	335.173.000,00	0,00	0,00
24	DAK Non Fisik Dana Bantuan BLPS	0,00	335.173.000,00	0,00
	Jumlah	164.516.475.000,00	149.619.165.751,00	141.901.104.002,00



5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	50.002.203.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp63.219.134.000,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021.

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
102.973.891.000,00	102.630.432.454,00	102.204.375.000,00

Realisasi Dana Desa sebesar Rp102.630.432.454,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa selama Tahun 2021.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	73.606.520.773,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp73.054.374.772,00 merupakan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tapin selama Tahun 2021 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.860.323.000,00	7.911.310.905,18	10.066.178.172,18
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.092.387.000,00	6.152.431.363,82	9.827.826.233,82
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	91.774.039.000,00	47.254.861.890,00	42.643.654.050,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	145.879.000,00	133.695.728,00	142.338.930,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	16.412.539.000,00	11.602.074.885,00	10.926.523.387,00
	Jumlah	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	73.606.520.773,00

5.1.1.1. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
42.174.969.200,00	30.466.329.121,00	27.280.864.347,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp30.466.329.121,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	20.845.469.200,00	9.109.587.121,00	27.280.864.347,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.329.500.000,00	21.356.742.000,00	0,00
	Jumlah	42.174.969.200,00	30.466.329.121,00	27.280.864.347,00

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Hibah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
20.845.469.200,00	9.109.587.121,00	27.280.864.347,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp9.109.587.121,00 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.845.469.200,00	9.109.587.121,00	26.480.864.347,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	8.000.000.000,00	0,00	800.000.000,00
	Jumlah	20.845.469.200,00	9.109.587.121,00	27.280.864.347,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp9.109.587.121,00 seluruhnya merupakan Hibah IPDMIP selama Tahun 2021

5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
21.329.500.000,00	21.356.742.000,00	0,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 sebesar Rp21.356.742.000,00 seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS selama Tahun 2021.

5.1.2. Belanja

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.777.416.499.244,00	1.506.125.212.042,00	1.239.680.432.984,80

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja secara keseluruhan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

2021 adalah sebesar Rp1.506.125.212.042,00 atau mencapai 84,74% dari anggaran belanja Tahun 2021 sebesar Rp1.777.416.499.244,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	954.383.644.132,00	873.848.686.477,00	744.099.463.333,73
2	Belanja Modal	629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	314.884.915.821,07
3	Belanja Tak Terduga	17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	13.420.690.337,00
4	Belanja Transfer	176.467.756.112,00	176.034.539.570,00	167.275.363.493,00
Jumlah		1.777.416.499.244,00	1.506.125.212.042,00	1.239.680.432.984,80

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
954.383.644.132,00	873.848.686.477,00	744.099.463.333,73

realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp873.848.686.477,00 atau mencapai 91,56% dari anggaran sebesar Rp954.383.644.132,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	405.398.178.921,00
2	Belanja Barang dan Jasa	440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	301.614.588.522,73
3	Belanja Bunga	5.940.375.000,00	1.948.221.349,00	1.337.918.090,00
4	Belanja Hibah	69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	25.069.689.500,00
5	Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	10.679.088.300,00
Jumlah		954.383.644.132,00	873.848.686.477,00	744.099.463.333,73

Penjelasan untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	405.398.178.921,00

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp422.170.852.450,00 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan pengeluaran lainnya selama periode Tahun 2021, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	188.340.667.900,00	185.277.847.805,00	187.952.133.120,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	16.178.134.038,00	15.366.334.256,00	15.925.817.822,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	7.448.451.261,00	7.161.135.000,00	7.666.255.750,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	13.979.127.139,00	13.210.898.370,00	13.428.001.675,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.036.838.040,00	1.812.230.000,00	1.685.493.750,00
6	Belanja Tunjangan Beras	10.525.076.118,00	9.817.617.300,00	8.557.983.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	746.819.761,00	655.651.716,00	646.795.360,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	27.102.828,00	2.662.547,00	2.539.401,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	12.892.593.412,00	12.771.047.349,00	11.061.491.876,00
10	Belanja Uang Paket	48.132.000,00	46.998.000,00	47.659.500,00
15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	329.357.700,00	23.050.650,00	13.428.450,00
17	Belanja Uang Jasa Pengabdian	237.710.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
18	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	3.878.640.000,00	3.310.400.000,00	3.319.520.000,00
20	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	1.752.000.000,00	1.512.199.772,00	1.539.038.424,00
21	Belanja Tunjangan Transportasi	3.312.500.000,00	3.312.500.000,00	2.928.500.000,00
22	Belanja Tunjangan Reses	787.500.000,00	787.500.000,00	745.500.000,00
23	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	103.542.820.930,00	101.926.090.145,00	90.201.364.904,00
25	Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	55.302.213.000,00	54.438.428.760,00	48.014.463.900,00
26	Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	726.000.000,00	1.137.250.000,00	1.059.687.500,00
27	Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.870.000,00	1.000.000.000,00
28	Belanja Tunjangan Khusus Guru	733.465.000,00	604.690.800,00	972.010.800,00
30	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	713.093.750,00	671.809.798,00	209.944.725,00
31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	98.811.750,00	53.921.732,00	20.834.719,00
33	Belanja Pegawai untuk Operasional BLUD	248.120.000,00	248.020.000,00	4.772.840.000,00
34	Belanja Honorarium	2.218.616.250,00	1.788.232.000,00	0,00
35	Belanja Uang Representasi DPRD	567.700.000,00	556.395.000,00	0,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.909.200,00	53.283.300,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	62.729.100,00	0,00
38	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	806.772.750,00	0,00
39	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00	63.366.450,00	0,00
40	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	72.000.000,00	270.396,00	0,00
41	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.112.564.700,00	3.835.070.000,00	0,00
42	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
43	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.606.600,00	5.640.000,00	0,00
44	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
45	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.013.636,00	4.417.620,00	0,00
46	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.040.970,00	1.633.484,00	0,00
47	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00	1.740,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
48	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	291.156.314,00	271.793.750,00	0,00
49	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.238.796,00	18.112.860,00	0,00
50	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	17.721.900,00
51	Belanja Tunjangan Komisi	0,00	0,00	31.652.775,00
52	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	17.447.850,00
53	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	5.663.700,00
54	Belanja Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	2.766.500.000,00
55	Belanja Jasa Medis	0,00	0,00	296.364.729,00
56	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	48.200.000,00
57	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LRA	0,00	0,00	439.482.331,00
58	Belanja Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	1.740.000,00
	Jumlah	432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	405.398.178.921,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	301.614.588.522,73

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp381.394.334.514,00 merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja bahan/material, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	124.320.322.360,00	106.939.237.897,00	65.187.456.413,00
2	Belanja Jasa	168.218.397.478,00	145.339.065.986,00	100.768.020.687,00
3	Belanja Pemeliharaan	14.934.957.083,00	13.191.933.795,00	10.230.162.034,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.415.982.200,00	41.075.076.436,00	46.449.292.383,00
5	Belanja Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	16.299.390.965,00	15.742.217.665,00	46.236.631.125,73
6	Belanja Barang dan Jasa Bos	12.399.034.335,00	15.189.655.188,00	220.090.134,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.198.468.388,00	43.917.147.547,00	32.522.935.746,00
	Jumlah	440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	301.614.588.522,73

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

a) Belanja Barang

No.	Belanja Barang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.660.535.727,00	27.040.975.067,00	9.911.969.949,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.689.319.492,00	2.192.687.400,00	2.462.100.081,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.597.402.000,00	7.799.898.277,00	1.979.055.264,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	115.395.800,00	110.111.250,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.945.036.200,00	1.751.904.700,00	396.162.590,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	2.400.000,00	5.560.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	9.000.000,00	8.475.000,00	0,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	239.420.350,00	215.322.566,00	47.430.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.593.671.300,00	3.218.033.977,00	2.491.194.197,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.336.641.820,00	892.502.394,00	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	20.100.000,00	14.070.000,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	61.399.800,00	56.576.300,00	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.966.306.959,00	3.526.116.938,00	5.342.459.200,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.468.959.300,00	1.298.512.110,00	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.456.357.777,00	6.741.018.625,00	8.468.984.789,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	490.098.400,00	335.386.400,00	438.809.043,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.325.000,00	2.925.000,00	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	79.145.600,00	68.622.500,00	0,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.192.247.200,00	1.105.463.350,00	632.287.126,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.365.500,00	18.186.500,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	252.705.800,00	190.849.000,00	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.464.008.200,00	3.729.047.509,00	2.179.772.353,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.465.530.441,00	3.865.152.642,00	3.264.889.900,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.469.894.664,00	5.339.835.482,00	7.913.542.813,00
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.762.419.800,00	2.342.280.100,00	0,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.028.120.000,00	721.007.000,00	0,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	128.628.800,00	127.816.350,00	152.375.189,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.708.835.010,00	8.196.175.619,00	6.664.607.163,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.306.811.000,00	3.435.330.081,00	1.591.661.416,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Barang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
31	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.479.000,00	11.315.000,00	618.470.182,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.100.000,00	1.100.000,00	182.415.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	476.774.520,00	382.840.200,00	0,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	89.430.000,00	12.155.000,00	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.841.069.000,00	14.206.319.715,00	5.043.623.145,00
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.776.800,00	10.700.000,00	854.971.458,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	312.271.600,00	252.400.000,00	75.020.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	882.907.400,00	852.454.000,00	275.628.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.689.395.000,00	1.618.355.600,00	307.100.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.518.325.100,00	1.431.840.745,00	935.178.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	200.806.700,00	183.925.000,00	256.520.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.672.000,00	4.495.000,00	0,00
43	Belanja Pakaian Penyelamatan	245.000.000,00	198.075.000,00	96.920.000,00
44	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	335.764.600,00	325.818.800,00	104.185.000,00
45	Belanja Pakaian KORPRI	3.403.500,00	3.375.000,00	0,00
46	Belanja Pakaian Adat Daerah	51.717.600,00	50.060.000,00	53.700.000,00
47	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.460.443.600,00	1.424.994.700,00	657.060.000,00
48	Belanja Pakaian Olahraga	1.420.154.000,00	1.399.582.000,00	1.139.375.000,00
49	Belanja Pakaian Paskibraka	220.500.000,00	220.500.000,00	143.400.000,00
50	Belanja Alat-Alat Olahraga	0,00	0,00	501.029.555,00
JUMLAH		124.320.322.360,00	106.939.237.897,00	65.187.456.413,00

b) Belanja Jasa

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.324.830.000,00	3.708.730.000,00	3.705.615.750,00
2	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.517.395.000,00	2.350.669.000,00	2.022.400.000,00
3	Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	389.800.000,00	246.600.000,00	50.400.000,00
4	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.146.570.000,00	1.053.990.000,00	4.649.850.000,00
5	Belanja Honorarium Rohaniwan	106.250.000,00	136.450.000,00	0,00
6	Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38.000.000,00	31.200.000,00	0,00
7	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.900.000,00	800.000,00	0,00
8	Belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	517.500.000,00	506.400.000,00	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.877.050.000,00	1.867.500.000,00	2.757.202.150,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.093.665.944,00	19.157.543.337,00	15.021.418.483,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	252.420.000,00	155.427.280,00	158.592.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.454.906.028,00	6.866.330.035,00	8.791.362.842,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.825.050.000,00	1.480.500.000,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	334.800.000,00	313.000.000,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	794.650.000,00	566.425.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.753.350.000,00	1.719.675.000,00	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	301.100.000,00	184.100.000,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.392.584.600,00	8.520.057.100,00	4.794.795.573,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.399.282.000,00	1.356.582.000,00	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.382.707.400,00	3.936.595.200,00	3.852.808.851,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.450.853.000,00	2.284.524.850,00	1.263.983.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.603.859.100,00	10.156.535.400,00	9.501.632.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.225.077.600,00	15.120.290.000,00	4.353.758.975,00
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.000.000,00	1.227.200,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	696.922.800,00	517.600.000,00	121.200.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	488.082.000,00	258.810.498,00	0,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	135.230.000,00	82.650.000,00	0,00
30	Belanja Jasa Tata Rias	298.550.000,00	207.225.000,00	37.500.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	226.400.000,00	190.000.000,00	0,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	66.620.000,00	46.425.000,00	5.860.713.002,00
33	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	31.500.000,00	30.000.000,00	103.718.481,00
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	947.999.996,00	755.862.650,00	8.741.153.840,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	415.210.000,00	283.550.000,00	1.129.669.500,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	836.500.000,00	640.900.000,00	0,00
37	Belanja Jasa Kalibrasi	11.907.500,00	11.907.500,00	789.390.000,00
38	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	191.280.000,00	55.880.000,00	0,00
39	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	292.830.000,00	103.629.900,00	0,00
40	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.652.488.000,00	3.491.367.334,00	2.975.843.500,00
41	Belanja Tagihan Telepon	1.032.000.000,00	685.958.145,00	695.070.389,00
42	Belanja Tagihan Air	798.800.000,00	395.504.097,00	424.063.668,00
43	Belanja Tagihan Listrik	7.792.326.248,00	6.667.179.849,00	7.049.661.882,00
44	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	377.680.000,00	365.087.000,00	306.788.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
45	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.553.170.350,00	1.037.185.150,00	1.359.395.683,00
46	Belanja Paket/Pengiriman	23.816.000,00	23.570.850,00	134.554.000,00
47	Belanja Penambahan Daya	23.000.000,00	12.673.400,00	64.192.220,00
48	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	579.818.700,00	415.925.974,00	0,00
49	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.000.000,00	5.500.000,00	0,00
50	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.774.025.376,00	1.647.043.164,00	0,00
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.279.325.000,00	9.930.511.500,00	0,00
52	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.112.454.000,00	1.043.182.000,00	0,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.623.520,00	9.322.937,00	0,00
54	Belanja Sewa Grader	1.620.466.548,00	1.619.882.800,00	0,00
55	Belanja Sewa Excavator	3.857.873.000,00	3.857.873.000,00	0,00
56	Belanja Sewa Compacting Equipment	1.655.524.000,00	1.655.524.000,00	0,00
57	Belanja Sewa Electric Generating Set	33.500.000,00	31.475.000,00	12.225.000,00
58	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.200.000,00	2.000.000,00	70.180.000,00
59	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
60	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
61	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.068.302.000,00	873.535.334,00	233.914.000,00
62	Belanja Sewa Alat Pendingin	51.775.000,00	51.164.400,00	18.465.000,00
63	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	404.100.000,00	278.994.543,00	218.370.000,00
64	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	76.252.000,00	75.350.000,00	48.750.000,00
65	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	3.000.000,00	29.450.000,00
66	Belanja Sewa Peralatan Umum	183.000.000,00	130.200.000,00	200.656.000,00
67	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	25.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
68	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	240.400.090,00	232.800.000,00	0,00
69	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	37.500.000,00	24.400.000,00	222.143.300,00
70	Belanja Sewa Bangunan Gudang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
71	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	865.209.600,00	280.214.200,00	0,00
72	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	262.400.000,00	45.500.000,00	0,00
73	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.500.000,00	4.552.400,00	0,00
74	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	15.912.000,00	4.000.000,00	0,00
75	Belanja Sewa Hotel	94.537.700,00	22.422.822,00	0,00
76	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	144.000.000,00	33.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
77	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	6.224.600,00	2.224.600,00	0,00
78	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	101.708.250,00	75.408.250,00	0,00
79	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	4.320.200,00	4.290.000,00	0,00
80	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	566.000.000,00	540.125.600,00	0,00
81	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	662.800.000,00	515.185.000,00	0,00
82	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	170.000.000,00	167.567.000,00	0,00
83	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.739.231.794,00	2.620.639.650,00	0,00
84	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.234.998.000,00	1.226.022.600,00	0,00
85	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.323.575.000,00	2.944.419.000,00	5.172.311.849,00
86	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	998.312.200,00	947.589.000,00	0,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	573.000.000,00	572.006.000,00	0,00
88	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	85.000.000,00	83.215.000,00	0,00
89	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	394.500.000,00	384.887.148,00	0,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.034.760.071,00	2.878.075.539,00	3.062.234.550,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.890.892.000,00	2.571.241.700,00	0,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.375.000.000,00	1.367.303.150,00	0,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	572.000.000,00	543.369.000,00	0,00
94	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	213.119.000,00	198.440.000,00	0,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	350.000.000,00	336.490.000,00	0,00
96	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	15.185.000,00	9.018.000,00	0,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	678.500.000,00	676.316.700,00	210.210.000,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	1.957.764.000,00	634.216.000,00	38.565.200,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	2.415.304.000,00	2.407.614.000,00	0,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	40.000.000,00	39.754.000,00	283.226.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
101	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	1.065.716.400,00	672.836.900,00	124.885.000,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	182.525.000,00	180.785.000,00	0,00
103	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
104	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.687.000.000,00	1.572.876.000,00	3.900.000,00
105	Belanja Bimbingan Teknis	1.383.750.000,00	380.044.000,00	0,00
106	Belanja Diklat Kepemimpinan	235.647.000,00	235.627.000,00	0,00
107	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	618.756,00	562.717,00	0,00
108	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.549.108,00	15.487.540,00	0,00
109	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	112.500,00	35.882,00	0,00
110	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.471.228,00	3.402.935,00	0,00
111	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	63.614.456,00	74.261.357,00	0,00
112	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	282.196,00	329.464,00	0,00
113	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	56.256,00	55.697,00	0,00
114	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.993.544,00	28.848.199,00	0,00
115	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.375.000,00	10.341.877,00	0,00
116	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.768.676,00	10.245.785,00	0,00
117	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	911.143,00	416.847,00	0,00
JUMLAH		168.218.397.478,00	145.339.065.986	100.768.020.687,00

c) Belanja Pemeliharaan

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	29.565.000,00	23.640.000,00	1.309.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.500.000,00	2.900.000,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.377.563.100,00	1.059.069.574,00	708.586.251,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	32.266.400,00	23.595.500,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.200.000,00	350.000,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	154.000,00	154.000,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	14.000.000,00	12.142.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	515.916.272,00	377.764.790,00	341.429.070,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	36.243.500,00	23.428.900,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	117.870.000,00	92.995.000,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.136.000,00	1.100.000,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.100.000,00	21.340.000,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	142.305.000,00	44.550.000,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	70.530.000,00	20.248.400,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	122.870.000,00	101.051.000,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	97.300.000,00	75.088.000,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	155.370.000,00	100.567.520,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.527.475.791,00	3.288.123.040,00	1.074.259.624,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	30.340.000,00	30.280.000,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	29.975.000,00	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	190.000.000,00	189.811.000,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.000.000,00	12.980.000,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	15.092.000,00	14.511.500,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	159.000.000,00	156.928.000,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	50.000.000,00	49.962.000,00	0,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	50.000.000,00	49.680.000,00	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	31.360.000,00	31.184.560,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	254.560.000,00	110.067.000,00	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	209.500.000,00	150.497.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.522.122.000,00	7.020.378.000,00	8.104.578.089,00
33	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000,00	14.408.761,00	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya	7.818.020,00	3.363.250,00	0,00
JUMLAH		14.934.957.083,00	13.191.933.795,00	10.230.162.034,00

d) Belanja Perjalanan Dinas

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.063.039.200,00	34.387.492.991,00	37.949.026.610,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.189.374.000,00	5.772.977.163,00	8.500.265.773,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	180.620.000,00	108.120.000,00	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	977.699.000,00	801.236.282,00	0,00
JUMLAH		55.415.982.200,00	41.075.076.436,00	46.449.292.383,00

e) Belanja Uang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	579.950.000,00	430.100.000,00	0,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	661.000.000,00	620.000.000,00	0,00
3	Belanja Beasiswa	299.520.000,00	294.520.000,00	0,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	668.000.000,00	459.000.000,00	0,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	68.600.000,00	67.850.000,00	8.065.117.000,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	13.452.320.965,00	13.300.747.665,00	38.171.514.125,73
JUMLAH		16.299.390.965,00	15.742.217.665,00	46.236.631.125,73

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

No.	Belanja Barang dan Jasa Bos	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.399.034.335,00	15.189.655.188,00	220.090.134,00
JUMLAH		12.399.034.335,00	15.189.655.188,00	220.090.134,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

No.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.198.468.388,00	43.917.147.547,00	32.522.935.746,00
JUMLAH		49.198.468.388,00	43.917.147.547,00	32.522.935.746,00

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.940.375.000,00	1.948.221.349,00	1.337.918.090,00

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp1.948.221.349,00 merupakan realisasi atas pembayaran biaya fasilitasi pinjaman pembiayaan kepada PT. SMI atas pembiayaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka pembangunan RSUD Baru Kabupaten Tapin. Adapun jumlah fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp.148.657.565.500,00.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	25.069.689.500,00

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp63.673.128.164,00 merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Partai Politik Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	5.894.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	19.175.689.500,00
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	852.098.322,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.092.770.000,00	1.092.770.000,00	0,00
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.013.303.308,00	62.580.358.164,00	0,00
Jumlah		69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	25.069.689.500,00

Realisasi belanja hibah kepada partai politik sebesar Rp1.092.770.000,00 adalah realisasi belanja hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	Partai PDI Perjuangan	24-06-2021	1705/SP2D/2021	97.990.000,00
2	Partai Golkar	24-06-2021	1710/SP2D/2021	375.630.000,00
3	Partai PKS	24-06-2021	1703/SP2D/2021	87.880.000,00
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	24-06-2021	1702/SP2D/2021	57.920.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Nama Penerima	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
5	Partai Demokrat	24-06-2021	1709/SP2D/2021	97.540.000,00
6	Partai Berkarya	24-06-2021	1708/SP2D/2021	39.780.000,00
7	Partai Nasdem	24-06-2021	1704/SP2D/2021	87.660.000,00
8	Partai Gerindra	24-06-2021	1706/SP2D/2021	89.080.000,00
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	30-06-2021	1765/SP2D/2021	61.310.000,00
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	24-06-2021	1707/SP2D/2021	97.980.000,00
	Jumlah			1.092.770.000,00

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2021 sebesar Rp62.580.358.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	7.127.842.000,00
	BOP PAUD (DAK NON FISIK)	4.323.705.000,00
	BOP KESETARAAN (DAK NON FISIK)	2.570.166.000,00
	SD ISLAM TERPADU AN-NUR	233.971.000,00
2	DINAS KESEHATAN	300.000.000,00
	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN TAPIN	300.000.000,00
3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.400.000.000,00
	KONI KABUPATEN TAPIN	5.500.000.000,00
	GERAKAN PRAMUKA KWARCAB TAPIN	350.000.000,00
	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN TAPIN	550.000.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	12.412.394.500,00
	BAZNAS KABUPATEN TAPIN	235.500.000,00
	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TAPIN	360.900.000,00
	YAYASAN PONDOK PESANTREN MA'ARIF ASSUNIYYAH	500.000.000,00
	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN	5.679.172.000,00
	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KAB. TAPIN	786.822.500,00
	PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TAPIN	300.000.000,00
	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TAPIN	100.000.000,00
	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL-MIZAN KEJARI TAPIN	500.000.000,00
	PONDOK PESANTREN UMMU SALAMAH	100.000.000,00
	BADAN PENGELOLA MASJID RAYA NURUL FALAH RANTAU KAB. TAPIN	500.000.000,00
	PANITIA MESJID AT-TAQWA DESA KELADAN KEC. CANDI LARAS UTARA	150.000.000,00
	PANITIA PEMBANGUNAN LANGGAR DURRATUN NASIHIN DESA BATARATAT KECAMATAN LOKPAIKAT	200.000.000,00
	PANITIA PELAKSANA REHAB LANGGAR ASSAADAH LAWAHAN KECAMATAN TAPIN SELATAN	400.000.000,00
	MAJELIS TA'LIM WAL MADAD AN-NUR DESA SUKA RAMAI KEC. TAPIN TENGAH	25.000.000,00
	PANITIA LANGGAR DARUL MUHSININ DESA TANGKAWANG BARU KECAMATAN BAKARANGAN	100.000.000,00
	TKA/TPA SYUHADA UNIT 258 KELURAHAN BITAHAN KECAMATAN LOKPAIKAT	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
	PANITIA RENOVASI MASJID NURUL ISLAM DESA BATUNG KECAMATAN PIANI	200.000.000,00
	PANITIA PONDOK PESANTREN IBNU SALAM DESA PABAUNGAN HILIR KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN	250.000.000,00
	PANITIA MESJID AL-FALAH SIMPANG 3 KULUR DESA PEMATANG KARANGAN HULU KECAMATAN TAPIN TENGAH	250.000.000,00
	PANITIA LANGGAR DARUL MUSTAGFIRIN DESA PEMATANG KARANGAN HILIR KECAMATAN TAPIN TENGAH	100.000.000,00
	MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH SULLAMUL 'ULUM DESA MARGASARI HILIR KECAMATAN CANDI LARAS UTARA	200.000.000,00
	PANITIA MASJID MIFTAHUL ZANNAH DESA SUNGAI RUTAS HULU KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN	200.000.000,00
	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI JL. DATU ALING KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG KECAMATAN TAPIN UTARA	200.000.000,00
	BADAN PENGELOLA MASJID THARIQUL JANNAH DESA AYUNAN PAPAN KECAMATAN LOKPAIKAT	200.000.000,00
	PANITIA LANGGAR BABUL KHAIR DESA LINUH KECAMATAN BUNGUR	200.000.000,00
	PANITIA PEMBANGUNAN TKA/TPA MIFTAHUL JANNAH DESA SUNGAI RUTAS HULU KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN	200.000.000,00
	BADAN PENGELOLA MASJID DARUL MUTTAQIN DESA BUAS-BUAS KECAMATAN CANDI LARAS UTARA	250.000.000,00
	PANITIA REHAB LANGGAR AL-MUNAWWAR JL. BUPATI SAID ALWI RANTAU	75.000.000,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.844.100.000,00
	REKRUTMEN BINTARA POLRI POLDA KALSEL TAHUN 2021	1.844.100.000,00
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	91.091.000,00
	PANITIA PEMBANGUNAN MCK UMUM DESA KEPAYANG	91.091.000,00
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	149.500.000,00
	PANITIA PENGADAAN PERAHU AIR	149.500.000,00
8	DINAS PERIKANAN	816.340.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK KEPAYANG MAKMUR	68.625.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK MELATI PUTIH	137.250.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK KARANG PACULAN	97.374.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK KARYA BARU	117.200.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK KARANG TARUNA JAYA	184.000.000,00
	PANITIA PENGADAAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KELOMPOK DESA PKK KABUPATEN TAPIN	19.600.000,00
	PANITIA PENGADAAN PERAHU/KAPAL PERAIRAN DARAT 3GT	192.291.000,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.017.777.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
	PANITIA Pengerjaan Jalan Aspal	11.428.490.660,00
	PANITIA Pengerjaan Cor	1.776.525.600,00
	PANITIA Pengerjaan Drainase	5.389.874.450,00
	PANITIA Pengerjaan Lanjutan	2.376.643.700,00
	PANITIA Pengerjaan Gorong-gorong	86.442.650,00
	PANITIA Pengerjaan Jalan Lingkungan	391.475.000,00
	PANITIA Pengerjaan Rabat Beton	568.325.000,00
10	DINAS PERTANIAN	10.323.767.604,00
	PANITIA Pengadaan Pupuk	246.664.000,00
	PANITIA Pengerjaan Jalan Usaha Tani	5.281.521.000,00
	PANITIA Pengadaan Ankas	42.000.000,00
	PANITIA Pengadaan Bibit	290.650.000,00
	PANITIA Pengadaan Bantuan Stimulus Dampak COVID-19	346.975.000,00
	PANITIA Pengadaan Ternak	610.944.604,00
	PANITIA Pengerjaan Dam Parit	114.000.000,00
	PANITIA Pengerjaan Embung Pertanian	114.000.000,00
	PANITIA Pengerjaan Jalan Produksi Perkebunan	1.640.960.000,00
	PANITIA Pengerjaan Jalan Irigasi	360.700.000,00
	PANITIA Pengerjaan Lanjutan	561.450.000,00
	PANITIA Pengerjaan Jembatan	280.660.000,00
	PANITIA Pengadaan Kandang Ayam	93.610.000,00
	PANITIA Pengerjaan Rehab Surjan	199.333.000,00
	PANITIA Pengerjaan Tabat/Dam Parit	140.300.000,00
11	KECAMATAN BINUANG	723.677.000,00
	KELURAHAN RAYA BELANTI	96.659.000,00
	KELURAHAN BINUANG	414.636.000,00
	KELURAHAN KARANGAN PUTIH	212.382.000,00
12	KECAMATAN LOKPAIKAT	373.869.000,00
	KELURAHAN BITAHAN	175.645.000,00
	PANITIA Pembangunan Ruang Kelas MI Raudhatul Jannah	198.224.000,00
	TOTAL	62.580.358.164,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	10.679.088.300,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.662.150.000,00 merupakan realisasi pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	0,00	0,00	1.484.496.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	2.022.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	0,00	0,00	7.172.592.300,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.260.600.000,00	2.048.750.000,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.613.400.000,00	2.613.400.000,00	0,00
	Jumlah	4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	10.679.088.300,00

Realisasi belanja bantuan sosial kepada individu adalah realisasi belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat lansia, warga eks kusta, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Bantuan sosial untuk lansia	1.883.000.000,00
2	Bantuan sosial untuk warga eks kusta	141.000.000,00
3	Bantuan sosial untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	24.750.000,00
	JUMLAH	2.048.750.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan adalah realisasi belanja bantuan sosial yang diberikan kepada panti asuhan sebagai berikut:

No	NAMA PANTI ASUHAN	JUMLAH
1	Panti Asuhan Akhlaqul Karimah	277.400.000,00
2	Panti Asuhan Miftahussalam	438.000.000,00
3	Panti Asuhan Budi Taqwa	233.600.000,00
4	Panti Asuhan Budi Utomo	87.600.000,00
5	Panti Asuhan Izzul Hasan	605.900.000,00
6	Panti Asuhan Mi'rajul Ulum	350.400.000,00
7	Panti Asuhan Siti Khadijah	620.500.000,00
	JUMLAH	2.613.400.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	314.884.915.821,07

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp442.233.855.608,00 atau mencapai 70,26% dari anggaran Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp629.382.120.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	30.334.280.380,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	44.586.631.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	105.530.913.638,07
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	120.073.896.647,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.456.033.334,00	2.463.242.169,00	4.513.021.997,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	0,00	9.846.171.650,00
	Jumlah	629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	314.884.915.821,07

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	30.334.280.380,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp13.781.914.000,00 merupakan realisasi belanja modal pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Persil	1.009.121.000,00	722.721.000,00	27.620.741.360,00
2	Pengadaan Tanah Non Persil	71.814.252.107,00	13.059.193.000,00	2.713.539.020,00
3	Pengadaan Tanah untuk Lapangan	28.411.682.358,00	0,00	0,00
	Jumlah	101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	30.334.280.380,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	44.586.631.509,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.642.456.139,00 merupakan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari APBD, BLUD, dan Dana BOS oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	57.950.000,00	57.525.000,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	126.622.100,00	24.589.100,00	55.708.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7.711.430.000,00	6.596.546.000,00	5.652.300.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	18.000.000,00	16.750.000,00	116.200.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin	50.000.000,00	49.499.100,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	82.357.600,00	80.587.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	5.793.800,00	2.137.000,00	307.874.314,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	8.166.500,00	8.100.000,00	100.400.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	0,00	104.671.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.405.346.975,00	1.253.069.200,00	3.908.132.286,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.483.474.059,00	5.178.172.540,00	4.532.318.335,00
13	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.563.650.735,00	12.816.203.596,00	10.070.660.437,00
14	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.393.293.150,00	1.230.642.991,00	754.648.300,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.607.381.999,00	2.503.793.967,00	1.886.569.562,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	86.500.000,00	75.850.000,00	1.157.247.100,00
17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	25.638.028.599,00	3.780.940.449,00	4.804.385.604,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.979.883.910,00	2.312.328.768,00	1.304.893.679,00
20	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	80.125.756,00	0,00	2.566.769.000,00
21	Belanja Modal pengadaan Alat Peraga/Pratek Sekolah	2.925.790.000,00	2.338.750.940,00	440.576.785,00
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	724.900.000,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	68.079.000,00
25	Belanja Modal Peralatan Mesin dari BLUD	8.637.255.252,00	7.982.746.469,00	5.806.029.504,00
26	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dari Dana BOS	7.439.420.601,00	6.174.825.771,00	222.768.603,00
27	Belanja Modal Alat Eksplorasi	355.888.000,00	350.435.000,00	0,00
28	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	207.179.300,00	167.762.348,00	0,00
29	Belanja Modal Alat Peraga	340.398.750,00	310.000.000,00	0,00
30	Belanja Modal Alat Rambu-Rambu	1.122.070.800,00	1.104.429.000,00	0,00
31	Belanja Modal Peralatan Olahraga	121.913.500,00	121.450.000,00	0,00
32	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	100.902.800,00	74.321.300,00	0,00
	Jumlah	85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	44.586.631.509,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	105.530.913.638,07

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp228.023.651.539,00 merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan gedung tempat kerja	279.027.797.014,00	227.612.558.539,00	105.210.706.638,07
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	320.207.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	413.794.066,00	411.093.000,00	0,00
	Jumlah	279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	105.530.913.638,07

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	120.073.896.647,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp143.322.591.761,00 merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, berupa:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Jalan	81.925.924.010,00	72.440.501.449,00	52.788.910.800,00
2	Belanja modal Pengadaan Jembatan	28.928.000.000,00	28.012.987.705,00	8.037.545.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	16.644.981.000,00	16.396.469.000,00	16.466.714.750,00
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Banjir	15.735.288.300,00	12.954.838.157,00	23.803.411.489,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	3.118.123.000,00	2.803.785.950,00	996.925.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	2.600.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	72.475.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	17.485.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.000.000.000,00	985.600.000,00	7.870.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	4.450.826.308,00
11	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	2.483.300.000,00	2.376.593.000,00	3.776.757.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	7.399.999.625,00	7.168.175.000,00	8.571.685.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	941.788.800,00
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan air Kotor	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
11	Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Dana BLUD	184.000.000,00	183.641.500,00	138.902.500,00
	Jumlah	157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	120.073.896.647,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.456.033.334,00	2.463.242.169,00	4.513.021.997,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.463.242.169,00 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Buku	0,00	0,00	4.067.311.170,00
2	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	10.350.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Barang Perpustakaan	409.000.000,00	374.320.500,00	8.350.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	26.700.000,00	23.628.000,00	41.785.500,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	333.795.127,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bersumber Dana BOS	4.959.613.734,00	2.005.093.669,00	51.430.200,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
8	Belanja Modal Hewan	39.219.600,00	38.700.000,00	0,00
	Jumlah	5.456.033.334,00	2.463.242.169,00	4.513.021.997,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
250.000.000,00	0,00	9.846.171.650,00

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 selama Tahun 2021, untuk perbandingan dengan realisasi Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	572.642.500,00
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	9.273.529.150,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	250.000.000,00	0,00	9.846.171.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	13.420.690.337,00

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.008.130.387,00 atau mencapai 81,52% dari anggaran sebesar Rp17.182.979.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pembayaran Pengamanan VVIP Kunjungan Presiden RI dalam rangka peresmian Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya Kec. Piani	1.015.975.000,00	0,00
2	Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid 19	12.812.703.113,00	13.097.712.437,00
3	Pembayaran Bansos Tidak Direncanakan	69.449.374,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Dana BOS Tahap 1 Gelombang 1 ke SDN Sungai Salai Hilir	0,00	35.910.000,00
5	Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Dana BOS Tahap 1 Gelombang 2 ke SDN Sungai Salai Hilir	0,00	107.880.000,00
6	Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Th 2020	0,00	179.187.900,00
7	Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Piutang DPM-LUEP	2.900,00	0,00
8	Pembayaran Pengamanan dan Pengawalan Tamu-tamu Daerah serta antisipasi penyebaran Covid 19 pada rangkaian peringatan hari jadi Kab. Tapin ke 56 tahun 2021	110.000.000,00	0,00
Jumlah		14.008.130.387,00	13.420.690.337,00

Dari Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan *Covid-19* Tahun 2021 sebesar Rp12.812.703.113,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	SKPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	128.645.900,00
		RSUD Datu Sanggul	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	1.183.836.060,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	6.965.014.400,00
		Sekretariat Daerah	Penanganan COVID	Penanganan COVID	35.579.403,00
Jumlah Belanja Bidang Kesehatan					8.313.075.763,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

2	Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial (JPS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	437.466.350,00
		Dinas Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.780.400.000,00
		Kecamatan Piani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.654.250,00
		Kecamatan Tapin Selatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	118.513.000,00
		Kecamatan Binuang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	131.513.000,00
		Kecamatan Bungur	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.513.000,00
		Kecamatan Tapin Utara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	130.513.000,00
		Kecamatan Bakarangan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.386.750,00
		Kecamatan Candi Laras Selatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.373.000,00
		Kecamatan Candi Laras Utara	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.693.000,00
		Kecamatan Hatungun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.494.250,00
		Kecamatan Salam Babaris	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.624.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

			Keja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
		Kecamatan Tapin Tengah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	141.468.000,00
		Kecamatan Lokpaikat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.015.500,00
Jumlah Belanja Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial					4.499.627.350,00
3	Pengamanan Dampak Ekonomi	-	-	-	0,00
Jumlah Pengamanan Dampak Ekonomi					0,00
TOTAL					12.812.703.113,00

Dari jumlah realisasi Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp12.812.703.113,00 tersebut diatas telah diatribusi ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp3.500.000,00.

5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
176.467.756.112,00	176.034.539.570,00	167.275.363.493,00

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp176.034.539.570,00 atau mencapai 99,75% dari anggaran sebesar Rp176.467.756.112,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	165.817.624.910,00
	Jumlah	176.467.756.112,00	176.034.539.570,00	167.275.363.493,00

Penjelasan masing-masing transfer adalah sebagai berikut:

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.039.312.404,00 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	1.803.000.000,00	1.805.616.074,00	1.297.939.188,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	325.781.212,00	233.696.330,00	159.799.395,00
	Jumlah	2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00

5.1.3.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.803.000.000,00	1.805.616.074,00	1.297.939.188,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.805.616.074,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa. Rincian dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
325.781.212,00	233.696.330,00	159.799.395,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp233.696.330,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	165.817.624.910,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp173.995.227.166,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa (DD)	0,00	102.630.432.454,00	102.204.375.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)	174.338.974.900,00	71.364.794.712,00	62.520.479.910,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	1.092.770.000,00
	Jumlah	174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	165.817.624.910,00

5.1.3.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa (DD)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	102.630.432.454,00	102.204.375.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.630.432.454,00,

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
174.338.974.900,00	71.364.794.712,00	62.520.479.910,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp71.364.794.712,00.

5.1.2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.092.770.000,00. Rincian Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Partai PDI Perjuangan	0,00	97.990.000,00	(97.990.000,00)
2	Partai Golkar	0,00	375.630.000,00	(375.630.000,00)
3	Partai PKS	0,00	87.880.000,00	(87.880.000,00)
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	0,00	57.920.000,00	(57.920.000,00)
5	Partai DEMOKRAT	0,00	97.540.000,00	(97.540.000,00)
6	Partai BERKARYA	0,00	39.780.000,00	(39.780.000,00)
7	Partai NASDEM	0,00	87.660.000,00	(87.660.000,00)
8	Partai GERINDRA	0,00	89.080.000,00	(89.080.000,00)
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	0,00	61.310.000,00	(61.310.000,00)
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0,00	97.980.000,00	(97.980.000,00)
	Jumlah	0,00	1.092.770.000,00	1.092.770.000,00

5.1.4. Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
474.493.874.732,00	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Struktur Pembiayaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto secara keseluruhan dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp436.777.764.925,27 dari anggaran sebesar Rp474.493.874.732,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		474.493.874.732,00	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27

Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp436.777.764.925,27 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	326.836.309.232,00	326.836.309.232,27	379.156.550.370,27
2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	148.657.565.500,00	109.921.012.750,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Piutang	500.000.000,00	20.442.943,00	25.728.918,00
Jumlah		475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27

Penjelasan masing-masing jenis Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
326.836.309.232,00	326.836.309.232,27	379.156.550.370,27

Dalam tahun anggaran 2021 dianggarkan penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp326.836.309.232,00 dan realisasi penggunaannya sebesar Rp326.836.309.232,27.

5.1.4.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
148.657.565.500,00	109.921.012.750,00	0,00

Penerimaan pinjaman dalam negeri tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp148.657.565.500,00 adalah penerimaan pinjaman Kabupaten Tapin kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur yang mana pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

tersebut diperuntukkan untuk pembangunan RSUD Baru di Kabupaten Tapin. Realisasi pinjaman dalam negeri tahun 2021 adalah sebesar Rp109.921.012.750,00.

5.1.4.1.3. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
500.000.000,00	20.442.943,00	25.728.918,00

Realisasi Penerimaan Kembali Piutang Tahun 2021 sebesar Rp20.442.943,00 merupakan penerimaan atas pemberian dana talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	28-05-2021	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Hj. Maisyarah LUEP PP Berkat Hijrah	5.000.000,00
2	13-08-2021	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	1.360.736,00
3	15-09-2021	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Aberansyah LUEP PP Doa Ibu	10.000.000,00
4	28-09-2021	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	906.190,00
5	10-11-2021	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	3.176.017,00
JUMLAH			20.442.943,00

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.500.000.000,00	0,00	0,00

Tidak terdapat Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2021.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
0,00	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp132.792.517.161,10 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan-LRA	1.202.139.964.277,83	1.187.334.462.928,80
Belanja	(1.506.125.212.042,00)	(1.239.680.432.984,80)
Surplus/(Defisit)	(303.985.247.764,17)	(52.345.970.056,00)
Penerimaan Pembiayaan	436.775.949.644,27	379.182.279.288,27
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27
SiLPA Tahun Berjalan	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp132.792.517.161,10 dan Rp 326.836.309.232,27 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas di Kasda	97.948.848.794,42	301.932.715.847,16
	a. RKUD Bank Kalsel (PAD dan Penerimaan Lainnya)	56.488.844.829,91	276.414.717.018,63
	b. RKUD Bank Kalsel (DAU)	41.460.003.964,51	25.217.998.828,53
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00	60.000,00
3	Kas di BLUD	32.694.317.624,24	20.517.843.640,11
4	Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00	917.121.076,00
5	Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44	3.468.568.669,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	132.792.517.161,10	326.536.309.232,27

Pada Kas di Kasda per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.948.848.794,42 terdapat dana yang sudah ditentukan alokasi pemanfaatannya ditahun berikutnya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Tahun 2021	380.498.201,00
2	Sisa DAK Fisik	
	DAK Reguler	
	SD	36.815.250,00
	SMP	58.035.500,00
	SKB	2.179.800,00
	PAUD	2.119.400,00
	Pelayanan Dasar	1.463.092.065,00
	Pelayanan Rujukan	35.600.000,00
	Pelayanan Kefarmasian	97.638.204,00
	Keluarga Berencana	36.454.164,00
	Jalan	0,00
	DAK Penugasan	
	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	16.376.250,00
	Penguatan Intervensi Stunting	0,00
	Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	50.400.000,00
	Air Minum (Penurunan Stunting)	20.100.000,00
	Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)	51.600.000,00
	Sanitasi (Penurunan Stunting)	63.000.000,00
	Irigasi	70.000.000,00
	Pertanian	308.817.048,00
	Kelautan dan Perikanan	208.664.000,00
3	Sisa DAK Non Fisik	
	-Bantuan Operasional Kesehatan	5.980.613.167,00
	-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	848.207.027,00
	-Administrasi Kependudukan	108.781.808,00
	-BOP-PAUD	599.852.000,00
	-BOP-Kesetaraan	86.029.000,00
	-Tunjangan Profesi Guru	4.058.020.540,00
	-Tunjangan Khusus Guru	7.722.000,00
	-Tambahkan Penghasilan Guru	49.000.500,00
	- Penyuluhan Pertanian dan Konsumsi Pangan	7.320.000,00
	- Penanaman Modal	139.954.000,00
4	Sisa DID	12.227.442.161,00
5	Sisa PAD/DAU/DBH	70.934.516.709,42
	TOTAL	97.948.848.794,42



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dengan demikian dari total saldo Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.948.848.794,42 jika kegiatan-kegiatan diatas akan dilaksanakan di Tahun 2022 maka SiLPA Murni Tahun 2021 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp97.948.848.794,42.



5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>326.836.309.232,27</u>	<u>379.156.550.370,27</u>

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp326.836.309.232,27.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>326.836.309.232,27</u>	<u>379.156.550.370,27</u>

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp326.836.309.232,27.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>132.792.517.161,10</u>	<u>326.836.309.232,27</u>

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp132.792.517.161,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Surplus/Defisit Anggaran	(303.985.247.764,17)	(52.345.970.056,00)
Pembiayaan Netto	436.777.764.925,27	379.182.279.288,27
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>132.792.517.161,10</u>	<u>326.836.309.232,27</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp132.792.517.161,10 dan Tahun 2020 sebesar Rp326.836.309.232,27 merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	97.948.848.794,42	301.932.715.847,16
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00	60.000,00
Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44	3.468.568.669,00
Kas di BLUD	32.694.317.624,24	20.517.843.640,11
Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00	917.121.076,00
Jumlah	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. Aset Lancar

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
196.395.574.683,69	451.934.442.934,70

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp196.395.574.683,69 dan Rp451.934.442.934,70. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 turun sebesar Rp255.538.868.251,01 atau sebesar 56,54% dari Saldo Aset lancar per 31 Desember 2020, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Kas dan Bank	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	62.672.818.488,10	125.745.040.719,86
4	Penyisihan Piutang	(16.854.732.946,00)	(15.330.031.193,48)
5	Persediaan	17.784.971.980,49	14.683.124.176,05
	Jumlah	196.395.574.683,69	451.934.442.934,70

Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp132.792.517.161,10 dan Rp326.836.309.232,27 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	97.948.848.794,42	301.932.715.847,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00	60.000,00
4	Kas di Bendahara BLUD	32.694.317.624,24	20.517.843.640,11
5	Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00	917.121.076,00
6	Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44	3.468.568.669,00
	Jumlah	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
97.948.848.794,42	301.932.715.847,16



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp97.948.848.794,42 dan Rp301.932.715.847,16 merupakan saldo rekening giro pada Rekening Bank Kalsel Cabang Rantau. Rincian saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Rekening Giro Bank Kalsel	006.00.03.00001.7	56.488.844.829,91	276.414.717.018,63
2	Rekening Giro Bank Kalsel	006.00.03.00003.9	41.460.003.964,51	25.517.998.828,53
	Jumlah		97.948.848.794,42	301.932.715.847,16

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 pada 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
143.148.682,00	60.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp143.148.682,00 dan Rp60.000,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp143.148.682,00 merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan. Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2021. Rincian mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Lampiran 2.

5.3.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
32.694.317.624,24	20.517.843.640,11

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp32.694.317.624,24 dan Rp20.517.843.640,11 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Datu Sanggul. Rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
A	Rekening Giro			
1	Rekening Giro Bank Mandiri	031-00-5544556-8	23.546.198.622,02	11.753.087.718,56
2	Rekening Giro Bank Mandiri	031-00-4455665-5	1.586.628,30	1.838.221,55



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3	Rekening Giro Bank Kalsel	006.00.05.00001.1	3.146.532.373,92	2.762.917.700,00
	Jumlah Rekening Giro		26.694.317.624,24	14.517.843.640,11
B	Rekening Deposito			
1	Rekening Deposito (1 bulan) Bank Kalsel	006.04.01.40392.6	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	Rekening Deposito (1 bulan) Bank Kalsel	006.04.01.40390.4	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3	Rekening Deposito (3 bulan) Bank Kalsel	006.04.02.00136.2	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Rekening Deposito		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Saldo Kas di Bendahara BLUD		32.694.317.624,24	20.517.843.640,11

Rincian mutasi Kas di BLUD terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.5. Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
550.316.951,00	917.121.076,00

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp550.316.951,00 dan Rp917.121.076,00. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut terdapat pada 13 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening BNI	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Puskesmas Binuang	0344939540	18.107.378,00	116.468.000,00
2	Puskesmas Baringin	0345089953	69.618.832,00	77.960.544,00
3	Puskesmas Margasari	0345092467	258.760.852,00	271.645.040,00
4	Puskesmas Banua Padang	0344926280	15.791.201,00	74.729.881,00
5	Puskesmas Salam Babaris	0345050652	37.705.804,00	86.358.270,00
6	Puskesmas Piani	0344901425	15.657.260,00	26.783.377,00
7	Puskesmas Pandahan	0345071616	14.337.321,00	21.753.182,00
8	Puskesmas Lokpaikat	0345067962	20.515.600,00	67.584.157,00
9	Puskesmas Tapin Utara	0345077845	5.640.038,00	39.703.994,00
10	Puskesmas Hatungun	0344922162	2.749.022,00	8.179.511,00
11	Puskesmas Tambarangan	0345081998	18.113.800,00	15.720.408,00
12	Puskesmas Tambaruntung	0345577485	1.017.824,00	25.970.001,00
13	Puskesmas Bakarangan	0344933117	72.302.019,00	84.264.711,00
	Jumlah		550.316.951,00	917.121.076,00

Rincian mutasi Kas di Bendahara FKTP terdapat pada Lampiran 4.

5.3.1.6. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.455.885.109,44	3.468.568.669,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kas Di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.455.885.109,44 dan Rp3.468.568.669,00. Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada rekening Bendahara BOS pada 197 sekolah di Kabupaten Tapin yang terdiri dari 175 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Rincian Kas di Bendahara BOS pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran 5.

5.3.1.7. Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.

5.3.1.8. Piutang Pajak

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
19.012.201.286,00	18.354.801.466,39

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp19.012.201.286,00 dan Rp18.354.801.466,39 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	4.127.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	84.471.563,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum	0,00	20.041.350,06
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	79.774.664,33
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	19.012.201.286,00	18.160.540.189,00
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	5.846.700,00
	Jumlah	19.012.201.286,00	18.354.801.466,39

Penjelasan masing-masing Piutang Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.1.8.1. Piutang Pajak Hotel

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	4.127.000,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 sedangkan per 31 Desember 2020 Rp4.127.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.3.1.8.2. Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	84.471.563,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021 sedangkan per 31 Desember 2020 Rp84.471.563,00

5.3.1.8.3. Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0,00	20.041.350,06

Tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.041.350,06.

5.3.1.8.4. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
19.012.201.286,00	18.160.540.189,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp19.012.201.286,00 dan Rp18.160.540.189,00. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Penghapusan Piutang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
		Tahun 2020	Tahun 2021		
1	3	4	5	6	7=(1+2+3)-(4+5)-6
18.160.540.189,00	2.193.989.846	228.169.645,00	772.119.151,00	342.039.953,00	19.012.201.286,00

Untuk Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp19.012.201.286,00 dan Rp18.160.540.189,00 merupakan saldo Piutang dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Piutang	Saldo Piutang PBB 2021 (Rp)	Saldo Piutang PBB 2020 (Rp)
1	1994	10.146.100,00	10.169.423,00
2	1995	20.180.433,00	20.193.046,00
3	1996	34.776.863,00	34.811.792,00
4	1997	24.569.781,00	24.594.801,00
5	1998	39.853.091,00	39.900.578,00
6	1999	46.230.653,00	46.282.019,00
7	2000	46.968.680,00	47.068.901,00
8	2001	42.778.277,00	42.868.457,00
9	2002	8.331.764,00	8.350.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Tahun Piutang	Saldo Piutang PBB 2021 (Rp)	Saldo Piutang PBB 2020 (Rp)
10	2003	94.184.929,00	94.485.771,00
11	2004	243.426.105,00	244.592.079,00
12	2005	2.763.190,00	4.005.935,00
13	2006	496.651.722,00	500.142.741,00
14	2007	104.862.948,00	107.474.089,00
15	2008	1.182.320.651,00	1.229.206.444,00
16	2009	1.187.101.178,00	1.233.432.389,00
17	2010	1.292.806.666,00	1.347.070.601,00
18	2011	1.352.255.646,00	1.415.710.024,00
19	2012	1.468.450.656,00	1.546.325.661,00
20	2013	1.356.849.746,00	1.413.351.813,00
21	2014	946.376.841,00	1.000.185.748,00
22	2015	1.224.494.532,00	1.275.330.393,00
23	2016	1.164.308.616,00	1.177.246.776,00
24	2017	1.224.788.379,00	1.241.280.567,00
25	2018	1.292.798.846,00	1.312.601.142,00
26	2019	1.336.986.196,00	1.360.965.879,00
27	2020	1.345.068.102,00	1.382.892.796,00
28	2021	1.421.870.695,00	0,00
Jumlah		19.012.201.286,00	18.160.540.189,00

5.3.1.8.5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>79.774.664,33</u>

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp79.774.664,33. Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6=(1+2+3)-(4+5)
79.774.664,33	(0,01)	0,00	79.774.664,32	0,00	0,00

5.3.1.9. Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>(13.342.643.155,78)</u>	<u>(12.532.393.976,47)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dari Piutang Pajak Tahun 2021 sebesar Rp19.012.201.286,00 diperoleh penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp13.342.643.155,78 sehingga nilai Piutang Pajak setelah penyisihan adalah sebesar Rp5.669.558.130,22. Rincian Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	19.012.201.286,00	(13.342.643.155,78)	5.669.558.130,22
	Jumlah	19.012.201.286,00	(13.342.643.155,78)	5.669.558.130,22

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar (P<1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th<P<2 th) (Rp)	Diragukan (2 th<P<5 th) (Rp)	Macet (5 th<P) (Rp)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
1994 s.d 2014	10.001.885.920,00	0,00	0,00	0,00	(10.001.885.920,00)	0,00
2015	1.224.494.532,00	0,00	0,00	0,00	(1.224.494.532,00)	0,00
2016	1.164.308.616,00	0,00	0,00	(582.154.308,00)	0,00	582.154.308,00
2017	1.224.788.379,00	0,00	0,00	(612.394.189,50)	0,00	612.394.189,50
2018	1.292.798.846,00	0,00	0,00	(646.399.423,00)	0,00	646.399.423,00
2019	1.336.986.196,00	0,00	(133.698.619,60)	0,00	0,00	1.203.287.576,40
2020	1.345.068.102,00	0,00	(134.506.810,20)	0,00	0,00	1.210.561.291,80
2021	1.421.870.695,00	(7.109.353,48)	0,00	0,00	0,00	1.414.761.341,52
Jumlah	19.012.201.286,00	(7.109.353,48)	(268.205.429,80)	(1.840.947.920,50)	(11.226.380.452,00)	5.669.558.130,22

5.3.1.10. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
3.527.439.668,00	3.006.310.168,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.527.439.668,00 dan Rp3.006.310.168,00 merupakan tunggakan Wajib Retribusi Daerah (WRD) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko	3.219.422.000,00	2.798.842.000,00
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah	308.017.668,00	207.468.168,00
	Jumlah	3.527.439.668,00	3.006.310.168,00

Penjelasan masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:

5.3.1.10.1. Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
3.219.422.000,00	2.798.842.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Piutang Retribusi Sewa Kios/Sewa Toko per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.219.422.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
			Tahun 2021	Piutang Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6 = 1+2+3-4-5
2.798.842.000,00	9.925.000,00	1.063.680.000,00	362.220.000,00	290.805.000,00	3.219.422.000,00

5.3.1.10.2. Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
308.017.668,00	207.468.168,00

Saldo Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp308.017.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
		Tahun 2021	Piutang Tahun 2020	
1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
207.468.168,00	115.525.500,00	13.584.000,00	1.392.000,00	308.017.668,00

5.3.1.11. Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(3.008.412.918,00)	(2.334.825.423,60)

Dari Piutang Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp3.527.439.668,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp3.008.412.918,00 sehingga nilai piutang setelah penyisihan adalah sebesar Rp519.026.750,00. Rincian dari Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi (Rp)	Piutang Retribusi Netto (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Retribusi Sewa Kios Pasar/sewa toko	3.219.422.000,00	(2.751.366.000,00)	468.056.000,00
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas dan tanah daerah	308.017.668,00	(257.046.918,00)	50.970.750,00
	Jumlah	3.527.439.668,00	(3.008.412.918,00)	519.026.750,00

Untuk masing-masing Penyisihan Piutang Retribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Toko/Sewa Kios Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar (P<1 Bln) (Rp)	Kurang lancar (1 Bln<P<3 Bln) (Rp)	Diragukan (3 Bln<P<12 Bln) (Rp)	Macet (12 Bln<P) (Rp)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
2012	68.765.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.765.000,00)	0,00
2013	108.185.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.185.000,00)	0,00
2014	151.660.000,00	0,00	0,00	0,00	(151.660.000,00)	0,00
2015	239.332.000,00	0,00	0,00	0,00	(239.332.000,00)	0,00
2016	321.300.000,00	0,00	0,00	0,00	(321.300.000,00)	0,00
2017	379.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(379.900.000,00)	0,00
2018	427.605.000,00	0,00	0,00	0,00	(427.605.000,00)	0,00
2019	394.150.000,00	0,00	0,00	0,00	(394.150.000,00)	0,00
2020	427.065.000,00	0,00	0,00	0,00	(427.065.000,00)	0,00
2021	701.460.000,00	(678.000,00)	(12.551.000,00)	(220.175.000,00)	0,00	468.056.000,00
Jumlah	3.219.422.000,00	(678.000,00)	(12.551.000,00)	(220.175.000,00)	(2.517.962.000,00)	468.056.000,00

b. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah

Penyisihan Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar (P < 1 Bln) (Rp)	Kurang lancar (1 Bln<P<3 Bln) (Rp)	Diragukan (3 Bln<P<12 Bln) (Rp)	Macet (12 Bln<P) (Rp)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
2009	25.553.400,00	0,00	0,00	0,00	(25.553.400,00)	0,00
2010	9.011.730,00	0,00	0,00	0,00	(9.011.730,00)	0,00
2011	16.895.320,00	0,00	0,00	0,00	(16.895.320,00)	0,00
2012	18.843.938,00	0,00	0,00	0,00	(18.843.938,00)	0,00
2013	22.727.760,00	0,00	0,00	0,00	(22.727.760,00)	0,00
2014	25.165.780,00	0,00	0,00	0,00	(25.165.780,00)	0,00
2015	23.717.640,00	0,00	0,00	0,00	(23.717.640,00)	0,00
2016	21.807.120,00	0,00	0,00	0,00	(21.807.120,00)	0,00
2017	8.295.120,00	0,00	0,00	0,00	(8.295.120,00)	0,00
2018	10.238.120,00	0,00	0,00	0,00	(10.238.120,00)	0,00
2019	11.379.120,00	0,00	0,00	0,00	(11.379.120,00)	0,00
2020	12.441.120,00	0,00	0,00	0,00	(12.441.120,00)	0,00
2021	101.941.500,00	0,00	0,00	(50.970.750,00)	0,00	50.970.750,00
Jumlah	308.017.668,00	0,00	0,00	(50.970.750,00)	(206.076.168,00)	50.970.750,00

5.3.1.12. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.692.455.643,00	4.918.851.281,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.692.455.643,00 dan Rp4.918.851.281,00 merupakan Piutang Pelayanan BLUD pada RSUD Datu Sanggul. Rincian Piutang Pelayanan BLUD sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
				Tahun 2021	Piutang Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4)-(6+7)
1	PT. Hasnur Riung Sinergi	4.600.426,00	67.427.703,00	32.277.846,00	4.600.426,00	35.149.857,00
2	PT Riung Mitra Lestari	0,00	6.305.000,00	3.715.000,00	0,00	2.590.000,00
3	PT. Kalimantan Prima Persada	0,00	427.137.612,00	360.578.150,00	0,00	66.559.462,00
4	BPJS	1.709.947.305,00	17.009.700.756,00	15.753.060.286,00	1.709.947.305,00	1.256.640.470,00
5	BPJS –Covid 19	3.204.303.550,00	34.970.126.300,00	34.704.626.700,00	3.204.303.550,00	265.499.600,00
6	PT. Trakindo Utama	0,00	127.111.296,00	107.657.296,00	0,00	19.454.000,00
7	PT. Adhi Luthfiatama	0,00	51.133.477,00	4.571.223,00	0,00	46.562.254,00
	Jumlah	4.918.851.284,00	52.658.942.148,00	50.966.486.506,00	4.918.851.287,00	1.692.455.643,00

5.3.1.13. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2020	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
(8.462.278,22)	(24.594.256,41)

Penyisihan Piutang Pelayanan BLUD Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar (P<Tgl Jatuh Tempo) (Rp)	Kurang Lancar (1 Bln Surat Tagihan ke-1<P) (Rp)	Diragukan 1 Bln Surat Tagihan ke-2<P) (Rp)	Macet (1 Bln Surat Tagihan ke-3<P) (Rp)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.692.455.643,00	(8.462.278,22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.692.455.643,00	(8.462.278,22)	0,00	0,00	0,00	1.683.993.364,79

5.3.1.14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	71.614.409.886,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp71.614.409.886,00. Piutang Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Piutang atas kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk rincian saldo Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang Dana Transfer Tahun 2021 (Rp)	Piutang Dana Transfer Tahun 2020 (Rp)
1	DBH PBB	0,00	51.262.525.247,00
2	DBH PPh	0,00	1.665.560.000,00
3	DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	21.712.344,00
4	DBH Non Minyak Bumi & Gas Bumi Lainnya	0,00	1.276.726.833,00
4	DBH SDA Perikanan	0,00	546.181.150,00
5	DBH SDA Kehutanan	0,00	180.387.766,00
6	DBH SDA Minerba	0,00	16.657.869.300,00
7	DBH Sektor Lainnya	0,00	3.447.246,00
8	DBH Cukai Hasil Tembakau	000	0,00
	Jumlah	0,00	71.614.409.886,00

5.3.1.15. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
37.615.171.397,10	27.238.615.381,47

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp37.615.171.397,10 dan Rp27.238.615.381,47 merupakan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun berjalan namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Bagi Hasil	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
				Tahun 2021	Piutang 2020	
1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4)-(5+6)
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	3.719.773.299,01	0,00	9.343.987.993,79	4.191.537.606,00	3.719.773.299,01	5.152.450.387,79
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.297.959.479,85	(1,22)	8.763.532.130,43	3.854.471.883,00	2.297.959.481,07	4.909.060.247,43
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.058.321.423,61	0,79	53.573.482.098,70	28.196.540.468,00	19.058.321.422,82	25.376.941.630,70
DBH Pajak Air Permukaan (AP)	45.487.668,00	(0,44)	115.690.751,18	88.208.060,00	45.487.668,44	27.482.691,18
DBH Pajak Rokok	2.117.073.511,00	1.527.344.658,00	10.106.893.156,00	7.957.656.716,00	3.644.418.169,00	2.149.236.440,00
Jumlah	27.238.615.383,47	1.527.344.657,13	81.903.586.134,10	44.288.414.738,00	28.765.960.046,34	37.615.171.397,10



5.3.1.16. Piutang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
825.550.494,00	612.052.537,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp825.550.494,00 dan Rp612.052.537,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Uang Muka	233.940.900,00	0,00
2	Piutang Kepada LUEP	591.609.594,00	612.052.537,00
	Jumlah	825.550.494,00	612.052.537,00

Penjelasan dari masing-masing Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.1.16.1. Piutang Uang Muka

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
233.940.900,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya - Piutang Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp233.940.900,00 dan Rp0,00, Piutang Lainnya - Piutang Uang Muka sebesar Rp233.940.900,00 merupakan pembayaran uang muka sebesar 30% atas pekerjaan fisik Belanja Modal Bangunan Parkir Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Cabai Rawit Hiyung dengan Nomor Kontrak : 521.3/322/PPK-SPP/2021 Tanggal 27 September 2021 pelaksana CV. Yonia pada Dinas Pertanian Tahun 2021, dengan nomor SP2D 4264/SP2D/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang sampai dengan akhir tahun 2021, kemajuan fisik pekerjaan tidak ada. Sehingga dilakukan pemutusan kontrak untuk pekerjaan tersebut. Telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah atas Piutang tersebut pada tanggal 6 Januari 2022.

5.3.1.16.2. Piutang Kepada LUEP

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
591.609.594,00	612.052.537,00

Piutang kepada LUEP merupakan saldo piutang kepada Lembaga Usaha Pedesaan (LUEP) atas pemberian Dana Talangan sebagai Dana Penguatan Modal. Rincian atas saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp)
				Tahun 2021	Piutang Tahun 2020	
1	2	3	5	6	7	8 = 3+4+5-6-7
1	PP Bina Usaha	26.368.636,00	0,00	0,00		26.368.636,00
2	PP AU	110.532.901,00	0,00	0,00	5.442.943,00	105.089.958,00
3	PP Doa Ibu	168.001.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	158.001.000,00
4	PP Berkat Hijrah	114.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	109.000.000,00
5	PP UD Surya	157.450.000,00	0,00	0,00	0,00	157.450.000,00
6	PP Akhmad	35.700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00
	Jumlah	612.052.537,00	0,00	0,00	20.442.943,00	591.609.594,00

Rincian saldo akhir Piutang kepada LUEP Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Pokok Piutang (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PP Bina Usaha	26.368.636,00	0,00	26.368.636,00	Diserahkan ke KPKNL
2	PP AU	98.159.958,00	6.930.000,00	105.089.958,00	Diserahkan ke KPKNL
3	PP Doa Ibu	148.925.000,00	9.076.000,00	158.001.000,00	
4	PP Berkat Hijrah	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00	
5	PP UD Surya	150.000.000,00	7.450.000,00	157.450.000,00	
6	PP Akhmad	34.000.000,00	1.700.000,00	35.700.000,00	
	Jumlah	566.453.594,00	25.156.000,00	591.609.594,00	

Dari Saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2021 sebesar Rp591.609.594,00 termasuk nilai Piutang yang diserahkan ke KPKNL sebesar Rp131.458.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LUEP	Tanggal Penyerahan	Nilai (Rp)	Alasan
1	PP Bina Usaha	18 Oktober 2010	26.368.636,00	Sesuai dengan SPK, Pasal 6 ayat (2) bahwa apabila dalam waktu yang telah ditetapkan debitur tidak mengembalikan pinjamannya maka agunan akan diserahkan ke KPKNL untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku
2	PP AU	13 Juni 2016	105.089.958,00	
	Jumlah		131.458.594,00	

5.3.1.17. Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
(495.034.594,00)	(438.217.537,00)

Dari nilai Piutang Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp825.550.494,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp495.034.594,00 sehingga nilai Piutang Lainnya setelah penyisihan adalah sebesar Rp330.515.900,00. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya yaitu:

No	Uraian	Piutang lainnya (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya (Rp)	Piutang Lainnya Netto (Rp)
1	Piutang Kepada LUEP	591.609.594,00	(495.034.594,00)	96.575.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Jumlah	591.609.594,00	(495.034.594,00)	96.575.000,00
---------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

Penyisihan Piutang Kepada LUEP Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar (P<Tgl Jatuh Tempo) (Rp)	Kurang Lancar (1 Bln Surat Tagihan ke-1<P) (Rp)	Diragukan 1 Bln Surat Tagihan ke-2<P) (Rp)	Macet (1 Bln Surat Tagihan ke-3<P) (Rp)	
		0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
2009	26.368.636,00	0,00	0,00	0,00	(26.368.636,00)	0,00
2014	105.089.958,00	0,00	0,00	0,00	(105.089.958,00)	0,00
2015	267.001.000,00	0,00	0,00	0,00	(267.001.000,00)	0,00
2019	193.150.000,00	0,00	0,00	(96.575.000,00)	0,00	96.575.000,00
Jumlah	591.609.596,00	0,00	0,00	(96.575.000,00)	(398.459.594,00)	96.575.000,00

Rincian Piutang dan Penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 6.

5.3.1.18. Persediaan

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
17.784.971.980,49	14.683.124.176,05

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp17.784.971.980,49 dan Rp14.683.124.176,05 terdiri dari persediaan yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Persediaan yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah daerah		
	Alat Tulis Kantor	413.162.300,00	303.785.092,00
	Benda Pos, Cukai, Karcis,	28.421.300,00	223.895.861,00
	Bahan Cetak	336.704.801,00	0,00
	Obat/Alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	1.612.628.138,00
	Bahan Kimia	35.330.086,00	32.489.925,00
	Lainnya	570.950.862,00	273.069.332,00
	Sub Jumlah 1	1.384.569.349,00	2.445.868.348,00
2	Persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan		
	Obat/Alkes Habis Pakai	15.989.556.770,49	11.908.024.548,05
	Obat-obatan untuk Hewan/Tanaman	0,00	55.904.500,00
	Gabah/Padi	0,00	133.790.000,00
	Bibit Ternak/Tanaman	10.580.000,00	20.080.000,00
	Lainnya	385.422.361,00	101.291.780,00
	Sub Jumlah 2	16.385.559.131,49	12.219.090.828,05
3	Persediaan yang digunakan dalam proses produksi		
	Pupuk, Obat-obatan untuk Tanaman	14.843.500,00	18.165.000,00
	Sub Jumlah 3	14.843.500,00	18.165.000,00
	Jumlah	17.784.971.980,49	14.683.124.176,05



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dari nilai Persediaan sebesar Rp17.784.971.980,49 diantaranya merupakan Persediaan Obat/Alat kesehatan Habis Pakai sebesar Rp15.989.556.770,49.

Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
124.367.355.884,78	132.570.089.349,29

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp124.367.355.884,78 dan Rp132.570.089.349,29 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	44.850.000,00	44.850.000,00
2	Investasi Permanen	124.322.505.884,78	132.525.239.349,29
	Jumlah	124.367.355.884,78	132.570.089.349,29

Penjelasan masing-masing jenis Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

5.3.2.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
44.850.000,00	44.850.000,00

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.850.000,00 merupakan Investasi Non Permanen – Lainnya berupa penyaluran dana bergulir yang diberikan kepada kelompok peternak sapi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, yang terdiri dari:

No	Nama Penerima Ternak Guliran	Tahun Perguliran	Saldo Buku 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Buku 31 Desember 2020 (Rp)
1	M. Sarwani Abdan	2011		0,00
2	Suwarsono	2011		0,00
3	Asrani	2012		0,00
4	Ilham	2019	16.000.000,00	16.000.000,00
5	Hairil Anwar	2020	13.700.000,00	13.700.000,00
6	Fitri Ramadhani	2020	6.150.000,00	6.150.000,00
7	Adi Yannor	2021	9.000.000,00	9.000.000,00
	Jumlah		44.850.000,00	44.850.000,00

Rincian dari mutasi Investasi Non Permanen Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.2.2. Investasi Permanen

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
124.322.505.884,78	132.525.239.349,29



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Investasi Permanen Kabupaten Tapin berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Investasi Permanen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin masing-masing sebesar Rp124.322.505.884,78 dan Rp132.525.239.349,29 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BUMD	Persentase Kepemilikan (%)	31 Desember 2020 (Rp)	Tambah / (Kurang) Tahun 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Metode Perhitungan
1	Bank Kalsel	3,16	42.442.328.939,00	0,00	42.442.328.939,00	Biaya
2	BPR Tapin Selatan	65,05	7.004.363.281,45	476.748.088,37	7.481.111.369,82	Ekuitas
3	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin	91,32	83.078.547.128,84	(8.679.481.552,88)	74.399.065.575,96	Ekuitas
	Jumlah		132.525.239.349,29	(8.202.733.464,51)	124.322.505.884,78	

Untuk masing-masing penyertaan modal ke BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 tidak terdapat penambahan jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tapin pada Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 tetap sebesar Rp42.442.328.939,00. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dengan persentase kepemilikan senilai 3,16 %. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dimana penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
2. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (PT BPR Tapin Selatan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 juncto Nomor 9 Tahun 1996. Nomor 5 tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan, dan terakhir Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan sebesar Rp1.767.411.122,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2010. Pada tanggal 02 Maret 2020 telah dilakukan penggabungan (*merger*) 5 (lima) BPR di Kabupaten Tapin bergabung ke dalam PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera berdasarkan akta penggabungan no 4 tanggal 02 Maret 2020 dan akta perubahan anggaran dasar nomor 05 tanggal 02 Maret 2020, surat dari Kemenkumham nomor AHU-0027255.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera, serta surat pemberitahuan dari OJK nomor S-109/KR-09/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang laporan kegiatan penggabungan. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera pada tahun 2021 senilai 65,05% pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.481.111.369,82;

- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (PDAM Kabupaten Tapin) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1990. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan adalah sebesar Rp 99.973.330.241,00 yang terdiri dari penyerahan aset dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 4.580.705.241,00 yang kemudian menjadi penyertaan modal dari Kabupaten Tapin dan penyertaan modal dari Kabupaten Tapin sebesar Rp 95.392.625.000,00 berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 tahun 2009, Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2012 dan Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 8 Tahun 2015. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapin tidak menambah penyertaan modalnya pada PDAM Kabupaten Tapin. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PDAM Kabupaten Tapin sebesar 91,32%. Pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (equity method). Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tapin maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PDAM Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.399.065.575,96.

Rincian mutasi dari Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.3.3. Aset Tetap

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.084.789.585.614,66	1.829.060.354.450,75

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 senilai Rp2.084.789.585.614,66 berasal dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2021. Penjelasan mutasi nilai Aset Tetap selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Tahun 2021 (Rp)		Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	446.957.018.257,68	25.306.675.123,00	12.732.012.798,00	459.531.680.582,68
Peralatan dan Mesin	337.821.273.598,41	59.430.660.885,00	12.949.450.520,92	384.302.483.962,49
Gedung dan Bangunan	1.050.524.168.061,83	339.666.544.604,75	275.006.566.677,00	1.115.184.145.989,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.634.351.241.517,51	183.019.136.608,00	11.350.414.831,00	1.806.019.963.294,51
Aset Tetap Lainnya	16.293.148.714,00	6.813.175.369,00	393.253.000,00	22.713.071.083,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.712.563.295,47	196.116.686.589,00	14.033.548.250,00	254.795.701.634,47
Akumulasi Penyusutan	(1.729.599.058.994,15)	(231.670.191.223,92)	3.511.789.286,00	(1.957.757.460.932,07)
Jumlah	1.829.060.354.450,75	578.682.687.954,83	329.977.035.362,92	2.084.789.585.614,66



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.3.3.1. Tanah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
459.531.680.582,68	446.957.018.257,68

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp459.531.680.582,68 dan Rp446.957.018.257,68. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Saldo Awal	446.957.018.257,68	415.592.214.877,68
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian / Realisasi Belanja Modal	13.781.914.000,00	30.334.280.380,00
b. Koreksi	0,00	184.800.000,00
c. Hibah	0,00	567.800.000,00
d. Pencatatan kembali Aset Tetap Tanah	41.990.000,00	0,00
e. Kapitalisasi	187.517.000,00	0,00
f. Reklasifikasi	684.678.000,00	707.978.000,00
g. Mutasi Unit Kerja	10.610.576.123,00	0,00
Jumlah Mutasi Penambahan	25.306.675.123,00	31.794.858.380,00
3. Mutasi Pengurangan		
a. Hibah	(93.665.250,00)	(184.800.000,00)
b. Reklasifikasi	0,00	(245.255.000,00)
c. Koreksi	(2.027.771.425,00)	0,00
d. Mutasi Unit Kerja	(10.610.576.123,00)	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	(12.732.012.798,00)	(430.055.000,00)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2+3)	459.531.680.582,68	446.957.018.257,68

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	13.781.914.000,00	
2	Koreksi aset tetap yang tidak tercatat	41.990.000,00	Dinas Perindustrian
3	Kapitalisasi	187.517.000,00	Dinas Perkimtan
4	Reklasifikasi dari aset tetap JIJ	684.678.000,00	Dinas Pendidikan
5	Mutasi aset tetap dari SKPD lain	10.610.576.123,00	Dari Dis Perkimtan ke DLH dan Setda ke Kec.Lokpaikat
	Jumlah	25.306.675.123,00	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Hibah	(93.665.250,00)	Dari Dinkes ke Pem.Desda, Setda ke Kemenag Tpn dan Kec.Tapin Utara ke Musholla Arraudah
2	Koreksi	(2.027.771.425,00)	Dinas Perkimtan, Dinas Pertanian dan Setda
3	Mutasi aset tetap dari SKPD lain	(10.610.576.123,00)	Dari Dis Perkimtan ke DLH dan Setda ke Kec.Lokpaikat
	Jumlah	(12.732.012.798,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
384.302.483.962,49	337.821.273.598,41

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp384.302.483.962,49 dan Rp337.821.273.598,41. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Saldo Awal	337.821.273.598,41	287.837.593.798,81
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	54.642.456.139,00	44.586.631.509,00
b. Koreksi	137.144.500,00	234.753.200,00
c. Hibah	2.485.612.935,00	4.650.616.450,00
d. Kapitalisasi	45.420.000,00	81.158.475,00
e. Reklasifikasi	1.087.907.640,00	7.263.900.308,00
f. Mutasi Unit Kerja	1.032.119.671,00	11.638.482.344,00
Jumlah Mutasi Penambahan	59.430.660.885,00	68.455.542.286,00
3. Mutasi Pengurangan		
a. Koreksi	(1.976.641.231,50)	(3.312.664.368,00)
b. Aset Ekstrakomtable	(2.765.272.995,00)	(455.267.087,00)
c. Reklasifikasi	(7.175.416.623,42)	(3.065.448.687,40)
d. Mutasi Unit Kerja	(1.032.119.671,00)	(11.638.482.344,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	(12.949.450.520,92)	(18.471.862.486,40)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2+3)	384.302.483.962,49	337.821.273.598,41

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	54.642.456.139,00	
2	Koreksi aset tetap yang tidak tercatat	125.710.000,00	Dinas Pendidikan
3	Koreksi aset tetap yang tercatat sebagai barang ekstrakomtable	11.434.500,00	BPBD
4	Perolehan dari hibah	2.485.612.935,00	Dis Perhubungan, Dis Penanaman Modal & PTSP dan Dis Pertanian
5	Kapitalisasi	45.420.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kominfo, Dis PM & PTSP, Dis Pustarda, Dis Perdagangan, Setda, Kec.Binuang dan Bappelitbang
6	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	755.114.640,00	Dis Perhubungan, Setda dan Set DPRD
7	Reklas dari aset tetap lainnya	332.793.000,00	Setda
8	Mutasi aset tetap dari SKPD lain	1.032.119.671,00	Dari Dis Perkimtan ke Dis Budpar, Dis Pertanian ke DLH, Setda ke Dis Perhubungan, Setda ke Kdh/Wkdh, Setda ke Kec.CLU dan Setda ke Bapenda
	Jumlah	59.430.660.885,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Koreksi bukan aset tetap	(1.976.641.231,50)	
2	Barang ekstrakompatabel	(2.765.272.995,00)	
3	Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan	(1.385.002.886,75)	Setda dan Set DPRD,
4	Reklas ke aset lainnya (perubahan kondisi dari Baik ke Rusak Berat)	(5.790.413.736,67)	
5	Mutasi aset tetap ke SKPD lain	(1.032.119.671,00)	Dari Dis Perkimtan ke Dis Budpar, Dis Pertanian ke DLH, Setda ke Dis Perhubungan, Setda ke Kdh/Wkdh, Setda ke Kec.CLU dan Setda ke Bapenda
	Jumlah	(12.949.450.520,92)	

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.115.184.145.989,58	1.050.524.168.061,83

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp1.115.184.145.989,58 dan Rp1.050.524.168.061,83. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Saldo Awal	1.050.524.168.061,83	962.665.698.164,76
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	228.023.651.539,00	105.530.913.638,07
b. Hibah	4.675.051.875,00	4.092.200.000,00
c. Kapitalisasi	2.091.081.500,00	2.889.483.000,00
d. Reklasifikasi	11.115.078.736,75	3.263.718.931,00
e. Mutasi Unit Kerja	93.761.680.954,00	25.361.946.920,97
Jumlah Mutasi Penambahan	339.666.544.604,75	141.138.262.490,04
3. Mutasi Pengurangan		
a. Koreksi	(575.444.900,00)	(117.427.000,00)
b. Hibah	(538.702.000,00)	(5.641.486.122,00)
c. Setoran pengembalian belanja modal	(233.940.900,00)	0,00
d. Reklasifikasi	(179.896.797.923,00)	(22.158.932.550,00)
e. Mutasi Unit Kerja	(93.761.680.954,00)	(25.361.946.920,97)
Jumlah Mutasi Pengurangan	(275.006.566.677,00)	(53.279.792.592,97)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2+3)	1.115.184.145.989,58	1.050.524.168.061,83

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dengan penjelasan berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	228.023.651.539,00	
2	Hibah	4.675.051.875,00	Dinas Pertanian
3	Kapitalisasi	2.091.081.500,00	
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.385.002.886,75	Setda dan Set DPRD
5	Reklas dari Aset Tetap KDP	9.730.075.850,00	Dinas PUPR
6	Mutasi Aset Tetap dari SKPD lain	93.761.680.954,00	Dari Disperkimtan ke Disbudpar dan DLH, Dis Pertanian ke DLH, Dis PUPR ke Disdukcapil dan Dispora, Setda ke Dispora, Kdh, Kec.Lokpaikat dan Kec.CLU, Dis Pol PP dan Dis PUPR ke Setda
	Jumlah	339.666.544.604,75	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Koreksi bukan Aset Tetap	(575.444.900,00)	Disdik, Disperkimtan dan Disbudpar
2	Hibah	(538.702.000,00)	Dinas Kesehatan
3	Setor pengembalian uang muka pekerjaan	(233.940.900,00)	Dinas Pertanian
4	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(755.114.640,00)	Dis Perhubungan, Setda dan Set DPRD
5	Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ	(631.865.000,00)	Dis Perikanan, Dis Pertanian dan Kec.Tapin Utara
6	Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP	(178.509.818.283,00)	Dis Kesehatan, Dis PUPR dan Dis Pertanian
7	Mutasi Aset Tetap ke SKPD lain	(93.761.680.954,00)	Dari Disperkimtan ke Disbudpar dan DLH, Dis Pertanian ke DLH, Dis PUPR ke Disdukcapil dan Dispora, Setda ke Dispora, Kdh, Kec.Lokpaikat dan Kec.CLU, Dis Pol PP dan Dis PUPR ke Setda
	Jumlah	(275.006.566.677,00)	

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.806.019.963.294,51	1.634.351.241.517,51

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp1.806.019.963.294,51 dan Rp1.634.351.241.517,51. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Saldo Awal	1.634.351.241.517,51	1.511.833.821.949,51
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	143.322.591.761,00	120.073.896.647,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Hibah	1.592.474.047,00	0,00
c. Kapitalisasi	33.126.823.400,00	2.750.080.300,00
d. Reklasifikasi	4.935.337.400,00	7.807.765.000,00
e. Mutasi Unit Kerja	41.910.000,00	1.133.127.200,00
Jumlah Mutasi Penambahan	183.019.136.608,00	131.764.869.147,00
3. Mutasi Pengurangan		
a. Hibah	(466.244.119,00)	0,00
b. Koreksi	(213.798.395,00)	(6.640.000,00)
c. Reklasifikasi	(10.628.462.317,00)	(8.107.682.379,00)
d. Mutasi Unit Kerja	(41.910.000,00)	(1.133.127.200,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	(11.350.414.831,00)	(9.247.449.579,00)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2+3)	1.806.019.963.294,51	1.634.351.241.517,51

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dengan penjelasan berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	143.322.591.761,00	
	Hibah	1.592.474.047,00	Dinas Pertanian
2	Kapitalisasi	33.126.823.400,00	Dis PUPR, Disperkimtan, Dis Pertanian, Kec.Lokpaikat, Kec.Tapin Selatan dan Kec.Binuang
3	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	631.865.000,00	Dis Perkimtan, Dis Pertaniang dan Kec.Tapin Utara,
4	Reklas dari aset tetap KDP	4.303.472.400,00	Dis PUPR dan Dis Pertanian
5	Mutasi aset tetap dari SKPD lain	41.910.000,00	Dari Dis Perkimtan ke Dis Pertanian
	Jumlah	183.019.136.608,00	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Hibah	(466.244.119,00)	Dari Setda ke Pondok Pesantren
2	Koreksi bukan aset tetap	(213.798.395,00)	Dinas PUPR
3	Reklas ke aset tetap tanah	(684.678.000,00)	Dinas Pendidikan
4	Reklas ke aset tetap KDP	(9.943.784.317,00)	Dinas PUPR
5	Mutasi aset tetap ke SKPD lain	(41.910.000,00)	Dari Dis Perkimtan ke Dis Pertanian
	Jumlah	(11.350.414.831,00)	

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
22.713.071.083,00	16.293.148.714,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp22.713.071.083,00 dan Rp16.293.148.714,00. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Saldo Awal	16.293.148.714,00	21.381.933.614,00
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	2.463.242.169,00	4.513.021.997,00
b. Kapitalisasi	1.305.000,00	0,00
c. Koreksi	4.023.078.200,00	0,00
d. Hibah	325.550.000,00	0,00
Jumlah Mutasi Penambahan	6.813.175.369,00	4.513.021.997,00
3. Mutasi Pengurangan		
a. Koreksi	(38.960.000,00)	(4.159.185.600,00)
b. Reklasifikasi	(354.293.000,00)	(5.665.389.900,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	(393.253.000,00)	(9.824.575.500,00)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2+3)	22.713.071.083,00	16.293.148.714,00

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	2.463.242.169,00	
2	Kapitalisasi	1.305.000,00	Dis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Koreksi aset tetap tidak tercatat	4.023.078.200,00	Dinas Pendidikan
4	Hibah	325.550.000,00	Dinas Pertanian
	Jumlah	6.813.175.369,00	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Koreksi bukan aset tetap	(38.960.000,00)	Dis Tenaga Kerja, Setda dan Bappelitbang
2	Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin	(332.793.000,00)	Setda
3	Reklas ke aset tidak berwujud	(21.500.000,00)	Dis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Jumlah	(393.253.000,00)	

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
254.795.701.634,47	72.712.563.295,47

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp254.795.701.634,47 dan Rp72.712.563.295,47.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Saldo Awal	72.712.563.295,47	53.326.617.844,47
2. Mutasi Penambahan		
a. Kapitalisasi	7.663.083.989,00	165.660.000,00
b. Reklasifikasi	188.453.602.600,00	23.646.912.139,00
Jumlah Mutasi Penambahan	196.116.686.589,00	23.812.572.139,00
3. Mutasi Pengurangan		
a. Reklasifikasi	(14.033.548.250,00)	(3.949.845.931,00)
b. Koreksi	0,00	(476.780.757,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	(14.033.548.250,00)	(4.426.626.688,00)
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	254.795.701.634,47	72.712.563.295,47

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kapitalisasi	7.663.083.989,00	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian
2	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	178.509.818.283,00	Dis Kesehatan, Dis PUPR dan Dis Pertanian
3	Reklas dari aset tetap JIJ	9.943.784.317,00	Dinas PUPR
	Jumlah	196.116.686.589,00	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(9.730.075.850,00)	Dinas PUPR
2	Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.303.472.400,00)	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian
	Jumlah	(14.033.548.250,00)	

Rincian dari mutasi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 10.

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(1.957.757.460.932,07)	(1.729.599.058.994,15)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.957.757.460.932,07) dan sebesar (Rp1.729.599.058.994,15) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	(261.766.860.799,92)	(232.746.577.742,93)
Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(523.132.312.488,72)	(460.106.884.529,72)
Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.172.858.287.643,43)	(1.036.745.596.721,50)
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
Jumlah	(1.957.757.460.932,07)	(1.729.599.058.994,15)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penyusutan aset tetap dimulai tahun 2015, saldo penyusutan sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar (Rp1.729.599.058.994,15), penyusutan tersebut merupakan penyusutan s.d. 31 Desember 2020. Penyusutan s.d 31 Desember 2020 ditambah koreksi penyusutan dan ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021, sehingga saldo penyusutan tahun 2021 menjadi sebesar (Rp1.957.757.460.932,07). Untuk metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), rincian akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021
1.	Penyusutan s.d Tahun 2020	(1.729.599.058.994,15)
2.	Koreksi/penyesuaian penyusutan saldo awal tahun 2021	3.511.789.286,00
3.	Beban penyusutan tahun 2021	(231.670.191.223,92)
	Jumlah	(1.957.757.460.932,07)

a. Akumulasi penyusutan setelah koreksi saldo awal Tahun 2021

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi penyusutan s.d Tahun 2020	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021	Koreksi akumulasi penyusutan saldo awal Tahun 2021		Akumulasi penyusutan saldo awal Tahun 2021 (setelah koreksi)
				Tambah	Kurang	
1.	Peralatan dan Mesin	232.746.577.742,93	229.195.541.066,93	0,00	3.551.036.676,00	229.195.541.066,93
2.	Gedung dan Bangunan	460.106.884.529,72	460.159.393.397,72	52.508.868,00	0,00	460.159.393.397,72
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.036.745.596.721,50	1.036.732.335.243,50	0,00	13.261.478,00	1.036.732.335.243,50
	Jumlah	1.729.599.058.994,15	1.726.087.269.708,15	52.508.868,00	3.564.298.154,00	1.726.087.269.708,15

c. Akumulasi penyusutan per 31 Desember Tahun 2021

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi penyusutan saldo awal Tahun 2021 (setelah koreksi)	Beban Penyusutan	Akumulasi penyusutan 31 Desember 2021
1.	Peralatan dan Mesin	229.195.541.066,93	32.571.319.732,99	261.766.860.799,92
2.	Gedung dan Bangunan	460.159.393.397,72	62.972.919.091,00	523.132.312.488,72
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.036.732.335.243,50	136.125.952.399,93	1.172.858.287.643,43
	Jumlah	1.726.087.269.708,15	231.670.191.223,92	1.957.757.460.932,07

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	199.700.994.370,81	180.059.852.344,81
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.523.036.094,00	2.755.964.797,00
3	Dinas Kesehatan	58.165.573.758,18	53.100.405.774,18



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4	RSUD Datu Sanggul	78.933.512.921,00	65.844.969.583,01
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.155.748.000.064,34	1.037.138.429.182,41
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.704.458.729,85	21.222.659.441,85
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.569.393.405,00	5.431.519.965,00
8	Dinas Perhubungan	23.467.674.606,00	19.499.097.918,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.774.180.510,00	1.416.871.549,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	22.311.521.002,15	15.818.112.906,15
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.950.367.168,00	1.690.027.207,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.556.152.303,00	2.390.900.006,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.073.628.229,00	5.375.877.567,00
14	Dinas Sosial	1.202.996.608,00	1.057.878.147,00
15	Dinas Tenaga Kerja	2.073.913.710,00	1.993.842.365,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.156.994.690,00	5.493.798.246,00
17	Dinas Perdagangan	68.512.248.090,00	60.218.402.854,00
18	Dinas Perindustrian	2.436.941.671,00	2.167.835.102,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75.022.992.760,00	63.623.264.377,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.601.600.443,99	3.039.801.471,99
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	694.160.338,00	645.334.297,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	2.527.824.613,00	2.782.573.381,00
23	Sekretariat Daerah	82.573.001.928,05	59.049.259.100,05
24	Sekretariat DPRD	10.650.607.675,00	9.879.112.721,00
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18.229.135.318,00	15.040.526.645,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.832.244.129,00	3.638.701.186,00
27	Badan Pendapatan Daerah	1.808.248.464,00	1.514.782.366,00
28	Inspektorat	3.505.264.779,00	3.334.830.908,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	6.945.473.074,00	6.375.069.962,00
30	Kecamatan Piani	1.402.751.856,00	1.334.132.482,00
31	Kecamatan Lokpaikat	1.165.038.252,00	961.522.047,00
32	Kecamatan Tapin Utara	1.576.338.340,00	1.434.912.350,00
33	Kecamatan Bakarangan	1.266.280.248,00	1.255.606.671,00
34	Kecamatan Candi Laras Selatan	567.011.231,00	577.426.707,00
35	Kecamatan Candi Laras Utara	1.777.227.003,00	440.480.367,00
36	Kecamatan Hatungun	1.163.202.093,00	1.126.397.963,00
37	Kecamatan Salam Babaris	1.459.753.605,00	1.494.646.836,00
38	Kecamatan Tapin Tengah	1.102.938.113,00	1.052.052.795,00
39	Kecamatan Tapin Selatan	1.244.950.615,00	1.224.953.443,00
40	Kecamatan Binuang	2.003.322.448,00	1.708.810.509,00
41	Kecamatan Bungur	1.760.450.173,00	1.591.269.331,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	4.755.077.824,60	4.882.664.738,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.221.871.629,00	3.598.363.838,00
44	Dinas Pertanian	32.348.121.663,15	28.209.872.946,75
45	Dinas Perikanan	11.901.676.604,95	11.047.611.037,95
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.789.307.781,00	16.058.633.562,00
	Jumlah	1.957.757.460.932,07	1.729.599.058.994,15

5.3.4. Aset Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
13.279.895.607,67	9.272.415.498,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp13.279.895.607,67 dan Rp9.272.415.498,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	2.225.392.206,00	2.225.392.206,00
	a. Tuntutan Perbendaharaan	1.564.500.292,00	1.535.885.785,00
	b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	660.891.914,00	689.506.421,00
2	Aset Tidak Berwujud	8.483.715.228,00	8.187.932.228,00
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.728.088.233,00)	(5.964.991.494,00)
	Aset Tidak Berwujud (Netto)	1.755.626.995,00	2.222.940.734,00
3	Aset Lain-lain	35.189.657.734,87	31.294.840.454,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(25.890.781.328,20)	(26.470.757.896,20)
	Aset Lain-Lain (Netto)	9.298.876.406,67	4.824.082.558,00
	Jumlah	13.279.895.607,67	9.272.415.498,00

5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2.225.392.206,00	2.225.392.206,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.225.392.206,00 merupakan saldo Tagihan/Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp 1.564.500.292,00 dan Tagihan Ganti Kerugian Daerah karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah sebesar 660.891.914,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.3.4.1.1. Tuntutan Perbendaharaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.564.500.292,00	1.535.885.785,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.535.885.785,00, yang merupakan saldo atas Tuntutan Perbendaharaan yang pada Tahun 2020 didasarkan atas Surat Penetapan Kasus Kerugian Daerah dari BPK RI Nomor 46/S/II/06/2020 tanggal 30 Juni 2020.

5.3.4.1.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
660.891.914,00	689.506.421,00

Tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah tagihan atas adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pemotongan dana operasional Puskesmas dan Biaya Lainnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor 700/06-LHP-RiksusTim/INSP/2008 tanggal 14 April 2008	28.614.507,00	28.614.507,00
2	Kerugian Daerah pada pengeluaran keuangan Tahun Anggaran 2007 di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, sesuai Surat Penetapan Kasus Kerugian Daerah dari BPK-RI Nomor: 46/S/II/06/2020 tanggal 30 Juni 2020	0,00	0,00
3	Pengeluaran honorarium tim/panitia yang diberikan lebih dari dua kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban, sesuai LHP BPK Tahun 2006.	80.000.000,00	80.000.000,00
4	Pengeluaran Kegiatan Muspida tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK tahun 2006.	245.642.714,00	245.642.714,00
5	Realisasi biaya pungut upah PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK Tahun 2006.	335.249.200,00	335.249.200,00
	Jumlah	660.891.914,00	689.506.421,00

Rincian dari mutasi Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.3.4.2. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
8.483.715.228,00	8.187.932.228,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.483.715.228,00 dan Rp8.187.932.228,00 merupakan saldo Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi, *Software*, *Website*, *Database* dan Hasil Kajian (DED) yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	542.844.710,00	542.844.710,00
2	RSUD Datu Sanggul	503.300.000,00	503.300.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.546.257.500,00	1.546.257.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	520.235.000,00	520.235.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	644.508.986,00	644.508.986,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	110.260.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	87.355.000,00	87.355.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.463.636,00	18.463.636,00
9	Dinas Perhubungan	233.482.482,00	233.482.482,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	165.900.000,00	95.900.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	138.817.514,00	138.817.514,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	267.843.000,00	267.843.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.850.000,00	26.350.000,00
15	Dinas Perdagangan	34.788.000,00	34.788.000,00
16	Sekretariat Daerah	186.490.000,00	186.490.000,00
17	Sekretariat DPRD	900.000.000,00	825.000.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.491.450.300,00	1.491.450.300,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	186.960.000,00	186.960.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	287.786.100,00	287.786.100,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.775.000,00	320.680.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	16.160.000,00	16.160.000,00
23	Dinas Pertanian	116.500.000,00	97.000.000,00
24	Dinas Perindustrian	36.688.000,00	0,00
	Jumlah	8.483.715.228,00	8.187.932.228,00

Rincian per jenis Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Goodwill		
1	Dinas Pendidikan	460.706.987,00	460.706.987,00
2	RSUD Datu Sanggul	129.395.000,00	129.395.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	110.260.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	7.500.000,00
5	Dinas Perhubungan	95.370.000,00	95.370.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	129.706.250,00	129.706.250,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.350.000,00	26.350.000,00
8	Dinas Perdagangan	22.788.000,00	22.788.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	722.742.300,00	722.742.300,00
	Jumlah Goodwill	1.704.818.537,00	1.704.818.537,00
	Lisensi dan Franchise		



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00
	Jumlah Lisensi dan Franchise	13.500.000,00	13.500.000,00
	Software		
1	Dinas Pendidikan	82.137.723,00	82.137.723,00
2	RSUD Datu Sanggul	373.905.000,00	373.905.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	526.967.500,00	526.967.500,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	16.160.000,00	16.160.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.732.486,00	25.732.486,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.463.636,00	18.463.636,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	165.900.000,00	95.900.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	9.111.264,00	9.111.264,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	109.400.000,00	109.400.000,00
12	Dinas Pertanian	116.500.000,00	97.000.000,00
13	Sekretariat Daerah	186.490.000,00	186.490.000,00
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	173.460.000,00	173.460.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	287.786.100,00	287.786.100,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.775.000,00	320.680.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	74.855.000,00	74.855.000,00
18	Dinas Perdagangan	12.000.000,00	12.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.500.000,00	0,00
20	Dinas Perindustrian	36.688.000,00	0,00
	Jumlah Software	2.646.831.709,00	2.426.048.709,00
	Kajian (DED)		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.019.290.000,00	1.019.290.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	618.776.500,00	618.776.500,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	158.443.000,00	158.443.000,00
5	Sekretariat DPRD	900.000.000,00	825.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	768.708.000,00	768.708.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	510.235.000,00	510.235.000,00
8	Dinas Perhubungan	138.112.482,00	138.112.482,00
	Jumlah Kajian (DED)	4.118.564.982,00	4.043.564.982,00
	Jumlah	8.483.715.228,00	8.187.932.228,00

Rincian dari mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 12.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.3.4.3. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
(Rp) **(Rp)**

(6.728.088.233,00) **(5.964.991.494,00)**

Saldo nilai amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp6.728.088.233,00 dan Rp5.964.991.494,00. Perhitungan nilai amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten, sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti Software, Website, Database, Hasil Kajian/Penelitian dengan masa manfaat selama 5 tahun. Penyajian nilai amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	AKUMULASI AMORTISASI 31 Desember 2020 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI SALDO AWAL TAHUN 2021 (SETELAH KOREKSI) (Rp)	BEBAN AMORTISASI (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	533.838.006,00	533.838.006,00	9.006.704,00	542.844.710,00
2	RSUD Datu Sanggul	466.383.166,00	466.383.166,00	24.223.500,00	490.606.666,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.239.643.458,00	1.239.643.458,00	81.353.500,00	1.320.996.958,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	120.550.917,00	120.550.917,00	102.047.000,00	222.597.917,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	404.728.939,00	404.728.939,00	128.806.256,00	533.535.195,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	110.260.000,00	0,00	110.260.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	32.461.333,00	32.461.333,00	14.971.000,00	47.432.333,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.028.636,00	13.028.636,00	3.435.000,00	16.463.636,00
9	Dinas Perhubungan	125.294.371,00	125.294.371,00	27.622.496,00	152.916.867,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.120.000,00	84.120.000,00	10.646.667,00	94.766.667,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	112.397.117,00	137.147.117,00	1.670.397,00	138.817.514,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	127.360.482,00	127.360.482,00	53.568.600,00	180.929.082,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.350.000,00	26.350.000,00	3.225.000,00	29.575.000,00
15	Dinas Perdagangan	23.788.000,00	23.788.000,00	2.400.000,00	26.188.000,00
16	Sekretariat Daerah	97.732.502,00	97.732.502,00	29.765.833,00	127.498.335,00
17	Sekretariat DPRD	469.583.331,00	469.583.331,00	126.666.669,00	596.250.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	1.475.016.968,00	1.475.016.968,00	3.400.000,00	1.478.416.968,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	65.871.667,00	65.871.667,00	34.692.000,00	100.563.667,00
20	Badan Pendapatan Daerah	199.452.767,00	199.452.767,00	20.000.000,00	219.452.767,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	AKUMULASI AMORTISASI 31 Desember 2020 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI SALDO AWAL TAHUN 2021 (SETELAH KOREKSI) (Rp)	BEBAN AMORTISASI (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Desember 2021 (Rp)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	177.243.834,00	177.243.834,00	35.118.250,00	212.362.084,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	7.002.667,00	7.002.667,00	3.232.000,00	10.234.667,00
23	Dinas Pertanian	46.883.333,00	46.883.333,00	20.050.000,00	66.933.333,00
24	Dinas Perindustrian	0,00	0,00	2.445.867,00	2.445.867,00
Jumlah		5.964.991.494,00	5.989.741.494,00	738.346.739,00	6.728.088.233,00

5.3.4.4. Aset Lain-Lain

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>35.189.657.734,87</u>	<u>31.294.840.454,20</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp35.189.657.734,87 dan Rp31.294.840.454,20 yang merupakan nilai aset yang berasal dari hasil reklasifikasi Aset Tetap yang sudah tidak berfungsi mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain karena kondisi rusak berat dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.594.063.150,00	7.246.923.150,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.960.922,00	73.960.922,00
3	Dinas Kesehatan	4.723.581.436,00	5.629.581.436,00
4	RSUD Datu Sanggul	462.503.500,00	462.503.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.353.329.000,00	4.290.668.000,00
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	336.298.750,00	251.713.750,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	115.196.400,00	134.339.660,00
8	Dinas Perhubungan	2.064.109.700,00	1.581.176.700,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	116.528.750,00	116.528.750,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.500.545,00	143.413.991,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.270.000,00	20.038.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.079.968.573,00	1.079.968.573,00
14	Dinas Sosial	19.164.000,00	19.164.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
15	Dinas Tenaga Kerja	30.238.000,00	30.238.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
17	Dinas Perdagangan	1.199.063.318,00	1.199.063.318,00
18	Dinas Perindustrian	78.272.000,00	109.370.758,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	141.840.976,67	67.477.310,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	678.778.569,00	678.778.569,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	94.350.000,00	78.850.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	319.657.480,00	16.636.000,00
23	Sekretariat Daerah	1.769.091.629,00	1.769.091.629,00
24	Sekretariat DPRD	693.400.250,00	0,00
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.075.031.366,00	1.075.031.366,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	330.463.390,00	64.579.000,00
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00
28	Inspektorat	12.532.100,00	67.803.902,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.568.200,00	200.568.200,00
30	Kecamatan Piani	137.562.000,00	137.562.000,00
31	Kecamatan Lokpaikat	175.316.000,00	175.316.000,00
32	Kecamatan Tapin Utara	122.471.000,00	122.471.000,00
33	Kecamatan Bakarangan	95.548.000,00	95.548.000,00
34	Kecamatan Candi Laras Selatan	283.909.550,00	313.220.000,00
35	Kecamatan Candi Laras Utara	150.781.000,00	150.781.000,00
36	Kecamatan Hatungun	122.644.000,00	89.829.000,00
37	Kecamatan Salam Babaris	206.046.200,00	52.833.200,00
38	Kecamatan Tapin Tengah	92.530.000,00	92.530.000,00
39	Kecamatan Tapin Selatan	209.180.000,00	72.820.000,00
40	Kecamatan Binuang	0,00	24.168.745,00
41	Kecamatan Bungur	290.038.000,00	261.705.000,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	631.728.000,00	202.707.000,00
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.146.000,00	68.109.000,00
44	Dinas Pertanian	2.442.850.725,40	1.718.224.225,40
45	Dinas Perikanan	1.295.123.163,80	1.223.957.163,80
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	214.022.091,00	85.590.636,00
	Jumlah	35.189.657.734,87	31.294.840.454,20

Rincian dari Aset Lain-Lain dan Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<u>(25.890.781.328,20)</u>	<u>(26.470.757.896,20)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai (Rp25.890.781.328,20) dan (Rp26.470.757.896,20) adalah saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(3.581.964.884,00)	(6.546.055.284,00)
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(73.960.922,00)	(73.960.922,00)
3	Dinas Kesehatan	(4.272.524.446,00)	(5.059.430.696,00)
4	RSUD Datu Sanggul	(432.408.944,00)	(432.408.944,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.652.160.248,00)	(2.589.551.333,00)
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(336.298.750,00)	(251.713.750,00)
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(115.196.400,00)	(80.268.660,00)
8	Dinas Perhubungan	(1.361.677.676,00)	(1.214.062.176,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(0,00)	(0,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(115.593.416,00)	(115.593.416,00)
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(62.500.545,00)	(136.559.618,00)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(22.143.959,00)	(20.038.000,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.073.977.740,00)	(1.073.977.740,00)
14	Dinas Sosial	(19.164.000,00)	(19.164.000,00)
15	Dinas Tenaga Kerja	(30.238.000,00)	(30.238.000,00)
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(0,00)	(0,00)
17	Dinas Perdagangan	(1.130.638.568,00)	(1.130.638.568,00)
18	Dinas Perindustrian	(9.712.950,00)	(40.811.708,00)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(136.164.074,00)	(67.477.310,00)
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(403.663.481,00)	(403.663.481,00)
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(94.350.000,00)	(78.850.000,00)
22	Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	(318.357.480,00)	(15.786.000,00)
23	Sekretariat Daerah	(1.604.786.407,00)	(1.604.786.407,00)
24	Sekretariat DPRD	(693.400.250,00)	(0,00)
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(905.830.449,00)	(905.830.449,00)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(324.785.403,00)	(64.579.000,00)
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(0,00)	(0,00)
28	Inspektorat	(12.087.425,00)	(65.801.323,00)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(196.130.492,00)	(196.130.492,00)
30	Kecamatan Piani	(135.074.889,00)	(135.074.889,00)
31	Kecamatan Lokpaikat	(175.316.000,00)	(175.316.000,00)
32	Kecamatan Tapin Utara	(122.121.000,00)	(122.121.000,00)
33	Kecamatan Bakarangan	(95.448.000,00)	(95.448.000,00)
34	Kecamatan Candi Laras Selatan	(251.685.740,00)	(280.996.190,00)
35	Kecamatan Candi Laras Utara	(150.281.000,00)	(150.281.000,00)
36	Kecamatan Hatungun	(122.644.000,00)	(89.829.000,00)
37	Kecamatan Salam Babaris	(206.046.200,00)	(52.833.200,00)
38	Kecamatan Tapin Tengah	(53.285.100,00)	(53.285.100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
39	Kecamatan Tapin Selatan	(204.080.000,00)	(67.720.000,00)
40	Kecamatan Binuang	(0,00)	(23.701.205,00)
41	Kecamatan Bungur	(290.038.000,00)	(261.705.000,00)
42	Dinas Ketahanan Pangan	(629.391.646,00)	(200.370.646,00)
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(73.146.000,00)	(68.109.000,00)
44	Dinas Pertanian	(2.033.499.696,40)	(1.307.180.696,40)
45	Dinas Perikanan	(1.154.985.056,80)	(1.083.819.056,80)
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(214.022.091,00)	(85.590.636,00)
	Jumlah	(25.890.781.328,20)	(26.470.757.896,20)

5.3.5. Kewajiban

5.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
59.450.822.606,53	55.761.955.065,42

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp59.450.822.606,53 dan Rp55.761.955.065,42 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	181.439.855,53	178.906.103,94
3	Utang Belanja	380.498.201,00	203.800.027,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	58.888.884.550,00	55.379.248.934,48
	Jumlah	59.450.822.606,53	55.761.955.065,42

Penjelasan untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.3.5.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
181.439.855,53	178.906.103,94

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp181.439.855,53 dan Rp178.906.103,94 yang terdiri dari:

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Ijin Reklame	136.133.964,77	140.491.113,94
		Pemakaian Kekayaan Daerah	2.563.150,68	0,00
2	Dinas Perhubungan	Ijin Trayek dan KIR	4.512.740,08	34.414.990,00
		Pemakaian Kekayaan Daerah	22.050.000,00	0,00
3	RSUD Datu Sanggul	Pemakaian Kekayaan Daerah	16.000.000,00	4.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

4	Dinas Perdagangan	Pemakaian Kekayaan Daerah	180.000,00	0,00
	Jumlah		181.439.855,53	178.906.103,94

Rincian dari mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 14.

5.3.5.1.2. Utang Belanja

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
380.498.201,00	203.800.027,00

Utang Belanja merupakan kewajiban yang timbul sampai dengan 31 Desember 2021 namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp380.498.201,00 dan Rp203.800.027,00. Saldo Utang Beban Tahun 2021 merupakan Utang Beban Barang Jasa yaitu kewajiban atas pembayaran beban listrik, telepon serta serta pembayaran barang dan jasa lainnya pada 45 SKPD yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Listrik	141.166.691,00
2	Beban Air	33.840.652,00
3	Beban Telepon	16.415.585,00
4	Beban Internet	26.275.273,00
5	Beban Jasa Pelayanan	162.800.000,00
	Jumlah	380.498.201,00

Rincian mutasi Utang Beban dari seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

5.3.5.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
58.888.884.550,00	55.379.248.934,48

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp58.888.884.550,00 dan Rp55.379.248.934,48. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.888.884.550,00 merupakan saldo Utang Tranfer Pemerintah Pusat dan Utang BLUD) pada RSUD Datu Sanggul yang terdiri atas utang pembelian obat, utang jasa pelayanan medis dan BBM untuk mobil *ambulance*.

Rincian dari Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.5.1.3.1. Utang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
51.355.266.702,00	50.960.590.148,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Saldo Utang Lebih Salur Dana Transfer per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.355.266.702,00 dan Rp50.960.590.148,00 yang merupakan Utang Transfer atas lebih salur dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) dari Pemerintah Pusat yang diakui Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2021, yang terdiri atas:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	DBH SDA Minerba	50.893.968.760	47.616.136.118,00
2	DBH PBB	49.144.282,00	0,00
3	DBH PPh	0,00	1.519.127.362,00
4	DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi	251.734.700	1.825.326.668,00
5	DBH SDA Perikanan	157.694.020,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan	2.724.940,00	0,00
	Jumlah	51.355.266.702,00	50.960.590.148,00

Rincian dari Utang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 16.

5.3.5.1.3.2. Utang Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.533.617.848,00	4.418.658.786,48

Saldo Utang Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.533.617.848,00 dan Rp4.418.658.786,48. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.533.617.848,00 merupakan saldo Utang BLUD pada RSUD Datu Sanggul yang terdiri atas utang pembelian obat, utang jasa pelayanan medis dan BBM untuk mobil ambulance, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kreditur	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	PT.ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	14.927.892,00	90.252.955,00
2	PT.ANUGRAH ARGON MEDIKA	21.366.298,00	45.101.508,00
3	PT.BORNEO PERKASA MEDIKA	194.596.050,00	101.733.500,00
4	PT.DAYA MUDA AGUNG	2.351.250,00	5.347.650,00
5	PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	20.080.881,00	35.248.974,00
6	PT.GRAHA MEDIKA MANDIRI	17.534.000,00	13.545.950,00
7	PT.INDOBAARIQ	0,00	48.052.620,00
8	PT.KALISTA PRIMA	5.275.050,00	0,00
9	PT.KEBAYORAN PHARMA	12.210.000,00	24.041.600,00
10	PT.KIMIA FARMA	13.859.351,00	20.436.257,00
11	PT.MENSA BINA SUKSES	3.790.187,00	19.572.135,00
12	PT.MERAPI UTAMA PHARMA	10.226.225,00	4.450.996,00
13	PT.MILLENIUM PHARMACONT INT	42.384.299,00	54.629.741,00
14	PT.PANCARAYA KRISNAMANDIRI	35.189.000,00	2.024.000,00
15	PT.PARID PADANG GLOBAL	24.309.856,00	32.386.606,00
16	PT.PENTAVALENT	18.841.727,00	28.371.337,00
17	PT.RAJAWALI NUSINDO	4.186.619,00	6.208.005,00
18	PT.SAMATOR	13.200.000,00	52.140.000,00
19	PT.SAPTA SARI TAMA	2.227.500,00	6.948.370,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Kreditur	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
20	PT.TIGAMAS PUTERA	22.902.339,00	70.125.000,00
21	PT.TRI SAPTA JAYA	5.940.000,00	18.373.678,00
22	PT.UNITED DICO CITAS	17.241.984,00	16.499.983,00
23	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	2.376.000,00	7.040.000,00
24	PT. TEMPO	2.428.650,00	13.350.000,00
25	PT. BINA SAN PRIMA	3.564.990,00	0,00
26	PT. DOS NI ROHA	48.881.250,00	0,00
27	PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	4.352.501,00	0,00
28	PT. SURYA BORNEO HIGIENIS	10.296.000,00	0,00
29	PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI	100.100.000,00	0,00
30	Jasa Pelayanan Umum	208.036.992,00	285.608.149,00
31	Jasa Pelayanan BPJS	958.198.805,00	1.395.498.124,48
32	Jasa Pelayanan BPJS (Covid-19)	5.689.831.372,00	2.018.191.648,00
33	BBM Ambulance	2.910.780,00	3.480.000,00
	Jumlah	7.533.617.848,00	4.418.658.786,48

Rincian dari Utang Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
109.921.012.750,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp109.921.012.750,00 dan Rp0,00. Saldo Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 seluruhnya merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.3.5.2.1. Utang Jangka Panjang Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
109.921.012.750,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp109.921.012.750,00 dan Rp0,00. Saldo utang jangka panjang tersebut adalah utang kepada Lembaga Keuangan Bank. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada Lembaga keuangan bukan bank atau BUMN yaitu ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) dengan tujuan Pembangunan Rumah Sakit Umum Baru Kelas C. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 8 Tanggal 25 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp148.657.565.500 yang terdiri dari:

- Konstruksi Bangunan (Fisik) sebesar Rp125.000.000.000;
- Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp23.657.565.500



5.3.6. Ekuitas

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
2.249.460.756.434,27	2.367.075.347.167,32

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapin yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak Pihak Ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah Kabupaten Tapin yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami defisit sebesar Rp58.353.770.779,45 atau mengalami penurunan sebesar Rp153.886.433.878,85 atau turun 161,08% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami surplus sebesar Rp95.532.663.099,40. Adapun surplus defisit LO tahun 2021 dan 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(54.266.136.861,45)	96.552.169.360,40
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.892.206.644,00)	(696.528.361,00)
3	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(57.158.343.505,45)	95.855.640.999,40
4	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(1.195.427.274,00)	(322.977.900,00)
5	Surplus/Defisit-LO	(58.353.770.779,45)	95.532.663.099,40

Masing-masing uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Defisit-LO dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp54.266.136.861,45
Jumlah tersebut merupakan selisih dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.107.909.981.496,70 dengan beban kegiatan operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.162.176.118.358,15.
- b. Defisit dari kegiatan Non Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.892.206.644,00.
Jumlah tersebut merupakan selisih antara penjumlahan Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 pada Tahun 2021 dengan penjumlahan Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp132.746.067,00, Defisit atas Ekstrakomptabel sebesar Rp2.759.460.577,00
- c. Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp57.158.343.505,45
Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp54.266.136.861,45 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.892.206.644,00.
- d. Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp1.195.427.274,00
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa-LO sebesar Rp1.195.427.274,00 selama Tahun 2021.
- e. Defisit-LO sebesar Rp58.353.770.779,45
Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp57.158.343.505,45 dengan Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp1.195.427.274,00.

Penjelasan untuk masing-masing Pos Laporan Operasional akan diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kegiatan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.107.909.981.496,70	1.120.912.195.874,28

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

No	Pendapatan-LO	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	120.202.590.427,60	95.808.120.302,32	24.394.470.125,28
2	Pendapatan Transfer-LO	956.449.273.271,10	987.735.867.794,96	(31.286.594.523,86)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	31.258.117.798,00	37.368.207.777,00	(6.110.089.979,00)
	Jumlah	1.107.909.981.496,70	1.120.912.195.874,30	(13.002.214.377,58)

Penurunan Pendapatan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp13.002.214.377,58 disebabkan adanya penurunan dan kenaikan pendapatan sebagai berikut:

1. Kenaikan Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp13.679.247.833,27;
2. Penurunan Pendapatan Retribusi daerah sebesar Rp92.688.034,76;
3. Kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.479.773.573,36;
4. Kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp9.328.136.753,41;
5. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp45.063.084.820,00;
6. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp13.776.490.296,14;
7. Penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp27.460.575.979,00; dan
8. Kenaikan lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp21.350.486.000,00.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
120.202.590.427,60	95.808.120.302,32

PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp120.202.590.427,60 dan Tahun 2020 sebesar Rp95.808.120.302,32. Terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp24.394.470.125,28 atau naik 25,46%. Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	30.444.454.990,51	16.765.207.157,24	13.679.247.833,27
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	2.853.725.974,24	2.946.414.009,00	(92.688.034,76)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.178.158.451,36	3.698.384.878,00	1.479.773.573,36
4	Lain-lain PAD Yang Sah	81.726.251.011,49	72.398.114.258,08	9.328.136.753,41
	Jumlah	120.202.590.427,60	95.808.120.302,32	24.394.470.125,28

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pendapatan Pajak Daerah	30.444.454.990,51	29.439.686.762,34	1.004.768.228,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.853.725.974,24	2.337.412.375,00	516.313.599,24
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.178.158.451,36	4.701.395.003,00	476.763.448,36
4	Lain-lain PAD Yang Sah	81.726.251.011,49	84.964.646.649,49	(3.238.395.638,00)
	Jumlah	120.202.590.427,60	121.443.140.789,83	(1.240.550.362,23)

Penjelasan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
30.444.454.990,51	16.765.207.157,24

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp30.444.454.990,51 dan Tahun 2020 sebesar Rp16.765.207.157,24. Terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp13.679.247.833,27 atau 81,59%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel	86.744.135,00	78.137.800,00	8.606.335,00
2	Pajak Restoran	2.298.401.288,32	2.136.097.011,70	162.304.276,62
3	Pajak Hiburan	6.216.000,00	5.159.700,00	1.056.300,00
4	Pajak Reklame	606.427.728,24	520.763.399,19	85.664.329,05
5	Pajak Penerangan Jalan	9.724.108.710,75	8.636.291.506,23	1.087.817.204,52
6	Pajak Parkir	39.041.233,50	39.021.900,00	19.333,50
7	Pajak Air Tanah	10.837.400,00	0,00	10.837.400,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.318.373.470,70	2.185.892.477,02	4.132.480.993,68
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.193.989.846,00	2.110.362.514,00	83.627.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.160.315.178,00	1.039.480.849,10	8.120.834.328,90
11	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)
	Jumlah	30.444.454.990,51	16.765.207.157,24	13.679.247.833,27

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Pajak- LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Pajak Hotel	86.744.135,00	90.850.500,00	(4.106.365,00)
2	Pajak Restoran	2.298.401.288,32	2.382.450.493,50	(84.049.205,18)
3	Pajak Hiburan	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	606.427.728,24	602.070.579,07	4.357.149,17
5	Pajak Penerangan Jalan	9.724.108.710,75	9.744.049.854,06	(19.941.143,31)
6	Pajak Parkir	39.041.233,50	44.858.700,00	(5.817.466,50)
7	Pajak Air Tanah	10.837.400,00	10.837.400,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.318.373.470,70	6.397.749.261,71	(79.375.791,01)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.193.989.846,00	1.000.288.796,00	1.193.701.050,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.160.315.178,00	9.160.315.178,00	0,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	30.444.454.990,51	29.439.686.762,34	1.004.768.228,17

Selisih lebih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp1.004.768.228,17 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah LRA			29.439.686.762,34
1. Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 pada Pajak Hotel	0,00	(4.106.365,00)	(4.106.365,00)
2. Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 pada Pajak Restoran	0,00	(84.049.205,18)	(84.049.205,18)
3. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 dan Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2020 Pada Pajak Reklame	140.491.113,94	(136.133.964,77)	4.357.149,17
4. Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 pada Pajak Penerangan Jalan	0,00	(19.941.143,31)	(19.941.143,31)
5. Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 pada Pajak Parkir	0,00	(5.817.466,50)	(5.817.466,50)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 pada Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	0,00	(79.375.791,01)	(79.375.791,01)
7. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan	1.421.870.695,00	(228.169.645,00)	1.193.701.050,00
Pendapatan Pajak Daerah LO	1.562.361.808,94	(557.593.580,77)	30.444.454.990,51

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2.853.725.974,24	2.946.414.009,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.853.725.974,24 dan Tahun 2020 sebesar Rp2.946.414.009,00. Terdapat penurunan Pendapatan Retribusi Daerah –LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp92.688.034,76 atau turun 3,15%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	625.428.202,00	703.179.521,00	(77.751.319,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	48.391.000,00	2.400.000,00	45.991.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.600.000,00	680.000,00	36.920.000,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.300.000,00	206.660.000,00	(199.360.000,00)
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	134.043.000,00	150.687.900,00	(16.644.900,00)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	532.107.349,32	297.965.120,00	234.142.229,32
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	967.220.000,00	931.210.000,00	36.010.000,00
8	Retribusi Terminal	156.682.000,00	3.200.000,00	153.482.000,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	89.200.000,00	105.282.000,00	(16.082.000,00)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	9.700.000,00	10.725.000,00	(1.025.000,00)
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	63.937.500,00	43.050.000,00	20.887.500,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	149.522.173,00	431.005.103,00	(281.482.930,00)
14	Retribusi Izin Trayek	3.278.108,92	3.343.381,00	(65.272,08)
15	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	26.874.141,00	53.858.359,00	(26.984.218,00)
16	Retribusi Izin Gangguan	0,00	3.167.625,00	(3.167.625,00)
	Jumlah	2.853.725.974,24	2.946.414.009,00	(92.688.034,76)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	625.428.202,00	625.428.202,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	48.391.000,00	48.391.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	134.043.000,00	134.043.000,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	532.107.349,32	456.171.000,00	75.936.349,32
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	967.220.000,00	556.745.000,00	410.475.000,00
8	Retribusi Terminal	156.682.000,00	156.682.000,00	0,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.442.500,00	2.442.500,00	0,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	63.937.500,00	63.937.500,00	0,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	149.522.173,00	149.522.173,00	0,00
14	Retribusi Izin Trayek	3.278.108,92	250.000,00	3.028.108,92
15	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	26.874.141,00	0,00	26.874.141,00
Jumlah		2.853.725.974,24	2.337.412.375,00	516.313.599,24

Selisih lebih Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp516.313.599,24 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah LRA			2.337.412.375,00
1. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Dan Bangunan	101.939.650,69	(1.392.000,00)	100.547.650,69
2. Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2020 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	0,00	(24.611.301,37)	(24.611.301,37)
3. Penambahan piutang tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d	701.460.000,00	(290.985.000,00)	410.475.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Tahun 2020 Pada Retribusi Pasar Grosir Pertokoan			
4. Penambahan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2020 dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 Pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.257.697,92	(229.589,00)	3.028.108,92
5. Penambahan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2020 Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	26.874.141,00	0,00	26.874.141,00
Pendapatan Retribusi Daerah LO	833.531.489,61	(317.217.890,37)	2.853.725.974,24

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.178.158.451,36	3.698.384.878,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp5.178.158.451,36 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.698.384.878,00. Terdapat kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp1.479.773.573,36 atau naik 40,01%. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bank Kalsel	4.701.395.003,00	3.698.384.878,00	1.003.010.125,00
2	BPR Tapin Selatan	476.763.448,36	0,00	476.763.448,36
	Jumlah	5.178.158.451,36	3.698.384.878,00	1.479.773.573,36

Perbandingan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.701.395.003,00	4.701.395.003,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	476.763.448,36	0,00	476.763.448,36



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

	Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)			
	Jumlah	5.178.158.451,36	4.701.395.003,00	476.763.448,36

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp476.763.448,36 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah LRA			4.701.395.003,00
1. Penambahan Pengakuan atas kenaikan nilai investasi pada BPR Tapin Selatan Tahun 2021 Pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	476.763.448,36	0,00	476.763.448,36
Pendapatan Retribusi Daerah LO	476.763.448,36	0,00	5.178.158.451,36

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
81.726.251.011,49	72.398.114.258,08

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp81.726.251.011,49 dan Tahun 2020 sebesar Rp72.398.114.258,08. Terdapat kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp9.328.136.753,41 atau naik 12,88%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.142.000,00	6.717.000,00	425.000,00
2	Jasa Giro	10.244.600.686,33	14.715.035.358,00	(4.470.434.671,67)
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.547.609,82	4.977.975,00	36.569.634,82
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	104.760.181,00	86.782.786,00	17.977.395,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	1.063.945.475,00	2.590.732.052,37	(1.526.786.577,37)
6	Pendapatan dari BLUD	61.269.633.862,13	46.615.983.389,92	14.653.650.472,21
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.889.268.129,00	6.034.994.138,00	(145.726.009,00)
8	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	522.749.819,00	0,00	522.749.819,00
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	2.582.603.249,21	2.330.891.558,79	251.711.690,42



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
10	Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
	Jumlah	81.726.251.011,49	72.398.114.258,08	9.328.136.753,41

Penjelasan atas selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Lain-lain PAD yang Sah-LO	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.142.000,00	7.142.000,00	0,00
2	Jasa Giro	10.244.600.686,33	10.244.600.686,33	0,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.547.609,82	41.547.609,82	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	104.760.181,00	104.760.181,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	1.063.945.475,00	1.063.945.475,00	0,00
6	Pendapatan dari BLUD	61.269.633.862,13	64.508.029.500,13	(3.238.395.638,00)
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.889.268.129,00	5.889.268.129,00	0,00
8	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	522.749.819,00	522.749.819,00	0,00
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	2.582.603.249,21	2.582.603.249,21	0,00
10	Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	81.726.251.011,49	84.964.646.649,49	(3.238.395.638,00)

Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp3.238.395.638,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA			84.964.646.649,49
1. Penambahan Piutang Tahun 2021 serta Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 serta Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 Pada Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.696.455.643,00	(4.934.851.281,00)	(3.238.395.638,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO	1.696.455.643,00	(4.934.851.281,00)	81.726.251.011,49



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
956.449.273.271,10	987.735.867.794,96

Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2021 sebesar Rp956.449.273.271,10 dan Tahun 2020 sebesar Rp987.735.867.794,96. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp31.286.594.523,86 atau turun 3,17%. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	874.545.687.141,00	919.608.771.961,00	(45.063.084.820,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.903.586.130,10	68.127.095.833,96	13.776.490.296,14
	Jumlah	956.449.273.271,10	987.735.867.794,96	(31.286.594.523,86)

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
874.545.687.141,00	919.608.771.961,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2021 sebesar Rp874.545.687.141,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp919.608.771.961,00. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp45.063.084.820,00 atau turun 4,90%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	811.326.553.141,00	869.606.568.961,00	(58.280.015.820,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	63.219.134.000,00	50.002.203.000,00	13.216.931.000,00
	Jumlah	874.545.687.141,00	919.608.771.961,00	(45.063.084.820,00)

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp811.326.553.141,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp869.606.568.961,00. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp58.280.015.820,00 atau turun 6,70%. Rincian Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	245.007.552.390,00	305.860.894.959,00	(1.412.575.315,00)
2	Dana Alokasi Umum	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00	(5.144.735.000,00)
3	Dana Alokasi Khusus	149.619.165.751,00	141.901.104.002,00	7.718.061.749,00
	Jumlah	811.326.553.141,00	869.606.568.961,00	(58.280.015.820,00)

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Pajak	245.007.552.390,00	245.007.552.390,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum	416.699.835.000,00	416.699.835.000,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus	149.619.165.751,00	149.619.165.751,00	0,00
	Jumlah	811.326.553.141,00	811.326.553.141,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO dengan LRA tahun 2021. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp811.326.553.141,00 merupakan pendapatan bagi hasil dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp77.726.525.923,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp79.139.101.238,00. Terdapat penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp1.412.575.315,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	70.773.879.299,00	68.721.452.085,00	2.052.427.214,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	6.952.646.000,00	10.417.637.453,00	(3.464.991.453,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	624,00	11.700,00	(11.076,00)
	Jumlah	77.726.525.923,00	79.139.101.238,00	(1.412.575.315,00)

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	70.773.879.299,00	70.773.879.299,00	0,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	6.952.646.000,00	6.952.646.000,00	0,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	624,00	624,00	0,00
	Jumlah	77.726.525.923,00	77.726.525.923,00	0,00

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 sebesar Rp167.281.026.467,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp226.721.793.721,00. Terdapat penurunan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp59.440.767.254,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	307.010.314,00	242.296.366,00	64.713.948,00
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	104.956.450,00	(104.956.450,00)
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	165.547.842.703,00	224.792.026.055,00	(59.244.183.352,00)
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.357.619.150,00	1.330.780.150,00	26.839.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	68.554.300,00	251.734.700,00	(183.180.400,00)
	Jumlah	167.281.026.467,00	226.721.793.721,00	(59.440.767.254,00)

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Bagi Hasil Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	307.010.314,00	307.010.314,00	0,00
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	165.547.842.703,00	165.547.842.703,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.357.619.150,00	1.357.619.150,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	68.554.300,00	68.554.300,00	0,00
	Jumlah	167.281.026.467,00	167.281.026.467,00	0,00

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp416.699.835.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp421.844.570.000,00. Terdapat penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp5.144.735.000,00. Pendapatan operasional yang berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin telah diterima seluruhnya pada Tahun 2021. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Dana Alokasi Umum	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00	(5.144.735.000,00)
Jumlah	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00	(5.144.735.000,00)

Perbandingan antara Dana Alokasi Umum (DAU) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
	LO	LRA	
Dana Alokasi Umum	416.699.835.000,00	416.699.835.000,00	0,00
Jumlah	416.699.835.000,00	421.844.570.000,00	0,00

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2021, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp149.619.165.751,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp141.901.104.002,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp7.718.061.749,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Dana Alokasi Khusus	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	77.454.455.569,00	80.859.291.557,00	(3.404.835.988,00)
	a. Pendidikan	25.891.252.690,00	26.365.334.022,00	(474.081.332,00)
	b. Jalan	9.258.185.000,00	0,00	9.258.185.000,00
	c. Irigasi	6.543.687.000,00	7.257.583.750,00	(713.896.750,00)
	d. Air Minum	8.467.674.865,00	9.219.292.000,00	(751.617.135,00)
	e. Sanitasi	4.334.600.000,00	5.045.340.000,00	(710.740.000,00)
	f. Kesehatan	18.932.462.966,00	26.007.257.710,00	(7.074.794.744,00)
	g. Kelautan Dan Perikanan	1.092.136.000,00	1.024.547.900,00	67.588.100,00
	h. Lingkungan Hidup	0,00	1.437.629.850,00	(1.437.629.850,00)
	i. Pertanian	2.934.457.048,00	0,00	2.934.457.048,00
	j. Pasar	0,00	0,00	0,00
	k. Pariwisata	0,00	0,00	0,00
	l. Keluarga Berencana	0,00	3.326.306.325,00	(3.326.306.325,00)
	m. Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.176.000.000,00	(1.176.000.000,00)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	72.164.710.182,00	61.041.812.445,00	11.122.897.737,00
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	3.866.468.000,00	0,00	3.866.468.000,00
	b. Tunjangan Profesi Guru	55.302.213.000,00	0,00	55.302.213.000,00
	c. Tambahan Penghasilan Guru	1.080.938.000,00	0,00	1.080.938.000,00
	d. Bantuan Operasional Kesehatan	4.497.844.536,00	0,00	4.497.844.536,00
	e. Bidang Keluarga Berencana	2.896.853.391,00	0,00	2.896.853.391,00
	f. Tunjangan Khusus Guru	594.075.145,00	0,00	594.075.145,00
	g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	938.526.110,00	777.338.670,00	161.187.440,00
	h. BOP Pendidikan Kesetaraan	2.652.619.000,00	2.663.743.300,00	(11.124.300,00)
	i. Bidang Pendidikan	0,00	55.497.691.475,00	(55.497.691.475,00)
	j. Bidang Pariwisata	0,00	2.103.039.000,00	(2.103.039.000,00)
	k. Dana Bantuan BLPS	335.173.000,00	0,00	335.173.000,00
	Jumlah	149.619.165.751,00	141.901.104.002,00	7.718.061.749,00

Perbandingan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Dana Alokasi Khusus	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	77.454.455.569,00	77.454.455.569,00	0,00
	a. Pendidikan	25.891.252.690,00	25.891.252.690,00	0,00
	b. Jalan	9.258.185.000,00	9.258.185.000,00	0,00
	c. Irigasi	6.543.687.000,00	6.543.687.000,00	0,00
	d. Air Minum	8.467.674.865,00	8.467.674.865,00	0,00
	e. Sanitasi	4.334.600.000,00	4.334.600.000,00	0,00
	f. Kesehatan	18.932.462.966,00	18.932.462.966,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Dana Alokasi Khusus	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
	g. Kelautan Dan Perikanan	1.092.136.000,00	1.092.136.000,00	0,00
	h. Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
	i. Pertanian	2.934.457.048,00	2.934.457.048,00	0,00
	j. Pasar	0,00	0,00	0,00
	k. Pariwisata	0,00	0,00	0,00
	l. Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
	m. Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	72.164.710.182,00	72.164.710.182,00	0,00
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	3.866.468.000,00	3.866.468.000,00	0,00
	b. Tunjangan Profesi Guru	55.302.213.000,00	55.302.213.000,00	0,00
	c. Tambahan Penghasilan Guru	1.080.938.000,00	1.080.938.000,00	0,00
	d. Bantuan Operasional Kesehatan	4.497.844.536,00	4.497.844.536,00	0,00
	e. Bidang Keluarga Berencana	2.896.853.391,00	2.896.853.391,00	0,00
	f. Tunjangan Khusus Guru	594.075.145,00	594.075.145,00	0,00
	g. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	938.526.110,00	938.526.110,00	0,00
	h. BOP Pendidikan Kesetaraan	2.652.619.000,00	2.652.619.000,00	0,00
	i. Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
	j. Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
	k. Dana Bantuan BLPS	335.173.000,00	335.173.000,00	0,00
	Jumlah	149.619.165.751,00	149.619.165.751,00	0,00

5.4.1.2.1.2. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
63.219.134.000,00	50.002.203.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2021 sebesar Rp63.219.134.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp50.002.203.000,00. Terdapat kenaikan DID Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp13.216.931.000,00 atau naik sebesar 26,43%. Rincian DID pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	63.219.134.000,00	50.002.203.000,00	13.216.931.000,00
	Jumlah	63.219.134.000,00	50.002.203.000,00	13.216.931.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Dana Insentif Daerah	63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	0,00
Jumlah		63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	0,00

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
81.903.586.130,10	68.127.095.833,96

Pendapatan Transfer Antar Daerah periode tahun anggaran 2021 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp81.903.586.130,10 dan Tahun 2020 sebesar Rp68.127.095.833,96. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp13.776.490.296,14 atau naik 20,22%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.343.987.993,79	8.843.019.024,29	500.968.969,50
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.763.532.130,43	6.710.122.434,94	2.053.409.695,49
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.573.482.098,70	43.522.315.504,44	10.051.166.594,26
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	115.690.751,18	137.589.459,69	(21.898.708,51)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.106.893.156,00	8.914.049.412,00	1.192.843.744,00
Jumlah		81.903.586.130,10	68.127.095.833,96	13.776.490.294,74

Penjelasan atas selisih antara Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.343.987.993,79	7.911.310.905,18	1.432.677.088,61
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.763.532.130,43	6.152.431.363,82	2.611.100.766,61
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.573.482.098,70	47.254.861.890,00	6.318.620.208,70
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	115.690.751,18	133.695.728,00	(18.004.976,82)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.106.893.156,00	11.602.074.885,00	(1.495.181.729,00)
Jumlah		81.903.586.130,10	73.054.374.772,00	8.849.211.358,10



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Selisih Kurang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp8.849.211.358,10 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA			73.054.374.772,00
1. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Pajak Kendaraan Bermotor	5.152.450.387,79	(3.719.773.299,18)	1.432.677.088,61
2. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.909.060.247,43	(2.297.959.480,82)	2.611.100.766,61
3. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.376.941.630,70	(19.058.321.422,00)	6.318.620.208,70
4. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2020 Pada Pajak Air Permukaan	27.482.691,18	(45.487.668,00)	(18.004.976,82)
5. Penambahan Piutang Tahun 2021 dan Pengurangan atas pelunasan piutang s/d tahun 2020 Pada Pajak Rokok	2.149.236.440,00	(3.644.418.169,00)	(1.495.181.729,00)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	37.615.171.397,10	(28.765.960.039,00)	81.903.586.130,10

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
31.258.117.798,00	37.368.207.777,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp31.258.117.798,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp37.368.207.777,00. Terdapat penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp6.110.089.979,00 atau turun sebesar 16,35%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	9.901.375.798,00	37.361.951.777,00	(27.460.575.979,00)
2	Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.356.742.000,00	6.256.000,00	21.350.486.000,00
	Jumlah	31.258.117.798,00	37.368.207.777,00	(6.110.089.979,00)

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp9.901.375.798,00 dan Rp37.361.951.777,00. Terdapat penurunan Pendapatan Hibah Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp27.460.575.979,00 atau turun sebesar 73,50%. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.901.375.798,00	31.549.997.297,00	(21.648.621.499,00)
	Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2021 (DPPKB)	303.865.827,00	0,00	303.865.827,00
	Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan)	487.922.850,00	0,00	487.922.850,00
	Pendapatan Hibah (Dana BOS)	0,00	23.192.533.404,00	(23.192.533.404,00)
	Hibah IPDMIP	9.109.587.121,00	3.288.330.943,00	5.821.256.178,00
	Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kemendikbud	0,00	452.425.000,00	(452.425.000,00)
	Hibah Dari Kemenkes yang diterima RSUD Datu Sanggul	0,00	4.616.707.950,00	(4.616.707.950,00)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	351.954.480,00	(351.954.480,00)
	Hibah Persediaan dari Provinsi Kalimantan Selatan (DPPKB)	0,00	351.954.480,00	(351.954.480,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	5.460.000.000,00	(5.460.000.000,00)
4	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Perorangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.901.375.798,00	37.361.951.777,00	(27.460.575.979,00)

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Hibah LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Hibah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.901.375.798,00	9.109.587.121,00	791.788.677,00
	Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2021 (DPPKB)	303.865.827,00	0,00	303.865.827,00
	Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan)	487.922.850,00	0,00	487.922.850,00
	Hibah IPDMIP	9.109.587.121,00	9.109.587.121,00	0,00
	Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kemendikbud	0,00	0,00	0,00
	Hibah Dari Kemenkes yang diterima RSUD Datu Sanggul	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Hibah Persediaan dari Provinsi Kalimantan Selatan (DPPKB)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Pendapatan Hibah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
4	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Perorangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.901.375.798,00	9.109.587.121,00	791.788.677,00

Selisih Lebih Pendapatan Hibah LO dengan LRA tahun 2021 sebesar Rp791.788.677,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah LRA			8.402.387.521,00
1. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari BKKBN	303.865.827,00	0,00	303.865.827,00
2. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian Perhubungan	487.922.850,00	0,00	487.922.850,00
Pendapatan Hibah LO	791.788.677,00	0,00	9.194.176.198,00

b. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp21.356.742.000,00 dan Rp6.256.000,00. Terdapat kenaikan Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp21.350.486.000,00. Rincian Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah (Dana BOS)	21.356.742.000,00	0,00	21.356.742.000,00
2	Denda Piutang DPM LUEP	0,00	6.256.000,00	(6.256.000,00)
	Jumlah	21.356.742.000,00	6.256.000,00	21.350.486.000,00

Penjelasan atas selisih antara Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah (Dana BOS)	21.356.742.000,00	21.356.742.000,00	0,00
	Jumlah	21.356.742.000,00	21.356.742.000,00	0,00

5.4.2. Beban

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.162.176.118.358,15	1.024.360.026.513,88



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.162.176.118.358,15 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.024.360.026.513,88. Terdapat kenaikan Beban Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp137.816.091.844,27 atau naik 13,45%. Rincian realisasi Beban Tahun 2021 dan Tahun 2020 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Pegawai	422.134.252.450,00	405.398.178.921,00	16.736.073.529,00
2	Beban Barang dan Jasa	355.873.225.756,08	277.915.038.034,21	77.958.187.721,87
3	Beban Bunga	0,00	1.337.918.090,00	(1.337.918.090,00)
4	Beban Hibah	62.763.906.164,00	51.139.200.420,00	11.624.705.744,00
5	Beban Bantuan Sosial	4.662.150.000,00	10.679.088.300,00	(6.016.938.300,00)
6	Beban Penyisihan Piutang	1.867.533.011,91	767.852.884,50	1.099.680.127,41
7	Beban Lain-lain	9.062.405.897,24	9.395.709.587,86	(333.303.690,62)
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.571.319.732,99	32.765.632.662,11	(194.312.929,12)
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.972.919.091,00	54.371.082.551,00	8.601.836.540,00
10	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.125.952.399,93	114.811.099.370,00	21.314.853.029,93
11	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	460.260.024,40	(460.260.024,40)
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	738.346.739,00	247.977.175,80	490.369.563,20
14	Beban Bagi Hasil	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00	581.573.821,00
15	Beban Bantuan Keuangan	71.364.794.712	63.613.249.910,00	7.751.544.802,00
	Jumlah	1.162.176.118.358,15	1.024.360.026.513,88	137.816.091.844,27

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
422.134.252.450,00	405.398.178.921,00

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp422.134.252.450,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp405.398.178.921,00. Terdapat kenaikan Beban Pegawai Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp16.736.073.529,00 atau naik 4,13%. Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	185.277.847.805,00	187.952.133.120,00	(2.674.285.315,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga	15.366.334.256,00	15.925.817.822,00	(559.483.566,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan	7.161.135.000,00	7.666.255.750,00	(505.120.750,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional	13.210.898.370,00	13.428.001.675,00	(217.103.305,00)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	1.812.230.000,00	1.685.493.750,00	126.736.250,00
6	Beban Tunjangan Beras	9.817.617.300,00	8.557.983.960,00	1.259.633.340,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	655.651.716,00	646.795.360,00	8.856.356,00
8	Beban Pembulatan Gaji	2.662.547,00	2.539.401,00	123.146,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	12.771.047.349,00	11.061.491.876,00	1.709.555.473,00
10	Beban Uang Paket	46.998.000,00	47.659.500,00	(661.500,00)
11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	17.721.900,00	(17.721.900,00)
12	Beban Tunjangan Komisi	0,00	31.652.775,00	(31.652.775,00)
13	Beban Tunjangan Badan Anggaran	0,00	17.447.850,00	(17.447.850,00)
14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	5.663.700,00	(5.663.700,00)
15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	23.050.650,00	13.428.450,00	9.622.200,00
16	Beban Tunjangan Perumahan	0,00	2.766.500.000,00	(2.766.500.000,00)
17	Beban Uang Jasa Pengabdian	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
18	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	3.310.400.000,00	3.319.520.000,00	(9.120.000,00)
19	Beban Jasa Medis	0,00	296.364.729,00	(296.364.729,00)
20	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	1.512.199.772,00	1.539.038.424,00	(26.838.652,00)
21	Beban Tunjangan Transportasi	3.312.500.000,00	2.928.500.000,00	384.000.000,00
22	Beban Tunjangan Reses	787.500.000,00	745.000.000,00	42.000.000,00
23	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	101.926.090.145,00	90.201.364.904,00	11.724.725.241,00
24	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	48.200.000,00	(48.200.000,00)
25	Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.438.428.760,00	48.014.463.900,00	6.423.964.860,00
26	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.137.250.000,00	1.059.687.500,00	77.562.500,00
27	Beban Penunjang Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	399.870.000,00	1.000.000.000,00	(600.130.000,00)
28	Beban Tunjangan Khusus Guru	604.690.800,00	972.010.800,00	(367.320.000,00)
29	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	439.482.331,00	(439.482.331,00)
30	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	671.809.798,00	209.944.725,00	461.865.073,00
31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.921.732,00	20.834.719,00	33.087.013,00
32	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	0,00	1.740.000,00	(1.740.000,00)
33	Beban Pegawai untuk Operasional BLUD	248.020.000,00	4.772.840.000,00	(4.524.820.000,00)
34	Beban Honorarium	1.751.632.000,00	0,00	1.751.632.000,00
35	Beban Uang Representasi DPRD	556.395.000,00	0,00	556.395.000,00
36	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.283.300,00	0,00	53.283.300,00
37	Beban Tunjangan Beras DPRD	62.729.100,00	0,00	62.729.100,00
38	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	806.772.750,00	0,00	806.772.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
39	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.366.450,00	0,00	63.366.450,00
40	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.396,00	0,00	270.396,00
41	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.835.070.000,00	0,00	3.835.070.000,00
42	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00
43	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00
44	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00
45	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.417.620,00	0,00	4.417.620,00
46	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.633.484,00	0,00	1.633.484,00
47	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.740,00	0,00	1.740,00
48	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	271.793.750,00	0,00	271.793.750,00
49	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.112.860,00	0,00	18.112.860,00
	Jumlah	422.134.252.450,00	405.398.178.921,00	16.736.073.529,00

Perbandingan Beban Pegawai LO dengan belanja LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Beban/belanja Pegawai	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Gaji Pokok PNS	185.277.847.805,00	185.277.847.805,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	15.366.334.256,00	15.366.334.256,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	7.161.135.000,00	7.161.135.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional	13.210.898.370,00	13.210.898.370,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	1.812.230.000,00	1.812.230.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras	9.817.617.300,00	9.817.617.300,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	655.651.716,00	655.651.716,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji	2.662.547,00	2.662.547,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	12.771.047.349,00	12.771.047.349,00	0,00
10	Beban Uang Paket	46.998.000,00	46.998.000,00	0,00
11	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	23.050.650,00	23.050.650,00	0,00
12	Beban Uang Jasa Pengabdian	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
13	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	3.310.400.000,00	3.310.400.000,00	0,00
14	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	1.512.199.772,00	1.512.199.772,00	0,00
15	Beban Tunjangan Transportasi	3.312.500.000,00	3.312.500.000,00	0,00
16	Beban Tunjangan Reses	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
17	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	101.926.090.145,00	101.926.090.145,00	0,00
18	Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.438.428.760,00	54.438.428.760,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Beban/belanja Pegawai	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
19	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.137.250.000,00	1.137.250.000,00	0,00
20	Beban Penunjang Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	399.870.000,00	399.870.000,00	0,00
21	Beban Tunjangan Khusus Guru	604.690.800,00	604.690.800,00	0,00
22	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	671.809.798,00	671.809.798,00	0,00
23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.921.732,00	53.921.732,00	0,00
24	Beban Pegawai untuk Operasional BLUD	248.020.000,00	248.020.000,00	0,00
25	Beban Honorarium	1.751.632.000,00	1.788.232.000,00	(36.600.000,00)
26	Beban Uang Representasi DPRD	556.395.000,00	556.395.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.283.300,00	53.283.300,00	0,00
28	Beban Tunjangan Beras DPRD	62.729.100,00	62.729.100,00	0,00
29	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	806.772.750,00	806.772.750,00	0,00
30	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.366.450,00	63.366.450,00	0,00
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.396,00	270.396,00	0,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.835.070.000,00	3.835.070.000,00	0,00
33	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
34	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00
35	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
36	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.417.620,00	4.417.620,00	0,00
37	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.633.484,00	1.633.484,00	0,00
38	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.740,00	1.740,00	0,00
39	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	271.793.750,00	271.793.750,00	0,00
40	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.112.860,00	18.112.860,00	0,00
	Jumlah	422.134.252.450,00	422.170.852.450,00	(36.600.000,00)

Penjelasan atas selisih Beban Pegawai LO dengan Belanja LRA tahun 2021 sebesar Rp36.600.000,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Pegawai LRA			422.170.852.450,00
1. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(7.855.000,00)	(7.855.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(510.000,00)	(510.000,00)
3. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(885.000,00)	(885.000,00)
4. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	(13.040.000,00)	(13.040.000,00)
5. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Perdagangan	0,00	(10.500.000,00)	(10.500.000,00)
6. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Perindustrian	0,00	(1.770.000,00)	(1.770.000,00)
7. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	(2.040.000,00)	(2.040.000,00)
Beban Pegawai LO	0,00	(36.600.000,00)	422.134.252.450,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
355.873.225.756,08	277.915.038.034,21

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp355.873.225.756,08 dan Tahun 2020 sebesar Rp277.915.038.034,21. Terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp77.958.187.721,87 atau naik 28,05%. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang	86.384.557.450,56	80.365.025.231,73	6.019.532.218,83
2	Beban Jasa	135.123.660.113,00	136.838.101.771,48	(1.714.441.658,48)
3	Beban Pemeliharaan	12.735.819.795,00	14.098.473.648,00	(1.362.653.853,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	41.075.076.436,00	46.613.437.383,00	(5.538.360.947,00)
5	Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	18.174.029.665,00	0,00	18.174.029.665,00
6	Beban Barang dan Jasa Bos	15.189.655.188,00	0,00	15.189.655.188,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	47.190.427.108,52	0,00	47.190.427.108,52
	Jumlah	355.873.225.756,08	277.915.038.034,21	77.958.187.721,87



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. **Beban Barang**

No.	Beban/belanja Barang	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.933.246.272,00	27.040.975.067,00	(18.107.728.795,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	531.940.967,00	2.192.687.400,00	(1.660.746.433,00)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.152.137.377,00	7.799.898.277,00	(3.647.760.900,00)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	110.111.250,00	110.111.250,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.697.960.200,00	1.751.904.700,00	(53.944.500,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	8.715.000,00	8.475.000,00	240.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	224.822.566,00	215.322.566,00	9.500.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.099.101.342,00	3.218.033.977,00	881.067.365,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	862.831.594,00	892.502.394,00	(29.670.800,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.823.500,00	0,00	2.823.500,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	56.576.300,00	56.576.300,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.050.192.721,00	3.526.116.938,00	524.075.783,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.291.447.530,00	1.298.512.110,00	(7.064.580,00)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.450.892.295,00	6.741.018.625,00	(290.126.330,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	336.286.400,00	335.386.400,00	900.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	68.622.500,00	68.622.500,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.094.911.850,00	1.105.463.350,00	(10.551.500,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.186.500,00	18.186.500,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	190.849.000,00	190.849.000,00	0,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.724.856.909,00	3.729.047.509,00	(4.190.600,00)
25	Beban Obat-Obatan-Obat	2.938.232.637,56	3.865.152.642,00	(926.920.004,44)
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.335.609.482,00	5.339.835.482,00	(4.226.000,00)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.103.711.168,00	2.342.280.100,00	761.431.068,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	798.298.780,00	721.007.000,00	77.291.780,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	127.816.350,00	127.816.350,00	0,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Barang	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
31	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.387.230.619,00	8.196.175.619,00	191.055.000,00
32	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.449.025.081,00	3.435.330.081,00	13.695.000,00
33	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.315.000,00	11.315.000,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	501.750.200,00	382.840.200,00	118.910.000,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00
37	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.889.039.715,00	14.206.319.715,00	1.682.720.000,00
38	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	252.400.000,00	252.400.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	852.454.000,00	852.454.000,00	0,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.618.355.600,00	1.618.355.600,00	0,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.493.840.745,00	1.431.840.745,00	62.000.000,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	183.925.000,00	183.925.000,00	0,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00
45	Beban Pakaian Penyelamatan	59.240.500,00	198.075.000,00	(138.834.500,00)
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	325.818.800,00	325.818.800,00	0,00
47	Beban Pakaian KORPRI	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
48	Beban Pakaian Adat Daerah	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00
49	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.424.994.700,00	1.424.994.700,00	0,00
50	Beban Pakaian Olahraga	1.399.582.000,00	1.399.582.000,00	0,00
51	Beban Pakaian Paskibraka	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00
JUMLAH		86.384.557.450,56	106.939.237.897,00	(20.554.680.446,44)

b. Beban Jasa

No.	Beban/belanja Jasa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.708.730.000,00	3.708.730.000,00	0,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.642.119.000,00	2.350.669.000,00	291.450.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	246.600.000,00	246.600.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.053.990.000,00	1.053.990.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	136.450.000,00	136.450.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	800.000,00	800.000,00	0,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	506.400.000,00	506.400.000,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.867.500.000,00	1.867.500.000,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.571.193.337,00	19.157.543.337,00	413.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Jasa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	155.427.280,00	155.427.280,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.401.274.035,00	6.866.330.035,00	(2.465.056.000,00)
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.480.500.000,00	1.480.500.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	518.650.000,00	313.000.000,00	205.650.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	566.425.000,00	566.425.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.719.675.000,00	1.719.675.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	184.100.000,00	184.100.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	8.544.272.100,00	8.520.057.100,00	24.215.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.356.582.000,00	1.356.582.000,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.949.845.200,00	3.936.595.200,00	13.250.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.235.274.850,00	2.284.524.850,00	(49.250.000,00)
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.174.886.800,00	10.156.535.400,00	18.351.400,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	20.334.240.000,00	15.120.290.000,00	5.213.950.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Caraka	1.227.200,00	1.227.200,00	0,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	517.950.000,00	517.600.000,00	350.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	258.810.498,00	258.810.498,00	0,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tata Rias	207.225.000,00	207.225.000,00	0,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	55.837.900,00	46.425.000,00	9.412.900,00
33	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	557.464.650,00	755.862.650,00	(198.398.000,00)
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	283.550.000,00	283.550.000,00	0,00
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	640.900.000,00	640.900.000,00	0,00
37	Beban Jasa Kalibrasi	11.907.500,00	11.907.500,00	0,00
38	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	55.880.000,00	55.880.000,00	0,00
39	Beban Jasa Pengukuran Tanah	103.629.900,00	103.629.900,00	0,00
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.497.367.334,00	3.491.367.334,00	6.000.000,00
41	Beban Tagihan Telepon	682.803.202,00	685.958.145,00	(3.154.943,00)
42	Beban Tagihan Air	396.674.149,00	395.504.097,00	1.170.052,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Jasa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
43	Beban Tagihan Listrik	6.685.841.632,00	6.667.179.849,00	18.661.783,00
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	365.087.000,00	365.087.000,00	0,00
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.045.456.935,00	1.037.185.150,00	8.271.785,00
46	Beban Paket/Pengiriman	23.570.850,00	23.570.850,00	0,00
47	Beban Penambahan Daya	12.673.400,00	12.673.400,00	0,00
48	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	415.925.974,00	415.925.974,00	0,00
49	Beban Pengolahan Air Limbah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.647.043.164,00	1.647.043.164,00	0,00
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.930.511.500,00	9.930.511.500,00	0,00
52	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.043.182.000,00	1.043.182.000,00	0,00
53	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.322.937,00	9.322.937,00	0,00
54	Beban Sewa Grader	0,00	1.619.882.800,00	(1.619.882.800,00)
55	Beban Sewa Excavator	2.897.873.000,00	3.857.873.000,00	(960.000.000,00)
56	Beban Sewa Compacting Equipment	0,00	1.655.524.000,00	(1.655.524.000,00)
57	Beban Sewa Electric Generating Set	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
59	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
60	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
61	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.079.835.334,00	873.535.334,00	206.300.000,00
62	Beban Sewa Alat Pendingin	51.164.400,00	51.164.400,00	0,00
63	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	297.844.543,00	278.994.543,00	18.850.000,00
64	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	75.350.000,00	75.350.000,00	0,00
65	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
66	Beban Sewa Peralatan Umum	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00
67	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00
68	Beban Sewa Peralatan Jaringan	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00
70	Beban Sewa Bangunan Gudang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	280.214.200,00	280.214.200,00	0,00
72	Beban Sewa Bangunan Terbuka	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
73	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.552.400,00	4.552.400,00	0,00
74	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
75	Beban Sewa Hotel	22.422.822,00	22.422.822,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Jasa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.224.600,00	2.224.600,00	0,00
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	45.708.250,00	75.408.250,00	(29.700.000,00)
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	432.319.600,00	540.125.600,00	(107.806.000,00)
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	457.850.000,00	515.185.000,00	(57.335.000,00)
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	167.567.000,00	167.567.000,00	0,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.035.714.150,00	2.620.639.650,00	(584.925.500,00)
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.127.259.600,00	1.226.022.600,00	(98.763.000,00)
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.290.972.500,00	2.944.419.000,00	(1.653.446.500,00)
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	765.572.000,00	947.589.000,00	(182.017.000,00)
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	572.006.000,00	572.006.000,00	0,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	83.215.000,00	83.215.000,00	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	323.227.148,00	384.887.148,00	(61.660.000,00)
90	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	930.086.539,00	2.878.075.539,00	(1.947.989.000,00)
91	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	923.509.300,00	2.571.241.700,00	(1.647.732.400,00)
92	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	881.431.500,00	1.367.303.150,00	(485.871.650,00)
93	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	282.073.000,00	543.369.000,00	(261.296.000,00)
94	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	198.440.000,00	198.440.000,00	0,00
95	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	336.490.000,00	336.490.000,00	0,00
96	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	9.018.000,00	9.018.000,00	0,00
97	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	676.316.700,00	676.316.700,00	0,00
98	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	446.699.000,00	634.216.000,00	(187.517.000,00)
99	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	2.407.614.000,00	(2.407.614.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Jasa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
100	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	39.754.000,00	39.754.000,00	0,00
101	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	672.836.900,00	672.836.900,00	0,00
102	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	180.785.000,00	180.785.000,00	0,00
103	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
104	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.572.876.000,00	1.572.876.000,00	0,00
105	Beban Bimbingan Teknis	380.044.000,00	380.044.000,00	0,00
106	Beban Diklat Kepemimpinan	235.627.000,00	235.627.000,00	0,00
107	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	562.717,00	562.717,00	0,00
108	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	15.487.540,00	15.487.540,00	0,00
109	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	35.882,00	35.882,00	0,00
110	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.402.935,00	3.402.935,00	0,00
111	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	74.261.357,00	74.261.357,00	0,00
112	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	329.464,00	329.464,00	0,00
113	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.697,00	55.697,00	0,00
114	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.848.199,00	28.848.199,00	0,00
115	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.341.877,00	10.341.877,00	0,00
116	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.245.785,00	10.245.785,00	0,00
117	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	416.847,00	416.847,00	0,00
JUMLAH		135.123.660.113,00	145.339.065.986,00	(10.215.405.873,00)

c. Beban Pemeliharaan

No.	Beban/belanja Pemeliharaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.059.069.574,00	1.059.069.574,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.595.500,00	23.595.500,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	350.000,00	350.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	154.000,00	154.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Pemeliharaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
7	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	12.142.000,00	12.142.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	377.764.790,00	377.764.790,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	23.428.900,00	23.428.900,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	92.995.000,00	92.995.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	20.248.400,00	20.248.400,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	101.051.000,00	101.051.000,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	75.088.000,00	75.088.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	100.567.520,00	100.567.520,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.832.009.040,00	3.288.123.040,00	(456.114.000,00)
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.975.000,00	29.975.000,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	189.811.000,00	189.811.000,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	14.511.500,00	14.511.500,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.928.000,00	156.928.000,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	49.962.000,00	49.962.000,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	31.184.560,00	31.184.560,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Beban/belanja Pemeliharaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	110.067.000,00	110.067.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	150.497.000,00	150.497.000,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.020.378.000,00	7.020.378.000,00	0,00
33	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	14.408.761,00	14.408.761,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
35	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya	3.363.250,00	3.363.250,00	0,00
JUMLAH		12.735.819.795,00	13.191.933.795,00	(456.114.000,00)

d. Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban/belanja Perjalanan Dinas	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.387.492.991,00	34.387.492.991,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.772.977.163,00	5.772.977.163,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108.120.000,00	108.120.000,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	801.236.282,00	801.236.282,00	0,00
JUMLAH		41.075.076.436,00	41.075.076.436,00	0,00

e. Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat

No.	Beban/belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	430.100.000,00	430.100.000,00	0,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
3	Beban Beasiswa	294.520.000,00	294.520.000,00	0,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.239.400.000,00	459.000.000,00	2.780.400.000,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.850.000,00	67.850.000,00	0,00
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.952.159.665,00	13.300.747.665,00	(348.588.000,00)
JUMLAH		18.174.029.665,00	15.742.217.665,00	2.431.812.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

f. Beban Barang dan Jasa Bos

No.	Beban/belanja Barang dan Jasa Bos	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Barang dan Jasa BOS	15.189.655.188,00	15.189.655.188,00	0,00
JUMLAH		15.189.655.188,00	15.189.655.188,00	0,00

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Beban/belanja Barang dan Jasa BLUD	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	47.190.427.108,52	43.917.147.547,00	3.273.279.561,52
JUMLAH		47.190.427.108,52	43.917.147.547,00	3.273.279.561,52

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa LRA			381.394.334.514,00
Beban Barang			
1. Penambahan Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	44.260.000,00	(18.151.988.795,00)	(18.107.728.795,00)
2. Penambahan Beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2020, Beban Bahan-Bahan Kimia dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2021 Pengurangan Bahan-Bahan Kimia karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	227.904.675,00	(1.888.651.108,00)	(1.660.746.433,00)
3. Penambahan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2021, Pengurangan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	53.665.300,00	(3.701.426.200,00)	(3.647.760.900,00)
4. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2020 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2021	0,00	(53.944.500,00)	(53.944.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Penambahan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2020 dan pengurangan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2021	2.040.000,00	(1.800.000,00)	240.000,00
6. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2020 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2021	12.000.000,00	(2.500.000,00)	9.500.000,00
7. Penambahan Beban Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2020, Beban Bahan-Bahan Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2021	1.000.804.450,00	(119.737.085,00)	881.067.365,00
8. Pengurangan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Tahun 2021	0,00	(29.670.800,00)	(29.670.800,00)
9. Penambahan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	2.823.500,00	0,00	2.823.500,00
10. Penambahan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
11. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Tahun 2020 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Tahun 2021	780.525.283,00	(256.449.500,00)	524.075.783,00
12. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2020 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2021	19.498.170,00	(26.562.750,00)	(7.064.580,00)
13. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2020 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2021	43.170.500,00	(333.296.830,00)	(290.126.330,00)
14. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga	900.000,00	0,00	900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021			
15. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun 2020, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun 2021	21.666.500,00	(32.218.000,00)	(10.551.500,00)
16. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2020, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2021	33.685.700,00	(37.876.300,00)	(4.190.600,00)
17. Penambahan Beban Obat-Obatan Tahun 2020, Beban Obat-Obatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Obat-Obatan Tahun 2021	12.871.584.197,05	(13.798.504.201,49)	(926.920.004,44)
18. Pengurangan Beban Obat-Obatan Lainnya Tahun 2021		(4.226.000,00)	(4.226.000,00)
19. Penambahan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020, Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan pengurangan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021	847.449.368,00	(86.018.300,00)	761.431.068,00
20. Penambahan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2020 dan pengurangan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2021	88.791.780,00	(11.500.000,00)	77.291.780,00
21. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Atribusi	191.055.000,00	0,00	191.055.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021			
22. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	13.695.000,00	0,00	13.695.000,00
23. Penambahan Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	118.910.000,00	0,00	118.910.000,00
24. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	1.682.720.000,00	0,00	1.682.720.000,00
25. Penambahan Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
26. Penambahan Beban Pakaian Penyelamatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Beban Pakaian Penyelamatan atas Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 Pada DPPKB	4.200.000,00	(143.034.500,00)	(138.834.500,00)
Beban Jasa			
1. Penambahan Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	291.450.000,00	0,00	291.450.000,00
2. Penambahan Beban Jasa Tenaga Kesehatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan penambahan Utang Beban Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2021 Pada Dinas Kesehatan	413.650.000,00	0,00	413.650.000,00
3. Pengurangan Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(2.465.056.000,00)	(2.465.056.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Penambahan Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	205.650.000,00	0,00	205.650.000,00
5. Penambahan Beban Jasa Tenaga Administrasi dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	24.215.000,00	0,00	24.215.000,00
6. Penambahan Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
7. Penambahan Beban Jasa Tenaga Ahli dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Beban Jasa Tenaga Ahli karena Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 Pada Sekretariat DPRD	25.750.000,00	(75.000.000,00)	(49.250.000,00)
8. Penambahan Beban Jasa Tenaga Kebersihan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	18.351.400,00	0,00	18.351.400,00
9. Penambahan Beban Jasa Tenaga Keamanan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	5.213.950.000,00	0,00	5.213.950.000,00
10. Penambahan Beban Jasa Tenaga Supir dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	350.000,00	0,00	350.000,00
11. Penambahan Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	9.412.900,00	0,00	9.412.900,00
12. Pengurangan Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi karena Kapitalisasi Aset Lainnya Tahun 2021 Pada Disperta, Diskominfo, Disperin, dan BKPSDM	0,00	(198.398.000,00)	(198.398.000,00)
13. Penambahan Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
14. Penambahan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2020	17.210.745,00	(20.365.688,00)	(3.154.943,00)
15. Penambahan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2021, Penambahan Beban Tagihan Air dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2020	37.208.552,00	(36.038.500,00)	1.170.052,00
16. Penambahan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2021, Penambahan Beban Tagihan Listrik dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2020	145.621.891,00	(126.960.108,00)	18.661.783,00
17. Penambahan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2021, Penambahan Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2020	28.707.516,00	(20.435.731,00)	8.271.785,00
18. Pengurangan Beban Sewa Grader karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(1.619.882.800,00)	(1.619.882.800,00)
19. Pengurangan Beban Sewa Excavator karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(960.000.000,00)	(960.000.000,00)
20. Pengurangan Beban Sewa Compacting Equipment karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(1.655.524.000,00)	(1.655.524.000,00)
21. Penambahan Beban Sewa Alat Kantor Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	206.300.000,00	0,00	206.300.000,00
22. Penambahan Beban Sewa Peralatan Studio Audio dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
23. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	0,00	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arsitektural karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dispustarsip			
24. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinsos dan Sekretariat daerah	0,00	(107.806.000,00)	(107.806.000,00)
25. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Disperkimtan dan Disdag	0,00	(57.335.000,00)	(57.335.000,00)
26. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR, Disperta, DLH, dan Disbudpar	0,00	(584.925.500,00)	(584.925.500,00)
27. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(98.763.000,00)	(98.763.000,00)
28. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Disperkimtan dan DPUPR	0,00	(1.653.446.500,00)	(1.653.446.500,00)
29. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Disperta dan DPUPR	0,00	(182.017.000,00)	(182.017.000,00)
30. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Disperta, DPPKB, Disdag, dan Dispustarsip	0,00	(61.660.000,00)	(61.660.000,00)
31. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR, Disperta, Dinsos, Disperkimtan, DLH, Disdag, Disbudpar, Dispustarsip, dan Sekretariat Daerah	0,00	(1.947.989.000,00)	(1.947.989.000,00)
32. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil	0,00	(1.647.732.400,00)	(1.647.732.400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR dan Disperkimtan			
33. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(485.871.650,00)	(485.871.650,00)
34. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(261.296.000,00)	(261.296.000,00)
35. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Disperkimtan	0,00	(187.517.000,00)	(187.517.000,00)
36. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada DPUPR	0,00	(2.407.614.000,00)	(2.407.614.000,00)
Beban Pemeliharaan			
1. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, dan Dinas Perindustrian	0,00	(456.114.000,00)	(456.114.000,00)
Beban Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat			
1. Pengurangan Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Kecamatan Tapin Selatan	0,00	(348.588.000,00)	(348.588.000,00)
2. Penambahan Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	2.780.400.000,00	0,00	2.780.400.000,00
Beban Barang dan Jasa BLUD			
1. Penambahan Beban Barang Dan Jasa dikarenakan adanya penyesuaian utang BLUD Tahun 2021 dan Pengurangan atas Pelunasan utang BLUD Tahun 2020, dan penyesuaian atas Atribusi Belanja BLUD Tahun 2021	7.691.938.348,00	(4.418.658.786,48)	3.273.279.561,52
Beban Barang dan Jasa LO	35.272.990.775,05	(60.794.099.532,97)	355.873.225.756,08



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.4.2.3 Beban Bunga

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
0,00	1.337.918.090,00

Beban Bunga Tahun 2021 sebesar Rp0,00 adalah beban bunga dalam rangka pembayaran biaya fasilitas pinjaman pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank atau BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan RSUD baru di Kabupaten Tapin. Beban Bunga Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.337.918.090,00. Terdapat penurunan Beban Bunga Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp1.337.918.090,00 atau turun 100,00%. Rincian Beban Bunga Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	1.337.918.090,00	(1.337.918.090,00)
	Jumlah	0,00	1.337.918.090,00	(1.337.918.090,00)

Perbandingan Beban Bunga LO dengan Belanja LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Beban/belanja Bunga	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	1.948.221.349,00	(1.948.221.349,00)
	Jumlah	0,00	1.948.221.349,00	(1.948.221.349,00)

Penjelasan selisih Beban Bunga LO dengan Belanja LRA tahun 2021 sebesar Rp1.948.221.349,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Bunga LRA			1.948.221.349,00
1. Pengurangan Beban Bunga dalam rangka atribusi belanja bunga pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit pada SKPD Dinas PUPR Tahun 2021	0,00	(1.948.221.349,00)	(1.948.221.349,00)
Beban Bunga LO	0,00	(1.948.221.349,00)	0,00

5.4.2.4 Beban Hibah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
62.763.906.164,00	51.139.200.420,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan, negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp62.763.906.164,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp51.139.200.420,00. Terdapat kenaikan Beban Hibah Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp11.624.705.744,00 atau naik sebesar 22,73%. Rincian Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.671.136.164,00	51.139.200.420,00	10.531.935.744,00
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.092.770.000,00	0,00	1.092.770.000,00
	Jumlah	62.763.906.164,00	51.139.200.420,00	11.624.705.744,00

Perbandingan Beban Hibah LO dengan Belanja LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Beban/belanja Hibah	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.671.136.164,00	62.580.358.164,00	(909.222.000,00)
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.092.770.000,00	1.092.770.000,00	0,00
	Jumlah	62.763.906.164,00	63.673.128.164,00	(909.222.000,00)

Penjelasan selisih Beban Hibah LO dengan Belanja LRA tahun 2021 sebesar Rp909.222.000,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Hibah LRA			63.673.128.164,00
1. Pengurangan Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	(9.900.000,00)	(9.900.000,00)
2. Pengurangan Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Kecamatan Binuang	0,00	(723.677.000,00)	(723.677.000,00)
3. Pengurangan Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan karena	0,00	(175.645.000,00)	(175.645.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 Pada Kecamatan Lokpaikat			
Beban Hibah LO	0,00	(909.222.000,00)	62.763.906.164,00

Penjelasan masing-masing jenis Beban Hibah adalah sebagai berikut:

a. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 sebesar Rp61.671.136.164,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp51.139.200.420,00. Terdapat kenaikan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp10.531.935.744,00. Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.715.588.500,00	19.175.689.500,00	3.539.899.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.776.294.164,00	31.963.510.920,00	4.812.783.244,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.179.253.500,00	0,00	2.179.253.500,00
	Jumlah	61.671.136.164,00	51.139.200.420,00	10.531.935.744,00

b. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021 sebesar Rp1.092.770.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Di Tahun 2020 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dimasukkan ke Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Partai PDI Perjuangan	97.990.000,00	0,00	97.990.000,00
2	Partai Golkar	375.630.000,00	0,00	375.630.000,00
3	Partai PKS	87.880.000,00	0,00	87.880.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	57.920.000,00	0,00	57.920.000,00
5	Partai DEMOKRAT	97.540.000,00	0,00	97.540.000,00
6	Partai BERKARYA	39.780.000,00	0,00	39.780.000,00
7	Partai NASDEM	87.660.000,00	0,00	87.660.000,00
8	Partai GERINDRA	89.080.000,00	0,00	89.080.000,00
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	61.310.000,00	0,00	61.310.000,00
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	97.980.000,00	0,00	97.980.000,00
	Jumlah	1.092.770.000,00	0,00	1.092.770.000,00

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4.662.150.000,00	10.679.088.300,00

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp4.662.150.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp10.679.088.300,00. Terdapat penurunan Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp6.016.938.300,00 atau turun sebesar 56,34%. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.613.400.000,00	1.484.496.000,00	1.128.904.000,00
2	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	2.048.750.000,00	2.022.000.000,00	26.750.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	0,00	7.172.592.300,00	(7.172.592.300,00)
	Jumlah	4.662.150.000,00	10.679.088.300,00	(6.016.938.300,00)

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Beban/belanja Bantuan Sosial	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.613.400.000,00	2.613.400.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	2.048.750.000,00	2.048.750.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.662.150.000,00	4.662.150.000,00	

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.867.533.011,91	767.852.884,50

Penyisihan Piutang merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai nilai yang diharapkan dapat ditagih (Net Realizable Value). Perhitungan Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan metode umur piutang (aging schedule). Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp1.867.533.011,91 dan Tahun 2020 sebesar Rp767.852.884,50. Terdapat kenaikan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp1.099.680.127,41 atau naik sebesar 143,21%. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.153.260.438,70	26.695.506,59	1.126.564.932,11
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pajak	673.587.494,40	514.309.850,00	159.277.644,40
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	24.594.256,41	(24.594.256,41)
4	Beban Penyisihan LUEP	0,00	202.253.271,50	(202.253.271,50)
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	56.817.057,00	0,00	56.817.057,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(16.131.978,19)	0,00	(16.131.978,19)
Jumlah		1.867.533.011,91	767.852.884,50	1.099.680.127,41

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun 2016 diakui penyisihan piutang.

5.4.2.7 Beban Lain-lain

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
9.062.405.897,24	9.395.709.587,86



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Beban Lain-Lain Tahun 2021 sebesar Rp9.062.405.897,24 dan Tahun 2020 sebesar Rp9.395.709.587,86. Terdapat penurunan Beban Lain-lain selama Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp333.303.690,62 atau turun sebesar 3,55%. Rincian Beban Lain-Lain Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	9.104.395.897,24	9.387.472.087,86	(283.076.190,62)
	BPR Tapin Selatan	0,00	1.674.129.130,74	(1.674.129.130,74)
	PDAM	9.104.395.897,24	7.713.342.957,12	1.391.052.940,12
2	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	(41.990.000,00)	8.237.500,00	(50.227.500,00)
	Penyisihan Investasi Non Permanen Pada SKPD Dinas Pertanian	(41.990.000,00)	8.237.500,00	(50.227.500,00)
	Jumlah	9.062.405.897,24	9.395.709.587,86	(333.303.690,62)

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
232.408.537.962,92	202.656.051.783,31

Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu Aset Tetap dan Aset Tetap Tidak Berwujud selama masa manfaat aset bersangkutan. Hal ini sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp232.408.537.962,92 dan Tahun 2020 sebesar Rp202.656.051.783,31. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp29.752.486.179,61 atau naik 14,68%. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	32.571.319.732,99	32.765.632.662,11	(194.312.929,12)
2	Gedung Dan Bangunan	62.972.919.091,00	54.371.082.551,00	8.601.836.540,00
3	Jalan Jaringan Dan Irigasi	136.125.952.399,93	114.811.099.370,00	21.314.853.029,93
4	Aset Lain-lain	0,00	460.260.024,40	(460.260.024,40)
5	Aset Tak Berwujud	738.346.739,00	247.977.175,80	490.369.563,20
	Jumlah	232.408.537.962,92	202.656.051.783,31	29.752.486.179,61

Perhitungan Beban Penyusutan diberlakukan mulai Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus selain Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya (hewan ternak, buku, dan tanaman);



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

- b. Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu; dan
- c. Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.

Penjelasan masing-masing jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.8.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
32.571.319.732,99	32.765.632.662,11

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp32.571.319.732,99 dan Tahun 2020 sebesar Rp32.765.632.662,11. Terdapat penurunan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp194.312.929,12 atau turun 0,59%. Adapun rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.714.643.051,00	1.528.524.245,00	186.118.806,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.261.429.852,00	8.806.747.911,14	(545.318.059,14)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	295.313.546,00	1.027.010.440,00	(731.696.894,00)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	837.383.697,00	0,00	837.383.697,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.235.870.668,98	4.045.669.446,99	1.190.201.221,99
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	995.370.042,00	694.319.052,41	301.050.989,59
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.118.352.028,01	10.547.032.401,00	(5.428.680.372,99)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.260.224.211,00	1.301.939.204,60	1.958.285.006,40
9	Beban Penyusutan Komputer	6.535.996.500,00	4.557.452.105,02	1.978.544.394,98
10	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	98.460.000,00	102.300.480,95	(3.840.480,95)
11	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	160.608.403,00	154.637.375,00	5.971.028,00
12	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	57.667.734,00	0,00	57.667.734,00
	Jumlah	32.571.319.732,99	32.765.632.662,11	(194.312.929,12)

5.4.2.8.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
62.972.919.091,00	54.371.082.551,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp62.972.919.091,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp54.371.082.551,00. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp8.601.836.540,00 atau naik 15,82%. Adapun rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	62.268.771.561,00	53.548.354.389,00	8.720.417.172,00
2	Beban Penyusutan Monumen	701.877.530,00	820.250.162,00	(118.372.632,00)
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.270.000,00	2.478.000,00	(208.000,00)
	Jumlah	62.972.919.091,00	54.371.082.551,00	8.601.836.540,00

5.4.2.8.3 Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
136.125.952.399,93	114.811.099.370,00

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 sebesar Rp136.125.952.399,93 dan Tahun 2020 sebesar Rp114.811.099.370,00. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp21.314.853.029,93 atau naik 18,57%. Adapun rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	93.007.812.227,93	80.225.530.366,00	12.782.281.861,93
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	34.526.836.904,00	26.857.512.148,00	7.669.324.756,00
3	Beban Penyusutan Instalasi	1.627.558.105,00	1.395.520.249,00	232.037.856,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	6.963.745.163,00	6.332.536.607,00	631.208.556,00
	Jumlah	136.125.952.399,93	114.811.099.370,00	21.314.853.029,93

5.4.2.8.4 Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
0,00	460.260.024,40

Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp460.260.024,40. Terdapat penurunan Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp460.260.024,40 atau turun 100,00%. Adapun rincian Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	460.260.024,40	(460.260.024,40)
	Jumlah	0,00	460.260.024,40	(460.260.024,40)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.4.2.8.5 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
738.346.739,00	247.977.175,80

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 sebesar Rp738.346.739,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp247.977.175,80. Terdapat kenaikan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp490.369.563,20 atau naik 197,75%. Adapun rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	738.346.739,00	247.977.175,80	490.369.563,20
	Jumlah	738.346.739,00	247.977.175,80	490.369.563,20

5.4.2.9 Beban Transfer

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
73.404.107.116,00	65.070.988.493,00

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Beban Transfer terdiri atas beban sebagai berikut:

No	Beban	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00	581.573.821,00
2	Beban Bantuan Keuangan	71.364.794.712,00	63.613.249.910,00	7.751.544.802,00
	Jumlah	73.404.107.116,00	65.070.988.493,00	8.333.118.623,00

Perbandingan Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Beban/Belanja Transfer	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bagi Hasil	2.039.312.404,00	2.039.312.404,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan	71.364.794.712,00	173.995.227.166,00	(102.630.432.454,00)
	Jumlah	73.404.107.116,00	176.034.539.570,00	(102.630.432.454,00)

Penjelasan selisih Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA tahun 2021 sebesar Rp102.630.432.454,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Transfer LRA			176.034.539.570,00
1. Pengurangan Beban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBN Karena Pelaksanaan kegiatannya di Pemerintahan Desa dan Pendapatannya pun langsung di transfer dari RKUD ke RKD	0,00	(102.630.432.454,00)	(102.630.432.454,00)
Beban Transfer LO	0,00	(102.630.432.454,00)	73.404.107.116,00

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer adalah sebagai berikut:

5.4.2.9.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Bagi Hasil terdiri atas beban sebagai berikut:

No	Beban	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.805.616.074,00	1.297.939.188,00	507.676.886,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	233.696.330,00	159.799.395,00	73.896.935,00
	Jumlah	2.039.312.404,00	1.457.738.583,00	581.573.821,00

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.805.616.074,00	1.297.939.188,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 sebesar Rp1.805.616.074,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.297.939.188,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp507.676.886,00. Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan pajak daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1.	Binuang	8	132.775.248,00	108.663.608,00	24.111.640,00
2.	Tapin Selatan	10	87.572.470,00	99.739.100,00	(12.166.630,00)
3.	Tapin Tengah	17	153.769.794,00	159.251.570,00	(5.481.776,00)
4.	Tapin Utara	12	139.511.117,00	95.231.251,00	44.279.866,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
5.	Candi Laras Selatan	12	177.027.372,00	106.743.592,00	70.283.780,00
6.	Candi Laras Utara	13	242.752.423,00	164.242.758,00	78.509.665,00
7.	Bakarangan	12	150.923.372,00	105.336.520,00	45.586.852,00
8.	Piani	8	132.488.999,00	89.002.680,00	43.486.319,00
9.	Bungur	12	168.102.447,00	113.232.520,00	54.869.927,00
10.	Lokpaikat	8	112.184.398,00	83.760.680,00	28.423.718,00
11.	Salam Babaris	6	139.625.116,00	80.883.260,00	58.741.856,00
12.	Hatungun	8	168.883.318,00	91.851.649,00	77.031.669,00
Jumlah			1.805.616.074,00	1.297.939.188,00	507.676.886,00

b. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
233.696.330,00	159.799.395,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 sebesar Rp233.696.330,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp159.799.395,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp73.896.935,00. Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya daerah merupakan beban transfer bagi hasil retribusi yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan retribusi daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1.	Binuang	8	15.661.287,00	9.390.383,00	6.270.904,00
2.	Tapin Selatan	10	17.914.359,00	15.997.728,00	1.916.631,00
3.	Tapin Tengah	17	32.213.996,00	21.097.643,00	11.116.353,00
4.	Tapin Utara	12	20.819.520,00	12.185.952,00	8.633.568,00
5.	Candi Laras Selatan	12	20.898.603,00	10.475.329,00	10.423.274,00
6.	Candi Laras Utara	13	25.417.083,00	22.066.686,00	3.350.397,00
7.	Bakarangan	12	22.166.758,00	14.620.666,00	7.546.092,00
8.	Piani	8	16.894.849,00	14.350.267,00	2.544.582,00
9.	Bungur	12	21.611.727,00	15.165.697,00	6.446.030,00
10.	Lokpaikat	8	12.902.608,00	9.599.798,00	3.302.810,00
11.	Salam Babaris	6	15.421.230,00	7.574.802,00	7.846.428,00
12.	Hatungun	8	11.774.310,00	7.274.444,00	4.499.866,00
Jumlah			233.696.330,00	159.799.395,00	73.896.935,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.4.2.9.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
71.364.794.712,00	63.613.249.910,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2021 sebesar Rp71.364.794.712,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp63.613.249.910,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp7.751.544.802,00 atau naik 12,19%. Beban Transfer Bantuan Keuangan adalah beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Beban Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas beban sebagai berikut:

No	Beban	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	71.364.794.712,00	62.520.479.910,00	8.844.314.802,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.092.770.000,00	(1.092.770.000,00)
	Jumlah	71.364.794.712,00	63.613.249.910,00	7.751.544.802,00

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

a. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1.	Binuang	8	4.568.234.132,00	4.261.676.728,00	306.557.404,00
2.	Tapin Selatan	10	5.638.727.994,00	5.119.810.472,00	518.917.522,00
3.	Tapin Tengah	17	9.515.320.835,00	8.307.527.828,00	1.207.793.007,00
4.	Tapin Utara	12	6.402.033.079,00	5.023.153.647,00	1.378.879.432,00
5.	Candi Laras Selatan	12	6.583.894.544,00	5.394.083.459,00	1.189.811.085,00
6.	Candi Laras Utara	13	7.595.125.467,00	7.080.067.261,00	515.058.206,00
7.	Bakarangan	12	6.789.487.857,00	5.970.045.240,00	819.442.617,00
8.	Piani	8	4.614.067.826,00	5.020.599.728,00	(406.531.902,00)
9.	Bungur	12	6.700.354.500,00	5.676.973.592,00	1.023.380.908,00
10.	Lokpaikat	8	4.398.960.734,00	3.611.438.728,00	787.522.006,00
11.	Salam Babaris	6	3.430.833.309,00	2.975.542.499,00	455.290.810,00
12.	Hatungun	8	4.715.649.652,00	4.079.560.728,00	636.088.924,00
13.	Iuran JKN (Kepala Desa dan Perangkat Desa)		412.104.783,00	0,00	412.104.783,00
	Jumlah		71.364.794.712,00	62.520.479.910,00	8.844.314.802,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Partai PDI Perjuangan	0,00	97.990.000,00	(97.990.000,00)
2	Partai Golkar	0,00	375.630.000,00	(375.630.000,00)
3	Partai PKS	0,00	87.880.000,00	(87.880.000,00)
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	0,00	57.920.000,00	(57.920.000,00)
5	Partai Demokrat	0,00	97.540.000,00	(97.540.000,00)
6	Partai Berkarya	0,00	39.780.000,00	(39.780.000,00)
7	Partai Nasdem	0,00	87.660.000,00	(87.660.000,00)
8	Partai Gerindra	0,00	89.080.000,00	(89.080.000,00)
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	0,00	61.310.000,00	(61.310.000,00)
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0,00	97.980.000,00	(97.980.000,00)
	Jumlah	0,00	1.092.770.000,00	(1.092.770.000,00)

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Transfer

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(54.266.136.861,45)</u>	<u>96.552.169.360,40</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp54.266.136.861,45 dan Tahun 2020 sebesar Rp96.552.169.360,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan	1.107.909.981.496,70	1.120.912.195.874,28
2	Beban	1.162.176.118.358,15	1.024.360.026.513,88
	Jumlah	(54.266.136.861,45)	96.552.169.360,40

5.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(2.892.206.644,00)</u>	<u>(696.528.361,00)</u>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp2.892.206.644,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp696.528.361,00 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00
2	Jumlah Defisit Non Operasional	(2.892.206.644,00)	(696.528.361,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
	Jumlah	(2.892.206.644,00)	(696.528.361,00)

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Defisit atas Ekstrakomptabel	2.759.460.577,00	0,00	2.759.460.577,00
2	Defisit atas Koreksi Bukan Aset	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Atas Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non lancar	0,00	455.267.087,00	(455.267.087,00)
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	132.746.067,00	241.261.274,00	(108.515.207,00)
	Jumlah	2.892.206.644,00	696.528.361,00	2.195.678.283,00

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.195.427.274,00	322.977.900,00

Pos Luar Biasa merupakan beban tak terduga Tahun 2021 sebesar Rp1.195.427.274,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp322.977.900,00. Terdapat kenaikan Beban Luar Biasa Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp872.449.374,00 atau naik 270,13%. Beban Luar Biasa Tahun 2021 merupakan Beban Tak Terduga dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19.

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Tak Terduga	1.195.427.274,00	322.977.900,00	872.449.374,00
	Jumlah	1.195.427.274,00	322.977.900,00	872.449.374,00

Perbandingan Beban Tak Terduga LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Beban/Belanja Tak Terduga	Realisasi Tahun 2021 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Tak Terduga	1.195.427.274,00	14.008.130.387,00	(12.812.703.113,00)
	Jumlah	1.195.427.274,00	14.008.130.387,00	(12.812.703.113,00)

Penjelasan selisih Beban Tak Terduga LO dengan Belanja LRA tahun 2021 sebesar Rp12.812.703.113,00 terdiri dari:

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Tak Terduga LRA			14.008.130.387,00
1. Pengurangan Beban Tak Terduga atas Pembelian Aset Tetap berupa Tong Air dan Mesin Pada Sekretariat Daerah	0,00	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(43.010.000,00)	(43.010.000,00)
3. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Kimia Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(74.893.550,00)	(74.893.550,00)
4. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(53.665.300,00)	(53.665.300,00)
5. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Lainnya Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(840.772.800,00)	(840.772.800,00)
6. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(2.823.500,00)	(2.823.500,00)
7. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(1.375.000,00)	(1.375.000,00)
8. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(15.548.150,00)	(15.548.150,00)
9. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(43.170.500,00)	(43.170.500,00)
10. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Dalam Rangka	0,00	(900.000,00)	(900.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021			
11. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(9.349.800,00)	(9.349.800,00)
12. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(19.030.000,00)	(19.030.000,00)
13. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Obat-Obatan-Obat Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(19.548.710,00)	(19.548.710,00)
14. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(536.706.000,00)	(536.706.000,00)
15. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(191.055.000,00)	(191.055.000,00)
16. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(13.695.000,00)	(13.695.000,00)
17. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(118.910.000,00)	(118.910.000,00)
18. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(1.682.720.000,00)	(1.682.720.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
19. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(62.000.000,00)	(62.000.000,00)
20. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Pakaian Penyelamatan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)
21. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(291.450.000,00)	(291.450.000,00)
22. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(250.850.000,00)	(250.850.000,00)
23. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(205.650.000,00)	(205.650.000,00)
24. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Administrasi Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(24.215.000,00)	(24.215.000,00)
25. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(13.250.000,00)	(13.250.000,00)
26. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Ahli Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(25.750.000,00)	(25.750.000,00)
27. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Kebersihan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(18.351.400,00)	(18.351.400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
28. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Keamanan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(5.213.950.000,00)	(5.213.950.000,00)
29. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Supir Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(350.000,00)	(350.000,00)
30. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(9.412.900,00)	(9.412.900,00)
31. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
32. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Tagihan Air Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(3.367.900,00)	(3.367.900,00)
33. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Tagihan Listrik Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(4.455.200,00)	(4.455.200,00)
34. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(3.227.403,00)	(3.227.403,00)
35. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(206.300.000,00)	(206.300.000,00)
36. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Sewa Peralatan Studio Audio Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(18.850.000,00)	(18.850.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
37. Pengurangan Beban Tidak Terduga ke Beban Uang/Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021	0,00	(2.780.400.000,00)	(2.780.400.000,00)
Beban Tak Terduga LO	0,00	(12.812.703.113,00)	1.195.427.274,00

5.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(1.195.427.274,00)</u>	<u>(322.977.900,00)</u>

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(58.353.770.779,45)</u>	<u>95.532.663.099,40</u>

Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp58.353.770.779,45 dan Tahun 2020 sebesar Rp95.532.663.099,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional	(54.266.136.861,45)	96.552.169.360,40
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.892.206.644,00)	(696.528.361,00)
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Pos Luar Biasa	(1.195.427.274,00)	(322.977.900,00)
	Surplus/Defisit- LO	(58.353.770.779,45)	95.532.663.099,40



5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Komponen-Komponen Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung. Laporan Arus Kas Tahun 2021 menunjukkan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp132.792.517.161,10. Hal ini diperoleh dari saldo awal kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan arus masuk kas dan arus keluar dari Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran yaitu sebagai berikut:

Jenis Aktivitas	Arus Masuk (Rp)	Arus Keluar (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Arus Kas Tahun 2021:			
- Operasi	1.202.132.822.277,83	1.063.891.356.434,00	138.241.465.843,83
- Investasi Non Keuangan	7.142.000,00	442.233.855.608,00	(442.226.713.608,00)
- Pembiayaan	109.941.455.693,00	0,00	109.941.455.693,00
- Non Anggaran	84.243.535.324,00	84.243.535.324,00	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS			(194.043.792.071,17)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan JKN			326.836.309.232,27
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS			132.792.517.161,10
Saldo Akhir terdiri dari:			
- Kas di BUD (Kasda)			97.948.848.794,42
- Kas di Bendahara Pengeluaran			143.148.682,00
- Kas di BLUD			32.694.317.624,24
- Kas di Bendahara FKTP			550.316.951,00
- Kas di Bendahara BOS			1.455.885.109,44

Penjelasan masing-masing komponen arus kas tersebut adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>138.241.465.843,83</u>	<u>262.532.228.765,07</u>

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp138.241.465.843,83 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:

Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	29.439.686.762,34
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	2.337.412.375,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	4.701.395.003,00
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp.	84.964.646.649,49
Dana Perimbangan	Rp.	811.326.553.141,00
Penerimaan Dana Desa	Rp.	102.630.432.454,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	Rp.	63.219.134.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp.	73.054.374.772,00
Penerimaan Hibah	Rp.	9.109.438.052,56
Penerimaan Lainnya	Rp.	21.349.749.068,44
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp.	1.202.132.822.277,83

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:

Pembayaran Pegawai	Rp.	422.170.852.450,00
Pembayaran Barang dan Jasa	Rp.	381.394.334.514,00
Pembayaran Bunga	Rp.	1.948.221.349,00
Pembayaran Hibah	Rp.	63.673.128.164,00
Pembayaran Bantuan Sosial	Rp.	4.662.150.000,00
Pembayaran Tak Terduga	Rp.	14.008.130.387,00
Pembayaran Bagi Hasil	Rp.	2.039.312.404,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp.	173.995.227.166,00
Jumlah Arus Kas Keluar	Rp.	1.063.891.356.434,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Rp. 138.241.465.843,83

Perbandingan Aktivitas Operasi-Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih / (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:			
1. Penerimaan Pajak Daerah	29.439.686.762,34	29.439.686.762,34	0,00
2. Penerimaan Retribusi Daerah	2.337.412.375,00	2.337.412.375,00	0,00
3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.701.395.003,00	4.701.395.003,00	0,00
4. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah	84.964.646.649,49	84.964.646.649,49	0,00
5. Penerimaan Dana Perimbangan	811.326.553.141,00	811.326.553.141,00	0,00
6. Penerimaan Dana Desa	102.630.432.454,00	102.630.432.454,00	0,00
7. Penerimaan Dana Insentif Daerah	63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	0,00
8. Penerimaan Dana Bagi Hasil	73.054.374.772,00	73.054.374.772,00	0,00
9. Penerimaan Hibah	9.109.587.121,00	9.109.587.121,00	0,00
10. Penerimaan Lainnya	21.349.600.000,00	21.356.742.000,00	7.142.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.202.132.822.277,83	1.202.139.964.277,83	7.142.000,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:			
1. Pembayaran Pegawai	422.170.852.450,00	422.170.852.450,00	0,00
2. Pembayaran Barang dan Jasa	381.394.334.514,00	381.394.334.514,00	0,00
3. Pembayaran Bunga	1.948.221.349,00	1.948.221.349,00	0,00
4. Pembayaran Hibah	63.673.128.164,00	63.673.128.164,00	0,00
5. Pembayaran Bantuan Sosial	4.662.150.000,00	4.662.150.000,00	0,00
6. Pembayaran Tak Terduga	14.008.130.387,00	14.008.130.387,00	0,00
7. Pembayaran Bagi Hasil	2.039.312.404,00	2.039.312.404,00	0,00
8. Pembayaran Bantuan Keuangan	173.995.227.166,00	173.995.227.166,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.063.891.356.434,00	1.063.891.356.434,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Operasi sebesar Rp7.142.000,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokkan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sedangkan pada LRA dikelompokkan ke Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp7.142.000,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(442.226.713.608,00)	(314.878.198.821,07)

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp442.226.713.608,00 merupakan selisih arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:

Hasil Penjualan Peralatan Mesin	Rp.	1.892.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Rp.	5.250.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp.	7.142.000,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:

Perolehan Tanah	Rp.	13.781.914.000,00
Perolehan Peralatan Dan Mesin	Rp.	54.642.456.139,00
Perolehan Gedung Dan Bangunan	Rp.	228.023.651.539,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp.	143.322.591.761,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.463.242.169,00
Perolehan Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	Rp.	442.233.855.608,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp. (442.226.713.608,00)

Perbandingan Aktivitas Investasi Non Keuangan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih / (Kurang) (Rp)
<u>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan :</u>			
1. Hasil Penjualan Peralatan Mesin	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00
2. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00
<u>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan :</u>			
1. Perolehan Tanah	13.781.914.000,00	13.781.914.000,00	0,00
2. Perolehan Peralatan Dan Mesin	54.642.456.139,00	54.642.456.139,00	0,00
3. Perolehan Gedung Dan Bangunan	228.023.651.539,00	228.023.651.539,00	0,00
4. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143.322.591.761,00	143.322.591.761,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih / (Kurang) (Rp)
5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.463.242.169,00	2.463.242.169,00	0,00
6. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	442.233.855.608,00	442.233.855.608,00	0,00

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Investasi sebesar Rp7.142.000,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokkan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi sedangkan pada LRA dikelompokkan ke Lain-Lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.892.000,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp5.250.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
109.941.455.693,00	25.728.918,00

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun 2021 menunjukkan saldo sebesar Rp109.941.455.693,00 yang merupakan selisih jumlah arus kas masuk dengan jumlah arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan:

Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	109.921.012.750,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Rp.	20.442.943,00
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp.	109.941.455.693,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan:

Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	Rp.	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	109.941.455.693,00

Perbandingan Aktivitas Pembiayaan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pembiayaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih / (Kurang) (Rp)
<u>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan:</u>			
1. Penerimaan Pinjaman Daerah	109.921.012.750,00	109.921.012.750,00	0,00
2. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	20.442.943,00	20.442.943,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	109.941.455.693,00	109.941.455.693,00	0,00
<u>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan:</u>			
1. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada aktivitas pembiayaan baik pada arus kas masuk maupun arus kas keluarnya.



5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Tahun 2021 (Rp) (0,00)	Tahun 2020 (Rp) (0,00)
------------------------------	------------------------------

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2021 menunjukkan saldo Rp0,00 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran:

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp.	84.243.535.324,00
Penerimaan Transfer	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp.	84.243.535.324,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran:

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp.	84.243.535.324,00
Pengeluaran Transfer	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	Rp.	84.243.535.324,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 0,00

Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK sebesar Rp84.243.535.324,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	14.936.824.922,00
2	Taperum	313.647.000,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 21	12.414.812.124,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 22	719.202.158,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 23	122.564.898,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	10.079.386.783,00
7	Pajak Penghasilan Pasal 15	157.000,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	44.104.482.216,00
9	BPJS	1.552.353.223,00
10	Lainnya	105.000,00
	Jumlah	84.243.535.324,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Tahun 2021 (Rp) (194.043.792.071,17)	Tahun 2020 (Rp) (52.320.241.138,00)
--	---

Kenaikan/penurunan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp194.043.792.071,17) dan (Rp52.320.241.138,00). Rincian kenaikan/penurunan kas Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	138.241.465.843,83	262.532.228.765,07
Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(442.226.713.608,00)	(314.878.198.821,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	109.941.455.693,00	25.728.918,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(194.043.792.071,17)	(52.320.241.138,00)

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
326.836.309.232,27	379.156.550.370,27

Saldo awal kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS per 1 Januari 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp326.836.309.232,27 dan Rp379.156.550.370,27 sehingga terjadi penurunan saldo awal kas sebesar Rp52.320.241.138,00 atau turun sebesar 13,80% dari jumlah saldo awal kas Tahun 2020.

5.5.7 Saldo Akhir Kas`

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
132.792.517.161,10	326.836.309.232,27

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp132.792.517.161,10 dan Rp326.836.309.232,27 sehingga terjadi penurunan saldo akhir kas sebesar Rp194.043.792.071,17 atau turun sebesar 59,37% dari jumlah saldo akhir kas Tahun 2020. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp132.792.517.161,10 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kas di BUD (Kas Daerah)	97.948.848.794,42	301.932.715.847,16	(203.983.867.052,74)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	143.148.682,00	60.000,00	143.088.682,00
Kas di BLUD	32.694.317.624,24	20.517.843.640,11	12.176.473.984,15
Kas di Bendahara FKTP	550.316.951,00	917.121.076,00	(366.804.125,00)
Kas di Bendahara BOS	1.455.885.109,44	3.468.568.669,00	(2.012.683.559,56)
Saldo Akhir Kas	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27	(194.043.792.071,17)



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ekuitas akhir Pemerintah Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun operasional. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>2.367.075.347.167,32</u>	<u>2.265.487.129.036,59</u>

Rincian nilai Ekuitas Awal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Aset	Rp 2.422.837.302.232,74
2. Kewajiban	Rp 55.761.955.065,42
3. Ekuitas	<u>Rp 2.367.075.347.167,32</u>

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(58.353.770.779,45)</u>	<u>95.532.663.099,40</u>

Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar (Rp58.353.770.779,45) berasal dari:

Pendapatan	Rp. 1.107.909.981.496,70
Beban	<u>Rp. 1.162.176.118.358,15</u> -
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. (54.266.136.861,45)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (2.892.206.644,00)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>Rp. (57.158.343.505,45)</u> +
Surplus/Defisit-LO	Rp. <u>(58.353.770.779,45)</u>

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<u>(59.260.819.953,60)</u>	<u>6.055.555.031,33</u>

Merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas Tahun 2021 dan 2020 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp59.260.819.953,60 dan Rp6.055.555.031,33 terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas - Piutang	(70.077.140.228,47)	2.955.054.875,00
2.	Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	0,00
3.	Koreksi Ekuitas - Persediaan	(26.985.179,00)	30.620.000,00
4.	Koreksi Ekuitas – Investasi Non Permanen	0,00	16.475.000,00
5.	Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen	424.898.984,37	(678.964.041,68)
6.	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	3.689.965.858,50	(13.771.888.844,00)
7.	Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	(16.125.935,00)	(1.609.554.687,99)
8.	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(394.676.554,00)	21.123.769.020,00
9.	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	(2.009.956.290,00)
10.	Koreksi Ekuitas – Bukan Aset Tetap	0,00	0,00
11.	Koreksi Ekuitas – Atas Penghapusan	0,00	0,00
12.	Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal	7.139.243.100,00	0,00
	Total	(59.260.819.953,60)	6.055.555.031,33

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut:

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas – Piutang

Koreksi Ekuitas – Piutang selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp70.077.140.228,47) dan Rp2.955.054.875,00. Koreksi Ekuitas – Piutang pada Tahun 2021 yaitu Koreksi lebih catat atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan kurang catat atas Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.

5.6.3.2. Koreksi Ekuitas - Persediaan

Koreksi Ekuitas - Persediaan selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp26.985.179,00) dan Rp30.620.000,00. Koreksi Ekuitas - Persediaan pada tahun 2021 merupakan koreksi atas nilai Persediaan karcis untuk penerimaan dan pemakaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang pengadaan karcisnya ada pada Badan Pendapatan Daerah..

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas – Investasi Non Permanen

Koreksi Ekuitas – Investasi Non Permanen selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp16.475.000,00.

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen

Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp424.898.984,37 dan (Rp678.964.041,68). Koreksi Ekuitas Investasi Permanen TA 2021 merupakan koreksi atas penyertaan modal Pemda akibat adanya kerugian yang dialami PDAM Tapin sebesar minus Rp8.679.481.552,88 dan koreksi atas pengakuan laba pada BPR Tapin Selatan sebesar Rp476.748.088,37, serta kurang catat nilai investasi penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp8.627.632.448,88.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5.6.3.5. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.689.965.858,50 dan minus Rp13.771.888.844,00 yang terdiri dari:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(1.409.501.546,00)
2	Dinas Kesehatan	(1.464.987.348,00)
3	RSUD Datu Sanggul	(61.200.000,00)
4	Dinas PUPR	1.066.242.695,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(1.290.900.000,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.102.500,00
7	Dinas Tenaga Kerja	(43.288.250,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(12.300.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.150.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(181.600,00)
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.528.500,00
12	Dinas Perhubungan	(94.551.000,00)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(16.452.900,00)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(5.812.418,00)
15	Dinas Pertanian	8.323.237.507,00
16	Dinas Perdagangan	(5.737.000,00)
17	Sekretariat Daerah	(1.248.024.781,50)
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(49.458.500,00)
19	Sekretariat DPRD	(6.600.000,00)
20	Kecamatan Tapin Utara	(14.000.000,00)
Jumlah		3.689.965.858,50

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap mencerminkan koreksi atas nilai Aset Tetap karena kesalahan pencatatan nilai Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyebab terjadinya koreksi nilai Aset Tetap pada TA 2021 yaitu:

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Tambah			
1. Koreksi atas Aset Hibah yang diterima			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koreksi Tambah atas hibah Berdasarkan No SK 570/65/BAST/DPMPSTP/2021	17.528.500,00
2	Dinas Pertanian	Koreksi Tambah atas Hibah BPTP Prov. Kal-Sel berdasarkan berita acara hibah No. B-1127.1/PL.130/H/10/2016 tgl. 2 November 2016 dan B-289.2/PL.130/H/03/2018 tgl. 5 Maret 2018 pada SKPD Dinas Pertanian TA. 2021.	8.573.237.507,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	11.434.500,00
2. Koreksi atas Atribusi Belanja Tahun sebelumnya yang belum dicatat			
1.	Dinas PUPR	Atribusi atas Biaya Fasilitas Pinjaman Daerah Tahun 2020	1.337.918.090,00
			9.940.118.597,00
Koreksi Kurang			
Koreksi atas Bukan Aset Tetap			
1	Dinas Pendidikan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	987.366.546,00
2	Dinas Kesehatan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	918.901.348,00
3	RSUD Datu Sanggul	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	61.200.000,00
4	Dinas PUPR	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	271.675.395,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.290.900.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4.332.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap lainnya	43.288.250,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	12.300.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.150.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	181.600,00
11	Dinas Perhubungan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	94.551.000,00
12	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	16.452.900,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.812.418,00
14	Dinas Pertanian	Aset Tetap Tanah	250.000.000,00
15	Dinas Perdagangan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.737.000,00
16	Sekretariat Daerah	Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya	145.377.987,50
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Aset Tetap Lainnya	160.000,00
18	Sekretariat DPRD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
Koreksi atas Aset Tetap yang dihibahkan			
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Hibah Aset Tetap Tanah Poskesdes dan bangunan Poskesdes dari Dinas Kesehatan kepada pemerintah desa.	546.086.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Sekretariat Daerah	Koreksi Hibah Aset Tetap Tanah Ke KUA Kab. Tapin sesuai BAST No 044/HIBAH/BKAD/2021 dan SK Bupati Nomor 188.45/197/KUM/2021	538.525.369,00
		Koreksi Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Ponpes Muthi'ul Huda Hatungun sesuai BAST No 043/HIBAH/BKAD/2021 Sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/198/KUM/2021	
3	Tapin Utara	Koreksi Hibah Aset Aset Tetap Tanah Ke Yayasan Langgar dengan Nomor BA 016/HIBAH/BKAD/2021 Tahun 2021	14.000.000,00
Koreksi atas Aset yang dihapuskan			
1	Dinas Pendidikan	Penghapusan aset tetap lainnya (Buku) TA 2021 berdasarkan SK nomor 900/012/BKAD/SK/2021 Tanggal 22 September 2021	422.135.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Penghapusan aset tetap lainnya (Buku) TA 2021 berdasarkan SK nomor 900/009/BKAD/SK/2021 Tanggal 6 September 2021	49.298.500,00
3	Sekretariat Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah (Tanah) Berdasarkan TS Dari Sekretariat Daerah Nomor : 100/098/Bagpem/2015)	564.121.425,00
Jumlah koreksi kurang			6.250.152.738,50
Total			3.689.965.858,50

5.6.3.6. Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi

Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar minus Rp16.125.935,00 dan minus Rp1.609.554.687,99 yang terdiri dari:

No	Nama SKPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.825.082.345,00	(5.491.679.892,81)
2	Dinas Kesehatan	301.765.209,00	937.242.979,82
3	RSUD Datu Sanggul	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.551.467.224,00	1.338.780.838,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.745.738.836,00	(261.161.802,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	20.494.659,00	(290.053.832,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.434.500,00)	(193.612.896,00)
8	Dinas Sosial	-	(24.377.916,00)
9	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(126.042,00)	(185.600.612,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	(491.672.479,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(3.947.379.630,00)	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(428.801.573,00)	(486.623.313,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Nama SKPD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
13	Dinas Perhubungan	(475.310.608,00)	963.308.959,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	(412.611.703,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(238.307.896,00)
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.158.899.189,00)	(380.979.253,00)
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80.035.738,00	(233.813.038,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.079.402,00	(190.623.265,00)
19	Dinas Perikanan	-	-
20	Dinas Pertanian	(2.269.951.675,00)	(7.460.000,00)
21	Dinas Perdagangan	-	-
22	Dinas Perindustrian	-	(205.996.292,00)
23	Sekretariat Daerah	(11.063.436.477,00)	6.868.676.047,00
24	Kecamatan Piani	-	(170.547.659,00)
25	Kecamatan Lokpaikat	(114.619.973,00)	(170.547.659,00)
26	Kecamatan Tapin Selatan	-	(199.551.875,00)
27	Kecamatan Binuang	-	(170.547.659,00)
28	Kecamatan Bungur	-	(170.547.659,00)
29	Kecamatan Candi Laras Utara	(1.049.023.026,00)	-
30	Inspektorat	-	(425.152.896,00)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	(444.966.021,00)
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.006.655,00)	(589.357.896,00)
33	Badan Pendapatan Daerah	(22.800.000,00)	(281.769.998,00)
Jumlah		(16.125.935,00)	(1.609.554.687,99)

5.6.3.7. Koreksi Ekuitas - Kewajiban

Koreksi Ekuitas – Kewajiban selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp394.676.554,00) dan Rp21.123.769.020,00 yaitu koreksi atas lebih salur Dana Bagi Hasil berdasarkan PMK Nomor 129 Tahun 2021 sebesar Rp394.676.554,00

5.6.3.8. Koreksi Ekuitas – Lainnya

Koreksi Ekuitas – Lainnya selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp2.009.956.290,00).

5.6.3.9. Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal

Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.139.243.100,00 dan Rp0,00. Koreksi Ekuitas atas Saldo Awal Tahun 2021 sebesar Rp7.139.243.100,00 terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Koreksi tambah	7.311.608.600,00	
1.	Koreksi ekuitas atas saldo awal karcis	198.730.000,00	Bapenda
2.	Koreksi ekuitas atas saldo awal buku	4.023.078.200,00	Disdik
3.	Koreksi ekuitas atas saldo awal peralatan mesin	125.710.000,00	Disdik
4	Koreksi ekuitas atas saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain	2.964.090.400,00	Disdik
	Koreksi kurang	172.365.500,00	
1.	Koreksi ekuitas atas saldo awal akumulasi amortisasi asset tidak berwujud	24.750.000,00	DPMPSTP
2.	Koreksi ekuitas atas saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain	147.615.500,00	Dishub
	jumlah	7.139.243.100,00	

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp)	(Rp)
<u>2.249.460.756.434,27</u>	<u>2.367.075.347.167,32</u>

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.249.460.756.434,27 dan Rp2.367.075.347.167,32. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

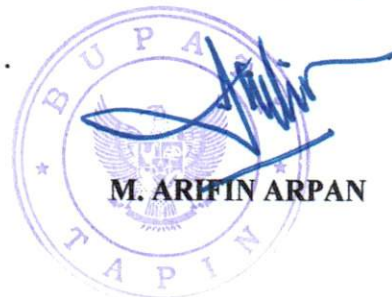
BAB VI
PENUTUP

Sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015 maka telah dilaksanakan berbagai perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi keuangan dan pembaharuan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Pemerintah Kabupaten Tapin ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

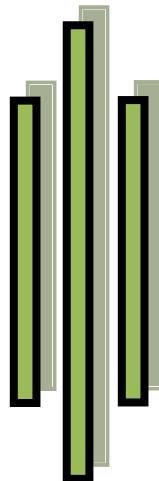
Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

 **BUPATI TAPIN,** 





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dimana secara konstitusional telah diatur pada Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD merupakan informasi utama dan data dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Laporan ini tidak terlepas dari kekurangan dan untuk penyempurnaannya mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/926/OTDA tanggal 26 Januari 2022 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra-Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang diukur berdasarkan Indikator



Kinerja Kunci pada masing-masing urusan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan wajib pelayanan dasar, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang didukung dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Tapin yang memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu.

Keberhasilan yang dicapai merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin pada tahun 2021, meskipun terdapat kendala dan pencapaian yang belum maksimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan masih dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan menghadapi New Normal dengan adanya Pandemi COVID-19. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab bersama dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan untuk penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang dengan harapan terwujudnya Tapin Maju, Sejahtera yang Agamis dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.

 **BUPATI TAPIN,**

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756). Berdasarkan undang-undang tersebut, yang semula Kewedanaan Tapin yang semula termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diberikan Hak Otonomi sebagai Daerah tingkat II Kabupaten Tapin dan diresmikan pada tanggal 30 Nopember 1965 dengan ibu kota Kabupaten di Rantau. Dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, diantaranya yang utama adalah :



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);



7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021.

1.1.1. PENJELASAN UMUM

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan Kewedanaan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Dalam perkembangannya Kabupaten Tapin sekarang mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Binuang	8	3
2	Hatungun	8	-
3	Tapin Selatan	10	1
4	Salam Babaris	6	-
5	Tapin Tengah	17	-
6	Bungur	12	-
7	Piani	8	-
8	Lokpaikat	8	1
9	Tapin Utara	12	4
10	Bakarangan	12	-
11	Candi Laras Selatan	12	-
12	Candi Laras Utara	13	-
Kabupaten Tapin		126	9

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021



B. Data Geografis Wilayah

Secara Astronomis Kabupaten Tapin terletak diantara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala

Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin terbagi atas 12 kecamatan yang meliputi 126 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 2.152,63 km², yang merupakan 5,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

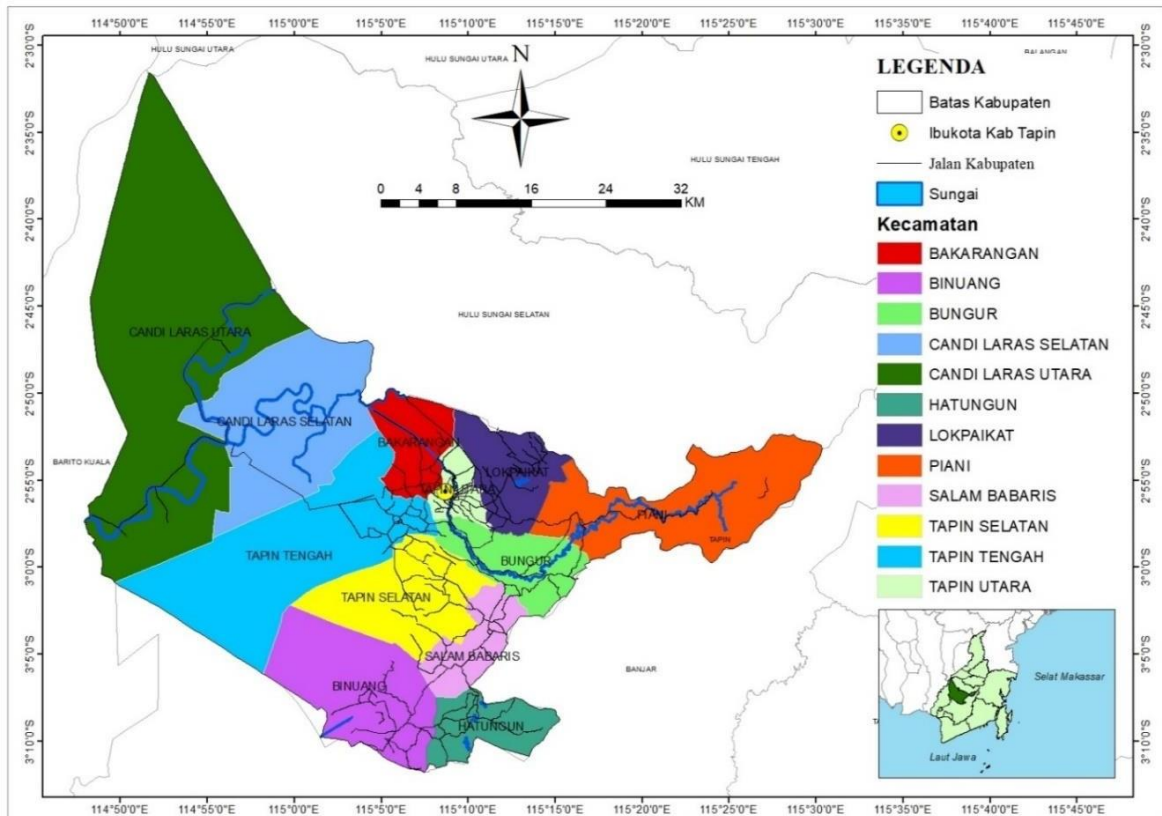
Tabel 1.2
Sebaran Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Tapin
1	Binuang	Binuang	150,91	7,01
2	Hatungun	Hatungun	79,57	3,70
3	Tapin Selatan	Tambarangan	171,84	7,98
4	Salam Babaris	Salam Babaris	59,90	2,78
5	Tapin Tengah	Pematang Karang Hulu	306,26	14,32
6	Bungur	Bungur	89,39	4,15
7	Piani	Miawa	190,09	8,83
8	Lokpaikat	Lokpaikat	106,28	4,94
9	Tapin Utara	Rangda Malingkung	32,62	1,52
10	Bakarangan	Bakarangan	70,40	3,27
11	Candi Laras Selatan	Baringin	277,46	12,89
12	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	617,93	28,71
Kabupaten Tapin			2.152,63	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini :

Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034

Tinjauan kondisi fisik dasar wilayah meliputi tinjauan aspek topografi dan kemiringan, jenis tanah, kemampuan tanah, kondisi iklim dan hidrologi.

1. Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan air laut yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu :

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Benuang.



- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 1.3
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
		0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	>500 m	
1	Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
2	Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
3	Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
5	Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
7	Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
8	Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
9	Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase		67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,21	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 % dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0 – 2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 1.4
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25 %	>25-40%	>40%	
1	Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
2	Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
3	Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
5	Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
7	Piani	0	1.090	3.510	8.909	2.360	4.140	20.009
8	Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
9	Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234



10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Persentase		82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

2. Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50% sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23% sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7% sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57% terletak di Kecamatan Piani.

3. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian,



ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

4. Iklim dan Hidrologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 - 32 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 – 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di



Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 133.058 hektar atau 6 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 63.300 Hektar atau sekitar 29 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Laporan semester II Tahun 2021 berjumlah 190.954 jiwa, terdiri dari 96.027 jiwa laki – laki dan 94.927 jiwa perempuan. Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin lebih banyak bertempat tinggal Kecamatan Benuang (16,37%), Kecamatan Tapin Utara (13,25%) dan Kecamatan Tapin Selatan (10,83%). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Piani (3,21%).

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik



perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

- 1) Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

- 1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tapin Utara (776 jiwa/km²), Kecamatan Binuang (207 jiwa/km²), Kecamatan Salam Babaris (206 jiwa/km²), Kecamatan Bakarangan (151 jiwa/km²), Kecamatan Bungur (153 jiwa/km²), Kecamatan Tapin Selatan (120 jiwa/km²), Kecamatan Lokpaikat (110 jiwa/km²), Kecamatan Hatungun (120 jiwa/km²). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tapin Tengah (67 jiwa/km²), Kecamatan Candi Laras Selatan (44 jiwa/km²), Kecamatan Piani (32 jiwa/km²), Kecamatan Candi Laras Utara (27 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tapin adalah 89 jiwa/ km².

Tabel 1.5
Luas wilayah, Jumlah Desa / Kelurahan dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Desa	Kel	
1	Binuang	150,91	8	3	31276
2	Hatungun	79,57	8	-	9557
3	Tapin Selatan	171,84	10	1	20698
4	Salam Babaris	59,90	6	-	12351
5	Tapin Tengah	306,26	17	-	20492
6	Bungur	89,39	12	-	13655
7	Piani	190,09	8	-	6141
8	Lokpaikat	106,28	8	1	11785
9	Tapin Utara	32,62	12	4	25318
10	Bakarangan	70,40	12	-	10607
11	Candi Laras Selatan	277,46	12	-	12211
12	Candi Laras Utara	617,93	13	-	16863
Kabupaten Tapin		2.152,63	126	9	190.954

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022, Semester II

a) Struktur Penduduk

Pada Tahun 2021 dilihat dari tabel menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin sedang mengalami pertumbuhan, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi serta pertumbuhan penduduk tinggi.

Ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Tapin termasuk penduduk muda, artinya sebagian besar terdiri dari penduduk dengan usia muda. Hal ini berarti, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk penduduk usia mudanya. Disamping itu, program Keluarga Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk juga harus mendapat perhatian khusus.



Untuk klasifikasi penduduk Tapin menjadi 3 (tiga) kelompok umur, yaitu kelompok usia muda (0-14 tahun) adalah 24,65%, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,53% dan kelompok usia lanjut (65 tahun keatas) adalah 4,81%.

Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dihitung besarnya Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif (umur dibawah 15 tahun) dan kelompok umur yang sudah dianggap tidak produktif (70 tahun keatas) dengan banyaknya orang yang termasuk kelompok usia produktif (umur 15-69 tahun). Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi beban atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, atau dengan kata lain proporsi penduduk usia non produktif dibanding dengan usia produktif. Angka ini masih Cukup Baik karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Tapin masih lebih banyak dibanding yang tidak produktif.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tapin Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	6.434	6.014	12.448
2	5-9	8.960	8.223	17.183
3	10-14	8.973	8.469	17.442
4	15-19	7.575	7.344	14.919
5	20-24	7.748	7.430	15.178
6	25-29	7.723	7.495	15.218
7	30-34	7.739	7.940	15.679
8	35-39	8.203	8.111	16.314
9	40-44	7.345	7.470	14.815
10	45-49	7.095	7.283	14.378
11	50-54	6.003	5.991	11.994
12	55-59	4.645	4.647	9.292
13	60-64	3.425	3.473	6.898
14	65-69	2.028	2.074	4.102
15	70+	2.131	2.963	5.094
JUMLAH		96.027	94.927	190.954

Sumber : DKB Semester II TA 2021, Dukcapil Kabupaten Tapin

b) Jenis Pekerjaan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu hal yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Tapin menurut lapangan usaha utama paling banyak bekerja pada jenis pekerjaan Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Berdasarkan data bahwa Sektor Pertanian sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus.

Adapun untuk rincian jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama
di Kabupaten Tapin

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Pertanian	39.529
2.	Industri	15.391
3.	Jasa	42.016

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

c) Pendidikan

Kondisi lembaga penyelenggara pendidikan setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2017 terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten maupun Kota sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah hanya terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan Tingkat SD dan SMP.

Terkait hal tersebut untuk pendidikan baik negeri maupun swasta dan jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, berdasarkan data tahun pelajaran 2020/2021

se-Kabupaten Tapin.

Adapun untuk data perkembangan Pendidikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8
Data Perkembangan Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Jenjang Pendidikan					
		PAUD		SD / MI		SMP / MTs	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Jumlah Sekolah	183	182	194	194	40	40
2.	Jumlah Kelas	441	436	1.300	1.324	359	369
3.	Jumlah Perpustakaan	-	-	163	176	36	43
4.	Jumlah Murid	5.136	5.735	21.202	21.138	7.754	7.204
5.	Rasio Murid : Guru	12	10	13	13	13	10
6.	Jumlah Lulusan	2.540	2.626	3.207	3.276	2.495	2.698

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin, 2021

Dari sektor pendidikan baik Negeri maupun Swasta yang sudah diuraikan pada tabel tersebut di atas terdapat pengurangan jumlah sekolah di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 PAUD bergabung dengan SKB Kabupaten Tapin sehingga di hapus kelompok bermainnya.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Adapun di Kabupaten Tapin memiliki 12 (dua Belas) Kecamatan, 9 (sembilan) Kelurahan dan 126 (seratus dua puluh enam) Desa.

Tabel 1.9
Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Binuang	8	3
2	Hatungun	8	-
3	Tapin Selatan	10	1
4	Salam Babaris	6	-
5	Tapin Tengah	17	-
6	Bungur	12	-
7	Piani	8	-
8	Lokpaikat	8	1
9	Tapin Utara	12	4
10	Bakarangan	12	-
11	Candi Laras Selatan	12	-
12	Candi Laras Utara	13	-
Kabupaten Tapin		126	9

Sumber : KDA Kabupaten Tapin, BPS, 2021

Dalam perkembangannya, untuk Desa dan Kelurahan selama kurun waktu 15 tahun di Kabupaten Tapin belum ada pemekaran Desa/Kelurahan, sedangkan untuk pemekaran Kecamatan terkendala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. Salah satu diantaranya adalah desa untuk memekarkan Kecamatan minimal 10 desa dengan usia desa 5 (lima) tahun.

Kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 9 (sembilan) adalah :

- I. Kecamatan Binuang
 - 1) Kelurahan Binuang
 - 2) Kelurahan Karang Putih
 - 3) Kelurahan Raya Belanti
- II. Kecamatan Tapin Selatan
 - 1) Kelurahan Tambarangan
- III. Kecamatan Lokpaikat
 - 1) Kelurahan Bitahan



IV. Kecamatan Tapin Utara

- 1) Kelurahan Kupang
- 2) Kelurahan Rangda Malingkung
- 3) Kelurahan Rantau Kanan
- 4) Kelurahan Rantau Kiwa

Desa yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 126 Desa sebagai berikut :

I. Kecamatan Binuang

- 1) Desa Tungkap
- 2) Desa A. Yani Pura
- 3) Desa Pulau Pinang
- 4) Desa Pualam Sari
- 5) Desa Gunung Batu
- 6) Desa Pulau Pinang Utara
- 7) Desa Padang Sari
- 8) Desa Mekar Sari

II. Kecamatan Hatungun

- 1) Desa Tarungin
- 2) Desa Matang Batas
- 3) Desa Hatungun
- 4) Desa Burakai
- 5) Desa Batu Hapu
- 6) Desa Kambang Kuning
- 7) Desa Asam Randah
- 8) Desa Bagak

III. Kecamatan Tapin Selatan

- 1) Desa Tatakan
- 2) Desa Suato Tatakan
- 3) Desa Sawang
- 4) Desa Lawahan
- 5) Desa Timbaan
- 6) Desa Rumintin
- 7) Desa Cempaka
- 8) Desa Harapan Masa
- 9) Desa Tandui



10) Desa Hatiwin

IV. Kecamatan Salam Babaris

- 1) Desa Salam Babaris
- 2) Desa Suato Lama
- 3) Desa Kambang Habang lama
- 4) Desa Pantai Cabe
- 5) Desa Suato Baru
- 6) Desa Kambang Habang Baru

V. Kecamatan Tapin Tengah

- 1) Desa Pandulangan
- 2) Desa Labung
- 3) Desa Mandurian
- 4) Desa Serawi
- 5) Desa Pematang Karang Hulu
- 6) Desa Pematang Karang
- 7) Desa Pandahan
- 8) Desa P. Karang Hilir
- 9) Desa Hiyung
- 10) Desa Andhika
- 11) Desa Sukaramai
- 12) Desa Tirik
- 13) Desa Kepayang
- 14) Desa Batang Lantik
- 15) Desa Mandurian Hilir
- 16) Desa Sungai Bahalang
- 17) Desa Papagan Makmur

VI. Kecamatan Bungur

- 1) Desa Kalumpang
- 2) Desa Banua Padang
- 3) Desa Bungur
- 4) Desa Banua Padang Hilir
- 5) Desa Shabah
- 6) Desa Hangui
- 7) Desa Rantau Bungur
- 8) Desa Purut



- 9) Desa Bungur Baru
- 10) Desa Timbung
- 11) Desa Paring Guling
- 12) Desa Linuh

VII. Kecamatan Piani

- 1) Desa Pipitak Jaya
- 2) Desa Miawa
- 3) Desa Batu Ampar
- 4) Desa Harakit
- 5) Desa Batung
- 6) Desa Balawaian
- 7) Desa Baramban
- 8) Desa Buniin Jaya

VIII. Kecamatan Lokpaikat

- 1) Desa Binderang
- 2) Desa Parandakan
- 3) Desa Lokpaikat
- 4) Desa Bataratat
- 5) Desa Bitahan Baru
- 6) Desa Puncak Harapan
- 7) Desa Budi Mulya
- 8) Desa Ayunan Papan

IX. Kecamatan Tapin Utara

- 1) Desa Keramat
- 2) Desa Antasari
- 3) Desa Jingah Babaris
- 4) Desa Banua Hanyar
- 5) Desa Banua Halat Kiri
- 6) Desa Banua Halat Kanan
- 7) Desa Perintis Raya
- 8) Desa Kakaran
- 9) Desa Antasari Hilir
- 10) Desa Lumbu Raya
- 11) Desa Banua Hanyar Hulu
- 12) Desa Badaun



X. Kecamatan Bakarangan

- 1) Desa Parigi Kacil
- 2) Desa Bakarangan
- 3) Desa Parigi
- 4) Desa Paul
- 5) Desa Gadung
- 6) Desa Bundung
- 7) Desa Tangkawang
- 8) Desa Waringin
- 9) Desa Gadung Kamarat
- 10) Desa Masta
- 11) Desa Ketapang
- 12) Desa Tangkawang Baru

XI. Kecamatan Candi Laras Selatan

- 1) Desa Margasari Hulu
- 2) Desa Candi Laras
- 3) Desa Baringin A
- 4) Desa Marampiaou
- 5) Desa Pabaungan Hilir
- 6) Desa Pabaungan Hulu
- 7) Desa Sungai Rutas
- 8) Desa Baringin B
- 9) Desa Marampiaou Hilir
- 10) Desa Sungai Rutas Hulu
- 11) Desa Baulin
- 12) Desa Pabaungan Pantai

XII. Kecamatan Candi Laras Utara

- 1) Desa Keladan
- 2) Desa Sungai Salai
- 3) Desa Pariok
- 4) Desa Margasari Hilir
- 5) Desa Batalas
- 6) Desa Rawana
- 7) Desa Buas-Buas
- 8) Desa Teluk Haur
- 9) Desa Sungai Puting



- 10) Desa Sawaja
- 11) Desa Sungai Salai Hilir
- 12) Desa Buas-Buas Hilir
- 13) Desa Rawana Hulu

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Susunan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

(1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah;
- 5) Badan Daerah; dan
- 6) Kecamatan.

(2) Susunan Unit Perangkat Daerah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:

- a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
- c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
- b) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;

3. Bagian Hukum, terdiri atas:

- a) Subbagian Perundang-undangan;



- b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
 - 4. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan



- c) Subbagian Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah;
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Sosial
 - e. Dinas Pertanian
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - g. Dinas Lingkungan Hidup
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - l. Dinas Perhubungan
 - m. Dinas Perdagangan
 - n. Dinas Perikanan
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - p. Dinas Ketahanan Pangan
 - q. Dinas Tenaga Kerja
 - r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
 - t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - v. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - w. Dinas Perindustrian
- 5) Badan Daerah; dan
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Pendapatan Daerah



- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6) Kecamatan.
 - a. Kecamatan Tapin Utara
 - b. Kecamatan Tapin Tengah
 - c. Kecamatan Tapin Selatan
 - d. Kecamatan Salam Babaris
 - e. Kecamatan Piani
 - f. Kecamatan Lokpaikat
 - g. Kecamatan Hatungun
 - h. Kecamatan Candi Laras
 - i. Kecamatan Candi Laras Utara
 - j. Kecamatan Binuang
 - k. Kecamatan Bakarangan
 - l. Kecamatan Bungur

Adapun tipe dari Unit Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- d. Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- e. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- m. Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- n. Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;



- q. Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
 - t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
 - v. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
 - w. Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; dan



- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Piani dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Candi Laras Selatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Candi Laras Utara Tipe A;
 - j. Kecamatan Binuang Tipe A;
 - k. Kecamatan Bakarangan Tipe A; dan
 - l. Kecamatan Bungur Tipe A;

(3) Pegawai Pemerintahan

Data Umum Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

1. Jumlah PNS se – Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 sebesar 3.682 orang, yang terdiri dari 1.799 pria dan 2.063 wanita.
2. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :
 - Golongan I : 25 orang
 - Golongan II : 502 orang
 - Golongan III : 2.478 orang
 - Golongan IV : 857 orang
3. Berdasarkan Eselon, terdiri dari :
 - Eselon II : 39 orang
 - Eselon III : 169 orang
 - Eselon IV : 465 orang
 - Eselon V : 10 orang
4. Berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :
 - Sampai dengan Sekolah Dasar (SD) : 27 orang
 - SLTP/ sederajat : 33 orang



- SMA/ sederajat : 652 orang
- Diploma I, II/ Akta I, II : 295 orang
- Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda : 668 orang
- Tingkat Sarjana/ Doktor/ Ph.D : 2.187 orang

5. Jenjang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- Struktural : 683 orang
- Fungsional Tertentu : 2.305 orang
- Fungsional Umum : 874 orang

Tabel 1.10
Rekap Pegawai Per Urusan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.746
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	500
		BLUD RSUD Datu Sanggul	269
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PU & PR	84
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Pertanahan	Disperkimtan	19
5	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Dissatpol PP & Kebakaran	42
		BPBD	16
6	Sosial	Dinas Sosial	19
B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	26
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DP3A	14
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	16
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	30
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dukcapil	19
7	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	DPMD	20
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	DPPKB	20
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	22
10	Komunikasi & Informatika Statistik	Dinas Kominfo	23



	Persandian		
11	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Perindustrian	Dinas Perindustrian	21
12	Penanaman Modal	DPMPTSP	18
13	Kepemudaan & Olah Raga	Dispora	24
16	Kebudayaan Pariwisata	Disbudpar	23
17	Perpustakaan Kearsipan	Disputarda	19
C. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			
1	Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan	34
3	Pertanian	Dinas Pertanian	125
4	Kehutanan	-	-
5	Energi & Sumber Daya Mineral	-	-
6	Perdagangan	Dinas Perdagangan	27
D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			
85		Sekretaris Daerah	1
		Staf Ahli Bupati	3
		Asisten	3
		- Bagian Umum dan Keuangan	5
		- Bagian Organisasi	6
		- Bagian Hukum	8
		- Bagian Kesra	5
		- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	11
		- Bagian Pemerintahan	6
		- Bagian Perekonomian & Administrasi Pembangunan	6
		- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10
		- Bagian Pengadaan Barang & Jasa	17
		Kec. Piani	9
		Kec. Taput	14
		Kec. Lokpaikat	17
		Kec. Bakarangan	13
		Kec. Candi Laras Selatan	14
		Kec. Candi Laras Utara	16
		Kec. Hatungun	13
		Kec. Salam Babaris	13
		Kec. Tapin Tengah	15
		Kec. Tapin Selatan	17
		Kec. Binuang	14



		Kec. Bungur	16
		Sekretariat DPRD	24
		Inspektorat	38
		BKAD	32
		BAPENDA	22
		BKPSDM	28
		Bapelitbang	24
D.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bakesbangpol	18
TOTAL			3.682

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tapin, 2021

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, penerimaan dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Ditengah pandemi Virus Covid-19 yang tengah mewabah sekarang ini, beberapa kebijakan perlu diambil dalam rangka menyesuaikan kondisi dan untuk menstabilkan kembali roda perekonomian masyarakat dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Maka dari itu,

langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapin harus benar-benar berdampak secara langsung sehingga hasil yang dirasakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah berarti kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis :

pertama, penerimaan meliputi semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

kedua, pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan Pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 unaudited, Realisasi Pendapatan Daerah terhadap total Anggaran pada APBD Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebesar 92,27%, sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar 84,74%. Secara rinci Target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah sebagai berikut :

1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 77.102.149.312,00 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 71.897.510.578,00 yang berarti terjadi kenaikan sebesar 5.204.638.734,00 atau 7,24%.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.

Jumlah Pendapatan Transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD 2021 setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 311.728.716.000,00 atau 35,75% yang semula sebesar Rp. 871.916.790.000,00 menjadi Rp. 1.183.645.506.000,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pemerintah Daerah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebesar Rp. 38.860.069.200,00 dan dalam Perubahan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.314.900.000,00 atau 8,53 % sehingga menjadi Rp. 42.174.969.200,00.

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 1.11
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	PENDAPATAN DAERAH	982.674.369.778,00	1.302.922.624.512,00	320.248.254.734,00	32,59
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578,00	77.102.149.312,00	5.204.638.734,00	7,24
1.1.1	Pajak Daerah	17.680.000.000,00	18.030.000.000,00	350.000.000,00	1,98
1.1.2	Retribusi Daerah	3.257.812.120,00	3.257.812.120,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.050.000.000,00	4.701.395.000,00	1.651.395.000,00	54,14
1.1.4	Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah	47.909.698.458,00	51.112.942.192,00	3.203.243.734,00	6,69
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000,00	1.183.645.506.000,00	311.728.716.000,00	35,75
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	787.555.451.000,00	1.044.360.339.000,00	256.804.888.000,00	32,61
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.361.339.000,00	139.285.167.000,00	54.923.828.000,00	65,11
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200,00	42.174.969.200,00	3.314.900.000,00	8,53
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.395.469.200,00	20.845.469.200,00	2.450.000.000,00	13,32
1.3.3	Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.464.600.000,00	21.329.500.000,00	864.900.000,00	4,23

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, Target



Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.302.922.624.512,00 Sedangkan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan akhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.202.146.755.068,83 atau 92,27 % dari target pendapatan.

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	77.102.149.312,00	122.156.982.112,39	45.054.832.800,39	158,44
Pendapatan Transfer	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	(133.415.011.633,00)	88,73
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.174.969.200,00	29.759.278.589,44	(12.415.690.610,56)	70,56
JUMLAH	1.302.922.624.512,00	1.202.146.755.068,83	(100.775.869.443,17)	92,27

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

Untuk lebih jelasnya secara terinci, target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH	1.302.922.624.512,00	1.202.146.755.068,83	92,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.102.149.312,00	122.156.982.112,39	158,44
Pajak Daerah	18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	163,28
Retribusi Daerah	3.257.812.120,00	2.145.200.175,00	65,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.112.942.192,00	85.870.700.172,05	168,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	88,73



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	93,57
Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	52,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.174.969.200,00	29.759.278.589,44	70,56
Pendapatan Hibah	20.845.469.200,00	8.402.387.521,00	40,31
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	21.329.500.000,00	21.356.891.068,44	100,13

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

Namun jika dilihat secara lebih terperinci berdasarkan objek pendapatan, realisasi pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 hanya terjadi pada sektor tertentu. Masih terdapat sektor lainnya dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Jenis Pajak
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	(%)
1	Pajak Hotel	110.000.000,00	90.850.500,00	82,59
2	Pajak Restoran	2.550.000.000,00	2.382.450.493,50	93,43
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	6.216.000,00	31,08
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	602.070.579,07	120,41
5	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.744.049.854,06	108,27
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	44.858.700,00	112,15
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.837.400,00	108,37
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3.500.000.000,00	6.397.749.261,71	182,79



10	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00	1.000.288.796,00	100,03
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.250.000.000,00	9.160.315.178,00	732,82
JUMLAH		18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	163,28

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Jenis Retribusi Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	1.011.650.000,00	660.550.002,00	65,29
2	Retribusi Jasa Usaha	1.791.162.120,00	1.334.878.000,00	74,52
3	Retribusi Perizinan Tertentu	455.000.000,00	149.772.173,00	39,92
JUMLAH		3.257.812.120,00	2.145.200.175,00	65,85

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Pendapatan
Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

NO	PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	TARGET	REALISASI	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	100
JUMLAH		4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	100

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	7.142.000,00	0,00
2	Jasa Giro	6.250.000.000,00	10.951.651.217,89	
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	159.511.943,48	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	104.760.181,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	248.900,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	661.956.099,00	0,00
7	Pendapatan BLUD	38.000.000.000,00	64.508.029.500,13	169,76
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.862.942.192,00	5.889.268.129,00	
9	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	522.749.819,00	0,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	3.065.382.382,55	0,00
	JUMLAH	51.112.942.192,00	85.870.700.172,05	

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

2) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 yaitu Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.777.416.499.244,00.

Sedangkan jumlah Realisasi Belanja Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember



2021 (unaudited) adalah sebesar Rp. 1.506.130.187.552,00 atau sebesar 84,74 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya uraian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	1.777.416.499.244,00	1.506.130.187.552,00	84,74
BELANJA OPERASI	954.383.644.132,00	873.848.686.477,00	91,56
Belanja Pegawai	432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	97,54
Belanja Barang dan Jasa	440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	86,53
Belanja Bunga	5.940.375.000,00	1.948.221.349,00	32,80
Belanja Hibah	69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	91,02
Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	95,65
BELANJA MODAL	629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	70,26
Belanja Modal Tanah	101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	13,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	63,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	81,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	91,04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.456.033.334,00	2.463.242.169,00	45,15
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.182.979.000,00	14.013.105.897,00	81,55
Belanja Tidak Terduga	17.182.979.000,00	14.013.105.897,00	81,55
BELANJA TRANSFER	176.467.756.112,00	176.034.539.570,00	99,75
Belanja Bagi Hasil	2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	95,80
Belanja Bantuan Keuangan	174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	99,80

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

3) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, penerimaan Pembiayaan penerimaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 475.993.874.732,00 Sedangkan jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 (unaudited) adalah sebesar Rp. 436.775.949.644,00 atau sebesar 91,76% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya uraian anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.19
Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	475.993.874.732,00	436.775.949.644,00	91,76
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya	326.836.309.232,00	326.836.309.232,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	148.657.565.500,00	109.921.012.750,00	73,94
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	18.627.662,00	3,73
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : Simda Kabupaten Tapin, 2021

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi target capaian rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan

daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program- program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu strategis permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Isu- isu strategis Kabupaten Tapin yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi masih rendah
Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat ke delapan dengan nilai 4,26 atau bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,01 turun sebesar 0,75
2. Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih rendah
Infrastruktur di Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pada tahun 2019 jalan dalam kondisi mantap sebesar 63,88% dan Jembatan dalam kondisi baik sebesar 55,43%.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan
Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin tahun 2019 berada pada peringkat ke empat dengan nilai 70,13. Harapan lama sekolah Kabupaten Tapin berada pada peringkat 12 dari 13 Kabupaten/Kota dengan nilai 11,86.
4. Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten tapin dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 IKLH sebesar 62,98, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 61,47 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 62,06.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut disusunlah program pembangunan daerah yang merupakan program atau sekumpulan program unggulan dengan melihat pada aspek pencapaian visi dan misi kepala daerah serta hasil perumusan analisis teknokratis.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka stunting.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2021 yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga dengan mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi, sosial secara nasional serta dampak dari pandemi corona virus

disease 2019 (COVID- 19).

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tapin tahun 2021 khususnya tentang pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), serta dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, serta RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024) yang memuat program prioritas pembangunan nasional, maka Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 **yaitu “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN”** dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi (pertanian - pangan, pariwisata, industri dan investasi)
2. Pemulihan kinerja IKM dan UKM
3. Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten

Tapin Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2. Pengembangan wilayah untuk Pemerataan pembangunan
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Revolusi mental
5. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Penguatan kualitas lingkungan hidup untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik
8. Fokus pemulihan kegiatan ekonomi dan penguatan daya beli



masyarakat terdampak Covid-19

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021, maka arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat
	Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah
	Peningkatan penataan destinasi / obyek dan promosi
	Pariwisata untuk pemulihan sektor pariwisata
	Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro untuk pemulihan sektor IKM dan UKM
	Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah untuk pemulihan sektor IKM dan UKM
	Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa
	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan berkelanjutan yang aman untuk pemulihan sektor pertanian – pangan



	<p>Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja</p>
	<p>Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS khususnya akibat pandemi covid19</p>
	<p>Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha untuk pemulihan sektor IKM dan UKM</p>
	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah</p>
Pengembangan wilayah untuk Pemerataan pembangunan	<p>Peningkatan cakupan layanan irigasi untuk pertanian</p>
	<p>Peningkatan cakupan layanan jaringan komunikasi</p>
	<p>Peningkatan perumahan yang layak huni</p>
	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan</p>
Peningkatan kualitas SDM	<p>Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan.</p>
	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan</p>
	<p>Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan</p>
	<p>Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</p>



	<p>Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</p>
	<p>Peningkatan perlindungan perempuan dan anak</p>
Revolusi mental	<p>Peningkatan pembinaan keagamaan</p>
	<p>Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air</p>
Pembangunan Infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	<p>Peningkatan kualitas gedung kantor dan gedung pelayanan publik</p>
	<p>Peningkatan kualitas pelayanan transportasi</p>
	<p>Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik</p>
Penguatan kualitas lingkungan hidup untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim	<p>Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>
	<p>Penerapan instrumen pengendalian RTRW</p>
Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik	<p>Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</p>
	<p>Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik</p>



	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
	Pengembangan kapasitas aparatur
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Fokus pemulihan kegiatan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat terdampak Covid-19	Pemulihan kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat
	Pemberian paket bantuan dan stimulus bagi UMKM terdampak Covid-19
	Pemberdayaan masyarakat dalam program padat karya
	Pelatihan bagi masyarakat yang terkena PHK

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

RKPD Kabupaten Tapin tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan untuk tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

1) Visi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab

permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan misi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.20.
Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019 - 2023

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	Tapin Yang Religius dan Sejahtera Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: "Kabupaten Tapin yang Religius" mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. "Sejahtera" mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyanggah kesejahteraan social. 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 8) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS





VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
<p>Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing</p>	<p>Tapin Yang Religius dan Sejahtera</p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan</p>	<p>9) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.</p> <p>10) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.</p> <p>11) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.</p> <p>12) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>13) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social.</p> <p>14) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.</p> <p>15) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.</p> <p>16) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	<p>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</p>



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	<p>Tapin Yang Religius dan Sejahtera</p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan</p>	<p>17) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.</p> <p>18) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.</p> <p>19) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.</p> <p>20) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>21) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social.</p> <p>22) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.</p> <p>23) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.</p> <p>24) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	<p>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</p>



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
	penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.			

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Dengan penjelasan di atas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

**Tabel 1.21.
Penyusunan Penjelasan Visi**

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 1.22.
Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Sumber : *RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023*

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.23.
Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Sumber : *RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023*

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:



1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
 - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
 - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
 - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
 - e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
 - a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
 - b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
 - c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
 - d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki



batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. **Infrastruktur** meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

b. **Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan** berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
- b. Meningkatnya Sektor Pariwisata
- c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah
- f. Menurunnya Pengangguran



Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
- e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatnya investasi.

Sasaran: Meningkatnya keamanan daerah.

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)

Tujuan 5.1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas ASN
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.



Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel berikut. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Tabel 1.24.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672	0.002677	0.002679	0.002685	0.002691	0.002691
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	1,141,745	1,141,745	1,176,000	1,211,280	1,274,615	1,285,045	1,323,595	1,323,595
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Sasaran 4: Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
Sasaan 1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
Sasaan 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
Sasaan 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
Sasaan 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Sasaran 5: Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85





C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, maka dipilih beberapa program perangkat daerah untuk menjadi program pembangunan daerah.

Penyajian secara sistematis dari misi, tujuan dan sasaran hingga ke program pembangunan daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, ditampilkan pada Tabel. Program yang disajikan merupakan sekumpulan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, program pembangunan daerah juga memuat program dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dimuat program untuk penerapan SPM. Hal ini disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.25.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2023

Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					102,589,329,881		106,843,265,817		124,735,937,639		134,372,840,908		143,448,318,662		616,180,092,907	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	102,589,329,881	69.7	106,843,265,817	70.2	124,735,937,639	70.7	134,372,840,908	71.2	143,448,318,662	71.2	616,180,092,907	
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	30,228,456,500	8.3	31,640,440,253	8.72	36,949,628,011	9.15	39,477,305,991	9.61	42,244,182,891	9.61	180,540,013,646	
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1		12.7		13.34		13.74		14		14		
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672		0.002677		0.002679		0.002685		0.002691		0.002691		
Program:																
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	64	67	74	882,758,500	77	923,100,563	80	1,078,366,078	84	1,151,155,789	88	1,231,161,116	88	5,266,542,046	DI NAS PENDIDIKAN
	Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	0	15	30		45		60		75		90		90		
Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	0,075	0,039	0,034	20,619,402,650	0,029	21,561,709,351	0,024	25,188,388,864	0,019	26,888,605,112	0,014	28,757,363,168	0,014	123,015,469,145	DI NAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	0,023	0,021	0,020		0,015		0,010		0,005		0,002		0,002		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	72	90	82		95		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	78	89	90		91		92		93		94		94		
Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	0,43	0,40	0,38	7,315,40 4,450	0,30	7,649,71 8,433	0,25	8,936,40 1,074	0,20	9,539,60 8,146	0	10,202,6 10,913	0	43,643,7 43,016	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	1,29	1,31	1,12		1,01		0,72		0,33		0		0		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	62	63	70		80		90		95		100		100		
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	72,89	73,07	76,92		84,60		92,31		96,15		100		100		
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	0,0049	0,0050	0,0051	752,533, 900	0,0053	786,924, 699	0,0055	919,285, 434	0,0057	981,337, 200	0,0059	1,049,54 0,136	0,0060	4,489,62 1,369	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)		7,69	19,20		30,70		42,30		57,60		76,90		76,90		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	74	74	79	446,022, 000	84	466,405, 205	89	544,854, 561	94	581,632, 244	100	622,055, 685	100	2,660,96 9,695	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	82,15	82,15	85,70		89,25		92,80		96,35		100		100		
Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	3,98		3,98	95,200,0 00	4,48	119,000, 000	4,97	148,750, 000	5,47	185,937, 500	5,97	232,421, 875	5,97	781,309, 375	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	30	33.33	100	117,135,000	100	133,582,000	50	133,582,000	33.33	149,030,000	25	149,030,000	25	682,359,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	30	33.33	100		100		50		33.33		25		25		
	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	4.17	0	3.84		4.23		4.06		4.39		4.20		4.20		
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	67,875,050,516	71.12	68,997,768,128	71.83	81,560,641,383	72.55	87,411,416,231	73.28	93,879,838,855	73.28	403,915,115,114	
Program:																
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	76,25	82,28	100	762,309,600	100	820,220,000	100	861,234,000	100	733,267,000	100	931,746,000	100	4,108,776,600	DINAS KESEHATAN
Program Bebas Berobat	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	79,54	95,89	100	13,069,000,000	100	18,069,000,000	100	23,069,000,000	100	23,412,500,000	100	23,412,500,000	100	101,032,000,000	DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	58,13	89,72	100	40,798,000	82	716,080,000	86	733,580,000	90	751,080,000	92	766,580,000	92	3,008,118,000	DINAS KESEHATAN
Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	31,17	86,12	100	148,300,000	54	557,750,000	63	562,750,000	72	567,750,000	81	562,750,000	81	2,399,300,000	DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	78,04	92,14	43.00	335,185,000	47.00	624,885,000	50.00	641,725,000	55.00	659,405,000	60.00	667,925,000	60.00	2,929,125,000	DINAS KESEHATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	81,09	84,88	92,5	889,969,000	100	954,467,450	100	1,002,190,823	100	1,052,300,366	100	1,104,915,383	100	5,003,843,022	DINAS KESEHATAN
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	47,34	92,61	100	17,195,778,734	100	11,039,498,153	100	12,479,355,857	100	15,085,649,156	100	18,036,456,732	100	73,836,738,632	DINAS KESEHATAN
Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	2	2,05	2,11	1,159,250,000	2,1	1,326,598,750	2,09	1,424,269,938	2,08	1,535,753,434	2,07	1,679,099,356	2,07	7,124,971,478	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase penyediaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan (%)	71,43	71,43	77,14	723,600,000									85	4,914,000,000	RSUD DATU SANGGUL
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar (%)	39,54	50	59,55	4,517,987,776	68,64	4,724,310,305	77,27	5,518,759,327	86,82	5,891,431,700	92,72	6,300,614,945	92,72	26,953,104,052	RSUD DATU SANGGUL
Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat (nilai)	A	A	A	29,032,872,406	A	30,164,958,471	A	35,267,776,438	A	37,722,279,575	A	40,417,251,440	A	172,605,138,329	RSUD DATU SANGGUL
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	11.417.450	11.417.450	11.760.000	502.064.241	12.112.800	524.991.962	12.746.150	613.275.611	12.850.450	654.689.063	13.235.950	700.159.809	13.235.950	2.995.180,686	
Program:																
Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	- Persentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	80	80	85	502,064,241	90	524,991,962	95	613,275,611	100	654,689,063	100	700,159,809	100	2,995,180,686	Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	3,193,42 5,425	80	4,367,68 9,759	85	4,283,77 9,353	80	5,347,95 5,016	86,67	4,902,01 5,045	86,67	22,094,8 64,598	
Program:																
Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman Dan Taqwa	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	40,38	53,84	65	3,014,69 0,425	68	4,104,55 4,759	71	3,970,50 4,353	74	4,987,19 5,016	77	4,533,01 5,045	77	20,609,9 59,598	Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	40	50	80	51,350,0 00	80	99,400,0 00	80	115,350, 000	80	129,450, 000	80	132,500, 000	80	528,050, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani (%)	80	80	80	65,735,0 00	80	86,585,0 00	80	93,725,0 00	80	122,310, 000	80	124,000, 000	80	492,355, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata (%)	100	100	80	61,650,0 00	85	77,150,0 00	85	104,200, 000	90	109,000, 000	90	112,500, 000	90	464,500, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83,87	83,87	84,54	790,333, 200	84,73	1,312,37 5,715	84,92	1,328,61 3,282	85,11	1,481,47 4,606	85,3	1,722,12 2,061	85,3	6,634,91 8,864	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72,99	72,99	73,17		73,25		73,32		73,39		73,47		73,47		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	120,120,000	90	236,920,605	90	260,612,665	90	286,673,931	90	315,341,323	90	1,219,668,524	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	51,710,100	90	179,295,605	90	192,225,165	90	231,447,681	90	247,092,448	90	901,770,999	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Kualitas Hidup Perempuan	- Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	2	0.01	2,1	454,228,100	2,2	476,939,505	2,3	524,633,452	2,4	577,096,794	2,5	634,806,470	2,5	2,667,704,321	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	- Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah (%)	51.6	52	53		54		55		56		57		57	-	
	- Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	13	15	17		18		19		20		22		22	-	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8.33	8.33	8.3	164,275,000	8.3	419,220,000	8.3	351,142,000	8.3	386,256,200	8.3	524,881,820	8.3	1,845,775,020	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	1.69	1.69	1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	8	8	8.33		7.69		7.69		7.69		7.69		7.69	-	
	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	75	75	75		50		50		50		50		50	-	
	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	75	75	38.46		38.46		46.15		53.84		61.53		61.53	-	
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa					52,303,139,441		50,309,619,240		54,451,738,567		56,743,949,202		58,458,505,772		272,266,952,222	
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	52,303,139,441	5	50,309,619,240	5.2	54,451,738,567	5.4	56,743,949,202	5.6	58,458,505,772	5.6	272,266,952,222	
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3		0.3		0.29		0.29		0.28		0.28		
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31		0.3		0.29		0.28		0.27		0.27		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5895173	6072028	6254189		644181		66350		683412		7039144.9		7039144.9		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7433273	76562712	7885959326		8122538.105		8366214.2		8617200.7		8875716.7		8875716.7		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	19,975,933,231	23.15	20,529,170,010	23.53	22,498,674,793	23.91	23,398,136,830	24.3	24,353,520,677	24	110,755,435,541	
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5		2.6		2.7		2.8		2.9		3		
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4		1.5		1.6		1.7		1.8		2		
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2		7.4		7.6		7.8		8		8		
Program:																
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	48.25	48.50	49.23	5,974,014,614	49.97	6,018,494,849	50.72	6,189,766,883	51.48	6,270,109,805	52.25	6,358,323,957	52.25	30,810,710,108	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	46.75	47.33	48.04	-	48.76	-	49.49	-	50.23	-	50.99	-	50.99	-	
	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	8.76	9.05	9.19	-	9.32	-	9.46	-	9.61	-	9.75	-	9.75	-	
	- Luas Panen Padi (Ha)	75,302	78,966.39	79,899.98		80,844.61		81,800.41		82,767.51		83,746.04		48802.496		
	- Luas Panen Jagung (Ha)	1,038	1,691.11	1,749.42		1,809.74		1,872.15		1,936.71		2,003.49		11062.61		
	- Luas Panen Kedelai (Ha)	77	104.97	108.59		112.34		116.21		120.22		124.36		686.69		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik (%)	2.50	3.35	5.00	4,068,534,611	10.00	4,071,664,374	15.00	4,083,715,592	20.00	4,089,368,763	25.00	4,095,575,777	25.00	20,408,859,116	DINAS PERTANIAN
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	111	111.55	112.10	1,020,42 2,489	112.66	1,067,02 2,028	113.21	1,246,45 4,486	113.77	1,330,62 5,424	114.34	1,423,04 2,625	677.64	6,087,56 7,051	DINAS PERTANIAN
	- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	111	149.13	151.29		153.48		155.71		157.97		160.25		927.84		
	- Luas Panen Jeruk (Ha)	464	464.18	468.83		473.51		478.25		483.03		487.86		2855.6 7		
	Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	7.97	8,55	8.64		8.72		8.81		8.90		8.99		8.99		
	Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	6.96	6,67	6.87		7.08		7.29		7.51		7.73		7.73		
	Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	0.89	1.99	0.91		0.94		0.97		1.00		1.03		1.03		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	2.50	5.00	7.50	265,819, 995	10.00	277,959, 172	12.50	324,701, 316	15.00	346,627, 840	17.50	370,702, 515	17.50	1,585,81 0,838	DINAS PERTANIAN
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	621.18	603.09	613.88	936,073, 914	632.30	978,821, 514	651.27	1,143,42 2,005	670.80	1,220,63 5,336	690.93	1,305,41 3,290	690.93	5,584,36 6,059	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	1,878.70	1,789.24	3,239.35	-	3,336.5 3	-	3,436. 63	-	3,539.7 3	-	3,645. 92	-	3645.9 2	-	
	- Luas Tanaman Karet (Ha)	399.27	13,309.0 0	14,118.2 1		14,541. 76		14,978 .01		15,427. 35		15,890 .17		15890. 17		
	- Luas Tanaman Sawit (Ha)	2248.05	44,961.0 0	3,239.35		3,336.5 3		3,436. 63		3,539.7 3		3,645. 92		3645.9 2		
	- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	5.00	5.00	4.50		4.00		3.50		3.00		2.50		2.50		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	9.38	12.50	15.63	62,041,181	18.17	64,874,410	21.88	75,783,815	25.00	80,901,366	28.18	86,520,286	28.18	370,121,057	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	- Populasi sapi (ekor)	6751	6,900	7,015	4,184,419,866	7,132	4,375,509,379	7,251	5,111,303,374	7,372	5,456,460,943	7,495	5,835,433,748	7495	24,963,127,309	DINAS PERTANIAN
	- Populasi kambing (ekor)	4526	4,585	4,650		4,716		4,783		4,851		4,920		4920		
	- Populasi unggas (ekor)	2281314	2,301,089	2,315,533		2,330,206		2,346,072		2,364,135		2,364,135		2364135		
	- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	3.8	3.80	3.84		3.89		3.94		4.00		4.05		4.05		
	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	2.00	2.00	2.00	198,881,268	2.00	207,963,560	2.00	242,935,109	2.00	259,340,101	2.00	277,352,297	2.00	1,186,472,335	DINAS PERTANIAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	100.09	100	100	2,031,303,280	100	2,124,066,619	100	2,481,253,708	100	2,648,808,525	100	2,832,778,759	100	12,118,210,890	DINAS PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	98.29	100	100	618,529,189	100	646,775,504	100	755,538,506	100	806,558,728	100	862,577,423	100	3,689,979,350	DINAS PERIKANAN
Program Pembinaan, Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.2	0.25	0.30	615,892,825	0.33	696,018,600	0.37	843,800,000	0.38	888,700,000	0.41	905,800,000	0.41	3,950,211,425	DINAS PERINDUSTRIAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.15	0.20	0,23		0,25		0,26		0,27		0,29		0,29		
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	2,019,81 9,982	3.2	2,112,05 7,914	3.5	2,467.22 6,766	3.7	2,633,83 4,367	4	2,816,76 4,586	4	12,049,7 03,615	
Program:																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	68.18	70	70	1,003,21 1,982	73	1,078,21 2,914	75	1,305,25 7,166	78	1,366,00 1,047	80	1,513,13 3,266	80	6,265,81 6,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	15	20	20	175,400, 000	25	281,340, 000	35	295,150, 000	40	336,180, 000	55	336,180, 000	55	1,424,25 0,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	20	25	30	822,208, 000	33	677,555, 000	35	791,819, 600	40	835,653, 320	50	858,251, 320	50	3,985,48 7,240	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	15	25	30	19,000,0 00	35	74,950,0 00	40	75,000,0 00	45	96,000,0 00	50	109,200, 000	50	374,150, 000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	100,187, 363	1.4	123,782, 648	1.4	133,257, 711	1.6	137,982, 996	1.7	143,146, 892	1.7	638,357, 610	
Program:																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	82.39	83	86.96	51,137,3 63	87	53,472,6 48	87	62,464,7 11	88	66,682,8 46	88	71,314,2 34	87.84	305,071, 802	DINAS PERINDUSTRIAN
	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	21	17	14.80	9,200,00	26	9,660,00	34	10,143,00	41	10,650,150	47	11,182,658	46.51	50,835,808	DINAS PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	4.49	4.50	14.02	39,850,000	15	60,650,000	16	60,650,000	17	60,650,000	18	60,650,000	17.88	282,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	22,048,450,839	0.57	22,293,568,041	0.58	23,925,539,263	0.59	24,706,497,127	0.6	25,179,980,156	0.6	118,154,035,427	
Program:																
Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten (%)	56	68	74	190,821,958	76	199,536,206	79	233,090,595	81	248,830,804	84	266,113,088	84	1,138,392,651	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase BUMDES yang aktif (%)	30	35	78		80		81		83		85		85		
	- Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)	0.80	0.90	1.00		1.70		1.85		2.00		2.10		2.10		
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar (%)	30	35	40	980,357,130	43	1,025,127,008	47	1,197,514,319	67	1,278,380,412	70	1,367,168,990	70	5,848,547,859	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	78	83	85	963,810,586	89	1,007,824,835	91	1,177,302,579	93	1,256,803,808	94	1,344,093,806	94	5,749,835,614	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase PKK aktif (%)	88	89	91		92		94		95		97		97		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase posyandu aktif (%)	78	80	82		84		87		88		90		90		
Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja (%)	15	20	30	2,016,17 0,000	35	2,031,47 8,500	40	2,778,56 6,718	45	3,144,43 0,046	50	3,162,15 1,549	50	13,132,7 96,813	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,65	55,00	58,00	17,897,2 91,165	62,00	18,029,6 01,492	67,00	18,539,0 65,052	70,00	18,778,0 52,058	75,00	19,040,4 52,724	75	92,284,4 62,491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	512,422, 400	86	538,043, 520	87	564,945, 696	88	593,192, 981	90	622,852, 630	90	2,831,45 7,227	
Program:																
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	15,286,0 00 (Kg/kapita/tahun)	12000 (Kg/kapita/tahun)	14,368,8 40 (Kg/kapita/tahun)	212,639, 000	14,656, 216 (Kg/kapita/tahun)	223,270, 950.00	14,949, 341 (Kg/kapita/tahun)	234,434, 498	15,248, 327 (Kg/kapita/tahun)	246,156, 222	15,553, 294 (Kg/kapita/tahun)	258,464, 033	15,553, 294 (Kg/kapita/tahun)	1,174,96 4,703	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	100	80	100	299,783, 400	100	314,772, 570.00	100	330,511, 199	100	347,036, 758	100	364,388, 596	100	1,656,49 2,523	DINAS KETAHANAN PANGAN
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	7,212,86 7,993	3.65	4,260,37 0,770	3.55	4,388,14 4,309	3.45	4,782,65 2,293	3.35	4,830,20 5,728	3.35	25,474,2 41,092	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42		0.43		0.44		0.45		0.46		0.46		
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07		0.06		0.05		0.04		0.03		0.03		
Program:																



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	54.2	55	55	398,604,300	55.05	512,761,795	55.1	538,399,885	55.12	565,319,879	55.14	593,585,873	55.16	2,608,671,732	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	1.4	2.26	23.00	4,024,579,700	2.27	398,000,000	2.28	417,900,000	2.29	438,795,000	2.3	460,734,750	2.3	5,740,009,450	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	23.3	35	35	559,698,100	35.05	619,295,600	35.10	625,260,380	35.12	631,523,399	35.14	638,099,569	35.14	3,073,877,048	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	2.9	3	3	471,125,000	3.02	486,424,000	3.04	490,745,200	3.06	495,282,460	3.08	500,046,583	3.08	2,443,623,243	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	55.1	56.1	56.1	682,968,000	56.15	1,126,492,500	56.16	1,182,817,125	56.17	1,241,957,981	56.18	1,304,055,880	56.18	5,538,291,487	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	222,612,000	100	223,742,600	100	224,929,730	100	226,176,217	100	227,485,027	100	1,124,945,574	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	-	-	10	291,975,500	10.05	306,574,275	10.10	321,902,989	10.12	337,998,138	10.14	354,898,045	10.14	1,613,348,947	DINAS SOSIAL
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	433,457,633	3.8	452,626,337	3.6	473,950,030	3.4	491,652,608	3.2	512,035,103	3.2	2,363,721,711	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	18.74	50	50	137,482,500	50	137,482,500	50	137,482,500	60	137,482,500	50	137,482,500	50	687,412,500	DINAS TENAGA KERJA
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)			60		60		60		60		60		60		
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)			45		45		45		45		45		45		
	- Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)		4,03	10		10		10		10		10		10		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	60,75	66,93	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000		63,050,000	75	63,050,000	75	315,250,000	DINAS TENAGA KERJA
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	12,600,000	70	15,000,000	75	17,000,000	80	20,000,000	85	25,000,000	100	89,600,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	- Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	16,500,000	100	16,500,000	100	22,000,000	100	25,000,000	100	27,000,000	100	107,000,000	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	15,000,000	43	25,000,000	45	25,550,000	48	25,550,000	50	26,550,000	50	117,650,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Desa																
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	13,095,725	100	13,693,767	100	15,996,537	100	17,076,755	100	18,262,804	100	78,125,587	KECAMATAN SALAM BABARIS
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	21,000,000	43	21,840,000	45	21,840,000	48	23,150,400	50	24,539,424	50	112,369,824	KECAMATAN PIANI
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	16,700,000	70	17,327,920	75	17,452,681	80	18,555,690	85	19,759,955	85	89,796,246	KECAMATAN LOKPAIKAT
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	13,000,000	70	13,000,000	75	16,000,000	80	17,000,000	85	17,000,000	85	76,000,000	KECAMATAN HATUNGUN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	16,240,000	76	16,240,000	77	16,240,000	78	17,052,000	80	17,904,600	80	83,676,600	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	17,425,000	70	17,875,000	75	17,875,000	80	18,875,000	85	20,875,000	85	92,925,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	33,804,407	76	35,348,150	77	41,292,362	78	44,080,765	80	47,142,348	80	201,668,033	KECAMATAN BINUANG
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	29,180,000	100	30,639,000	100	32,170,950	100	33,779,498	100	35,468,472	100	161,237,920	KECAMATAN BAKARANGAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	18,380,000	100	19,630,000	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,000,000	100	101,010,000	KECAMATAN BUNGUR
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan					314,412,353,788		345,364,181,250		319,903,378,569		343,370,381,568		354,821,705,897		1,677,872,001,071		
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	304,565,776,123	52.33	335,067,799,311	55.33	307,975,152,916	60.67	330,416,837,372	64.33	341,121,516,227	67.67	1,619,147,081,950		
Sasaan 1: Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	196,286,541,018	63	213,757,506,762	55.333	195,132,338,809	70	212,133,978,072	75	216,868,266,095	75	1,034,178,630,756		
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52		55	55.333	333		60		65		65			
Program:																	
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	44,69	45,55	48	133,491,541,018	50	139,898,256,762	52	119,784,701,309	55	129,155,744,947	57	125,182,003,001	57	647,512,247,037	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	9.62	9,25	12		13		14		15		18		18			
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	47.00	49	52		55		58		60		65		65			
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	4,5	10	12	51,965,000,000	15	61,946,250,000	20	62,243,337,500	21	68,563,503,125	25	75,830,060,094	25	320,548,150,719	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	0	3	10		12		15		20		22		22			
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	10	5	8	10,830,000,000	15	11,913,000,000	20	13,104,300,000	25	14,414,730,000	30	15,856,203,000	35	66,118,233,000		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaan 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	10,734,0 22,502	58	11,132,8 78,298	60	12,668,6 80,514	62	13,389,1 18,251	64	14,180, 1 37,582	64	62,104,8 37,146	
Program:																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	51.36	60.00	70.00	10,734,0 22,502	75.00	11,132,8 78,298	80.00	12,668,6 80,514	85.00	13,389,1 18,251	90.00	14,180, 1 37,582	90	62,104,8 37,146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)															
Sasaan 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	85,007,7 53,201	69	97,063,1 18,091	71	84,977,3 41,703	73	88,689,8 67,500	75	92,766, 1 11,045	75	448,504, 191,539	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan irigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang	45.17	50	55	85,007,7 53,201	57	97,063,1 18,091	60	84,977,3 41,703	65	88,689,8 67,500	70	92,766, 1 11,045	70	448,504, 191,539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	35.15	40	45		48		50		52		55		55		
Sasaan 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	12,424,7 40,327	44	12,996,4 29,553	48	15,059,1 04,610	60	16,056,8 88,483	64	17,149, 8 07,745	64	73,686,9 70,718	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	95	95	96	243,555,433	96	254,677,857	96	297,504,970	96	317,594,972	96	339,653,200	96	1,452,986,432	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	70	75	80	990,000,000	85	1,039,500,000	90	1,091,475,000	95	1,146,048,750	100	1,203,351,188	100	5,470,374,938	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	40.00	45.00	50.00	11,191,184,894	55.00	11,702,251,697	60.00	13,670,124,639	65.00	14,593,244,761	70.00	15,606,803,358	70	66,763,609,349	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaan 5: Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	112,719,075	92	117,866,607	94	137,687,280	96	146,985,067	98	157,193,761	98	672,451,790	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki izin	55.09	57.33	57.33	112,719,075	59.67	117,866,607	0.62	137,687,280	0.6467	146,985,067	0.6467	157,193,761	1	672,451,790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	9,846,577,664	0.11	10,296,381,939	2.69	11,928,225,653	0.01	12,953,544,196	0.32	13,700,189,669	0.32	58,724,919,121	
Sasaran 1: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53,329	9,285,272,271	53	9,709,301,939	55	11,342,036,653	55	12,107,944,977	55	12,948,889,669	55	55,393,445,509	
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48		57		63		69		75		75		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program:																	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Status Mutu Air (status)	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	3,150,24 7,189	Cemar Sedang	3,294,10 9,235	Cemar Sedang	3,848,0 5 2,921	Cemar Sedang	4,107,90 5,349	Cemar Sedang	4,393,2 1 5,631	Cemar Sedang	18,793,5 30,324	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80	80	80		80		80		80		80		80			
	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	0	60	60		60		60		60		60		60			
Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	0	0	20	4,195,34 4,428	40	4,386,93 2,833	60	5,124,6 4 7,817	80	5,470,70 6,514	100	5,850,6 6 8,730	100	25,028,3 00,322	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	25	25	25	150,454, 686	50	157,325, 487	75	183,78 1, 640	100	196,192, 100	100	209,818 , 417	100	897,572, 330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0	0	12.50	868,416, 237	25	908,074, 121	37.50	1,060,7 7 7,596	50&	1,132.41 0,091	62.50	1,211,0 6 0,453	62.50	5,180,73 8,498	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Program Penaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29	20	24	327,830, 169	28	342,801, 159	32	400,44 7, 255	36	427,488, 773	40	457,179 , 560	40	1,955,74 6,917	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19.35	36	24		28		32		36		40		40		
	- Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	30	20	40	360,613,186	50	377,081,275	55	440,491,981	60	470,237,651	65	502,897,516	65	2,151,321,609	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	7,69	23,08	38,46	39,073,743	53,86	40,858,120	69,22	47,728,900	84,60	50,951,951	100	54,490,765	100	233,103,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	5,24	12,8	30,24	19,717,917	47,68	20,618,374	65,12	24,085,599	82,56	25,712,058	100	27,497,862	100	117,631,809	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	62,73	88,53	90	173,574,714	90	181,501,335	90	212,022,945	90	226,340,491	90	242,060,734	90	1,035,500,219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	98	561,305,393	98	587,080,000	98	586,189,000	98	845,599,219	98	751,300,000	98	3,331,473,612	
Program:																
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat					2,479,954,429		2,593,206,278		3,029,284,786		3,233,847,204		3,458,450,689		14,794,743,386	
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	2,479,954,429	5.2	2,593,206,278	5.5	3,029,284,786	5.7	3,233,847,204	6	3,458,450,689	6	14,794,743,386	
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	2,479,954,429	0.5	2,593,206,278	0.51	3,029,284,786	0.52	3,233,847,204	0.53	3,458,450,689	0.53	14,794,743,386	
Program:																
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	0	0	100	351,707,277	100	367,768,661	100	429,613,340	100	458,624,393	100	490,477,672	100	2,098,191,344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	0	0	100	10,500,925	100	10,980,470	100	12,826,967	100	13,693,150	100	14,644,193	100	62,645,706	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	0	0	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan penanaman modal (%)	-90	57.7	5	73,677,921	5	77,042,564	5	89,998,188	5	96,075,612	5	102,748,443	5	439,542,727	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase dokumen RUPM yang tersedia			-		50		-		50		-		100		
	Persentase rekomendasi PM (investor baru)			100		100		100		100		100		100		
Program peningkatan keamanan, ketertarikan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	99.41	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	50	50	50	112,509,914	60	117,647,894	70	137,431,788	80	146,712,321	80	156,902,073	80	671,203,990	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80	80	80	365,227,941	80	381,906,771	80	446,128,941	80	476,255,265	80	509,333,078	80	2,178,851,996	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	99.77	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).					18,807,939,826		20,103,504,299		22,734,639,464		24,192,809,279		25,713,626,421		111,552,519,281	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	-	-	C	18,807,939,826	CC	20,103,504,299	CC	22,734,639,464	B	24,192,809,279	BB	25,713,626,421	BB	111,552,519,281	
Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	12,879,546,819	B	13,932,592,470	B	15,819,185,563	BB	16,816,349,607	BB	17,901,480,062	BB	77,349,154,521	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program:																
Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	116,301,391	100	121,612,516	100	142,063,108	100	151,656,387	100	162,189,523	100	693,822,925	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,166,654	100	2,801,515,909	100	3,272,624,163	100	3,493,618,872	100	3,736,264,527	100	15,983,190,125	INSPEKTORAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	70.22	60.92	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951,682	80	808,249,995	85	944,166,854	90	1,007,924,826	95	1,077,929,194	95	4,611,222,552	INSPEKTORAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100		
Program Penatausahaan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	556,800,000	100	864,640,000	100	907,872,000	100	953,265,600	100	1,000,928,880	100	4,283,506,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Penyusunan Anggaran	Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	1,146,500,000	100	1,203,825,000	100	1,264,016,250	100	1,327,217,063	100	1,393,577,916	100	6,335,136,228	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	97,57	97,57	100	1,287,46 7,600	100	1,522,64 0,480	100	1,598,77 2,504	100	1,678,7 1 1,129	100	1,762,6 4 6,686	100	7,850,23 8,399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	11,58	11,58	100		100		100		100		100		100		
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perbendaharaan	Persentase complain terhadap penerbitan SP2D (%)	0	0	0	257,970, 000	0	270,868, 500	0	284,411, 925	0	298,63 2, 521	0	313,56 4, 147	0	1,425,44 7,094	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	2,406,74 1,792	100	2,516,65 0,246	100	2,939,85 4,946	100	3,138,3 7 8,319	100	3,356,3 5 1,113	100	14,357,9 76,416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	- Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:															
	a. sasaran	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	b. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah															
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	99,094,446	100	103,619,783	100	121,044,683	100	129,218,624	100	138,193,368	100	591,170,905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)																
	a. kinerja	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	104,434,917	100	109,204,137	100	127,568,112	100	136,182,569	100	145,640,987	100	623,030,721		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)																
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100			
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100			
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)																



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)																
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100			
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,16 6,654	100	2,801,51 5,909	100	3,272,6 2 4,163	100	3,493,6 1 8,872	100	3,736,2 6 4,527	100	15,983,1 90,125		INSPEKTO RAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		INSPEKTO RAT
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		INSPEKTO RAT
Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951, 682	80	808,249, 995	85	944,16 6, 854	90	1,007,9 2 4,826	95	1,077,9 2 9,194	95	4,611,22 2,552		INSPEKTO RAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100			
	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100			



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	-	-	99	916,038,319	99	957,870,956	99	1,118,948,362	99	1,194,509,029	99	1,277,472,408	99	5,464,839,075	
Program:																
Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment (%)	98	99	99	310,024,347	99	324,182,200	99	378,697,297	99	404,270,077	99	432,348,234	99	1,849,522,156	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	90.01	99	70	606,013,972	75	633,688,756	80	740,251,065	85	790,238,952	90	845,124,175	90	3,615,316,920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	5,012,354,687	79	5,213,040,872	81	5,796,505,540	83	6,181,950,642	85	6,534,673,951	85	28,738,525,685	
Program:																
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	0	0	100	618,873,105	100	647,135,126	100	755,958,602	100	807,007,192	100	863,057,035	100	3,692,031,061	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perizinan yang diterbitkan	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	87.34	87	88	838,845,803	89	877,153,297	89	1,024,657,066	89	1,093,850,404	89	1,169,822,644	89	5,004,329,214	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	87.34	87	88	223,037,194	89	233,222,612	89	272,441,771	89	290,839,298	89	311,039,238	89	1,330,580,113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara (poin)	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah (poin)	85	85	86.40	183,429,651	86.50	195,094,333	86.6	181,009,425	86.80	188,078,887	86.80	198,212,534	86.80	945,824,831	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)														-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan (poin)	77.17	85	86.40	386,770,199	86.50	395,122,473	86.60	401,088,793	86.70	425,044,055	86.80	446,773,898	87	2,054,799,418	KECAMATAN TAPIN SELATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Salam Babaris (poin)	78	85	78.25	146,690,640	78.50	153,389,548	79.11	179,183,827	79.56	191,283,804	80.00	204,569,221	80.00	875,117,041	KECAMATAN SALAM BABARIS
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani (poin)	87.32	85	86.50	183,584,995	86.60	190,928,395	86.70	193,416,790	86.80	207,400,677	87	223,033,765	87	998,364,622	KECAMATAN PIANI
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat (poin)	86.31	85	86.4	304,120,600	86.5	315,555,535	86.6	317,827,534	86.7	337,914,235	86.8	359,844,868	86.8	1,635,262,772	KECAMATAN LOKPAIKAT
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun (poin)	86.23	85	86	154,650,000	87	157,650,000	87	167,369,156	87	178,031,601	87	193,571,400	87	851,272,157	KECAMATAN HATUNGUN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan (poin)	80	85	85	196,650,000	86	196,650,000	87	196,650,000	88	206,482,500	89	236,806,625	89	1,033,239,125	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara (poin)	86,3	86,3	86.4	171,179,900	86.5	172,449,804	86.6	174,363,866	86.7	178,409,226	86.8	193,152,554	86.8	889,555,350	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang (poin)	78.11	85	85	312,973,202	86	336,399,102	87	426,600,997	88	468,914,290	89	415,373,034	89	1,960,260,625	KECAMATAN BINUANG
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	82	85	86,4	189,228,500	85	198,689,925	85	208,624,421	85	219,055,642	85	230,008,424	86,8	1,045,606,913	KECAMATAN BAKARA NGAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	76	76	86	221,224,684	86.5	222,267,570	87	221,047,000	87.5	240,694,119	88	260,665,241	88	1,165,898,614	KECAMATAN BUNGUR
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	-	-	100	16,158,567	100	16,896,478	100	19,737,823	100	21,070,684	100	22,534,126	100	96,397,678	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	80	80	100	864,937,645	100	904,436,672	100	1,056,528,466	100	1,127,874,026	100	1,206,209,340	100	5,159,986,150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (%)	80	80	80	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	80	80	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	JUMLAH				490,592,717,365		525,213,776,884		524,854,979,026		561,913,828,160		585,900,607,440		2,692,666,308,867	

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023





D. Kegiatan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah disusun berdasarkan tingkat kebutuhan yang penting dan tingkat keterkaitan dengan pencapaian RPJMD, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk memecahkan permasalahan/isu-isu strategis.

Adapun rencana program masing-masing Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	1	Dinas Pendidikan					31.294.797.163	0	0		71.625.000		
1	1	Pendidikan											
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.403.016.963	0	0	100	-	
1	1	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik		TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	139.280.000	0	0	-	
1	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	33.555.000	0	0	12 bulan	-
1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	181.782.500	0	0	12 Bulan	-
1	1	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggantian		TAPIN	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		TAPIN	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	1 Tahun	11.500.000	0	0	1 Tahun	-
1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	Waktu penyediaan makan dan minum harian dan rapat	12 Bulan	164.850.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat dinas pendidikan serta Konsultasi dan Monitoring	12 Bulan	822.049.463	0	0	12 Bulan	-
1	1	1	19	Tapin Expo		TAPIN	Waktu pelaksanaan tapin expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	-
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	197.400.000	0	0	100	-	
1	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	70.000.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	2	30	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor Disdikab. / Upt Disdik Kec.		TAPIN	Jumlah ruang kantor yang dipelihara	1 Unit	50.000.000	0	0	1 Unit	-
1	1	2	31	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan Disdik		TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan disdik	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	2	47	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	47.400.000	0	0	12 bulan	-
1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	15.675.000	0	0	100	-	
1	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		TAPIN	Jumlah Laporan Kinerja dan dokumen Perencanaan	13 Laporan	7.500.000	0	0	13 Laporan	-
1	1	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun		TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan laporan akhir tahun	2 Laporan	7.500.000	0	0	2 Laporan	-
1	1	6	6	Workshop Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah		TAPIN	waktu Workshop Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	675.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	1	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	80%	679.956.100	0	0	84	-
1	1	1	5	67 Pembinaan PAUDNI		TAPIN	Waktu Pembinaan PAUDNI	12 bulan	40.000.000	0	0	12 bulan	-
1	1	1	5	69 Hari Anak Nasional		TAPIN	waktu Hari Anak Nasional	12 bulan	76.150.000	0	0	12 bulan	-
1	1	1	5	71 Lomba Gugus TK/PAUD		TAPIN	waktu Lomba Gugus TK/PAUD	12 bulan	304.500	0	0	12 bulan	-
1	1	1	5	77 Pembinaan kampung PAUD		TAPIN	waktu Pembinaan kampung PAUD	12 bulan	606.000	0	0	12 bulan	-





Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022				
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	1	1	5	85	Pembangunan Infrastruktur PAUD		TAPIN	waktu Pembangunan Infrastruktur PAUD	12 bulan	240.000	0	0	12 bulan	-
1	1	1	5	87	HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Tingkat Provinsi diKabupaten Tapin		TAPIN	waktu HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Tapin	12 bulan	306.000	0	0	12 bulan	-
1	1	15	88	Manajemen Pengelolaan dan PengawasanPenyaluran DAK BOP PAUD Non Fisik		TAPIN	waktu Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD Non Fisik	12 bulan	66.400.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	15	89	Manajemen Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal		TAPIN	waktu Manajemen Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal	12 bulan	675.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	15	90	Peningkatan prasarana pendidikan informal		TAPIN	waktu Peningkatan prasarana pendidikan informal	12 bulan	469.304.600	0	0	12 bulan	-	
1	1	15	91	Alat Permainan Edukatif (APE) Luar		TAPIN	waktu Alat Permainan Edukatif (APE) Luar	12 bulan	390.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	15	93	Peningkatan Mutu Satuan PAUD		TAPIN	waktu Peningkatan Mutu Satuan PAUD	12 bulan	25.580.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan			Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	0,55%	137.724.000	0	0	0,57	-
1	1	18	14	Penyelenggaraan Paket C Lanjutan		TAPIN	Jumlah Kelompok Belajar Paket C	7 Kelompok Belajar	306.000	0	0	7 Kelompok Belajar	-	
1	1	18	15	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C		TAPIN	Jumlah Lembaga yang mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	12 Lembaga	30.200.000	0	0	12 Lembaga	-	
1	1	18	16	Penyelenggaraan Paket A		TAPIN	Jumlah Kelompok Belajar Paket A	3 Kelompok Belajar	306.000	0	0	3 Kelompok Belajar	-	
1	1	18	17	Penyelenggaraan Paket B		TAPIN	Jumlah Kelompok Belajar Paket B	6 Kelompok Belajar	306.000	0	0	6 Kelompok Belajar	-	
1	1	18	18	BOP PKBM		TAPIN	Jumlah PKBM yang melaksanakan Proses Belajar Mengajar	11 Lembaga	360.000	0	0	11 Lembaga	-	
1	1	18	19	Aprisiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi		TAPIN	Jumlah Cabang Lomba yang diikuti GTK PAUD Dikmas	8 Cabang	22.000.000	0	0	8 Cabang	-	
1	1	18	20	Hari Aksara Internasional (HAI)		TAPIN	Jumlah Lembaga yang ikut serta dalam pelaksanaan HAI	10 Lembaga	50.000.000	0	0	10 Lembaga	-	
1	1	18	23	Try Out UNBK Nonformal		TAPIN	waktu Try Out UNBK Nonformal	12 bulan	306.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	18	26	Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		TAPIN	waktu Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	12 bulan	360.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	18	27	Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)		TAPIN	waktu Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)	12 bulan	17.380.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	18	29	Peningkatan Mutu Satuan PNF		TAPIN	waktu Peningkatan Mutu Satuan PNF	12 bulan	16.200.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89%	247.080.000	0	0	94	-
1	1	20	13	Pelaksanaan sertifikasi Guru		TAPIN	Jumlah guru yang profesional	1200 Guru	16.500.000	0	0	1200 Guru	-	
1	1	20	14	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Bintek Jafung		TAPIN	Jumlah penilaian angka kredit jabatan Fungsional	2 Kali	30.022.000	0	0	2 Kali	-	
1	1	20	16	Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi		TAPIN	waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	12 bulan	645.000	0	0	12 bulan	-	
1	1	20	17	Seleksi Cakep dan Pengawas Sekolah		TAPIN	Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	40 Orang	55.630.000	0	0	40 Orang	-	
1	1	20	18	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		TAPIN	Jumlah penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 paket	10.160.000	0	0	1 paket	-	
1	1	20	19	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan		TAPIN	Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	200 Peserta	58.478.000	0	0	200 Peserta	-	



			(PKB) Guru										
1	1	20	21	Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah		TAPIN	waktu Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	12 bulan	645.000	0	0	12 bulan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	1	20	22	Pendidikan Profesi Guru		TAPIN	Jumlah guru yang mengikuti diklat pendidikan profesi guru	160 Guru	75.000.000	0	0	160 Guru	-
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP	TAPIN	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	100%	3.003.130.200	0	0	100	-
1	1	22	10	Pemutakhiran Data Pendidikan		TAPIN	Jumlah Data Pendidikan	1 Data	32.500.200	0	0	1 Data	-
1	1	22	11	Karnaval HUT RI		TAPIN	Jumlah pelaksanaan Karnaval HUT RI	1 Kali	90.120.000	0	0	1 Kali	-
1	1	22	12	Peringatan Hari Guru Nasional		TAPIN	Jumlah peringatan Hari Guru Nasional	1 Kali	17.000.000	0	0	1 Kali	-
1	1	22	13	Peringatan Hari Pendidikan Nasional		TAPIN	Jumlah Hari Pendidikan Nasional yang Diperingati	1 Kali	29.000.000	0	0	1 Kali	-
1	1	22	14	Peningkatan Pelayanan Pendidikan		TAPIN	Waktu peningkatan pelayanan Pendidikan di Kabupaten Tapin	12 Bulan	2.800.660.000	0	0	12 Bulan	-
1	1	22	17	Pengembangan Website Pendidikan		TAPIN	waktu Pengembangan Website Pendidikan	12 bulan	690.000	0	0	12 bulan	-
1	1	22	18	Pengelolaan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA S/M)		TAPIN	Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi	50 Sekolah	32.500.000	0	0	50 Sekolah	-
1	1	22	19	Workshop Sekolah Ramah Anak		TAPIN	waktu Workshop Sekolah Ramah Anak	12 bulan	660.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	Program Pembinaan SD	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP	TAPIN	Angka Putus Sekolah Dasar	0,02%	20.600.853.000	0	0	0,019	-
1	1	23	1	Asistensi Pelaksanaan US SD		TAPIN	Jumlah Peserta Ujian Sekolah (US) SD	3300 Siswa	2.700.000	0	0	3300 Siswa	-
1	1	23	2	Penyusunan dan penggandaan soal uji coba UAS SD		TAPIN	Waktu penyusunan dan penggandaan soal uji coba UAS SD	3 Minggu	2.400.000	0	0	3 Minggu	-
1	1	23	3	Pelaksanaan O2SN SD		TAPIN	waktu Pelaksanaan O2SN SD	12 bulan	38.810.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	5	Manajemen Tim BOS Kab.Tapin		TAPIN	Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah yang dibina sesuai dengan juknis BOS	394 Kepsek/Bendahara	109.930.000	0	0	394 Kepsek/Bendahara	-
1	1	23	23	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)		TAPIN	waktu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	24	Pelaksanaan Matematika and Science Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional		TAPIN	waktu Pelaksanaan Matematika and Science Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional	12 bulan	17.520.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	25	Khataman Al Quran Massal Siswa SD		TAPIN	Jumlah Peserta yang mengikuti Khataman Al Quran Massal jenjang SD	3300 Siswa	48.750.000	0	0	3300 Siswa	-
1	1	23	26	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD		TAPIN	waktu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	12 bulan	24.130.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	27	Pembangunan SD		TAPIN	Jumlah Pembangunan SD	2 Unit	1.460.919.400	0	0	2 Unit	-
1	1	23	28	BOS SD NEGERI TIRIK		KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	58.500.000	0	0	1 sekolah	-



1	1	23	29	BOS SD NEGERI TUNGKAP 1			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;TUNGKAP	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	176.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	30	BOS SD NEGERI TUNGKAP 2			TAPIN;BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	92.700.000	0	0	1 sekolah	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022				
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	1	23	31	BOS SD NEGERI ANDHIKA			ANDHIKA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	57.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	32	BOS SD NEGERI WARINGIN DALAM			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BAKARANGAN;WARINGIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	68.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	33	BOS SDN SWATO TATAKAN 2			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN SELATAN;HATIWIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	58.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	34	BOS SD NEGERI PUNCAK HARAPAN			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;LOKPAKAT;PUNCAK HARAPAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	34.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	35	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 1			RANGDA MALINGKUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	127.800.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	36	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 3			RANGDA MALINGKUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	169.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	37	BOS SD NEGERI ANTASARI			TAPIN;TAPIN UTARA;ANTASARI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	103.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	38	BOS SD NEGERI ANTASARI HILIR			ANTASAN HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	176.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	39	BOS SD NEGERI ASAM RANDAH			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;HATUNGU N;ASAM RANDAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	77.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	40	BOS SD NEGERI AYUNAN PAPAN			AYUNAN PAPAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	67.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	41	BOS SD NEGERI BAGAK			BAGAK	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	74.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	42	BOS SD NEGERI BAKARANGAN 1			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BAKARANGAN;BAKARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	176.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	43	BOS SD NEGERI BAKARANGAN 2			BAKARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	58.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	44	BOS SD NEGERI BALAWAIAN			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;PIANI;BALAWAIAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	59.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	45	BOS SD NEGERI BALAWAIAN HILIR			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;PIANI;BALAWAIAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	18.900.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	47	BOS SD NEGERI BANUA HANYAR HULU			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	50.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	48	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Ruang Guru			TAPIN	waktu Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Ruang Guru	12 bulan	330.000	0	0	12 bulan	-
1	1	23	49	BOS SD NEGERI BANUA PADANG			BANUA PADANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	91.800.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	50	BOS SD NEGERI BARAMBAN			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;PIANI;BARAMBAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	117.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	51	BOS SD NEGERI BATALAS			BATALAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.800.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	52	BOS SD NEGERI BATU AMPAR			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;PIANI;BATU AMPAR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	54.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	53	BOS SD NEGERI BATU HAPU 1			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	72.900.000	0	0	1 sekolah	-



1	1	23	54	BOS SD NEGERI BATU HAPU 2		BATU HAPU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	149.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	55	BOS SD NEGERI BATUNG		BATUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	124.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	56	BOS SD NEGERI BAULIN		BAULIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	47.700.000	0	0	1 sekolah	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	1	23	57	BOS SD NEGERI BERINGIN 1		BARINGIN A.	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.800.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	58	BOS SD NEGERI BERINGIN 2		BARINGIN A.	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	106.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	59	BOS SD NEGERI MARAMPIAU		MARAMPIAU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	77.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	60	BOS SD NEGERI BERINGIN B		BARINGIN B	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	88.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	61	BOS SD NEGERI BINDERANG		TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	209.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	62	BOS SD NEGERI BINUANG 1		KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	130.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	63	BOS SD NEGERI BINUANG 10		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;RAYA BELANTI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	88.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	64	BOS SD NEGERI BINUANG 2		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;KARANGAN PUTIH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	222.300.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	65	BOS SD NEGERI BINUANG 3		KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;TUNGKAP	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	158.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	66	BOS SD NEGERI BINUANG 4		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	147.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	67	BOS SD NEGERI BINUANG 5		BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	41.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	68	BOS SD NEGERI BINUANG 6		BINUANG;BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	202.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	69	BOS SD NEGERI BINUANG 7		TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	153.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	70	BOS SD NEGERI MARAMPIAU HILIR		MARAMPIAU HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	80.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	71	BOS SD NEGERI BINUANG 8		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG;RAYA BELANTI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	148.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	72	BOS SD NEGERI BINUANG 9		BINUANG;BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	80.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	73	BOS SD NEGERI BITAHAN 1		TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	252.900.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	74	BOS SD NEGERI BITAHAN 2		BITAHAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	102.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	75	BOS SD NEGERI BITAHAN BARU		LOKPAIKAT	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	86.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	76	BOS SD NEGERI BUAS BUAS 1		BUAS-BUAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	107.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	77	BOS SD NEGERI BUAS BUAS 2		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;CANDI LARAS UTARA;BUAS-BUAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	49.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	78	BOS SD NEGERI BUAS BUAS HILIR		BUAS-BUAS HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	26.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	79	BOS SD NEGERI BUNDUNG 1		BUNDUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	45.900.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	80	BOS SD NEGERI MARGASARI ILIR 1		MARGASARI HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	109.800.000	0	0	1 sekolah	-



1	1	23	81	BOS SD NEGERI BUNDUNG 2		BUNDUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	35.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	82	BOS SD NEGERI BUNGUR BARU		BUNGUR BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	117.900.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	83	BOS SD NEGERI BUNGUR		TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	125.100.000	0	0	1 sekolah	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	1	23	84	BOS SD NEGERI BURAKAI		BURAKAI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	62.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	85	BOS SD NEGERI CANDI LARAS		CANDI LARAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	81.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	86	BOS SD NEGERI GADUNG HILIR		GADUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	109.800.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	87	BOS SD NEGERI GADUNG KERAMAT		GADUNG KERAMAT	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	47.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	88	BOS SD NEGERI GUNUNG BATU		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BINUANG; GUNUNGBATU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	141.300.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	89	BOS SD NEGERI HANGUI 1		HANGUI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	39.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	90	BOS SD NEGERI HARAKIT		HARAKIT	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	36.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	91	BOS SD NEGERI MARGASARI ILIR 2		MARGASARI HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	87.300.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	92	BOS SD NEGERI HARAPAN MASA 1		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN;HARAPAN MASA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	38.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	93	BOS SD NEGERI HARAPAN MASA 2		HARAPAN MASA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	65.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	94	BOS SD NEGERI HATUNGUN 1		HATUNGUN;HATUNGUN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	158.400.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	95	BOS SD NEGERI HATUNGUN 2		HATUNGUN; HATUNGUN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	98.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	96	BOS SD NEGERI HIYUNG 1		TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	75.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	97	BOS SD NEGERI HIYUNG 2		TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	72.900.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	98	BOS SD NEGERI KALADAN 1		KELADAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	67.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	99	BOS SD NEGERI KALADAN 2		KELADAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	30.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	100	BOS SD NEGERI KALUMPANG 1		KALUMPANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	147.600.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	101	BOS SD NEGERI KALUMPANG 2		KALUMPANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	79.200.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	102	BOS SD NEGERI MARGASARI ULU		MARGASARI HULU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	71.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	103	BOS SD NEGERI KALUMPANG 3		KALUMPANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	63.000.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	104	BOS SD NEGERI KEMBANG HABANG 1		TAPIN;SALAM BABARIS;KAMBANG HABANG LAMA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	161.100.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	105	BOS SD NEGERI KEMBANG HABANG 2		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;SALAM BABARIS;KAMBANG, HABANG BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	76.500.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	106	BOS SD NEGERI KEMBANG HABANG 3		KAMBANG HABANG BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	72.000.000	0	0	1 sekolah	-



1	1	23	107	BOS SD NEGERI KEMBANG KUNING			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;KAMBANG KUNING	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	65.700.000	0	0	1 sekolah	-
1	1	23	108	BOS SD NEGERI KEPAYANG			KEPAYANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	112.500.000	0	0	1 sekolah	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
11	23	109	BOS SD NEGERI KUPANG 1		KUPANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	110.700.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	110	BOS SD NEGERI KUPANG 2		TAPIN UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	117.000.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	111	BOS SD NEGERI LABUNG 1		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN TENGAH;LABUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	83.700.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	112	BOS SD NEGERI LABUNG 2		LABUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	84.600.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	113	BOS SD NEGERI MATANG BATAS		MATANG BATAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	81.900.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	114	BOS SD NEGERI LALAPIN		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;PIANI;BATUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	42.300.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	115	BOS SD NEGERI LAWAHAN 1		LAWAHAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	37.800.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	116	BOS SD NEGERI LAWAHAN 2		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN SELATAN;LAWAHAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	29.700.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	117	BOS SD NEGERI LAWAHAN CEMPAKA		TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.800.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	118	BOS SD NEGERI LINUH 2		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;BUNGUR;L INUH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	81.000.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	119	BOS SD NEGERI LOKPAIKAT 1		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;LOKPAIKAT;LOKPAIKAT	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	108.000.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	120	BOS SD NEGERI LOKPAIKAT 3		BUDI MULYA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	90.900.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	121	BOS SD NEGERI MANDURIAN		TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	113.400.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	122	BOS SD NEGERI MANDURIAN HILIR		INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	11 sekolah	90.900.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	123	BOS SD NEGERI MIAWA		MIAWA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	163.800.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	124	BOS SD NEGERI PABAUNGAN HILIR 1		PABAUNGAN HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	71.100.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	125	BOS SD NEGERI PABAUNGAN HILIR 2		PABAUNGAN HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	17.100.000	0	0	1 sekolah	-
11	23	126	BOS SD NEGERI PABAUNGAN HULU		PABAUNGAN HULU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	57.600.000	0	0	1 sekolah	-

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 1 23 127	BOS SD NEGERI PABAUNGAN PANTAI			PABAUNGAN PANTAI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	24.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 128	BOS SD NEGERI PADANG SARI			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BINUANG; PADANG SARI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	46.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 129	BOS SD NEGERI PANDAHAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN TENGAH; PANDAHAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	57.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 130	BOS SD NEGERI PANDAHAN 2			PANDAHAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	75.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 131	BOS SD NEGERI PANDULANGAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN TENGAH; PANDULANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	99.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 132	BOS SD NEGERI PANDULANGAN 2			PANDULANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	28.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 133	BOS SD NEGERI PANTAI CABE			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	116.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 134	BOS SD NEGERI PARIGI KACIL			PARIGI KECIL	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	41.400.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 135	BOS SD NEGERI PARIGI SIMBAR			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	75.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 136	BOS SD NEGERI PARING GULING			PARING GULING	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	81.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 137	BOS SD NEGERI PARIOK 1			PARIOK	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 138	BOS SD NEGERI PARIOK 2			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	42.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 139	BOS SD NEGERI PAUL			BAKARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	63.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 140	BOS SD NEGERI PEMATANG KARANGAN			TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	51.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 141	BOS SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HILIR 1				Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	150.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 142	BOS SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HULU			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	134.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 143	BOS SD NEGERI PERINTIS RAYA			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	49.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 144	BOS SD NEGERI PIPITAK JAYA 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; PIANI; PIPITAK JAYA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	8.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 145	BOS SD NEGERI PIPITAK JAYA 2			PIANI; PIPITAK JAYA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	35.100.000	0	0	1 sekolah	-





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
11 23 146	BOS SD NEGERI PUALAMSARI 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BINUANG; A. YANI PURA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	168.300.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 147	BOS SD NEGERI PUALAMSARI 2			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	76.500.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 148	BOS SD NEGERI PUALAMSARI 3			MEKARSARI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	73.800.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 149	BOS SD NEGERI PULAU PINANG 1			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BINUANG; PULAU PINANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	165.600.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 150	BOS SD NEGERI PULAU PINANG 2			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BINUANG; PULAU PINANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	123.300.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 151	BOS SD NEGERI PULAU PINANG UTARA			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	195.300.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 152	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 4			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	143.100.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 153	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 5			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN UTARA; RANGDA MALINGKUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	108.900.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 154	BOS SD NEGERI RANTAU BUJUR 1			RANTAU BUJUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	32.400.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 155	BOS SD NEGERI RANTAU BUJUR 2			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BUNGUR; RANTAU BUJUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	48.600.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 156	BOS SD NEGERI RANTAU KANAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN UTARA; RANTAU KANAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	234.900.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 157	BOS SD NEGERI RANTAU KANAN 2			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN UTARA; RANTAU KANAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	179.100.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 158	BOS SD NEGERI RANTAU KANAN 3			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN UTARA; RANTAU KANAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	117.900.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 159	BOS SD NEGERI RANTAU KIWA 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN UTARA; RANTAU KIWA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	219.600.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 160	BOS SD NEGERI RANTAU KIWA 2			TAPIN; TAPIN UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	189.900.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 161	BOS SD NEGERI RAWA MUNING 1			PAPAGAN MAKMUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	15.300.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 162	BOS SD NEGERI RAWA MUNING 2			TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	4.500.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 163	BOS SD NEGERI RAWANA HILIR			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	54.000.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 164	BOS SD NEGERI RAWANA HULU			RAWANA HULU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	111.600.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 165	BOS SD NEGERI RUMINTIN 1			TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	146.700.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 166	BOS SD NEGERI RUMINTIN 2			TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	64.800.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 167	BOS SD NEGERI RUMINTIN 3			TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	65.700.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 168	BOS SD NEGERI SABAH			SHABAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	154.800.000	0	0	1 sekolah	-
11 23 169	BOS SD NEGERI SALAM BABARIS 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; SALAM BABARIS; PANTAI CABE	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	79.200.000	0	0	1 sekolah	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 1 23 170	BOS SD NEGERI SALAM BABARIS 2			SALAM BABARIS; SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	162.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 171	BOS SD NEGERI SALAM BABARIS 3			SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	30.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 172	BOS SD NEGERI SALAM BABARIS 4			SALAM BABARIS; SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	72.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 173	BOS SD NEGERI SAWAJA			SAWAJA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	81.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 174	BOS SD NEGERI SAWANG			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN; SAWANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	129.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 175	BOS SD NEGERI SERAWI			SERAWI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	51.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 176	BOS SD NEGERI SUNGAI BAHALANG			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN TENGAH ;SUNGAI BAHALANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	51.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 177	BOS SD NEGERI SUNGAI PUTING			SUNGAI PUTING	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	124.200.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 178	BOS SD NEGERI SUNGAI RUTAS 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;CANDI LARAS SELATAN; SUNGAI RUTAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	72.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 179	BOS SD NEGERI SUNGAI RUTAS 2			CANDI LARAS SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	99.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 180	BOS SD NEGERI SUNGAI SALAI			SUNGAI SELAI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	131.400.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 181	BOS SD NEGERI SUNGAI SALAI HILIR			SUNGAI SELAI HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	118.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 182	BOS SD NEGERI SWATO 1			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;SALAM BABARIS; SUATO LAMA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	57.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 183	BOS SD NEGERI SWATO 2			SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	125.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 184	BOS SD NEGERI SWATO 3			SUATO LAMA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	24.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 185	BOS SD NEGERI A. YANI PURA 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	153.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 186	BOS SD NEGERI SWATO BARU			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;SALAM BABARIS; SUATO BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	73.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 187	BOS SD NEGERI SWATO TATAKAN 1			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	236.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 188	BOS SD NEGERI TAMBARANGAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN;TAMBARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	156.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 188	BOS SD NEGERI TAMBARANGAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN;TAMBARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	156.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 189	BOS SD NEGERI TAMBARANGAN 2			INDONESIA ;KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN; TAMBARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	65.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 190	BOS SD NEGERI TAMBARANGAN 3			TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	95.400.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 191	BOS SD NEGERI TANDUI 1			TANDUI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	65.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 192	BOS SD NEGERI TANDUI 2			INDONESIA ;KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN SELATAN; TANDUI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	36.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 193	BOS SD NEGERI TANGKAWANG			TANGKAWANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	115.200.000	0	0	1 sekolah	-



Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 1 23 194	BOS SD NEGERI TARUNGIN 1			INDONESIA; TAPIN; HATUNGUN; TARUNGIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	63.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 195	BOS SD NEGERI TARUNGIN 2			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; HATUNGUN; TARUNGIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	56.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 196	BOS SD NEGERI A. YANI PURA 2			A. YANI PURA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	43.200.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 197	BOS SD NEGERI TATAKAN 1			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN SELATAN; TATAKAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	207.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 198	BOS SD NEGERI TATAKAN 2			SUATO TATAKAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	93.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 199	BOS SD NEGERI TATAKAN 3			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	84.600.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 200	BOS SD NEGERI TELUK HAUR			TELUK HAUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	107.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 201	BOS SD NEGERI TIMBAAN 1			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN SELATAN; TIMBAAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	74.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 202	BOS SD NEGERI TIMBAAN 2			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; TAPIN SELATAN; TIMBAAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	36.900.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 203	BOS SD NEGERI TIMBUNG			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BUNGUR; TIMBUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	116.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 23 205	Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) SD			TAPIN	waktu Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) SD	12 bulan	4.000.000	0	0	12 bulan	-
1 1 23 206	Peningkatan Prasarana SD			TAPIN	waktu Peningkatan Prasarana SD	12 bulan	2.335.289.000	0	0	12 bulan	-
1 1 23 207	Penghargaan sekolah dan siswa berprestasi Jenjang SD			TAPIN	waktu Penghargaan sekolah dan siswa berprestasi Jenjang SD	12 bulan	4.000.000	0	0	12 bulan	-
1 1 23 208	Penerimaan Murid Baru Jenjang SD			TAPIN	waktu Penerimaan Murid Baru Jenjang SD	12 bulan	4.000.000	0	0	12 bulan	-
1 1 23 209	Bimtek Pengembangan Kurikulum SD			TAPIN	waktu Bimtek Pengembangan Kurikulum SD	12 bulan	1.992.200	0	0	12 bulan	-
1 1 23 210	Pengadaan Sarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			TAPIN	Jumlah pengadaan Sarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1 paket	183.082.400	0	0	1 paket	-
1 1 23 211	Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Karakter			TAPIN	waktu Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Karakter	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	-
1 1 24	Program Pembinaan SMP	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP		Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	0,25%	5.009.961.900	0	0	0,2	71.625.000
1 1 24 2	Biaya Operasional Ujian Nasional (UN) SMP/MTs			TAPIN	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN/SMP-MTs	43 Sekolah	71.625.000	0	0	43 Sekolah	71.625.000
1 1 24 3	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP			TAPIN	Jumlah cabang lomba olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat SMP	5 Cabang	40.000.000	0	0	5 Cabang	-
1 1 24 4	Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP			TAPIN	Jumlah cabang lomba Festival Lomba seni siswa nasional Tingkat SMP	5 Cabang	40.000.000	0	0	5 Cabang	-
1 1 24 5	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP			TAPIN	Jumlah cabang lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	3 Cabang	38.750.000	0	0	3 Cabang	-
1 1 24 20	Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS SMP			TAPIN	waktu Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS SMP	12 bulan	500.000	0	0	12 bulan	-
1 1 24 21	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional			TAPIN	Jumlah Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional yang ditingkatkan	3 Mata Pelajaran	500.000	0	0	3 Mata Pelajaran	-
1 1 24 22	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP			TAPIN	Waktu pelaksanaan Liga sepak bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP	1 Kali	74.999.500	0	0	1 Kali	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 1 24 23	Pembangunan SMP			TAPIN	Jumlah Pembangunan SMP	1 Unit	631.557.400	0	0	1 Unit	-
1 1 24 24	Pelaksanaan Seleksi dan Training Centre POPDA			TAPIN	waktu Pelaksanaan Seleksi dan Training Center POPDA	12 bulan	500.000	0	0	12 bulan	-
1 1 24 25	BOS SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	129.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 26	BOS SMP NEGERI 1 PIANI			BARAMBAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	279.400.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 27	BOS SMP NEGERI 1 RANTAU			TAPIN UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	507.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 28	BOS SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	332.200.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 29	BOS SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	201.300.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 30	BOS SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	265.100.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 31	BOS SMP NEGERI 2 BAKARANGAN			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BAKARANG AN;BUNDUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 32	BOS SMP NEGERI 2 BINUANG			BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	115.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 33	BOS SMP NEGERI 2 BUNGUR			LINUH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	82.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 34	BOS SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN			SUNGAI RUTAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	55.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 35	BOS SMP NEGERI 2 CANDI LARAS UTARA			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;CANDI LARAS UTARA;BUAS-BUAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	63.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 36	BOS SMP NEGERI 2 PIANI			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	112.200.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 37	BOS SMP NEGERI 2 RANTAU			KALIMANTAN SELATAN; TAPIN;TAPIN UTARA; RANTAU KANAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	390.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 38	BOS SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS			KAMBANG HABANG BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	115.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 39	BOS SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH			TAPIN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	195.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 40	Pengembangan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP			TAPIN	waktu Pengembangan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP	12 bulan	330.000	0	0	12 bulan	-
1 1 24 41	BOS SMP NEGERI 1 BAKARANGAN			INDONESIA; KALIMANTAN SELATAN; TAPIN; BAKARANGAN; TANGKAWANG BARU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	194.700.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 42	BOS SMP NEGERI 1 BINUANG			BINUANG; BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	393.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 43	BOS SMP NEGERI 1 BUNGUR			KALUMPANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	126.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 44	BOS SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN			CANDI LARAS SELATAN;BARINGIN A.	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	129.800.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 45	BOS SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;CANDI LARAS UTARA;MARGASARI HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	115.500.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 46	BOS SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA			KELADAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	57.200.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 47	BOS SMP NEGERI 1 HATUNGUN			HATUNGUN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah	165.000.000	0	0	1 sekolah	-
1 1 24 49	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran UN Siswa SMP			TAPIN	Jumlah Mata Pelajaran UN Siswa SMP	4 Mata Pelajaran	500.000	0	0	4 Mata Pelajaran	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 1	Dinas Kesehatan						21.545.553.459	0	0		31.123.428.566
2	Kesehatan										
2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.558.880.892	0	0	100	2.924.300.510
2 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Jasa Komunikasi Suber daya air dan listrik	12 bln	116.679.992	0	0	12 bln	120.800.000
2 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan ATK kantor setiap tahun anggaran	12 bln	49.814.600	0	0	12 bln	70.000.000
2 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	11.586.300	0	0	12 bln	20.000.000
2 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	2.000.000
2 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu rapat - rapat konsultasi / koordinasi, bimtek dan pertemuan	12 bln	576.825.000	0	0	12 bln	570.000.000
2 1	19 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 bln	62.600.000	0	0	12 bln	98.200.000
2 1	20 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa non pns (bidan desa, dokter ptt, dokter interenship, dan pegawai kontrak	12 bln	1.712.400.000	0	0	12 bln	2.000.000.500
2 1	21 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 kali	20.000.000	0	0	1 kali	40.300.000
2 1	22 Sistem Informasi Kesehatan (SIK)			TAPIN	Waktu Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12 bulan	8.875.000	0	0	12 bulan	3.000.010
2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	96.580.000	0	0	100	164.000.036
2 2	22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
2 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 bln	77.800.000	0	0	12 bln	145.000.001
2 2	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bln	18.580.000	0	0	12 bln	15.000.035
2 2	48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
2 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase aparatur sesuai kompetensinya	100%	5.259.800	0	0	100	16.000.000
2 5	4 Penilaian dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas			TAPIN	waktu Penilaian dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
2 5	7 Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional			TAPIN	Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional	12 bln	5.159.800	0	0	12 bln	13.000.000
2 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	16.699.509	0	0	100	23.000.000
2 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	wakt Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bln	10.050.000	0	0	12 bln	12.000.000
2 6	5 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	12 bln	6.649.509	0	0	12 bln	11.000.000
2 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan	100%	2.075.836.100	0	0	100	2.205.919.000
2 15	10 Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten			TAPIN	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kefarmasian	13 puskesmas	91.196.100	0	0	13 puskesmas	80.200.000
2 15	11 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar			TAPIN	waktu pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk PKD	12 bulan	1.984.440.000	0	0	12 bulan	2.119.719.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 2 15 2	Pengadaan bahan & alat Kesehatan habis pakai untuk PKD			TAPIN	waktu Pengadaan bahan & alat Kesehatan habis pakai untuk PKD	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 15 14	Pemusnahan Obat dan BAKHP			TAPIN	waktu Pemusnahan Obat dan BAKHP	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	100%	8.330.607.258	0	0	100	185.450.020
1 2 16 16	Sunatan massal			TAPIN	Jumlah Peserta pada Pelaksanaan Sunatan Massal Bagi Masyarakat Miskin	200 Orang	83.799.700	0	0	200 Orang	121.450.000
1 2 16 17	Pelayanan kesehatan daerah terpencil			TAPIN	waktu Pelayanan kesehatan daerah terpencil	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 18	Pengobatan massal			TAPIN	waktu Pengobatan massal	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 20	Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas			TAPIN	waktu Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 26	Pembinaan & Pengawasan Sarana/Institusi Kesehatan			TAPIN	waktu Pembinaan & Pengawasan Sarana/Institusi Kesehatan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 27	Pengembangan Obat dan Pengobatan Tradisional			TAPIN	waktu Pengembangan Obat dan Pengobatan Tradisional	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 28	Penilaian Kinerja Puskesmas			TAPIN	waktu Penilaian Kinerja Puskesmas	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 2 16 29	Validasi dan Pemutakhiran data SDK			TAPIN	waktu Validasi dan Pemutakhiran data SDK	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 30	Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Kualitas SDM Kesehatan			TAPIN	waktu Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Kualitas SDM Kesehatan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 31	Pembinaan Pelayanan JKN			TAPIN	waktu Pembinaan Pelayanan JKN	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 32	Penanggulangan Krisis Kesehatan			TAPIN	waktu Penanggulangan Krisis Kesehatan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 34	Bimbingan Teknis Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Kelompok Asman TOGA			TAPIN	waktu Bimbingan Teknis Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Kelompok Asman TOGA	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 35	Manajemen Operasional Puskesmas			TAPIN	Jumlah pelayanan kesehatan di puskesmas dan ifk	14 Puskesmas	58.200.000	0	0	14 Puskesmas	40.000.020
1 2 16 38	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Piani)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	81.700.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 39	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Banua Padang)			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BUNGUR	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	103.009.100	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 40	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Tapin Utara)			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN UTARA	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	49.250.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 41	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Binuang)			BINUANG	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	142.400.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 42	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Tapin Utara)			TAPIN UTARA	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	1.127.485.729	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 43	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Banua Padang)			BUNGUR	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	484.947.200	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 44	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Salam Babaris)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	380.174.871	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 45	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Tambarangan)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	524.000.000	0	0	1 puskesmas	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 2 16 46	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Tambaruntung)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	388.582.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 47	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Pandahan)			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	284.472.050	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 48	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Margasari)			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;CANDI LARAS UTARA	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	744.000.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 49	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Binuang)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	1.136.478.608	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 50	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Hatungun)			HATUNGUN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	275.000.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 51	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Piani)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	272.450.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 52	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Lokpaikat)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	411.146.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 53	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Baringin)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	595.432.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 54	Jasa Pelayanan dan Operasional Puskesmas dari Dana Kapitasi JKN (Puskesmas Bakarangan)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	535.530.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 55	Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu Untuk Publik Safety Center/PSC (Call Centre 119)			TAPIN	waktu Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu Untuk Publik Safety Center/PSC (Call Centre 119)	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 16 56	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Bakarangan)			BAKARANGAN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	64.200.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 57	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Salam Babaris)			SALAM BABARIS	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	64.230.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 58	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Tambarangan)			TAPIN SELATAN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	97.350.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 59	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Tambaruntung)			TAPIN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	43.800.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 60	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Pandahan)			TAPIN TENGAH	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	30.500.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 61	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Margasari)			CANDI LARAS UTARA	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	45.620.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 62	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Baringin)			TAPIN;CANDI LARAS SELATAN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	156.200.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 63	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Hatungun)			HATUNGUN	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	78.000.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 16 64	Operasional Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Lokpaikat)			LOKPAIKAT;LOKPAIKAT	Jumlah puskesmas yang beroperasi	1 puskesmas	71.450.000	0	0	1 puskesmas	-
1 2 19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga	50%	65.500.000	0	0	55	103.775.000
1 2 19 11	Penilaian Sekolah Sehat			TAPIN	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Sekolah Se-Kabupaten Tapin	Ditetapkannya Kategori Sekolah Sehat Se-Kabupaten Sekolah	21.125.000	0	0	Ditetapkannya Kategori Sekolah Sehat Se-Kabupaten Sekolah	54.650.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 2 19 15	Penilaian Posyandu Tingkat Kabupaten dan Provinsi			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	waktu pelaksanaan Penilaian Posyandu Tingkat Kab. dan Provinsi	12 bulan	22.250.000	0	0	12 bulan	22.250.000
1 2 19 16	Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten			TAPIN	waktu Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten	12 bulan	22.125.000	0	0	12 bulan	26.875.000
1 2 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase pelayanan gizi masyarakat	86%	162.590.000	0	0	90	262.290.000
1 2 20 7	Penanggulangan Gizi Buruk			TAPIN	waktu kegiatan gizi buruk	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	15.000.000
1 2 20 8	Lomba balita Sehat			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba Balita Sehat	1 KALI	32.890.000	0	0	1 KALI	32.890.000
1 2 20 10	Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) Terintegrasi Tingkat Kabupaten			TAPIN	waktu pelaksanaan kegiatan KP2S	12 bulan	114.700.000	0	0	12 bulan	214.400.000
1 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase desa yang melakukan STBM	79%	66.825.000	0	0	86	84.000.000
1 2 21 6	Sanitasi Tempat Penjual /Pengolahan makanan (TPM)			TAPIN	waktu Sanitasi Tempat Penjual /Pengolahan makanan (TPM)	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 21 8	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			TAPIN	waktu Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	12 bulan	23.775.000	0	0	12 bulan	32.000.000
1 2 21 12	Forum Kabupaten Sehat			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	waktu Forum Kabupaten Sehat	12 bulan	42.950.000	0	0	12 bulan	51.000.000
1 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular	100%	205.624.900	0	0	100	112.244.000
1 2 22 1	Peningkatan Imunisasi			TAPIN	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Imunisasi	13 Puskesmas	64.500.000	0	0	13 Puskesmas	28.620.000
1 2 22 4	Kesehatan haji			TAPIN	Terlayannya calon jamaah haji yang akan berangkat	300 orang	7.824.900	0	0	300 orang	7.824.000
1 2 22 9	Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD			TAPIN	terputusnya penularan penyakit DBD & tidak menular	10 kasus	10.500.000	0	0	10 kasus	10.500.000
1 2 22 13	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB			TAPIN	persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standat dalam waktu kurun waktu satu tahun	100 persen	57.500.000	0	0	100 persen	-
1 2 22 21	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kanker dan Kelainan Darah			TAPIN	jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	13 puskesmas	65.300.000	0	0	13 puskesmas	65.300.000
1 2 33	Program Bebas Berobat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan	100%	7.941.000.000	0	0	100	25.020.500.000
1 2 33 1	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tapin			TAPIN	Waktu Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Tapin	12 bulan	7.941.000.000	0	0	12 bulan	25.020.500.000
1 2 34	Program Kesehatan Keluarga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA)	63%	20.050.000	0	0	72	20.950.000
1 2 34 6	Peringatan Hari Lansia Tingkat Kabupaten			TAPIN	waktu Peringatan Hari Lansia Tingkat Kabupaten	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 2 34 7	Pertemuan Pengelola Data Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA)			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pengelola Data Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) serta pemanfaatan buku KIA untuk penurunan stunting	4 KALI	19.950.000	0	0	4 KALI	19.950.000
1 2 37	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100%	0	0	0	100	-
1 2 38	Program Pengawasan Obat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan anak serta Status Gizi Balita		Persentase kasus obat yang tidak aman yang ditangani	100%	100.000	0	0	100	1.000.000
1 2 38 1	Pembinaan Toko Obat dan Apotek			TAPIN	waktu Pembinaan Toko Obat dan Apotek	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	1.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 2	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul						74.517.565.500	0	0		51.389.200.000
2	Kesehatan										
2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.360.000.000	0	0	100	3.889.200.000
2 1	20 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan			TAPIN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	29 orang	3.360.000.000	0	0	29 orang	3.889.200.000
2 35	Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	ANilai	47.500.000.000	0	0	A	47.500.000.000
2 35	1 Penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 Bulan	47.500.000.000	0	0	12 Bulan	47.500.000.000
2 36	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan pada rumah sakit		Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	77,27%	23.657.565.500	0	0	86,82	-
2 36	2 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit			TAPIN	Waktu pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	12 bulan	23.657.565.500	0	0	12 bulan	-
3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Sekretariat)						2.724.338.000	0	0		2.909.308.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.800.968.000	0	0	100	2.007.658.000
3 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.980.000	0	0	12 bulan	5.000.000
3 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	320.000.000	0	0	12 bulan	320.000.000
3 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	200.058.000	0	0	12 bulan	200.058.000
3 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	55.010.000	0	0	12 bulan	50.000.000
3 1	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	65.000.000	0	0	12 bulan	91.700.000
3 1	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	15.000.000
3 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	104.000.000	0	0	12 bulan	92.500.000
3 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	838.520.000	0	0	12 bulan	1.035.000.000
3 1	19 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Kegiatan Tapin Expo	1 tahun	40.000.000	0	0	1 tahun	40.000.000
3 1	20 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	158.400.000	0	0	12 bulan	158.400.000
3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	912.360.000	0	0	100	894.000.000
3 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	225.000.000
3 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	106.400.000	0	0	12 bulan	107.000.000
3 2	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	50.000.000
3 2	49 Honorarium Pegawai Tidak Tetap			TAPIN	Waktu Honorarium Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	540.000.000	0	0	12 bulan	496.000.000
3 2	62 Monitoring Evaluasi & Pelaporan			TAPIN	Waktu Monitoring Evaluasi & Pelaporan	12 bulan	15.960.000	0	0	12 bulan	16.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 3 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparaturn dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	11.010.000	0	0	100	7.650.000
1 3 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	4.500.000	0	0	12 Laporan	450.000
1 3 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	6.510.000	0	0	2 laporan	7.200.000
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)						183.049.909.898	0	0		14.464.000.000
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1 3 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik		Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	60%	177.885.909.898	0	0	65	2.950.000.000
1 3 29 6	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh			TAPIN	waktu Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	12 bulan	65.500.000.000	0	0	12 bulan	2.950.000.000
1 3 29 10	Pembangunan Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pembangunan Gedung Kantor	12 bulan	112.385.909.898	0	0	12 bulan	-
1 3 35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	80%	1.114.000.000	0	0	85	1.014.000.000
1 3 35 1	Pembangunan Prasarana Sanitasi			TAPIN	Jumlah Akses Air Limbah Yang di Bangun	515 kk	100.000.000	0	0	520 kk	100.000.000
1 3 35 2	Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	115 sr	814.000.000	0	0	120 sr	814.000.000
1 3 35 5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum			TAPIN	Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	115 sr	200.000.000	0	0	120 sr	100.000.000
1 3 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik		Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	67%	4.050.000.000	0	0	70	10.500.000.000
1 3 36 1	Pembangunan Drainase Lingkungan			TAPIN	Panjang Drainase Lingkungan Yang Dibangun	3,5 kilometer	750.000.000	0	0	2 kilometer	1.500.000.000
1 3 36 2	Pembangunan Jalan Lingkungan			TAPIN	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	3,5 kilometer	3.300.000.000	0	0	2 kilometer	9.000.000.000
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)						219.591.800.000	0	0		384.800.000
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1 3 15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparaturn dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	52%	186.870.000.000	0	0	55	-
1 3 15 5	Pembangunan jembatan			TAPIN	Panjang Jembatan yang dibangun	212 km	3.850.000.000	0	0	212 km	-
1 3 15 9	Pembangunan jalan lingkaran dalam kota rantau			TAPIN	Panjang Jalan Lingkaran Dalam Kota Rantau yang dibangun (km)	25 km	26.450.000.000	0	0	25 km	-
1 3 15 10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan			TAPIN	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang dibangun (Km)	6 km	151.570.000.000	0	0	6 km	-
1 3 15 11	Pembangunan bangunan pelengkap jalan			TAPIN	A Panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun	13 (Km)	5.000.000.000	0	0	13 (Km)	-
1 3 16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air		Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	15%	31.630.000.000	0	0	20	-
1 3 16 3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			TAPIN	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	16000 meter	31.630.000.000	0	0		-
1 3 18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten		Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	20%	990.800.000	0	0	21	264.800.000
1 3 18 9	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			TAPIN	Panjang Jalan dan Jembatan yang terpelihara	22 (KM)	780.000.000	0	0	22 (KM)	-
1 3 18 11	Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan			TAPIN	Panjang jalan dan jembatan yang di inspeksi	500 (meter)	210.800.000	0	0	500 (meter)	264.800.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 3 22	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten		Persentase data jalan yang dimutakhirkan	100%	101.000.000	0	0	100	120.000.000
1 3 22	3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			TAPIN	A Waktu monitoring, evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	20.000.000
1 3 22	4 Pengembangan sistem informasi dan penguatan database jalan			TAPIN	Jumlah Sistem Informasi Data Base Jalan	1 (Aplikasi)	50.000.000	0	0	1 (Aplikasi)	50.000.000
1 3 22	5 Pengembangan sistem informasi dan penguatan database jembatan			TAPIN	Jumlah Sistem Informasi Data Base Jembatan	1 (Aplikasi)	50.000.000	0	0	1 (Aplikasi)	50.000.000
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)						28.021.555.000	0	0		10.000.000.000
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1 3 16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air		Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	15%	2.000.000.000	0	0	20	-
1 3 16	3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				Panjang Saluran Drainase yang dibangun	16000 meter	2.000.000.000	0	0		-
1 3 17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air		Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana	47%	5.600.000.000	0	0	49	4.500.000.000
1 3 17	5 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai			TAPIN	Panjang bangunan pengaman tebing sungai yang terbangun	3 km	5.600.000.000	0	0	3,24 km	4.500.000.000
1 3 34	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatnya jaringan rawa dalam kondisi baik/ sedang		Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang	60%	20.421.555.000	0	0	65	5.500.000.000
1 3 34	2 Pelaksanaan Rehab. Saluran Sungai			TAPIN	Panjang sungai yang di rehab	346,5 km	2.400.000.000	0	0	348,5 km	2.500.000.000
1 3 34	3 Pembuatan Pintu Air			TAPIN	Waktu pembuatan Pintu Air	12 bulan	1.000.000.000	0	0	12 bulan	1.500.000.000
1 3 34	4 Pengembalian fungsi saluran irigasi			TAPIN	Panjang saluran irigasi yang terbangun	1,3 km	16.850.000.000	0	0	1,8 km	1.500.000.000
1 3 34	6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			TAPIN	A Waktu monitoring, evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	171.555.000	0	0	12 bulan	-
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang)						1.514.400.000	0	0		300.000
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1 3 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang		Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang	69,22%	1.368.528.000	0	0	86,6	-
1 3 31	5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan			LOKPAIKAT	Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun (Dok)	2 dokumen	1.368.528.000	0	0	2 dokumen	-
1 3 32	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang		Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	90%	38.200.000	0	0	90	300.000
1 3 32	10 Koordinasi Penataan Ruang Daerah			TAPIN	Jumlah koordinasi penanganan pengendalian dan pemanfaatan ruang	8 kali	38.200.000	0	0	8 kali	300.000
1 3 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang		Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang	65,12%	107.672.000	0	0	82,56	-
1 3 33	5 Pengawasan pemanfaatan ruang			LOKPAIKAT	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang	20 bulan	107.672.000	0	0	20 bulan	-
1 3 1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Jasa Konstruksi)						429.623.000	0	0		273.000.000
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1 3 37	Program Peningkatan Perizinan, Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi		Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	60%	429.623.000	0	0	60	273.000.000



Kode	Usuran /Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 3 37 1	Pembinaan Jasa Konstruksi			TAPIN	Jumlah Pebinaan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan	0 kegiatan	92.350.000	0	0	0 kegiatan	164.500.000
1 3 37 3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat berat			TAPIN	Jumlah Pemeliharaan alat-alat berat yang siap pakai	0 unit	327.650.000	0	0	0 unit	107.000.000
1 3 37 4	Monitoring Evaluasi & Pelaporan Bidang Jaskon & Peralatan			TAPIN	Jumlah Monitoring dan Pelaporan yang Dilaksanakan	12 bulan	9.623.000	0	0	12 bulan	1.500.000
1 4 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						11.572.220.430	0	0		10.189.759.559
1 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.197.554.700	0	0	100	969.699.659
1 4 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6.600.000	0	0	12 bulan	10.400.000
1 4 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	62.800.000	0	0	12 bulan	55.000.000
1 4 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	31.624.700	0	0	12 bulan	31.000.000
1 4 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	10.200.000	0	0	12 bulan	13.500.000
1 4 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	74.230.000	0	0	12 bulan	76.170.000
1 4 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	560.000.000	0	0	12 bulan	395.829.659
1 4 1 19	Tapin Expo			TAPIN	Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	1 kali	50.500.000	0	0	1 kali	51.000.000
1 4 1 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			TAPIN	Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS	12 bulan	401.600.000	0	0	12 bulan	336.800.000
1 4 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	78.550.000	0	0	100	92.000.000
1 4 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	41.550.000	0	0	12 bulan	56.000.000
1 4 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	37.000.000	0	0	12 bulan	36.000.000
1 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	15.600.000	0	0	100	16.619.900
1 4 6 5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	7.200.000	0	0	2 laporan	8.460.000
1 4 6 7	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 laporan	8.400.000	0	0	13 laporan	8.159.900
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	0,88%	2.501.278.000	0	0	1,45	751.180.000
1 4 15 6	Pendampingan bantuan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			TAPIN	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1 laporan	75.618.000	0	0	1 laporan	74.100.000
1 4 15 7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat			TAPIN	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3 buah	607.600.000	0	0	3 buah	408.000.000
1 4 15 10	Penanganan kawasan Permukiman kumuh Perkotaan			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	1.677.010.000	0	0	4 buah	176.280.000
1 4 15 11	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan			TAPIN	waktu Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	12 bulan	141.050.000	0	0	12 bulan	92.800.000
1 4 21	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	100%	1.385.973.300	0	0	100	1.521.150.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 4 21	1 Pemeliharaan Kawasan Taman (Jalur Hijau dan Taman)			TAPIN	Waktu pemeliharaan kawasan taman (jalur hijau dan taman)	12 bulan	826.900.800	0	0	12 bulan	940.200.000
1 4 21	2 Pengelolaan RTH Publik Perkotaan			TAPIN	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik	2 kawasan	508.888.500	0	0	2 kawasan	526.950.000
1 4 21	3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH			TAPIN	Jumlah kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	2 kegiatan	50.184.000	0	0	2 kegiatan	54.000.000
1 4 23	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	62,78%	5.993.894.430	0	0	36,89	6.413.090.000
1 4 23	1 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Perumahan dan Permukiman			TAPIN	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman	1 kawasan	1.008.615.000	0	0	1 kawasan	1.200.000.000
1 4 23	2 Pemeliharaan PJU			TAPIN	Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	12 bulan	467.200.000	0	0	12 bulan	503.300.000
1 4 23	5 Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)			TAPIN	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	1 tahun	3.720.000.000	0	0	1 tahun	3.889.620.000
1 4 23	7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase			TAPIN	Waktu pemeliharaan drainase	12 bulan	744.439.430	0	0	12 bulan	755.510.000
1 4 23	9 Pemeliharaan Fasilitas Bermain Anak			TAPIN	waktu Pemeliharaan Fasilitas Bermain Anak	12 bulan	53.640.000	0	0	12 bulan	64.660.000
2 4	Pertanahan										
2 4 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya kualitas ASN	Tertanganinya konflik pertanahan		Persentase advokasi pertanahan yang Berhasil	100%	108.570.000	0	0	100	84.100.000
2 4 17	1 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			TAPIN	Waktu fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	12 bulan	108.570.000	0	0	12 bulan	84.100.000
2 4 20	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Meningkatnya kualitas ASN	Tertanganinya konflik pertanahan		Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi Pertanahan	18,18%	290.800.000	0	0	18,18	341.920.000
2 4 20	1 Survey dan pendataan Pertanahan			TAPIN	Jumlah dokumen survey dan pendataan Pertanahan	1 dokumen	110.490.000	0	0	1 dokumen	154.000.000
2 4 20	2 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan			TAPIN	Jumlah sistem informasi pertanahan yang Dibuat	1 buah	50.510.000	0	0	1 buah	50.700.000
2 4 20	3 Penyuluhan Hukum Pertanahan			TAPIN	Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	2 kali	26.600.000	0	0	2 kali	28.620.000
2 4 20	4 Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah			TAPIN	Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran Tanah	2 Kali	103.200.000	0	0	2 Kali	108.600.000
1 5 1	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran						3.884.999.357	0	0		3.902.299.368
1 5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	689.567.500	0	0	100	682.367.500
1 5 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	17.160.000	0	0	12 bulan	17.160.000
1 5 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis antor yang Cukup	12 bulan bulan	30.243.400	0	0	12 bulan bulan	30.243.400
1 5 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetak dan Penggandaan	12 bulan	11.200.000	0	0	12 bulan	10.000.000
1 5 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	86.250.000	0	0	12 bulan	86.250.000
1 5 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	504.684.100	0	0	12 bulan	498.684.100
1 5 1	19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan belanja bahan pembersih	12 bulan	32.030.000	0	0	12 bulan	32.030.000
1 5 1	28 Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan pembelian alat-alat listrik dan elektronik	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	8.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	317.731.857	0	0	100	307.731.867
1 5 2 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (note book, printer, AC, PC dll)	6 buah	60.000.000	0	0	6 buah	60.000.000
1 5 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	20.000.000	0	0	12 bulan	20.000.000
1 5 2 45	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	12 bulan	13.000.000	0	0	12 bulan	3.000.010
1 5 2 46	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu penyediaan suku cadang, BBM/Gas/Pelumas untuk semua mobil Dinas Kepala Satuan	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	30.000.000
1 5 2 47	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional SATPOL PP dan DAMKAR			TAPIN	Waktu penyediaan suku cadang, BBM/gas/pelumas untuk semua mobil operasional dan kendraan roda 2	12 bulan	194.731.857	0	0	12 bulan	194.731.857
1 5 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	9.650.000	0	0	100	8.850.000
1 5 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah dokumen keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	3.500.000	0	0	2 Dokumen	3.500.000
1 5 6 6	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Dokumen	6.150.000	0	0	11 Dokumen	5.350.000
1 5 26	Program peningkatan keamanan, ketertarikan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan daerah	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketertarikan, serta Perlindungan Masyarakat		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	2.249.000.000	0	0	100	2.234.600.000
1 5 26 1	Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik Lainnya			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pengamanan terhadap kegiatan kedinasan, kemasyarakatan dan kegiatan publik Lainnya	12 bulan	57.400.000	0	0	12 bulan	57.400.000
1 5 26 2	Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan Tamu - tamu VIP dan pejabat penting lainnya			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pengawalan terhadap unsur muspida serta aset-aset penting yang ada di Kab. Tapin	12 bulan	138.000.000	0	0	12 bulan	138.000.000
1 5 26 3	Pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan			TAPIN	Jumlah tenaga pendukung (kontrak) yang melaksanakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	1.998.600.000	0	0	12 bulan	1.984.200.000
1 5 26 6	Pelayanan Kerugian Materil			TAPIN	waktu Pelayanan Kerugian Materil	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 26 7	Penanganan Ketertiban Umum, Patroli Rutin di Wilayah Kab.Tapin			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pengamanan terhadap unsur muspida serta aset-aset penting yang ada di Kab. Tapin	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	50.000.000
1 5 27	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya keamanan daerah	Penanggulangan Bencana Kebakaran		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	395.600.000	0	0	100	411.800.000
1 5 27 1	Lomba Keterampilan Pemadam Kebakaran Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten			TAPIN	Jumlah kegiatan lomba keterampilan pemadam kebakaran tingkat provinsi dan Kabupaten	2 kegiatan	1.000.000	0	0	2 kegiatan	1.000.000
1 5 27 2	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kebakaran			TAPIN	Waktu penyediaan pemeliharaan dan perawatan sarpras kebakaran	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	10.000.000
1 5 27 3	Posko Siaga Bencana Kebakaran			TAPIN	Waktu penyediaan posko siaga bencana kebakaran perumahan, hutan dan lahan	12 bulan	351.600.000	0	0	12 bulan	367.800.000
1 5 27 4	Pelatihan Aparat Pemadam Kebakaran			TAPIN	Jumlah aparat Damkar yang mengikuti Pelatihan	12 orang	18.000.000	0	0	12 orang	18.000.000
1 5 27 5	Penyediaan Jasa Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	15.000.000
1 5 29	Program peningkatan penegakan Perda dan Perkada	Meningkatnya keamanan daerah	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketertarikan, serta Perlindungan Masyarakat		Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100%	122.100.000	0	0	100	152.100.000
1 5 29 4	Operasi Penyakit Masyarakat			TAPIN	Waktu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyakit masyarakat	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	51.000.000
1 5 29 5	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perkada	12 bulan	28.200.000	0	0	12 bulan	28.200.000



Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 5 29 6	Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda & Perkada			TAPIN	Waktu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	29.000.000
1 5 29 7	Pembuatan Raperda dan Revisi Perda			TAPIN	waktu Pembuatan Raperda dan Revisi Perda	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 29 8	Penyelidikan dugaan adanya Pelanggaran Perda dan Perkada			TAPIN	waktu Penyelidikan dugaan adanya Pelanggaran Perda dan Perkada	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 29 9	Penyidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada			TAPIN	waktu Penyidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 29 10	Kerjasama dengan aparat hukum dan instansi terkait dalam penegakan Perda dan Perkada			TAPIN	waktu Kerjasama dengan aparat hukum dan instansi terkait dalam penegakan Perda dan Perkada	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 29 12	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada			TAPIN	waktu Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 29 13	Sosialisasi - Penyuluhan Perda & Perkada			TAPIN	Waktu penyediaan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Pekada di Kabupaten Tapin	12 bulan	18.900.000	0	0	12 bulan	18.900.000
1 5 30	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	Meningkatnya keamanan daerah	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat		- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	101.350.000	0	0	100	104.850.001
1 5 30 1	Pembinaan Korsi Musik Satpol PP			TAPIN	Waktu pelaksanaan Pembinaan Satkorsik Satpol PP Kabupaten Tapin	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	24.000.000
1 5 30 2	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan Kebangsaan			TAPIN	Waktu pelaksanaan pentas semi budaya, Festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	12 bulan	16.050.000	0	0	12 bulan	21.050.000
1 5 30 3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah			TAPIN	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	122 orang	30.000.000	0	0	122 orang	29.500.000
1 5 30 6	Pembinaan Penyuluhan Keamanan Lingkungan			TAPIN	waktu Pembinaan Penyuluhan Keamanan Lingkungan	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 30 7	Survey Indeks rasa aman			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Survey Indeks rasa aman	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
1 5 30 8	Pembinaan dan Pengawasan Poskamling			TAPIN	Jumlah Pos Kamling yang dibina	12 unit	15.300.000	0	0	12 unit	15.300.000
1 5 30 9	Pemberdayaan Linmas			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Linmas	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	2.000.001
1 5 30 10	Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas dan Damkar			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas dan Damkar	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	3.000.000
1 5 2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2.234.688.999	0	0		2.586.100.000
1 5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	797.378.999	0	0	90	956.100.000
1 5 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	1.000.000
1 5 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	74.160.000	0	0	12 bulan	75.000.000
1 5 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			TAPIN	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	64.800.000	0	0	12 bulan	65.000.000
1 5 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	25.765.300	0	0	12 bulan	33.000.000
1 5 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	28.000.000	0	0	12 bulan	29.700.000
1 5 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan Makanan dan minuman	12 bulan	94.000.000	0	0	12 bulan	96.600.000
1 5 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	410.973.699	0	0	12 bulan	540.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 5 1 21	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Tapin Expo	1 kali	30.500.000	0	0	1 kali	32.100.000
1 5 1 24	Penyediaan peralatan kebersihan kantor			TAPIN	waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	3.080.000	0	0	12 bulan	3.500.000
1 5 1 25	penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Ekspedisi/Pengiriman	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	10.000.000
1 5 1 27	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	57.600.000	0	0	12 bulan	57.600.000
1 5 1 28	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.500.000	0	0	12 bulan	12.600.000
1 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	234.700.000	0	0	90	226.300.000
1 5 2 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	106.700.000	0	0	12 bulan	59.300.000
1 5 2 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer Peripheralsnya			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralsnya	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	10.000.000
1 5 2 45	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	17.000.000
1 5 2 46	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	110.000.000	0	0	12 bulan	140.000.000
1 5 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%	6.385.000	0	0	90	7.550.000
1 5 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	3.695.000	0	0	2 laporan	3.700.000
1 5 6 6	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	2.690.000	0	0	8 laporan	3.850.000
1 5 28	Program penanganan bencana	Meningkatnya keamanan daerah	Menurunkan Indeks Risiko Bencana		Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	80%	935.250.000	0	0	80	1.067.700.000
1 5 28 1	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)			TAPIN	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12 bulan	152.550.000	0	0	12 bulan	154.300.000
1 5 28 4	Pengelolaan Peralatan dan Logistik			TAPIN	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12 bulan	60.000.000	0	0	12 bulan	104.500.000
1 5 28 6	Operasional Dapur Umum lapangan			TAPIN	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12 bulan	42.500.000	0	0	12 bulan	43.000.000
1 5 28 9	Pengelolaan Bencana/posko			TAPIN	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2 kali	680.200.000	0	0	2 kali	765.900.000
1 5 31	Program pencegahan dini dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya keamanan daerah	Menurunkan Indeks Risiko Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	70%	224.650.000	0	0	80	287.750.000
1 5 31 4	Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			TAPIN	waktu Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	12 bulan	8.900.000	0	0	12 bulan	11.000.000
1 5 31 8	Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB			TAPIN	waktu Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	12 bulan	8.400.000	0	0	12 bulan	13.900.000
1 5 31 10	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah			TAPIN	waktu Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	12 bulan	19.000.000	0	0	12 bulan	33.000.000
1 5 31 11	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana			TAPIN	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1 desa	36.800.000	0	0	1 desa	53.500.000
1 5 31 13	Apel Kesiapsiagaan Bencana			TAPIN	waktu Apel Kesiapsiagaan Bencana	12 bulan	72.050.000	0	0	12 bulan	98.400.000
1 5 31 14	Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)			TAPIN	waktu Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	12 bulan	31.900.000	0	0	12 bulan	35.200.000
1 5 31 15	Sosialisasi Kebencanaan			TAPIN	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	4 kali	32.600.000	0	0	4 kali	40.000.000
1 5 31 18	Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan			TAPIN	waktu Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	2.750.000
1 5 32	Program Pasca Bencana	Meningkatnya keamanan daerah	Menurunkan Indeks Risiko Bencana		Persentase daerah terdampak bencana yang pulih	70%	36.325.000	0	0	80	40.700.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5 32 1	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana			TAPIN	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	21.025.000	0	0	15	21.500.000
5 32 5	Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi			TAPIN	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	2 kali	15.300.000	0	0	2 kali	19.200.000
5 3	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						1.032.432.914	0	0		152.948.306
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	504.028.014	0	0	100	124.595.006
5 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.250.000	0	0	12 bulan	2.465.000
5 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	34.000.000	0	0	12 bulan	22.330.000
5 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			TAPIN	waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	45.210.000	0	0	12 bulan	-
5 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan alat tulis kantor	12 bulan	27.234.800	0	0	12 bulan	-
5 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.900.000	0	0	12 bulan	9.900.000
5 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu ketersediaan makanan/minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	50.125.000	0	0	12 bulan	56.100.000
5 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	270.908.214	0	0	12 bulan	-
5 1 21	Tapin Expo			TAPIN	waktu Tapin expo	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	-
5 1 27	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan gedung kantor	12 bulan	33.400.000	0	0	12 bulan	33.800.000
5 1 28	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	6
5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	93.050.000	0	0	100	28.353.300
5 2 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah pengadaan AC, Personal Computer dan Lap Top	12 unit	45.700.000	0	0	12 unit	-
5 2 17	Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus			TAPIN	waktu Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	12 bulan	9.750.000	0	0	12 bulan	-
5 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	10.600.000	0	0	12 bulan	9.650.000
5 2 31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9.000.000	0	0	12 bulan	1.100.000
5 2 46	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	18.000.000	0	0	12 bulan	17.603.300
5 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	15.509.900	0	0	100	-
5 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	6.450.000	0	0	2 laporan	-
5 6 6	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 laporan	9.059.900	0	0	13 laporan	-
5 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80%	127.125.000	0	0	80	-
5 17 4	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			TAPIN	Jumlah peserta rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	96 org/kali	31.255.000	0	0	96 org/kali	-



Kode	Usuran /Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 5 17	5 Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)			TAPIN	Jumlah peserta rakor PPWK	60 org/kali	51.870.000	0	0	60 org/kali	-
1 5 17	6 Sosialisasi Pembauran Kebangsaan			TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	100 org/keg	16.900.000	0	0	100 org/keg	-
1 5 17	7 Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif Ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara			TAPIN	Jumlah peserta Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	120 org/keg	16.800.000	0	0	120 org/keg	-
1 5 17	8 Revolusi Mental			TAPIN	waktu Revolusi Mental	12 bulan	7.600.000	0	0	12 bulan	-
1 5 17	9 Gelar adat budaya Antar Suku dalam rangka karnaval Hari Jadi Kabupaten Tapin			TAPIN	waktu Gelar adat budaya Antar Suku dalam rangka karnaval Hari Jadi Kabupaten Tapin	12 bulan	2.700.000	0	0	12 bulan	-
1 5 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	70.050.000	0	0	100	-
1 5 21	11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik			TAPIN	waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik	12 bulan	20.600.000	0	0	12 bulan	-
1 5 21	12 Raker / Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik			TAPIN	waktu Raker / Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik	12 bulan	13.000.000	0	0	12 bulan	-
1 5 21	13 Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin			TAPIN	waktu Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin	12 bulan	19.950.000	0	0	12 bulan	-
1 5 21	15 Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah			TAPIN	waktu Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah	12 bulan	8.250.000	0	0	12 bulan	-
1 5 21	16 Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat			TAPIN	waktu Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat	12 bulan	8.250.000	0	0	12 bulan	-
1 5 23	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas		- Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	80%	89.395.000	0	0	80	-
1 5 23	1 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			TAPIN	waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	45.445.000	0	0	12 bulan	-
1 5 23	3 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			TAPIN	Jumlah peserta penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	150 org/keg	36.850.000	0	0	150 org/keg	-
1 5 23	4 Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya			TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	50 org/keg	7.100.000	0	0	50 org/keg	-
1 5 24	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas		Persentase Ormas yang terdata	85%	51.550.000	0	0	90	-
1 5 24	1 Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas			TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	70 org/keg	10.575.000	0	0	70 org/keg	-
1 5 24	2 Sistem Informasi ORMAS			TAPIN	Waktu pengelolaan Sistem Informasi Informasi Ormas	12 bulan	28.100.000	0	0	12 bulan	-
1 5 24	5 Saresehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan			TAPIN	Jumlah peserta Sarasehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan	60 org/keg	10.375.000	0	0	60 org/keg	-
1 5 24	6 Sistem Informasi Online Layanan Administrasi(SIOLA)			TAPIN	waktu Sistem Informasi Online Layanan Administrasi(SIOLA)	12 bulan	2.500.000	0	0	12 bulan	-
1 5 33	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%	81.725.000	0	0	80	-
1 5 33	1 Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin			TAPIN	Waktu pengawasan dini pemerintah daerah di Kab. Tapin	12 bulan	21.575.000	0	0	12 bulan	-
1 5 33	3 Penanganan Konflik Sosial			TAPIN	Waktu penanganan konflik sosial	12 bulan	50.150.000	0	0	12 bulan	-
1 5 33	4 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tapin			TAPIN	Waktu Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kab. Tapin	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Usuran /Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 6 1	Dinas Sosial						2.512.345.540	0	0		480.000
1 6	Sosial										
1 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	752.606.640	0	0	100	-
1 6 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu pelayanan Surat Menyurat (Bulan)	12 Bulan	510.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 Bulan	22.000.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	Waktu penyediaan jasa administrasian keuangan dan jasa pengolahan data perencanaan dan pelaporan (Bulan)	12 Bulan	62.500.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor yang cukup (Bulan)	12 Bulan	59.505.400	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4.450.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.000.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai tamu dan rapat	12 Bulan	67.197.500	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu penyediaan rapat dan koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	484.143.740	0	0	12 Bulan	-
1 6 1	19 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	1 Kali	25.000.000	0	0	1 Kali	-
1 6 1	20 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih	12 Bulan	25.300.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	60.550.000	0	0	100	-
1 6 2	11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	3.050.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	48.000.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 2	28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	4.500.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	13.420.000	0	0	100	-
1 6 6	5 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun			TAPIN	jumlah laporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	12 bulan	5.940.000	0	0	12 bulan	-
1 6 6	6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	7.480.000	0	0	12 bulan	-
1 6 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,10%	389.507.600	0	0	55,12	-
1 6 15	4 Pedampingan Program Keluarga Harapan (PKH)			TAPIN	jumlah laporan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 bulan	175.565.000	0	0	12 bulan	-
1 6 15	5 Verifikasi dan Validasi Data Terpadu			TAPIN	Jumlah laporan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	12 bulan	183.022.600	0	0	12 bulan	-
1 6 15	6 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			TAPIN	Jumlah Laporan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 bulan	30.830.000	0	0	12 bulan	-
1 6 15	7 Verifikasi dan Validasi Data PBI			TAPIN	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PBI	1 laporan	90.000	0	0	1 laporan	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 6 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	2,28%	293.590.000	0	0	2,29	480.000
1 6 16	10 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa			TAPIN	Waktu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 Bulan	83.650.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 16	12 Bedah Rumah Keluarga Miskin			TAPIN	Jumlah rumah tidak layak huni yang diidentifikasi dan diprioritaskan untuk direhab	25 Rumah	209.940.000	0	0	25 Rumah	480.000
1 6 17	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	35,10%	85.580.000	0	0	35,12	-
1 6 17	7 Pendampingan Sosial/Asistensi Lanjut Usia dan Orang Terlantar			TAPIN	Jumlah laporan Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Jaminan Sosial	1 Laporan	68.345.000	0	0	1 Laporan	-
1 6 17	9 Peningkatan Pemberdayaan PMKS			TAPIN	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan bimbingan dalam pengembangan bakat dan keterampilan	15 orang	9.075.000	0	0	15 orang	-
1 6 17	10 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar			TAPIN	Jumlah Anak Terlantar yang magang setelah mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Bakat	6 Orang	8.160.000	0	0	6 Orang	-
1 6 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	3,04%	70.985.000	0	0	3,06	-
1 6 18	6 Bimbingan Sosial dan Keterampilan Penyandang Cacat melalui LBK			TAPIN	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bimbingan dan Keterampilan Melalui LBK	15 orang	52.235.000	0	0	15 orang	-
1 6 18	7 Praktek Belajar Kerja Penyandang Cacat			TAPIN	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terampil dengan mengikuti praktek Belajar kerja	5 Orang	18.750.000	0	0	5 Orang	-
1 6 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	56,16%	545.518.300	0	0	56,17	-
1 6 21	5 Pemeliharaan TMP Puspa Raya dan Ziarah Pendiir Kabupaten Tapin			TAPIN	Waktu Pemeliharaan TMP Ziarah Pendiir	12 Bulan	32.890.000	0	0	12 Bulan	-
1 6 21	9 Pemberdayaan Karang Taruna			TAPIN	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	137 KT	84.390.000	0	0	137 KT	-
1 6 21	10 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			TAPIN	Jumlah PSM yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	33 orang	69.989.900	0	0	33 orang	-
1 6 21	12 Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna	5 Kali	256.460.000	0	0	5 Kali	-
1 6 21	13 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			TAPIN	Jumlah TKSK yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS dan memperoleh insentif	144 org/bln	74.808.400	0	0	144 org/bln	-
1 6 21	14 Pemberdayaan/Pengembangan LK3			TAPIN	Jumlah Masyarakat bermasalah sosial psikologis yang dilayani dengan baik melalui LK3	15 orang	26.980.000	0	0	15 orang	-
1 6 22	Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	17.200.000	0	0	100	-
1 6 22	1 Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan			TAPIN	Jumlah Panti Asuhan yang memberikan pelayanan dengan baik	7 PA	17.200.000	0	0	7 PA	-
1 6 23	Program Rehabilitasi Sosial	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	10,10%	283.388.000	0	0	10,12	-
1 6 23	2 Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum			TAPIN	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang dilayani dengan baik	5 Orang	5.390.000	0	0	5 Orang	-
1 6 23	3 Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Penyakit Kronis dan psikotik			TAPIN	Jumlah Penyandang Kronis dan Psikotik yang dilayani dengan baik	5 orang	8.263.000	0	0	5 orang	-
1 6 23	5 Verifikasi dan Validasi Data PMKS			TAPIN	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PMKS	1 laporan	90.000	0	0	1 laporan	-



Kode	Usuran /Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 6 23 6	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)			TAPIN	Jumlah Perempuan Rawan Sosial ekonomi (PRSE) yang mendapatkan Pelayanan Sosial dengan baik	14 orang	3.645.000	0	0	14 orang	-
1 6 23 7	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)			TAPIN	Jumlah PMKS yang dilayani dengan baik atau memerlukan program sosial daerah dan pusat melalui SLRT	300 Orang	266.000.000	0	0	300 Orang	-
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2 1 1	Dinas Tenaga Kerja						1.416.175.000	0	0		1.237.194.958
2 1	Tenaga Kerja										
2 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	634.094.075	0	0	100	964.824.950
2 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	64.800.000	0	0	12 bulan	-
2 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	83.182.400	0	0	12 bulan	81.561.600
2 1 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	waktu penyediaan cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.700.000	0	0	12 bulan	11.400.000
2 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	64.360.000	0	0	12 bulan	64.360.000
2 1 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	357.800.675	0	0	12 bulan	716.001.350
2 1 1 19	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	25.000.000
2 1 1 22	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	33.251.000	0	0	12 bulan	66.502.000
2 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	64.050.000	0	0	100	8
2 1 2 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	jumlah peralatan gedung kantor	54 unit	100.000	0	0	54 unit	5
2 1 2 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			TAPIN	waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	-
2 1 2 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	12 bulan	33.850.000	0	0	12 bulan	-
2 1 2 46	Rehab Gedung			TAPIN	jumlah gedung yang direhab	1 buah	100.000	0	0	1 buah	3
2 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	7.680.000	0	0	100	-
2 1 6 5	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun			TAPIN	waktu Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	12 bulan	3.840.000	0	0	12 bulan	-
2 1 6 6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	3.840.000	0	0	12 bulan	-
2 1 18	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50%	281.609.200	0	0	60	-
2 1 18 1	Bursa Kerja Online			TAPIN	jumlah pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	2500 orang	109.000.000	0	0	2500 orang	-
2 1 18 2	Penyuluhan Informasi Pasar Kerja			TAPIN	A Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja	80 Orang	20.715.000	0	0	80 Orang	-
2 1 18 3	Pelatihan Kewirausahaan			TAPIN	A jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	20 Orang	10.191.200	0	0	20 Orang	-
2 1 18 4	Pelatihan Teknologi Tepat Guna			TAPIN	jumlah wirausaha baru yang mendapat pelatihan	10 Orang	20.283.000	0	0	10 Orang	-
2 1 18 5	Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai			TAPIN	Jumlah peserta sosialisasi tenaga kerja siap pakai	50 Orang	17.850.000	0	0	50 Orang	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 1 18	6	Padat Karya Produktif		TAPIN	Jumlah masyarakat/pencari kerja yang diberikan fasilitas sistem pendanaan	22 orang	86.580.000	0	0	22 orang	-
2 1 18	7	Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)		TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi PMI (Pekerja Migran Indonesia)	25 Orang	6.990.000	0	0	25 Orang	-
2 1 18	8	Tim penanggulangan PMI non prosedural (Salgas)		TAPIN	jumlah orang	23 orang	10.000.000	0	0	23 orang	-
2 1 19		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	154.480.000	0	0	50	272.370.000
2 1 19	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		TAPIN	waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 bulan	66.750.000	0	0	12 bulan	267.000.000
2 1 19	3	Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan		TAPIN	waktu Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	12 bulan	1.790.000	0	0	12 bulan	5.370.000
2 1 19	4	Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripatit		TAPIN	waktu Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripatit	12 bulan	11.800.000	0	0	12 bulan	-
2 1 19	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan		TAPIN	waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	12 bulan	21.800.000	0	0	12 bulan	-
2 1 19	6	Dewan Pengupahan		TAPIN	waktu Dewan Pengupahan	12 bulan	29.590.000	0	0	12 bulan	-
2 1 19	7	Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal		TAPIN	waktu Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal	12 bulan	22.750.000	0	0	12 bulan	-
2 1 20		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	274.261.725	0	0	75	-
2 1 20	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin		TAPIN	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan	32 Orang	220.361.725	0	0	32 Orang	-
2 1 20	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK Tapin		TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana BLK Tapin	12 bulan	53.900.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					2.839.658.449	0	0		-
2 2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2 2 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.420.234.180	0	0	100	-
2 2 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		TAPIN	Waktu Penyediaan Benda Pos dan Jasa Pengiriman	12 bulan	550.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik		TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	51.500.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	39.800.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	43.545.700	0	0	12 bulan	-
2 2 1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		TAPIN	Waktu ketersediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	6.565.287	0	0	12 bulan	-
2 2 1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		TAPIN	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1	17	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	Waktu ketersediaan Konsumsi Harian Pegawai Rapat dan Tamu	11 bulan	65.350.000	0	0	11 bulan	-
2 2 1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	Waktu Ketersediaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	1.138.223.193	0	0	12 bulan	-
2 2 1	19	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor dan bahan pembersih		TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan Pembersih	12 bulan	44.700.000	0	0	12 bulan	-
2 2 1	20	Tapin Expo		TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	-
2 2 1	21	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja		TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	91.370.000	0	0	100	-
2 2 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	21.370.000	0	0	12 bulan	-
2 2 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12 bulan	62.000.000	0	0	12 bulan	-
2 2 2	45 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 buah	8.000.000	0	0	24 buah	-
2 2 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	15.000.000	0	0	100	-
2 2 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	13 bh	7.500.000	0	0	13 bh	-
2 2 6	5 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	2 bh	7.500.000	0	0	2 bh	-
2 2 20	Program Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	90%	94.410.000	0	0	90	-
2 2 20	1 Asistensi Pendampingan dan Advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan			TAPIN	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	3.590.000	0	0	8 Kasus	-
2 2 20	2 Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan			TAPIN	Jumlah Kasus yang ditangani Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan	12 Kasus	62.660.000	0	0	12 Kasus	-
2 2 20	3 Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat di Kecamatan			TAPIN	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi PTT Perlindungan dan Anak Berbasis Masyarakat di kecamatan	100 Orang	9.840.000	0	0	100 Orang	-
2 2 20	4 Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan			TAPIN	waktu Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan	12 bulan	3.590.000	0	0	12 bulan	-
2 2 20	5 Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA			TAPIN	waktu Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA	12 bulan	7.340.000	0	0	12 bulan	-
2 2 20	6 Koordinasi Gugus Tugas TPPO dan Kampanye Aksi Damai TPPO dan Kekerasan Lainnya			TAPIN	waktu Koordinasi Gugus Tugas TPPO dan Kampanye Aksi Damai TPPO dan Kekerasan Lainnya	12 bulan	7.390.000	0	0	12 bulan	-
2 2 21	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	90%	46.120.000	0	0	90	-
2 2 21	1 Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap anak			TAPIN	Jumlah Peserta Yang Memahami Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	50 Orang	7.470.000	0	0	50 Orang	-
2 2 21	2 Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap anak korban kekerasan			TAPIN	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	3.590.000	0	0	8 Kasus	-
2 2 21	3 Asistensi Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum			TAPIN	waktu Asistensi Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum	12 bulan	3.590.000	0	0	12 bulan	-
2 2 21	4 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan UPTD PPA			TAPIN	waktu Monitoring dan Evaluasi Pelayanan UPTD PPA	12 bulan	9.940.000	0	0	12 bulan	-
2 2 21	5 Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan (GNAKSA)			TAPIN	waktu Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan (GNAKSA)	12 bulan	11.140.000	0	0	12 bulan	-
2 2 21	6 Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat			TAPIN	waktu Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	12 bulan	10.390.000	0	0	12 bulan	-
2 2 22	Program Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	2,30%	315.307.700	0	0	2,4	-
2 2 22	1 Pembinaan Keaksaraan Al-Qur'an bagi perempuan			TAPIN	Jumlah Peserta Tadarusan dan Majelis Taklim Perempuan yang Mengikuti Khataman Massal Al-Quran	1000 Orang	125.412.800	0	0	1000 Orang	-
2 2 22	2 Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan			TAPIN	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	72 Orang	12.307.300	0	0	72 Orang	-
2 2 22	3 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Maulid Nabi Muhammad SAW			TAPIN	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Melalui Maulid Nabi Muhammad SAW	181 orang	22.014.100	0	0	181 orang	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 2 22	4 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Gebyar Ramadhan			TAPIN	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan	145 orang	26.688.500	0	0	145 orang	-
2 2 22	5 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Miraj Nabi Muhammad SAW			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah peserta kegiatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui isra miraj	181 orang	21.260.000	0	0	181 orang	-
2 2 22	6 Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha			TAPIN	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Memahami (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	109 Orang	14.865.000	0	0	109 Orang	-
2 2 22	7 Pelatihan Usaha Rumah Perempuan			TAPIN	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan dibidang Usaha Rumah Perempuan	109 Orang	20.215.000	0	0	109 Orang	-
2 2 22	8 Optimalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)			TAPIN	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG	45 SKPD	36.195.000	0	0	45 SKPD	-
2 2 22	9 Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumah Perempuan			TAPIN	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumah perempuan	12 kecamatan	36.350.000	0	0	12 kecamatan	-
2 2 23	Program Kualitas Keluarga	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Persentase perkawinan usia anak	2,30%	490.195.300	0	0	2,2	-
2 2 23	3 Peringatan Hari Kartini			TAPIN	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Kartini	50 kelompok	85.220.000	0	0	50 kelompok	-
2 2 23	4 Peringatan Hari Ibu			TAPIN	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Ibu	50 kelompok	85.280.000	0	0	50 kelompok	-
2 2 23	8 Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak			TAPIN	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak dan Penatalaksanaan Puspaga	350 orang	47.000.000	0	0	350 orang	-
2 2 23	9 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan			TAPIN	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan	12 Kecamatan	63.895.300	0	0	12 Kecamatan	-
2 2 23	10 Pembentukan dan Penatalaksanaan PUSPAGA			TAPIN	waktu Pembentukan dan Penatalaksanaan PUSPAGA	12 bulan	98.770.000	0	0	12 bulan	-
2 2 23	11 Peningkatan Kualitas Keluarga			TAPIN	waktu Peningkatan Kualitas Keluarga	12 bulan	110.030.000	0	0	12 bulan	-
2 2 24	Program Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	90%	99.079.000	0	0	90	-
2 2 24	1 Pengembangan dan Evaluasi Sistem Informasi Data Kekerasan			TAPIN	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasan	1 Kali	50.499.000	0	0	1 Kali	-
2 2 24	2 Pembuatan Evaluasi Data Gender Anak			TAPIN	Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak (dokumen b)	1 dokumen	29.740.000	0	0	1 dokumen	-
2 2 24	3 Sosialisasi dan Workshop up Dating Data Kekerasan Perempuan dan anak			TAPIN	Jumlah Peserta yang mamahami Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Elektronik	40 Orang	6.710.000	0	0	40 Orang	-
2 2 24	4 Sosialisasi dan Pembaharuan Forum Data Gender dan Anak			TAPIN	waktu Sosialisasi dan Pembaharuan Forum Data Gender dan Anak	12 bulan	7.390.000	0	0	12 bulan	-
2 2 24	5 Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan			TAPIN	waktu Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	12 bulan	4.740.000	0	0	12 bulan	-
2 2 25	Program pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak		Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	8,30%	267.942.269	0	0	8,3	-
2 2 25	1 Pembinaan Dan Pembekalan Forum Anak			TAPIN	Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang dibina	12 Kecamatan	19.890.000	0	0	12 Kecamatan	-
2 2 25	2 Seleksi Forum Anak			TAPIN	Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak dan Lomba Inovasi & Kreativitas	15 anak	126.100.000	0	0	15 anak	-
2 2 25	3 Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak			TAPIN	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak	4 kecamatan	7.436.000	0	0	4 kecamatan	-
2 2 25	4 Advokasi Dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak (PRA)			TAPIN	Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA	13 puskesmas	48.523.569	0	0	13 puskesmas	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 2 25	5 Sinkronisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)			TAPIN	Jumlah SKPD sebagai Anggota Gugus Tugas KLA	30 SKPD	24.750.000	0	0	30 SKPD	-
2 2 25	6 Pelatihan Kha Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)			TAPIN	Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Kha Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	54 orang	7.620.000	0	0	54 orang	-
2 2 25	7 Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya, Dan Sekolah Ramah Anak			TAPIN	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan Sekolah Ramah Anak	54 Orang	7.320.000	0	0	54 Orang	-
2 2 25	8 Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)			TAPIN	Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Ruang Bermain Ramah Anak	21 Orang	4.590.000	0	0	21 Orang	-
2 2 25	9 Pola Asuh Anak dan Remaja			TAPIN	Jumlah Peserta yang memahami Tentang Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	72 orang	16.772.700	0	0	72 orang	-
2 2 25	10 KajiTiru Pola Asuh Anak dan Remaja			TAPIN	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pola Asuh Anak dan Remaja	15 orang	4.940.000	0	0	15 orang	-
2 3 1	Dinas Ketahanan Pangan						1.338.982.198	0	0		1.424.210.000
2 3	Pangan										
2 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	605.109.358	0	0	100%	647.000.000
2 3 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	45.000.000	0	0	12 Bulan	45.000.000
2 3 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Di sediakan	12 Bulan	39.915.200	0	0	12 Bulan	42.000.000
2 3 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Di sediakan	12 Bulan	11.000.000	0	0	12 Bulan	13.000.000
2 3 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	78.575.198	0	0	12 Bulan	82.000.000
2 3 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Rapat-Rapat Konsultasi/Koordinasi	12 Bulan	313.618.960	0	0	12 Bulan	365.000.000
2 3 1	19 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	5 Orang	82.000.000	0	0	5 Orang	57.000.000
2 3 1	20 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Pameran Pembangunan	1 Pameran	25.000.000	0	0	1 Pameran	31.000.000
2 3 1	21 Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Peralatan dan Komponen Listrik Untuk Kantor	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	12.000.000
2 3 2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100 %	171.072.040	0	0	100%	197.210.000
2 3 2	9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	8 Laptop dan Printer	66.060.000	0	0	8 Laptop dan Printer	115.710.000
2 3 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Jumlah Waktu Kendaraan Dinas/Operasional Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan	82.000.000	0	0	12 Bulan	55.000.000
2 3 2	26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah Waktu Perlengkapan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan	7.000.000	0	0	12 Bulan	10.000.000
2 3 2	28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan	13.512.040	0	0	12 Bulan	14.000.000
2 3 2	45 Pemeliharaan Taman dan Penghijauan Kantor			TAPIN	Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Taman	12 Bulan	2.500.000	0	0	12 Bulan	2.500.000
2 3 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100 %	85.100.100	0	0	100%	85.500.000
2 3 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	45.800.100	0	0	12 bulan	64.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 6	6			TAPIN	waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	12 bulan	39.300.000	0	0	12 bulan	21.500.000
3 21	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup		Ketersediaan Pangan Utama	14949341 kg/kapita	176.525.700	0	0	15248327	185.700.000
3 21	1			TAPIN	Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	10 Ton	21.150.100	0	0	10 Ton	18.000.000
3 21	2			TAPIN	Jumlah Rapat Koordinasi Dengan Dewan Ketahanan Pangan	2 kali Rapat	8.150.000	0	0	2 kali Rapat	8.600.000
3 21	4			TAPIN	Terantisipasinya Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	1 Laporan	40.600.100	0	0	1 Laporan	45.000.000
3 21	5			TAPIN	Jumlah Laporan Data Base	1 Dokumen	5.300.100	0	0	1 Dokumen	7.000.000
3 21	7			TAPIN	Jumlah Terbinanya Desa Mapan	1 Laporan	63.325.100	0	0	1 Laporan	64.800.000
3 21	8			TAPIN	Jumlah Dokumen Data dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	1 Laporan	4.200.100	0	0	1 Laporan	5.000.000
3 21	9			TAPIN	Jumlah Tersalurannya Dana DPM LUEP dan LDPM/Sajian Data Distribusi Pangan (Gapoktan)	7 Gapoktan	9.000.100	0	0	7 Gapoktan	10.000.000
3 21	10			TAPIN	Jumlah Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.950.000	0	0	1 Laporan	2.300.000
3 21	12			TAPIN	Data Analisis Ketersediaan (BNBM,PPH,HBKN dan Analisis)	1 Laporan	22.850.100	0	0	1 Laporan	25.000.000
3 22	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	100%	301.175.000	0	0	100	308.800.000
3 22	2			TAPIN	Jumlah Kelompok yg Dibina untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	2 kali Lomba	74.550.000	0	0	2 kali Lomba	81.000.000
3 22	3			TAPIN	Jumlah Data dan Analisis PPH Konsumsi dan PPM	1 Laporan	86.375.000	0	0	1 Laporan	69.200.000
3 22	4			TAPIN	waktu Hari Pangan Sedunia	12 bulan	18.100.000	0	0	12 bulan	18.100.000
3 22	5			TAPIN	Jumlah KWT yg di bina untuk pengembangan pangan B2SA	7 KWT	85.850.000	0	0	7 KWT	100.500.000
3 22	6			TAPIN	Jumlah Sampel Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	3 Sampel	36.300.000	0	0	3 Sampel	40.000.000
5 1	Dinas Lingkungan Hidup						10.751.037.800	0	0		11.074.225.442
5	Lingkungan Hidup										
5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapat kan pelayanan administrasi perkantoran	100%%	1.043.063.180	0	0	100%	258.332.317
5 1	2			TAPIN	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air	12 bulan	183.750.000	0	0	12 bulan	190.042
5 1	10			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	69.219.900	0	0	12 bulan	70.411.515
5 1	11			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.000.000
5 1	17			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	96.720.000	0	0	11 bulan	96.720.000
5 1	18			TAPIN	Waktu koordinasi kedalam dan keluar daerah yang disediakan	12 bulan	514.773.280	0	0	12 bulan	519.457
5 1	19			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan	12 bulan	92.400.000	0	0	12 bulan	92.4
5 1	20			TAPIN	Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat	1 stand	20.000.000	0	0	1 stand	25.000.000
5 1	22			TAPIN	Jumlah PTT kesekretariatan yang disediakan	36 bulan	61.200.000	0	0	36 bulan	61.200.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 5 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	132.012.500	0	0	100%	138.613.750
2 5 2	3 pembangunan gedung kantor			TAPIN	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	0	0	0	1 unit	-
2 5 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan	12 bulan	10.400.000	0	0	12 bulan	10.400.000
2 5 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang Disediakan	12 bulan	46.500.000	0	0	12 bulan	46.500.000
2 5 2	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan	12 bulan	65.112.500	0	0	12 bulan	71.713.750
2 5 2	45 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	6 unit	10.000.000	0	0	8 unit	10.000.000
2 5 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	12.500.000	0	0	100%	8.831.803
2 5 6	5 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 laporan	5.000.000	0	0	2 laporan	5.000.000
2 5 6	6 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat	14 laporan	7.500.000	0	0	14 laporan	3.831.803
2 5 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase cakupan area pelayanan	58,33%	6.324.898.000	0	0	66,67	6.824.750.000
2 5 15	15 Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah			TAPIN	Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan	12 bulan	26.000.000	0	0	12 bulan	34.000.000
2 5 15	16 Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan			TAPIN	Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan	12 bulan	177.000.000	0	0	12 bulan	179.300.000
2 5 15	17 Penyusunan Kebijakan Penyimpanan Sementara Limbah B3			TAPIN	Jumlah rekomendasi dokumen perijinan tempat penyimpanan sementara LB3	8 dokumen	1.500.000	0	0	10 dokumen	4.400.000
2 5 15	24 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			TAPIN	Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	12 bulan	225.000.000	0	0	12 bulan	229.000.000
2 5 15	26 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dan Perkotaan			TAPIN	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang Disediakan	12 bulan	4.698.300.000	0	0	12 bulan	4.737.900.000
2 5 15	27 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat			TAPIN	Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara	12 bulan	1.096.000.000	0	0	12 bulan	1.375.000.000
2 5 15	28 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan / Fasilitas Pendukung TPA			TAPIN	Jumlah sarana dan prasarana persampahan / fasilitas pendukung TPA yang disediakan/dibangun	4 paket	20.000.000	0	0	5 paket	100.000.000
2 5 15	29 Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah			TAPIN	Jumlah sosialisasi dan kampanye Sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan	5 kali	9.900.000	0	0	6 kali	14.500.000
2 5 15	30 Pengawasan Penataan Pengelolaan B3 dan LB3			TAPIN	Jumlah kegiatan yang diawasi keataatannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3	36 Kegiatan/u	3.798.000	0	0	38 Kegiatan/u	5.000.000
2 5 15	32 Penyediaan alat penunjang operasional persampahan			TAPIN	Tersedianya peralatan penunjang operasional persampahan	3 unit	25.900.000	0	0	3 unit	100.000.000
2 5 15	33 Penyediaan TPS Khusus Limbah B3			TAPIN	Jumlah TPS khusus LB3 yang di bangun dan dikelola	1 unit	41.500.000	0	0	0 unit	45.650.000
2 5 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Status Mutu Air	Cemar Sedangstatus	1.366.594.120	0	0	Cemar Sedang	1.640.347.501
2 5 16	1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura			TAPIN	Jumlah pelaksanaan penilaian kota sehat/adipura	3 kali	151.545.000	0	0	3 kali	28290001.4
2 5 16	3 Pemantauan Kualitas Lingkungan			TAPIN	Jumlah hasil analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau	180 Laporan Hasil Uji	196.509.120	0	0	180 Laporan Hasil Uji	233.050.000
2 5 16	17 Penilaian Kantor di SKPD Kabupaten Tapin yang Ramah Lingkungan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan penilaian kebersihan kantor SKPD	1 kali	0	0	0	1 kali	-
2 5 16	21 Sekolah Adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan			TAPIN	Jumlah sekolah yang dibina	10 sekolah	251.155.000	0	0	10 sekolah	278.020.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 5 16 23	Kampung Iklim			TAPIN	Jumlah Lokasi Kampung Iklim Yang Dikelola	1 Lokasi	115.250.000	0	0	1 Lokasi	129.000.000
2 5 16 25	Sekolah Hijau			TAPIN	Jumlah lomba memelihara dan menjaga lingkungan sekolah	1 kali	0	0	0	1 kali	-
2 5 16 33	Inventarisasi Gas Rumah Kaca			TAPIN	Jumlah laporan inventarisasi GRK yang Dibuat	1 laporan	86.005.000	0	0	1 laporan	90.450.000
2 5 16 35	Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan			TAPIN	Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah	1 laporan	94.930.000	0	0	1 laporan	94.930.000
2 5 16 39	Pengelolaan PROKASIH			TAPIN	Jumlah lokasi pengelolaan kali/sungai di Kabupaten Tapin	1 lokasi	261.150.000	0	0	1 lokasi	270.122.500
2 5 16 41	Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	2 Orang	0	0	0	2 Orang	-
2 5 16 42	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan pengendalian dan pencemaran kerusakan LH	1 Kali	0	0	0	1 Kali	-
2 5 16 43	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan			TAPIN	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan yang Dilaksanakan	3 kali	35.575.000	0	0	3 kali	37.000.000
2 5 16 45	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lngkungan Hidup pada Masyarakat			TAPIN	Jumlah sosialisasi yang dilakukan tentang peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 kali	174.475.000	0	0	3 kali	224.875.000
2 5 26	Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman Hayati	60%	1.369.545.000	0	0	80	1.559.250.001
2 5 26 1	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati			TAPIN	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keanekaragaman hayati yang dikelola	2 Lokasi	1.308.045.000	0	0	2 Lokasi	1.493.440.001
2 5 26 2	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana keanekaragaman Hayati			TAPIN	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dibangun	1 lokasi	0	0	0	1 lokasi	-
2 5 26 3	Peningkatan Tutupan Lahan			TAPIN	Jumlah lokasi yang dilakukan penutupan Lahan	1 lokasi	61.500.000	0	0	1 lokasi	65.810.000
2 5 26 4	Peningkatan Kemampuan Aparat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA serta Keanekaragaman Hayati			TAPIN	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	1 Orang	0	0	0	1 Orang	-
2 5 26 5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			TAPIN	Jumlah sosialisasi/pelatihan perlindungan dan konservasi SDA yang dilaksanakan	1 kali	0	0	0	1 kali	-
2 5 27	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	75%	64.895.000	0	0	100	87.100.000
2 5 27 1	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			TAPIN	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat	1 laporan	41.295.000	0	0	1 laporan	61.500.000
2 5 27 2	Daya Dukung Daya Tampung Sungai			TAPIN	Jumlah kajian daya dukung daya tampung yang dibuat	0 laporan	2.000.000	0	0	0 laporan	4.000.000
2 5 27 3	Sistem Informasi Lingkungan Hidup			TAPIN	Waktu penyediaan informasi lingkungan hidup secara online	12 bulan	21.600.000	0	0	12 bulan	21.600.000
2 5 27 4	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			TAPIN	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat	1 laporan	0	0	0	0 laporan	-
2 5 28	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase MHA yang ditetapkan haknya	37,50%	98.250.000	0	0	50	69.400.030
2 5 28 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan	1 kali	20.500.000	0	0	1 kali	21.400.000
2 5 28 3	Promosi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah promosi dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 kali	0	0	0	3 kali	-
2 5 28 4	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup	1 usulan	77.750.000	0	0	1 usulan	48000029.75
2 5 28 5	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan LH	1 kelompok	0	0	0	1 kelompok	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 5 28 6	Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah bimtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan	1 kali	0	0	0	1 kali	-
2 5 28 7	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah lembaga kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk pengembangan kepedulian LH	1 kelompok	0	0	0	1 kelompok	-
2 5 28 8	Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup			TAPIN	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui bimtek atau Sosialisasi	3 Orang	0	0	0	3 Orang	-
2 5 29	Program Kajian Dampak Lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	55%	45.925.000	0	0	60	76.700.000
2 5 29 1	Pembinaan AMDAL			TAPIN	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha	20 Kegiatan/u	3.000.000	0	0	20 Kegiatan/u	6.000.000
2 5 29 2	Peningkatan Kinerja SDM dalam Implementasi AMDAL			TAPIN	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal	2 orang	40.225.000	0	0	2 orang	65.700.000
2 5 29 3	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja RKL-RPL			TAPIN	Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan	25 perusahaan	2.700.000	0	0	25 perusahaan	5.000.000
2 5 29 4	Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Penilai AMDAL			TAPIN	Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	0	0	0	20 orang	-
2 5 30	Program Pnaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	32%	65.165.000	0	0	36	73.900.000
2 5 30 1	Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan			TAPIN	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya	31 Perusahaan	29.950.000	0	0	33 Perusahaan	38.900.000
2 5 30 2	Pos pengaduan penanganan kasus Lingkungan			TAPIN	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan identifikasi	4 pengaduan	35.215.000	0	0	4 pengaduan	35.000.000
2 5 31	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	64%	228.190.000	0	0	71	337.000.040
2 5 31 1	Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan			TAPIN	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan	10 orang	1.000.000	0	0	10 orang	6.000.000
2 5 31 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium			TAPIN	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan	1 unit	1.000.000	0	0	1 unit	25.000.000
2 5 31 3	Operasional Laboratorium			TAPIN	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan	12 bulan	226.190.000	0	0	12 bulan	306.000.040
2 6 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						1.032.619.514	0	0		1.039.200.000
2 6	Administrasi Kependudukan dan Capil										
2 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	468.409.014	0	0	100	586.000.000
2 6 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu penyediaan surat menyurat	12 bulan	1.098.000	0	0	12 bulan	900.000
2 6 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	waktu penyediaan komunikasi sumber daya listrik dan air	12 bulan	95.400.000	0	0	12 bulan	75.000.000
2 6 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu penyediaan ATK	12 bulan	72.285.100	0	0	12 bulan	125.000.000
2 6 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3.400.000	0	0	12 bulan	3.800.000
2 6 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	4.000.000
2 6 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	waktu penyediaan makan minum	12 bulan	79.860.000	0	0	12 bulan	60.000.000
2 6 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu koordinasi dan konsultasi	12 bulan	145.165.914	0	0	12 bulan	260.000.000
2 6 1 20	Tapin Expo			TAPIN	jumlah kegiatan tapin expo	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	27.300.000





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 6 1 22	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Jumlah jasa kebersihan (OB)tahun	2 orang	43.200.000	0	0	2 orang	30.000.000
2 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	184.475.000	0	0	100	199.500.000
2 6 2 12	Pengadaan Peralatan Kantor			TAPIN	waktu pengadaan peralatan kantor	12 bulan	139.475.000	0	0	12 bulan	161.000.000
2 6 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			TAPIN	waktu penyediaan pemeliharaan dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas	12 bulan	43.000.000	0	0	12 bulan	35.500.000
2 6 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	waktu pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	3.000.000
2 6 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	3.375.100	0	0	100	3.600.000
2 6 6 6	Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			TAPIN	jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	13 buah	2.166.400	0	0	13 buah	2.500.000
2 6 6 7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Akhir Tahun			TAPIN	jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	2 buah	1.208.700	0	0	2 buah	1.100.000
2 6 17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan		Tingkat Akurasi Data Penduduk	90,20%	8.150.000	0	0	90,3	25.650.000
2 6 17 5	Pembinaan tertib administrasi kependudukan pada desa binaan			TAPIN	jumlah desa yang dibina (20 kali)	10 desa	8.150.000	0	0	10 desa	25.650.000
2 6 17 7	Desa Adminduk			TAPIN	waktu Desa Adminduk	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 6 17 8	Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online			TAPIN	waktu Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 6 18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	83%	23.710.000	0	0	84	-
2 6 18 7	Desa Tertib Administrasi Kependudukan			TAPIN	Jumlah pembinaan desa	1 paket	23.710.000	0	0	-	-
2 6 19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga	89%poin	175.250.200	0	0	89%	183.200.000
2 6 19 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			TAPIN	jumlah pelayanan publik	12 kecamatan	173.200.200	0	0	12 kecamatan	180.500.000
2 6 19 10	Pengadaan Blanko, Tinta Ribbon dan Film Kartu Identitas Anak (KIA)			TAPIN	waktu pengadaan blanko,tinta ribbon dan film KIA	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 6 19 14	Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk			TAPIN	waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 bulan	2.050.000	0	0	12 bulan	2.700.000
2 6 20	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan	89%poin	169.250.200	0	0	89%	41.250.000
2 6 20 1	Pelayanan pencatatan perkawinan non Muslim			TAPIN	jumlah pencatatan perkawinan massal pasangan non muslim	1 kali	7.300.000	0	0	1 kali	8.000.000
2 6 20 2	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil			TAPIN	jumlah pelayanan publik (tahun)	16 orang	151.600.200	0	0	16 orang	16.450.000
2 6 20 3	Pembentukan tim registrasi kematian di Desa			TAPIN	waktu Pembentukan tim registrasi kematian di desa	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	9.000.000
2 6 20 4	Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			TAPIN	waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	12 bulan	2.350.000	0	0	12 bulan	7.800.000
2 7 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						2.766.483.577	0	0		91.360.000
2 7	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2 7 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98%	1.093.534.877	0	0	98	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 7 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa Telephone , Internet ,Listrik dan Air	12 Bulan	55.500.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	Waktu penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	90.100.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan ATK	12 Bulan	63.258.300	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makan dan Minum harian Pegawai	12 Bulan	60.013.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	726.483.577	0	0	12 Bulan	-
2 7 1 20	Tapin Expo			TAPIN	Pelaksanaan HUT kabupaten	1 Kali	25.000.000	0	0	1 Kali	-
2 7 1 21	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 1 22	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan	33.180.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98%	66.590.000	0	0	98	-
2 7 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 7 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu Pelihaaran Kendaraan Oprasioanal Kantor	12 Bulan	38.485.875	0	0	12 Bulan	-
2 7 2 45	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	6.000	0	0	12 bulan	-
2 7 2 46	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu Pelihaaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	18.098.125	0	0	12 Bulan	-
2 7 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	95%	9.623.000	0	0	97	-
2 7 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Laporan	4.597.000	0	0	9 Laporan	-
2 7 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun	6 Laporan	5.026.000	0	0	6 Laporan	-
2 7 21	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	47%	528.140.430	0	0	67	91.360.000
2 7 21 5	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa			TAPIN	waktu Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	12 bulan	48.718.000	0	0	12 bulan	-
2 7 21 6	Perlombaan Desa			TAPIN	Jumlah Desa yg mengikti perlombaan desa tingkat kabupaten	12 Desa	177.406.556	0	0	12 Desa	91.360.000
2 7 21 7	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa			TAPIN	waktu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	12 bulan	11.157.874	0	0	12 bulan	-
2 7 21 8	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa			TAPIN	Jumlah desa yang di dampingi dalam Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawan APBDesa	126 Desa	100.798.000	0	0	126 Desa	-
2 7 21 9	Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES			TAPIN	waktu Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES	12 bulan	45.660.000	0	0	12 bulan	-
2 7 21 17	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa			TAPIN	waktu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	12 bulan	144.400.000	0	0	12 bulan	-
2 7 23	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	79%	365.075.100	0	0	81	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 7 23	2 Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa			TAPIN	waktu Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan	28.278.100	0	0	12 bulan	-
2 7 23	3 Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna			TAPIN	Jumlah posyantek yang dikembangkan	5 posyantek	99.940.000	0	0	5 posyantek	-
2 7 23	4 Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)			TAPIN	waktu Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	12 bulan	25.032.000	0	0	12 bulan	-
2 7 23	5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)			TAPIN	waktu Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	6 Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)			TAPIN	waktu Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	9 Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan			TAPIN	waktu Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	10 Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa			TAPIN	waktu Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	11 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA			TAPIN	waktu Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	12 Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG			TAPIN	waktu Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG	12 bulan	49.845.000	0	0	12 bulan	-
2 7 23	13 Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG			TAPIN	waktu Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 23	14 Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan			TAPIN	waktu Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan	12 bulan	129.220.000	0	0	12 bulan	-
2 7 23	15 Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan			TAPIN	waktu Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 24	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Menurunnya Desa Berstatus Tertinggal		- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91%	703.520.170	0	0	93	-
2 7 24	1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			TAPIN	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten	1 PKK	415.081.170	0	0	1 PKK	-
2 7 24	2 Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu			TAPIN	Jumlah pokjanal posyandu yang dikembangkan dan diberdayakan	126 pokjanal	62.830.000	0	0	126 pokjanal	-
2 7 24	3 Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Melalui Kader Posyandu			TAPIN	Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	194 poyandu	137.400.000	0	0	194 poyandu	-
2 7 24	5 Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat			TAPIN	waktu Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat	12 bulan	9.000	0	0	12 bulan	-
2 7 24	6 Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)			TAPIN	Jumlah desa yang memutakhirkan data IDM	126 Desa	88.100.000	0	0	126 Desa	-
2 7 24	7 Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga			TAPIN	waktu Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 24	16 Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Lomba			TAPIN	waktu Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Lomba	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 24	17 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			TAPIN	waktu Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 24	18 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa			TAPIN	waktu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
2 7 24	22 Karya Bhakti TMMD			TAPIN	partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan TMMD	750 org	100.000	0	0	750 org	-
2 8 1	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						1.903.368.932	0	0		225.720.000
2 8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2 8 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	922.335.432	0	0	100	215.800.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 8 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	77.184.100	0	0	12 Bulan	72.000.000
2 8 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	54.450.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.222.300	0	0	12 Bulan	31.000.000
2 8 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.400.000	0	0	12 Bulan	12.000.000
2 8 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.000.000	0	0	12 Bulan	4.000.000
2 8 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	65.340.000	0	0	11 Bulan	66.000.000
2 8 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	618.420.532	0	0	12 Bulan	-
2 8 1 19	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan	45.318.500	0	0	12 Bulan	30.800.000
2 8 1 20	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	-
2 8 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	114.500.000	0	0	100	-
2 8 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48 Unit	109.500.000	0	0	48 Unit	-
2 8 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	-
2 8 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	8.360.000	0	0	100	9.920.000
2 8 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Laporan	5.000.000	0	0	13 Laporan	2.350.000
2 8 6 5	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	3.360.000	0	0	2 Laporan	7.570.000
2 8 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				Persentase peserta KB aktif MKJP	8,87%	62.461.000	0	0	8,86	-
2 8 18 6	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes			TAPIN	Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	1 Kali	13.600.000	0	0	1 Kali	-
2 8 18 9	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana	150 Orang	27.284.000	0	0	150 Orang	-
2 8 18 10	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	4 Kali	21.577.000	0	0	4 Kali	-
2 8 25	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi				Persentase kelahiran total (TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,09%	135.309.000	0	0	2,08	-
2 8 25 2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu			TAPIN	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	12 Bulan	25.500.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 25 3	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	250 Akseptor	31.809.000	0	0	250 Akseptor	-
2 8 25 4	Pelayanan KB Medis Operasi			TAPIN	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	130 Orang	26.850.000	0	0	130 Orang	-
2 8 25 9	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	1 Kali	21.050.000	0	0	1 Kali	-
2 8 25 12	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	2 kali	10.500.000	0	0	2 kali	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2 8 25 13	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana			TAPIN	waktu Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
2 8 25 14	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	12 Bulan	19.500.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 26	Program Generasi Berencana (Genre)				Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	68,02%	76.550.000	0	0	79,52	-
2 8 26 1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	1 kali	17.880.000	0	0	1 kali	-
2 8 26 5	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR			TAPIN	Waktu Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	12 bulan	49.355.000	0	0	12 bulan	-
2 8 26 10	Ajang Kreativitas PIK-Remaja			TAPIN	Jumlah Ajang Kreativitas PIK-Remaja	1 kali	9.315.000	0	0	1 kali	-
2 8 27	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,09%	364.998.500	0	0	92,14	-
2 8 27 1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	12.330.000	0	0	3 Kali	-
2 8 27 3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	3 Kali	17.905.000	0	0	3 Kali	-
2 8 27 4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	2 Kali	5.080.000	0	0	2 Kali	-
2 8 27 9	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	3 Kali	20.238.000	0	0	3 Kali	-
2 8 27 13	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12 Bulan	26.730.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 27 14	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	3 Kali	23.270.000	0	0	3 Kali	-
2 8 27 15	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	2 Kelompok	249.072.500	0	0	2 Kelompok	-
2 8 27 16	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	10.373.000	0	0	3 Kali	-
2 8 28	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya Angka Kelahiran		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	75%	29.250.000	0	0	80	-
2 8 28 1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	11 Sekolah	22.910.000	0	0	11 Sekolah	-
2 8 28 2	Pembinaan Koalisi Kependudukan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 Kali	6.340.000	0	0	1 Kali	-
2 8 29	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan				Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	41.750.000	0	0	85	-
2 8 29 1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	160 Dokumen	41.750.000	0	0	160 Dokumen	-
2 8 30	Program Advokasi dan Penggerakan				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%	147.855.000	0	0	45	-
2 8 30 1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyebarluasan informasi dan advokasi	12 Bulan	37.715.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 30 3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	12 Bulan	60.290.000	0	0	12 Bulan	-
2 8 30 12	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	2 Kali	49.450.000	0	0	2 Kali	-
2 8 30 13	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
2 8 30 14	Pembentukan Rumah Dataku			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
283015	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
283016	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
291	Dinas Perhubungan						1.627.076.800	0	0		1.593.700.000
291	Perhubungan										
291	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	798.473.200	0	0	100	915.100.000
2912	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	94.800.000	0	0	12 bulan	147.400.000
2919	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	12 bulan	42.000.000	0	0	12 bulan	45.000.000
29110	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	25.273.200	0	0	12 bulan	30.000.000
29111	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.900.000	0	0	12 bulan	10.000.000
29117	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	52.600.000	0	0	12 bulan	52.600.000
29118	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	278.500.000	0	0	12 bulan	325.500.000
29121	Tapin Expo			TAPIN	Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	10 hari	24.000.000	0	0	10 hari	24.000.000
29122	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN UTARA	Waktu tenaga teknis pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	223.200.000	0	0	12 bulan	230.400.000
29123	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	7.000.000	0	0	12 bulan	7.000.000
29124	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	43.200.000	0	0	12 bulan	43.200.000
292	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	72.000.000	0	0	100	121.000.000
29222	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	15.000.000	0	0	12 Bulan	30.000.000
29224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	57.000.000	0	0	12 Bulan	91.000.000
296	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	6.000.000	0	0	100	20.000.000
2961	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.000.000	0	0	12 laporan	10.000.000
2966	Penyusunan laporan keuangan semesteran & akhir tahun			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran & akhir tahun	2 Laporan	3.000.000	0	0	2 Laporan	10.000.000
2915	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas prasarana perhubungan		Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	90%	361.000.000	0	0	95	161.000.000
291514	Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	12 Bulan	139.000.000	0	0	12 Bulan	139.000.000
291515	Pembangunan pelabuhan/dermaga			TAPIN	Waktu Penyediaan Pembangunan pelabuhan/dermaga	12 Bulan	200.000.000	0	0	12 Bulan	-
291516	Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	10.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
29	15	22	Pemeliharaan Halte		TAPIN	Waktu Pemeliharaan Halte	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	12.000.000
29	24		Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas darat	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	55%	267.503.600	0	0	55	267.500.000
29	24	1	Pengadaan Buku dan Plat Uji KIR		TAPIN	Waktu Pengadaan Buku dan Plat Uji KIR	12 Bulan	6.900.000	0	0	12 Bulan	6.900.000
29	24	2	Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor		TAPIN	Waktu Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	30.000.000
29	24	3	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		TAPIN	Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	80.403.600	0	0	12 bulan	80.400.000
29	24	4	Akreditasi Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor		TAPIN	Waktu Akreditasi Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	50.000.000
29	24	5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	12 bulan	39.600.000	0	0	12 bulan	39.600.000
29	24	8	Pemeliharaan Warning Light		TAPIN	Waktu Pemeliharaan Warning Light	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	25.000.000
29	24	9	Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	24	10	Pemeliharaan Traffict Light		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pemeliharaan Traffict Light	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	25.000.000
29	24	11	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Darat		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Darat	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	24	12	Pemeliharaan Rambu Darat		TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rambu Darat	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	10.000.000
29	24	13	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	24	14	Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	24	16	Pembuatan Zona Selamat Sekolah		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pembuatan Zona Selamat Sekolah	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	24	17	Pembuatan Marka Jalan		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pembuatan Marka Jalan	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	100.000
29	25		Program Pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas darat	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	100%	122.100.000	0	0	100	109.100.000
29	25	1	Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas		TAPIN	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	12 Bulan	50.000.000	0	0	12 Bulan	40.000.000
29	25	3	Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas		TAPIN	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas	12 Bulan	7.500.000	0	0	12 Bulan	9.500.000
29	25	4	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		TAPIN	Waktu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.000.000
29	25	5	Pelayanan dan Pengawasan Angkutan		TAPIN	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	12 Bulan	58.600.000	0	0	12 Bulan	53.600.000



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
						Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
10	1							2.375.575.100	0	0		
10												
10	1							883.575.100	0	0	100	-
10	1	2						160.000.000	0	0	12 bulan	-
10	1	7						88.800.000	0	0	12 bulan	-
10	1	10						69.000.000	0	0	12 bulan	-
10	1	11						55.000.000	0	0	12 bulan	-
10	1	17						82.000.000	0	0	12 bulan	-
10	1	18						351.375.100	0	0	12 bulan	-
10	1	19						38.800.000	0	0	12 bulan	-
10	1	21						25.000.000	0	0	200 Pengunjung	-
10	1	22						13.600.000	0	0	12 bulan	-
10	2							252.000.000	0	0	100	-
10	2	11						185.000.000	0	0	1 Paket	-
10	2	24						32.000.000	0	0	2 unit	-
10	2	46						35.000.000	0	0	12 bulan	-
10	6							15.000.000	0	0	100	-
10	6	1						12.000.000	0	0	1 Dokumen	-
10	6	6						3.000.000	0	0	2 Laporan	-
10	21							239.700.000	0	0	64,67	-
10	21	1						40.000.000	0	0	12 bulan	-
10	21	2						132.000.000	0	0	2 Website	-
10	21	4						30.600.000	0	0	3 Jaringan	-
10	21	5						26.600.000	0	0	70 unit	-
10	21	6						100.000	0	0	12 bulan	-
10	21	7						100.000	0	0	40 orang	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
210 21	8	Jumlah mengikuti peningkatan wawasan dan pelatihan TI		TAPIN	waktu Jumlah mengikuti peningkatan wawasan dan pelatihan TI	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
210 21	9	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Kabupaten		TAPIN	waktu Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Kabupaten	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
210 21	10	Sosialisasi SPBE		TAPIN	Jumlah Sosialisasi SPBE	1 kali	10.000.000	0	0	1 kali	-
210 21	11	Evaluasi SPBE		TAPIN	jumlah Evaluasi SPBE	1 kali	100.000	0	0	1 kali	-
210 22		Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya level SPBE Kabupaten	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100%	930.000.000	0	0	100	-
210 22	1	Pengembangan Kemitraan Informasi Melalui LPPL		TAPIN	Realisasi waktu tayang hasil kerjasama Pemda dengan LPPL	7350 menit	850.000.000	0	0	7350 menit	-
210 22	2	Pembinaan / Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat		TAPIN	waktu Pembinaan / Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	-
210 22	3	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik		TAPIN	Jumlah SDM yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	50 Orang	25.000.000	0	0	50 Orang	-
210 22	4	Diseminasi Informasi Melalui Media Massa		TAPIN	Jumlah Media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah	1 Media	15.000.000	0	0	1 Media	-
210 22	5	Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten		TAPIN	Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten	288 Berita	10.000.000	0	0	288 Berita	-
210 22	6	Kerjasama Media Massa Kegiatan Pengembangan kemitraan		TAPIN	Jumlah jam tayang Talkshow (60 Menit 1x Tayang) (wawancara)	1 Tayang	10.000.000	0	0	1 Tayang	-
210 22	7	Kerjasama informasi dan media massa kegiatan pelatihan jurnalistik bagi pelajar		TAPIN	Jumlah kerjasama informasi dan media massa kegiatan pelatihan jurnalistik bagi Pelajar	60 Siswa	10.000.000	0	0	60 Siswa	-
214		Statistik									
214 16		Program Pengembangan dan Pengelolaan Statistik	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya layanan statistik sektoral	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	65%	25.000.000	0	0	75	-
214 16	1	Penyediaan Data Statistik Daerah		TAPIN	Jumlah Buku KDA dan PDRB yang dicetak	150 Buah	15.000.000	0	0	150 Buah	-
214 16	2	Pembuatan Buku Statistik Ekonomi Makro		TAPIN	waktu Pembuatan Buku Statistik Ekonomi Makro	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	-
214 16	3	Sosialisasi Pendataan Data Statistik Sektoral Kabupaten Tapin		TAPIN	waktu Sosialisasi Pendataan Data Statistik Sektoral Kabupaten Tapin	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
215		Persandian									
215 16		Program Pengembangan dan Pengelolaan Persandian	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian	Persentase aparatur persandian yang memahami standar persandian	50%	30.300.000	0	0	100	-
215 16	1	Sosialisasi Keamanan Informasi Bidang Persandian		TAPIN	Persentasi peserta Bimtek yang memahami materi Bimtek (%)	70%	15.000.000	0	0	70%	-
215 16	2	Sosialisasi Pengembangan Informasi Bidang Persandian		TAPIN	waktu Sosialisasi Pengembangan Informasi Bidang Persandian	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	-
215 16	3	Pengamanan Ruang Rapat Kantor dan Kediaman Bupati		TAPIN	waktu Pengamanan Ruang Rapat Kantor dan Kediaman Bupati	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
215 16	4	Penyelenggaraan Ekosistem Cybersecurity		TAPIN	waktu Penyelenggaraan Ekosistem Cybersecurity	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
215 16	5	Kegiatan Sosialisasi Sertifikat Elektronik & Tanda Tangan Digital		TAPIN	waktu Kegiatan Sosialisasi Sertifikat Elektronik & Tanda Tangan Digital	12 bulan	100.000	0	0	12 bulan	-
212 1		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1.104.727.188	0	0		960.150.000
212		Penanaman Modal									
212 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	685.580.188	0	0	100	560.085.000
212 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		TAPIN	Jumlah bulan penyediaan jasa surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	0	0	12 Bulan	1.750.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
212	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik		TAPIN	Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	87.960.000	0	0	12 Bulan	95.700.000
212	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		TAPIN	Jumlah bulan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	12 Bulan	5.700.000	0	0	12 Bulan	6.270.000
212	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	72.597.700	0	0	12 Bulan	-
212	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		TAPIN	Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11.500.000	0	0	12 Bulan	12.650.000
212	1	17	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	68.400.000	0	0	12 Bulan	75.240.000
212	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan	378.122.488	0	0	12 Bulan	302.500.000
212	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		TAPIN	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	12 Bulan	34.800.000	0	0	12 Bulan	38.280.000
212	1	20	Tapin Expo		TAPIN	Jumlah pelaksanaan tapin expo	1 Paket	25.000.000	0	0	1 Paket	27.695.000
212	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	134.150.000	0	0	100	207.465.000
212	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		TAPIN	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 Paket	2.000.000	0	0	2 Paket	60.000.000
212	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		TAPIN	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Paket	3.000.000	0	0	3 Paket	12.000.000
212	2	11	Pengadaan Pakaian Dinas / Khusus		TAPIN	waktu Pengadaan Pakaian Dinas / Khusus	12 bulan	32.550.000	0	0	12 bulan	35.805.000
212	2	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		TAPIN	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 Buah	10.000.000	0	0	1 Buah	11.000.000
212	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor		TAPIN	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Buah	17.000.000	0	0	1 Buah	18.700.000
212	2	45	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional		TAPIN	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang dipelihara	6 Unit	69.600.000	0	0	6 Unit	69.960.000
212	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	15.020.000	0	0	100	-
212	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	11 Dokumen	8.500.000	0	0	11 Dokumen	-
212	6	5	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun		TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	6.520.000	0	0	2 Dokumen	-
212	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya keamanan daerah		Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan	100%	2.125.000	0	0	100	-
212	15	12	Partisipasi penyelenggaraan pameran Investasi		TAPIN	waktu Partisipasi penyelenggaraan pameran investasi	12 bulan	1.125.000	0	0	12 bulan	-
212	15	15	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Tapin		KALIMANTAN SELATAN	waktu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Tapin	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	-
212	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya keamanan daerah		Pertumbuhan penanaman modal	5%	21.545.000	0	0	5	-
212	16	13	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal		TAPIN	waktu Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	12 bulan	17.745.000	0	0	12 bulan	-
212	16	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		TAPIN	waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 bulan	3.800.000	0	0	12 bulan	-
212	18		Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Meningkatnya keamanan daerah		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	100%	19.082.000	0	0	100	1.200.000
212	18	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Investasi		TAPIN	Jumlah pelaksanaan monitoring	10 Kali	990.000	0	0	10 Kali	1.200.000
212	18	4	Sosialisasi Mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal		TAPIN	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	100%	15.692.000	0	0	100%	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
212 18	5	Pengolahan dan Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan		TAPIN	waktu Pengolahan dan Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	2.400.000	0	0	12 bulan	-	
212 19		Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya keamanan daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	100%	227.225.000	0	0	100	191.400.000
212 19	2	Peningkatan Pelayanan Perizinan		TAPIN	Jumlah perizinan jasa usaha dan perizinan tertentu yang diproses	1756 Izin	178.500.000	0	0	1756 Izin	191.400.000	
212 19	4	Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait di lingkungan Pemkab Tapin		TAPIN	Persentase perizinan yang diterbitkan	100%	27.900.000	0	0	100%	-	
212 19	5	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		TAPIN	Nilai IKM yang diperoleh	81 Poin	2.925.000	0	0	81 Poin	-	
212 19	6	Bimtek Perizinan Terintegrasi (OSS)		TAPIN	waktu Bimtek Perizinan Terintegrasi (OSS)	12 bulan	17.900.000	0	0	12 bulan	-	
213 1		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					9.212.384.605	0	0		10.821.611.120	
213		Kepemudaan dan Olah Raga										
213 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.213.308.954	0	0	100	1.512.150.000
213 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		TAPIN	WaktuA Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.600.000	0	0	12 bulan	6.400.000	
213 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik		TAPIN	A Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	187.200.000	0	0	12 bulan	187.500.000	
213 1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	A Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	82.388.100	0	0	12 bulan	82.500.000	
213 1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		TAPIN	A Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	13.500.000	
213 1	17	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	A Waktu Penyediaan makanan dan Minuman	12 bulan	72.920.000	0	0	12 bulan	73.000.000	
213 1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	A Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	1.382.850.854	0	0	12 bulan	680.000.000	
213 1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		TAPIN	A Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	40.800.000	0	0	12 bulan	67.400.000	
213 1	22	Tapin Expo		TAPIN	A Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 kali	20.000.000	0	0	1 kali	41.000.000	
213 1	24	Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan		TAPIN	A Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	12 bulan	402.550.000	0	0	12 bulan	341.850.000	
213 1	25	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja		TAPIN	A Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	19.000.000	
213 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	294.117.451	0	0	100	763.700.000
213 2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	251.000.000	
213 2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	63.117.451	0	0	12 bulan	286.700.000	
213 2	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor		TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	30.000.000	
213 2	45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		TAPIN	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	196.000.000	
213 6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	13.998.200	0	0	100	22.685.000
213 6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	14.600.000	
213 6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun		TAPIN	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	12 bulan	3.998.200	0	0	12 bulan	8.085.000	



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
21317	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya peran serta calon pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan		Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi	78%	691.505.000	0	0	88	1.205.356.120
21317	1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			TAPIN	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	11.680.000	0	0	40 Orang	9.980.000
21317	3 Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)			TAPIN	Jumlah peserta SP4	10 orang	119.090.000	0	0	10 orang	1.100.120
21317	5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda			TAPIN	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	40 Orang	7.805.000	0	0	40 Orang	19.995.000
21317	6 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan			TAPIN	Jumlah peserta diklat	40 Orang	5.360.000	0	0	40 Orang	75.311.000
21317	7 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah peserta terpilih	53 orang	547.570.000	0	0	53 orang	1.098.970.000
21321	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga		Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	96%	2.668.500.000	0	0	96	2.830.000.000
21321	4 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga			TAPIN	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana olahraga	408 orang	408.000.000	0	0	408 orang	410.000.000
21321	7 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga			TAPIN	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	21 buah	409.500.000	0	0	21 buah	410.000.000
21321	41 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	12 bulan	1.650.000.000	0	0	12 bulan	1.700.000.000
21321	42 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga			TAPIN	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	4 Paket	200.000.000	0	0	4 Paket	-
21321	44 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Olahraga			TAPIN	Waktu Pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana olahraga	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	310.000.000
21322	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya prestasi olahraga		Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	21Cabang Olahraga	1.673.220.000	0	0	24	2.212.950.000
21322	1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/SMPC			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu pembinaan dan penyelenggaraan	12 Bulan	395.340.000	0	0	12 Bulan	519.420.000
21322	2 Penampilan / Demonstrasi Komunitas			TAPIN	Waktu Penampilan komunitas	12 bulan	483.680.000	0	0	12 bulan	483.680.000
21322	3 Pembinaan dan penyelenggaraan Olahraga Paralympic/NPC			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah cabang olahraga paralympic yang dilombakan	7 Cabor	395.000.000	0	0	7 Cabor	750.650.000
21322	5 Pembinaan Federasi Olah Raga Masyarakat Indonesia (FORMI)			KALIMANTAN SELATAN	Waktu pembinaan	12 Bulan	399.200.000	0	0	12 Bulan	459.200.000
21325	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Prestasi	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya prestasi olahraga		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	14Cabang Olahraga	1.373.075.000	0	0	16	1.818.750.000
21325	1 Penyelenggaraan POPDA & Invitasi Olahraga Pelajar			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Cabang Olah Raga yang di Lombakan	10 cabor	275.000.000	0	0	10 cabor	350.000.000
21325	4 Penyelenggaraan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tapin			TAPIN	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	2 kali	613.000.000	0	0	2 kali	1.015.500.000
21325	6 Lomba dan Pembinaan Olah Raga Pelajar			TAPIN	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dilombakan dan dibina	10 cabor	275.000.000	0	0	10 cabor	230.000.000
21325	7 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Olahraga Prestasi			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah peserta pelatihan pelatih olahraga prestasi	20 orang	10.075.000	0	0	20 orang	22.025.000
21325	8 Lomba dan Pembinaan Olah Raga Prestasi			TAPIN	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dilombakan dan dibina	10 cabor	199.000.000	0	0	10 cabor	200.225.000
21325	9 Pembinaan dan Pelatihan Marching Band			TAPIN	Waktu pembinaan dan pelatihan marching band	12 Bulan	1.000.000	0	0	12 Bulan	1.000.000
21326	Program Pelayanan dan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya peran serta calon pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	83%	284.660.000	0	0	92	456.020.000
21326	1 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP/BPAP) / Jambore Pemuda Indonesia (JPI)			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Peserta PPAP/BPAP/JPI terpilih	4 orang	18.910.000	0	0	4 orang	20.500.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
213	26	2	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Jenesys		INDONESIA	Jumlah peserta PAPAN & Jenesys	4 orang	20.090.000	0	0	4 orang	38.300.000	
213	26	3	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara		INDONESIA	Jumlah peserta kapal pemuda nusantara	2 orang	18.040.000	0	0	2 orang	32.550.000	
213	26	4	Peningkatan Pengetahuan Mengenai Para Pahlawan (Napak Tilas Jejak Pahlawan)		KALIMANTAN SELATAN	Jumlah peserta napak tilas	12 Orang	39.920.000	0	0	12 Orang	45.350.000	
213	26	5	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pramuka		TAPIN	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina	12 Okp dan pramuka	11.780.000	0	0	12 Okp dan pramuka	18.920.000	
213	26	6	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda		TAPIN	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	40 Orang	18.020.000	0	0	40 Orang	19.350.000	
213	26	7	Pembinaan paduan suara remaja dan pemuda Kab. Tapin		TAPIN	waktu Pembinaan paduan suara remaja dan pemuda Kab. Tapin	12 bulan	157.900.000	0	0	12 bulan	281.050.000	
216	1		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata					2.689.238.994	0	0		3.789.864.562	
216			Kebudayaan										
216	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	96%	690.426.994	0	0	98	1.732.489.994
216	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik		TAPIN	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	78.800.000	0	0	12 bulan	66.800.000	
216	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		TAPIN	Jumlah petugas jasa administrasi keuangan	48 orang/bulan	79.950.000	0	0	48 orang/bulan	79.950.000	
216	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	33.506.100	0	0	12 bulan	27.913.818	
216	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		TAPIN	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.080.000	0	0	12 bulan	15.080.000	
216	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		TAPIN	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	6.000.000	
216	1	17	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	52.880.000	0	0	12 bulan	58.000.000	
216	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	365.410.894	0	0	12 bulan	1.398.346.176	
216	1	19	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor		TAPIN	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor	24 orang/bulan	34.800.000	0	0	24 orang/bulan	54.400.000	
216	1	21	Tapin Expo		TAPIN	Jumlah pelaksanaan tapin expo	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	26.000.000	
216	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96%	105.000.000	0	0	98	136.000.000
216	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		TAPIN	waktu penyediaan pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor	12 bulan	23.000.000	0	0	12 bulan	40.000.000	
216	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		TAPIN	waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	20.000.000	
216	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		TAPIN	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Bh	6.000.000	0	0	20 Bh	6.000.000	
216	2	45	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		TAPIN	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 buah	61.000.000	0	0	9 buah	70.000.000	
216	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	5.000.000	0	0	100	6.430.000
216	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	3.750.000	
216	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun		TAPIN	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	2.680.000	
216	19		Program pengembangan Unsur Kebudayaan			Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	50%	82.129.000	0	0	45	82.147.000	



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
216 19	2 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah			TAPIN	Jumlah sanggar budaya aktif	2 kelompok	82.129.000	0	0	2 kelompok	82.147.000
216 20	Program Pemanfaatan Unsur Kebudayaan				Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	90%	466.150.000	0	0	95	619.472.000
216 20	3 Mengikuti Festival seni dan budaya daerah			TAPIN	waktu Mengikuti Festival seni dan budaya daerah	12 bulan	110.390.000	0	0	12 bulan	181.500.000
216 20	4 Penampilan seni bernuansa islami dan hiburan rakyat pada Tapin Expo			TAPIN	waktu Penampilan seni bernuansa islami dan hiburan rakyat pada Tapin Expo	12 bulan	47.754.000	0	0	12 bulan	93.600.000
216 20	5 Festival Layang-layang			TAPIN	waktu Festival Layang-layang	12 bulan	65.854.000	0	0	12 bulan	66.158.000
216 20	7 Festival teater tradisi (mamanda /Ba pandang / Japin carita) - (Org)			TAPIN	waktu Festival teater tradisi (mamanda /Ba pandang / Japin carita) - (Org)	12 bulan	38.790.000	0	0	12 bulan	49.800.000
216 20	8 Pagelaran Seni Budaya di Rantau Baru			TAPIN	waktu Pagelaran Seni Budaya di Rantau Baru	12 bulan	95.514.000	0	0	12 bulan	97.914.000
216 20	9 Pawai Seni Budaya Daerah			TAPIN	waktu Pawai Seni Budaya Daerah	12 bulan	107.848.000	0	0	12 bulan	130.500.000
216 21	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya				Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100%	618.150.000	0	0	100	478.991.568
216 21	1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			TAPIN	Jumlah event aktualisasi budaya daerah	2 kali	53.450.000	0	0	2 kali	6450046.5
216 21	2 Pemeliharaan dan perawatan Benda Cagar Budaya / Situs			TAPIN	Jumlah juru pelihara BCB/situs yang aktif	324 orang/bulan	170.200.000	0	0	324 orang/bulan	194.340.000
216 21	3 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya			TAPIN	waktu Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	12 bulan	62.000.000	0	0	12 bulan	56.000.006
216 21	4 Pendaftaran Benda Cagar Budaya			TAPIN	Jumlah benda cagar budaya yang Terdaftar	50 buah	21.800.000	0	0	50 buah	22.000.000
216 21	5 Dukungan Penyelenggaraan Ritus Budaya Daerah			TAPIN	waktu Dukungan Penyelenggaraan Ritus Budaya Daerah	12 bulan	75.860.000	0	0	12 bulan	860.075
216 21	6 Pelestarian aruh adat lereng meratus			TAPIN	Jumlah kegiatan aruh adat	7 kali	56.150.000	0	0	7 kali	17550040.1
216 21	7 Penyediaan Jasa pemangku adat dayak			TAPIN	Jumlah jasa pemangku adat dayak	300 orang/bulan	141.550.000	0	0	300 orang/bulan	144.951.100
216 21	10 Pemuktahiran Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	waktu Pemuktahiran Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	12 bulan	11.640.000	0	0	12 bulan	11.340.300
216 21	11 Pendataan Seni, Budaya, Sastra dan Tradisi Khas Daerah (WBTB)			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	waktu Pendataan Seni, Budaya, Sastra dan Tradisi Khas Daerah (WBTB)	12 bulan	25.500.000	0	0	12 bulan	25.500.000
216 22	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan				Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	45%	56.354.000	0	0	75	56.754.000
216 22	1 Pembinaan tentang pelestarian seni budaya daerah			TAPIN	Jumlah sanggar seni budaya terbina	6 kelompok	56.354.000	0	0	6 kelompok	56.754.000
3 2	Pariwisata										
3 2 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik	75%	226.880.000	0	0	78	226.080.000
3 2 16	16 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata			TAPIN	Jumlah rakoor	3 kali	27.280.000	0	0	3 kali	27.280.000
3 2 16	21 Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Operasional Destinasi Wisata			TAPIN	Jumlah destinasi yang terpelihara	5 buah	199.600.000	0	0	5 buah	198.800.000
3 2 18	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase destinasi wisata yang Dipasarkan	35%	376.335.000	0	0	40	388.920.000
3 2 18	5 Pemilihan duta wisata daerah			TAPIN	waktu Pemilihan duta wisata daerah	12 bulan	108.050.000	0	0	12 bulan	123.050.000
3 2 18	6 Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pemasaran Pariwisata			TAPIN	Jumlah informasi pariwisata	48 buah	54.600.000	0	0	48 buah	54.600.000



Kode	Usuran /Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 2 18	7 Penyusunan Profil Pariwisata Kabupaten Tapin			TAPIN	waktu Penyusunan Profil Pariwisata Kabupaten Tapin	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	30.000.000
3 2 18	8 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara			TAPIN	Jumlah promosi pariwisata	6 kali	85.850.000	0	0	6 kali	81.000.000
3 2 18	9 Lomba Foto Tempat Wisata Kabupaten Tapin			TAPIN	waktu Lomba Foto Tempat Wisata Kabupaten Tapin	12 bulan	17.325.000	0	0	12 bulan	19.700.000
3 2 18	10 Pembuatan bahan dan Pembelian Alat Promosi Pariwisata			TAPIN	Jumlah alat dan bahan promosi pariwisata	6 jenis	50.810.000	0	0	6 jenis	50.870.000
3 2 18	14 Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan			TAPIN	waktu Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	29.700.000	0	0	12 bulan	29.700.000
3 2 20	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina	40%	46.874.000	0	0	45	62.580.000
3 2 20	1 Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata			TAPIN	waktu Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	12 bulan	28.634.000	0	0	12 bulan	36.990.000
3 2 20	2 Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata			TAPIN	waktu Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	12 paket	18.240.000	0	0	12 paket	25.590.000
3 2 21	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	35%	15.940.000	0	0	40	-
3 2 21	2 Pembinaan Pokdarwis			TAPIN	Jumlah Pokdarwis yang dibina	40 orang	15.940.000	0	0	40 orang	-
2 17 1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						1.351.604.759	0	0		500.000
2 17	Perpustakaan										
2 17 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	519.709.800	0	0	100	-
2 17 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	1.935.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	80.500.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	28.960.800	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	21.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	81.430.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	164.720.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	19 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	95.164.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 1	21 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	25.000.000	0	0	1 Kali	-
2 17 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0%	48.598.959	0	0	0	-
2 17 2	11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	13.448.959	0	0	12 Bulan	-
2 17 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	4.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	-
2 17 2	45 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	29 Buah	1.150.000	0	0	29 Buah	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
217	6		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	5.200.000	0	0	100	-		
217	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TAPIN	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan	4.000.000	0	0	13 Laporan	-		
217	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun	2 Laporan	1.200.000	0	0	2 Laporan	-		
217	15		Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	4,97%	160.768.000	0	0	5,47	-
217	15	1	Peningkatan Pelayanan dan Informasi	TAPIN	Jumlah orang yang dilayani dengan baik	21817 Orang	160.768.000	0	0	21817 Orang	-		
217	16		Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP	50%	483.250.000	0	0	33,33	-
217	16	1	Penyediaan Bahan Perpustakaan	TAPIN	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	800 Buku	133.000.000	0	0	800 Buku	-		
217	16	4	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	TAPIN	Jumlah Perpustakaan yang dibina	16 Buah	250.000	0	0	16 Buah	-		
217	16	5	Pembangunan Sarana Gedung/kantor	TAPIN	waktu Pembangunan Sarana Gedung/kantor	12 bulan	350.000.000	0	0	12 bulan	-		
217	17		Program Promosi Perpustakaan		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan Perpustakaan	Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	1,08%	59.100.000	0	0	0,37	-
217	17	1	Pameran dan Promosi Perpustakaan	TAPIN	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak	3 Jenis	13.600.000	0	0	3 Jenis	-		
217	17	2	Gerakan Minat dan Budaya Baca	TAPIN	Jumlah pengunjung (pemustaka)	21817 Orang	45.500.000	0	0	21817 Orang	-		
218			Kearsipan										
218	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Persentase pengelola arsip yang terampil	55,55%	8.710.000	0	0	57,78	500.000
218	15	9	Penyusunan Perbup Kearsipan	TAPIN	Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun	1 Paket	5.000.000	0	0	1 Paket	-		
218	15	11	Penilaian dan Pemusnahan Arsip	TAPIN	Jumlah Penilaian dan Pemusnahan Arsip	1 kali	3.460.000	0	0	1 kali	-		
218	15	12	Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	TAPIN	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK	1220 Berkas	250.000	0	0	1220 Berkas	500.000		
218	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Persentase jumlah perangkat daerah dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	55,55%	66.268.000	0	0	57,78	-
218	16	5	Pendataan dan penataan dokumen/arsip Daerah	TAPIN	Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24 Buah	39.168.000	0	0	24 Buah	-		
218	16	6	Bimbingan Teknis Kearsipan	TAPIN	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan	100 Orang	100.000	0	0	100 Orang	-		
218	16	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip Daerah	12 Bulan	15.250.000	0	0	12 Bulan	-		
218	16	9	Pengawasan Kearsipan	TAPIN	Jumlah pengelola arsip yang terampil	2 orang	11.750.000	0	0	2 orang	-		



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan										
3 1 1	Dinas Perikanan						1.883.789.524	0	0		41.010.000
3 1	Kelautan dan Perikanan										
3 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	689.579.524	0	0	100	-
3 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) (bulan)	12 bulan	75.600.000	0	0	12 bulan	-
3 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12 bulan	19.505.000	0	0	12 bulan	-
3 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	12 bulan	45.061.700	0	0	12 bulan	-
3 1 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12 bulan	8.500.000	0	0	12 bulan	-
3 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12 bulan	71.804.000	0	0	12 bulan	-
3 1 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta pembinaan dan money dalam daerah dan penas tani	12 bulan	441.008.824	0	0	12 bulan	-
3 1 1 19	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah terlaksananya Tapin Expo (kali)	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	-
3 1 1 20	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (bulan)	12 bulan	3.100.000	0	0	12 bulan	-
3 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	70%	262.050.000	0	0	70	-
3 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor			TAPIN	waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	31.000.000	0	0	12 bulan	-
3 1 2 11	Pengadaan peralatan kantor			TAPIN	jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	1 unit	97.450.000	0	0	1 unit	-
3 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab dan sertifikasi tanah pemerintah	2 Paket	50.000.000	0	0	2 Paket	-
3 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	26 Unit	68.600.000	0	0	26 Unit	-
3 1 2 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor			TAPIN	Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	15.000.000	0	0	20 Unit	-
3 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	26.425.000	0	0	100	-
3 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	8 buku	21.325.000	0	0	8 buku	-
3 1 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	5 laporan	5.100.000	0	0	5 laporan	-
3 1 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	100%	564.460.000	0	0	100	-
3 1 20 4	Pengembangan BBI lokal linuh			TAPIN	Jumlah Bulan Sarana dan Prasana BBIL LINUH (Bulan)	12 bulan	250.560.000	0	0	12 bulan	-
3 1 20 14	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan			TAPIN	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	5 paket	279.130.000	0	0	5 paket	-
3 1 20 31	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan			TAPIN	waktu Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan	12 bulan	20.000.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 1 20 34	Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Bidang Perikanan			TAPIN	waktu Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Bidang Perikanan	12 bulan	14.770.000	0	0	12 bulan	-
3 1 21	Program pengembangan perikanan Tangkap				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	156.250.000	0	0	100	30.560.000
3 1 21 11	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan			TAPIN	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	15 kali	54.560.000	0	0	15 kali	30.560.000
3 1 21 13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi			TAPIN	waktu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi	12 bulan	39.160.000	0	0	12 bulan	-
3 1 21 16	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan			TAPIN	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 bulan	62.530.000	0	0	12 bulan	-
3 1 26	Program Peningkatan Kualitas SDM, Kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan				Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100%	185.025.000	0	0	100	10.450.000
3 1 26 1	Kampanye Makan Ikan			TAPIN	waktu Kampanye Makan Ikan	12 bulan	59.300.000	0	0	12 bulan	-
3 1 26 2	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan			TAPIN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 bulan	18.500.000	0	0	12 bulan	-
3 1 26 4	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan			TAPIN	Jumlah uji sampel produk perikanan	10 sampel	81.950.000	0	0	10 sampel	4.000.000
3 1 26 5	Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan			TAPIN	waktu Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan	12 bulan	10.450.000	0	0	12 bulan	6.450.000
3 1 26 6	Penumbuhkembangan Kelompok			TAPIN	Jumlah Kelompok perikanan yang naik Kelas	7 kelompok	14.825.000	0	0	7 kelompok	-
3 3 1	Dinas Pertanian						13.678.960.353	0	0		-
3 3	Pertanian										
3 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	2.366.308.300	0	0	100	-
3 3 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Telpon Internet Listrik dan Air (Bulan)	12 bulan	203.890.000	0	0	12 bulan	-
3 3 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan ATK (Bulan)	12 bulan	87.468.300	0	0	12 bulan	-
3 3 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	waktu pemenuhan barang cetakan dan penggandaan dan penjilidan (Bulan)	12 bulan	24.750.000	0	0	12 bulan	-
3 3 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 bulan	253.000.000	0	0	12 bulan	-
3 3 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadiri rapat koordinasi (Bulan)	12 Bulan	1.234.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 1 20	Tapin Expo			TAPIN	jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan (kali)	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	-
3 3 1 23	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor (Bulan)	12 Bulan	217.800.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 1 24	Penyediaan Jasa Administrasi Kecamatan			TAPIN	Waktu optimalnya pelayanan administrasi kecamatan (Bulan)	12 Bulan	320.400.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	405.637.653	0	0	100	-
3 3 2 48	Pengelolaan Kebun Dinas			TAPIN	Waktu terpeliharanya kebun dinas (Bulan)	12 Bulan	7.675.003	0	0	12 Bulan	-
3 3 2 50	Peningkatan Sarana Prasarana Kebun Pertanian Terpadu			TAPIN	Jumlah terpenuhinya perlengkapan Kebun Petanian Terpadu	1 paket	500.000	0	0	1 paket	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 3 2 51	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor hingga dapat digunakan dan berfungsi dengan baik (Bulan)	12 Bulan	174.462.650	0	0	12 Bulan	-
3 3 2 52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan	223.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	15.060.000	0	0	100	-
3 3 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (Dokumen)	5 Dokumen	11.310.000	0	0	5 Dokumen	-
3 3 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan secara Berkala	4 Dokumen	3.750.000	0	0	4 Dokumen	-
3 3 25	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Produktivitas Padi	50,72Ku/Ha	829.189.000	0	0	51,48	-
3 3 25 1	Pengembangan Tanaman Pangan Berkelanjutan			TAPIN	Luas Pertanaman Padi	86535 Ha	232.715.000	0	0	86535 Ha	-
3 3 25 3	Optimalisasi Pengelolaan UPB Padi dan Palawija			TAPIN	Jumlah Produksi Benih Padi Bermutu (ton)	7 Ton	190.570.000	0	0	7 Ton	-
3 3 25 4	Pengembangan Penangkaran Padi dan palawija			TAPIN	Jumlah Kelompok penangkar yang dibina	3 Kelompok	42.064.000	0	0	3 Kelompok	-
3 3 25 5	Penanganan dan pengendalian OPT Tanaman pangan			TAPIN	Jumlah Bahan Pengendalian OPT (paket)	1 Paket	248.690.000	0	0	1 Paket	-
3 3 25 6	Optimalisasi pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP)			TAPIN	Waktu Optimalisasi pengelolaan TTP	1 Tahun	115.150.000	0	0	1 Tahun	-
3 3 26	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase RMU yang menghasilkan Beras dengan mutu baik	15unit	69.205.000	0	0	20	-
3 3 26 1	Pengembangan pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan			TAPIN	Jumlah pertemuan kelompok usaha dan pengolahan hasil pertanian (kali)	6 kali	38.980.000	0	0	6 kali	-
3 3 26 2	Promosi dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan			TAPIN	Jumlah promosi hasil produksi dan pengolahan Tanaman Pangan	1 kali	30.225.000	0	0	1 kali	-
3 3 27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		- Jumlah Produksi Cabe Rawit Hiyung	464Ton	732.965.000	0	0	1538	-
3 3 27 1	Pengembangan Sentra Cabe Rawit Hiyung			TAPIN	Jumlah Pengembangan Cabe Rawit Hiyung (Ha)	25 Ha	55.635.000	0	0	25 Ha	-
3 3 27 2	Optimalisasi Pengelolaan UPB Hortikultura			TAPIN	Jumlah Produksi Bibit Jeruk Tempel	5000 Mata	173.630.000	0	0	5000 Mata	-
3 3 27 3	Pengembangan Komoditi Jeruk			TAPIN	Jumlah Pengembangan Jeruk (Ha)	25 Ha	128.655.000	0	0	25 Ha	-
3 3 27 5	Pengembangan Kawasan Bawang Merah			TAPIN	Jumlah Pengembangan Bawang Merah (Ha)	78 Ha	146.615.000	0	0	78 Ha	-
3 3 27 8	Pengelolaan Kebun Pertanian Terpadu			TAPIN	Waktu pengelolaan Kebun Pertanian Terpadu (Bulan)	12 Bulan	126.605.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 27 9	Pengembangan Aneka Sayuran dan Tanaman Obat			TAPIN	Jumlah Desa pengembangan tanaman Toga dan sayuran (Desa)	1 Desa	101.825.000	0	0	1 Desa	-
3 3 28	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	1%	98.950.000	0	0	1	-
3 3 28 2	Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura			TAPIN	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	1 Kali	30.000.000	0	0	1 Kali	-
3 3 28 4	Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman Holtikultura			TAPIN	Jumlah komoditas hortikultura yg di sertifikasi (komoditas)	1 komoditas	60.550.000	0	0	1 komoditas	-
3 3 28 5	Pengembangan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Hortikultura			TAPIN	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan yang dibina (kelompok)	1 Kelompok	8.400.000	0	0	1 Kelompok	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 3 29	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	12,50%	7.216.045.000	0	0	15	-
3 3 29	1 Pengelolaan lahan			TAPIN	Luas Intensifikasi lahan (Ha)	100 Ha	281.720.000	0	0	100 Ha	-
3 3 29	2 Pengelolaan Air			TAPIN	Jumlah sarana pengairan dan irigasi yang dibangun/direhab (paket)	2 paket	49.600.000	0	0	2 paket	-
3 3 29	4 Peningkatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pembinaan dan Pengawasan Alsintan			TAPIN	Jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia sesuai kuota (ton)	5600 Ton	192.800.000	0	0	5600 Ton	-
3 3 29	5 Pembiayaan dan Investasi			TAPIN	Jumlah Peserta AUTP	3500 Orang	71.925.000	0	0	3500 Orang	-
3 3 29	10 Pengembangan Infrastruktur Pertanian			TAPIN	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	5000 Meter	6.620.000.000	0	0	5000 Meter	-
3 3 30	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase lahan sawah fungsional yang Terairi	15,35%	420.635.000	0	0	15,4	-
3 3 30	1 Pengembangan Kelapa Sawit			TAPIN	Jumlah Luasan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat yang dikembangkan (Ha)	25 Ha	36.195.000	0	0	25 Ha	-
3 3 30	4 Operasional TP3K			TAPIN	Jumlah Bokar Bermutu	500 Ton	34.990.000	0	0	500 Ton	-
3 3 30	8 Pengembangan Peremajaan dan Intensifikasi Tanaman Karet			TAPIN	Luas Intensifikasi Karet	15 Ha	90.395.000	0	0	15 Ha	-
3 3 30	9 Perbenihan Tanaman Perkebunan			TAPIN	Jumlah Ketersediaan Bibit Karet Okulasi Yang Bermutu	20000 pohon	82.635.000	0	0	20000 pohon	-
3 3 30	10 Perlindungan Tanaman Perkebunan			TAPIN	Jumlah Kelompok Tani yang terlatih PHT Perkebunan	2 Kelompok	97.485.000	0	0	2 Kelompok	-
3 3 30	12 Sharing Kegiatan Dirjenbun, PSP, APBD Provinsi			TAPIN	Jumlah Kelompok Tani yang didampingi	3 Kelompok	78.935.000	0	0	3 Kelompok	-
3 3 31	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik	21,88%	43.469.000	0	0	25	-
3 3 31	1 Peningkatan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Produksi Karet dan Kelapa Sawit			TAPIN	Jumlah Bimtek yang diselenggarakan (Kali)	9 Kali	43.469.000	0	0	9 Kali	-
3 3 32	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Produktivitas Tanaman Karet	651,27 Ku/Ha	765.125.000	0	0	670,8	-
3 3 32	10 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			TAPIN	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	12 kecamatan	96.060.000	0	0	12 kecamatan	-
3 3 32	12 Pemberantasan rabies			TAPIN	Jumlah cakupan wilayah pemberantasan rabies tingkat kabupaten (Kecamatan)	12 kecamatan	13.190.000	0	0	12 kecamatan	-
3 3 32	23 Pengembangan Ternak unggulan			TAPIN	Jumlah bantuan hadiah ternak unggulan (Paket)	2 paket	75.600.000	0	0	2 paket	-
3 3 32	41 Optimalisasi Pengelolaan Taman Teknologi Pertanian Bidang Peternakan (TTP)			TAPIN	Waktu optimalisasi pengelolaan TTP Bidang peternakan (tahun)	1 tahun	152.320.000	0	0	1 tahun	-
3 3 32	42 Optimalisasi Kawin Suntik Sapi dan Pembibitan Ternak			TAPIN	Waktu optimalisasi pengelolaan pembibitan ternak	1 Tahun	392.630.000	0	0	1 Tahun	-
3 3 32	45 Optimalisasi & revitalisasi puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan)			TAPIN	Waktu pelayanan kesehatan hewan pada wilayah sentra peternakan	12 Bulan	35.325.000	0	0	12 Bulan	-
3 3 33	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina	2%	113.575.000	0	0	2	-
3 3 33	2 Promosi atas hasil produksi peternakan			TAPIN	Waktu Promosi atas hasil produksi peternakan	12 bulan	37.400.000	0	0	12 bulan	-
3 3 33	9 Inventarisasi Pengolahan Hasil Peternakan			TAPIN	Jumlah Inventarisasi Pengolahan Hasil Peternakan	1 paket	76.175.000	0	0	1 paket	-
3 3 34	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Kelas kelompok tani Madya	19%	602.796.400	0	0	22	-
3 3 34	3 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani			TAPIN	Jumlah Kelas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan (BPP) yang Meningkatkan (unit)	200 Unit	53.050.000	0	0	200 Unit	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 3 34 19	Peningkatan Pendapatan Pertanian Berrigasi (IPDMIP)			TAPIN	Jumlah Kelompok Tani yang di berdayakan (kelompok)	51 Kelompok	500.000	0	0	51 Kelompok	-
3 3 34 21	Penyuluhan berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi			TAPIN	Jumlah Media Informasi Penyuluhan yang diterbitkan (paket)	7 Paket	125.900.000	0	0	7 Paket	-
3 3 34 22	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian			TAPIN	Jumlah Percontohan usaha tani yang dilaksanakan (unit)	8 unit	83.900.000	0	0	8 unit	-
3 3 34 23	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian			TAPIN	Jumlah Programa Penyuluhan Pertanian yang Disusun (Buku)	13 Buku	41.150.000	0	0	13 Buku	-
3 3 34 24	Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan			TAPIN	Jumlah lomba penyuluhan yang Dilaksanakan	1 Kali	179.475.000	0	0	1 Kali	-
3 3 34 25	Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh			TAPIN	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (orang)	13 Orang	118.821.400	0	0	13 Orang	-
3 6 2	Dinas Perdagangan						3.657.362.420	0	0		470.065.004
3 6	Perdagangan										
3 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	957.642.420	0	0	100	38.912.504
3 6 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	waktu ketersediaan jasa telepon listrik dan air	12 Bulan	130.350.964	0	0	12 Bulan	1.500.004
3 6 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	waktu ketersediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	90.300.000	0	0	12 Bulan	8.000.000
3 6 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	waktu ketersediaan jasa petugas kebersihan kantor	12 Bulan	80.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	54.065.376	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan komponen listrik	12 Bulan	9.912.500	0	0	12 Bulan	9.912.500
3 6 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	waktu ketersediaan konsumsi	12 Bulan	96.662.500	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu ketersediaan Perjalanan Dinas	12 Bulan	422.551.080	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	waktu ketersediaan jasa Keamanan kantor	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	-
3 6 1 20	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah tersedianya Tapin Expo	1 kegiatan	25.000.000	0	0	1 kegiatan	19.500.000
3 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	128.500.000	0	0	100	130.702.500
3 6 2 11	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Kantor	7 buah	11.000.000	0	0	7 buah	-
3 6 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	12 bulan	20.000.000	0	0	12 bulan	20.000.000
3 6 2 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Inventaris Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan Peralatan inventaris kantor	12 bulan	18.000.000	0	0	12 bulan	15.002.500
3 6 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			TAPIN	waktu Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	1.000.000
3 6 2 46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			TAPIN	waktu ketersediaan jasa kendaraan dinas/operasional	12 bulan	78.500.000	0	0	12 bulan	94.700.000
3 6 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	14.030.000	0	0	100	7.700.000
3 6 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah ketersediaan laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja	10 laporan	9.550.000	0	0	10 laporan	5.900.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 6 6	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan		TAPIN	Jumlah ketersediaan laporan keuangan	2 laporan	4.480.000	0	0	2 laporan	1.800.000
3 6 15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							
3 6 15	5	Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Terbungkus		TAPIN	waktu ketersediaan Pengawasan barang beredar, barang dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus	12 bulan	11.600.000	0	0	12 bulan	2.000.000
3 6 15	6	Penyuluhan Perlindungan Konsumen		TAPIN	Jumlah ketersediaan penyuluhan	1 kali	8.000.000	0	0	1 kali	-
3 6 15	7	Pengawasan dan Penertiban Reklame		TAPIN	waktu ketersediaan pengawasan dan penertiban reklame	12 bulan	13.780.000	0	0	12 bulan	6.000.000
3 6 15	9	Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Informasi Harga Sembako		TAPIN	waktu ketersediaan Pengawasan, pemantauan, monitoring dan informasi harga sembako	12 bulan	7.540.000	0	0	12 bulan	-
3 6 15	10	Operasi Pasar		TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	3 Kali	23.700.000	0	0	3 Kali	-
3 6 15	11	Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP)		TAPIN	Jumlah Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTTP)	4 kali	15.100.000	0	0	4 kali	5.000.000
3 6 15	13	Pengadaan peralatan standar kemetrologi		TAPIN	waktu Pengadaan peralatan standar kemetrologi	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	1.000.000
3 6 15	14	Pembangunan Gedung Metrologi		TAPIN	waktu Pembangunan Gedung Metrologi	12 bulan	500.000	0	0	12 bulan	-
3 6 20		Program Promosi dan Informasi Daerah	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							
3 6 20	5	Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin		TAPIN	jumlah partisipasi pameran luar kabupaten Tapin	2 Kali	80.000.000	0	0	2 Kali	23.000.000
3 6 20	18	Semarak hari jadi Kabupaten Tapin		TAPIN	jumlah Koordinasi penyelenggaraan Tapin Expo	1 Kali	50.000.000	0	0	1 Kali	2.500.000
3 6 21		Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							
3 6 21	8	Pembersihan Lingkungan pasar		TAPIN	waktu ketersediaan Pembersihan lingkungan pasar	12 bulan	1.137.180.000	0	0	12 bulan	-
3 6 21	10	Pengamanan dan penertiban pasar		TAPIN	waktu ketersediaan Pengamanan dan penertiban pasar	12 bulan	490.800.000	0	0	12 bulan	-
3 6 21	12	Pemeliharaan sarana/prasarana pasar		TAPIN	waktu ketersediaan pemeliharaan sarana/prasarana pasar	12 bulan	33.500.000	0	0	12 bulan	-
3 6 21	14	pembangunan pasar		TAPIN	waktu pembangunan pasar	12 bulan	200.000	0	0	12 bulan	-
3 6 21	20	Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Warung		TAPIN	jumlah ketersediaan database pasar	1000 surat	25.000.000	0	0	1000 surat	-
3 6 21	21	Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting		TAPIN	Jumlah Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	48 Kali	3.800.000	0	0	48 Kali	-
3 6 21	22	Pemutakhiran Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung		TAPIN	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat	1000 data	40.000.000	0	0	1000 data	-
3 6 21	25	Pembersihan Drainase Pasar		TAPIN	waktu ketersediaan Pembersihan drainase pasar	12 bulan	253.640.000	0	0	12 bulan	225.000.000
3 6 21	26	Peresmian Pasar Kuliner Ramadhan		TAPIN	waktu ketersediaan Peresmian pasar kuliner ramadhan	1 kegiatan	48.250.000	0	0	1 kegiatan	2.400.000
3 6 21	27	Pembuatan raperda retribusi pasar		TAPIN	waktu Pembuatan raperda retribusi pasar	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	1.000.000
3 6 21	28	revitalisasi pasar tradisional		TAPIN	waktu revitalisasi pasar tradisional	12 bulan	500.000	0	0	12 bulan	500.000
3 6 21	29	Pengembangan dan peningkatan pasar		TAPIN	waktu Pengembangan dan peningkatan pasar	12 bulan	1.000.000	0	0	12 bulan	1.000.000
3 6 22		Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							
3 6 22	1	Sosialisasi SRG		TAPIN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan	100%	311.100.000	0	0	100	23.350.000
3 6 22	2	Penyuluhan pedagang kecil informal		TAPIN	waktu Sosialisasi SRG	12 bulan	29.400.000	0	0	12 bulan	-
3 6 22				TAPIN	jumlah ketersediaan penyuluhan pedagang informal kecil	1 kali	8.000.000	0	0	1 kali	-





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 6 22	3 Rekomendasi izin usaha perdagangan			TAPIN	jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	400 surat	35.000.000	0	0	400 surat	-
3 6 22	4 Pengawasan, monitoring dan evaluasi perusahaan			TAPIN	jumlah Pengawasan monitoring dan evaluasi perusahaan	12 kali	2.925.000	0	0	12 kali	-
3 6 22	5 Monitoring dan pengawasan SRG			TAPIN	Waktu Monitoring dan pengawasan SRG	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	2.000.000
3 6 22	6 Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol			TAPIN	jumlah Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	12 kali	10.775.000	0	0	12 kali	11.550.000
3 6 22	7 Pengelolaan SRG			TAPIN	jumlah ketersediaan kegiatan operasional Pengelolaan SRG	12 bulan	223.000.000	0	0	12 bulan	9.800.000
3 7 1	Dinas Perindustrian						1.983.337.760	0	0		-
2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro	19,51%	6.597.500	0	0	20,9	-
2 11 16	12 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru			TAPIN	Jumlah pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru	1 kali	6.597.500	0	0	1 kali	-
2 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,41%	47.050.000	0	0	88,59	-
2 11 18	11 Pemeringkatan Koperasi			TAPIN	Jumlah pemeringkatan koperasi	1 Kali	12.700.000	0	0	1 Kali	-
2 11 18	14 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi			TAPIN	Jumlah penyuluhan perpajakan bagi koperasi	1 Kali	6.200.000	0	0	1 Kali	-
2 11 18	16 Bimbingan Persiapan RAT Koperasi			TAPIN	Jumlah bimbingan persiapan RAT Koperasi	1 kali	6.550.000	0	0	1 kali	-
2 11 18	18 Pengelolaan Data Koperasi Online			TAPIN	Waktu penyediaan pengelolaan data koperasi online	12 Bulan	21.600.000	0	0	12 Bulan	-
2 11 19	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	15,95%	22.000.000	0	0	16,91	-
2 11 19	1 Pembinaan UP2K			TAPIN	Jumlah pembinaan UP2K	1 kali	22.000.000	0	0	1 kali	-
3 7	Perindustrian										
3 7 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase Bertambahnya Usaha Industri logam dan aneka	2,01%	1.017.560.260	0	0	2,37	-
3 7 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56.400.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	57.600.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	16.900.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	28.201.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11.500.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Jumlah ketersediaan komponen listrik	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	63.870.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu ketersediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	745.689.260	0	0	12 Bulan	-
3 7 1	19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	12 Bulan	14.400.000	0	0	12 Bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3 7 1 20	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah partisipasi Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	-
3 7 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,37%	39.940.000	0	0	0,38	-
3 7 2 11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	30.450.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 2 12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Paket	4.490.000	0	0	1 Paket	-
3 7 2 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah ketersediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Paket	5.000.000	0	0	1 Paket	-
3 7 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	80%	11.000.000	0	0	80	-
3 7 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.500.000	0	0	13 Laporan	-
3 7 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 Laporan	5.500.000	0	0	2 Laporan	-
3 7 20	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	2,01%	191.190.000	0	0	2,37	-
3 7 20 1	Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah			TAPIN	Waktu penyediaan inventarisasi dan pendataan usaha IKM	12 Bulan	97.990.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 20 3	Sosialisasi Tertib Administrasi dan Peizinan Bidang Perindustrian Bagi Industri Kecil dan Menengah			TAPIN	Jumlah sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1 kali	8.290.000	0	0	1 kali	-
3 7 20 4	Pembangunan Rumah dan Peralatan Kemasan Produk Industri			TAPIN	Rumah kemasan untuk produk IKM	1 paket	510.000	0	0	1 paket	-
3 7 20 6	Pelatihan tentang Usaha dan industri bidang logam dan aneka			TAPIN	Jumlah pelatihan tentang Usaha dan industri bidang logam dan aneka	1 kali	15.700.000	0	0	1 kali	-
3 7 20 8	Fasilitasi Promosi Hasil Kerajinan Kain Sasirangan			TAPIN	Jumlah Fasilitasi Promosi Hasil Kerajinan Kain Sasirangan	1 kali	53.000.000	0	0	1 kali	-
3 7 20 9	Pelatihan Teknis Pembuatan Bata Ringan			TAPIN	Jumlah Pelatihan Teknis Pembuatan Bata Ringan	1 kali	15.700.000	0	0	1 kali	-
3 7 21	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,37%	648.000.000	0	0	0,38	-
3 7 21 2	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin EXPO			TAPIN	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin EXPO	1 Kali	130.000.000	0	0	1 Kali	-
3 7 21 3	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo			TAPIN	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	1 Kali	87.600.000	0	0	1 Kali	-
3 7 21 4	Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival Sasirangan			TAPIN	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival Sasirangan	1 Kali	55.000.000	0	0	1 Kali	-
3 7 21 5	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional			TAPIN	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	2 Kali	157.000.000	0	0	2 Kali	-
3 7 21 6	Pendukung Operasionalisasi DEKRANASDA KAB.TAPIN			TAPIN	Jumlah penyediaan pendukung Operasionalisasi DEKRANASDA Kab.Tapin	12 Bulan	2.500.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 21 7	Kegiatan Pengolahan Kaolin			TAPIN	Waktu ketersediaan operasional kegiatan pengolahan kaolin	12 Bulan	105.000.000	0	0	12 Bulan	-
3 7 21 8	Kegiatan Galeri TAMASA			TAPIN	Waktu ketersediaan operasional Galeri TAMASA	12 Bulan	110.900.000	0	0	12 Bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)						429.587.000	0	0		460.700.022
1	Administrasi Pemerintahan										
1 15	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah				Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	3,0 Poin	141.200.000	0	0	3	120.200.022
1 15	1 Penyusunan dokumen LKPJ Tahunan			TAPIN	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	1 Dokumen	43.800.000	0	0	1 Dokumen	43.800.000
1 15	2 Penyusunan dokumen LPPD			TAPIN	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	2 Dokumen	48.400.000	0	0	2 Dokumen	26800021.6
1 15	8 Fasilitasi kegiatan eksekutif dan legislatif			TAPIN	Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	12 bulan	49.000.000	0	0	12 bulan	49.600.000
1 16	Program Fasilitasi dan Penataan Batas Wilayah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan	100%	37.800.000	0	0	100	39.300.000
1 16	1 Penegasan batas kabupaten			TAPIN	Jumlah Konflik Batas Yang Diselesaikan (Kabupaten)	1 Kabupaten	30.900.000	0	0	1 Kabupaten	31.800.000
1 16	4 Penamaan dan Pembakuan Nama Rupabumi			TAPIN	Jumlah Kegiatan Penamaan Rupabumi	1 Kegiatan	6.900.000	0	0	1 Kegiatan	7.500.000
1 17	Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	100%	250.587.000	0	0	100	301.200.000
1 17	1 Pelaksanaan Hari Besar Sejarah Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	12 Kali	250.587.000	0	0	12 Kali	301.200.000
1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)						1.009.940.000	0	0		982.540.043
1	Administrasi Pemerintahan										
1 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum		Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub yang diharmonisasi	100%	1.009.940.000	0	0	100	982.540.043
1 26	1 Dokumentasi dan Informasi Hukum			TAPIN	waktu Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 bulan	142.980.000	0	0	12 bulan	99780043.2
1 26	2 Bantuan Hukum			TAPIN	waktu Bantuan Hukum	12 bulan	440.060.000	0	0	12 bulan	440.060.000
1 26	4 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			TAPIN	waktu Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	239.325.000	0	0	12 bulan	235.725.000
1 26	5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan			TAPIN	waktu Publikasi Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	43.800.000	0	0	12 bulan	52.800.000
1 26	7 Penyuluhan Hukum dan HAM			TAPIN	waktu Penyuluhan Hukum dan HAM	12 bulan	92.925.000	0	0	12 bulan	95.925.000
1 26	9 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia			TAPIN	waktu Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia	12 bulan	50.850.000	0	0	12 bulan	58.250.000
1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)						280.731.100	0	0		300.481.100
1	Administrasi Pemerintahan										
1 27	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%	34.855.000	0	0	100	36.855.000
1 27	1 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 bulan	8.855.000	0	0	12 bulan	9.855.000
1 27	3 Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)			TAPIN	waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 bulan	26.000.000	0	0	12 bulan	27.000.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 28	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	209.760.000	0	0	100	209.760.000
4 1 28	1 Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	12 bulan	67.000.000	0	0	12 bulan	67.000.000
4 1 28	3 Review dan Evaluasi Kelembagaan			TAPIN	waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	12 bulan	25.340.000	0	0	12 bulan	25.340.000
4 1 28	4 Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja			TAPIN	waktu Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	12 bulan	117.420.000	0	0	12 bulan	117.420.000
4 1 30	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100Nilai	12.250.000	0	0	100	20.000.000
4 1 30	1 Pembinaan Pelayanan Publik			TAPIN	waktu Pembinaan Pelayanan Publik	12 bulan	12.250.000	0	0	12 bulan	20.000.000
4 1 49	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah				Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%	23.866.100	0	0	100	33.866.100
4 1 49	1 Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan			TAPIN	waktu Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	12 bulan	23.866.100	0	0	12 bulan	33.866.100
4 1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol)						5.362.350.000	0	0		5.193.350.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 20	Program Publikasi Informasi	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokol		Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik	100%	4.990.850.000	0	0	100	4.981.850.000
4 1 20	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			TAPIN	waktu Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 bulan	2.085.950.000	0	0	12 bulan	2.085.950.000
4 1 20	3 Pengembangan Komunikasi, Publikasi Dan Media Massa			TAPIN	waktu Pengembangan Komunikasi, Publikasi Dan Media Massa	12 bulan	2.904.900.000	0	0	12 bulan	2.895.900.000
4 1 21	Program Protokoler	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokol		Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani	100%	371.500.000	0	0	100	211.500.000
4 1 21	1 Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah			TAPIN	waktu Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	12 bulan	371.500.000	0	0	12 bulan	211.500.000
4 1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)						16.459.309.567	0	0		16.216.596.246
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	12.177.983.567	0	0	100	11.933.135.323
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	168.800.000	0	0	12 bulan	94.800.000
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.596.000.000	0	0	12 bulan	1.596.000.000
4 1 1	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	238.200.000	0	0	12 bulan	219.600.000
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	367.690.200	0	0	12 bulan	367.565.977
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	66.000.000	0	0	12 bulan	60.000.000
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	2.126.100.000	0	0	12 bulan	2.126.100.000
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	4.351.450.112	0	0	12 bulan	4.225.409.868
4 1 1	22 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo	1 kali	53.000.000	0	0	1 kali	53.000.000
4 1 1	25 Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			TAPIN	waktu Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	12 bulan	3.009.080.000	0	0	12 bulan	3.009.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1 1 26	Peningkatan kesegaran jasmani PNS			TAPIN	waktu Peningkatan kesegaran jasmani PNS	12 bulan	79.263.255	0	0	12 bulan	80.779.478
1 1 49	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			TAPIN	waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	122.400.000	0	0	12 bulan	100.800.000
1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	35.230.000	0	0	100	37.364.923
1 6 5	Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tupoksi staf ahli			TAPIN	Jumlah Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tupoksi staf Ahli	3 pengkajian	11.330.000	0	0	3 pengkajian	9.540.000
1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang wajib disusun	2 laporan	23.900.000	0	0	2 laporan	27.824.923
1 24	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%	4.246.096.000	0	0	100	4.246.096.000
1 24 6	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Pemerintah			TAPIN	waktu Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Pemerintah	12 bulan	1.110.000.000	0	0	12 bulan	1.110.000.000
1 24 7	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	12 bulan	510.000.000	0	0	12 bulan	510.000.000
1 24 8	Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh			TAPIN	waktu Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh	12 bulan	1.513.596.000	0	0	12 bulan	1.513.596.000
1 24 9	Pengadaan Pakaian Dinas Kdh dan Wakil Kdh			TAPIN	waktu penyediaan Pakaian Dinas Kdh dan Wakil Kdh	12 bulan	755.000.000	0	0	12 bulan	755.000.000
1 24 10	Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1 kali	357.500.000	0	0	1 kali	357.500.000
1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)						686.499.700	0	0		658.092.390
1	Administrasi Pemerintahan										
1 25	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang undangan		Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya	90%	686.499.700	0	0	90	658.092.390
1 25 1	Peningkatan kinerja pelayanan pengadaan			TAPIN	Waktu rekapitulasi pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa yang tersedia	12 bulan	439.899.700	0	0	12 bulan	450.619.890
1 25 3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi, Informasi dan Laporan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa			TAPIN	waktu Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi, Informasi dan Laporan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	100.000	0	0	1 tahun	200.000
1 25 5	Penanganan Hukum dan snggah Pengadaan Barang/ Jasa			TAPIN	Waktu penanganan hukum dan snggah barang dan jasa	12 bulan	3.175.000	0	0	12 bulan	2.915.000
1 25 6	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	1.600.000	0	0	12 bulan	1.600.000
1 25 7	Peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa			TAPIN	jumlah peserta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12 bulan	38.175.000	0	0	12 bulan	34.177.500
1 25 8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			TAPIN	Waktu penyediaan lelang dan maintainance LPSE	12 bulan	200.900.000	0	0	12 bulan	155.780.000
1 25 9	Evaluasi dan pelaporan mingguan, bulanan dan rekapitulasi personal inti serta laporan POKJA pengadaa			TAPIN	waktu Evaluasi dan pelaporan mingguan, bulanan dan rekapitulasi personal inti serta laporan POKJA pengadaan	12 bulan	2.650.000	0	0	12 bulan	12.800.000
1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)						3.623.063.400	0	0		3.620.327.340
1	Administrasi Pemerintahan										
1 38	Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	71%	2.673.560.000	0	0	74	2.646.080.870
1 38 1	Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)			TAPIN	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang	296.668.300	0	0	300 orang	31.500.000
1 38 2	Safari Ramadhan			TAPIN	Jumlah kunjungan safari Ramadhan	20 kali	698.898.500	0	0	20 kali	768.788.350





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 38	3 Silaturahmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat			TAPIN	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang	492.153.000	0	0	300 orang	541.368.300
4 1 38	4 Semarak Idul Fitri			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Fitri	1 kegiatan	461.645.600	0	0	1 kegiatan	507.810.160
4 1 38	5 Semarak Idul Adha			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Adha	1 kegiatan	139.524.000	0	0	1 kegiatan	153.476.400
4 1 38	6 Safari Jum			TAPIN	Jumlah kunjungan safari Jumat	20 kali	254.632.800	0	0	20 kali	280.096.080
4 1 38	10 Peringatan Hari Besar Islam			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar Islam	5 kegiatan	330.037.800	0	0	5 kegiatan	363.041.580
4 1 39	Program Pembinaan Kesejahteraan Pembangunan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	88%	949.503.400	0	0	93	974.246.470
4 1 39	1 Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah			TAPIN	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah	1 kegiatan	252.839.200	0	0	1 kegiatan	278.123.120
4 1 39	2 Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran			TAPIN	Jumlah pensiunan wredatama yang dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya	29 orang/kali	256.165.700	0	0	29 orang/kali	211.575.000
4 1 39	3 Penunjang Organisasi			TAPIN	Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaan kegiatannya	5 organisasi	148.320.600	0	0	5 organisasi	163.152.660
4 1 39	4 Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-tokoh Ulama			TAPIN	Jumlah pelaksanaan silaturahmi	30 kali	239.071.400	0	0	30 kali	262.978.540
4 1 39	5 Silaturahmi Pemda dengan Keluarga Yang Meninggal			TAPIN	Jumlah tokoh masyarakat pemuka agama dan aktivis sosial yang mendapatkan fasilitasi masalah sosial	5 orang	53.106.500	0	0	5 orang	58.417.150
4 1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)						6.198.152.600	0	0		6.453.441.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.523.395.000	0	0	100	1.686.395.000
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan	90.000.000	0	0	12 Bulan	95.000.000
4 1 1	13 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	13 Kali	855.910.000	0	0	13 Kali	852.910.000
4 1 1	19 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	12 Bulan	415.600.000	0	0	12 Bulan	415.600.000
4 1 1	21 Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Asrama Mahasiswa			TAPIN	Waktu tersedia rumah Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	12 Bulan	161.885.000	0	0	12 Bulan	322.885.000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	96%	2.068.527.600	0	0	97	2.157.816.000
4 1 2	3 Pembangunan gedung kantor			TAPIN	Jumlah paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	3 Paket	135.061.600	0	0	5 Paket	1.000.000
4 1 2	5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			TAPIN	Jumlah kendaraan dinas/operasional	8 unit	500.000	0	0	8 unit	1.000.000
4 1 2	7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah paket perlengkapan gedung Kantor	3 Paket	500.000	0	0	3 Paket	2.000.000
4 1 2	11 Pengadaan Tanah			TAPIN	Jumlah penambahan tanah daerah	5 Paket	500.000	0	0	5 Paket	1.000.000
4 1 2	12 Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa			TAPIN	Jumlah paket perlengkapan Asrama Mahasiswa	2 Paket	500.000	0	0	2 Paket	1.000.000
4 1 2	21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			TAPIN	Waktu terpelihara rumah dinas	12 bulan	75.000.000	0	0	12 bulan	23.300.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu terpelihara gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 bulan	60.500.000	0	0	12 bulan	60.500.000
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu terpelihara fasilitas mobil dinas dan sepeda motor dinas di Sekretariat Daerah	12 Bulan	806.170.000	0	0	12 Bulan	1.130.120.000
4 1 2 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			TAPIN	Waktu terpelihara perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	70.000.000	0	0	12 Bulan	70.000.000
4 1 2 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu terpelihara perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan	136.500.000	0	0	12 Bulan	136.500.000
4 1 2 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan	222.600.000	0	0	12 Bulan	202.200.000
4 1 2 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Mahasiswa			TAPIN	Waktu terpelihara Asrama Mahasiswa/i Tapin	12 Bulan	283.596.000	0	0	12 Bulan	283.596.000
4 1 2 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			TAPIN	Waktu terpelihara fasilitas komputer dan kelengkapannya di Sekretariat Daerah dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan	71.000.000	0	0	12 Bulan	71.000.000
4 1 2 45	Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum			TAPIN	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	12 Bulan	250.000	0	0	12 Bulan	1.000.000
4 1 2 46	Manajemen Aset			TAPIN	Waktu Pengelolaan aset yang efektif dan efisien	12 Bulan	250.000	0	0	12 Bulan	1.000.000
4 1 2 61	Pemanfaatan Tanah Daerah			TAPIN	Pemanfaatan tanah daerah secara efektif dan efisien	12 Bulan	203.600.000	0	0	12 Bulan	170.600.000
4 1 2 62	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa			TAPIN	Barang dan jasa yang disediakan	1 Buah	2.000.000	0	0	1 Buah	2.000.000
4 1 24	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%	2.606.230.000	0	0	100	2.609.230.000
4 1 24 1	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Waktu Tersedianya belanja rumah tangga Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan	1.277.000.000	0	0	12 Bulan	1.259.000.000
4 1 24 2	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	5 bulan	682.000.000	0	0	5 bulan	700.000.000
4 1 24 3	Pemeliharaan Rumah Jabatan Dan Barang- Barang Inventaris Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan	304.730.000	0	0	12 Bulan	304.730.000
4 1 24 4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan	342.500.000	0	0	12 Bulan	345.500.000
4 1 3	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi Dan Pembangunan)						374.020.000	0	0		368.401.513
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	35.300.000	0	0	100	17.050.000
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	jumlah laporan kinerja dan dokumen perencanaan	5 dokumen	35.300.000	0	0	5 dokumen	17.050.000
4 1 22	Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	95%	37.300.000	0	0	100	29.480.011
4 1 22 2	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan			TAPIN	pesentase pengadaan barang dan jasa SKPD yang tepat waktu	90 Persen	12.000.000	0	0	95 Persen	1650010.56
4 1 22 3	Pendampingan dan Evaluasi CSR			TAPIN	jumlah laporan evaluasi CSR	5 dokumen	25.300.000	0	0	5 dokumen	27.830.000
4 1 23	Program perumusan kebijakan Perekonomian	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Menjaga stabilitas harga bahan pokok		Persentase BUMD yang sehat dan profitable	95%	301.420.000	0	0	100	321.871.502
4 1 23 1	Pengendalian Inflasi Daerah			TAPIN	jumlah laporan TPID	2 dokumen	61.500.000	0	0	2 dokumen	64845001.98
4 1 23 4	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan			TAPIN	jumlah dokumen kebijakan yang direkomendasikan	5 dokumen	45.705.000	0	0	5 dokumen	50.275.500

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 23	5 Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi			TAPIN	Jumlah rumusan kebijakan dibidang pertambangan yang ditindak lanjuti	10 kebijakan	18.545.000	0	0	10 kebijakan	19.124.000
4 1 23	6 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah			TAPIN	Jumlah BUMD yang sehat	6 BUMD	175.670.000	0	0	6 BUMD	187.627.000
4 1 4	Sekretariat DPRD						25.808.549.329	0	0		14.081.608.645
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	2.023.115.000	0	0	90	1.891.785.000
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	650 Buah	25.000.000	0	0	650 Buah	25.000.000
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik (bulan)	12 Bulan	175.000.000	0	0	12 Bulan	175.000.000
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Jumlah dan jenis Alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	61.970.000	0	0	12 Bulan	62.000.000
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12 Bulan	32.000.000	0	0	12 Bulan	32.000.000
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Jumlah dan jenis barang Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	44 Buah	25.000.000	0	0	44 Buah	17.000.000
4 1 1	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			TAPIN	Waktu bahan bacaan yang disediakan koran/surat kabar	12 Bulan	108.000.000	0	0	12 Bulan	108.000.000
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	245.100.000	0	0	12 Bulan	247.500.000
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan)	12 Bulan	500.000.000	0	0	12 Bulan	500.000.000
4 1 1	19 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Org/Thn)	156 Orang/Tahun	221.600.000	0	0	156 Orang/Tahun	203.600.000
4 1 1	22 Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin EXPO (Kali)	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	20.000.000
4 1 1	27 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta Atributnya			TAPIN	Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (Stell)	175 Stell	284.645.000	0	0	175 Stell	247.285.000
4 1 1	47 Penyediaan Jasa Jasmani pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota beserta Medical Check Up			TAPIN	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	25 Orang	75.000.000	0	0	25 Orang	150.000.000
4 1 1	48 Penyediaan Jasa Non PNS			TAPIN	Waktu Tenaga Pengolah data umum dan Kepegawaian yang tersedia (Bulan)	12 Bulan	244.800.000	0	0	12 Bulan	104.400.000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	2.571.161.500	0	0	90	5.989.383.630
4 1 2	7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)	50 Buah	25.000.000	0	0	50 Buah	25.000.000
4 1 2	9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit/Buah)	25 Unit/Buah	100.000.000	0	0	25 Unit/Buah	3.500.983.630
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	70.000.000	0	0	12 bulan	70.000.000
4 1 2	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (Bulan)	12 Bulan	165.000.000	0	0	12 Bulan	165.000.000
4 1 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mobil Kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan	156.761.500	0	0	12 Bulan	174.000.000
4 1 2	63 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mesin genset (Bulan)	12 Bulan	54.400.000	0	0	12 Bulan	54.400.000
4 1 2	69 Rehab Gedung Kantor			TAPIN	Waktu pelaksanaan rehab gedung/kantor	12 Bulan	2.000.000.000	0	0	12 Bulan	2.000.000.000





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase aparatur sesuai kompetensinya	90%	3.400.000.000	0	0	90	4.222.000.000
4 1 5	5 Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara			TAPIN	Waktu yang disediakan untuk Aparatur mengikuti workshop/bimtek diklat seminar, sosialisasi, pendampingan kunker/studi banding anggota DPRD	12 Bulan	3.400.000.000	0	0	12 Bulan	4.222.000.000
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	1.775.000	0	0	100	900.000
4 1 6	8 Penyusunan Pelaporan Kinerja/Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin			TAPIN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	15 Laporan	1.775.000	0	0	15 Laporan	900.000
4 1 31	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	15.928.033.829	0	0	90	675.000.015
4 1 31	1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			TAPIN	Waktu pelaksanaan Ketua dan Anggota DPRD untuk mengikuti workshop/bimtek, studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	15.928.033.829	0	0	12 Bulan	675.000.015.353
4 1 32	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	80%	1.557.639.000	0	0	80	996.340.000
4 1 32	1 Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif			TAPIN	Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda	10 Perda	540.000.000	0	0	10 Perda	40.500.000
4 1 32	2 Hearing Dialog/Konsultasi Dengan Pejabat Pemda			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh masyarakat.	10 Kali	12.740.000	0	0	10 Kali	12.490.000
4 1 32	4 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan kunjungan kerja/Sidang/monitoring dalam daerah DPRD (Bulan)	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	20.000.000
4 1 32	5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	25.249.000	0	0	1 kali	25.000.000
4 1 32	6 Kegiatan Pembuatan Risalah Rapat-Rapat DPRD			TAPIN	Jumlah Hasil risalah rapat-rapat paripurna Rapat istimewa rapat komisirapat gabungan rapat banmus D (Jumlah Ris)	150 Risalah	310.600.000	0	0	150 Risalah	253.750.000
4 1 32	7 Kegiatan Pembuatan Himpunan Keputusan DPRD			TAPIN	Jumlah himpunan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD (Jmlh Himpun)	20 Himpunan	9.750.000	0	0	20 Himpunan	5.100.000
4 1 32	8 Kerjasama Bantuan Hukum dan Tenaga Ahli Fraksi			TAPIN	Jumlah tenaga bantuan hukum dan tenaga ahli fraksi yang di sediakan (Org/bulan)	12 Orang/bulan	406.500.000	0	0	12 Orang/bulan	406.500.000
4 1 32	9 Kegiatan Pelantikan-pelantikan / sidang Istimewa			TAPIN	Jumlah Kegiatan Pelantikan-pelantikan/Sidang Istimewa (Kali/Tahun)	1 kali	162.800.000	0	0	1 kali	163.000.000
4 1 32	11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD			TAPIN	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	12 Bulan	70.000.000	0	0	12 Bulan	70.000.000
4 1 46	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%	326.825.000	0	0	80	306.200.000
4 1 46	1 Kegiatan Reses Anggota DPRD			TAPIN	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD (Org/kali)	75 Orang/kali	318.450.000	0	0	75 Orang/kali	298.700.000
4 1 46	2 Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD			TAPIN	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	1 Tahun	8.375.000	0	0	1 Tahun	7.500.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 8	Kecamatan Piani						448.808.787	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	86,7 poin	292.051.487	0	0	86,8	-
4 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.650.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	27.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	18.600.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	13.957.700	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	11.100.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	43.128.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	127.015.787	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	8.400.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 50	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	12.200.000	0	0	1 Kali	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	74.500.000	0	0	100	-
4 1 2 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	22.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	23.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket/unit	19.000.000	0	0	11 Paket/unit	-
4 1 2 66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	5.500.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	4.357.300	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	3.043.900	0	0	13 Laporan	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1.313.400	0	0	2 Laporan	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	18.100.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	18.100.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	40.000.000	0	0	100	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	3.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kali	12.000.000	0	0	9 Kali	-
4 1 41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah koordinasi pengawasan dana desa	12 Bulan	11.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	14.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	75%	19.800.000	0	0	80	-
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	5.650.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	3.000.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	11.150.000	0	0	1 Kali	-
4 1 9	Kecamatan Lokpaikat						1.164.586.450	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	86,6poin	468.898.700	0	0	86,7	-
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.700.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Org/Bulan	12.000.000	0	0	12 Org/Bulan	-
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	18.260.700	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5.600.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	54.680.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	102.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Org/Bulan	12.000.000	0	0	12 Org/Bulan	-
4 1 1	32 Pembinaan Administrasi Kelurahan			TAPIN	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	142.888.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	33 Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	24 Org/Bulan	24.000.000	0	0	24 Org/Bulan	-
4 1 1	37 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	22.170.000	0	0	1 Kali	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	83.539.750	0	0	80	-
4 1 2	21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	12.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	42.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	21.500.000	0	0	12 Bulan	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 2 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	6.039.750	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Buah	2.000.000	0	0	7 Buah	-
4 1 2 65	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Lokpaikat			TAPIN	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Lokpaikat	1 Paket	0	0	0	1 Paket	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	7.723.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	4.538.000	0	0	13 Laporan	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	3.185.000	0	0	2 Laporan	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	16.850.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	16.850.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	62.200.000	0	0	100	-
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	4.150.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kali	3.500.000	0	0	9 Kali	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	23.750.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	30.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 42	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	0	0	0	100	-
4 1 42 5	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan			TAPIN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	25.375.000	0	0	100	-
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan	1 Kali	8.300.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	2.875.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	14.200.000	0	0	1 Kali	-
4 1 48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	500.000.000	0	0	100	-
4 1 48 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan			TAPIN	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	1 paket	500.000.000	0	0	1 paket	-
4 1 48 3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 48 4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 10	Kecamatan Tapin Utara						3.126.368.600	0	0		547.350.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	100point	886.800.600	0	0	100	276.500.000
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	32.280.000	0	0	12 Bulan	20.400.000
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	15.000.000	0	0	12 Bulan	18.000.000
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Alat tulis Kantor	12 Bulan	15.825.600	0	0	12 Bulan	22.100.000
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	14.000.000
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	6.000.000
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	21.480.000	0	0	12 Bulan	20.000.000
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	125.300.000	0	0	12 Bulan	17.500.000
4 1 1 22	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Tapin Expo yang Terselenggara	1 Kegiatan	1.000.000	0	0	1 Kegiatan	1.000.000
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	15.000.000	0	0	12 Bulan	18.000.000
4 1 1 32	Pembinaan Administrasi Kelurahan			TAPIN	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	581.915.000	0	0	12 Bulan	1.500.000
4 1 1 33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	36.000.000
4 1 1 37	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			TAPIN UTARA	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lingkungan	1 Tahun	34.000.000	0	0	1 Tahun	102.000.000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	159.823.000	0	0	80	186.950.000
4 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	30.013.000	0	0	12 Bulan	35.000.000
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	24.560.000	0	0	12 Bulan	27.590.000
4 1 2 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	69.350.000	0	0	12 Bulan	68.360.000
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket/Unit	35.900.000	0	0	11 Paket/Unit	56.000.000
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	7.045.000	0	0	100	8.150.000
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	13 Laporan	5.845.000	0	0	13 Laporan	6.500.000
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 Laporan	1.200.000	0	0	2 Laporan	1.650.000
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	10.000.000	0	0	100	12.000.000
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	10.000.000	0	0	1 Kali	12.000.000
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	40.100.000	0	0	100	37.250.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Kali	3.100.000	0	0	1 Kali	4.000.000
4 1 41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	1 Kali	5.000.000	0	0	1 Kali	6.000.000
4 1 41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	5.250.000
4 1 41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	22.000.000
4 1 42	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	150.000.000	0	0	100	-
4 1 42	6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kupang			TAPIN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kupang	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 42	7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rantau Kiwa			TAPIN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rantau Kiwa	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 42	8 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rangda Malingkung			TAPIN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rangda Malingkung	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 42	9 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rantau Kanan			TAPIN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rantau Kanan	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	22.600.000	0	0	100	26.500.000
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan	1 kali	7.000.000	0	0	1 kali	7.500.000
4 1 47	2 Pembinaan Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	12.500.000	0	0	1 Kali	15.000.000
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	1 Kali	3.100.000	0	0	1 Kali	4.000.000
4 1 48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	1.850.000.000	0	0	100	-
4 1 48	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung			TAPIN	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung	1 paket	50.000.000	0	0	1 paket	-
4 1 48	6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangda Malingkung	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa			TAPIN	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kiwa	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang			TAPIN	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang	12 bulan	500.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 48	13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 48	14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan			TAPIN	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan	12 bulan	50.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	27 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rantau Kanan	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 11	Kecamatan Bakarangan						503.433.200	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	85 poin	341.613.700	0	0	85	-
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.800.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	24.102.220	0	0	12 bulan	-
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 org/ bulan	15.362.000	0	0	12 org/ bulan	-
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	15.726.600	0	0	12 bulan	-
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	waktu penyediaan penggandaan dan percetakan	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	68.680.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu penyediaan rapat - rapat koordinasi	12 bulan	158.292.880	0	0	12 bulan	-
4 1 1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 org/ bulan	12.000.000	0	0	12 org/ bulan	-
4 1 1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	waktu penyediaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 kali	7.650.000	0	0	1 kali	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	88.600.000	0	0	100	-
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	7.000.000	0	0	1 tahun	-
4 1 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	31.000.000	0	0	1 tahun	-
4 1 2	55 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 buah/set	46.600.000	0	0	7 buah/set	-
4 1 2	66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	22.455.000	0	0	100	-
4 1 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 buah	21.575.000	0	0	13 buah	-
4 1 6	9 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 buah	880.000	0	0	2 buah	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	6.079.500	0	0	100	-
4 1 35	2 Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Waktu penyediaan nMusrenbang Kecamatan	1 kegiatan	6.079.500	0	0	1 kegiatan	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	23.980.000	0	0	100	-
4 1 41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Masyarakat			TAPIN	waktu penyediaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 kali	5.760.000	0	0	1 kali	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	jumlah persediaan koordinasi aparat desa	bulan 12	2.500.000	0	0	bulan 12	-
4 1 41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	waktu penyediaan pengawasan dana desa	12 bulan	1.920.000	0	0	12 bulan	-
4 1 41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	jumlah penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	1 tahun	13.800.000	0	0	1 tahun	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	75%	20.705.000	0	0	80	-
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali	6.000.000	0	0	1 kali	-
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	waktu penyediaan Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 kali	5.760.000	0	0	1 kali	-
4 1 47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	waktu penyediaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 kali	8.945.000	0	0	1 kali	-
4 1 12	Kecamatan Candi Laras Selatan						803.670.000	0	0		196.200.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	87poin	443.130.100	0	0	88	43.800.000
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5.250.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	21.600.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	17.404.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	36.929.600	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15.250.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	43.380.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	235.041.500	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	15.000.000
4 1 1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	28.800.000	0	0	12 bulan	28.800.000
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	22.475.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	243.789.900	0	0	80	30.000.000
4 1 2	11 Pengadaan Tanah			TAPIN	Jumlah pengadaan tanah	1 Paket	0	0	0	1 Paket	-
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	169.289.900	0	0	12 Bulan	-
4 1 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	21.500.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	25.500.000	0	0	12 Bulan	30.000.000
4 1 2	55 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Buah	27.500.000	0	0	14 Buah	-
4 1 2	70 Pembangunan / Pembuatan Bangunan Serbaguna dan Pengadaan Sarana Olahraga			TAPIN	waktu Pembangunan / Pembuatan Bangunan Serbaguna dan Pengadaan Sarana Olahraga	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	7.050.000	0	0	100	2.750.000
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.020.000	0	0	13 Laporan	600.000
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2.030.000	0	0	2 Laporan	2.150.000
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	14.750.000	0	0	100	19.500.000
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	14.750.000	0	0	1 Kegiatan	19.500.000
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	68.270.000	0	0	100	71.450.000
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	4.750.000	0	0	1 Kegiatan	4.750.000
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	14 Kali	15.100.000	0	0	14 Kali	15.800.000
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Waktu Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	23.500.000	0	0	12 Bulan	23.500.000
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	24.920.000	0	0	12 Bulan	25.400.000
4 1 41 5	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDDes			TAPIN	waktu Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDDes	12 bulan	0	0	0	12 bulan	2.000.000
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	26.680.000	0	0	100	28.700.000
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kegiatan	5.780.000	0	0	1 Kegiatan	7.800.000
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	2 Kegiatan	5.700.000	0	0	2 Kegiatan	5.700.000
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan	15.200.000	0	0	12 bulan	15.200.000
4 1 13	Kecamatan Candi Laras Utara						482.417.400	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara	86,6poin	355.127.400	0	0	86,7	-
4 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	9.537.700	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	10.239.700	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	63.300.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	132.650.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	54.000.000	0	0	12 Bulan	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 1 35	Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	21.600.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 50	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	20.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	53.450.000	0	0	80	-
4 1 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			CANDI LARAS UTARA	Waktu pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	16.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			CANDI LARAS UTARA	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	32.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 57	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor			CANDI LARAS UTARA	Waktu pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	5.450.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			CANDI LARAS UTARA	Waktu pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	5.640.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	3.510.000	0	0	13 Dokumen	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2.130.000	0	0	2 Dokumen	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	16.200.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	16.200.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	36.350.000	0	0	100	-
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	3.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	14 Kegiatan	18.600.000	0	0	14 Kegiatan	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	2.750.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	75%	15.650.000	0	0	80	-
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kegiatan	3.250.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kegiatan	3.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	9.400.000	0	0	1 Kegiatan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 14	Kecamatan Hatungun						594.930.000	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	87 poin	378.418.500	0	0	87	-
4 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan	16.916.700	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	14.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	16.201.800	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	4.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	51.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	210.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 35	Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 50	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Hari-Hari Besar Nasional	1 Kegiatan	25.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	117.000.000	0	0	80	-
4 1 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			TAPIN;HATUNGUN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;HATUNGUN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	41.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 paket	26.000.000	0	0	1 paket	-
4 1 2 66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;HATUNGUN	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 68	Pembangunan Tempat Parkir Kantor			HATUNGUN	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor	1 paket	20.000.000	0	0	1 paket	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	5.861.500	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.259.600	0	0	2 Dokumen	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	13 Dokumen	1.601.900	0	0	13 Dokumen	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	25.000.000	0	0	100	-
4 1 35	2 Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	48.250.000	0	0	100	-
4 1 41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	3.250.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	3.250.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	11.750.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	20.400.000	0	0	100	-
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.750.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kegiatan	3.250.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	9.400.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 15	Kecamatan Salam Babaris						531.800.435	0	0		373.200.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Salam Babaris	79,11 poin	384.540.435	0	0	79,56	373.200.000
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.800.000	0	0	12 Bulan	4.000.000
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12.521.735	0	0	12 Bulan	9.600.000
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12.985.000	0	0	12 Bulan	27.200.000
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	20.598.700	0	0	12 Bulan	22.000.000
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	3.560.000	0	0	12 Bulan	3.900.000
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.200.000	0	0	12 Bulan	2.500.000
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	39.875.000	0	0	12 Bulan	44.000.000
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	230.000.000	0	0	12 Bulan	213.000.000
4 1 1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	26.000.000
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	24.000.000	0	0	1 Kali	21.000.000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	54.094.000	0	0	80	-
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	29.000.000	0	0	12 Bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	19.500.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 67	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	5.594.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	6.860.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	4.030.000	0	0	13 Laporan	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2.830.000	0	0	2 Laporan	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	13.447.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	13.447.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	50.293.000	0	0	100	-
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	4.627.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	12 Bulan	2.066.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	23.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	20.600.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	22.566.000	0	0	100	-
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan	1 Kali	7.350.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	2.316.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan	12.900.000	0	0	12 bulan	-
4 1 16	Kecamatan Tapin Tengah						475.950.000	0	0		407.100.000
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	86,6 poin	322.476.000	0	0	86,7	356.850.000
4 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.100.000	0	0	12 Bulan	2.100.000
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	23.440.000	0	0	12 Bulan	19.000.000
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	30.400.000	0	0	12 Bulan	30.800.000
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	18.997.200	0	0	12 Bulan	14.000.000
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.500.000	0	0	12 Bulan	8.000.000
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.500.000	0	0	12 Bulan	2.500.000
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	39.340.000	0	0	12 Bulan	41.000.000
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	159.173.800	0	0	12 Bulan	200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	-
4 1 1 35	Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	18.000.000	0	0	12 bulan	18.000.000
4 1 1 50	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	21.025.000	0	0	1 Kegiatan	21.450.000
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	77.239.000	0	0	100	9.500.000
4 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	6.500.000	0	0	12 bulan	6.500.000
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	30.789.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN TENGAH	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	2.850.000	0	0	12 bulan	3.000.000
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor			TAPIN TENGAH	waktu Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	8 buah/unit/paket	37.100.000	0	0	5 buah/unit/paket	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	6.320.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	3.410.000	0	0	13 Dokumen	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2.910.000	0	0	2 Dokumen	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	13.100.000	0	0	100	15.000.000
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	13.100.000	0	0	1 Kegiatan	15.000.000
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	34.585.000	0	0	100	17.000.000
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	3.350.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kegiatan	3.200.000	0	0	9 Kegiatan	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	12.375.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	15.660.000	0	0	12 Bulan	17.000.000
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	75%	22.230.000	0	0	80	8.750.000
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	8.750.000	0	0	1 Kegiatan	8.750.000
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kegiatan	3.800.000	0	0	1 Kegiatan	-
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan	9.680.000	0	0	12 bulan	-
4 1 17	Kecamatan Tapin Selatan						1.211.155.000	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	86,6 poin	564.395.000	0	0	86,7	-
4 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	18.400.000	0	0	12 bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	13.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.591.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	3.624.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	35.080.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	223.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	12.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 32	Pembinaan Administrasi Kelurahan			TAPIN	waktu Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 bulan	144.200.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 35	Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 37	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			TAPIN	waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 bulan	60.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1 50	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	15.000.000	0	0	1 Kali	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	37.000.000	0	0	80	-
4 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	21.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN SELATAN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Buah	3.000.000	0	0	18 Buah	-
4 1 2 67	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN SELATAN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	6.910.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan 13	4.110.000	0	0	Laporan 13	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan 2	2.800.000	0	0	Laporan 2	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	12.000.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	12.000.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	66.875.000	0	0	100	-
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	3.725.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	10 Kali	28.150.000	0	0	10 Kali	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	25.000.000	0	0	12 Bulan	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 42	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	81.400.000	0	0	100	-
4 1 42	1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan			TAMBARANGAN	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan	12 bulan	81.400.000	0	0	12 bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	23.975.000	0	0	100	-
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	5.600.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	3.250.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	15.125.000	0	0	1 Kali	-
4 1 48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	418.600.000	0	0	100	-
4 1 48	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan	350.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan			TAMBARANGAN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan	43.600.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan			TAMBARANGAN	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 18	Kecamatan Binuang						2.548.175.300	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	87 poin	891.855.300	0	0	88	-
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.100.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	27.115.200	0	0	12 bulan	-
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	14.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	22.746.800	0	0	12 bulan	-
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	5.400.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	32.910.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi	12 bulan	182.200.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 org/bulan	12.000.000	0	0	12 org/bulan	-
4 1 1	32 Pembinaan Administrasi Kelurahan			TAPIN	waktu pembinaan administrasi kelurahan	36 kelurahan/bulan	455.583.300	0	0	36 kelurahan/bulan	-
4 1 1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP	24 org/bulan	24.000.000	0	0	24 org/bulan	-
4 1 1	37 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			TAPIN	Waktu pemeliharaan kebersihan Lingkungan	12 bulan	72.600.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	1 kegiatan	39.700.000	0	0	1 kegiatan	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	78.600.000	0	0	80	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	1.800.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	23.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2 55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116 unit/paket	21.800.000	0	0	116 unit/paket	-
4 1 2 57	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit/paket	30.000.000	0	0	3 unit/paket	-
4 1 2 66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	2.850.000	0	0	100	-
4 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	2.100.000	0	0	13 laporan	-
4 1 6 9	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 laporan	750.000	0	0	2 laporan	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100%	19.600.000	0	0	100	-
4 1 35 2	Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Waktu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	19.600.000	0	0	1 kegiatan	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	27.610.000	0	0	100	-
4 1 41 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			TAPIN	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	1 kegiatan	2.000.000	0	0	1 kegiatan	-
4 1 41 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 desa/kegiatan	1.010.000	0	0	9 desa/kegiatan	-
4 1 41 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Waktu pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 41 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 bulan	14.600.000	0	0	12 bulan	-
4 1 42	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	242.685.000	0	0	100	-
4 1 42 2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Putih			TAPIN	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Putih	12 bulan	82.905.000	0	0	12 bulan	-
4 1 42 3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang			TAPIN	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	12 bulan	75.075.000	0	0	12 bulan	-
4 1 42 4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti			TAPIN	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	12 bulan	84.705.000	0	0	12 bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	27.660.000	0	0	100	-
4 1 47 1	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kegiatan	5.655.000	0	0	1 kegiatan	-
4 1 47 3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Jumlah pelaksanaan koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 kegiatan	2.005.000	0	0	1 kegiatan	-
4 1 47 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kegiatan Keagamaan	3 kegiatan	20.000.000	0	0	3 kegiatan	-
4 1 48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	1.257.315.000	0	0	100	-
4 1 48 18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Putih			TAPIN	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Putih	12 bulan	383.795.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48 19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti			TAPIN	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	1 paket	24.495.000	0	0	1 paket	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 48	20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan	0	0	0	12 bulan	-
4 1 48	21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti			TAPIN	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan	390.800.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang			TAPIN	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	1 paket	17.625.000	0	0	1 paket	-
4 1 48	23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan	7.300.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang			TAPIN	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan	400.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 48	25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih			TAPIN	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	1 paket	25.000.000	0	0	1 paket	-
4 1 48	26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	12 bulan	8.300.000	0	0	12 bulan	-
4 1 19	Kecamatan Bungur						591.985.000	0	0		-
4 1	Administrasi Pemerintahan										
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87%	406.280.000	0	0	87,5	-
4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.920.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.400.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	18.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	14.815.800	0	0	12 bulan	-
4 1 1	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	7.100.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman			TAPIN	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	84.500.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	174.062.200	0	0	12 bulan	-
4 1 1	30 Penyediaan jasa keamanan kantor			TAPIN	waktu Penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	12.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	35 Penyediaan Jasa Petugas E-KTP			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	37 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan			TAPIN	waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 bulan	36.232.000	0	0	12 bulan	-
4 1 1	50 Peringatan Hari-hari Besar Nasional			TAPIN	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	12 bulan	13.250.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	58.000.000	0	0	80	-
4 1 2	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	18.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	29.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 2	55 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	-
4 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	6.825.000	0	0	100	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 1 6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	4.055.000	0	0	13 Laporan	-
4 1 6	9 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2.770.000	0	0	2 Laporan	-
4 1 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	16.850.000	0	0	100	-
4 1 35	2 Musrenbang Kecamatan			TAPIN	Waktu Musrenbang Kecamatan	1 Kali	16.850.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100%	77.650.000	0	0	100	-
4 1 41	1 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Masyarakat			TAPIN	Waktu Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	5.450.000	0	0	1 Kali	-
4 1 41	2 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	13 Desa/kegiatan	27.900.000	0	0	13 Desa/kegiatan	-
4 1 41	3 Koordinasi Pengawasan Dana Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Desa	23.750.000	0	0	12 Desa	-
4 1 41	4 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			TAPIN	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 bulan	20.550.000	0	0	12 bulan	-
4 1 47	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	26.380.000	0	0	100	-
4 1 47	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan	1 Kali	7.540.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	3 Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			TAPIN	Waktu Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	4.640.000	0	0	1 Kali	-
4 1 47	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan			TAPIN	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan	14.200.000	0	0	12 bulan	-
4 2 1	Inspektorat						5.582.200.000	0	0		1.643.694.357
4 2	Pengawasan										
4 2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.571.167.500	0	0	100	520.361.857
4 2 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa telpon, internet, listrik dan air (bln)	12 Bln	85.800.000	0	0	12 Bln	89.800.000
4 2 1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12 Bln	16.200.000	0	0	12 Bln	18.000.000
4 2 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan ATK (Bln)	12 Bln	80.900.900	0	0	12 Bln	108.111.000
4 2 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu ketersediaan barang dan cetakan dan penggandaan (Bln)	12 Bln	53.000.000	0	0	12 Bln	32.900.000
4 2 1	17 Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu ketersediaan konsumsi (Bln)	11 Bln	184.440.000	0	0	11 Bln	177.870.000
4 2 1	18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (Bln)	12 Bln	4.112.026.600	0	0	12 Bln	44.880.857
4 2 1	21 Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (Bln)	12 Bln	10.000.000	0	0	12 Bln	20.000.000
4 2 1	22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12 Bln	28.800.000	0	0	12 Bln	28.800.000
4 2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	301.595.000	0	0	100	378.225.000
4 2 2	11 Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor			TAPIN	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	27 Unit	170.395.000	0	0	27 Unit	214.000.000
4 2 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	1.500.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 2 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)	12 Bln	86.200.000	0	0	12 Bln	112.725.000
4 2 2 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (Bln)	12 Bln	40.000.000	0	0	12 Bln	50.000.000
4 2 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	1.750.000	0	0	100	2.000.000
4 2 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Laporan	1.000.000	0	0	11 Laporan	1.000.000
4 2 6 5	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	750.000	0	0	1 Laporan	1.000.000
4 2 7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100%	195.450.000	0	0	100	190.775.000
4 2 7 1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (Lap)	92 Laporan	86.700.000	0	0	92 Laporan	86.700.000
4 2 7 2	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	12 Laporan	4.125.000	0	0	12 Laporan	4.125.000
4 2 7 3	Evaluasi Lakip			TAPIN	Jumlah laporan hasil evaluasi lakip (Lap)	1 Laporan	5.225.000	0	0	1 Laporan	550.000
4 2 7 5	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	92 Laporan	86.600.000	0	0	92 Laporan	86.600.000
4 2 7 6	Review RKA SKPD			TAPIN	Jumlah laporan hasil review RKA (lap)	2 Laporan	7.000.000	0	0	2 Laporan	7.000.000
4 2 7 7	Review LAKIP			TAPIN	Jumlah laporan review lakip (lap)	1 Laporan	1.200.000	0	0	1 Laporan	1.200.000
4 2 7 8	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance			TAPIN	Jumlah dokumen PKPT (dok)	1 Dokumen	200.000	0	0	1 Dokumen	200.000
4 2 7 9	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah laporan review LKPD (Lap)	1 Laporan	3.200.000	0	0	1 Laporan	3.200.000
4 2 7 10	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 7 11	Reviu RPJMD			TAPIN	waktu Reviu RPJMD	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 7 12	Reviu KUA/PPAS			TAPIN	waktu Reviu KUA/PPAS	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 7 13	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			TAPIN	waktu Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	100%	165.420.000	0	0	100	171.945.000
4 2 8 1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			TAPIN	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	21 Orang	163.950.000	0	0	21 Orang	170.400.000
4 2 8 2	Tim Penilai P2UPD			TAPIN	Jumlah Hasil Penetapan angka kredit P2UPD (Orang)	11 Orang	1.470.000	0	0	11 Orang	1.545.000
4 2 9	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat Waktu	75%	345.962.500	0	0	85	379.532.500
4 2 9 1	Review laporan keuangan pemerintah daerah			TAPIN	Jumlah laporan hasil review LKPD (Lap)	1 Laporan	275.000	0	0	1 Laporan	275.000
4 2 9 3	Penyelesaian kerugian negara			TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	1	4.137.500	0	0	1	4.137.500
4 2 9 5	LHKPN			TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKPN (dok)	1 Dokumen	19.600.000	0	0	1 Dokumen	19.600.000
4 2 9 6	LHKASN			TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	1 Dokumen	13.635.000	0	0	1 Dokumen	13.635.000
4 2 9 8	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI			TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI (dok)	1 Dokumen	1.860.000	0	0	1 Dokumen	1.860.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 2 9 13	Penyerapan Anggaran keuangan Desa			TAPIN	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (Lap)	4 Laporan	400.000	0	0	4 Laporan	400.000
4 2 9 16	Sapu Bersih Pungli			TAPIN	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungli (Lap)	1 Laporan	208.940.000	0	0	1 Laporan	225.740.000
4 2 9 17	RAD PPK			TAPIN	Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Lap)	4 Laporan	250.000	0	0	4 Laporan	350.000
4 2 9 19	Unit Pengendalian Gratifikasi			TAPIN	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (Lap)	1 Laporan	29.400.000	0	0	1 Laporan	29.400.000
4 2 9 20	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP d			TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut (dok)	2 Dokumen	2.685.000	0	0	2 Dokumen	2.685.000
4 2 9 21	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik			TAPIN	waktu Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 9 23	Survey Penilaian Integritas			TAPIN	waktu Survey Penilaian Integritas	12 bulan	39.320.000	0	0	12 bulan	39.320.000
4 2 9 24	Satgas Kapabilitas APIP			TAPIN	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas apip (Lap)	4 Laporan	13.100.000	0	0	4 Laporan	18.600.000
4 2 9 25	Satgas SPIP			TAPIN	Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	3 Laporan	11.160.000	0	0	3 Laporan	22.330.000
4 2 9 26	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsif Gender)			TAPIN	waktu Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsif Gender)	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 9 28	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			TAPIN	waktu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 9 29	Penilaian Internal Zona Integritas			TAPIN	waktu Penilaian Internal Zona Integritas	12 bulan	300.000	0	0	12 bulan	300.000
4 2 10	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kab.Tapin		Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	855.000	0	0	100	855.000
4 2 10 1	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan			TAPIN	Jumlah laporan ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	1 Laporan	855.000	0	0	1 Laporan	855.000
4 3 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan						3.980.196.730	0	0		3.161.375.000
4 3 1	Perencanaan										
4 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.664.822.780	0	0	100	1.590.250.000
4 3 1 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	218.400.000	0	0	12 bulan	209.000.000
4 3 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa petugas kebersihan dan keamanan	12 bulan	78.027.000	0	0	12 bulan	68.000.000
4 3 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	121.955.000	0	0	12 bulan	94.750.000
4 3 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	16.100.000	0	0	12 bulan	17.000.000
4 3 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	12 bulan	20.000.000	0	0	12 bulan	-
4 3 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	155.140.000	0	0	12 bulan	166.000.000
4 3 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	1.023.500.780	0	0	12 bulan	1.000.000.000
4 3 1 19	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan pada Tapin Expo	1 kali	31.700.000	0	0	1 kali	35.500.000
4 3 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	187.510.000	0	0	100	235.550.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 3 2 11	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kantor			TAPIN	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	13 unit	70.510.000	0	0	13 unit	18.050.000
4 3 2 46	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	65.000.000	0	0	12	74.500.000
4 3 2 47	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			TAPIN	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	52.000.000	0	0	4 unit	143.000.000
4 3 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	17.360.000	0	0	100	36.050.000
4 3 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah dokumen perencanaan pada Bappelibang	3 dokumen	8.815.000	0	0	3 dokumen	13.800.000
4 3 6 6	Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun			TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan secara Berkala	1 laporan	8.545.000	0	0	1 laporan	22.250.000
4 3 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	857.400.000	0	0	100	680.300.000
4 3 21 6	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD			TAPIN	waktu Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	12 bulan	83.500.000	0	0	12 bulan	-
4 3 21 8	Penyusunan Rancangan RKPD			TAPIN	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kab Tapin	1 dokumen	19.500.000	0	0	1 dokumen	21.000.000
4 3 21 9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 kali	102.500.000	0	0	1 kali	2.000.000
4 3 21 10	Penetapan RKPD			TAPIN	Jumlah dokumen RKPD	1 dokumen	27.100.000	0	0	1 dokumen	26.400.000
4 3 21 15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS			TAPIN	Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan Nota kesepakatan PPAS APBD	2 dokumen	40.500.000	0	0	2 dokumen	493.000.000
4 3 21 16	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan			TAPIN	Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan PPAS APBP Perubahan	2 dokumen	22.100.000	0	0	2 dokumen	27.250.000
4 3 21 17	Penyusunan perubahan RKPD			TAPIN	Tersedianya dokumen perubahan RKPD	1 dokumen	15.850.000	0	0	1 dokumen	15.600.000
4 3 21 19	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			TAPIN	Waktu pengembangan SIPD Kab Tapin	12 bulan	13.350.000	0	0	12 bulan	6.950.000
4 3 21 20	Penetapan Perubahan RPJMD			TAPIN	waktu Penetapan Perubahan RPJMD	12 bulan	90.000.000	0	0	12 bulan	-
4 3 21 25	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan Laporan RFK yang benar dan tepat waktu	100%	30.150.000	0	0	100%	46.100.000
4 3 21 26	Penyusunan Perubahan RPJMD			TAPIN	waktu Penyusunan Rancangan RPJMD	12 bulan	145.100.000	0	0	12 bulan	-
4 3 21 27	Penyusunan Standar Satuan Harga			TAPIN	Tersusunnya SSH	1 dokumen	89.600.000	0	0	1 dokumen	42.000.000
4 3 21 28	Penyusunan Analisis Standard Belanja (ASB)			TAPIN	Tersusunnya ASB	1 dokumen	108.150.000	0	0	1 dokumen	-
4 3 21 30	Evaluasi RPJMD			TAPIN	waktu Evaluasi RPJMD	12 bulan	70.000.000	0	0	12 bulan	-
4 3 26	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	100%	512.618.950	0	0	100	333.825.000
4 3 26 3	Pelaksanaan Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)			TAPIN	Jumlah laporan PSETK	45 Laporan	327.873.950	0	0	45 Laporan	129.200.000
4 3 26 4	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	100 persen	46.750.000	0	0	100 persen	46.250.000
4 3 26 5	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Infrastruktur selesai tepat Waktu	100 persen	74.700.000	0	0	100 persen	74.200.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 3 26	6 Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	100 persen	34.445.000	0	0	100 persen	43.075.000
4 3 26	7 Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	100 persen	28.850.000	0	0	100 persen	41.100.000
4 3 28	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	100%	148.900.000	0	0	100	205.400.000
4 3 28	1 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sosial selesai tepat waktu	100 persen	71.200.000	0	0	100 persen	79.700.000
4 3 28	2 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia selesai tepat waktu	100 persen	49.600.000	0	0	100 persen	79.700.000
4 3 28	4 Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	100 persen	14.050.000	0	0	100 persen	23.000.000
4 3 28	5 Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia	100 persen	14.050.000	0	0	100 persen	23.000.000
4 7	Penelitian dan Pengembangan										
4 7 15	Program Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan		Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100%	591.585.000	0	0	100	80.000.000
4 7 15	1 Pengembangan SIDA dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah			TAPIN	waktu Pengembangan SIDA dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah	12 bulan	19.400.000	0	0	12 bulan	10.000.000
4 7 15	4 Jaring Penelitian dan Pengembangan			TAPIN	waktu Jaring Penelitian dan Pengembangan	12 bulan	100.000.000	0	0	12 bulan	-
4 7 15	5 Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah dalam Pembangunan			TAPIN	waktu Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah dalam Pembangunan	12 bulan	100.000.000	0	0	12 bulan	-
4 7 15	6 Publikasi Hasil Litbang			TAPIN	waktu Publikasi Hasil Litbang	12 bulan	16.900.000	0	0	12 bulan	-
4 7 15	7 Kajian penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi			TAPIN	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang Ekonomi	1 dokumen	136.085.000	0	0	1 dokumen	38.000.000
4 7 15	8 Kajian penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya			TAPIN	Jumlah MOU pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial Budaya	1 Mou	200.000.000	0	0	1 Mou	32.000.000
4 7 15	9 Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap SIDA Kab.Tapin			TAPIN	waktu Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap SIDA Kab.Tapin	12 bulan	19.200.000	0	0	12 bulan	-
4 4 5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						3.955.244.451	0	0		3.963.992.839
4 4	Keuangan										
4 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	1.637.628.400	0	0	100	1.643.022.081
4 4 1	1 Penyediaan jasa surat menyurat			TAPIN	waktu penyediaan jasa menyurat	12 bulan	2.100.000	0	0	12 bulan	2.205.000
4 4 1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	225.720.000	0	0	12 bulan	237.006.000
4 4 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	302.108.400	0	0	12 bulan	311.171.652
4 4 1	11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	17.000.000	0	0	12 bulan	16.800.000





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 4 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	10.000.000	0	0	12 bulan	10.500.000
4 4 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	153.140.000	0	0	12 bulan	159.348.000
4 4 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	739.000.000	0	0	12 bulan	714.000.000
4 4 1 19	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	69.600.000	0	0	12 bulan	71.052.429
4 4 1 21	Peningkatan Pelayanan PPKD			TAPIN	Jumlah berkas pencairan dana yang diselesaikan	220 berkas	91.960.000	0	0	220 berkas	94.269.000
4 4 1 22	Tapin Expo			TAPIN	Waktu terlaksananya TAPIN EXPO	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	24.570.000
4 4 1 23	Pembuatan data organisasi kantor			TAPIN	Waktu terlaksananya pembuatan data-data organisasi kantor	12 bulan	2.000.000	0	0	12 bulan	2.100.000
4 4 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	331.463.451	0	0	100	350.891.250
4 4 2 12	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor			TAPIN	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	10 buah	3.000.000	0	0	10 buah	3.000.000
4 4 2 13	Penyediaan peralatan rumah tangga			TAPIN	Jumlah peralatan rumah tangga	30 lusin	1.675.000	0	0	30 lusin	1.758.750
4 4 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	25.000.000	0	0	12 bulan	26.250.000
4 4 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan	8 unit	46.800.000	0	0	8 unit	49.140.000
4 4 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	0	0	12 bulan	5.250.000
4 4 2 30	Pemeliharaan rutin/berkala genset			TAPIN	Waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala genset	12 bulan	4.138.451	0	0	12 bulan	7.350.000
4 4 2 45	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	12 bulan	245.850.000	0	0	12 bulan	258.142.500
4 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	9.765.000	0	0	100	10.531.500
4 4 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Kinerja dan Perencanaan yang disusun	13 laporan	7.500.000	0	0	13 laporan	7.875.000
4 4 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 dokumen	2.265.000	0	0	2 dokumen	2.656.500
4 4 7	Program Penyusunan Anggaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	435.640.000	0	0	100	491.211.000
4 4 7 2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			TAPIN	Jumlah rancangan perda APBD	100 buku	162.380.000	0	0	100 buku	167.790.000
4 4 7 3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD			TAPIN	Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Tapin	100 buku	54.250.000	0	0	100 buku	56.962.500
4 4 7 4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			TAPIN	Jumlah Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	100 buku	93.260.000	0	0	100 buku	115.521.000
4 4 7 5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			TAPIN	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Tapin	100 buku	53.250.000	0	0	100 buku	55.912.500
4 4 7 6	Penyusunan/pembuatan DPA-SKPD			TAPIN	Jumlah DPA SKPD	149 dokumen	37.250.000	0	0	149 dokumen	58.012.500
4 4 7 7	Penyusunan/pembuatan DPPA-SKPD			TAPIN	Jumlah DPA SKPD	149 dokumen	35.250.000	0	0	149 dokumen	37.012.500
4 4 8	Program Perbendaharaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D	0%	475.020.000	0	0	0	416.228.000
4 4 8 1	Peningkatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD			TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD yang baik dan lancar	12 bulan	178.320.000	0	0	12 bulan	198.320.000



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 4 8 2	Pengelolaan administrasi gaji pegawai se kabupaten Tapin			TAPIN	Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi gaji pegawai di kabupaten Tapin	12 bulan	52.720.000	0	0	12 bulan	55.356.000
4 4 8 4	Penyusunan/Pembuatan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)			TAPIN	Jumlah laporan DAK yang disusun	52 dokumen	154.840.000	0	0	52 dokumen	69.846.000
4 4 8 5	Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola dan pelaksana penatausahaan keuanga			TAPIN	Jumlah keputusan kdH tentang pejabat pengelolaan pelaksanaan penatausahaan keungan daerah	30 SK	37.120.000	0	0	30 SK	38.976.000
4 4 8 6	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah			TAPIN	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	51.450.000	0	0	45 SKPD	38.430.000
4 4 8 7	Manajemen Pengelolaan Kas Daerah			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Laporan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	12 laporan	570.000	0	0	12 laporan	15.300.000
4 4 9	Program Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu	100%	377.800.000	0	0	100	346.765.023
4 4 9 1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			TAPIN	Jumlah Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemkab Tapin	1 dokumen	40.000.000	0	0	1 dokumen	23.1
4 4 9 2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			TAPIN	Jumlah Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	79.800.000	0	0	1 dokumen	83.790.000
4 4 9 5	Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Raperbup Tentang Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	75.000.000	0	0	1 dokumen	78.750.000
4 4 9 6	Penyusunan laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikut			TAPIN	Jumlah laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab Tapin dan prognosis 6 bulan berikutnya	2 dokumen	18.000.000	0	0	2 dokumen	18.000.000
4 4 9 7	Pra penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) Pemkab. Tapin			TAPIN	Jumlah laporan inventarisasi pos pos LKPD	45 dokumen	17.000.000	0	0	45 dokumen	17.850.000
4 4 9 8	Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah			TAPIN	Waktu terlaksananya penyediaan data keuangan yang valid	12 bulan	17.500.000	0	0	12 bulan	18.375.000
4 4 9 9	Penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab. Tapin			TAPIN	Jumlah laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	7 dokumen	130.500.000	0	0	7 dokumen	130.000.000
4 4 10	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100%	687.927.600	0	0	100	705.343.985
4 4 10 1	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah			TAPIN	Waktu peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	12 bulan	38.090.000	0	0	12 bulan	39.814.500
4 4 10 3	Penataan barang milik daerah			TAPIN	Jumlah dokumen Data BMD SKPD	45 dokumen	69.720.000	0	0	45 dokumen	73.206.000
4 4 10 6	Pendataan hasil pengadaan dan penetapan status penggunaan BMD			TAPIN	Jumlah SKPD yang ditetapkan status pengguna BMD	10 SKPD	58.000.000	0	0	10 SKPD	60.900.000
4 4 10 7	Penghapusan dan pemindahtanganan BMD pemerintah kabupaten Tapin			TAPIN	Jumlah laporan data penghapusan dan pemindahtanganan BMD	10 dokumen	188.820.200	0	0	10 dokumen	193011215.25
4 4 10 8	Penyusunan laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten Tapin			TAPIN	Jumlah laporan barang milik daerah	21 laporan	7.120.000	0	0	21 laporan	8.526.000
4 4 10 11	Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan dinas pada Pengelola Barang Milik Daerah			TAPIN	Jumlah kendaraan dinas pada pengelola barang dalam perawatan dan pemeliharaan	5 unit	105.517.400	0	0	5 unit	110.793.270
4 4 10 14	Penyusunan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3 dokumen	87.860.000	0	0	3 dokumen	92.253.000
4 4 10 15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penatausahaan Aset Daerah			TAPIN	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Aset	45 SKPD	76.820.000	0	0	45 SKPD	68.061.000
4 4 10 17	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			TAPIN	Jumlah laporan data rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan BMD	45 dokumen	44.680.000	0	0	45 dokumen	46.914.000
4 4 10 18	Pemanfaatan barang milik daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Data Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Tapin	1 dokumen	11.300.000	0	0	1 dokumen	11.865.000



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
						Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4	6							4.383.665.000	0	0		4.948.154.255
4												
4	1							2.070.299.000	0	0	100	2.537.098.450
4	1	2						337.800.000	0	0	12 Bulan	604.690.000
4	1	10						304.717.300	0	0	12 Bulan	374.397.030
4	1	11						174.830.500	0	0	12 Bulan	183.572.025
4	1	12						67.500.000	0	0	12 Bulan	70.875.000
4	1	17						197.950.000	0	0	12 Bulan	283.500.000
4	1	18						908.701.200	0	0	12 Bulan	937.492.395
4	1	19						53.800.000	0	0	12 Bulan	56.490.000
4	1	22						25.000.000	0	0	1 Kali	26.082.000
4	2							664.971.000	0	0	100	684.469.555
4	2	12						197.241.000	0	0	1 paket	207.103.050
4	2	22						200.000.000	0	0	12 Bulan	210.000.000
4	2	24						48.730.000	0	0	12 Bulan	51.166.500
4	2	28						55.000.000	0	0	12 Bulan	55.000.000
4	2	30						10.000.000	0	0	12 Bulan	5250005.25
4	2	31						154.000.000	0	0	12 Bulan	155.950.000
4	6							10.000.000	0	0	100	10.500.000
4	6	1						5.000.000	0	0	13 Dokumen	5.250.000
4	6	5						5.000.000	0	0	2 Dokumen	5.250.000
4	11							1.218.495.000	0	0	0,05	1.235.411.250
4	11	1						57.125.000	0	0	360 wajib pajak	59.981.250
4	11	3						334.500.000	0	0	4 laporan	313.425.000
4	11	4						392.700.000	0	0	360 surat	412.335.000
4	11	5						160.000.000	0	0	5710 buku	168.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 4 11 6	Perbaikan Data dan Validasi Data PBB-P2			TAPIN	Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	6012 Wajib Pajak	210.170.000	0	0	6012 Wajib Pajak	214.470.000
4 4 11 7	Sosialisasi PBB-P2			TAPIN	Waktu Sosialisasi PBB-P2	12 bulan	64.000.000	0	0	12 bulan	67.200.000
4 4 12	Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan Pelayanan yang prima kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5,00%	194.000.000	0	0	5	203.700.000
4 4 12 1	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib Pajak	24 laporan	26.000.000	0	0	24 laporan	27.300.000
4 4 12 3	Pendistribusian dan Penagihan PBB P2			TAPIN	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	12 dokumen	168.000.000	0	0	12 dokumen	176.400.000
4 4 13	Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan Pelayanan yang prima kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah		Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib Disusun	100%	225.900.000	0	0	100	276.975.000
4 4 13 1	Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah			TAPIN	Jumlah laporan Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	30.500.000	0	0	12 dokumen	38.325.000
4 4 13 3	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12 laporan	38.500.000	0	0	12 laporan	40.425.000
4 4 13 4	Penyusunan Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	12 laporan	147.400.000	0	0	12 laporan	188.250.000
4 4 13 5	Penetapan Target Pendapatan			TAPIN	Jumlah Laporan target pendapatan	2 dokumen	9.500.000	0	0	2 dokumen	9.975.000
4 5 7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						4.793.588.763	0	0		-
4 5	Kepegawaian										
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.303.151.763	0	0	100	-
4 5 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			TAPIN	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	72.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			TAPIN	Waktu tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	139.596.164	0	0	12 Bulan	-
4 5 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			TAPIN	Waktu penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	25.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu ketersediaan konsumsi	12 Bulan	133.200.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	12 Bulan	699.255.599	0	0	12 Bulan	-
4 5 1 19	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah ketersediaan Stan BKPSDM pada Tapin expo	1 kali	25.000.000	0	0	1 kali	-
4 5 1 20	Penyediaan Jasa Non PNS			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Non PNS	12 bulan	209.100.000	0	0	12 bulan	-
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	249.860.000	0	0	100	-
4 5 2 11	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor			TAPIN	Tersedianya perlengkapan dan peralatan Kantor	80 Buah	90.800.000	0	0	80 Buah	-
4 5 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 Buah	23.900.000	0	0	2 Buah	-
4 5 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	80.160.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	55.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur				Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	90%	483.975.000	0	0	90	-





Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4 5 4	4 Pelaksana Pemberian Santunan Pensiun Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin			TAPIN	waktu Pelaksanaan Pemberian Santunan Pensiun Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	12 bulan	20.350.000	0	0	12 bulan	-
4 5 4	5 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD			TAPIN	Waktu pelaksanaan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	12 Bulan	13.500.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	6 Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan			TAPIN	Waktu pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan	12 Bulan	57.500.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	7 Pengambilan sumpah PNS			TAPIN	Waktu pelaksanaan pengambilan sumpah PNS	12 Bulan	17.185.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	8 Kegiatan Baperjakat			TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan baperjakat	12 Bulan	26.910.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	9 Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			TAPIN	Waktu Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	12 Bulan	277.950.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	10 Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen			TAPIN	Waktu Penyelesaian proses pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	11 Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional			TAPIN	Waktu Penyelesaian proses pembuatan SK Jafung	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	12 Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS			TAPIN	Waktu penyelesaian pembuatan cuti-cuti PNS	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	13 Rapat Koordinasi Kepegawaian			TAPIN	Waktu rapat Koordinasi Kepegawaian	12 bulan	21.400.000	0	0	12 bulan	-
4 5 4	14 Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja Aparatur			TAPIN	Waktu pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	12 Bulan	21.800.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	15 Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional			TAPIN	Waktu pelaksanaan apel hari kesadaran Nasional	12 Bulan	10.650.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	16 Kegiatan Pencantuman Gelar			TAPIN	Waktu pelaksanaan pencantuman gelar	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 4	17 Pemberian penghargaan Satya Lencana bagi PNS Kabupaten Tapin			TAPIN	waktu Pemberian penghargaan Satya Lencana bagi PNS Kabupaten Tapin	12 bulan	13.130.000	0	0	12 bulan	-
4 5 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	15.000.000	0	0	100	-
4 5 6	5 Penyusunan Pelaporan Keuangan			TAPIN	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	7.500.000	0	0	1 Laporan	-
4 5 6	6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah laporan yang wajib dibuat	10 Laporan	7.500.000	0	0	10 Laporan	-
4 5 16	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	80%	2.234.922.000	0	0	85	-
4 5 16	1 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			TAPIN	waktu Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	12 bulan	200.000.000	0	0	12 bulan	-
4 5 16	2 Penyelenggaraan test kompetensi jabatan			TAPIN	Waktu pelaksanaan tes kompetensi Jabatan	12 Bulan	521.125.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 16	3 Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional			TAPIN	Waktu pelaksanaan Diklat teknis dan Fungsional	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 16	4 Diklat Prajabatan			TAPIN	jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	137 Orang	1.301.500.000	0	0	137 Orang	-
4 5 16	5 Diklatpim IV			TAPIN	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim IV	5 Orang	20.250.000	0	0	5 Orang	-
4 5 16	6 Diklatpim III			TAPIN	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim III	2 Orang	110.625.000	0	0	2 Orang	-
4 5 16	7 Diklatpim II			TAPIN	Jumlah peserta PNS yang mengikuti Diklatpim II	1 Orang	60.522.000	0	0	1 Orang	-
4 5 16	8 Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar			TAPIN	Waktu penyelesaian administrasi izin belajar dan tugas belajar	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-
4 5 17	Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya tingkat akurasi data kepegawaian		Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99%	506.680.000	0	0	99	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
4 5 17	8	Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN		TAPIN	Waktu Seleksi penerimaan calon pegawai ASN	12 Bulan	350.950.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	9	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS		TAPIN	Jumlah terbitnya SK pangkat PNS	1000 SK	57.100.000	0	0	1000 SK	-	
4 5 17	11	Pembekalan Calon Pegawai ASN		TAPIN	waktu Pembekalan calon pegawai ASN	12 Bulan	14.070.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	12	Penyelesaian SK Mutasi		TAPIN	Waktu penyelesaian SK Mutasi	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	13	Ujian Dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI		TAPIN	Waktu pelaksanaan Ujian dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	14	Pengolahan Data Bezetting Existing ASN		TAPIN	Waktu pengolahan data bezetting existing ASN	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	15	Penetapan CPNS menjadi PNS		TAPIN	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	16	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS		TAPIN	Waktu Peninjauan / perbaikan masa kerja PNS	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	17	Penyelesaian SK Pensiun		TAPIN	Waktu penyelesaian SK pensiun	12 Bulan	15.460.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	18	Sistem Informasi Berkala Online		TAPIN	Waktu penyelesaian SK berkala	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	19	Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan		TAPIN	waktu pelaksanaan entry data dan pengelolaan kearsipan	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	20	Pengelolaan dan Pengembangan Website		TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website	12 Bulan	33.500.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	21	Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK		TAPIN	Waktu perbaikan data pegawai dan operasional SAPK	12 Bulan	900.000	0	0	12 Bulan	-	
4 5 17	22	Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG		TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMPEG	12 Bulan	7.200.000	0	0	12 Bulan	-	
TOTAL								740.948.990.045	0	0		223.792.664.635

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM

yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka pemerintah Kabupaten Tapin menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi pemerintah daerah, karena :

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan semua kewenangan / fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat pemerintah daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten / Kota
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Taknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan / petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen

pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan / Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 1.26.
Integrasi SPM dalam RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	Dinas Pendidikan
			Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	
2	Pendidikan dasar	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	
			Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	
		Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	
			Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3	Pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	Dinas Pendidikan
			Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	
SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	Satpol PP
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	3
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	3
B. Data Geografis Wilayah.....	4
C. Jumlah Penduduk.....	9
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	16
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat	
Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	20
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	40
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	40
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	47
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan	
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	56
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan	
Dokumen Perencanaan Tahunan.....	98
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	169
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	174
2.1. Capaian Kinerja Makro	174
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	187
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	187
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	251
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan.....	265
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	290
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	290



B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan..... Target Capaian Kinerja.....	301
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	313
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan..... Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	328
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan ... Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai.....	340
F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	377
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	268
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	268
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	269
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	271
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh	
Daerah Kabupaten	302
3.1. 1 Target Kinerja	302
3.1. 2 Realisasi.....	303
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh	
Daerah Kabupaten	309
3.2.1 Target Kinerja	309
3.2.2 Realisasi	310
3.3 Permasalahan dan Kendala	315
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	317
BAB. IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	320
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	320
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	320
4.1.2 Target Pencapaian SPM	322
4.1.3 Realisasi.....	324
4.1.4 Alokasi Anggaran	346



4.1.5 Dukungan Personil.....	354
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	355
4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	357
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	357
4.2.2 Target Pencapaian SPM	375
4.2.3 Realisasi	376
4.2.4 Alokasi Anggaran	378
4.2.5 Dukungan Personil.....	379
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	379
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	383
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	383
4.3.2 Target Pencapaian	385
4.3.3 Realisasi.....	386
4.3.4 Alokasi Anggaran	385
4.3.5 Dukungan Personil.....	388
4.3.6 Pemasalahan dan Solusi.....	588
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	389
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	389
4.4.2 Target Pencapaian SPM.....	390
4.4.3 Realisasi	392
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	393
4.4.5 Dukungan Personil.....	394
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	396
4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	397
4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	397
4.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	
Kabupaten Tapin.	401
4.6 Bidang Urusan Sosial	409
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	409
4.6.2 Target Pencapaian SPM.....	409
4.6.3 Realisasi	410



4.6.4 Alokasi Anggaran.....	412
4.6.5 Dukungan Personil.....	412
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	413
4.7 Program dan kegiatan	415
4.7.1 Urusan Pendidikan.....	415
4.7.2 Urusan Kesehatan	421
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	426
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	427
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perindungan	428
4.7.6 Urusan Sosial	430
BAB. V PENUTUP	432



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM Kabupaten Tapin tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yang semula 70,11 naik menjadi 70,31. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun IPM Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 Sebesar 70,31%, sedangkan IPM KALSEL pada Tahun 2021 adalah 71,28%. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Tapin masih dibawah IPM KALSEL pada Tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia



(IPM) Kabupaten Tapin merupakan yang tertinggi kelima se-Kalimantan Selatan yaitu setelah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 akan nampak sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2016 - 2021

Prov/Kab	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tapin	68.05	68.70	69.53	70.13	70.11	70,31
KALSEL	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91	71,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Pada tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut mencakup: 1. umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); 2. pengetahuan (knowledge); dan 3. standar hidup layak (decent standard of living).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah pemenuhan standar hidup yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, maka dipilih alternatif lain berupa indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung hingga level kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari semakin membaiknya perekonomian.

1) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tapin	11,24	11,52	11,85	11,86	11,94	11,95
Provinsi Kalimantan Selatan	12,29	12,46	12,50	12,52	12,52	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2021 cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data harapan lama

sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2021 dan pada tahun 2021 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah

Tabel 2.3
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tapin	7,44	7,53	7,54	7,75	7,76	7,77
Provinsi Kalimantan Selatan	7,89	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2021 cenderung meningkat. Pada Tahun 2021 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,77 tahun artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 7 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan

Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2021. Data tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,34 tahun sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,77 tahun. Pada tahun 2021 berada di urutan ke tujuh dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Tabel 2.4
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tapin	69,62	69,77	69,98	70,23	70,40	70,57
Provinsi Kalimantan Selatan	68,83	68,66	68,49	68,23	68,02	67,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

AHH Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2021 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir tahun 2021 AHH Kabupaten Tapin sebesar 70,57 tahun, sedangkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,83 tahun. Pada tahun 2021 berada di urutan ke tiga dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan



merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang banyak di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio- ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Kemiskinan Kab. Tapin Tahun 2014-2021

Tahun	Variabel Kemiskinan				
	Garis Kemiskinan	Jml Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2014	314.696	6.520	3,63	0,37	0,06
2015	330.033	7.010	3,88	0,46	0,08
2016	369.153	6.810	3,70	0,25	0,03
2017	390.488	7.011	3,77	0,40	0,08
2018	405.591	6.979	3,70	0,35	0,06
2019	406.367	6.507	3,41	0,46	0,09
2020	446.577	5.899	3,06	0,45	0,12
2021	459.160	6.925	3,60	0,28	0,04

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

Berdasarkan Tabel, garis kemiskinan Kabupaten Tapin tahun 2021 sebesar 459.160 rupiah per kapita per bulan. Hal ini berarti seorang penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran makanan dan non makanannya kurang dari Rp. 459.160 per bulan atau Rp 15.305 per hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Garis kemiskinan tahun 2021 naik sekitar Rp 12.583. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan standar hidup masyarakat di Kabupaten Tapin.

Garis Kemiskinan di kabupaten Tapin masih lebih rendah jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang mencapai Rp 519.150 per kapita per bulan. Hal ini berarti seorang penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran makanan dan non makanannya kurang dari Rp. 519.150 per bulan atau Rp 17.305 per hari. Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan garis kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 21.888 rupiah.

Berdasarkan Tabel di atas persentase penduduk miskin di



Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah 3,60 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 mencapai 4,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tapin jauh lebih rendah jika dibandingkan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin sebesar 0,54 persen poin. Ini berarti usaha pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif.

Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Tetapi juga ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, ndeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tapin sebesar 0,28 persen. Angka ini turun sebesar 0,17 point dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 0,45 persen. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Tapin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Berbeda dengan P1, tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten menunjukkan penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Tahun 2020 menjadi 0,04. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kabupaten Tapin.

c. Angka Pengangguran

Jumlah Pengangguran adalah jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja .

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja; orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha; orang yang memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Pengangguran Kab. Tapin Tahun 2014-2021

Tahun	Angka Pengangguran	
	Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2014	1.659	1,79
2015	4.859	5,14
2016	-	-
2017	4.301	4,39
2018	3.931	4,02
2019	3.586	3,79
2020	3.760	3,73
2021	5.078	4,96

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Angka Pengangguran Kabupaten Tapin tahun 2021 sebesar 5.078 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3.760 hal ini mengalami kenaikan sebesar 1.318 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 Sebesar 4,96 persen, hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,23 point dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 3,73 persen. Sedangkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 mencapai 4,95 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin lebih tinggi 0,01 point jika dibandingkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Berdasarkan Fahri, dkk (2019) kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup atau ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan melakukan PHK. Selain itu adanya pembatasan pergerakan masyarakat membuat usaha ekonomi banyak yang tutup.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran paling tinggi untuk Kab/Kota di Kalsel adalah Kota Banjarmasin sedangkan TPT Kab/Kota terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan. TPT Kota Banjarmasin Tahun 2021 mencapai 8,47 persen dan TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 2,44 persen. Kemungkinan banyaknya pengangguran di Kota Banjarmasin dikarenakan banyaknya orang dari dalam daerah maupun luar daerah yang ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan karena Banjarmasin adalah Kota besar.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam



bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Untuk memperoleh nilai pertumbuhan ekonomi ini, indikator yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan atau dalam nilai riilnya. PDRB riil ini sudah menghilangkan unsur perubahan harga atau inflasi, sehingga hanya menunjukkan adanya perubahan kapasitas produksi. Nilai positif dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wilayah tersebut semakin membaik. Sebaliknya, nilai pertumbuhan ekonomi yang bertanda negatif menunjukkan adanya penurunan produktivitas ekonomi wilayah tersebut.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2017-2021 Kabupaten Tapin

No	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**	2020**	2021**
1	Petanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5,5	-0,43	5,36	-4,34	-1,57
2	Pertambangan dan penggalian	5,78	6,82	3,00	-2,04	5,82
3	Industri pengolahan	3,22	3,92	4,29	-4,29	4,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,33	7,41	4,14	4,38	4,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,65	6,77	2,15	-0,33	3,48
6	Konstruksi	4,91	5,75	4,73	-0,68	2,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,49	7,84	6,38	-0,23	1,27
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	7,31	4,89	-1,60	4,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,21	6,85	2,93	-0,87	5,62
10	Informasi dan Komunikasi	3,75	6,99	4,52	7,42	7,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	6,29	6,05	5,85	-1,34
12	Real Estate	3,14	5,17	3,68	2,97	3,09
13	Jasa Perusahaan	1,56	3,84	4,81	-2,64	5,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2,20	3,78	4,81	0,96	3,21
15	Jasa Pendidikan	6,53	6,96	3,98	-0,38	4,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,41	7,66	3,66	2,11	9,13
17	Jasa Lainnya	5,36	7,25	1,64	-0,68	1,30
PDRB		5,14	5,01	4,24	-1,49	3,41

Sumber : KDA Kab. Tapin, BPS Tahun 2021 (*Angka Sementara / Preliminary Figure)
(** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figure)

Berdasarkan tabel di atas, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin Tahun 2021 sudah mulai membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,49 persen. Artinya PDRB pada tahun 2020 di Kabupaten Tapin mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2019. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi sebesar -1,81 persen. Fenomena kontraksi ekonomi pada tahun 2020 ini diakibatkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain itu, Covid-19 juga membuat bidang investasi ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha.

Pada tahun 2021 untuk sektor lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sudah mengalami penurunan kontraksi PDRB menjadi -1,57 dibanding pada tahun 2020 sektor tersebut mengalami kontraksi PDRB tertinggi yakni sebesar -4,34. Diikuti oleh sektor Industri Pengolahan pada tahun lalu sebesar -4,29 persen telah tumbuh menjadi 4,37 persen. Diantara 17 lapangan usaha, terdapat 2 sektor yang masih mengalami kontraksi PRDB dan 15 sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif, sektor yang paling tumbuh pada saat krisis Covid-19 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor ini tumbuh dengan laju pertumbuhan 9,13 persen di tahun 2021, jauh lebih tinggi daripada di tahun 2020, yaitu hanya 2,11 persen. Sektor yang menempati urutan kedua setelah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah sektor informasi dan komunikasi walaupun adanya penurunan sebesar 0,10 persen menjadi 7,32 persen di tahun 2021. Sektor informasi dan komunikasi tetap bertahan karena penggunaan data internet, media sosial, dan transaksi online yang tetap menjadi kebutuhan di masyarakat terutama pada saat pandemi ini. Sektor informasi dan komunikasi yang tetap positif ini erat kaitannya dengan peran sebagai enabler (fasilitator) dalam mendorong keberlangsungan kegiatan produktif di tengah pandemi.



Selama masa pembatasan aktivitas sosial, peran internet amat signifikan dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring. Baik urusan pekerjaan, fasilitas dan produk kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, rekreasi, hiburan hingga transaksi ekonomi.

e. Pendapatan Perkapita

Selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tapin rata – rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 40.20 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 47,14 juta rupiah pada tahun 2021 sedangkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) rata – rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 32,69 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 34,46 juta rupiah pada tahun 2021 tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33,60 juta rupiah.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tapin Tahun 2015-2021

	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	3	4	5	6	7	8	
PDRB ADHB (Milyar)	6474,84	6897,02	7430,81	7999,16	8438,25	8393,89	9047,33
PDRB ADHK 2010 (Milyar)	5343,48	5608,97	5897,16	6192,45	6454,99	6358,49	6575,52
PDRB perkapita (ADHB) (Rupiah)	40.206.482	41.782.272	44.446.445	42.936.292	44.821.844	44.358.839	47.417.624
PDRB perkapita (ADHK) (Rupiah)	32.697.738	33.158.800	34.407.661	33.238.595	34.287.270	33.602.446	34.462.712

Keterangan : *) = angka sementara; **) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Dalam Angka 2021 (diolah)

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2013 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2021

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tapin	0,32	0,33	0,28	0,268	0,274	0,289
Provinsi Kalimantan Selatan	0,332	0,347	0,344	0,334	0,332	0,330

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan tabel, rasio gini di Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 sebesar 0,289, sedangkan persentase rasio gini di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 mencapai 0,330 persen. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Tapin jauh lebih merata jika dibandingkan distribusi pendapatan di Kalimantan Selatan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi kenaikan gini ratio di Kabupaten Tapin sebesar 0,015 poin. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di tahun 2020 lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan tahun 2021.

**2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan****2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran****1.) Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	92 orang	DISDIK	
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	130 orang	DISDIK	
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tahap 1 6264 Tahap 2 5631	DISDIK	
4	Jumlah Kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	97 orang	DISDIK	
5	Jumlah Pendidik Paud (Negeri dan Swasta)	602 orang	DISDIK	
6	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau serjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan setifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	57 orang	DISDIK	Data dari Dinas Pendidikan besertifikat = 85, ijazah S1 = 227
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD non formal dari lembaga pemerintah	SI= 51 Sertifikat= 48 STTPL= 0 orang	DISDIK	Data dari Dinas Pendidikan D-IV/S1 = 83 Sertifikat Pendidik = 64 Sertifikat Calon Kepsek = 33



Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	199	DISDIK	SD 173 & SMP 26
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	170	DISDIK	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	340	DISDIK	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18746	DISDIK	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3749	DISDIK	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	375	DISDIK	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	206	DISDIK	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1351	DISDIK	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	350	DISDIK	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	491	DISDIK	



	(Negeri dan Swasta)			
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	75	DISDIK	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	332	DISDIK	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	82	DISDIK	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1662	DISDIK	S1 = 1.002, SERTIFIKAT = 660
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	518	DISDIK	S1 = 336, SERTIFIKAT = 182
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	454	DISDIK	S1 = 166, SERTIFIKAT = 151, STTPL = 137
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	DISDIK	S1 = 19, SERTIFIKAT = 17, STTPL = 17
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	307	DISDIK	



	Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	DISDIK	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	199	DISDIK	SD 173 & SMP 26
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	170	DISDIK	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	340	DISDIK	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18746	DISDIK	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3749	DISDIK	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	375	DISDIK	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	206	DISDIK	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1351	DISDIK	



9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	350	DISDIK	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	491	DISDIK	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	75	DISDIK	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	332	DISDIK	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	82	DISDIK	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1662	DISDIK	S1 = 1.002, SERTIFIKAT = 660
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	518	DISDIK	S1 = 336, SERTIFIKAT = 182
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	454	DISDIK	S1 = 166, SERTIFIKAT = 151, STTPL = 137
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat	53	DISDIK	S1 = 19, SERTIFIKAT = 17, STTPL = 17



	pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	307	DISDIK	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	DISDIK	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10	DISDIK	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIK	Surat Keterangan
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4700	DISDIK	TAHAP 1= 1.627, TAHAP 2= 1.485, PD =1.588
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0	DISDIK	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	170	DISDIK	
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	127	DISDIK	
7	Jumlah kepala sekolah pada	0	DISDIK	



	jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14	DISDIK	

2.) Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	SK Rumah Sakit Rujukan yaitu Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DINKES	RSUD Datu Sanggul setiap tiga tahun disiapkan untuk memperoleh Akreditasinya untuk tahun 2020 ditunda disebabkan adanya kondisi pandemi covid tetapi untuk Evaluasi tetap jalan (RE.AKREDTASI) (diminta dokumennya penundaan penilaian Akreditasinya)



Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Tablet Tambah Darah (305550 Tablet) 2) Tes Kehamilan (3395 Buah) 3) Pemeriksaan Hb (3.05550 Buah) 4) Asam folat (101850) 5) HIV Test Rapid (3395 Buah) 6) Hepatitis Test Rapid (3395Buku) 7) Sypihilis Test Rapid (3395) 8) Pemeriksaan HB(33395) 9) Urine Test Reagent (755) 10) Buku Kia (3395)	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenal	1) Bidan (224 Orang) 2) Dokter Spesialis (11 Orang) 3) Gizi (45 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (190 orang) 7) Apoteker (7 Orang)	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	1) Formulir Partograf (3240 lembar) 2) Buku KIA (3395 Buku) 3) Oxytoxsin(3.777 Lembar) 4) Infus RL (3240) 5) Methil Ergometrin Injeksi(650) 6) Mgso4 40%(650) 7) Vit A (6480) 8) Rekamidis (3395)	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes



2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bidan (245 Orang) 2) Dokter Spesialis (11 Orang) 3) Gizi (36 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (171 orang) 7) Apoteker (7 Orang) 	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vaksin Hepatitis BO (3086 Single Dose) 2) Vitamin KI Injeksi (3086 Ampul) 3) Salep/Tetes Mata Antibiotik (3086 Tube) 4) Formulir MTBM (9258 Lembar) 5) Buku KIA (3395 Buku) 	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bidan (245 Orang) 2) Dokter Spesialis (1 Orang) 3) Gizi (36 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (171 orang) 7) Apoteker (7 Orang) 	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisiener KPSP (49194 Lembar) 2) Formulir DDTK (49194 Lembar) 3) Buku KIA (3395 Buku) 4) Vitamin A Biru (2927 Biji) 5) Vitamin A Merah (25054 Biji) 	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bidan 	DINKES	Data dukung



	kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(245 Orang) 2) Dokter Spesialis (1 Orang) 3) Gizi (36 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (171 orang) 7) Apoteker (7 Orang)		Validasi dari Dinkes
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) UKS KIT (12 KIT) 2) Buku Raport Kesehatan (5702 Buku)		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1) Bidan (245 Orang) 2) Dokter Spesialis (11 Orang) 3) Gizi (36 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (171 orang) 7) Apoteker (7 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Tensi Meter (13 Buah) 2) Body Fat Analyzer (13 Buah) 3) Alat Ukur Tinggi Badan (13 Buah) 4) Stripe Test Glukosa (31.011 Buah) 5) Glukosa Meter (13 Buah) 6) Lacet (31.011 Buah) 7) Kapas Alkohol 8) KIT IVA Test (14 paket)		Data dukung Validasi dari Dinkes



2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Bidan (13 Orang) 3) Perawat (13 Orang) 4) Gizi (13 Orang) 5) Kader Pusbindu (625 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Lansia KIT (107 KIT) 2) Buku Kesehatan Lansia (5759 Buku)		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Bidan (245 Orang) 2) Dokter Spesialis (11 Orang) 3) Gizi (36 Orang) 4) Analis (25 Orang) 5) Dokter Umum (29 Orang) 6) Perawat (171 orang) 7) Apoteker (7 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Tensi Meter (13 Buah)		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Bidan (13 Orang) 3) Perawat (13 Orang) 4) Pengelola Program (13 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Stripe Test Glukosa (2.240) 2) Glukosa Meter (13 Buah) 3) Lacet		Data dukung Validasi dari Dinkes



		4) Kapas 5) Alkohol		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Bidan (13 Orang) 3) Perawat (13 Orang) 4) Gizi (13 Orang) 5) Pengelola Program (13 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Perawat terlatih (13 Orang) 3) Pengelola Program (13 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Kotak Slide Microscopis (137 kotak) 2) Catrid TCM (400 pcs) 3) Pot Sputum (3.420 pcs) 4) Masker N95 (5.820 Masker) 5) Masker 3 ply (10 Buah)		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Pengelola Program (13 Orang) 3) Analis (19 Orang) 4) Pengelola Farmasi (14 Orang)		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Rapid HIV (1.975 Pcs)		



2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1) Dokter (13 Orang) 2) Pengelola Program (13 Orang) 3) Analis (19 Orang) Pengelola Farmasi (14 Orang)		
---	---	--	--	--

3.) Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (CIPTA KARYA)				
1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	ADA	PUPR	
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	TIDAK ADA	PUPR	Suket kadis
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	PUPR	Tidak Ada
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	PUPR	Tidak Ada
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	PUPR	Tidak Ada
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (CIPTA KARYA)				
1	Jumlah SPALD Regional	0	PUPR	Tidak Ada
2	Total kapasitas SPALD Regional	0	PUPR	Tidak Ada
3	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	PUPR	Tidak Ada
4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan	0	PUPR	Tidak Ada



	limbah domestik			
5	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik	0	PUPR	Tidak Ada
Rasio kemandapan jalan (BINA MARGA) PUPR				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	0	PUPR	Tidak Ada
2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan kabupaten	TIDAK ADA	PUPR	Tidak Ada
3	Panjang jalan yang dibangun	0	PUPR	Tidak Ada
4	Panjang jembatan yg dibangun	0	PUPR	Tidak Ada
5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	PUPR	Tidak Ada
6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	PUPR	Tidak Ada
7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	PUPR	Tidak Ada
8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	PUPR	Tidak Ada
9	Panjang jalan yang dipelihara	0	PUPR	Tidak Ada
10	Panjang jembatan yang dipelihara	0	PUPR	Tidak Ada
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (SDA)				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	83341,05 H (Tiga Kecamatan)	PUPR	Rekapitulasi Data Kecamatan Rawan Banjir
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	23705,37 M (tiga Kecamatan)	PUPR	Rekapitulasi Data Kecamatan Panjang Sungai



3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	PUPR	Tidak Ada
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	PUPR	Tidak Ada
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	TIDAK	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	TIDAK	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Pengaman Tebing = 6465.10 m, Tanggul Sungai = 42390.66 m Pintu air = 14 unit	PUPR	KIB D dan Data Dak
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (SDA)				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	83341,05 H	PUPR	Tidak Ada
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	23705,37 M	PUPR	Tidak Ada
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten(Ha)	0	PUPR	Surat Keterangan (menyusul)
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan	0	PUPR	Surat Keterangan



	abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			(menyusul)
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (SDA)				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0	PUPR	Surat Keterangan
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	10,41%	PUPR	KIB D DAN EPAKSI
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	4%	PUPR	KIB D DAN EPAKSI
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota CIPTA KARYA)				
1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ADA	PUPR	RISPAM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	TIDAK ADA	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	69	PUPR	Ada Data Dukung Primer
4	Jumlah izin yang	0	PUPR	SURAT



	diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM			KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (CIPTA KARYA)				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	48614	PUPR	ADA, DATA PRIMER
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	48614	PUPR	ADA, DATA PRIMER + Surat Keterangan
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	86.68%	PUPR	Ada



8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	PUPR	SURAT KETERANGAN No. 600/264DPUPR-SEKR/II/2022
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (BINA MARGA)				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	617,15 km	PUPR	SK BUPATI
2	Panjang jalan yang dibangun	6535.7 km	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
3	Panjang jembatan yg dibangun	59 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17795 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
5	Panjang jembatan yang	56.84 m	PUPR	KIB D BIDANG



	diganti/dilebarkan			BINA MARGA
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	11183.9 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	645 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
8	Panjang jalan yang dipelihara	93,5 km	PUPR	Suket Kepala Dinas
9	Panjang jembatan yang dipelihara	164,5 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Jaskon)				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3	PUPR	Ada
2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	115	PUPR	Ada
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	115	PUPR	Ada
4	Terselenggaranya Sistem Informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten kota yang aktif dengan data termuktakhir	0	PUPR	Surat keterangan
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	PUPR	Surat keterangan
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	PUPR	Surat keterangan
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi	0	PUPR	Surat keterangan



	di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	PUPR	Surat keterangan
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	PUPR	Surat keterangan
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	PUPR	Surat keterangan
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	80	PUPR	Data Dukung Rekapitulasi Sertifikasi, Operator dan Teknisi
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	80	PUPR	Data Dukung Rekapitulasi Sertifikasi, Operator dan Teknisi
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
14	Tersedianya data dan	0	PUPR	Surat



	informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			Keterangan
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Surat Keterangan
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	PUPR	Surat Keterangan
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	PUPR	Surat Keterangan
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	34	PUPR	Rekap Data IUJK



23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Surat Keterangan

4.) Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota				
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1494	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan Berdasarkan survey 2020 dan belum ada rencana penanganan
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (bencana putting beliung 2019)



5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	74	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Target 2021)



6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	14,62	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	57	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,1368	Dinas Perkimtan	Terdapat perbedaan jumlah luasan antara yg dilaporkan data rekapitulasi yang dilampirkan (Laporan :14,17, data dukung 14,26)
		0,416317	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
4	Jumlah rumah di kab/kota	55.794	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
5	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	193	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
6	Jumlah rumah tidak layak huni	7829	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
7	Jumlah rumah yang tidak dihuni	6231	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
8	Rasio rumah dan KK	118%	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
9	Jumlah rumah pembangunan baru	70	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Hasil Pendataan



				Tahun 2018)
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2319	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Hasil Pendataan Tahun 2018)
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2124	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Hasil Pendataan Tahun 2018)
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	2319	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Hasil Pendataan Tahun 2018)
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perkimtan	Perumahan yang terfasilitasi RTNH tidak ada
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	788	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Hasil Pendataan Tahun 2018)
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Maksimum	0	Dinas Perkimtan	Tidak ada pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah



	/ Absentee			kelebihan maksimum/absentee
4	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perkimtan	Tidak ada permohonan atas dokumen izin membuka tanah
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	Dinas Perkimtan	Tidak ada dokumen penetapanam site lokasi pembangunan fisik

5.) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	61	POLPP	Rekapitulasi jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani Satpol PP & Kebakaran Kab Tapin Tahun 2020
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	745	POLPP	Data Linmas di Kecamatan di Kabupaten Tapin
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	36	POLPP	Daftar Perda dan Perkada Kab. Tapin Yang Ditegakkan oleh Satpol PP & Kebakaran
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	POLPP	Suket
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	POLPP	SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin



6	Tersedianya sarana prasarana minimal	8	POLPP	Daftar Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	24	POLPP	Laporan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta Tahun 2020
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ADA	POLPP	Foto Markas Damkar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ADA	POLPP	Jadwal Piket Posko Damkar
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	DAFTAR: 1 MAKO	POLPP	Foto Markas Damkar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	DAFTAR: 2 UNIT	POLPP	Daftar Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan Dakmar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	JUMLAH: 11 ORANG	POLPP	Daftar Anggota Pemadam Kebakaran yang Memiliki Standar Kualifikasi



7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	POLPP	Surat Keterangan
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	JUMLAH: 11 ORANG	POLPP	Daftar anggota pemadam yang memiliki standar kualifikasi
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	50%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1 %	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1 %	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	50%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
8	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
9	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat	0%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi



	bencana			
10	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi
11	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	Telah diverifikasi/validasi

6.) Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandanganpengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 SLRT	DINSOS	(SLRT)
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	602 Orang	DINSOS	DTKS
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	DINSOS	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	753 Orang	DINSOS	Daftar lanjut usia yang dijangkau Tahun 2020
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Buah	DINSOS	Dokumentasi roda empat
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	DINSOS	Surat Keterangan kegiatan penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi belum dinaggarkan



7	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	DINSOS	Surat Keterangan tidak dianggarkan kegiatan tersebut karena belum ada nya rumah singgah/shelter/empat tinggal sementara di Kabupaten Tapin
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan penyediaan paket sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng belum dianggarkan
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng belum dianggarkan
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	DINSOS	Surat Keterangan tidak dianggarkan kegiatan tersebut karena belum ada nya rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara di Kabupaten



				Tapin
11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan penyediaan paket perbekalan kesehatan belum dianggarkan
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan penyediaan paket perbekalan kesehatan belum dianggarkan
13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINSOS	Surat keterangan belum ada rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara di Kab. Tapin
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	101 Orang	DINSOS	peksos = 2 orang, TKSK = 12 Orang, PSM = 61 Orang, KT = 26 Orang Belum lengkap SK peksos kurang 1
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	13 Orang	DINSOS	Daftar nama siswa/siswi (anak terlantar) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria Banjarbaru yang lulus tahun 2020
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	2 kali	DINSOS	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) & PSBW



17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DINSOS	Surat Keterangan kegiatan fasilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng untuk mendapat dokumen kependudukan belum dianggarkan
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	DINSOS	Surat keterangan penyediaan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng untuk mendapatkan dokumen kependudukan belum dianggarkan
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng belum dianggarkan
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan reunifikasi dengan keluarga bagi



				penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng belum dianggarkan
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang Dirujuk	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan pelayanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng belum dianggarkan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		DINSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar nama penerima bantuan • Dokumentasi
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	691 Orang	DINSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar nama penerima bantuan • Dokumentasi
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DINSOS	Surat keterangan belum ada tempat penampungan pengungsi di Kab. Tapin
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan	0	DINSOS	Surat keterangan kegiatan untuk penyediaan paket permakanan bagi kelompok rentan belum dianggarkan



5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	181 Orang	DINSOS	Surat keterangan tidak ada nya bencana yang terjadi pada tahun 2020 yang memerlukan dukungan psikososial
6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	36 Orang	DINSOS	SK Kepala Dinas Sosial Kab. Tapin No. 07 Tahun 2020

7.) Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten / kota.	Ada	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten / kota	110	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaste	100	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	60%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5,5%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
4	Persentase LPK yang terakreditasi	8,3 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen



				terkait
6	Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah : 288	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
8	Persentase penyerapan lulusan	40%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	0.0%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	7	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
2	Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker	Data bukan urusan tenaga kerja
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	85,5%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4,5%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	19 SP / SB	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait



4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	20 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	86,4%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	6,4%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
7	Jumlah mogok kerja	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
8	Jumlah penutupan perusahaan	11	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	6	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
11	Jumlah perselisihan PHK	6	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	66 Orang	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten / kota yang diberdayakan	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	14,3%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah	42	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen



	kabupaten / kota			terkait
2	Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	1241 Orang	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten / kota	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
6	Jumlah Penempatan Lembaga Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	99	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab / Kota	673	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	59	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7 orang	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	2%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	29	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	20 %	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen



	(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya			terkait
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0%	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis

8.) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45 SKPD		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar SKPD yang telah dilatih PUG • Undangan • Daftar hadir • dokumentasi
2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	58 Program		Khusus SKPD kecamatan program/kegiatan yang sama tidak dihitung
Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Media		Screenshot IG : layanan_ppa_tapin
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) • foto ruang pelayanan PPA



				sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Bagan alur penanganan korban di Unit PPA • SOP layanan penanganan pengaduan • Buku register kasus
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		<ul style="list-style-type: none"> • Data kasus kekerasan anak yang ditangani Kab Tapin sebanyak 15 orang
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 lembaga		Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)				
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • SK Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kab. Tapin No.188.45/046/KUM/2020 • Undangan Bimtek • Daftar Hadir
2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	320 orang		Undangan Bimtek dan Daftar Hadir
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Tapin No. 188.45/018/KUM/2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Kab. Tapin



				<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Webinar sebagai Puspaga Terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI tentang Rencana Aksi Perlibatan Anak dan Keluarga Sebagai 2P dalam Upaya Penurunan Stunting melalui "Pemahaman Manajemen Kesehatan Reproduksi"
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Tapin No. 188.45/018/KU M/2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Kab. Tapin • DPA DPPA Program : Kualitas Keluarga, Kegiatan : Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program		DPA DPPP A program : "perlindungan hak perempuan", kegiatan : "pelayanan penanganan tindak kekerasan"
6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0 lembaga		Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		Data kasus kekerasan terhadap



				perempuan yang ditangani Kab. Tapin sebanyak 3 orang
--	--	--	--	--

9.) Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2 buah SK	Dinas Ketahanan Pangan	Perbup No.03 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/089/KUM/2017 Tentang Tim Pengelolaan Cadangan Pangan dan
2	Terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Beras : 221.940 kg, Gula : 22.194 kg, Susu : 11.097 kaleng, Minyak Goreng : 11.097 Liter	Dinas Ketahanan Pangan	Rekapitulasi Cadangan Pangan Pemerintah Kab.Tapin dan Daftar tanda terima pendistribusian beras
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak terlaksana
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1 Laporan Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Kegiatan Pengembangan Sumber Pangan Alternatif TA 2020
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Bukti dukung berupa peta ketahanan dan kerentanan pangan



		(FSVA)		
6	Tertangani nya kerawanan pangan	1 Laporan Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	Bukti dukung berupa Laporan SKPG dan Foto kegiatan.
7	Tersalurkan nya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalur nya 6.490 Kg beras untuk 8 desa	Dinas Ketahanan Pangan	Bukti dukung berupa Laporan SKPG dan Foto kegiatan.
8	Terlaksana nya pengawasan keamanan pangan segar	3 Sampel berupa : Beras, Bawang Putih dan Wortel	Dinas Ketahanan Pangan	Bukti dukung berupa laporan uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) TA. 2021

10.) Urusan Pertanahan

No	Indikator Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Maksimum / Absentee	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
4	Dokumen Izin membuka tanah	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada permohonan atas dokumen izin membuka tanah



5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik
---	---	------	--	---

11.) Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota				
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA 2021 = 52,80	DLH	Penjelasan dan data dukung perhitungan
	b. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKU 2020 = 92,02		
	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKL 2020 = 29,50		
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota				
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	0,54% 74,54% 0,53%	DLH	Ket IKK output table 1 dan 2
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP/ DLH	
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	0	DLH	Surat Pernyataan



3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten / Kota	0	DLH	Surat Pernyataan
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLH	Surat Pernyataan
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH DLH	Surat Pernyataan
6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH	Laporan Pelaksanaan Pos Pengaduan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2020

12.) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Perekaman KTP Elektronik				
1	Penerbitan akta perkawinan	46,63%	DISDUK CAPIL	Ada
2	Penerbitan akta perceraian	21,81%	DISDUK CAPIL	Ada
3	Penerbitan akta kematian	100%	DISDUK CAPIL	Ada
4	Penyajian data kependudukan	100%	DISDUK CAPIL	Ada

13.) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capai-an Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase pengentasan desa tertinggal				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	126	DPMD	Surat Pernyataan



2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	DPMD	Surat Pernyataan
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	222 posyandu, 664 posyandu lansia, 11 lembaga adat	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	4 Bumdes, 7 Teknologi Tepat guna	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
Persentase peningkatan status desa mandiri				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	126	DPMD	Surat Pernyataan
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	DPMD	Surat Pernyataan
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	222 posyandu, 664 posyandu lansia, 11 lembaga adat	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	4 Bumdes, 7 Teknologi Tepat guna	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung



14.) Urusan Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)				
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	DPPKB	Belum dalam bentuk perda tetapi sudah diuat dalam bentuk buku grand design pembangunan kependudukan (terlampir)
3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	26 Tahun	DPPKB	Pendataan keluarga tahun 2015 dari BKKBN
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	62 Orang	DPPKB	Pendataan keluarga tahun 2015 dari BKKBN
5	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	59,19%	DPPKB	
6	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	40	DPPKB	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	91,28 %	DPPKB	
2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,54 %	DPPKB	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	696	DPPKB	
4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	72,30 %	DPPKB	



Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	37,81%	DPPKB	
2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	72,18%	DPPKB	

15.) Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 41 Thn 2020 & Surat Edaran Nomor SE 11 thn 2020
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	0%	Ada	Surat pernyataan Kepala Dinas (Data dukung ada tetapi tidak sesuai dengan yang Diberikan)
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	-	Surat pernyataan Kepala Dinas
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	17,19		Bukti dukung Sudah Dilengkapi
Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten / Kota				
1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	17,19		1. Pemasangan perlengkapan jalan tidak ada kegiatan dan anggarannya 2. Targetnya ada tapi kegiatan tidak dilaksanakan (dokumen notulen rapat dengan forum



				lalu lintas Kab. Tapin)
--	--	--	--	-------------------------

16.) Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	Tidak Ada	Surat Keterangan Kadis
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	25,9%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	62,96 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	62,96 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	62,96%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	Belum memanfaatkan SE	Surat Keterangan Kadis
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	63 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	63 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	63 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Tidak Ada	Surat keterangan Kadis



12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	26%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	ada	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota				
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

17.) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas				
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan



2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,02%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12,16%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,21%	Ada	Bukti Dukung Terlampir (msh kurang 2 org untuk bukti dukung)
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,82%	-	Tidak perlu diisi
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	0!	-	Terdapat Surat Pernyataan



	pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	48,65%	-	Terdapat Surat Pernyataan
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	48,65%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5,72%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2,22%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,5%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,2%	Ada	Bukti Dukung Terlampir

**18.) Urusan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Perda No. 03 Tahun 2016	Ada	Perda NO. 03 Tahun 2016
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	tersedia (Draf SOP)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1	Tidak Ada	Surat keterangan Kadis
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Tidak Ada	Surat keterangan Kadis
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Tidak Ada	Surat keterangan Kadis
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	32	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4521	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 904,434,344,073	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten / kota	1	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung



				terkait
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	19 Perusahaan	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten / kota	3	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

19.) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	30	DISPORA	Dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
Mengukur peningkatan prestasi olahraga				
1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan satuan pendidikan	130	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait



2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
---	---	---	---------	--

20.) Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
1	Tersedianya buku profil daerah	ada	DISKOMINFO	
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	DISKOMINFO	
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	DISKOMINFO	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3	DISKOMINFO	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	3	DISKOMINFO	
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	DISKOMINFO	
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	DISKOMINFO	

**21.) Urusan Persandian**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Tingkat keamanan informasi pemerintah				
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi
3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi

22.) Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Terlestariannya Cagar Budaya				
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	6	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Jumlah obyek pemajuan	23	Disbudpar	Dibuktikan



	kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			dengan dokumen pendukung terkait
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	23	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	40	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	33	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	33	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disbudpar	Surat Keterangan
8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Disbudpar	Surat Keterangan
9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	33	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Disbudpar	Surat Keterangan



13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disbudpar	Surat Keterangan
15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Disbudpar	Surat Keterangan
16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disbudpar	Surat Keterangan
17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	Surat Keterangan
18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	Surat Keterangan
19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	Surat Keterangan
20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disbudpar	Surat Keterangan

23.) Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	178.28%	Dinas Perpustakaan Dan kearsipan	
2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	6,48%	Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan	
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.06%	Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan	
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.52%	Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan	Surat Keterangan
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	89	Dinas Perpustakaan	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan	Surat keterangan



2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dan kearsipan	Surat keterangan
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	252	Dinas Perpustakaan	Dokumen Terlampir 252

24.) Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,34%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,35%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Surat Keterangan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Surat Keterangan
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	foto 57	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi	Tidak ada	Dinas Perpustakaan	Surat Keterangan



	kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		dan kearsipan	
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	5	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	

25.) Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi				
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	DISKAN	Surat Keterangan
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	DISKAN	Surat Keterangan
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	DISKAN	Surat Keterangan
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan aksesiptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	129	DISKAN	Rekap Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	672,365	DISKAN	Rekap Produksi BenihTahun 2020

**26.) Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	22 Buah	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	135 Buah	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	9 Sub jenis	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Disbudpar	Surat Keterangan
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Disbudpar	Surat Keterangan
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	103,75%	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Desa	Disbudpar	Surat Keterangan

**27.) Urusan Pertanian**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	27,337	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Prasaran pertanian yang digunakan	26,352	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	Surat keterangan
4	Persentase prasarana yang digunakan	0	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	Dinas Pertanian	Surat keterangan
Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular				
1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
2	Tersedia nya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
3	Pemberda-yaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
4	Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
5	Menurun nya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan

28.) Urusan Kehutanan**29.) Urusan Energi Sumberdaya Mineral****30.) Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	0%	DISDAG	Surat keterangan



	b. Toko swalayan	100 %	DISDAG	Ada
2	Persentase penerbitan TDG	100 %	DISDAG	Ada
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	33 %	DISDAG	Ada
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		DISDAG	
	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DISDAG	Surat keterangan
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		DISDAG	Surat keterangan
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	DISDAG	Surat keterangan
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	DISDAG	Surat keterangan
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	DISDAG	Surat keterangan
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,87%	DISDAG	Surat keterangan
Persentase kinerja pupuk				
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,0091 %	DISDAG	Ada
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	5,25 %	DISDAG	Ada
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	DISDAG	Surat Keterangan

31.) Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota				
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya	0		



	di daerah kabupaten/kota			
2	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100 %		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Ada	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Ada	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0		

32.) Urusan Transmigrasi

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

1.) Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	62,48%	DINAS PENDIDIKAN DAN DISDUKCAPIL	Daftar rincian terlampir
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,84%	DINAS PENDIDIKAN DAN DISDUKCAPIL	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir



3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	65,86%	DINAS PENDIDIKAN DAN DISDUKCAPIL	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,26%	DINAS PENDIDIKAN DAN DISDUKCAPIL	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir

2.) Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,0%	Dinas Kesehatan	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90%	Dinas Kesehatan	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95%	Dinas Kesehatan	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99%	Dinas Kesehatan	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92%	Dinas Kesehatan	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87%	Dinas Kesehatan	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25%	Dinas Kesehatan	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	48%	Dinas Kesehatan	



	kesehatan sesuai standar			
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16%	Dinas Kesehatan	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75%	Dinas Kesehatan	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	81,73%	Dinas Kesehatan	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	20%	Dinas Kesehatan	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	58,07%	Dinas Kesehatan	

3.) Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (CIPTA KARYA)	0%	PUPR	SUKET
2	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (CIPTA KARYA)	0%	PUPR	SUKET
3	Rasio kemantapan jalan (BINA MARGA)	0	PUPR	Data Termasuk Kewenangan Provinsi
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan	22.76%	PUPR	Rekapitulasi dan KIB



	Kab/Kota (SDA)			
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (SDA)	0	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (SDA)	14,01%	PUPR	Rekapitulasi
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (CIPTA KARYA)	68,11%	PUPR	Rekap Rumah Tangga yang Memiliki Akses air Minum
8	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (CIPTA KARYA)	86,68%	PUPR	Rekap Rumah Tangga yang Memiliki Akses air Limbah
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (BINA MARGA)	70,12%	PUPR	DD1 Jalan Tahun 2021 (Data Menyusul)
10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Jaskon)	62%	PUPR	Rekap Tenaga Operator dan Rekap Tenaga Sertifikasi
11	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Jaskon)	100%	PUPR	Rekapitulasi Paket Perkerjaan Dinas PUPR Kab. Tapin

4.) Urusan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	PUPR	



2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	PUPR	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,94%	PUPR	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	14,03%	PUPR	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	PUPR	

5.) Urusan Trantibunlinmas

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	DINAS POL PP DAN DAMKAR	
2	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	41,66%	DINAS POL PP DAN DAMKAR	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85 %	DINAS POL PP DAN DAMKAR	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13 menit	DINAS POL PP DAN DAMKAR	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7220	BPBD	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	120	BPBD	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78	BPBD	

**6.) Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	2,50%	Dinas Sosial	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	Dinas Sosial	

7.) Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	57,9%	Dinas Tenaga Kerja	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	31,399,946%	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	68 %	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	65 %		

**8.) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	27,93%	DP3A	Data jumlah Anggaran Responsif Gender th. 2021
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,27%	DP3A	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)"	0,0%	DP3A	

9.) Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1844,60%	DKP	Analisis dan data Ketersediaan Pangan utama 2020.

10.) Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari BPN No 216/400-63.05/11/2021 terlampir
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dan Surat Pernyataan Terlampir
3	Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0,94%	Disperkim	Surat Keterangan
4	Persentasi tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang	14,03%	Data dari Disperkimtan yang didapat	Data dari BPN No216/400-63.05/11/2021



	berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee		dari BPN	terlampir
5	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari BPN No216/400-63.05/11/2021 terlampir
6	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari BPN No216/400-63.05/11/2021 terlampir

11.) Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	63,58	DLH	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	56,34%	DLH	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	47,37%	DLH	

12.) Urusan Administrasi Penduduk

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perekaman KTP Elektronik	100,15%	DISDUKCAPIL	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	67,08%	DISDUKCAPIL	
3	Mengukur tingkat kepemilikan akte kelahiran	97,35%	DISDUKCAPIL	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	100%	DISDUKCAPIL	



	berdasarkan perjanjian kerja sama			
--	-----------------------------------	--	--	--

13.) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMPD	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	27,428%	DPMPD	

14.) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,26%	DPPKB	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	85,27%	DPPKB	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,22%	DPPKB	

15.) Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas
2	Rasio konektivitas Provinsi	0	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas
3	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten / Kota	0	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas
4	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas

**16.) Urusan Kominfo**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26%	DISKOMINFO	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DISKOMINFO	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	50 %	DISKOMINFO	

17.) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	8,11%	Dinas Perindustrian	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	26,82%	Dinas Perindustrian	

18.) Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-30,13%	DPMPTSP	

19.) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,82%	DISPORA	Surat pernyataan tidak dilaksanakan



2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,31%	DISPORA	Surat pernyataan tidak dilaksanakan
3	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (OR)	12	DISPORA	
4	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	0	DISPORA	Surat pernyataan tidak dilaksanakan

20.) Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	83%	DISKOMINFO	
2	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	83%	DISKOMINFO	

21.) Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	61%	DISKOMINFO	SUKET

22.) Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	100%	DISBUDPAR	

**23.) Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Surat Keterangan (Belum dilaksanakan surveynya tetapi sudah dianggararkan untuk tahun ini)
2	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	27,15 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24.) Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0,56	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60,83%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

25.) Urusan Kelautan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi	4.311,145	Dinas Perikanan	Rekap produksi perikanan tangkap dan rekap produksi



				perikanan budidaya tahun 2020
--	--	--	--	-------------------------------------

26.) Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	25,22%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	29,27%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,7%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,57%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	

27.) Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	5,04%	Dinas Pertanian	
2	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	-100%	Dinas Pertanian	

28.) Urusan Kehutanan**29.) Urusan Sumberdaya Mineral**

**30.) Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	49,67%	Dinas Perdagangan	
2	Persentase kinerja pupuk	78,94 %	Dinas Pertanian	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	5,25 %	Dinas Perdagangan	

31.) Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1,3%	Dinas Perindustrian	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota	0	Dinas Perindustrian	Suket
3	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	Dinas Perindustrian	(RPIK Kabupaten Tapin masih dalam proses penyelesaian Perda sehingga apa yang diamanatkan dalam RIPIN dan RPIP belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara penuh)
4	Mengukur persentase jumlah hasil	100%	Dinas Perindustrian	



	pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
5	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Suket
6	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Suket
7	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	95%		Suket

32.) Urusan Transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1.) Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	0,09%	BKAD	Data pegawai diluar Pendidikan dan Kesehatan, Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD
2	Mengukur tax ratio atau	1,21%	BKAD	LRA TA 2020,



	kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah			Data PDRB Non Migas Kab. Tapin (BPS Kab. Tapin)
3	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditure	56,99%	BKAD	Data LRA TA 2020

2.) Fungsi Penunjang Pengadaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	BPBJ	Pada tahun 2020 tidak ada kontrak konstruksi dengan nilai besar (kontrak konstruksi dengan nilai >50 M)
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	46,64%	BPBJ	Data paket tender (sebanyak 146 paket) dan non tender (sebanyak 337 paket) tahun 2020 yang tayang dalam sistem LPSE
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,90%	BPBJ	Bukti dukung berupa LRA PemKab Tapin Belanja langsung

3.) Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,04%	BKPSDM	



2	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	11,22%	BKPSDM	
3	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	29,12%	BKPSDM	

4.) Fungsi Penunjang Manejemen Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	89,86%	BKAD	Data LRA TA. 2020
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	126,19%	BKAD	Data LRA TA. 2020
3	Assets Management	ya	BKAD	Sampel Rekapitulasi KIB B Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD
		ya	BKAD	Sampel Kertas Kerja Rekonsiliasi Penginputan Data SIMDA BMD Per 31 Desember 2020
		ya	BKAD	Sampel Rekapitulasi Buku Inventaris (Rekap Hasil Sensus) Kec. Lokpaikat
		ya	BKAD	Data LRA TA 2020 (Belanja Modal)
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	23,92%	BKAD	Data LRA TA 2019

**5.) Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Diskominfo	



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menginformasikan Capaian keberhasilan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dalam Pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin dimana yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah sebagai berikut :

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja untuk pencapaian pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Tapin yang dijabarkan kedalam Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APM PAUD)	76,69%
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan. (Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)	92,06%
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APM SMP/MTs)	80,00%
		Presentase Pendidik Yang Bersertifikat	59,01%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58
		Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57
		Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05
		Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15
		Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99
		Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	49,02
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi balita			
	Indikator	Satuan	Target
a	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	124/100.000
b	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	8
c	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik	%	82
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan			
	Indikator	Satuan	Target
a	Persentase puskesmas yang terakreditasi Madya	%	100
b	Rasio Tenaga medis dengan jumlah penduduk	Per 100.000	44/100.000
c	Rasio tenaga paramedis dengan jumlah : a. Bidan b. Perawat	Per 100.000	246/100.000 345/100.000



Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap kesehatan			
	Indikator	Satuan	Target
a	Persentasi Rumah tangga yang ber PHBS	%	97
Sasaran Strategis 4			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang baik			
	Indikator	Satuan	Target
a	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	%	100
b	Persentase Desa yang melaksanakan UCI	%	93,5

Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kinerja			Anggaran
No	Sasaran	Realisasi Capaian Indikator Kinerja	
1.	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Tercapai 100%	366.030.000

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85 %
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%



Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Daerah	%	-7
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	%	93
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	0.032
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Kabupaten	%	77
5.	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak	%	Prata ma

Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020
I	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,25
II	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi padi	Ton	403.982
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.826



		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	104,384
V	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Ton	4.585
		Jumlah Produksi Telur	Ton	6.440
5.1	"Meningkatkan Populasi dan Konsumsi Peternakan"	Populasi Sapi	Ekor	7.015
		Populasi kambing	Ekor	4.716
		Populasi Unggas	Ekor	2.315.533
		Angka konsumsi daging per kapita	Kg/Kapita/Th	3,89

Sasaran 7 : Meningkatkan Sektor Pariwisata.

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan (%)	%	20

Sasaran 8 : Meningkatkan Sektor Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020
		Target
Sasaran ke-1 : Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM		
Persentase Koperasi Berkualitas	%	29,90
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	82

**Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Indikator Kinerja	Target
		2020
1.	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794 %
2.	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794 %

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan Pangan Utama dengan Mutu dan Jumlah Yang Cukup	ketersediaan energy minimal 2.400 kkal/kap/hari	E = kkal/kap/hari	12.770,40
		Ketersediaan protein minimal 63 gr/kap/hari	Protein = gr/kap/hari	332,82
		Skor PPH Ketersediaan	%	98
		Penguatan cadangan pangan	Ton	10 Ton
2	Percepatan Diversifikasi Pangan	Peningkatan nilai/skor pola pangan harapan konsumsi	%	90
	Peningkatan Keamanan Pangan Masyarakat	% skor sampel pangan segar yang lulus diuji	%	100

Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan

SASARAN		Target Tahunan
URAIAN	INDIKATOR	
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,65
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,43
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,06

**Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2020)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	50
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	%	75
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	kasus	100

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan

No	Sasaran	Indikator	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	78
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	45

Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih.

No	Sasaran	Indikator	Target (%)
4	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	2
		Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	2

**Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi**

No	Sasaran	Indikator	Target (%)
2	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	50

Sasaran 16 : Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Target (%)
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	53,57
		Persentase sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) dalam kondisi baik	28,33

Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi

No	Program / Kegiatan	Tahun 2020 Target
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	100 %
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	2 website
2	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	3 jaringan
3	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	70 unit
4	Sosialisasi dan Bimtek IT/Website SOPD	40 orang

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.73
		Indeks Kualitas Udara	88.58
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	26.74

**Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan**

NO	Tujuan	Indikator	Target
1	Meningkatnya lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni	98,00
	Kinerja Utama (sasaran Strategi)	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	-0,0065%
2	Meningkatkan kemanfaatan Runag Terbuka Hijau	Persentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau	17,50%
3	Tertanganinya Konflik Pertanahan	Persentase penanganan Konflik-konflik pertanahan	100%

Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah

NO	Tujuan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rp)	170
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	5

Sasaran 21 : Meningkatnya Keamanan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%
2	Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%

Sasaran 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan➤ **Indikator Nilai SAKIP****1) Perencanaan (Bappelitbang)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah	100%
		Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD	100%



		Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah	100%
--	--	---	------

2) Penyusunan Dokumen (Bagian Organisasi)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020 Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	16	Persentase SAKIP SKPD Kategori Baik	%	100

3) Evaluasi (Inspektorat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %

➤ Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70 %

➤ Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

**Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase kepuasan ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99%
2	Meningkatnya Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	Persentase Data kepegawaian yang akurat dan terkini	99%
3	Meningkatnya Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	99%
4	Meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur	Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan	99%

Sasaran 24 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	81,5



B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja untuk pencapaian pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Tapin yang dijabarkan kedalam Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APM PAUD)	76,69%	72,24%	94,19%
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan. (Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)	92,06%	94,12%	102,23%
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APM SMP/MTs)	80,00%	64,38%	80,47%
		Presentase Pendidik Yang Bersertifikat	59,01%	50,06%	84,83%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58	25,69	104,51
		Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57	21,42	74,97
		Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05	79,21	95,37
		Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15	96,15	98,97
		Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99	68,23	98,89
		Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	49,02	78,91	160,97
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01	50,06	84,83

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi balita						
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
a	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	124/100.000	149	120	Sangat Baik
b	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	8	14	175	Baik
c	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik	%	82		83,41	Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
a	Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	13	100	Sangat Baik



	Madya					
b	Rasio Tenaga medis dengan jumlah penduduk	Per 100.000	44/100.000	22/100.000	50	Kurang
c	Rasio tenaga paramedis dengan jumlah : a. Bidan b. Perawat	Per 100.000	246/100.000 345/100.000	a. 244/100.000 b. 171/100.000	a. 99,19 b. 50,58	Baik Kurang
Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap kesehatan						
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
a	Persentasi Rumah tangga yang ber PHBS	%	97	16583	56,25	Cukup
Sasaran Strategis 4						
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang baik						
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
a	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	%	100	95	70	Baik
b	Persentase Desa yang melaksanakan UCI	%	93,5	76	56,62	Kurang

Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Total	%	
1.	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	366.020.000	274.031.400	74,86%	91.988.600
Total		366.020.000	274.031.400	74,86%	91.988.600

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %	85%	100 %
		Persentase	85 %	100%	117,65%



		kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan			
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	85%	100%

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Daerah	-7	1.27	100
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	93	90.91	97,75
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.032	0.022	100
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Kabupaten	77	83	100
5.	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak	Prata ma	Tidak ada penilaian	-

**Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
I	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,25	3,51	280,94
II	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi padi	Ton	403.982	446.269	110,47
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.826	4.864	55,11
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	104,384	0	0,00
V	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Ton	4.585	4.960	108,17
		Jumlah Produksi Telur	Ton	6.440	6.440	99,99
5.1	"Meningkatkan Populasi dan Konsumsi Peternakan"	Populasi Sapi	Ekor	7.015	7.486	106,71
		Populasi kambing	Ekor	4.716	4.850	102,84
		Populasi Unggas	Ekor	2.315.533	2.734.598	118,10
		Angka konsumsi daging per kapita	Kg/Kapita/Th	3,89	4,01	103,08

Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor Pariwisata.

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan (%)	20	(55,64)	(278,2)

**Sasaran 8 : Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Sasaran (%)
		Target	Realisasi	
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM				
Persentase Koperasi Berkualitas	%	29,90	25,64	85,75%
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	82	83	101,21%

Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		2020	2020
1.	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794 %	0,794 %
2.	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794 %	0,794 %

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ketersediaan Pangan Utama dengan Mutu dan Jumlah Yang Cukup	ketersediaan energy minimal 2.400 kkal/kap/hari	E = kkal/kap/hari	12.770,40	39.972,74 kkal/kap/hari	➤ 100 %
		Ketersediaan protein minimal 63 gr/kap/hari	Protein = gr/kap/hari	332,82	369,13 gr/kap/hari	➤ 100 %
		Skor PPH Ketersediaan	%	98	85,8	88 %
		Penguatan cadangan pangan	Ton	10 Ton	10 ton	100 %
2	Percepatan Diversifikasi Pangan	Peningkatan nilai/skor pola	%	90	93,8	➤ 100 %



		pangan harapan konsumsi				
	Peningkatan Keamanan Pangan Masyarakat	% skor sampel pangan segar yang lulus diuji	%	100	100 %	100 %

Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan

SASARAN		Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian %
URAIAN	INDIKATOR			
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,65	3,06	119,28
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,43	0,45	95,56
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,06	0,12	50,00

Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2020)	Realisasi (2020)	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	50	50	100
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	%	75	70	93
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	kasus	100	60	60

**Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan**

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	78	70	89,74
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	45	48	106,67

Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih.

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
4	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	2	1,62	81
		Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	2	1,08	54

Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
2	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	50	0,007401	0,014802

Sasaran 16 : Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	%
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	53,57	48,57	90,66
		Persentase sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) dalam kondisi baik	28,33	12,78	45,11

**Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi**

No	Program / Kegiatan	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	100 %	80 %
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	2 website	2 website
2	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	3 jaringan	3 jaringan
3	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	70 unit	70 unit
4	Sosialisasi dan Bimtek IT/Website SOPD	40 orang	-

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.73	57.78	107.53 %
		Indeks Kualitas Udara	88.58	91.89	103.73 %
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	26.74	46.36	173.37%
Rata-rata capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					128,21%

Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan

NO	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni	98,00	58,70	59,90
	Kinerja Utama (sasaran Strategi)	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	-0,0065%	-0,0065%	100%
2	Meningkatkan kemanfaatan Runag Terbuka Hijau	Persentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang	17,50%	-44,8%	0%



		Terbuka Hijau			
3	Tertanganinya Konflik Pertanahan	Persentase penanganan Konflik-konflik pertanahan	100%	100%	100%

Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah

NO	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rp)	170	1.294,39	761,41%
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	5	-37,62%	-7,52%

Sasaran 21 : Meningkatnya Keamanan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%	22,22%	88,88%
2		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	14,28%	57,12%
Rata-rata Capaian			82%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah	100%	100 %	100 %
		Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD	100%	100 %	100 %
		Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah	100%	100 %	100 %



Sasaran 22 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

➤ Indikator Nilai SAKIP

1) Perencanaan (Bappelitbang)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah	100%	100 %	100 %
		Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD	100%	100 %	100 %
		Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah	100%	100 %	100 %

2) Penyusunan Dokumen (Bagian Organisasi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Kategori/Capaian
1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	16 Persentase SAKIP SKPD Kategori Baik	%	100	100	Tercapai

3) Evaluasi (Inspektorat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	0%	100%

Pencapaian indikator meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar 0 % dari target 100% sehingga persentase capaian meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar 0%



dikarenakan pemantauan tindak lanjut saking belum dapat terlaksana.

➤ **Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %	88 %	103 %
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70 %	76,5 %	109,2 %

➤ **Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu (30 Desember 2019)	100%

Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja
Tujuan : Meningkatkan Kualitas ASN					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase kepuasan ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	Persentase Data kepegawaian yang akurat dan terkini	99%	99,87%	99,87%
3	Meningkatnya Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	99%	13,45%	13,59%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja
4	Meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur	Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan	99%	88,17%	88,17%

Sasaran 24 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	81,5	84,15	103,25

C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang dijabarkan kedalam Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	APK PAUD	75,00 %	84,17%	112,22%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,25%	98,38%	95,90%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,00%	88,48%	93,81%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,96 %	91,89%	99,92%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	60,90 %	66,61%	109,37%



2	Meningkatnya mutu lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	87,25 %	93,93%	107,65%
		Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA, MA, /SMK	91,91%	84,78%	92,24%
		Rata-Rata nilai ujian sekolah (SD/MI/Paket A)	63,64 %	67,51%	106,08%
		Rata-rata nilai ujian nasional (SMP/MTs/Paket B)	60,90 %	48,88%	80,26%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	99,67%	101,15%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%
		Persentase Guru Bersertifikasi	57,77 %	48,63%	84,17%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	24,58	25,69	104,51
		Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	28,57	21,42	74,97
		Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	83,05	79,21	95,37
		Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	97,15	96,15	98,97
		Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	68,99	68,23	98,89
		Rata-Rata Nilai Hasil	49,02	78,91	160,97



		UN SMP			
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	59,01	50,06	84,83

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi balita				
Indikator		Satuan	Tahun 2019 Realisasi	Tahun 2020 Realisasi
a	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	3	149
b	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	35	14
c	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik	%	9154	?
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan				
Indikator		Satuan	Tahun 2018 Realisasi	Tahun 2019 Realisasi
a	Persentase puskesmas yang terakreditasi Madya	%	100	13
b	Rasio Tenaga medis dengan jumlah penduduk	Per 100.000	16/ 100.000	22/ 100.000
c	Rasio tenaga paramedis dengan jumlah : a. Bidan b. Perawat	Per 100.000	a. 114/ 100.000 b. 98/ 100.000	a. 244/ 100.000 b. 171/ 100.000
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap kesehatan				
Indikator		Satuan	Tahun 2018 Realisasi	Tahun 2019 Realisasi
a	Persentasi Rumah tangga yang ber PHBS	%	16583	16583
Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang baik				
Indikator		Satuan	Tahun 2018 Realisasi	Tahun 2019 Realisasi
a	Persentase Desa yang	%	32	95



	melaksanakan STBM			
b	Persentase Desa yang melaksanakan UCI	%	121	76

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Realisasi Total	%	Realisasi Total	%
1.	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	366.020.000			274.031.400	74,86%
Total		366.020.000			274.031.400	74,86%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019			Realisasi 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	87,50 %	109,37 %		85%	100%	
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	125%		100 %	117,65 %	
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	100%	125%		100 %	125%	



		(%)					
--	--	-----	--	--	--	--	--

Sasaran 5: Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Daerah	-1,68	1.27
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	91,5	90.91
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,029	0.022
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan P2TP2A Kabupaten	79,29	83
5.	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak	Tidak Tercapai	Tidak ada penilaian

Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020
I	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	-5,87	3,51
II	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi padi	Ton	418.240	446.269
		Jumlah Produksi jagung	Ton	14.248	4.864



		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	456	0
V	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Ton	4.667	4.960
		Jumlah Produksi Telur	Ton	6244	6.440
5.1	"Meningkatkan Populasi dan Konsumsi Peternakan"	Populasi Sapi	Ekor	7.015	7.486
		Populasi kambing	Ekor	4.650	4.850
		Populasi Unggas	Ekor	2.315.533	2.734.598
		Angka konsumsi daging per kapita	Kg/Kapita/Th	3,84	4,01

Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor Pariwisata.

No.	Kinerja Utama/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	21,36%	(55,64)%

Sasaran 8 : Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2020)	Realisasi (2019)
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM			
Persentase Koperasi Berkualitas	%	25,64	25,64
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	83	83

Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2019	2020
1.	Persentase Desa Berstatus Maju	0,794 %	0,794 %



2.	Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal	0,794 %	0,794 %
----	---	---------	---------

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketersediaan Pangan Utama dengan Mutu dan Jumlah Yang Cukup	ketersediaan energy minimal 2.400 kkal/kap/hari	E = kkal/kap/hari	39.972,74 kkal/kap/hari	39.972,74 kkal/kap/hari
		Ketersediaan protein minimal 63 gr/kap/hari	Protein = gr/kap/hari	369,13 gr/kap/hari	369,13 gr/kap/hari
		Skor PPH Ketersediaan	%	85,8	85,8
		Penguatan cadangan pangan	Ton	10 ton	10 ton
2	Percepatan Diversifikasi Pangan	Peningkatan nilai/skor pola pangan harapan konsumsi	%	93,8	93,8
	Peningkatan Keamanan Pangan Masyarakat	% skor sampel pangan segar yang lulus diuji	%	100 %	100 %

Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan jaminan sosial	125,92 %	160,48 %
2.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial	69,65 %	118,47 %



3.	Meningkatnya Potensi Kesejahteraan (PSKS) Dalam Melayani Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peran Sumber Sosial Melayani Masalah Sosial	Persentase Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Melayani Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	95,03 %	93,16 %
----	---	---	--	---------	---------

Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2020 (%)
Menurunnya Pengangguran (RPJMD)	Tingkat Pengangguran Terbuka	70,05	50	100
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	44,99	70	93
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	66,12	60	60%

Sasaran 13 : Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019 (%)	Sasaran	Indikator	Capaian 2020 (%)
1	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	101,59	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	89,74
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	106,16		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	106,67

Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Jaringan Air Bersih.



No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019 (%)	Sasaran	Indikator	Capaian 2020 (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	99,42	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	80,95
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah	130,08		Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	53,85

Sasaran 15 : Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019 (%)	Sasaran	Indikator	Capaian 2020 (%)
2	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air	Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi	106,57	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	0,0014802

Sasaran 16 : Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019 (%)	Sasaran	Indikator	Capaian 2020 (%)
1.	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik	Persentase pembangunan drainase lingkungan	100	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	90,67



		Persentase pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan	121,25		Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	45,10
--	--	---	--------	--	---	-------

Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi

No	Program / Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur Teknologi dan E-Government	100 %	75 %	100 %	80 %
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	2 website	2 website	2 website	2 website
2	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	1 jaringan	1 jaringan	3 jaringan	3 jaringan
3	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	70 unit	70 unit	70 unit	70 unit
4	Sosialisasi dan Bimtek IT/Website SOPD	50 orang	-	40 orang	-

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Kinerja Naik/Turun	SKPD Penanggung Jawab
			2019	2020		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas air	54.67	57.78	Naik	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara	93.31	91.89	Turun	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat kualitas air membaik	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup



		Tingkat kualitas udara membaik	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
--	--	--------------------------------	---	---	---	------------------------

Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan

No	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian		Peningkatan Capaian (%)
			2019	2020	2019	2020	
1	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	0,0041	0,0063	92,48	100	7,52
2	Meningkatnya Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Peningkatan Pertumbuhan Jumlah Pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14,60	44,88	87,58	0,00	87,58
3	Tertanganinya Konflik Pertanahan	Prosentase Konflik Pertanahan yang selesai	100	100	100	100	Max

Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah

NO	Tujuan	Indikator	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Investor	Nilai Investasi (Milyar Rp)	150	2075,06	170	1.294,39
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN (%)	5	496,83%	5	-37,62%

Sasaran 21 : Meningkatnya Keamanan Daerah

No.	Tujuan			Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Sasaran	2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)
1	Terpeliharanya Ketertiban	Persentase Penurunan	25%	Terpeliharanya Ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran	17,64 %	-28,57%	22,22%



No.	Tujuan			Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Sasaran	1	2	3
	n Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	an Pelanggaran Perda dan Perkada		Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	n Perda dan Perkada			
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%			Persentase Penurunan Pelanggaran K3	19,04 %	-23,52%

Sasaran 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

➤ Indikator Nilai SAKIP

1) Perencanaan (Bappelitbang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Sasaran Strategis Dengan Tujuan Dan Misi Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Program Prioritas Yang Terakomodir Dalam Rpjmd	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2) Penyusunan Dokumen (Bagian Organisasi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019			Tahun 2020				
			Target	Realisasi	Kategori/Capaian	Target	Realisasi	Kategori/Capaian		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	16	Persentase SAKIP SKPD Kategori Baik	%	100	100	Tercapai (100%)	100	100	Tercapai (100%)

3) Evaluasi (Inspektorat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	100%	100%

Pencapaian indikator meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar 0 % dari target 100% sehingga persentase capaian meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar 0% dikarenakan pemantauan tindak lanjut sakin belum dapat terlaksana.

➤ Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	88 %	74.42 %
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	76,5 %	72.61

➤ **Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	Persentase	Keterangan
1	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	

Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN

➤ **Meningkatnya Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur.**

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Jumlah eselon IV keatas	647	672
Pejabat Ess II yg telah mengikuti assestment	36	34
Pejabat Ess III yg telah mengikuti assestment	51	51
Pejabat Ess IV yg telah mengikuti assestment	0	0

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur.

IKU	Tahun 2019	Tahun 2020
-----	------------	------------



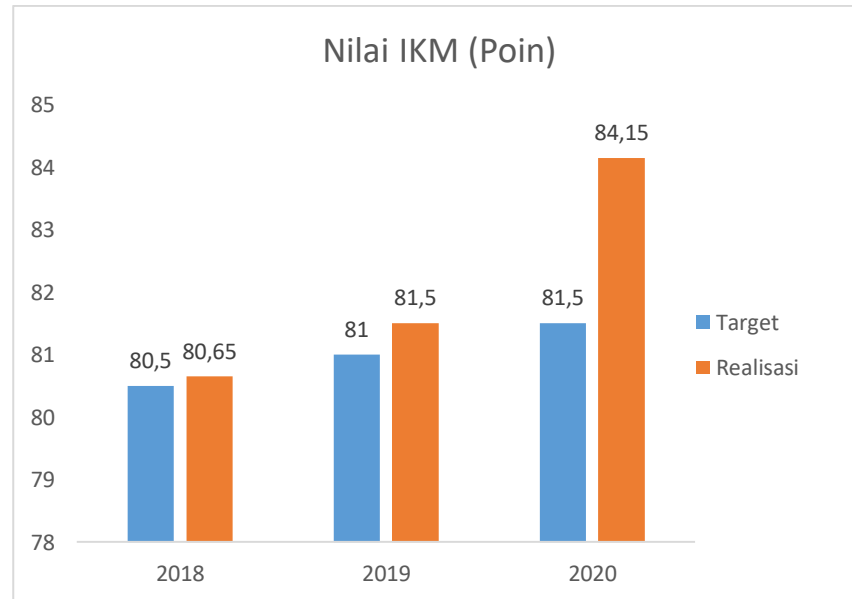
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	$= \frac{(87 : 647)}{X 100}$ $= \mathbf{13,45\%}$	$= \frac{(\text{Realisasi} : \text{Target})}{x 100}$ $= \frac{(13,45\% : 99\%)}{x 100}$ $= \mathbf{13,59\%}$	$= \frac{(85 : 672)}{X 100}$ $= \mathbf{12,64\%}$	$= \frac{(\text{Realisasi} : \text{Target})}{x 100}$ $= \frac{(12,64\% : 99\%)}{x 100}$ $= \mathbf{12,76\%}$

➤ **Meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur.**

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	Assesment dan Syarat Jabatan
1	Pimpinan Tinggi Pratama	39	39
2	Administrator	168	168
3	Pengawas	624	465

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	Assesment dan Syarat Jabatan Tahun 2019	Assesment dan Syarat Jabatan Tahun 2020
1	Pimpinan Tinggi Pratama	39	39	39
2	Administrator	168	168	168
3	Pengawas	624	465	465

Sasaran 24 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat



Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada data diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPSTP meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 80,65 pada tahun 2018 dan 81,50 pada tahun 2019, dan tahun 2020 capaian 84,15 poin.

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah



Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan kedalam Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target RPJMD				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial masyarakat	Persentase lembaga keagamaan dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial keagamaan	%	1,75	2,1	2,2	2,5	2,8	2,8
	Persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan	%	8,91	10	11	12	13	14

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 1											
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi Balita											
Indikator	Satuan	2018			2019	2019	2019	2020	2023	2024	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
A	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100rb KH	175	162	92,57		3	93,76	?	0	0
B	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	16	13	81,25		35	10,89	75	0	0



C	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik	%	74	55,03	74,36		9154	53,37	83,41	0	0
Sasaran Strategis 2											
Meningkatnya akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan											
Indikator		Satuan	2018			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a	Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100		1	0	100	0	0
b	Rasio Tenaga medis dengan jumlah penduduk	per 100.000	41/100.000	16/100.000	39,02		0	0	22/100.000	0	0
c	Rasio tenaga paramedis dengan jumlah : a. Bidan b. Perawat	Per 100.000	a.104/100.000 b.162/100.000	a.114/100.000 b.98/100.000	a.109,61 b.60,49		0	0	a.244 b.171	0	0

Sasaran Strategis 3											
Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap kesehatan											
Indikator		Satuan	2018			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi
A	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	%	40	28,19	70,47		18563	47,78	56,25	0	0

Sasaran Strategis 4											
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Baik											
Indikator		Satuan	2018			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	%	100	94	94		0	0	70	0	0



b	Persentase Desa yang melaksanakan UCI	%	92,5	96,3	104,1	135	121	0	56,62	0	0
---	---------------------------------------	---	------	------	-------	-----	-----	---	-------	---	---

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
			Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(5)				
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	109,37	100%	80%	85%	90%
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	125%	117,65%	80%	85%	85%
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	125%	125%	80%	85%	85%

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Daerah	-7	1.27	100	Capaian Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan semakin Baik dengan ditandai Menurunnya angka Minus pada Realisasi Capaian.



2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	93	90.91	97,75	Target Hampir Tercapai
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.032	0.022	100	Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak semakin menurun/baik dengan ditandai menurunnya Realisasi Capaian Kinerja dari Target Renstra
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Kabupaten	77	83	100	Tercapai
5.	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak	Pratama	Tidak ada penilaian	-	Belum tercapai, karena tidak ada penilaian Tahun 2020 disebabkan adanya wabah virus corona

Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
I	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,25	3,51	280,94
II	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi padi	Ton	403.982	446.269	110,47
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.826	4.864	55,11
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	104,384	0	0,00



V	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Ton	4.585	4.960	108,17
		Jumlah Produksi Telur	Ton	6.440	6.440	99,99
5.1	"Meningkatkan Populasi dan Konsumsi Peternakan"	Populasi Sapi	Ekor	7.015	7.486	106,71
		Populasi kambing	Ekor	4.716	4.850	102,84
		Populasi Unggas	Ekor	2.315.533	2.734.598	118,10
		Angka konsumsi daging per kapita	Kg/Kapita/Th	3,89	4,01	103,08
5.2	"Meningkatnya pengendalian penyakit hewan"	Persentase penyakit hewan yg tertangani	persen	100	100	100,00
5.3	Meningkatnya pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina	persen	2	2	100,00

Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor Pariwisata

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Prosentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	50	(55,64)	(111,28)

Sasaran 8 : Meningkatkan Sektor Koperasi dan UMKM

SASARAN		Target Kinerja Sasaran pada tahun					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Target (Realisasi)	Target (Realisasi)	Target (Realisasi)	Target	Target	Target
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	25% (25,64%)	27,4% (25,64%)	29,90% (25,64%)	32,5%	35%	37,6%
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	78% (80%)	80% (83%)	82% (83%)	84%	86%	88%

**Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra Tahun 2019	Realisasi Capaian tahun 2019	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ketersediaan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik	90	90	100
		Persentase Program Pemebangunan di Desa Memenuhi Target	85	85	100
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang terbina dan berfungsi	75	75	100
		Prosentase RKPDesa yang berkualitas.	40	40	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	0,5	0,5	100
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Persentase posyantek (pos pelayanan teknologi) yang berkualitas	3	3	100

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
----	---------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



	Strategis	Utama (IKU)	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)			
1.	Ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup	Ketersediaan energy (kkal/kap/hari) minimal 2.400 kkal/kap/hari	11.395,24 kkal/kap/hari	11.694,11 kkal/kap/hari	12.770,40 kkal/kap/hari	41.617,04 kkal/kap/hari	39.972,74 kkal/kap/hari
Ketersediaan protein (gram/kap/hari) minimal 63 gr/kap/hari		282,00 gr/kap/hari	286,93 gr/kap/hari	332,82 gr/kap/hari	414,99 gr/kap/hari	369,13 gr/kap/hari	
PPH ketersediaan		98,7	97,2	98,2	88,5	85,8	
Penguatan Cadangan Pangan		10 ton	0 ton	0 ton	14 ton	10 ton	
Penanganan Daerah Rawan Pangan		12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	
2.	Percepatan diversifikasi pangan	Peningkatan nilai/skor Pola Pangan Harapan konsumsi	83,7	85,4	83,9	86,2	93,8
3	Peningkatan Keamanan Pangan Masyarakat	% skor sampel pangan segar yang lulus di uji	0 sampel	3 sampel	3 sampel	5 sampel	3 sampel

Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan

SASARAN		Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian %
URAIAN	INDIKATOR			
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,65	3,06	119,28
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,43	0,45	95,56



	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,06	0,12	50,00
--	------------------------------------	------	------	-------

Realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2020, yaitu Persentase penduduk miskin (%) sebesar 3,06% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 3,65% telah tercapai 119,28%. Realisasi Sasaran Indikator II Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin) sebesar 0,45 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 0,43 dengan capaian 95,56%. Realisasi Sasaran Indikator III Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin) sebesar 0,12 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu 0,06 dengan capaian 50,0%.

Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			Target Akhir Jangka Menengah	Capaian sd. Tahun 2020
		Target	Realisasi	Capaian		
Menurunnya Pengangguran (RPJMD)	Tingkat Pengangguran Terbuka	50	50	100	3,80	100
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75	70	93	70	93
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	100	60	60	75	60
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	0	0	0	0	0

Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi



No	Program / Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Target s.d 2020 Renstra	Ket.
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	100 %	75 %	100 %	80 %	59,67%	Terca pai
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	2 website	2 website	2 website	2 website	1 website	Terca pai
2	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	1 jaringan	1 jaringan	3 jaringan	3 jaringan	3 jaringan	Terca pai
3	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	70 unit	70 unit	70 unit	70 unit	70 unit	Terca pai
4	Sosialisasi dan Bimtek IT/Website SOPD	50 orang	-	40 orang	-	-	-

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi tahun ini (2020)	Capaian tahun ini (2020)
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	75%	75%	75%	100%	100%	100%	80%	106.67%



2	Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	54.67	53.53	53.73	57.73	57.75	57.75	57.78	107.53 %
3	Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93.31	88.58	88.58	89.38	89.38	89.98	91.89	103.73 %
4	Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46.52	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	46.36	173.37%

Sasaran 19 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan

RENSTRA										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TA 2019		TA 2020		
				2017	2018	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	99,69	99,69	100	95,83	95,83
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		Persentase rumah layak huni (%)	97,5	97,62	97,56	99,55	98	58,70	59,90
		Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	0	-0,0044	-0,0041	102,50	-0,0065	-0,0065	100,00
		Meningkatnya kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka	33,30	25,00	14,60	87,60	17,50	-44,88	0,00
		Tertanganinya konflik pertanahan	Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan	0	100	100	100	100	100	100

**Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah**

NO	INDIKATOR	2019			2020			2021	2022	2023
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target
1	Nilai Investasi	150	2.075,06	1383,37%	170	1.294,39	761,41%	190	210	230
2	Persentase Pertumbuhan PMA/PM DN (%)	5	496,83	9936,60%	5	-37,62%	-7,52%	5	5	5

Sasaran 21 : Meningkatnya Keamanan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2023
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	22,22%	25%
2		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	14,28%	25%

Sasaran 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan➤ **Indikator Nilai SAKIP****1) Penyusunan Dokumen (Bagian Organisasi)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra						
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	16	SAKIP SKPD Kategori Baik	%	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target 2023
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	N/A	62.50 %	99

➤ **Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target 2023
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	88 %	74.42 %	100 %
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	76,5 %	72.61 %	

Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN➤ **Meningkatnya Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur.**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur.					
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	99 %	13,45%	13,45%	12,76%	12,76%

➤ **Meningkatnya tingkat efektivitas pengembangan karier aparatur.**

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	Assesment dan Syarat Jabatan
1	Pimpinan Tinggi Pratama	39	39
2	Administrator	168	168
3	Pengawas	624	465

**Sasaran 24 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat**

	INDIKATOR	2019			2020			2021	2022	2023
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	81	81,50	100,62%	81,50	84,15	103,25	82	82,5	83

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai**Sasaran 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan****➤ Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 5 – 6 Tahun Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Angka Partisipasi Pendidikan adalah suatu angka yang menggambarkan jumlah atau persentase anak didik yang mengikuti pendidikan pada semua jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Angka partisipasi murni (APM) merupakan persentase partisipasi bersekolah masyarakat usia yang berkaitan pada jenjang pendidikan tertentu. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk



menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak. Dan Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, emosi, dan spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku agama), bahasa, dan komunikasi, serta Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Seperti dijelaskan diatas Bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. Demikian halnya di Kabupaten Tapin.

Capaian perkembangan tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian
3	4	5	6
APM PAUD	76,69%	72,24%,	94,19%
Capaian Kinerja			94,19%

Apabila dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan anak usia didik (PAUD) sebesar 96,32% dengan realisasi hanya 72,24 dari target 76,69% capaian kinerja APM PAUD ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 yaitu 84,17% dari 75,00% yang ditargetkan. Pencapaian realisasi APM PAUD ini didapat dari formulasi Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu yang berusia 5-6 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya (5-6 tahun) dikali 100 % diperoleh



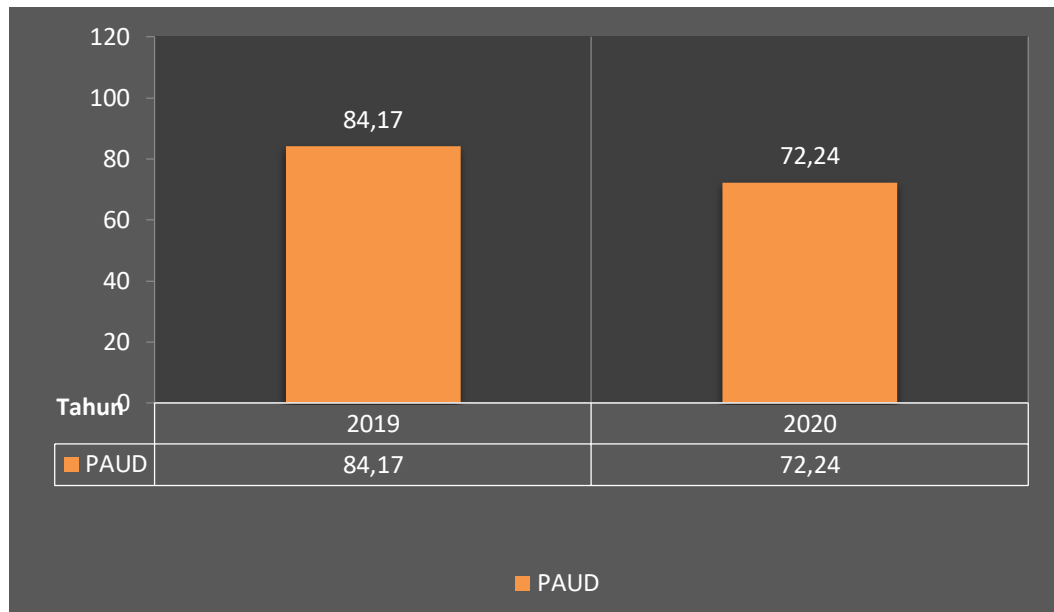
nilai realisasi indikator tahun 2020 sebesar 94,19%. Jika dilihat dari target yang ditetapkan maka angka tersebut di atas mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari jumlah siswa PAUD yang berusia 5-6 tahun ditahun 2020 sebanyak 4811 dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikabupaten Tapin yaitu 6659 (data dukcapil cut off juli 2020) dikali 100% sedangkan pada tahun 2019 jumlah siswa sebanyak 5572 di kali 100%. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di tahun ini di targetkan sebesar 76,69% dan dapat direalisasikan pula sesuai apa yang sudah ditargetkan walaupun ada perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya yaitu 84,17%, dimana tahun ini mengalami penurunan, hal tersebut tidak lepas dikarena Pandemi Covid-19 yang melanda dunia yang mana imbasnya juga berdampak di Negara kita, dimana peran serta orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD menurun dikarena mekanisme bersekolah jadi berubah, sehingga banyak orang tua yang menahan anak untuk sementara waktu tidak masuk pada jenjang PAUD.

Angka APM yang Menurun berimbas dari terdampaknya bangsa kita, khususnya Kabupaten Tapin akan pandemic Covid – 19 di tahun 2020 ini, dan juga ada beberapa dari orang tua murid / masyarakat yang memasukan anaknya ke jenjang SD yang mana usia mereka belum 6 tahun, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap APM PAUD, Selain itu juga dipengaruhi oleh factor keberadaan sekolah yaitu lokasi sekolah dan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD juga promosi, serta keberadaan orang tua yaitu factor ekonomi, persepsi orang tua terhadap PAUD, jarak rumah dengan lokasi PAUD dan minat memasukkan anak ke PAUD, sehingga di tahun 2020 ini bidang Bina PAUD bersama elemen – elemen pemangku pendidikan BUNDA PAUD , IGTKI dan HIMPAUDNI untuk memasyarakatkan / mensosialisasikan gerakan mendaftarkan anak ke PAUD.

Pencapaian target indikator kinerja APK PAUD sebesar 72,24% dilakukan melalui dukungan Program Pendidikan Anak Usia Dini,

dengan anggaran Rp **675.300.000,-** terealisasi sebesar Rp. **672.884.000,-** atau **99,64%** lebih kecil dari tahun 2019 dengan anggaran Rp.**1.039.049.000.00,-** dan realisasi anggaran Rp. **1.023.649.525.00** atau terserap sebesar 98,52 %.

Walaupun upaya dalam peningkatan APM dan mutu layanan PAUD telah banyak dilakukan namun masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi. Kecilnya anggaran yang tersedia merupakan salah satu hambatan yang terjadi yang menyebabkan keberlanjutan kegiatan menjadi lambat. Berikut perkembangan tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, yaitu :



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebagai berikut:

1. Belum seimbangnya jumlah anak usia dini dengan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini.
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas lembaga, siswa, guru sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini.

Strategi/Upaya pemecahan :

1. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak usia Dini melalui program satu desa satu PAUD.
2. Penyediaan Subsidi untuk peningkatan satuan pendidikan PAUD

➤ **Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD atau MI. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Kunci Bidang Pendidikan Tentang Angka Partisipasi sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi 2020	Capaian
3	4	5	6
APM SD/MI	92,06%	94,12%	102,23%
Capaian Kinerja			102,23%

Dari tabel tersebut diatas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan target 92,06% dan terealisasi 94,12% dengan capaian kinerja 102,23% , angka capaian ini didapat dari jumlah siswa dengan usia 7-12 tahun dikabupaten Tapin sebanyak 19924 yang terdiri dari siswa SD sebanyak 17.658, siswa Madrasah Ibtidayah (MI) sebanyak 2180, SLB dengan jumlah siswa 76 dan paket A sebanyak 10 dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikabupaten Tapin sebanyak 21168 orang dikali seratus. Dengan demikian APM SD/MI/Paket A mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 88,48.



APM	2018	2019	2020
SD/MI (%)	87,03	88,48	94,12

Dari tabel tersebut terlihat jelas perkembangan APM tahun 2018 capaian partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun pada tahun 2018 87,03% kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 88,48%. dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 94,12 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikkan angka partisipasi Murni (APM) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, membenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP). setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan BSNP . Proses penerimaan siswa baru juga dirombak dengan melakukan system online sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin.

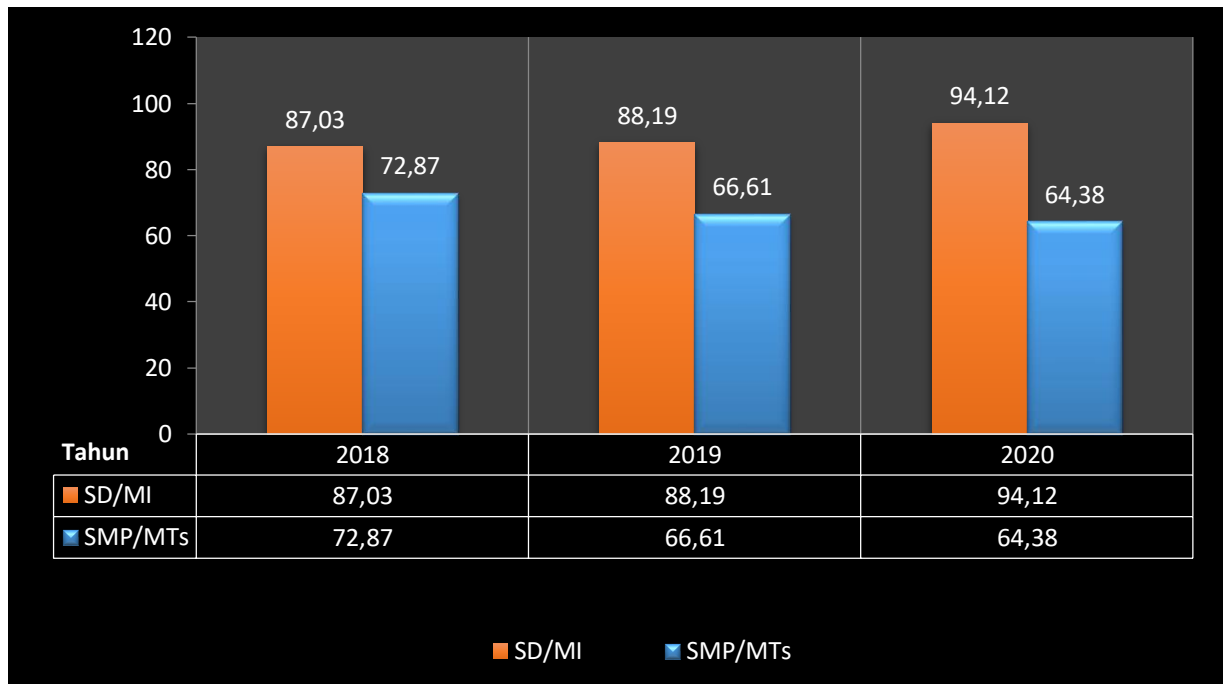
➤ **Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu

jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun atau seorang anak usia 12 tahun bersekolah di SMP atau MTs tidak akan masuk dalam perhitungan APM SMP/MTs, berikut tabel apaian perkembangan tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dikabupaten tapin tahun 2020.

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4
APM SMP/MTs	80,00%	64,38%	80,47%
Capaian Kinerja			80,47%

Dari tabel diatas hasil capaian ini dihitung dari jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya dikali 100. Pada tahun 2020 diperoleh angka sebesar 64,38% dibandingkan dengan target yaitu 80,00% atau capaian kinerja hanya 80,47%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah siswa yang berusia 13-15 tahun sebanyak 6213 untuk jenjang SMP 2837 dan MTs 3001 ditambah paket B 375 dibagi jumlah penduduk usia 13-15 sebanyak 9.650 dikali 100%.



Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan sekolah dasar atau yang dikenal dengan angka partisipasi minimum (APM) mengalami tren kenaikan atau peningkatan dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, sedangkan partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan sekolah menengah pertama mengalami penurunan dipengaruhi beberapa faktor -faktor: yaitu :1) keadaan geografis, jarak dengan sekolah, 2) tidak adanya akses kendaraan umum ke sekolah, 3) orangtua tidak sanggup membiayai, tingkat pendidikan orangtua , 4) dorongan orangtua, 5) rendahnya motivasi belajar anak. Kebijakan yang dilakukan untuk Pencapaian partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama ini yaitu kegiatan pembangunan gedung sekolah, kegiatan penyelenggaraan paket B setara SMP, kegiatan penyediaan beasiswa siswa berprestasi/kurang mampu, kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, dan kegiatan penambahan ruang kelas sekolah.

➤ **Persentase Pendidik yang bersertifikat**

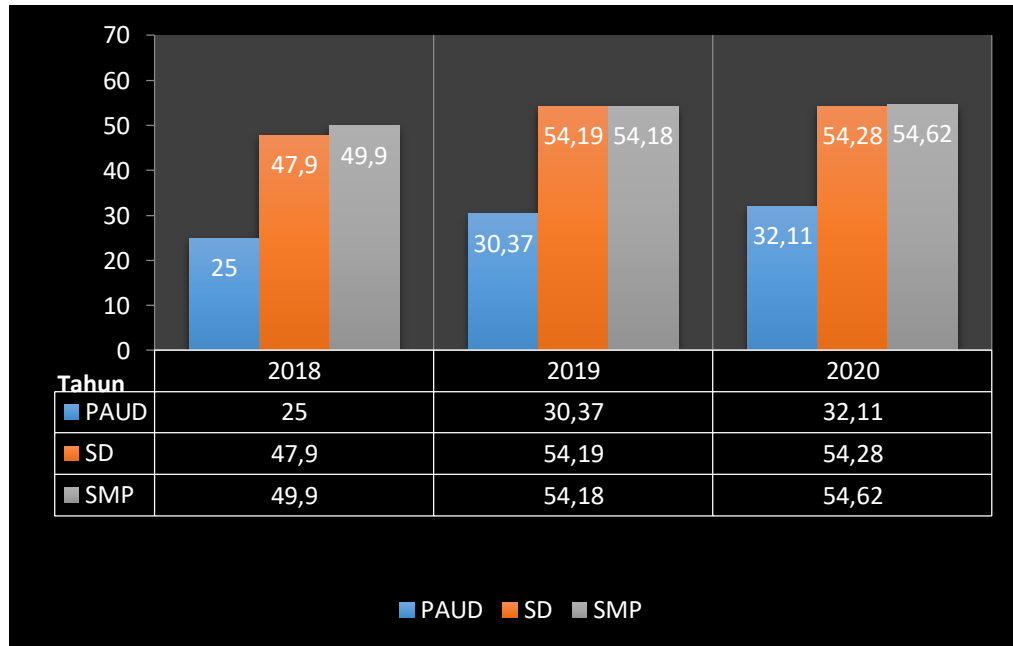
Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan



kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Demikian halnya di Kabupaten Tapin keadaan guru bersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian kinerja 2020
Persentase Guru professional (Bersertifikasi)	59,01%	50,06%	84,83%
Capaian Kinerja			84,83%

Dari tabel di atas menunjukkan , Guru/ tenaga pendidik yang professional atau bersertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Tapin pada tahun 2020 mencapai 50,06 % dari target 59,01% atau dengan capaian kinerja sebesar 84,83%. Angka ini didapat dari guru PAUD yang bersertifikasi sebanyak 149 orang dari jumlah guru sebanyak 464 0rang dan jumlah guru sekolah dasar bersertifikasi sebanyak 861 orang dari jumlah guru SD sebanyak 1.586 orang serta guru SMP yang bersertifikasi sebanyak 195 dari total jumlah guru SMP 357 orang. Angka capaian pada tahun 2020 ini lebih tinggi dari tahun 2019 mencapai 48,63% dari target sebesar 57,77% dengan capaian kinerja sebesar 88,18%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah guru PAUD sebanyak 398, guru SD sebanyak 1480 dan guru SMP sebanyak 188 orang yang mempunyai sertifikat pendidik professional di bagi total jumlah guru PAUD, SD/dan SMP sebanyak 2225 orang, berikut grafik perkembangan guru bersertifikasi dikabupaten Tapin.



Dari grafik diatas terlihat bahwa adanya kenaikan persentase guru yang bersertifikasi baik guru pada jenjang PAUD, SD dan SMP, untuk guru PAUD dengan capaian 32,11% dari 30,37% pada tahun 2019. Sedangkan pada guru bersertifikasi pada jenjang SD yaitu dengan capaian 47,9% pada tahun 2018 meningkat menjadi 54,19% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan menjadi 54,28 serta persentase guru bersertifikasi pada jenjang SMP ditahun 2018 sebesar 49,9% menjadi 54,19% dan pada tahun 2020 menjadi 54,62%. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase guru bersertifikasi pada tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini mengalami peningkatan, peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkat jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru baik melalui beasiswa dari pemerintah daerah kabupaten tapin dan pemerintah pusat maupun PPG melalui biaya mandiri.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran 1: "Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi Balita" dimana 1 indikator dengan capaian: kategori baik,



1 indikator dengan capaian: kategori baik, dan 1 indikator dengan capaian: kategori cukup dengan analisis sebagai berikut:

- a) Indikator: Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.
- b) Indikator: Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- c) Indikator: Persentasi Balita dengan Status Gizi Baik Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak.
Masa balita merupakan masa yang menentukan dalam tumbuh kembangnya yang akan menjadikan dasar terbentuknya manusia seutuhnya. Karena itu pemerintah memandang perlu untuk memberikan suatu bentuk pelayanan yang menunjang tumbuh kembang balita secara menyeluruh terutama dalam aspek mental dan sosial.

Sasaran 2: “Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” dimana 1 indikator dengan capaian: kategori sangat baik,



1 indikator dengan capaian: Kurang, dan 1 indikator dengan capaian: kategori Baik, dengan analisis sebagai berikut:

- a) Indikator: persentase puskesmas yang terakreditasi yaitu terakreditasinya puskesmas di kabupaten Tapin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas baik sarana maupun prasaran di puskesmas dengan terakreditasinya semua puskesmas di kabupaten Tapin. Target di tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (kategori sangat baik),
- b) Indikator: Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk merupakan rasio perbandingan jumlah tenaga medis di kabupaten Tapin dengan jumlah penduduk di kabupaten Tapin. Adapun target pencapaian rasio perbandingan tenaga medis dengan jumlah penduduk tahun 2020 adalah 41/100.000 penduduk dengan rasio realisasi 22/100.000 (sebanyak 29 tenaga medis) sehingga capaian kinerja sebesar 50 % (kategori kurang),
- c) Indikator: Rasio tenaga paramedis dengan jumlah penduduk dalam hal ini meliputi bidan dan perawat di kabupaten Tapin. Adapun target rasio pada tahun 2020 adalah 246/100.000 untuk bidan dan 345/100.000 untuk perawat, sedangkan realisasi pada tahun 2020 adalah 246/100.000 (sebanyak 244 bidan) untuk bidan dan 345/100.000 (sebanyak 171 perawat) untuk perawat. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 99,19 % dan 50,58 % (kategori kurang),

Sasaran 3: “Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap kesehatan” dimana 1 (satu) indikator dengan capaian: kategori cukup dengan analisis sebagai berikut:

- a) Indikator: Persentase Rumah Tangga Ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya

sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Sasaran 4: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Baik” dimana 1 indikator dengan capaian: kategori sangat baik dan 1 indikator dengan capaian di luar kategori yang tersedia dengan analisis sebagai berikut:

- a) Indikator: Persentase Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan hasil perbandingan jumlah desa yang melaksanakan STBM dengan jumlah seluruh desa/kelurahan di kabupaten Tapin. Desa yang tergolong sebagai desa yang melaksanakan STBM adalah desa yang telah melakukan perubahan perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.

Adapun target desa yang melaksanakan STBM pada tahun 2020 adalah 100% dengan realisasi sebesar 70 % yang artinya capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 70 % dimana hasil capaian persentase desa/kelurahan siaga aktif

- b) Indikator: Persentasi Desa/ Kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/ kelurahan dimana > 90% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan) meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Ibu hamil dan WUS meliputi: 2 dosis TT, anak sekolah tingkat dasar meliputi: 1 dosis DT, 1 dosis campak dan dan 2 dosis TT. Hasil pencapaian cakupan desa/ kelurahan UCI di Kabupaten Tapin pada tahun 2020 sebesar 93,5 % target yang telah



ditetapkan dalam Renstra sehingga capaian kerjanya sebesar 56,62 % (kategori kurang),

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

➤ Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Sasaran menjaga stabilitas harga bahan pokok ini didukung oleh satu program yang dijalankan oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu Program Perumusan Kebijakan Perekonomian yang mempunyai hasil program yaitu Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang direkomendasikan. Program ini mendukung indikator sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yaitu persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti.

Indikator persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 berhasil mencapai 100%, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu 90%. Capaian tahun 2020 juga lebih tinggi dari capaian di tahun 2019 yaitu 85%. Keberhasilan dari pencapaian program ini dikarenakan terjalannya dengan baiknya kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup Program Perumusan Kebijakan Perekonomian yaitu:

- Pengendalian Inflasi Daerah
- Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah
- Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan
- Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi

Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi fokus utama dalam Program Perumusan Kebijakan Perekonomian yang menghasilkan indikator kegiatan yaitu Persentase meningkatnya peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diukur



menggunakan formulasi berapa kebijakan bidang inflasi yang ditindak lanjuti dalam satu tahun. Terlebih lagi saat pandemi Covid-19 sempat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga perlu kebijakan perekonomian dalam mengatasinya. Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID Kabupaten Tapin setiap triwulan melaksanakan koordinasi terkait dengan pengendalian inflasi di Daerah. Prioritas program TPID Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 adalah distribusi dan perluasan akses pasar dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di masyarakat. Wujud nyata TPID Kabupaten Tapin dalam pengendalian harga adalah membentuk wadah untuk menyalurkan komoditas pangan atau bahan pokok. Wadah tersebut dinamakan Warung TPID dan dilaksanakan Pasar TPID di setiap triwulan. Komoditas yang diperdagangkan adalah bahan pokok yang rentan mengalami kenaikan harga seperti telur, beras, gula pasir, bawang putih dan minyak goreng. Keberhasilan dari kegiatan inilah yang menjadikan penunjang dalam meningkatkan capaian sasaran kinerja meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan adanya warung TPID yang menjadi wadah untuk menyalurkan komoditas pangan dan bahan pokok dengan harga terjangkau. Keberhasilan lainnya dari kegiatan ini adalah adanya koordinasi kontribusi komoditas dari SKPD terkait dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tapin untuk kontribusi telur, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin untuk melihat kualitas dari komoditas pangan yang diperjual belikan dan komoditi lain seperti beras, gula pasir, bawang putih, dan minyak goreng yang merupakan kontribusi dari Bulog Cabang Barabai.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk mencapai target yang telah ditentukan masih terdapat beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang



tersedia dikarenakan Sekretariat Daerah menempati kantor sementara dengan fasilitas kurang memadai dan terbatasnya sumber daya manusia khususnya untuk Sub Administrasi Pembangunan dikarenakan tidak adanya pegawai yang menjabat Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan. Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut sangat diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	100%	27,43 %	72,56
Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)		117,65%	27,43 % %	72,56	
Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)		125%	27,43 % %	72,56	

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Penggunaan Sumber Daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/kegiatan terdiri atas dua yaitu Efisiensi Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia.



Persentase efisiensi Sumber Daya Biaya dapat dihitung dengan rumus: $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada Tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.1.944.345.600,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 2.318.238.933,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1.19 %. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa Narasumber sebagai pemateri dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga konselor dalam pendampingan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor dalam Pembangunan khususnya dalam keterlibatan acara musrenbang Kabupaten, Peran Tim Teknis ARG dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta Meningkatkan Kelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan..

Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis

Berdasarkan data realisasi keuangan tahun kegiatan (penunjang angka PDRB) (2019) , total realisasi Input yang digunakan adalah 90,80% dari pagu anggaran 2019, adapun capaian indikator outcome persentase peningkatan PDRB adalah mencapai 280,94% sehingga terdapat efisiensi yang sangat baik.

**Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor Pariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2020 terdiri dari 11 program, 34 kegiatan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 4.570.460.246,- dan realisasi anggaran sebanyak Rp 4.042.951.114,- dengan capaian anggaran 88,46%. Capaian realisasi anggaran belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena :

Selama tahun 2020 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

- a. Adanya pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal Pebruari 2020 dan adanya pembatasan kegiatan sejak awal Maret 2020 membuat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara yang mencakup diantaranya Pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan.
- b. Akibat pandemic covid-19 juga dilakukan refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang dipangkas anggarannya bahkan ada kegiatan yang anggarannya di nol (Rp 0) kan yaitu Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata.
- c. Pada saat pandemic covid-19 pemasaran pariwisata difokuskan hanya pada media social karena untuk pemasaran secara langsung melalui event atau pameran tidak bisa dilaksanakan.

Sasaran 8 : Meningkatnya Sektor koperasi dan UMKM

Sasaran meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UMKM dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat degan Capaian Sasaran di atas 85% dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Kegiatan dari sasaran strategis ini adalah Pemeringkatan Koperasi dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru, pada



tahun 2020 Koperasi yang dievaluasi ada 3 Koperasi dari target 3 Koperasi Tahun 2020. Capaian dari sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan karena Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru mengalami penghapusan (Refocusing),

Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (tujuh) indikator sasaran yang harus dicapai. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin rata-rata sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori Berhasil.

Analisis atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020 tersaji sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra Tahun 2019	Realisasi Capaian tahun 2019	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ketersediaan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik	90	90	100
		Persentase Program Pemebangunan di Desa Memenuhi Target	85	85	100
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang terbina dan berfungsi	75	75	100
		Prosentase RKPDesa yang berkualitas.	40	40	100



	Pembangunan Desa				
3	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	0,5	0,5	100
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Persentase posyantek (pos pelayanan teknologi) yang berkualitas	3	3	100

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.891.132.198 dan realisasinya sebesar Rp 1.528.319.599, diperoleh hasil Rp 1.191.849.411 atau jika diukur dalam satuan persen adalah 119 %, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 119 %. Sementara tingkat efektivitasnya adalah 80,82 % (baik).

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan yang bersumber dari APBN (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 343.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 327.309.559 atau jika diukur dalam satuan persen adalah 104 %, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 104 %. Sementara tingkat efektivitasnya adalah 85 % (baik).

Selama tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);



- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.

**Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan**

No	Program	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,05%	88,26%	160,33%	Rp. 598.919.400,-	Rp. 536.936.000,-	89,65%
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	2,27 %	2,92 %	129,07 %	Rp. 462.490.000,-	Rp. 461.428.000,-	99,77%
3	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35,05 %	29,09 %	83,00 %	Rp. 79.730.000,-	Rp. 77.620.000,-	97,35%



No	Program	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,02 %	2,62%	86,75%	Rp. 63.455.000,-	Rp. 11.405.000,-	17,97%
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Partisipasi PSKS (TKSK Orsos Penyuluh Sosial PSM KT)	56,15%	52,31%	93,16%	Rp. 378.413.000,-	Rp. 351.170.000,-	92,80%
6	Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Panti Asuhan yang diberdayakan untuk memberikan layanan dengan baik	100%	100%	100%	Rp. 4.262.000,-	Rp. 4.242.000,-	99,53%
7	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	10,05%	4,13%	41,09%	Rp. 322.570.000,-	Rp. 241.953.000,-	75,01%
Rata-rata capaian					93,78%			81,73%



Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 yang tersaji dalam DPA Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 dari pagu anggaran **Rp. 351.775.510.678,00** telah direalisasi sebesar **Rp. 234.494.807.867,00** atau **69,22 %** penyerapannya dengan rincian dalam sasaran strategis sebagai berikut:



No	SASARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	89.333.000.000,00	83.949.579.000,00	93,97

Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Jaringan Air Bersih.

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 yang tersaji dalam DPA Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 dari pagu anggaran **Rp. 351.775.510.678,00** telah direalisasi sebesar **Rp. 234.494.807.867,00** atau **69,22 %** penyerapannya dengan rincian dalam sasaran strategis sebagai berikut:

No	SASARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
4	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	18.608.684.500,00	17.445.342.800,00	93,75

Sasaran 15 : Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 yang tersaji dalam DPA Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 dari pagu anggaran **Rp. 351.775.510.678,00** telah direalisasi sebesar **Rp. 234.494.807.867,00** atau **69,22 %** penyerapannya dengan rincian dalam sasaran strategis sebagai berikut:



No	SASARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	24.875.009.000,00	23.758.573.794,00	95,51

Sasaran 16 : Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 yang tersaji dalam DPA Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 dari pagu anggaran **Rp. 351.775.510.678,00** telah direalisasi sebesar **Rp. 234.494.807.867,00** atau **69,22 %** penyerapannya dengan rincian dalam sasaran strategis sebagai berikut:

No	SASARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparaturnya sesuai standar	137.751.272.500,00	74.848.394.662,00	54,33

Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi

Perbandingan Target, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government Tahun 2020.

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	1.142.910.000	1.052.570.052	90.339.948	92,10	7,90
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	298.700.000	273.421.500	25.278.500	91,54	8,46
2	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan	26.400.000	14.604.971	11.795.029	55,32	44,68



	Internet Publik (WIFI)					
3	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	817.810.000	764.543.581	53.266.419	93,49	6,51
4	Pembinaan dan Bimtek Website SOPD	-	-	-	-	-

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci dapat diuraikan menurut sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.73	57.78	107.53%
		Indeks Kualitas Udara	88.58	91.89	103.37%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	26.74	46.36	173.37%
Rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup					128.21 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar **128.21%** yang termasuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** berdasarkan skala nilai peringkat kinerja. Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 12.258.316.651,- dari Rp. 13.995.689.903,- atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar **87,59%**. dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.737.373.252,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup

dapat dikatakan **efisien** karena untuk pencapaian kinerja dengan kategori **“sangat tinggi”** tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **12.4%**.

Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan

Pencapaian sasaran pertama “Berkurangnya Kawasan Kumuh” dengan indikator Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh (%) adalah 0,0065 atau sebesar 100,00% dari target IKU dengan rumus perhitungan :

LK1 seluas 14,17 ha didapat dari hasil penanganan pada TA 2020 yaitu Luas kawasan kumuh sebelum penanganan dikurangi luas wilayah penanganan tahun ini yang direalisasikan melalui Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh, dengan Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Memenuhi Keempat Indikator Kelayakan Rumah (DAK).

Output kegiatan ini adalah peningkatan kualitas RTLH di kawasan kumuh dengan target 64 unit di dalam 1 Kecamatan Tapin Utara dan terbagi dari 4 Kelurahan.

Dalam hal realisasi kinerja di tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan di tempat umum dan refocusing anggaran. Perbandingan realisasi dan capaian pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target SPM adalah sebagai berikut:

- Realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota layak huni dan terjangkau (Jenis Pelayanan dasar ini direalisasikan melalui sumber dana APBD) , Realisasi sebanyak 2 (dua) unit yaitu pada penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana puting beliung di desa Rawana Hulu RT.05 RW.02 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

- Realisasi Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Jenis Pelayanan dasar ini direalisasikan melalui Dana Insentif Daerah (DID)) Penerapan SPM ini ditargetkan dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2020 dan 2021, di tahun 2020 telah direalisasikan 134 unit sesuai dengan target capaian di tahun 2020 134 unit, sehingga realisasi di tahun 2020 adalah 100%, sedangkan sisa unit yang menjadi target relokasi adalah sebesar 72 unit sesuai dengan target di tahun 2021.
- Secara target keseluruhan sampai dengan 2021 yaitu sebesar 206 unit, pada tahun 2020 telah terealisasi 65,05 % (134 unit) sehingga target tahun yang akan datang diharapkan tercapai sebanyak 72 unit agar realisasi penerapan SPM dapat maksimal.

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (sasaran Strategis) Ess II atau kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2020 sebesar 66,67% dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh (100,00%) Prosentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau (0,0%) dan Prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan (100,00%). Capaian yang rendah disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan di tempat umum, sehingga sasaran strategis kedua yaitu peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka Hijau tidak tercapai.

Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2020 dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2020 ada yang tercapai namun ada juga yang belum tercapai. Realisasi nilai investasi pada tahun 2019 meningkat cukup tinggi dari tahun 2018. Realisasi investasi Kabupaten Tapin tahun 2019 sebesar Rp1.294,36 Milyar dengan persentase pertumbuhan investasi sebesar -7,52%.



Hasil ini menunjukkan bahwa target nilai realisasi investasi di Kabupaten Tapin telah tercapai, namun pertumbuhan investasi di Kabupten Tapin pada tahun 2020 mengalami penurunan walaupun secara umum dari tahun ke tahun pertumbuhan investasi mengalami kenaikan. Adapun beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 yaitu kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini, menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara Nasional maupun Internasional menjadi lambat, sehingga para pelaku usaha enggan untuk mempeluas usahanya ataupun menanamkan modal. Faktor risiko kegagalan investasi yang tinggi ditengah pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu lemahnya pertumbuhan investasi. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa penurunan realisasi investasi PMA sangat menurun di tahun 2020, sehingga pada Tahun 2020 PMA kurang menunjang dalam realisasi investasi. Investasi dalam negeri atau PMDN menjadi penopang selama pandemi Covid-19.

PMA/PMDN	2019	2020
PMA	101.301.000.000	42.758.364.806
PMDN	1.973.758.300.000	1.251.629.768.738

Kurangnya promosi kepada investor dalam negeri maupun luar negeri terhadap potensi yang ada di Kabupaten Tapin, kajian potensi investasi masih belum memadai, yang kondisi infrastruktur jalan yang masih kurang memadai sehingga mengurangi daya tarik investor. Kurangnya kesadaran pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kabupaten Tapin masih sedikit yaitu 13 perusahaan. Sosialisasi terhadap pelaku usaha juga mengalami kendala di tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Adapun alternatif solusi untuk mengatasi



permasalahan tersebut yaitu perlu telah dilakukan upaya dalam mengimbuu perusahaan untuk menyampaikan LKM melalui surat pemberitahuan yang dikirim ke para pelaku usaha setiap triwulan. Bagi perusahaan yang ini berkonsultasi terkait pengisian LKPM juga dapat menghubungi Bidang yang bertanggungjawab baik via email, telepon maupun

Sasaran 21 : Meningkatkan Keamanan Daerah

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk menunjang Sasaran kinerja tersebut di atas adalah sebagaimana yang terurai dalam tabel berikut ini (Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Kinerja Tahun 2020) :

No .	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan	2.026.538.032	1.990.255.675	98,21
2.		Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada	91.300.000	91.014.800	99,69
3.		Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	100.600.000	100.089.500	99,49

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, berusaha untuk memaksimalkan kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada se-efektif mungkin demi tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja.

Terlebih tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan



Kebakaran Kabupaten Tapin yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik dari pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun penanggulangan kebakaran, sehingga memerlukan sumber daya yang optimal untuk menunjang setiap kegiatan.

Pada sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, indikator kinerja di pegang oleh 3 bidang dengan 3 program kegiatan penunjang untuk pencapaian target realisasi.

Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan realisasi capaian Rp 1.990.255.675,- atau 98,21% , program ini berisi kegiatan penunjang berupa pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan kedinasan, pengawalan pejabat penting serta pengamanan aset penting sesuai arahan kepala daerah.

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada realisasi sebesar Rp 91.014.800,- atau 99,69% dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi perda dan perkada, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, serta operasi pekat.

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan realisasi Rp 100.089.500,- atau 99,49%, kegiatan lebih mengacu pada pengembangan kapasitas anggota dalam rangka membekali anggota dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Namun pada tahun selanjutnya, bidang ini akan mulai lebih aktif berkerjasama dengan kecamatan dalam peningkatan kapasitas anggota linmas dalam melaksanakan K3.

Sedangkan untuk sasaran penanggulangan kebakaran, realisasi sebesar Rp 377.690.625,- atau 99,60 % dengan beberapa kegiatan yang menunjang indikator kinerja persentase penanganan aduan kebakaran yang ditindaklanjuti, yaitu posko siaga bencana kebakaran, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pelatihan aparat damkar dan beberapa tambahan kegiatan lainnya.

Sasaran 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

➤ Indikator Nilai SAKIP

1) Perencanaan (Bappelitbang)

Pada capaian IKU satu (1) ini menunjukkan bahwa sasaran strategis Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian indikator serta target kinerja tujuan dan misi kepala daerah capaian sebesar 100%

Jumlah sasaran strategis PD yang menunjang pencapaian indikator serta target kinerja tujuan dan misi Kepala Daerah ada 23 sasaran strategis dibagi dengan jumlah sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan berjumlah 23 Sasaran Strategis dikalikan dengan 100 persen sehingga berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 100 persen. Indikator Persentase keselarasan sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah setiap tahun selalu menghasilkan capaian realisasi sebesar 100 %, kecuali ada perubahan pada dokumen RPJMD yang diikuti perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Kemudian pada IKU dua (2) realisasi capaian IKU 100% karena menunjukkan bahwa program prioritas Kepala Daerah sudah pasti tercantum dalam dokumen RPJMD

Jumlah program prioritas Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 105 program prioritas dibagi dengan 105 program KDH dikali dengan 100 persen, sehingga menghasilkan angka 100 persen

IKU tiga (3) menunjukkan capaian keberhasilan yakni tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun berkenaan

Sebanyak 6 tujuan dan 23 sasaran strategis yang dicapai pada tahun yang berkenaan dibagi dengan 6 tujuan dan 23 sasaran strategis tahun berkenaan dikali 100 persen, sehingga menghasilkan angka 100 persen.

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD selalu menjadi acuan dalam penyusunan



Renja Perangkat Daerah, sehingga setiap tahun ketika verifikasi Renja perangkat daerah dipastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selalu termuat dalam dokumen Renja PD

Penyusunan Dokumen (Bagian Organisasi)

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020

Indikator yang memenuhi target sebanyak 14 indikator atau 77,8 % sedangkan indikator yang belum memenuhi target sebanyak 4 indikator atau sebesar 22.2%. Hal ini menunjukkan sebagian besar atau 77.8% pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 dikategori baik.

Indikator kinerja dari SAKIP adalah tersusunnya dokumen LKIP Kab. Tapin Tahun 2020 dan Dokumen PK Bupati Tapin Tahun 2020. Realisasi dari kegiatan ini telah memenuhi target sebesar 100% dengan tersedianya 2 dokumen yaitu dokumen LKIP tahun 2020 dan PK tahun 2020

2) Evaluasi (Inspektorat)

Pencapaian indikator meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar 0 % dari target 100% sehingga persentase capaian meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar 0% dikarenakan pemantauan tindak lanjut sakip belum dapat terlaksana.

➤ Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

- a) Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti



Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020 realisasi sebesar 88 % dari target sebesar 85% dengan capaian kinerja 103 %.

- b) Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020 realisasi sebesar 76,5 % dari target sebesar 70 % dengan capaian kinerja 109,2 %.

➤ **Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BKAD Kabupaten Tapin telah berupaya efisien dalam menggunakan pendanaan, hal ini dapat dilihat penganggaran untuk tahun 2020 sebanyak Rp.1.258.140.000 Realisasi serapan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.1.222.128.800,00 atau sebesar 97,14% ini berarti sudah melakukan efisiensi dengan capaian kinerja 100%..

Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN

Untuk penggunaan sumber daya, BKPSDM Tapin menggunakannya seefisien mungkin, terutama untuk sumber daya manusia. Sehingga setiap Aparatur yang ada pada BKPSDM bekerja sesuai tupoksinya & memiliki beban kerja yang cukup banyak.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah dialokasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.3.718.439.763,- dan

telah direalisasikan sebesar Rp.2.748.347.527,- atau 73,91%. apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 75,41% menunjukkan adanya Kurang penggunaan anggaran dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang membuat pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Terjadinya Pandemi Covid – 19, memberikan dampak yang luar biasa terhadap seluruh perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan penganggarnya. Kegiatan – kegiatan seperti diklat Kepemimpinan, diklat Prajabatan, sampai kegiatan – kegiatan yang sifatnya sosialisasi, sama sekali tidak dapat di realisasikan, sehubungan dengan larangan atas terjadinya kerumunan orang banyak yang berdampak pembatalan pelaksanaan oleh penyelenggara seperti LAN RI dan Bandiklat Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari hal tersebut diatas, memberikan dampak pula terhadap seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Tapin, yang tidak bisa melaksanakan kegiatan – kegiatan diklat maupun sosialisasi, yang akhirnya berakibat rendahnya pencapaian target kinerja SKPD, dalam hal ini adalah SKPD BKPSDM Kabupaten Tapin. Yang selanjutnya dapat diartikan, serapan anggaran rendah (efisien), akan tetapi target capaian kegiatan juga rendah.

Dari 4 (empat) sasaran kinerja yang telah dicanangkan sejak awal penyusunan rencana strategis (Renstra) dibuat, ada 1 (satu) sasaran strategis yang capaian kinerjanya hanya sebesar 13,59% (kurang berhasil) dari target sebesar 99%.

Tidak maksimalnya pencapaian target sasaran kinerja tersebut, dikarenakan terjadinya pandemi Covid – 19 yang akhirnya pihak penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan membatalkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatannya.

Kedepannya, BKPSDM Kabupaten Tapin akan berupaya lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi – Instansi vertikal diatas, guna dapat memaksimalkan realisasi kegiatan- kegiatan yang telah di



alokasikan pendanaannya. Dikarenakan, banyak kegiatan – kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Tapin yang sifatnya harus menyesuaikan dengan Instansi Vertikal diatas tersebut. Dalam hal ini seperti LAN RI, BPSDMD Provinsi Kalsel, BKN Kanreg VIII serta BKD Provinsi Kalsel.

Sasaran 24 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dapat dilihat bahwa capaian kerjanya lebih dari 100% atau besarnya persentase capaian “Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan” dibandingkan dengan target kinerja sebesar 103,25% dengan realisasi anggaran pada program kegiatan yang mendukung capaian sebesar 36,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa antara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja efisien. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target maka DPMPTSP Kabupaten Tapin efisien dalam penggunaan sumber daya.

NO.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KINERJA (%)
	Program peningkatan pelayanan terpadu satu pintu	36,98	103,25

Meskipun dalam realisasi keuangan dan kinerja telah efisien, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai khususnya yang mendukung dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Saran dan prasarana yang tersedia pada ruang pelayanan masih sangat minim. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan fasilitas untuk pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga meningkat.



F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2019, Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah Rp. 235.537.550.286,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa Kemudian Belanja Modal Rp. 6.681.570.730, . Alokasi belanja belanja operasi Rp. 224.331,227,100,- belanja langsung sebesar Rp. 14,779,623,500,-

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. **1.137.463.198,-** terealisasi sebesar Rp. **1.036.582.981,-** atau **91,13%**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. **217.038.000,-** terealisasi sebesar Rp. **208.714.284,-** atau **96,16%**
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp **15.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **15.000.000,-** atau **100%**
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah anggaran Rp. **675.300.000,-** terealisasi sebesar Rp. **672.884.000,-** atau **99,64%**
5. Program Pendidikan Non Formal dengan jumlah anggaran Rp. **891.367.900,-** terealisasi sebesar Rp. **869.625.275,-** atau **97,56%**
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah anggaran Rp. **134.690.000,-** terealisasi sebesar Rp. **109.940.000,-** atau **81,62%**



7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan jumlah anggaran Rp. **2.717.450.300,-** terealisasi sebesar Rp. **2.697.481.000,-** atau **99,27%**
8. Program Pembinaan Sekolah Dasar dengan jumlah anggaran Rp. **13.344.789.700,-** terealisasi sebesar Rp. **13.275.485.264,-** atau **99,48%**
9. Program Pembina/an Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah anggaran Rp. **9.138.203.000,-** terealisasi sebesar Rp. **8.810.324.063,-** atau **96,41%**

Dengan menganalisa daftar perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2020 maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar **Rp. 22.126.421.900** terealisasi **Rp. 21.839.937.629,52,-** terealisasi **(98,71%)** dengan 9 program dan 63 kegiatan, dengan serapan dana sebesar Rp 21.839.937.629,52,- sehingga masih ada dana yang belum terserap Rp 289.484.271,- atau sebesar 1,29%, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan juga efisiensi dana serta waktu pelaksanaan kegiatan, dari yang seharusnya 100%, dan juga pengaruh dari refocussing akibat dari pandemi covid-19 di Indonesia.

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja untuk Dinas Kesehatan adalah Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.537.964.440,00 atau 83,16% dari anggaran Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp 89.630.901.508,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
--------	----------	-----------	---	-----------



	(Rp) 2020	(Rp) 2020		(Rp) 2019
Belanja Pegawai	45.624.757.57 6,00	41.105.214.67 8,00	90,0 9	38.102.505.4 43,00
Belanja Barang dan Jasa	44.006.143.93 2,00	33.432.749.76 2,00	75,9 7	29.651.804.8 79,00
Jumlah Belanja	89.630.901.50 8	74.537.964.44 0	83,1 6	67.754.310.3 22,00

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2020	%
1. Belanja Pegawai	45.624.757.576	41.105.214.678	90,09
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	26.055.275.246	24.392.925.835	93,62
Belanja Tunjangan Keluarga	2.078.824.305	1.782.406.994	85,74
Belanja Tunjangan Jabatan	416.150.000	345.055.000	82,92
Belanja Tunjangan Fungsional	2.808.120.000	2.174.183.650	77,42
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	219.400.000	155.514.750	70,88
Belanja Tunjangan Beras	1.475.738.550	1.089.341.640	73,82
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.863.435	35.368.487	77,12
Belanja Pembulatan Gaji	2.636.040	347.593	13,19
Belanja Jasa Medis	800.000.000	296.364.729	37,05
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.722.750.000	10.833.706.000	92,42

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2020	%
2. Belanja Barang dan Jasa :	43.306.143.932	33.432.749.762	77,20
Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.703.463	941.187.981	83,61
Belanja Bahan/Material	7.816.305.536	7.682.291.916	98,29
Belanja Jasa Kantor	18.821.684.956	15.369.306.285	81,66
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.900.000	101.617.971	67,34
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.134.056	1.142.519.600	85,51
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	168.700.000	43.000.000	25,49
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000	-	-
Belanja Makanan dan Minuman	4.572.240.000	2.550.652.552	55,79
Belanja Pakaian Kerja	142.205.000	126.833.000	89,19



Belanja Perjalanan Dinas	6.715.120.821	3.742.560.457	55,73
Belanja Pemeliharaan	5.260.100	-	-
Belanja Honorarium PNS	57.490.000	43.380.000	75,46
Belanja Honorarium Non PNS	1.818.800.000	1.465.900.000	80,60
Belanja Jasa PNS	501.600.000	201.100.000	40,09
Belanja Jasa Non PNS	64.000.000	22.400.000	35,00

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2020	%
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.934.743.651	3.365.364.016	85,53
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.205.000.000	1.116.335.000	92,64
Pengadaan Alat Ukur	106.500.234	36.425.514	34,20
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.163.000	3.163.000	100
Pengadaan Alat Kantor	29.000.000	28.060.909	96,76
Pengadaan Alat Rumah Tangga	346.963.328	278.602.770	80,30
Pengadaan Komputer	373.850.579	347.871.160	93,05
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.500.000	979.000	21,76
Pengadaan Alat Studio	213.600.000	175.854.200	82,33
Pengadaan Alat Kedokteran	865.346.510	688.455.784	79,56
Pengadaan Alat Kesehatan	774.820.000	677.616.679	87,45
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000	12.000.000	100

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indikator persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 berhasil mencapai 100%, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu 90%. Capaian tahun 2020 juga lebih tinggi dari capaian di tahun 2019 yaitu 85%. Keberhasilan dari pencapaian program ini dikarenakan terjalannya dengan baiknya kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup Program Perumusan Kebijakan Perekonomian yaitu:

- Pengendalian Inflasi Daerah
- Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah



- Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan
- Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan

Nomor	Program	Kegiatan
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) - Sosialisasi pembauran kebangsaan - Sarasehan/diskusi/dialog interaktif ttg peningkatan kesadaran bela negara
2.	Pemeliharaan Kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> - Tim pengawasan dini pemerintah daerah di Kabupaten Tapin - Penanganan konflik sosial - Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di Kabupaten Tapin
3.	Peningkatan Dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan diseminasi perundang-undangan ormas - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) - Saresehan dan dialog tokoh agama dan ormas keagamaan - Sistem Informasi ORMAS

Sasaran 5 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 yang termuat dalam tabel **Belanja langsung** diatas, terdapat sebanyak 9 (Sembilan) program dan 50 (Lima Puluh) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar **Rp. Rp. 2.318.238.933,00** dengan total realisasi mencapai **Rp. 1.944.345.600,00 (83,87%)**



Sasaran 6 : Meningkatnya Sektor Agrobisnis

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2020 maka realisasi anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis sebesar **93,15%** dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar **99,93 %** menunjukkan adanya **efektifitas** penggunaan Anggaran.

Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor Pariwisata

Dalam Dinas Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu :

1. Program pengembangan kebudayaan :

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2. Program pengembangan kesenian tradisional :

- a. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- b. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat



No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.962.246	523.420.034	87,10
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	70.800.000	54.128.344	90,76
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.950.000	79.950.000	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	26.615.600	16.323.700	61,33
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.080.000	8.680.000	66,36
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.500.000	1.509.000	20,12
6	Penyediaan makanan dan minuman	44.400.000	34.084.500	79,77
7	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	295.566.646	294.678.490	99,70
8	Tapin Expo	26.000.000	0	0,00
9	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	37.050.000	34.066.000	91,95
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	132.150.000	121.650.080	92,05
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	17.879.580	89,40
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	2.484.000	41,40
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	10.336.500	68,91
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	91.150.000	90.950.000	99,78
III.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000	4.546.000	90,92



No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	2.716.000	90,53
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2.000.000	1.830.000	91,50
IV.	Program Pengembangan Unsur Kebudayaan	7.500.000	0	0,00
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	7.500.000	0	0,00
V.	Program pemanfaatan Unsur Kebudayaan	107.500.000	41.100.000	38,23
1	Promosi seni budaya daerah	71.000.000	71.000.000	100
VI.	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	812.249.000	686.811.000	84,56
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	132.950.000	11.250.000	8,46
2	Pemeliharaan dan perawatan Benda Cagar Budaya / Situs	165.455.000	165.455.000	100
3	Pendaftaran Benda Cagar Budaya	37.199.000	36.099.000	97,04
4	Pelestarian aruh adat lereng meratus	0	0	0,00
5	Penyediaan jasa pemangku adat dayak	154.900.000	153.800.000	99,29
6	Pembangunan balai adat	321.745.000	320.207.000	99,52
VII.	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan	47.410.000	39.650.000	83,63
1	Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah	47.410.000	39.650.000	83,63
VIII	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	207.850.000	142.450.000	68,54



No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
1	Pembuatan bahan dan pembelian alat promosi pariwisata	49.950.000	11.000.000	22,02
2	Pemanfaatan Teknologi dan iformasi dalam pemasaran pariwisata	45.600.000	39.600.000	86,84
3	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	112.300.000	91.850.000	81,79
IX.	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata	13.765.000	13.261.000	96,34
1	Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	13.765.000	13.261.000	96,34
X.	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	2.579.834.000	2.413.939.000	93,57
1	Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata	0	0	0,00
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Operasional Destinasi Wisata	128.810.000	98.750.000	76,66
3	Pembuatan sarana dan prasarana pariwisata (DAK Fisik)	2.006.974.000	1.987.814.000	99,05
4	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata (DAK Non Fisik)	344.050.000	227.975.000	66,26
5	Dukungan operasional Non rutin fasilitas pariwisata (DAK NON Fisik)	100.000.000	99.400.000	99,40
XI.	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	25.050.000	12.379.000	49,42
1	Pembinaan pokdarwis	56.240.000	56.124.000	99,79
	JUMLAH	4.570.460.246	4.042.951.114	88,46

**Sasaran 8 : Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM**

Berikut ini adalah tabel pencapaian kinerja disertai program pada tahun 2020 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	32,50	25,64	78,89%	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	42.487.500
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	84	83	98,80%	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	3.025.000
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	30.025.000

Sasaran meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UMKM dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat dengan Capaian Sasaran di atas 70% dapat dikategorikan Berhasil. Kegiatan dari sasaran strategis ini adalah Peningkatan Koperasi dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru, pada tahun 2021 Koperasi yang dievaluasi ada 3 Koperasi dari target 3 Koperasi Tahun 2021. Capaian dari sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021, Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan tidak mengalami penambahan dikarenakan kegiatan mengalami penghapusan (Refocusing), kegiatan dialihkan untuk Percepatan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Tapin.



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	732.759.833,00	563.810.429,00	76,94
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.400.000,00	37.396.882,00	66,31
Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00
Penyediaan jasan kebersihan kantor	20.400.000,00	18.586.750,00	91,11
Penyediaan alat tulis kantor	28.198.440,00	20.121.500,00	71,36
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.000.262,00	9.986.000,00	90,78
Penyediaan makanan dan minuman	41.840.000,00	36.840.000,00	88,05
Tapin Expo	0,00	0,00	0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	497.921.131,00	366.723.297,00	73,65
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.156.000,00	43,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.450.000,00	169.403.084,00	85,36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	30.450.000,00	11.348.084,00	37,27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	39.350.000,00	36.315.000,00	92,29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	3.340.000,00	66,80
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	123.650.000,00	118.400.000,00	95,75
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000.000,00	10.990.000,00	99,48
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.500.000,00	5.490.000,00	99,82
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
Program Peningkatan Kualita sKelembagaan Koperasi	31.550.000,00	31.550.000,00	100,00
Penyuluhan Perpajakan Bagi	0,00	0,00	0,00



Koperasi Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Data Koperasi Online	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
Pemeringkatan Koperasi Bimbingan Persiapan RAT Koperasi	9.950.000,00 0,00	9.950.000,00 0,00	100,00 0,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	39.625.000,00	0,00	0,00
Pembinaan UP2K	39.625.000,00	0,00	0,00
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	173.186.558,00	173.186.558,00	95,84
Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	99.686.558,00	92.479.500,00	92,77
Sosialisasi Tertib Administrasi dan Peizinan Bidang Perindustrian Bagi Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berkas Agro dan Kimia	488.750.000,00	241.778.540,00	49,47
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin Expo	120.500.000,00	0,00	0,00
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	0,00	0,00	0,00
Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival	33.000.000,00	30.358.000,00	91,99



Sasirangan			
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	83.500.000,00	0,00	0,00
Pendukung Operasional DEKRANASDA KAB. TAPIN	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Pengolahan Kaolin	93.500.000,00	87.546.800,00	93,63
Kegiatan Galeri TAMASA	148.650.000,00	121.873.740,00	81,99
Fasilitasi Penerapan standarisasi produk IKM (Hak Merk Produk)	9.600.000,00	2000.000,00	20,83
JUMLAH	1.675.321.391,00	1.183.511.553,00	70,64

Sasaran 9 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dengan adanya 4 Program dan 9 Kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dengan capaian kinerja dikatakan berhasil. Namun masih adanya beberapa kegiatan yang masih kurang anggaran sehingga kegiatan masih belum dapat dijalankan secara maksimal. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya DPMD mendapatkan tambahan pagu anggaran sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Dana
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.914.304	979.541.206	93,92	63.373.098
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	57.520.000	41.648.809	72,41	15.871.191
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.900.000	70.863.400	99,95	36.600
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.033.697	57.756.500	99,52	277.197
4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20.120.000	20.119.800	100,00	200
5	Penyediaan makanan dan minuman	49.200.000	48.892.500	99,38	307.500
6	Rapat - rapat	722.960.607	699.089.197	96,70	23.871.410



	Koordinasi dan Konsultasi				
7	Tapin Expo	25.000.000	1.996.000	7,98	23.004.000
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	39.180.000	39.175.000	99,99	5000
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.500.000	70.624.102	96,09	2.875.898
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	0
2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	42.000.000	39.172.202	93,27	2.827.798
3	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	28.500.000	28.451.900	99,83	48.100
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.680.000	16.213.100	97,20	466.900
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.910.000	6.902.500	99,89	7.500
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	9.770.000	9.310.600	95,30	459.400
IV	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	160.282.970	779.617.200	486,40	(619.334.230)
1	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan	96.632.970	88.867.000	91,96	7.765.970
2	Pemasyarakatan Posyantek dan	63.650.000	62.159.200	97,66	1.490.800



	Teknologi Tepat Guna				
3	Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (DID Tahap III)	0	628.591.000	0,00	(628.591.000)
V	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	350.846.100	298.536.100	85,09	52.310.000
1	Perlombaan Desa	26.100.000	25.516.600	97,76	583.400
2	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APB Desa	265.226.100	236.491.600	89,17	28.734.500
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	59.520.000	36.527.900	61,37	22.992.100
VI	Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	3.180.141.300	3.054.084.303	96,04	126.056.997
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	309.745.300	245.790.100	79,35	63.955.200
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjandal Posyandu	17.762.000	7.858.800	44,25	9.903.200
3	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar melalui kader posyandu	40.912.000	34.217.600	83,64	6.694.400
4	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	66.722.000	58.147.800	87,15	8.574.200
5	Karya Bhakti TMMD	1.045.000.000	1.041.647.800	99,68	3.352.200
6	Karya Bhakti TNI	1.700.000.000	1.666.422.203	98,02	33.577.797
		4.824.364.674	5.198.616.011	107,76	(374.251.337)

**Sasaran 10 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.205.198	693.759.664	98,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94.800.000	93.339.935	98,46
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	78.618,600	78.498.600	99,85
4	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	685.225.000	355.220.000	51,84
5	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	327.283.400	307.501.400	93,96
Total		1.891.132.198	1.528.319.599	80,82

Sasaran 11 : Menurunnya Kemiskinan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	98,33	98,33%
	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	100	100	100%
	1 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDL	Laporan	13	13	100%
	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%



	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100%
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100%
	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material untuk Tapin Expo	Bulan	12	12	100%
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	100%
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100%
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	100%
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	100%
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	100%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Bulan	12	12	100%



	Air dan Listrik	Listrik				
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	90	90%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Buah	20	14	70%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Buah	1	1	100%
II	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	%	100%	72,50%	72,50%
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	%	100	72,50	72,50%
	/ Kota					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	54	90%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	12	100%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	7	7	100%
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Orang	11	0	0,00%



III	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Terkantar (Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	%	42,91%	24,69%	57,54%	
	A Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	57,54	57,54%	
	1	Penyediaan permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Orang	500	0	0,00%
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Orang	150	150	100%
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	911	858	94,18%
	4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	500	178	36%
	B Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	100	0	0,00%	
	5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Non SPM)	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	10	0	0,00%
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	88,56	39,26	44,33%	
	A Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	%	100	44,33	44,33%	
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Waktu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Titik	12.500	6.624	52,99%
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lokus	20	16	80%
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah sosialisasi perda	Kali	1	0	0,00%



V	Program Penanganan Bencana	Persentase PMKS yang Memperoleh Penanganan Bencana	%	100%	100%	100%
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	100	100%
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	Orang	230	230	100%
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Orang	150	150	100%
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Rumah masyarakat miskin (RUTILAHU) yang direhab	RTLH	126	126	100%
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	%	100	100	100%
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah tenaga penanganan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	80	80	100%
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	50	50	100%
VI	Program Pengelolaan Taman Makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	%	100%	100%	100%
A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	%	100	100	100%
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Buah	1	1	100%



Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS Lainnya

1.1 Pedampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dalam mendukung program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan, berupa pemberian uang non tunai kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM). Pada tahun 2020 jumlah KPM PKH sebanyak 3.609 KPM. Dengan alokasi dana Rp. 202.415.000,- dapat terealisasi Rp. 196.875.000,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 97,26%

1.2 Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi dan memvalidasi basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Tapin yang mana data tersebut akan digunakan sebagai acuan calon penerima bantuan, baik bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten. Dengan alokasi dana Rp. 111.602.900,- dapat terealisasi Rp. 111.357.900,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 99,78%

1.3 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran. Dengan alokasi dana Rp. 52.776.000,- dapat terealisasi Rp. 52.776.000,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 100,00%

1.4 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid – 19

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dalam mendukung program pemerintah untuk Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Penanganan Covid – 19. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid – 19. Pada tahun 2020 ada 4.732 orang yang mendapatkan bantuan dari kegiatan ini. Alokasi dana



yang tersedia Rp. 252.503.400,- dapat terealisasi Rp. 246.649.800,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 97,68%

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.1 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini sangat diperlukan dan penting sehubungan dengan banyaknya bencana yang sering terjadi yang dan bertujuan memberikan bantuan kepada korban bencana. Dengan alokasi dana Rp. 62.700.000,- dapat terealisasi Rp. 61.638.000,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 98,31%

1.2 Bedah Rumah Keluarga Miskin

Kegiatan ini sangat diperlukan dan penting untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tapin dengan alokasi dana Rp. 4.853.160.000,- dapat terealisasi Rp. 4.853.160.000,- dengan realisasi capaian kegiatan persentasi 100%. Pada tahun 2020 sebanyak 25 rumah tidak layak huni yang di rehab
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia

1.1 Pendampingan Sosial / Asistensi Lanjut Usia dan Orang Terlantar

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai biaya operasional petugas pendamping/PSM program Jaminan Sosial Lanjut Usia yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin, berupa pemberian uang non tunai kepada lanjut usia yang ada di Kabupaten Tapin. Alokasi Dana sebesar Rp 9.500.000,- dapat terealisasi Rp. 9.410.000,- dengan realisasi capaian kegiatan Persentasi 98,62%

1.2 Peningkatan Pemberdayaan PMKS

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Pada tahun 2020 ada 13 orang anak terlantar yang mendapatkan pelatihan. Alokasi Dana sebesar Rp 9.075.000,- dapat terealisasi Rp. 7.975.000,- dengan realisasi capaian kegiatan Persentasi 87,88%

1.3 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar

Kegiatan ini diperlukan karena anak terlantar sesudah diberikan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya maka diberikan kesempatan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Tapin sesuai jurusan dalam pelatihannya. Pada 2020 ada 5 orang anak yang magang yaitu pada keahlian menjahit. Alokasi Dana sebesar Rp 8.160.000,- dapat terealisasi Rp. 8.160.000,- dengan realisasi capaian kegiatan Persentasi 100,00%

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.1 Bimbingan Sosial dan Keterampilan Penyandang Cacat Melalui LBK

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan diperlukan oleh Penyandang Cacat karena bertujuan untuk menambah keterampilan dan bimbingan sosial. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena adanya larangan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Sehingga realisasi dari kegiatan ini hanya digunakan untuk biaya operasional Loka Bina Karya (LBK). Jumlah Alokasi sebesar Rp. 8.900.000,- dan Terealisasi Rp. 8.400.000,- Dengan Realisasi capaian Kegiatan Persentasi 94,38%.

1.2 Pembinaan, Penanganan dan pengawasan Asistensi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Berat

Kegiatan ini merupakan pengawasan atau pendampingan Asistensi Penyandang Disabilitas (ASPD), dimana penyandang disabilitas diberikan bantuan berupa jaminan sosial atau uang non tunai yang disalurkan melalui bank mitra (sumber dana APBN) dalam memenuhi kehidupan dirinya sendiri maupun keluarganya. Jumlah Alokasi sebesar Rp. 3.500.000,- dan dapat terealisasi Rp. 3.390.000,- Dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 96,86%.

5. Program Rehabilitasi Sosial

1.1 Rehabilitasi Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Anak Lanjut Usia

Kegiatan ini direncanakan untuk merehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial terhadap anak lanjut usia, namun pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada anak lanjut usia yang di rehabilitasi sosial.

Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 3.495.000,- dapat terealisasi Rp. 0,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 0 %.

1.2 Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tali asih bagi anak berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2020 ada 5 orang anak yang mendapatkan bantuan berupa paket peralatan sekolah. Jumlah alokasi dana Rp. 5.390.000,- dapat terealisasi Rp. 4.900.000,- dengan realisasi capaian kegiatan 90,91 %.

1.3 Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Penyakit Kronis dan psikotok

Kegiatan ini membiayai dana operasional untuk pemberian bantuan jaminan hidup bagi eks kusta berupa jasa pengolah data dan pengadministrasian. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 8.263.000,- dapat terealisasi Rp. 4.365.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 52,83,- %.



1.4 Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual

Pada tahun 2020 kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual yang dibina dan ditangani. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 8.777.000,- dapat terealisasi Rp. 0,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 0 %.

1.5 Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Kegiatan ini merupakan biaya operasional bagi pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sehingga keterampilan tersebut dapat membantu dalam memenuhi kehidupan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 8.395.000,- dapat terealisasi Rp. 5.450.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 64,92%.

1.6 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

Kegiatan ini merupakan biaya operasional tenaga SLRT dalam memberikan pelayanan rujukan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dengan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Alokasi dana yang disediakan Rp. 288.250.000,- dapat terealisasi Rp. 227.238.000,- dengan Realisasi Capaian kegiatan persentasi 78,83%.

Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dalam Melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.1 Pemeliharaan TMP Puspa Raya dan Ziarah Pendiir Kabupaten Tapin



Kegiatan ini sangat diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan TMP Puspa Raya agar tetap terjaga rasa Nasionalisme bangsa Indonesia dan dapat menghargai perjuangan Para Pahlawan sekaligus ziarah kepada pendiri Kabupaten Tapin. Jumlah Alokasi sebesar Rp. 58.705.000,- dan dapat terealisasi Rp. 58.020.000,- Dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 98,83%.

1.2 Pemberdayaan Karang Taruna

Kegiatan ini sangat diperlukan guna membantu kegiatan Karang Taruna yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan tujuan partisipasi pembinaan generasi muda dan tukar menukar informasi dan pengalaman sesama anggota Karang Taruna. Dengan jumlah Alokasi dana sebesar Rp. 45.450.000,- dan terealisasi Rp. 45.450.000,- Persentasi 100,00%.

1.3 Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pendapatan bagi Karang Taruna di Kabupaten Tapin. Pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan berupa UEP jamur tiram dan budidaya lele. Dengan jumlah Alokasi dana sebesar Rp. 109.070.000,- dan terealisasi Rp. 109.070.000,- Persentasi 100,00 %

1.4 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Kegiatan ini sangat diperlukan untuk pembinaan dan pertemuan penyuluh Kesejahteraan Sosial se Kabupaten Tapin. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 68.400.000,- dapat terealisasi Rp. 41.867.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 61,21%.

1.5 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)



Kegiatan ini sangat diperlukan karena sehubungan dengan biaya operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 69.808.000,- dapat terealisasi Rp. 69.783.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 99,96 %.

1.6 Pemberdayaan/Pengembangan LK3

Kegiatan ini diperlukan karena merupakan wadah Kegiatan Sosial Masyarakat lainnya melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 26.980.000,- dapat terealisasi Rp. 26.980.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 100,00 %.

2. Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan

Kegiatan ini membiayai belanja operasional pengolah data panti asuhan yang ada di Kabupaten Tapin. Dengan jumlah Alokasi Dana Rp. 4.262.000,- dapat terealisasi Rp. 4.242.000,- dengan Realisasi Capaian Kegiatan Persentasi 99,53 %. Yang dimaksud PSKS yang berperan dalam melayani PMKS / peserta aktif adalah : PSKS yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya

Sasaran 12 : Menurunnya Pengangguran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN TASE (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454.501.175	399.084.839	88
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	57.500.000	42.999.827	75
	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.689.500	49.841.500	93
	3. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	5.700.000	5.700.000	100
	4. Penyediaan makanan dan minuman	64.360.000	52.622.500	82
	5. Rapat - rapat Koordinasi dan	202.000.675	201.670.012	99



	Konsultasi			
	6. Tapin Expo	25.000.000	0	0
	7. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	46.251.000	46.251.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328.500.000	327.207.097	99
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58.500.000	58.350.000	99
	2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30.000.000	29.950.000	99
	3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	30.000.000	29.492.097	98
	4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.925.000	99
	5. Rehab Gedung	200.000.000	199.490.000	99
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	10.000.000	9.874.000	98
	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	5.000.000	4.874.000	7
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	354.220.000	350.706.000	99
	1. Padat Karya Produktif (Pembuatan Masker untuk Pencegahan Covid 19)	112.000.000	109.848.000	98
	2. Padat Karya Produktif (DID Tahap III)	242.220.000	240.858.000	99
5	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	115.715.000	110.338.400	95
	1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	66.750.000	63.417.900	95
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	5.717.500	5.717.500	100
	3. Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	1.790.000	1.515.500	85
	4. Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit	5.900.000	5.590.000	95
	5. Dewan Pengupahan	29.590.000	28.440.000	96
	6. Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal	5.967.500	5.657.500	95
6	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	214.810.000	198.170.510	92



	1. Bursa Kerja Online	109.000.000	95.580.510	88
	2. Penyuluhan Informasi Pasar Kerja	0	0	0
	3. Pelatihan Kewirausahaan	0	0	0
	4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	0	0	0
	5. Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai	9.230.000	8.340.000	90
	6. Padat Karya Produktif	86.580.000	85.750.000	99
	7. Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0	0	0
	8 Tim penanggulangan PMI non prosedural (Satgas)	10.000.000	8.500.000	85
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	387.349.000	386.174.400	99
	1. Pedidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin	133.449.000	132.894.000	99
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK Tapin	53.900.000	53.868.400	99
	3. Rehab Gedung Workshop/Bengkel	200.000.000	199.412.000	100
	TOTAL (Rp.)	1.865.095.175	1.781.555.246	96

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan

Untuk mewujudkan pencapaian realisasi kinerja peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik ada beberapa keberhasilan dan hambatan antara lain dari sisi anggaran dan kualitas Sumber Daya Manusianya. Dari sisi anggaran peningkatan realisasi kinerja dengan dua indikator tersebut didukung dengan pagu sebesar Rp. 89.333.000.000,00, di dukung dengan program/kegiatan yang menunjang antara lain: Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan dengan jumlah kegiatan ada 14 Kegiatan. Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusianya perlu adanya



pedidikan dan pelatihan teknis yang mumpuni dan sesuai dengan keahliannya.

Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Air Bersih.

. Dari sisi anggaran peningkatan realisasi kinerja dengan dua indikator tersebut didukung dengan pagu sebesar Rp. 18.608.684.500,00, di dukung dengan program/kegiatan yang menunjang antara lain: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan jumlah kegiatan ada 7 Kegiatan. Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusianya perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis yang mumpuni dan sesuai dengan keahliannya.

Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

Dari sisi anggaran peningkatan realisasi kinerja dengan satu indikator tersebut didukung dengan pagu sebesar Rp. 24.875.009.000,00 yang di dukung dengan program/kegiatan yang menunjang antara lain: Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan jumlah kegiatan ada 4 Kegiatan. Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusianya perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis yang mumpuni dan sesuai dengan keahliannya.

Sasaran 16 : Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik

. Dari sisi anggaran peningkatan realisasi kinerja dengan dua indikator tersebut didukung dengan pagu sebesar Rp. 137.751.272.500,00, di dukung dengan program/kegiatan yang menunjang antara lain: Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan lingkungan dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan jumlah kegiatan ada 6 Kegiatan. Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusianya perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis yang mumpuni dan sesuai dengan keahliannya.



Sasaran 17 : Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi

Dari keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sasaran meningkatkan layanan terhadap informasi publik yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang meliputi 6 (enam) kegiatan, antara lain:
 - a. Pengembangan Kemitraan Informasi Melalui LPPL.
 - b. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.
 - c. Diseminasi Informasi Melalui Media Massa.
 - d. Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten.
 - e. Kerjasama Media Massa Kegiatan Pengembangan kemitraan.
 - f. Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi Pelajar.

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2021 yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan, dan 26 subkegiatan secara umum capaian kinerja ditahun 2021 sudah sesuai yang diharapkan dan program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa dikatakan sudah mendukung capaian target yang diharapkan, hal ini disebabkan :

1. Team Work yang kompak.
2. Klasifikasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
3. Schedule yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sasaran 18 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Keberhasilan Indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program- program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2020 diantaranya:



1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui status mutu air dan kualitas udara pada kondisi tertentu dan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran sehingga dapat diambil kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian pencemaran.
2. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembinaan AMDAL juga dilakukan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap implementasi dokumen AMDAL yang diterbitkan.
3. Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 dilakukan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap implementasi dokumen AMDAL yang diterbitkan yakni menjamin ketaatan pemilik izin lingkungan memenuhi aspek administrasi dan teknis pengelolaan Limbah B3.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan fokus kegiatan untuk penanganan/pengelolaan sampah dari TPS hingga TPA serta pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan

Untuk mendukung pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan dana pada program pendukung pencapaian target kinerja utama dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adapun rincian alokasi anggaran pada 8 (delapan) program di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi Anggaran Disperkimtan TA 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ALOKASI (%)
Sekretariat		4.402.548.077,00	4,40
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.402.548.077,00	100,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman		8.984.413.000,00	8,98
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.011.900.000,00	55,78
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.451.020.000,00	16,15
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.521.493.000,00	28,07
Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)		11.579.495.100,00	11,57
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.579.495.100,00	100,00
Pertanahan		75.136.870.107,00	75,06
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	179.800.000,00	0,24
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	74.525.347.107,00	99,19
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	431.723.000,00	0,57
JUMLAH		100.103.326.284,00	100,00

Sebanyak 3,78 % dari keseluruhan alokasi anggaran atau 32,64% dari total alokasi pada program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dialokasikan kepada kegiatan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) di kabupaten Tapin yaitu sebesar Rp. 3.780.000.000,00.

Tabel
Program dan Kegiatan Pendukung Target Kinerja Disperkimtan TA 2021

No	Kinerja Utama		Pendukung		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Program pengembangan perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
		Persentase perumahan yang berkualitas	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan	Persentase penanganan konflik-konflik pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Persentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Program Penatagunaan Tanah			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Pada sasaran Kinerja pertama “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman” dengan indikator Persentase Luas wilayah permukiman bebas kumuh, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase perumahan yang berkualitas, dialokasikan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel
Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ALOKASI (%)
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.011.900.000,00	5,01
1.04 . 1.04.01.01 . 17	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	100,00
1.04 . 1.04.01.01 . 17.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	100,00
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.451.020.000,00	1,45
1.04 . 1.04.01.01 . 23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	224.220.000,00	15,45
1.04 . 1.04.01.01 . 23.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	224.220.000,00	100,00
1.04 . 1.04.01.01 . 24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.226.800.000,00	84,55
1.04 . 1.04.01.01 . 24.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.191.000.000,00	97,08
1.04 . 1.04.01.01 . 24.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.800.000,00	2,92
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.521.493.000,00	2,52
1.04 . 1.04.01.01 . 25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.521.493.000,00	100,00
1.04 . 1.04.01.01 . 25.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.470.993.000,00	98,00
1.04 . 1.04.01.01 . 25.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.500.000,00	2,00
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.579.495.100,00	11,57
1.04 . 1.04.01.01 . 26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.579.495.100,00	100,00
1.04 . 1.04.01.01 . 26.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.579.495.100,00	100,00

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat. Sebagian dari output kegiatan pada program ini menunjang capaian kinerja pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Outcome dari program ini akan dijelaskan pada Bab IV tentang penarapan dan capaian SPM,

2. Program Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten/kota. Pada Tahun 2021 Disperkimtan Tapin melalui sub unit bidang



Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani kawasan kumuh sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/056/KUM/2016 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Rantau. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kawasan bebas kumuh dengan indikator Persentase Penurunan Kawasan Kumuh (%), realisasi 1,99 % dari target 2,13% atau dengan capaian di akhir TA sebesar 93,43 % . Perhitungan diambil dari luas bangunan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 57 unit dengan ukuran per unit $4 \times 6 = 24 \text{ m}^2$.

URAIAN	2020 (64 unit)	2021 (57 Unit)
Luas permukiman perkotaan (LW)	820,26 ha	820,26 ha
SK kumuh perkotaan (Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/056/KUM/2016)	14,62 ha	14,62 ha
	1,78 %	1,78 %
Kaw permukiman perkotaan bebas kumuh	805,64 ha	805,64 ha
Penanganan kumuh berdasarkan luas rumah yang ditangani (4x6) per unit	0,15 ha	0,29 ha
bebas kumuh setelah penanganan (LWBK)	0,0187 %	0,0354 %
	805,79 ha	805,93 ha
	98,24 %	98,25 %
PERSENTASE PENURUNAN KAWASAN KUMUH	1,05 %	1,99 %

❶ Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya updating kawasan kumuh yang direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh berupa pendataan dan updating kawasan kumuh.

Output sub kegiatan ini berupa penyusunan Legalitas dokumen RP3KP dan updating kawasan kumuh di perkotaan dan pedesaan, yang akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan rencana



kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal penanganan kawasan kumuh. Capaian sub kegiatan ini adalah 100% dari target 2 Dokumen.

🔴 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni (RTLH) di dalam kawasan kumuh melalui 2 (dua) sub kegiatan.

Sub kegiatan :

1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

Target yang ditetapkan dalam sub kegiatan ini adalah RTLH di kawasan kumuh dengan jumlah 57 unit RTLH dengan realisasi 57 unit (100%) peningkatan kualitas RTLH di kecamatan Tapin Utara dan Lokpaikat.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Output sub kegiatan ini adalah perumusan kebijakan terkait pengendalian permukiman kumuh dalam bentuk rapat-rapat tim Pokja yang melibatkan Kepala Daerah dan SKPD lain yang terkait dalam kerjasama penanganan kawasan kumuh. Di tahun 2021 sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan kendala teknis.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan Rumah tidak layak huni. Outcome program ini adalah meningkatnya Rumah Layak Huni dengan indikator Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani realisasi 2,05% dari target 0,88% dan Presentase peningkatan



kualitas rumah tidak layak huni realisasi 2,05% dari target 2,23%

URAIAN	2020	2021
Total rumah di Kabupaten Tapin (RP3KP 2019)	55794 unit	55794 unit
Rumah Tidak Layak Huni (Survey 2020 dan verifikasi DTKS 1)	9408 unit	9215 unit
	16,86 %	16,52 %
Penanganan RTLH (di dalam & di luar kawasan kumuh)	186,00 unit	193,00 unit
RATIO RTLH YANG TERTANGANI (RENSTRA 2018-2023)	1,98 %	2,09 %
PERSENTASE PENINGKATAN RTLH	1,98 %	2,09 %

🔴 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, melalui 2 (dua) sub kegiatan.

Sub kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Target dari sub kegiatan ini adalah RTLH di luar kawasan kumuh dengan target sebanyak 76 unit dan realisasi output 76 unit atau 100%.

2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sub kegiatan ini berupa pembentukan tim pendamping untuk memperlancar kegiatan di lapangan khususnya pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Sasaran utama program ini adalah pada PSU perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah cakupan program ini juga meliputi penanganan PSU di wilayah kabupaten Tapin yaitu pada Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Rantau baru serta penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyerap anggaran cukup besar khususnya pada pembayaran rekening PJU setiap bulannya. Indikator outcome dari program ini adalah :

1. Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam kondisi baik (%), realisasi 54,50 % dari target 62,78% atau dengan capaian sebesar 86,81 %.

Penyelenggaraan PSU	Vol	satuan	Realisasi	Capaian
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum				
Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	100	kaw ds	9,00	9,00
Pemeliharaan PJU	3500	titik	1.907,00	54,49
Pembayaran rek PJU	12	Bulan	12,00	100,00
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Perumahan & Permukiman	-	kwsn	-	-
	-	m'	-	-
Rata - rata Capaian				54,50
Target Kinerja Program				62,78
Capaian Realisasi Kinerja Program				86,80

2. Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik(%) realisasi 2,63% dari target 2,63% atau dengan capaian 100%.
3. Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%) realisasi 100% dari target kawasan yang dikelola 100%.

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Perumahan.

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan :



Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Output sub kegiatan ini berupa pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan Rantau baru, pembangunan dan pemeliharaan PJU, pembayaran rekening PJU dan perencanaan fasilitas umum di perumahan selama 12 bulan di tahun anggaran. Realisasi 12 bulan dengan capaian 100 %.

Sasaran 20 : Meningkatnya Investasi Daerah

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian Kinerja Utama “Meningkatnya Investor” dapat dilihat bahwa capaian kinerja Realisasi Investasi yaitu 761,41%. Namun untuk Persentase Pertumbuhan Investasi tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian -7,52%.

NO.	Program Penunjang	Realisasi Keuangan (%)	IKU	Capaian (Realisasi/Target)
1.	Program pengendalian dan pengawasan investasi	46,89	Realisasi Investasi	761,41%
			Persentase Pertumbuhan Investasi	-7,52%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anatara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja. Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya IKU Nilai Investasi dan Persentase Pertumbuhan Investasi maka DPMPTSP Kabupaten Tapin kurang efisien dalam penyerapan anggaran. Kurangnya serapan anggaran di Tahun 2020 disebabkan kegiatan Sosialisasi LKPM mengalami kendala untuk dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. Indikator pertama yaitu Realisasi investasi telah mencapai target namun, indikator kedua yaitu

pertumbuhan investasi menurun dari tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh lemahnya investasi tahun 2020.

Secara umum sumber daya yang tersedia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber masih belum cukup memadai. Hal tersebut dapat menyebabkan belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki DPMPSTSP Kabupaten Tapin untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

Sasaran 21 : Meningkatkan Keamanan Daerah

Adapun dari keseluruhan program dan kegiatan yang diuraikan sebelumnya, terdapat 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya
2. Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya
3. Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran
2. Posko Siaga bencana kebakaran
3. Pelatihan aparat pemadam kebakaran
4. Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada, dengan kegiatan:

1. Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada
2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada



3. Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

4. Operasi Penyakit Masyarakat

5. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dengan satu kegiatan, yaitu Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Sasaran 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

➤ **Indikator Nilai SAKIP**

1) Evaluasi (Inspektorat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	N/A	N/A

➤ **Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah**

➤ Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawas ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pemimpin instansi pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan



pemerintah. Karena efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Capaian dari Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti adalah 103%. Masih lemahnya kesadaran SKPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan menjadi kendala tersendiri dari indikator kinerja ini. Kedepannya Inspektorat akan mendorong untuk mendapatkan perhatian dari unsur pimpinan daerah agar diberikan semacam sistem reward dan punishment terhadap SKPD agar menambah kesadaran bagi SKPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Selain itu juga Inspektorat berencana akan melakukan konsolidasi/pemutakhiran temuan data seluruh SKPD pertriwulan untuk mempercepat proses penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat di SKPD terkait serta proaktif mengingatkan SKPD untuk penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mendukung kinerja Inspektur cascading kinerja ini diturunkan kepada sekretaris dengan indikator sasaran persentase rekomendasi hasil reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dengan capaian 100% dimana sesuai dengan MOU antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan bahwa temuan harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sebelum 60(enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK diterima. Selain itu juga cascading kinerja ini diturunkan kepada kasubbag evaluasi pelaporan. Karena keterbatasan SDM subbag evaluasi&pelaporan maka melibatkan seluruh bagian sekretariat untuk mendukung kinerja ini dimana pemantauan dibagi masing-masing wilayah dimana total hasil laporan pemantauan berjumlah 50 dikarenakan ada 20 objek pemeriksaan yang temuannya nihil sedangkan tahun 2020 hanya ada 44 tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan.



- Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti

Untuk Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan setiap pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pembahasan atas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yakni pada bulan Juni dan Desember 2020. Hasil capaian dari Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti adalah 109,2% kendala dari capaian kinerja ini adalah dimana masih adanya temuan mulai dari tahun 2005 yang masih belum selesai hal ini dikarenakan temuan tersebut sulit ditindaklanjuti dengan berbagai macam alasan. BPK mencoba mengakomodir untuk menghapus temuan yang sudah lampau ini dengan membuka status temuan dengan kategori tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Upaya Inspektorat untuk mendorong penyelesaian Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan mengusulkan temuan-temuan yang sudah lampau dan memang sulit untuk ditindaklanjuti masuk kedalam kategori keempat tersebut dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim BPK RI.

Untuk mendukung kinerja Inspektur cascading dari kinerja ini diturunkan kepada Sekretaris dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan. Mengingat keterbatasan SDM subbagian evaluasi dan pelaporan maka dibentuklah tim untuk mendukung kegiatan ini yang mana diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 188.45/202/KUM/2017 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/155/KUM/2016 tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Tapin.

➤ **Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Untuk mencapai sasaran dan target yang sudah ditentukan tentunya harus di dukung dengan program dan kegiatan yang selaras, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Adapun program yang mendukung tersebut adalah program Penyusunan Anggaran. Kinerja utama pada program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan Indikator Kinerja pada program ini adalah jumlah perda,perbup dan pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Target pada indikator ini adalah 2 Perda dan 6 Perbup sedangkan pencapaian kinerja pada program ini 100 persen, karena Perda dan Perbup disahkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas ASN

Berikut kegiatan-kegiatan yang ada pada BKPSDM Kabupaten Tapin yang terkait dengan Pengembangan Karier Aparatur :

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Penyelenggaraan test kompetensi jabatan
	Diklatpim IV
	Diklatpim III
	Diklatpim II
Program Kinerja, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
	Kegiatan Baperjakat
	Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



	Kegiatan Pencantuman Gelar
--	----------------------------

Sasaran 24 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mutu dan kinerja pelayanan berada dalam kategori BAIK. yaitu dengan NILAI INDEKS 84,15. Nilai ini dikonversi dengan pedoman sebagai berikut :

Niai Konversi	Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99		D	Tidak baik
65,00 – 76,60		C	Kurang baik
76,61-88,30		B	Baik
88,31 – 100,00		A	Sangat baik

Sumber : Kep.MenPAN 25/2004

Adapun hasil masing-masing unsur yang menjadi penilaian dalam SKM sebagai berikut :

No	Unsur Skm	Nilai Per Unsur Pelayanan	Kinerja Per Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan	3,147	Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,098	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,201	Baik
4.	Biaya dan tariff	3,52	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,092	Baik



6.	Kompetensi Pelaksana	3,687	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,624	Sangat Baik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,216	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3,741	Sangat Baik
NILAI INDEKS			B A I K
(JUMLAH NILAI RATA-RATA TERTIMBANG)			
NILAI SKM SETELAH DIKONVERSI (NI X 25)			

Peringkat kinerja per unsur pelayanan dari tertinggi ke rendah yaitu, (1) sarana dan prasarana, (2) kompetensi pelaksana, (3) perilaku pelaksana, (4) biaya dan tarif, (5) penanganan pengaduan saran dan masukan, (6) waktu pelayanan, (7) persyaratan, (8) Sistem mekanisme dan prosedur, (9) produk spesifikasi jenis pelayanan. Nilai survei kepuasan masyarakat setelah dikonversi sebesar 84,151, Mutu Pelayanan B, dan kinerja unit pelayanan BAIK.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah atau desa. Strategi pembangunan dalam kaitan Tugas Pembantuan adalah untuk mencapai keberhasilan pembangun sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan mempunyai tujuan dalam pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Pembangunan. Sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Daerahnya.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- f. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kementerian / lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian / Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 adalah :

- 1) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.

Sedangkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah :

- 1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.
- 2) Tugas pembantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.

**a) Dinas Pertanian**

Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian disamping melaksanakan program dan kegiatan dari dana APBD juga melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) dan APBD Provinsi.

b) Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 pada Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudiyakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat berbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (local wisdom) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini



disebut Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Kabupaten Tapin dalam hal aspek ketersediaan pangan terdiri dari beberapa tingkat kondisi seperti untuk kondisi aman (Hijau), kondisi waspada (Kuning), tingkat rentan (Merah). Pada dasarnya kerawanan pangan dan gizi merupakan bagian akhir dari proses perubahan situasi pangan dan gizi. Rawan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu disuatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Sedangkan rawan gizi merupakan suatu kondisi/keadaan dimana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan surveilans pangan dan gizi. Kegiatan surveilans pangan dan gizi pada intinya merupakan kegiatan pengamatan terhadap status gizi masyarakat yang di akibatkan oleh masalah pangan. Dalam surveilans informasi harus dikumpulkan secara teratur dan terus menerus dan diharapkan dapat digunakan untuk penentuan kebijakan, perencanaan program dan penetapan tindakan perbaikan pangan dan gizi masyarakat.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a) Dinas Pertanian

Adapun capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin adalah pada tabel Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2021.



Tabel 3.1.
Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2021 (Dinas Pertanian)

1	2	Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan											
1	Direktorat Jendral Tanaman Pangan										
1	Peningkatan Produktivitas Padi Sawah	Saprodi	1.594	Ha	410.455.000						APBN
2	Pengembangan budidaya padi lahan kering/gogo	Saprodi	500	Ha	697.500.000						APBN
3	Budidaya Padi Rawa	Saprodi	3.000	Ha	4.185.000.000						APBN
4	Fasilitasi saprodi jagung hibrida	Saprodi	1.090	Ha	1.527.500.000						APBN
	Sub Total				6.122.955.000,00			0,00	100	100	
2	Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana										
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Pembuatan Jaringan Tersier	8	Unit	640.000.000	8	Unit				APBN
	Sub Total				640.000.000,00			0,00	100,00	100,00	
3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)										
1	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Penyuluh Pertanian PNS	Dana	12	Bln	272.000.000,00	12	Bln	272.000.000	100	100	APBN
2	Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian	Dana	11	Bln	83.600.000,00	11	Bln	83.600.000	100	100	APBN
3	Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN	Dana	13	Orang	7.800.000,00	13	Orang	7.800.000	100	100	APBN
4	Pemanfaatan DAK Non Fisik Pendataan Pertanian oleh BPP ditingkat Kecamatan	Dana	12	BPP	123.000.000,00	12	BPP	115.680.000	94,05	100	APBN
	Sub Total BPPSDMP				486.400.000,00			479.080.000,00	98,50%	100,00	APBN
	SUB TOTAL APBN				7.249.355.000,00						



Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Selatan										
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura									
1	Bantuan jagung hibrida apbd prov	Saprodi	400	Ha						APBD Provinsi
2	Bantuan kacangTanah	Saprodi	31	Ha						APBD Provinsi
3	Pengolahan dan Pasca Panen Tanaman Pangan	Corn Sheler	3	Unit						APBD Provinsi
		Corn Sheller mobile	1	Unit						APBD Provinsi
		Power Thresher Multiguna	5	Unit						APBD Provinsi
		Power Thresher	2	Unit						APBD Provinsi
4	Bantuan Peralatan Sarana Pasca Panen	Peralatan Pasca panen			59.880.000					APBD Provinsi
5	Bantuan Kegiatan Fasilitas Bangunan Rumah Produksi Pengolahan Higienis Hortikultura	fasilitasi bangunan rumah produksi			135.000.000					APBD Provinsi
6	penangkaran Bawang Merah 2 ha	Saprodi	2	Ha	106.329.250					APBD Provinsi
7	Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan	Dana			25.987.100					APBD Provinsi
8	Peningkatan Kualitas Penyuluh Melalui Uji Coba Penerapan Teknologi/Kaji Terap Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten/Kota	Kaji terap	5	demplot	50.757.500					APBD Provinsi
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan									
1	Bantuan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap	Bahan pengendalian penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap								
2	Kegiatan Fasilitas Sarana Pembeku Lateks	Pembeku Lateks Berupa Asam Semut/Asam Formiat								
Sub Total APBDProvinsi					377.953.850,00			0,00	0,00%	100
Jumlah					7.627.308.850,000					



b) Dinas Ketahanan Pangan

Tersalurkannya Dana APBN/Dekonsentrasi dan APBD 1 Provinsi Kalimantan Selatan ke kelompok-kelompok Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Wanita (KW).

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.1.1 Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan dari dana APBD juga melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) dan APBD Provinsi. Adapun Program dan Kegiatan yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - a. Pengolahan dan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp. 6.122.955.000,00
2. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana
 - a. Jaringan Irigasi Tersier dengan pagu anggaran Rp. 640.000.000,00
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
 1. Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Penyuluh Pertanian PNS dengan pagu anggaran Rp. 272.000.000,00
 2. Honorarium dan BOP Penyuluh P3K dan THL-TB Penyuluh Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 83.600.000,00
 3. Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN dengan pagu anggaran Rp. 7.800.000,00
 4. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya dengan pagu anggaran Rp. 123.000.000,00

b) Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen atau lembar penugasan.

Untuk tugas pembantuan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 6 Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu 6 kelompok untuk pengembangan. Untuk tugas pembantuan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yaitu Peta Kerawanan Pangan.

3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

a) Dinas Pertanian

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1.1 Pengolahan dan Pasca Panen Tanaman Pangan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Tapin mendapat alokasi dana dari APBN, Bantuan Langsung APBN melalui Provinsi Kegiatan Pengolahan dan Pasca Panen Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian Pusat. Bantuan sarana dan prasarana pengolahan yang di alokasikan di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Corn Sheller / Perontok Jagung, sebanyak 3 unit yang diperuntukkan untuk kelompok tani sesuai dengan usulan yang telah diajukan yaitu 1 unit di kelompok tani Bina Karya Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, 1 unit di Kelompok Tani Bunga Melati Desa Paring Guling Kecamatan Bungur, dan 1 unit di Kelompok Tani Maju Jaya Desa Padang Sari Kecamatan Binuang.
2. Corn Sheller Mobile / Perontok Jagung Bermotor sebanyak 1 unit, tujuan diadakan sarana ini yaitu agar dapat menjangkau langsung ke wilayah yang agak jauh lokasinya sehingga dapat terakomodasi untuk penanganan pascapanen. Sarana pasca panen ini



diserahkan langsung ke kelompok tani penerima yaitu Kelompok Tani Pelaburan Permai Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan.

3. Power Thresher Multiguna, sebanyak 5 unit yang diperuntukkan untuk Poktan penerima bantuan kedelai, tetapi karena pada tahun ini pun di Kabupaten Tapin kegiatan kedelai kembali di batalkan maka alsintan ini pun diserahkan di Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.

4. Power Thresher/PerontokPadi

Pengadaan alat ini berasal dari dana APBN Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan sehingga alat yang dibeli lebih ringan untuk memudahkan mobilisasi dan bisa menyesuaikan spesifikasi lahan yang ada di Kabupaten Tapin. Alokasi yang diberikan yaitu sebanyak 2 unit dan di dilimpahkan pengelolaannya ke Poktan penerima bantuan yang sudah dimasukkan dalam daftar Calon Penerima Calon Lokasi / CPCL.

2. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana

a. Jaringan Irigasi Tersier

Alokasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) tahun 2021 menjadi 8 Unit. RJIT ini dialokasikan di daerah melalui dana Tugas Pembantuan. Ada 8 (Delapan) Kelompok tani pada 4 Kecamatan (Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang dan Lokpaikat) di kabupaten Tapin menerima bantuan berupa Pembangunan jaringan irigasi (pembuatan jaringan tersier) yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang sebagai berikut :



Tabel 3.2
Daftar Jaringan Irigasi Yang Dibangun

No	Uraian Kegiatan	Kelompok Tani	Volume
1.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Karang Putih Kecamatan Binuang	Bunga Kemuning	1
2.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Kecamatan Tapin Selatan	Bina Tani	1
3.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan	Sungai Anglai	1
4.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan	Awang Kembayau	1
5.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Mandurian Hilir Kecamatan Tapin Tengah	Tunas Muda	1
6.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Mandurian Hilir Kecamatan Tapin Tengah	Suka Tani	1
7.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah	Bayur Tani	1
8.	Pembuatan Saluran Irigasi Tersier Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat	Panggung	1
	Jumlah		8

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2021

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

3.1. Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Penyuluh Pertanian PNS

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember 2021). Realisasi keuangan sebesar Rp 272.000.000,00



3.2.Honorarium dan BOP Penyuluh P3K dan THL-TB Penyuluh Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan selama 11 bulan (Januari sampai dengan November 2021) untuk 19 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, yang terdiri dari :

- Penyuluh P3K : 17 orang
 - THL-TBPP Tingkat SLTA : 1 orang
 - THL-TBPP Tingkat S-1 : 1 orang
- Realisasi : Rp 83.600.000

3.3.Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN

Dilaksanakan oleh 1 orang admin SIMLUHTAN Kabupaten 12 orang admin SIMLUHTAN Kecamatan berupa kegiatan verifikasi dan validasi data ketenagaan, kelembagaan penyuluhan pertanian pada aplikasi SIMLUHTAN di Kabupaten dan 12 BPP kecamatan se Kabupaten Tapin selama 2 bulan

Realisasi : Rp 7.800.000,-

3.4.Peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya

Sasaran Kegiatan ini adalah 6 (enam) orang Penyuluh Swadaya yang berasal dari Kecamatan Tapin Selatan dengan Komoditas Padi. Adapun Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

- ✓ Meningkatkan kapasitas Penyuluh Swadaya dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian khususnya dalam pelaksanaan demplot
- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan masyarakat tani di sekitar lokasi demplot



- ✓ Mendorong dan memberikan contoh kepada masyarakat tani tentang tata cara kerja inovasi teknologi baru yang dapat yang dapat diterapkan oleh petani selaku pelaku utama dalam usaha tani.

Realisasi : Rp 4.000.000,-

b) Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasi oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

- 1) Program, kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan Tugas Pembantuan Pusat

Tabel 3.3
Tempat dan Lokasi Tugas Pembantuan Pusat

Program	Kegiatan	Output	Rincian Kegiatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Kelompok Wanita Tani (KWT)	- Honorarium Non PNS - Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Bahan Kimia dan Pupuk - Belanja Jasa Pengolahan Data - Belanja Jasa Tukang - Belanja Cetak - Belanja Pengadaan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta Kerawanan Pangan	- Belanja Jasa Pengolahan Data - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2021



2) Tempat atau Lokasi

Tabel 3.4
Tempat dan Lokasi Tugas Pembantuan Pusat

No	Nama KWT (Kelompok Wanita Tani)	Tipe	Desa/ Kelurahan/ Kecamatan
1	Maju Lestari	Penumbuhan	Margasari Hilir Kec. Candi
2	Teratai Putih	Penumbuhan	Gadung Kec. Bakarangan
3	Sekar Ayu	Penumbuhan	Masta Kec. Bakarangan
4	Mawar	Penumbuhan	Pematang Karang Hilir Kec. Tapin Tengah
5	Mayang	Penumbuhan	Pandahan Kec. Tapin Tengah
6	Ibu-ibu Dermawan	Penumbuhan	Raya Balanti Kec. Binuang

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2021

Tempat dan lokasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dilaksanakan di 6 Kelompok Wanita Tani (KWT) antara lain yaitu: Maju Lestari yang berlokasi di Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi, Teratai Putih yang berlokasi di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan, Sekar Ayu yang berlokasi di Desa Masta Kecamatan Bakarangan, Mawar yang berlokasi di Desa Pematang Karang Hilir Kecamatan Tapin Tengah, Mayang yang berlokasi di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah, Ibu-ibu Dermawan yang berlokasi di desa Raya Balanti Kecamatan Binuang.

Tempat dan lokasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran bersumber dari Dana APBN yang mana jumlah pagu sebesar Rp.188.088.000 dan Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar



Rp.188.088.000 untuk sisa pagu sebesar Rp. 0 dengan persentase 100 %.

4) Realisasi Capaian Kegiatan

Realisasi capaian kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan untuk 9 (Kelompok Wanita Tani) KWT yaitu : KWT Teratai Putih untuk Realisasi 100%, KWT Sekar Ayu untuk Realisasi 100%, KWT Mayang untuk Realisasi 100%, KWT Mawar untuk Realisasi 100%, KWT Maju Lestari untuk Realisasi 100%, KWT Ibu-ibu Dermawan untuk Realisasi 100%.

Realisasi capaian kegiatan penanganan daerah rawan pangan untuk pengolahan peta kerawanan pangan untuk realisasi 100%.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.2.1. Target Kinerja

a. Dinas Pertanian

1) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan dari dana dan APBD Provinsi yaitu dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Jagung Hibrida APBD Provinsi dengan volume 400 Ha,-
2. Bantuan Kacang Tanah dengan volume 31 Ha,-
3. Pengolahan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, Corn Sheler sebanyak 3 unit, Corn Sheller mobile sebanyak 1 unit, Power Thresher Multiguna sebanyak 5 unit, dan Power Thresher sebanyak 2 unit.
4. Bantuan Peralatan Sarana Pasca Panen, dengan pagu anggaran Rp. 59.880.000,-



5. Bantuan Kegiatan Fasilitas Bangunan Rumah Produksi Pengolahan Higienis Hortikultura Rp. 135.000.000,-
6. penangkaran Bawang Merah 2 ha, dengan pagu anggaran Rp. 106.329.250,-
7. Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan dengan pagu anggaran Rp. 25.987.100,-
8. Peningkatan Kualitas Penyuluh Melalui Uji Coba Penerapan Teknologi/Kaji Terap Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 50.757.500,-

2) Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan dari dana dan APBD Provinsi yaitu dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap yaitu Bahan pengendalian penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap
2. Kegiatan Fasilitas Sarana Pembeku Lateks yaitu Pembeku Lateks Berupa Asam Semut/Asam Formiat.

3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

a) Dinas Pertanian

Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Peralatan Sarana Pasca Panen

Pada tahun 2021 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapin memberikan bantuan Power Thresher/Perontok Padi kepada Kelompok Tani sesuai



dengan Alokasi Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pascapanen di tingkat petani.

a. Power Thresher/Perontok Padi,

Alokasi yang diberikan yaitu sebanyak 2 unit dan di dilimpahkan pengelolaannya ke Poktan penerima bantuan yang sudah dimasukkan dalam daftar Calon Penerima Calon Lokasi / CPCL. Adapun penerima bantuan alsintan pasca panen ini yaitu 1 unit diserahkan kepada kelompok tani Kayuh Baimbai Desa Parigi, dan 1 unit diserahkan kepada kelompok tani Sungai Buah Desa Marampiau Hilir.

Hasil dari kegiatan dan bantuan ini, diharapkan dari semua bantuan sarana bermanfaat bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani penerima dan di sekitarnya sehingga periode ketahanan penyimpanan produk pertanian tanaman pangan bisa bertahan lebih lama untuk tunda jual dan nilai jual produk pertanian tidak turun drastis pada musim panen sehingga memberikan dampak positif langsung kepada kesejahteraan petani secara luas.

2. Bantuan Kegiatan Fasilitas Bangunan Rumah Produksi Pengolahan Higienis Hortikultura

Kegiatan ini adalah kegiatan yang sumber dananya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura APBD Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatannya berupa fasilitas bangunan rumah produksi pengolahan higienis hortikultura yang ada di Kabupaten Tapin yaitu pada kelompok tani Semi Idaman Desa Shabah Kecamatan Bungur. (Rp 135.000.000) dan



bantuan sarana pengolahan dalam 1 unit mesin pengolahan bawang.

3. Penyerahan Bantuan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap

Penyerahan bantuan pencegahan dan pengendalian penyakit Jamur Akar Putih dan Kering Alur Sadap berupa *Trichoderma, sp* dan Formula ANKAS dari dana APBD Provinsi di Kelompok Tani Tri Usaha Desa Shabah Kecamatan Bungur.

1) Bantuan Penguatan Perlindungan Perkebunan

Belanja barang non operasional lainnya untuk Operasional Brigade Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Patroli Karlabun.

a) Kegiatan Registrasi UPPB

Penyerahan Bantuan Stimulus berupa Asam Semut /Asam Formiat.

Target Pembentukan UPPB pada tahun 2021 sebanyak 5 UPPB dan telah terealisasi yaitu UPPB Maju Bersama di Desa Suato Baru Kecamatan Salam Babaris, UPPB Maju Berkarya Desa Shabah Kecamatan Bungur, UPPB Bina Bersama Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat, UPPB Talikur Permai Desa Linuh Kecamatan Bungur dan UPPB Miwahan Untung Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang. Untuk menunjang kegiatan tersebut diberikan hibah untuk UPPB sebagai stimulus bagi UPPB yang terbentuk pada tahun 2021 berupa Asam Semut/Asam Formiat yang digunakan untuk petani sebagai pembeku lateks yang dianjurkan oleh pemerintah sebanyak 100 kg untuk setiap UPPB.



b) Kelompok Kerja (Pokja) Inventarisasi Dan Pengendalian Sisa Kredit Dan Sertifikat Petani Eks Proyek Upp Perkebunan (PRPTE) Dan Eks Proyek Berbantuan (TCSSP)

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.841.1/541/Sekr-2/IV/2021, tentang Kelompok Kerja (Pokja) inventarisasi dan pengendalian sisa kredit dan sertifikat petani eks proyek UPP Perkebunan (PRPTE) dan eks proyek Berbantuan (TCSSP) dimana salah satunya dianggotai oleh petugas kabupaten yang memfasilitasi proses penyelesaian sisa kredit dan penyerahan sertifikat petani.

Pada tahun 2021 dengan diadakannya pertemuan Pertemuan Inventarisasi dan pengendalian Sisa Kredit dan Sertifikat Petani Eks Proyek UPP Perkebunan (PRPTE) dilaksanakan untuk Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pelunasan Hutang Petani (BALDIT) EKS TCSSP beberapa petani telah difalitasi sebanyak 4 (empat) buah sertifikat, yaitu :

Tabel 3.5
Tempat dan Lokasi Tugas Pembantuan Pusat

No	NAMA PETANI	LOKASI/DESA	BULAN	Nomor Sertifikat
1	IDERAM	Tatakan	September	997
2	SUKARMAN	Matang Batas	Oktober	45
3	SALMI	Matang Batas	Oktober	59
4	MARIANAH	Kb.Habang Lama	Desember	963

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2021

c) Kegiatan Database Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP).

Kegiatan Database Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) dilaksanakan berupa pengumpulan data kelembagaan dari UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran) yang tersebar di Kabupaten Tapin.

4. Kegiatan Fasilitas Sarana Pembeku Lateks

Kegiatan Fasilitas Sarana Pembeku Lateks merupakan kegiatan dari APBN yang memberikan bantuan berupa Asam Formiat untuk UPPB yang terdapat di Kabupaten Tapin. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan mutu hasil bahan olah karet di anggota UPPB. Ada 13 UPPB yang menerima bantuan tersebut dengan banyaknya volume yang berbeda – beda sesuai dengan anggota UPPB. Pendistribusian bantuan tersebut di laksanakan pada Bulan Desember tahun 2021 dengan volume sebanyak 10.640 Liter asam formiat dengan kemasan botol ukuran 250 ml.

5. Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan berupa kordinasi kelembagaan penyuluhan melalui fasilitas peningkatan klasifikasi kelembagaan penyuluhan kecamatan (BPP) Kecamatan Bungur dari Utama menjadi Aditama berupa :

1. Rapat persiapan
 2. Rembug tani tingkat kecamatan
 3. Penyusunan Database Penyuluhan Tingkat Kecamatan
 4. Sosialisasi Peningkatan Kelas kelompok tani bagi petugas, penyuluh dan pengurus kelompok tani
 5. Penetapan kenaikan klasifikasi BPP kecamatan
- Realisasi Anggaran Rp. 25.987.100



6. Peningkatan Kualitas Penyuluh Melalui Uji Coba Penerapan Teknologi/Kaji Terap Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tabel 3.6
Uji Coba Penerapan Teknologi/Kaji Terap Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kecamatan	BPP/ Koordinator	Penyuluh ^{*)}	Desa/ WKPP	Komoditas	Teknologi Terap Kaji	Jadwal tanam
1.CL. Utara	Hj. Barlian, SP	Sunardi	Sungai Salai	Padi	Jajar Legowo	Apr-Sep
2.CL. Selatan	H. Triyanto, SP	Minarni, S.Pt.	Baringin A.	Padi	Jajar Legowo	Apr-Sep
3. Binuang	Supian Nor	Hamdan Arifin, S.Pt.	P.Pinang Utara	Padi	Jajar Legowo	Apr-Sep
4. Piani	A.I Rasyid Nazar, SP	M. Amin Kutbi	Miawa	Padi	Jajar Legowo	Apr-Sep
5.Salam Babaris	Akhmad Yani, SP	Khairansyah, SP	Suato Lama	Padi	Jajar Legowo	Apr-Sep

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2021

3.3. Permasalahan dan Kendala

a) Dinas Pertanian

Pada pelaksanaan tugas pembantuan baik dari anggaran Kementerian Pertanian maupun APBD provinsi tidak mendapati kendala secara berarti baik administrasi maupun teknis karena pada tahap perencanaannya pun telah dilakukan secara matang setahun sebelumnya dalam Rakortek Pertanian Kalimantan Selatan

b) Dinas Ketahanan Pangan

Secara garis besar Kabupaten Tapin sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat dibagi menjadi dua topografi, Daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Masing-masing lokasi yang berada di daerah tinggi dan rendah mempunyai permasalahan yang spesifik.

Adapun masalah dan kendala yang dialami oleh masing-masing Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai berikut :



- a. KWT Maju Lestari permasalahan yang dialami yaitu :
 - 1) Lahan demplot yang tidak memadai karena sulit mencari lahan yang tidak digenangi air
 - 2) Pekarangan para anggota Kelompok Tani Wanita (KWT) sempit
 - 3) Peran petugas pendamping/PPL belum optimal
 - 4) Administrasi kegiatan kelompok belum baik dan benar
- b. KWT Teratai Putih
 - 1) Pekarangan para anggota KWT sempit
 - 2) Peran petugas pendamping/PPL belum optimal
 - 3) Administrasi kegiatan kelompok belum baik dan benar
- c. KWT Sekar Ayu
 - 1) Lokasi KWT Sekar Ayu hampir sama dengan KWT Maju Lestari
 - 2) PPL Swadaya hanya dari Anggota KWT itu sendiri karena keterampilan masih minim
 - 3) Lokasi KWT lumayan jauh dari kantor dan rumah kepala desa menyebabkan kurangnya perhatian dan pembinaan dari aparat Desa Masta kepada kelompok
 - 4) Dinamika kelompok menjadi sebuah masalah yang signifikan karena pengetahuan anggota masih rendah serta rumah anggota yang jarang dan jauh menyebabkan kerjasama kelompok dalam mengolah serta memelihara kebun bibit dan demplot menjadi terhambat
 - 5) Administrasi belum memadai, walau semua buku sudah tersedia
- d. KWT Mawar
 - 1) Lokasi KWT berada di dataran rendah sehingga sepanjang tahun berair, kecuali musim kemarau
 - 2) Pekarangan anggota yang sempit
 - 3) Peran petugas pendamping / PPL belum maksimal

e. KWT Mayang

- 1) Pendamping /PPL jarang berkunjung atau kurang aktif
- 2) KWT tidak mempunyai sarana pengolahan hasil maupun akses pasar yang lebih luas sehingga harga anjlok dan tidak terolah dengan baik
- 3) Administrasi kegiatan kelompok masih belum tertata dengan baik

f. KWT Ibu-ibu Darmawan

- 1) Kunjungan dan bimbingan PPL yang kurang atau boleh dikatakan tidak ada
- 2) Kurangnya peran aparatur kelurahan yang sangat dibutuhkan
- 3) Dinamika dan kerjasama kelompok yang masih kurang maksimal

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

a) Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kami senantiasa mengharapkan koordinasi yang baik serta pembinaan dari pusat maupun provinsi sehingga dapat memberikan fasilitas dan bantuan yang tepat dan terbaik bagi masyarakat petani dan kelompok tani.

b) Dinas Ketahanan Pangan

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi saran yang diberikan :

a. KWT Maju Lestari

- 1) Demplot dibuat panggung bertingkat, untuk mengoptimalkan lahan, dan menghindari air pasang surut dengan system pertanaman polybag;
- 2) Pekarangan anggota juga agar dibuat panggung bertingkat untuk tempat meletakkan polybag di pekarangan anggota;



- 3) Petugas pendampingan/PPL yang berdomisili tidak di desa tersebut kami menyarankan kepada Dinas Pertanian agar dapat lebih memotivasi PPL yang bersangkutan untuk lebih sering hadir ke Desa yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan;
- 4) Pengurus kelompok lebih sering berkoordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten, baik melalui telepon maupun WA Group, tidak hanya menunggu kunjungan resmi tim teknis Kabupaten.

b. KWT Teratai Putih

- 1) Dibuat panggung bertingkat untuk tempat meletakkan polybag di pekarangan anggota;
- 2) Dinas Pertanian agar lebih memberikan pengertian kepada petugas pendamping/PPL bahwa kegiatan P2L adalah program nasional dan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya Dinas Ketahanan Pangan tapi melibatkan semua sektor;
- 5) Peran Tim Teknis Kabupaten sangat perlu ditingkatkan.

c. KWT Sekar Ayu

- 1) Dibuat panggung bertingkat untuk pertanaman di polybag pada musim air melimpah kalau sudah memasuki musim kemarau penanaman dilakukan langsung ditanah;
- 2) Dinas Pertanian agar dilakukan pelatihan-pelatihan Teknis bagi para PPL Swadaya yang ada di Kabupaten Tapin;
- 3) Pengurus kelompok dalam rapat maupun pelaksanaan kegiatan kelompok agar sesekali mengundang Kepala Desa dan Aparat Desa yang lain untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud;



- 4) Membuat jadwal kegiatan anggota secara bergantian untuk pemeliharaan pertanaman baik kebun bibit maupun demplot;
- 5) Pengurus kelompok untuk berkoordinasi kepada Tim Teknis Kabupaten Tapin secara berkala, bagaimana cara administrasi yang baik.

d. KWT Mawar

- 1) Demplot dibuah panggung bertingkat untuk mengoptimalkan lahan dan menghindari air pasang dengan system pertanaman polybag;
- 2) Pada pekarangan anggota juga dibuat panggung bertingkat untuk tempat meletakkan polybag di pekarangan anggota;
- 3) Ketua kelompok dan Kepala Desa untuk berkoordinasi lebih intensif dengan PPL yang bersangkutan.

e. KWT Mayang

- 1) Pengurus kelompok agar lebih sering berkoordinasi dan mengundang PPL yang bersangkutan dalam kegiatan kelompok, tembusan undangan kegiatan agar disampaikan juga kepada Dinas Ketahanan Pangan dan terutama Dinas Pertanian atasan langsung dari PLL;
- 2) Kelompok bisa berinovasi dalam pengolahan hasil panen mereka, baik berupa makanan olahan, maupun berusaha mencari pangsa pasar yang lebih luas melalui media sosial dan lain-lain;
- 3) Koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten lebih diintensifkan lagi melalui WA Group.

f. Peta Kerawanan Pangan

Perlunya perbaikan SDM untuk pembuatan peta kerawanan di daerah Kabupaten Tapin.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat salah satunya adalah pelayanan Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota bahwa standar pelayanan minimal.

Standar pelayanan Minimal pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :

- 1) Kesesuaian kewenangan,
- 2) Ketersediaan,
- 3) Keterjangkauan,
- 4) Kesiambungan,
- 5) Keterukuran dan
- 6) Ketepatan sasaran.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten Tapin terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini,
- b. Pendidikan dasar dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Dan Penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik



yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, serta penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini meliputi :

- a. Buku gambar
- b. Alat mewarnai

Adapun Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester
- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Dan Perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah dasar meliputi :

- a. Buku teks pelajaran
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Sedangkan Perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah menengah pertama meliputi :

- a. Buku teks pelajaran
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan



alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Kemudian Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan kesetaraan meliputi :

- a. Modul belajar
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai strategi mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, agar jangan sampai ada anak sekolah yang tidak sekolah baik pada jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dan juga ada anak usia sekolah yang sudah sekolah tapi rentan atau berpotensi putus sekolah karena kemiskinan dan belum mendapat KIP, PKH dan sebagainya maka pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan penerapan Standar pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Adapun target untuk tahun 2021 adalah pada tabel berikut ini :



TABEL 4.1
TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		Keterangan (permasalahan)
		Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$	Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	27.744 Orang	27.782 Orang	100,14 %	30.818 Orang	29.532 Orang	Masih ada siswa yang tidak berusia 7-15 tahun. Ada siswa yang berusia kurang dari 7 tahun.
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	700 Orang	684 Orang	97,71%	38.453 Orang	800 Orang	
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.000 Orang	4.696 Orang	93,92%	6.659 Orang	5.500 Orang	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021



4.1.3. Realisasi

Realisasi SPM bidang pendidikan oleh kabupaten dapat dilihat target yang telah dicapai pada pendidikan dasar ada sejumlah 4 sasaran dalam penerapan SPM pendidikan diharapkan Ketercapaian target tersebut didukung karena adanya beberapa kegiatan seperti penanganan anak tidak bersekolah pada tahun 2020 ini dengan melaksanakan pendataan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, dan bantuan untuk siswa miskin dengan penyediaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD penerima SPM, penyediaan perlengkapan dasar peserta didik Sekolah dasar (SD), penerima SPM penyediaan perlengkapan dasar peserta didik SMP penerima SPM sedangkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan kegiatan seperti Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Penilaian Angka kredit jabatan fungsional serta kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru.

Namun masih banyak kendala yang ditemui dilapangan untuk memenuhi standar yang diharapkan disamping biaya atau anggaran yang masih minim sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada penyediaan pelayanan dasar peserta didik.

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan pada tahun 2021, dimana pada jenis pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) terdapat capaian 83,19 persen dimana ada sebanyak 25.756 orang yang bersekolah pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama dan untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan dengan indikator jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan terdapat capaian 2,26 % atau dengan kata lain ada sejumlah anak yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan sebanyak 913 orang sedangkan untuk jenis



pelayanan dasar Pendidikan anak usia dini dengan indikator jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun dengan capaian 69,57 persen, rendahnya capaian yang didapat disebabkan rendahnya pemahaman dan pengolahan data capaian Bidang Teknis yang menangani tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Pendidikan.



TABEL 4.2
REALISASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2021

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEK OLAH/T AMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs))	30.960 Orang	25.756 Orang	83,19 %	340 Peserta Didik	340 Peserta Didik	100 %	91,60 %	Sangat Tinggi
2	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.)	40.392 Orang	913 Orang	2,26 %	-	-	-	1,13 %	Rendah
3	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	6.685 Orang	4.651 Orang	69,57 %	130 Peserta Didik	130 Peserta Didik	100 %	84,79 %	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021



Daftar penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Daftar Siswa Kurang Mampu Penerima Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021 :

TABEL 4.3
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU PENERIMA ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

No	Nama Siswa	Asal Sekolah	Kelas
1	Ahmad Qusairi Hamzah	Tk Raudhatul Jannah	A
2	Muhammad Dhaifi Ibrahim	Tk Raudhatul Jannah	A
3	Rifka Maulida Azzahra	Tk Raudhatul Jannah	A
4	Naura	Tk Raudhatul Jannah	A
5	Elisya Mahfujah	Tk Raudhatul Jannah	A
6	Fitriyanazua	Tk Raudhatul Jannah	A
7	Muhammad Azka Alfaridzky	Tk Raudhatul Jannah	B
8	Muhammad Nasir	Tk Raudhatul Jannah	B
9	Muhammad Rezki Mubarak	Tk Raudhatul Jannah	B
10	Nur Salsabilla	Tk Raudhatul Jannah	B
11	Nor Laila	Tk Raudhatul Jannah	B
12	Nafisah Azzahra	Tk Raudhatul Jannah	B
13	Nor Kamalia	Tk Raudhatul Jannah	B
14	Saidah Nafisah	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
15	Nadia Maulida.H.	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
16	Helyatul Aulia	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
17	M.Fikri Aditia	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
18	A.Budi Hartono	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
19	Juanta A.Vahreza	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
20	Rezky Maulana	Tk Nurul Muhibbin	Kel.B
21	Rima Nor Latifah	Tk.Anggrek	B
22	Adiba Raiya Ramadani	Tk.Anggrek	B
23	Lestiana Nor Latifah	Tk.Anggrek	B
24	M. Nasrullah	Tk.Anggrek	B
25	M. Iqbal	Tk.Anggrek	B
26	Aliya Rizkynazwa az-zahra	Tk.Anggrek	A
27	M. Faruq	Tk.Anggrek	A



28	Nor Aliyah	Tk.Anggrek	A
29	Tasya Anjani	Tk.Anggrek	A
30	Siti Khairunnisa	Tk.Anggrek	A
31	Nayla Azkia	TK Al-Mukhlisin	Kelompok A
32	Hamdani	TK Al-Mukhlisin	Kelompok A
33	Muhammad Najib	TK Al-Mukhlisin	Kelompok A
34	Khulifah Maulida	TK Al-Mukhlisin	Kelompok A
35	Bilqis	TK Al-Mukhlisin	Kelompok A
36	Nor Hatipah	TK Al-Mukhlisin	Kelompok B
37	Nor Halisa	TK Al-Mukhlisin	Kelompok B
38	Muhammad Akbar	TK Al-Mukhlisin	Kelompok B
39	Putri Najwa	TK Al-Mukhlisin	Kelompok B
40	Rusnia	TK Al-Mukhlisin	Kelompok B
41	Ahmad Biyadi	TK Kamboja	Kelompok A
42	Muhammad Raffi	TK Kamboja	Kelompok A
43	Muhammad Rifa'i	TK Kamboja	Kelompok A
44	Muhammad Nafis	TK Kamboja	Kelompok A
45	Muhammad Sahid	TK Kamboja	Kelompok A
46	Nur Hamidah	TK Kamboja	Kelompok B
47	Nurul Salsabila	TK Kamboja	Kelompok B
48	Muhammad Hafi Abdan	TK Kamboja	Kelompok B
49	Raihanatun	TK Kamboja	Kelompok B
50	Mariatul	TK Kamboja	Kelompok B
51	Firda Ariyani	TK Kartini Kec.Bungur	A
52	Muhammad Nazib Al Mubarak	TK Kartini Kec.Bungur	A
53	Muhammad Sidik	TK Kartini Kec.Bungur	A
54	Akhmad Shabri	TK Kartini Kec.Bungur	B
55	Elisa Fitri	TK Kartini Kec.Bungur	B
56	Keisha Naufalin Fitria	TK Kartini Kec.Bungur	B
57	Muhammad Amin	TK Kartini Kec.Bungur	B
58	Muhammad Rizki Maulana	TK Kartini Kec.Bungur	B
59	Muhammad Wildan	TK Kartini Kec.Bungur	B
60	Siti Adelia	TK Kartini Kec.Bungur	B
61	Marinka Putri Ramadini	TK As Shadiqin	B
62	Raimah	TK As Shadiqin	B
63	Selipi Yanti	TK As Shadiqin	B
64	Siti Mukhlisah	TK As Shadiqin	B
65	Siti Shalehah	TK As Shadiqin	B
66	Miti Hardi Yanti	TK As Shadiqin	A
67	M. Fauzan	TK As Shadiqin	A
68	M. Hisya	TK As Shadiqin	A
69	Raya Aprilia	TK As Shadiqin	A
70	Riva Lina Putri	TK As Shadiqin	A
71	Muhammad Ilham	TK Melati	B



	Fadillah		
72	Andun Surga Ningtias Prasetia	TK Melati	B
73	Muhammad Rafa Aldiyanto	TK Melati	B
74	Muhammad Al Aziz	TK Melati	A
75	Noor Fitriana	TK Melati	B
76	Siti Hadijah	TK Melati	B
77	Emir Faris Ansyari	TK Melati	B
78	Hanifa Hasna Salsabila	TK Melati	B
79	Noor Elfiana Annazma	TK Melati	B
80	Muhammad Feryansyah	TK Melati	A
81	Afifah Humari Musyarah	TK Mustika	A2
82	Ahmad Firza Hazki	TK Mustika	A1
83	Ahmad Zaini	TK Mustika	B1
84	Muhammad Ali Hanafi	TK Mustika	A2
85	Muhammad Padillah	TK Mustika	A2
86	Muhammad Rizal	TK Mustika	B1
87	Muhammad Zidan Latif	TK Mustika	B2
88	Nor Adzana Hikmah	TK Mustika	A1
89	Rahmawati	TK Mustika	B1
90	Siti Hajar	TK Mustika	A2
91	Kevin Aprilio	TK Cahaya Meratus	A
92	Agus Fernanda Kurdi	TK Cahaya Meratus	A
93	Anisa	TK Cahaya Meratus	A
94	Areva Marselina	TK Cahaya Meratus	A
95	Wahyu Dianur	TK Cahaya Meratus	A
96	Muhammad Fajar	TK Cahaya Meratus	A
97	Centini	TK Cahaya Meratus	A
98	Kila	TK Cahaya Meratus	B
99	Wahyu Saputra	TK Cahaya Meratus	B
100	Sahrini	TK Cahaya Meratus	A
101	Suci Kurniawati	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	B 2
102	Mixel Supiagus	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	B 2
103	Aisyiah Norhidayah	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	B 2
104	Aisyah Nuha Zahira	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	B 1
105	Siti Maisorah	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	B 2
106	Muhammad Ilmi	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	A 1
107	Rafli Arfa Assaid	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	A 1
108	Ihwan Khomarudin	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	A 2
109	Rijal Mut'taif	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	A 1
110	Rara Natasya	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	A 1
111	Annisa Salsabila	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	A
112	M. Nurrafa Yasiry	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	A
113	M. Lutfhi Habibi	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	A
114	Nur Aisyah Faiha	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	A



115	Rabiatul Adawiyah	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	A
116	Ahmad Qusairi	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
117	Fathul Jannah	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
118	Hayka Zahra Putri	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
119	M. Rizqan Mahmud	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
120	Muhammad Ramadhani	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
121	Nursalsabila	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
122	Nabila Aisyah	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
123	Nazwa Anggraini	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
124	Nurul Hikmah	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 1
125	Humaira Al Zahra	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2
126	Khairul Rahman	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2
127	M. Abdurrahman	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2
128	M. Ziyad Ramadhan	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2
129	Siti Khadijah Al Zahra	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2
130	Miftahul Hafiz	TK Tunas Tapin Kec. Tapin Utara	B 2

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021

b. Pendidikan Dasar

Penerima Bantuan Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Siswa Kurang Mampu Berprestasi Jenjang SD Tahun 2021 :

TABEL 4.4
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU PENERIMA BANTUAN ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2021

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN		ASAL SEKOLAH	KELAS	JUMLAH TERIMA
		L	P			
1	Risnawati		P	SDN RANTAU KIWA 1	1	1 PAKET
2	M. Reyhan	L		SDN RANTAU KIWA 2	6	1 PAKET
3	Riduan	L		SDN RANTAU KANAN 1	6	1 PAKET
4	Muhammad Fauzie Musyafa	L		SDN RANTAU KANAN 2	5	1 PAKET
5	Muhammad Al Akhyar	L		SDN RANTAU KANAN 3	1	1 PAKET
6	Helda Reghina Jannati		P	SDN RANGDA MALINGKUNG 1	3	1 PAKET
7	Muhammad Rafi Fadilah	L		SDN RANGDA MALINGKUNG 3	6	1 PAKET
8	Arifin Ilham	L		SDN RANGDA MALINGKUNG 4	5	1 PAKET
9	Lidia		P	SDN RANGDA MALINGKUNG 5	4	1 PAKET
10	Saidatul Akwan		P	SDN KUPANG 1	3	1 PAKET
11	M.Heriadi	L		SDN KUPANG 2	1	1 PAKET
12	Nor Aisa Nabila		P	SDN ANTASARI	3	1 PAKET



13	Asniah		P	SDN ANTASARI HILIR	4	1 PAKET
14	Nor Kamila Azizah		P	SDN BANUA HALAT KANAN	1	1 PAKET
15	Jolie Shiedqia		P	SDN BANUA HAYAR HULU	2	1 PAKET
16	Ahmad Alfarouq Hidayatullah	L		SDN PERINTIS RAYA	4	1 PAKET
17	Nor Khalisa		P	SDN SERAWI	4	1 PAKET
18	inayah		P	SDN PANDAHAN 1	5	1 PAKET
19	Muhammad Abni	L		SDN PANDAHAN 2	2	1 PAKET
20	Muhammad Arsyad Maulana	L		SDN PEMATANG KARANGAN	6	1 PAKET
21	Muhammad Zaini	L		SDN PEMATANG KARANGAN HULU	2	1 PAKET
22	Ahmad kusairi	L		SDN PEMATANG KARANGAN HILIR	4	1 PAKET
23	Muhammad Rapi'i	L		SDN RAWA MUNING 1	4	1 PAKET
24	Abdul kasim	L		SDN HIYUNG 1	4	1 PAKET
25	Ahmad Zainur Ridha	L		SDN HIYUNG 2	1	1 PAKET
26	Ahmad Afriadi	L		SDN KEPAYANG	5	1 PAKET
27	Regina Putri		P	SDN PANDULANGAN 1	5	1 PAKET
28	KHALIFATUL NAZUA		P	SDN PANDULANGAN 2	5	1 PAKET
29	Nur Zahwa Annisa		P	SDN TIRIK	4	1 PAKET
30	NOR AULIA		P	SDN LABUNG 1	5	1 PAKET
31	Nor Kamilah		P	SDN LABUNG 2	1	1 PAKET
32	Anisa Zahra		P	SDN LABUNG 2	1	1 PAKET
33	Nida		P	SDN MANDURIAN	3	1 PAKET
34	Nayra Qurrata A'Yun		P	SDN MANDURIAN HILIR	2	1 PAKET
35	M . Samman	L		SDN SUNGAI BAHALANG	5	1 PAKET
36	Nurul Amalia Rahmah		P	SD IT AN-NUR	4	1 PAKET
37	Muhammad Daud Alpatani	L		SDN Lawahan 1	2	1 PAKET
38	Muhamad Habibi	L		SDN Tambarangan 2	1	1 PAKET
39	M.Rasyid	L		SDN Tatakan 1	1	1 PAKET
40	Padilah	L		SDN Harapan Masa 1	2	1 PAKET
41	Sahrini Al Dita		P	SDN Tambarangan 1	4	1 PAKET
42	Muhammad Rayhan	L		SDN Tambarangan 3	5	1 PAKET
43	Muhammad Norman	L		SDN Harapan Masa 2	2	1 PAKET
44	Siti khadijah		P	SDN Swato Tatakan 1	2	1 PAKET
45	Muhammad Zaki	L		SDN Lawahan Cempaka	21	1 PAKET
46	Ahmad Rifani	L		SDN Tatakan 3	6	1 PAKET
47	Nuwa Herlina		P	SDN Swato Tatakan 2	2	1 PAKET
48	Nor Raisa Amira		P	SDN Tandui 1	2	1 PAKET
49	Nor Ainun Nazah		P	SDN Tatakan 2	V	1 PAKET
50	Naura		P	SDN Tandui 2	1	1 PAKET
51	Askana Sakhiya		P	SDN Timbaan 1	2	1 PAKET



52	Nur Syeva		P	SDN Rumintin 1	21	1 PAKET
53	Atiyah		P	SDN Timbaan 2	1	1 PAKET
54	M. Arsyad Ilmy	L		SDN BAKARANGAN 2	1	1 PAKET
55	Muhammad Fauzan	L		SDN GADUNG KERAMAT	1	1 PAKET
56	Zahra		P	SDN GADUNG HILIR	5	1 PAKET
57	Muhammad Iqbal	L		SDN BUNDUNG 2	4	1 PAKET
58	Dinda Ainayya		P	SDN BAKARANGAN 1	3	1 PAKET
59	Aulia RAHMAH		P	SDN TANGKAWANG	2	1 PAKET
60	Nur Khalifa Syagira		P	SDN BUNDUNG 1	1	1 PAKET
61	M. Qurtubi	L		SDN WARINGIN DALAM	3	1 PAKET
62	Hibzul Mubdi	L		SDN PAUL	3	1 PAKET
63	Selvia Fitri		P	SDN PARIGI SIMBAR	1	1 PAKET
64	Muhammad Sauqi	L		SDN PARIGI KACIL	3	1 PAKET
65	Husni MUBARAK	L		SDN MIAWA	21	1 PAKET
66	Halimah		P	SDN MIAWA	21	1 PAKET
67	Arni Maulida		P	SDN MIAWA	4	1 PAKET
68	Marsha Aulia		P	SDN MIAWA	5	1 PAKET
69	Ahmad Yozi Anarki	L		SDN BARAMBAN	2	1 PAKET
70	Mutiara Agustina Ramadhani		P	SDN BARAMBAN	21	1 PAKET
71	Windi Riski Aditia	L		SDN BARAMBAN	6	1 PAKET
72	Nadi	L		SDN BATU AMPAR	21	1 PAKET
73	Norsyifa Salbabila		P	SDN BATU AMPAR	4	1 PAKET
74	Norhalisa		P	SDN BATU AMPAR	5	1 PAKET
75	Akila ZAHRA		P	SDN BANUA PADANG	2	1 PAKET
76	Khafipah Permadi		P	SDN BUNGUR BARU	4	1 PAKET
77	Siti Maisyarah		P	SDN BUNGUR	4	1 PAKET
78	Muhammad Noor Rizky	L		SDN TIMBUNG	4	1 PAKET
79	Anggun Sabila		P	SDN SABAH	2	1 PAKET
80	Muhammad Riski	L		SDN KALUMPANG 1	5	1 PAKET
81	Meirina		P	SDN KALUMPANG 2	6	1 PAKET
82	Siti Maisyarah		P	SDN KALUMPANG 3	3	1 PAKET
83	Siti SAUDAH		P	SDN LINUH 2	5	1 PAKET
84	Siti Fatimah		P	SDN PAR1NG GULING	2	1 PAKET
85	Dhafita Nizza Nur Halimah		P	SDN RANTAU BUJUR 1	1	1 PAKET
86	Lia		P	SDN RANTAU BUJUR 2	5	1 PAKET
87	Muhammad Nafis	L		SDN HANGU1 1	5	1 PAKET
88	Muhammad Fauzi	L		SDN HANGU1 1	6	1 PAKET
89	Ellis Sri Yani		P	SDN B1NDERANG	2B	1 PAKET
90	Fatimah		P	SDN LOKPAIKAT 3	2	1 PAKET
91	Muhammad Dimas	L		SDN BITAHAN 2	6	1 PAKET
92	Affiqa Azzahra		P	SDN BITAHAN 1	2B	1 PAKET
93	Anshori Ahmad	L		SDN BITAHAN BARU	3	1 PAKET



94	Husma Sari		P	SDN LOKPAIKAT 1	2	1 PAKET
95	Bilkis Humairoh		P	SDN AYUNAN PAPAN	1	1 PAKET
96	Atika Zahra Ratifa		P	SDN PUNCAK HARAPAN	1	1 PAKET
97	Farid Wajidi	L		SDN Beringin B	21	1 PAKET
98	Muhamad Al Amin	L		SDN Beringin 1	1	1 PAKET
99	Jannatul Ma'wa		P	SDN Beringin 2	1	1 PAKET
100	Hidayah		P	SDN Baulin	5	1 PAKET
101	Khadijah		P	SDN Marampiau	5	1 PAKET
102	Shelvia Devi Kabilla		P	SDN Marampiau Hilir	2	1 PAKET
103	Abdurrahman Sidik	L		SDN Pabaungan Hulu	V	1 PAKET
104	Muhammad Ali Muddin	L		SDN Pabaungan Hilir 1	2	1 PAKET
105	Muhammad Sadiq	L		SDN Pabaungan Hilir 2	2	1 PAKET
106	Mislan	L		SDN Pabaungan Pantai	1	1 PAKET
107	Siti Zhafirah		P	SDN Rutas 1	1	1 PAKET
108	Noor Khalifah Hasanah		P	SDN Sungai Rutas 2	2	1 PAKET
109	Rahmad Ramadhan	L		SDN Candi Laras	6	1 PAKET
110	Muhammad Anwar	L		SDN Margasari Ulu	1	1 PAKET
111	Saudah		P	SDN PARIOK 1	5	1 PAKET
112	Nurul Amelia		P	SDN SUNGAI SALAI HILIR	3	1 PAKET
113	Siti Mukaramah		P	SDN BATALAS	5	1 PAKET
114	Muhammad Muliyaazid	L		SDN KALADAN 1	6	1 PAKET
115	Pusvita Dewi		P	SDN Margasari ilir 2	4	1 PAKET
116	Karmila		P	SDN RAWANA HULU	1	1 PAKET
117	Rahmiyati		P	SDN RAWANA HILIR	5	1 PAKET
118	Agus	L		SDN SUNGAI PUTING	3	1 PAKET
119	Syariah		P	SDN PARIOK 2	1	1 PAKET
120	Balkis		P	SDN TELUK HAUR	3	1 PAKET
121	Aulia Rahmah		P	SDN BUAS BUAS 2	3	1 PAKET
122	Siti Aisyah Norsifa		P	SDN BUAS BUAS HILIR	2	1 PAKET
123	Raihanah		P	SDN BUAS BUAS 1	1	1 PAKET
124	Amir	L		SDN SUNGAI SALAI	3	1 PAKET
125	Hilyah		P	SDN KALADAN 2	2	1 PAKET
126	Nurul Al'munawarah		P	SDN MARGASARI ILIR 1	6	1 PAKET
127	Muhammad Nuh Algani	L		SDN SAWAJA	2	1 PAKET
128	M.Taufik	L		SDN BINUANG 1	4	1 PAKET
129	Junatan Alpiadi	L		SDN BINUANG 2	3	1 PAKET
130	Khadijah		P	SDN BINUANG 3	4	1 PAKET
131	Muhammad Raya Saputra	L		SDN BINUANG 4	5	1 PAKET
132	Cinta Mie Azara		P	SDN BINUANG 6	3	1 PAKET
133	Siti Maryam		P	SDN BINUANG 7	2	1 PAKET
134	Siti Fathul Janah		P	SDN BINUANG 8	1	1 PAKET
135	Muhammad Saipul	L		SDN BINUANG 9	2	1 PAKET



136	Azkie Salsabila		P	SDN BINJUANG 10	2	1 PAKET
137	Romiy Maylano	L		SDN TUNGKAP 1	4	1 PAKET
138	Sifa Khatma		P	SDN TUNGKAP 2	5	1 PAKET
139	Nadia		P	SDN PULAU PINANG 1	1	1 PAKET
140	AiSYAH HUMAIROH		P	SDN PULAU PINANG 2	2	1 PAKET
141	Isna Juliyana		P	SDN PULAU PINANG UTARA	2A	1 PAKET
142	Adzkie Samha Saufa		P	SDN A.YANI PURA 1	1	1 PAKET
143	Muhammad Maulana	L		SDN PUALAM SAR1 1	4	1 PAKET
144	Muhamat Rafa	L		SDN PUALAM SAR1 2	1	1 PAKET
145	Shafira Hijjatul Marwah		P	SDN PUALAM SAR1 3	6	1 PAKET
146	Atiqah Azzahra		P	SDN GUNUNG BATU	3	1 PAKET
147	Siti Aisyah		P	SDN PADANG SAR1	1	1 PAKET
148	Nino Aminati Soleha		P	SDN Hatungun 1	2	1 PAKET
149	Robbidinnor	L		SDN Hatungun 2	2	1 PAKET
150	Jumiati		P	SDN Bagak	1	1 PAKET
151	Muhammad Reza Fahlevi	L		SDN Tarungin 1	5	1 PAKET
152	Nisfu Alyanti		P	SDN Batu Hapu 1	3	1 PAKET
153	Akhmad Fachmi	L		SDN Batu Hapu 2	5	1 PAKET
154	Maulida Hasanah		P	SDN Tarungin 2	1	1 PAKET
155	Nurul Hafifah		P	SDN Burakai	3	1 PAKET
156	Putry Isnaini		P	SDN Matang Batas	5	1 PAKET
157	Risma Nur Cahyanti		P	SDN Asam Randah	4	1 PAKET
158	Sentiawati		P	SDN Bagak	1	1 PAKET
159	Siti Norlaila		P	SDN SALAM BABARIS 1	6	1 PAKET
160	Muhammad Azis Kurniawan	L		SDNSALAM BABARIS 2	21	1 PAKET
161	Zuliana Rahmah		P	SDN SALAM BABARIS 3	1	1 PAKET
162	Muhammad Rahman	L		SDN SALAM BABARIS 4	21	1 PAKET
163	M.Nafis Athallah	L		SDN SWATO 1	6	1 PAKET
164	Muhammad Adityaramadani	L		SDN SWATO 2	2	1 PAKET
165	Fathinatul'at2qah		P	SDN SWATO 3	1	1 PAKET
166	Della Ema Prahesti		P	SDN SWATO BARU	1	1 PAKET
167	Muhammad Rizki	L		SDN PANTAI CABE	6	1 PAKET
168	Ahmad Husairi	L		SDN KEMBANG HABANG 1	1	1 PAKET
169	Noorhaliza		P	SDN KEMBANG HABANG 2	21	1 PAKET
170	Muhammad Noval	L		SDN KEMBANG HABANG 3	6	1 PAKET

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021

Penerima Bantuan Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar



Pelayanan Minimal Untuk Siswa Kurang Mampu Berprestasi Jenjang SMP Tahun 2021 :

TABEL 4.5
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU BERPRESTASI
PENERIMA ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

No	Nama	Asal sekolah	Kelas	Barang yang diterima		
				Buku	Penggaris	Tipp exx
1	Ahmad Rehan	SMP Islam Darul Muhibbien	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
2	Iqbal Nadi Syaputra	SMP Islam Darul Muhibbien	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
3	Muhammad Amin	SMP Islam Darul Muhibbien	VII A	1 paket	1 bh	1 bh
4	Wahyu Agustino Saputra	SMP Islam Darul Muhibbien	VII A	1 paket	1 bh	1 bh
5	Zahratozzita	SMP Islam Darul Muhibbien	VII C	1 paket	1 bh	1 bh
6	Siti Nor Fadila	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1 paket	1 bh	1 bh
7	Afifah Afra	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1 paket	1 bh	1 bh
8	Tyara Noor Awalliah	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1 paket	1 bh	1 bh
9	Ahmad Rifani	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII A	1 paket	1 bh	1 bh
10	Husnol Khatimah	SMPN 1 Tapin Tengah	VII C	1 paket	1 bh	1 bh
11	Habibi	SMPN 1 Tapin Tengah	IX A	1 paket	1 bh	1 bh
12	Muhammad Saubi	SMPN 1 Tapin Tengah	IX B	1 paket	1 bh	1 bh
13	M. Azmi Fazril	SMPN 1 Tapin Tengah	VII A	1 paket	1 bh	1 bh
14	Akhsanu Nadia	SMPN 1 Tapin Tengah	VII C	1 paket	1 bh	1 bh
15	Muhammad Hapi Z	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII B	1 paket	1 bh	1 bh
16	Risma Ariyanti	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII C	1 paket	1 bh	1 bh
17	Saldi	SMP NEGERI 2 PIANI	VII	1 paket	1 bh	1 bh
18	Gipi	SMP NEGERI 2 PIANI	VII	1 paket	1 bh	1 bh
19	Pira	SMP NEGERI 2 PIANI	VII	1 paket	1 bh	1 bh
20	Sira	SMP NEGERI 2 PIANI	VII	1 paket	1 bh	1 bh
21	Lala Azizah	SMP NEGERI 2 PIANI	VII	1 paket	1 bh	1 bh
22	Rindi	SMP NEGERI 2 PIANI	VIII B	1 paket	1 bh	1 bh
23	Ahmad Hafiz Rizki	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh
24	Alia Salsa Bela	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh
25	Ardiansyah	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh
26	Meidina Yanti	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh



27	Muhammad Nor Aldi	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh
28	Norhidayah Tapin Yati	SMP Muhammadiyah Rantau	VII	1 paket	1 bh	1 bh
29	M. Arfi Abdan	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	VIII A	1 paket	1 bh	1 bh
30	Fatimah	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	IX B	1 paket	1 bh	1 bh
31	Nor Halidah	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	IX B	1 paket	1 bh	1 bh
32	Maulidah	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	IX B	1 paket	1 bh	1 bh
33	Siti Khairunnisa	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	IX A	1 paket	1 bh	1 bh
34	Ahmad Madali	SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	IX A	1 paket	1 bh	1 bh
35	Ameliya Triyandini	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	8	1 paket	1 bh	1 bh
36	Noor Aida	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	8	1 paket	1 bh	1 bh
37	Oktavia Suryaningsih	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	8	1 paket	1 bh	1 bh
38	Fhara Mauliya Ahni	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	8	1 paket	1 bh	1 bh
39	Siti Maibella Zahra	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	9	1 paket	1 bh	1 bh
40	Siti Maimunah	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	9	1 paket	1 bh	1 bh
41	Vera Artika Sari	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	9	1 paket	1 bh	1 bh
42	Abdul Galib	SMP NEGERI 1 BINUANG	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
43	Cahaya Neng Harsuci	SMP NEGERI 1 BINUANG	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
44	Muhammad Rendy	SMP NEGERI 1 BINUANG	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
45	Ahmad Riandi	SMP NEGERI 1 BINUANG	VIII C	1 paket	1 bh	1 bh
46	Maisyah Sofa Azkia	SMP NEGERI 1 BINUANG	VIII C	1 paket	1 bh	1 bh
47	Norhasanah	SMP NEGERI 1 BINUANG	VIII C	1 paket	1 bh	1 bh
48	Akhmad Khairil	SMP NEGERI 1 BINUANG	XI B	1 paket	1 bh	1 bh
49	Fatma Ridha	SMP NEGERI 1 BINUANG	XI B	1 paket	1 bh	1 bh
50	Ahmad Fauzi	SMP NEGERI 1 PIANI	7	1 paket	1 bh	1 bh
51	Bagus Nurliansyah	SMP NEGERI 1 PIANI	9	1 paket	1 bh	1 bh
52	Sulis Fatimah	SMP NEGERI 1 PIANI	8	1 paket	1 bh	1 bh
53	Nor Adilliani	SMP NEGERI 1 PIANI	8	1 paket	1 bh	1 bh
54	Abdul Karem	SMP NEGERI 1 PIANI	9	1 paket	1 bh	1 bh
55	Muhammad Aria	SMP NEGERI 1 PIANI	9	1 paket	1 bh	1 bh



56	Muhammad Rifki	SMP NEGERI 1 PIANI	9	1 paket	1 bh	1 bh
57	Ahmad Khairil Musyafa	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VII	1 paket	1 bh	1 bh
58	Ahmad Ariyadi	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VII	1 paket	1 bh	1 bh
59	Ahmad Mujahid	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VII	1 paket	1 bh	1 bh
60	Dila	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VII	1 paket	1 bh	1 bh
61	Muhammad Amin	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VII	1 paket	1 bh	1 bh
62	Hasanudin	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
63	Muhammad Afriansyah	SMPN 3 CLU	IX	1 paket	1 bh	1 bh
64	Muhammad Muallimin	SMPN 3 CLU	IX	1 paket	1 bh	1 bh
65	Sholatiah	SMPN 3 CLU	IX	1 paket	1 bh	1 bh
66	Rahimah	SMPN 3 CLU	IX	1 paket	1 bh	1 bh
67	Siti Zulfa	SMPN 3 CLU	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
68	Safnatul Aulia	SMPN 3 CLU	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
69	Paujiah	SMPN 3 CLU	VII	1 paket	1 bh	1 bh
70	Ahmad Taufik	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
71	Anindiya Pasha	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
72	Benni Saputra	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
73	Bayu Saputra	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
74	M. Munawar Gajali Ilham	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
75	M. Fatur Rahman	SMP Negeri 2 Salam Babaris	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
76	Tisya Ayu Meilina	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9A	1 paket	1 bh	1 bh
77	Fridha Agustianty	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9A	1 paket	1 bh	1 bh
78	Nadhia Latifah	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9B	1 paket	1 bh	1 bh
79	Nia Normalita	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9B	1 paket	1 bh	1 bh
80	Dwi Wulan Dari	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9C	1 paket	1 bh	1 bh
81	Maharani Noor Setya Putri	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9C	1 paket	1 bh	1 bh
82	Nurlailatul Janah	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9D	1 paket	1 bh	1 bh
83	Zahratun Adelia	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	9D	1 paket	1 bh	1 bh
84	Muhammad Rangga	SMPN 1 Rantau	7c	1 paket	1 bh	1 bh
85	Munif Effendi	SMPN 1 Rantau	7c	1 paket	1 bh	1 bh



86	Nur Annisa Ramadhani	SMPN 1 Rantau	7c	1 paket	1 bh	1 bh
87	Sheeren Nurissama	SMPN 1 Rantau	7c	1 paket	1 bh	1 bh
88	Khumaira Almira Hafizah	SMPN 1 Rantau	7d	1 paket	1 bh	1 bh
89	Muhammad Hendri	SMPN 1 Rantau	7d	1 paket	1 bh	1 bh
90	Muhammad Zaini	SMPN 1 Rantau	7d	1 paket	1 bh	1 bh
91	Muhammad Aini	SMPN 1 Rantau	7e	1 paket	1 bh	1 bh
92	Muhammad Abrar	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
93	Muhammad Risky Mubarak	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
94	Ridhatul Hasanah	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
95	Irma	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
96	Muhammad Rayhan	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
97	Siti Aminah	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
98	Pitriatun Ni'mah	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
99	Ahmad Anur	SMP KARTIKA V-4 BINUANG	VII	1 paket	1 bh	1 bh
100	Bulan Lestari	SMP KARTIKA V-4 BINUANG	VII	1 paket	1 bh	1 bh
101	Joy Naidi Saputra	SMP KARTIKA V-4 BINUANG	VII	1 paket	1 bh	1 bh
102	Reihan Anjani	SMP KARTIKA V-4 BINUANG	VII	1 paket	1 bh	1 bh
103	A. Didi Riyandi	SMP KARTIKA V-4 BINUANG	VII	1 paket	1 bh	1 bh
104	Intan Nesya Haryanti	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
105	Muhammad Finsarahmadi	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
106	Muhammad Nor Aspia	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
107	Muhammad Ridho	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
108	Muhammad Saputra	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
109	Muhammad Sarwani Abdan	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
110	Naja Rafifah	SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	VII	1 paket	1 bh	1 bh
111	Siti Fatimah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh
112	Nor Halimah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh
113	Hakimah Mawaddah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh



114	Muhammad Rasyid	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh
115	Maulina	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh
116	Muhammad Ramadhan	SMPN 1 Candi Laras Utara	VII	1 paket	1 bh	1 bh
117	Abiansyah	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
118	Idawati	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
119	Ismail	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
120	Lia	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
121	Maulida	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
122	Muhammad Gani	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
123	Muhammad Ridhoansyah	SMP NEGERI 2 RANTAU	VII B	1 paket	1 bh	1 bh
124	Khadi Hanif	SMP NEGERI 2 RANTAU	VII C	1 paket	1 bh	1 bh
125	Shiren Nurlaila	SMP NEGERI 2 RANTAU	VII D	1 paket	1 bh	1 bh
126	M. Rohan	SMP NEGERI 2 RANTAU	VIII A	1 paket	1 bh	1 bh
127	Nurwi Asmawati	SMP NEGERI 2 RANTAU	VIII B	1 paket	1 bh	1 bh
128	M. Riyan	SMP NEGERI 2 RANTAU	VIII C	1 paket	1 bh	1 bh
129	M. Zainal Ilmi	SMP NEGERI 2 RANTAU	VIII D	1 paket	1 bh	1 bh
130	Akhmad Rayhan	SMP NEGERI 2 RANTAU	IX A	1 paket	1 bh	1 bh
131	Naila Salbila	SMPN 1 BUNGUR	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
132	Muhammad Ikhsan	SMPN 1 BUNGUR	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
133	M. Erwin Saputra	SMPN 1 BUNGUR	VII	1 paket	1 bh	1 bh
134	A. Ridho Alfian	SMPN 1 BUNGUR	VII	1 paket	1 bh	1 bh
135	Veni Norhidayah	SMPN 1 BUNGUR	IX	1 paket	1 bh	1 bh
136	Khairunisa	SMPN 1 BUNGUR	IX	1 paket	1 bh	1 bh
137	Aulia Ahrian Saidi	SMPN 2 BUNGUR	VII	1 paket	1 bh	1 bh
138	Yulianda	SMPN 2 BUNGUR	VII	1 paket	1 bh	1 bh
139	M. Faqih	SMPN 2 BUNGUR	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
140	Nor Laily	SMPN 2 BUNGUR	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
141	M.Noor	SMPN 2 BUNGUR	IX	1 paket	1 bh	1 bh
142	M. Abdurrahim	SMPN 2 BUNGUR	IX	1 paket	1 bh	1 bh
143	Liana Octavia	SMP Negeri 2 Benuang	VII	1 paket	1 bh	1 bh
144	Muhammad Hafiz	SMP Negeri 2 Benuang	VII	1 paket	1 bh	1 bh
145	Wulandari Putri	SMP Negeri 2 Benuang	VII	1 paket	1 bh	1 bh
146	M. Dimas Hadi	SMP Negeri 2 Benuang	VIII	1 paket	1 bh	1 bh



	Saputra					
147	Nia Rahmawati	SMP Negeri 2 Benuang	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
148	Risna Yanti	SMP Negeri 2 Benuang	VIII	1 paket	1 bh	1 bh
149	Rabiatul	SMP Negeri 2 Benuang	VII	1 paket	1 bh	1 bh
150	A. Fikri	SMPI Izzul Hasan	VII	1 paket	1 bh	1 bh
151	Hermawan	SMPI Izzul Hasan	VII	1 paket	1 bh	1 bh
152	Ratih Saputri	SMPI Izzul Hasan	VII	1 paket	1 bh	1 bh
153	Abdullah	SMPI Izzul Hasan	VII	1 paket	1 bh	1 bh
154	Akhmad Munawar	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
155	Halimatussadiyah	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
156	Rusaria Ananda Putri	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
157	Muhammad Hafiz	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
158	Nurrahmah	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	7	1 paket	1 bh	1 bh
159	Muhammad Zakaria	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	8	1 paket	1 bh	1 bh
160	Akhmad Faris Rahman	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	8	1 paket	1 bh	1 bh
161	Muhammad Nurhasan	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	8	1 paket	1 bh	1 bh
162	Muhammad Ridho	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	8	1 paket	1 bh	1 bh
163	Muhammad Fani	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	8	1 paket	1 bh	1 bh
164	Lina Oktavia	SMP NEGERI 2 BINUANG	8	1 paket	1 bh	1 bh
165	M. Hafis	SMP NEGERI 2 BINUANG	8	1 paket	1 bh	1 bh
166	Wulandari Putri	SMP NEGERI 2 BINUANG	8	1 paket	1 bh	1 bh
167	M. Dimas Hadi	SMP NEGERI 2 BINUANG	8	1 paket	1 bh	1 bh
168	Nia Rahmawati	SMP NEGERI 2 BINUANG	7	1 paket	1 bh	1 bh
169	Risna Yanti	SMP NEGERI 2 BINUANG	7	1 paket	1 bh	1 bh
170	Rabiatul	SMP NEGERI 2 BINUANG	7	1 paket	1 bh	1 bh

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penerima bantuan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Jabatan Tahun 2021



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 728/KEP/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI GURU PESERTA
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPGDJ) KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/ D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikasi Pendidik dapat memperoleh sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ);
- b. Bahwa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penerimaan Bantuan Pendidikan bagi Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4844);

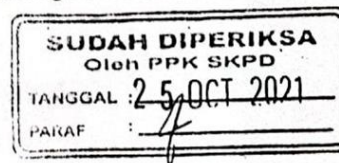


4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 17721/B/GT/2018 Tentang Sharing Pendanaan Pemerintah Daerah pada Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) Tahun 2018 Tanggal 31 Juli 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tapin nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.1.00/001/2021. Tanggal 05 Oktober 2021 Nomor Rekening : 5.1.2.05.01.0003
2. Pengumuman Hasil pembelajaran Daring Hybrid Learning PPG Dalam Jabatan IV Tanggal 21 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI GURU PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPGDJ) KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021.**



- KESATU** : Menetapkan guru yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan tempat tugas pada lajur 4, nomor rekening lajur 5 dan jumlah bersih bantuan yang diterima sebagaimana lajur 8 dalam lampiran keputusan ini adalah penerima bantuan pendidikan bagi guru peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPGDJ) Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Guru sebagai penerima bantuan berkewajiban segera meneruskan dana yang diterimanya kepada Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) dimana ia terdaftar sebagai peserta;
- KETIGA** : Guru sebagai bantuan berkewajiban :
- Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh LPTK penyelenggara program;
 - Mengikuti semua materi dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara program;
 - Belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya dalam menunjang tugas sebagai Guru Profesional dimasa yang akan datang.
- KEEMPAT** : Memberikan Bantuan Beasiswa untuk biaya PPG PAI Dalam Jabatan untuk Satu Semester sebesar Rp. 5.000.000,- / Orang;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan administrasi akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 07 Oktober 2021

**KEPALA DINAS,
DINAS
PENDIDIKAN**

IRNA WATI, S.Pd, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19651005 198601 2 002



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin
Nomor/KEP/DISDIK/2021
Tanggal : 21 Oktober 2021

**DAFTAR TERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI GURU AGAMA ISLAM PESERTA PPGDJ
KABUPATEN TAPIN 2021**

UDAH DIPERIKSA
Oleh PPK SKPD
Tanggal : 25 OCT 2021

No.	Nama	NIP	Tempat Tugas	No. Rekening	Jumlah Bantuan (Rp)	Jumlah Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih di Terima (Rp)	Tanda Tangan Penerima
1	Bahlilor	19610313 200904 1 003	SDN Margasari Ulu	006.03.28.06670.1	5,000,000	0	5,000,000	
2	Dewi Helena Wirawati	19860331 201101 2 011	SDN Margasari Ilir 2	006.03.28.06671.8	5,000,000	0	5,000,000	
3	Herlina	19820710 200904 2 006	SDN RAWANA HULU	006.03.28.06725.6	5,000,000	0	5,000,000	
4	Hidayati, S. Pd.I	19790928 200904 2 003	SDN BINJUANG 1	006.03.28.07068.7	5,000,000	0	5,000,000	
5	Hj. Zahiah, S.Pd.I	19840411 200904 2 007	SMPN 1 SALAM BABARIS	006.03.28.04669.7	5,000,000	0	5,000,000	
6	Muhammad Iswahyudi, S. Pd. I	19821005 200904 1 002	SDN Rantau Kanan 1	006.03.28.06562.3	5,000,000	0	5,000,000	
7	Murminah, S. Pd.I	19850705 201903 2 002	SDN RANGDA MALINGKUNG 3	006.03.28.07233.8	5,000,000	0	5,000,000	
8	Noor Adliani, S. Pd.I	19840615 201001 2 031	SDN TAMBARANGAN 3	006.03.28.06562.8	5,000,000	0	5,000,000	
9	Noor Hasanah	19830402 200904 2 008	SDN Ayunan Papan	006.03.28.04688.1	5,000,000	0	5,000,000	
10	Noorjanah	19880227 201903 2 003	SDN PUALAM SARI 3	006.03.28.07247.2	5,000,000	0	5,000,000	



11	Nurul Rosalina, S.Pd.I	18890827 201402 2 006	SDN SWATO 2	006.03.28.06452.8	5,000,000	0	5,000,000	11
12	Pauzie Rahman	18790406 201001 1 015	SDN MANDURIAN	006.03.28.05904.1	5,000,000	0	5,000,000	12
13	Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I	18820521 200904 2 001	SDN Pualam Sari 2	006.03.28.06932.7	5,000,000	0	5,000,000	13
14	Rafie, S.Pd.I, M.Pd.	18850502 201101 1 013	SDN Salam Babaris 3	006.03.28.06403.3	5,000,000	0	5,000,000	14
15	Rasyidah S.Pd.I	18820923 200604 2 015	SDN Bitahan Baru	006.03.28.05349.1	5,000,000	0	5,000,000	15
16	Rusnani, S.Pd.I	18800611 201402 2 001	SDN A. YANI PURA 2	006.03.28.06918.3	5,000,000	0	5,000,000	16
17	Sri Wahdah Amiry, S.Pd.I	18850419 200904 2 003	SDN SERAWI	006.03.28.05722.4	5,000,000	0	5,000,000	17
18	Syaid Abdillah, S.Pd.I, M.Pd.I	18861116 200904 1 001	SDN RANGDA MALINGKUNG 4	006.03.28.04961.4	5,000,000	0	5,000,000	18
19	Miswan	18790405 200904 1 004	SMPN 2 Piani	006.03.28.04455.3	5,000,000	0	5,000,000	19
J U M L A H				95,000,000	0	0	95,000,000	

Kepala Desa Pendidikan
Kabupaten Tapin
IRSAWATI, S.Pd. MM
NIP.19651005 198601 2 002

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK SKPP
TANGGAL : 25 OCT 2021
PARAF : *[Signature]*

**4.1.4. Alokasi Anggaran**

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari: APBD, DAK Fisik APBN dan Sumber dana lain yang sah;

TABEL 4.6
ALOKASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		
			K		Rp
1	3	4	5		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100	%	73.112.425.170
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100	%	36.045.597.989
	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Sekolah	224.279.700
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	Sekolah	484.647.208
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	Sekolah	251.178.933
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12	Sekolah	3.800.332.713
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3	Sekolah	6.965.020.025
	1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Sekolah	169.771.980
	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Sekolah	169.767.500



1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah	1	Paket	198.874.800
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	3.384.108.600
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	Paket	116.999.400
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	178	Sekolah	102.700.000
		Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian Sekolah	3000	Siswa	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersedianya Naskah soal ujicoba ujian akhir sekolah dan jadwal ujicoba ujian akhir sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar	178	Sekolah	6.400.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	4	Kegiatan	67.959.800
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	178	Sekolah	175.082.600
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang di bina akreditasi dan data sekolahnya	178	Sekolah	68.722.800
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar	178	Sekolah	19.776.664.930
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terkelolanya Manajemen BOS SD	178	Sekolah	83.087.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		90,00	%	26.094.545.271
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana Utilitas Sekolah	5	Sekolah	825.278.415
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34	Unit	6.841.825.400



	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	11	Unit	2.392.593.600
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Unit	223.071.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	10	Unit	2.018.445.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	12	Unit	2.547.026.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	Unit	1.113.280.966
	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5	Sekolah	191.860.100
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.546.478.250
	1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik	170	Siswa	17.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1	Paket	2.891.510.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Kegiatan	100.000.000
	1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40	Sekolah	91.936.500
	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	1	Paket	92.526.400
	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Paket	26.420.000
	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	Paket	36.236.600
	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terkelolanya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22	Sekolah	5.101.403.740



1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Manajemen BOS SMP	26	Sekolah	37.653.300
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		80,0 0	%	7.640.410.970
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1	Lembaga	177.324.540
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	Lembaga	715.174.560
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1	Lembaga	115.264.260
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebeluer PAUD	1	Lembaga	58.022.300
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	1	Paket	732.990.850
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	130	Siswa PAUD	13.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1	Paket	40.000.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	0	Kegiatan	0
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya Dana Insentif bagi Pendidik PAUD non PNS (KB dan TK)	12	Bulan	1.206.000.000
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pelaksanaan Lomba Apresiasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di Kab.Tapin	3	Cabang Lomba	12.506.500
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan Penanganan Stunting melalui Seminar Parenting, Peningkatan Mutu serta Pembinaan Kelembagaan bagi 183 Lembaga yang ada di Kab.Tapin	183	Lembaga	360.527.960



1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pelaksanaan BOP PAUD dan Manajemen Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi BOP PAUD bagi lembaga PAUD di Kab.Tapin	183	Lembaga	4.209.600.000
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,00	%	3.331.870.940
1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1	Lembaga	148.855.140
Rehabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan	1	Lembaga	200.000.000
1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15	Unit	154.622.400
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Kursus Wira Usaha Pedesaan (KWD) bagi lembaga SKB/PKBM di Kab.Tapin	1	Kelompok	17.348.000
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan ANBK untuk Warga Belajar Kesetaraan di lembaga SKB/PKBM di Kab.Tapin	14	Lembaga	30.095.400
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Lomba Apresiasi dan Hari Aksara Internasional (HAI) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan di Kab.Tapin	14	Lembaga	0
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Peningkatan Mutu Kelembagaan bagi Lembaga SKB/PKBM yang ada di Kab.Tapin	6	Lembaga	26.800.000
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan BOP Kesetaraan dan Manajemen Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi BOP Kesetaraan bagi lembaga SKB/PKBM di Kab.Tapin	14	Lembaga	2.754.150.000



1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik yang bersertifikat	64,48	%	11.499.900
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		89,00	%	11.499.900
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	204	Sekolah	11.499.900
	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD (KB dan TK)	211	PAUD	
	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	13	PKBM	
JUMLAH				Rp. 73.123.925.070

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021

Pembiayaan Pendidikan secara garis besar berasal dari APBN, dan APBD Kabupaten, untuk APBD Kabupaten Tapin belanja anggaran Dinas Pendidikan dengan rincian belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp. 268.980.084.690 dengan realisasi anggaran ditahun 2021 sebesar Rp. 251.444.701.461 atau sebesar 93,48 persen dengan jumlah belanja Pembiayaan pendidikan digunakan untuk pembangunan disektor pendidikan, pengadaan fisik, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun anggaran 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2021 ada 3 program dan 12 Kegiatan yang tersebar pada 79 sub kegiatan dengan sumber dana APBD II termasuk didalam dana DAK. Adapun khusus untuk kegiatan penerapan SPM pendidikan dengan



penyediaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD, SD, SMP penerima SPM dengan anggaran sebesar Rp. 146.999.400 dengan terealisasi 99,99 persen.



TABEL 4.7
ALOKASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN

No.	Isu SPM bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran				% Target Capaian			
					RPJMD	Renstra PD	RKPD	Renja PD	RPJMD	Renstra PD	RKPD	Renja PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Rp. 116.999.400,-				100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Belajar Peserta Didik				Rp. 17.000.000,-				100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Rp. 223.800.000,-				100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				Rp. 13.000.000,-				100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021



4.1.5. Dukungan Personil

Dinas Pendidikan terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 15 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a).

Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin :

TABEL 4.8
APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN

A	KEPALA DINAS		1
	1 KEPALA DINAS	1	
	JUMLAH	1	
B	SEKRETARIAT		19
	1. SEKRETARIS	1	
	2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1	
	3. SUB BAGIAN KEUANGAN	1	
	4. SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTUAN	1	
	5. KEPALA SKB	1	
	6. KEPALA TU SKB	1	
	7. STAF/ PENGADMINISTRASI SKB	13	
	JUMLAH	19	
C	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF		126
	1.KEPALA BIDANG BINA PAUD DAN PNF	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5.JFT GURU TK	99	
	6. JFT PENGAWAS TK	4	
	7. JFT PAMONG BELAJAR	9	
	8. JFT PENILIK PLS	10	
	JUMLAH	126	
D	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		1317
	1.KEPALA BIDANG BINA SD	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	0	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT GURU SEKOLAH DASAR	1269	
	6. JFT PENGAWAS SD	14	
	7. JFU ADMINISTRASI SD	0	
	8 JFU PENJAGA SEKOLAH	31	



	JUMLAH	1317	
E	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		286
	1.KEPALA BIDANG BINA SMP	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKATER	1	
	5. JFT PENGAWAS SMP	4	
	6.JFT GURU SMP	247	
	7. KEPALA TU SMP	12	
	8. JFU SMP	19	
	JUMLAH	286	
F	BIDANG KETENAGAAN		3
	1.KEPALA BIDANG KETENAGAAN	1	
	2.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF	0	
	3.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	1	
	4.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	1	
	JUMLAH	3	
	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DISDIK		1753

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Tahun 2021

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian SPM bidang pendidikan dasar pada tahun ini baik itu yang menyangkut pelayanan dasar oleh Kabupaten maupun pelayanan dasar oleh satuan pendidikan adalah keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Tapin untuk memenuhi semua target indikator SPM tersebut sehingga untuk tahun berikutnya lebih berusaha secara intensif mencari terobosan bantuan dana dari APBN terutama yang terkait dengan penyediaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD, SD, SMP kekurangan buku teks untuk setiap siswa, buku pengayaan dan alat praktek dan peraga siswa serta bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD/MI dan SMP/MTs. Dan juga Keterlambatan pelaksanaan penerapan SPM pendidikan karena ada wabah pandemi Covid-19. Dengan adanya Permendagri yang baru nomor 59 tahun 2021 untuk bidang teknis KETENAGAAN, SD, SMP, PAUD dan PNF yang menangani SPM, menginginkan adanya sosialisasi



dan bimbingan teknis tentang pengisian Data SPM khususnya bidang pendidikan yang diminta pada permendagri nomor 59 tahun 2021 tersebut.

Selain itu untuk pencapaian SPM bidang pendidikan dasar melibatkan lembaga di bawah kewenangan Kementerian Agama yaitu MI dan MTs sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama serta komitmen bersama untuk mewujudkan ketercapaian SPM bidang pendidikan dasar sebesar 100%.

Adapun permasalahan lain yang timbul dari pencapaian SPM bidang pendidikan tahun ini adalah masih minimnya anggaran untuk penerapan SPM Pendidikan dan juga Masih rendahnya Standar Satuan Pendidikan dan Standar biaya pribadi Peserta Didik. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemangku kebijakan di daerah untuk lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi tentang penerapan SPM pendidikan di kabupaten Tapin.

Dengan adanya tabulasi permasalahan dan rencana solusi yang akan diambil diharapkan dapat mencapai target pencapaian SPM pada tahun berikutnya.



4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi ;

- Standar kuantitas.
- Standar kualitas.

2) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.

3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi



4) Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
- Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- Temu wicara (konseling)

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja



$$\begin{array}{l} \text{Presentase ibu} \\ \text{hamil mendapatkan} \\ \text{Pelayanan ibu hamil} \end{array} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan K4 di fasilitas pelayanan} \\ \text{kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah} \\ \text{kabupaten/kota tersebut dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

1.2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

a. Pernyataan standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan



Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan bersalin}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

1.3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta,



klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

- Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} \\ = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\% \end{array}$$

1.4. Pelayanan kesehatan balita

a. Pernyataan standart

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.



- Pelayanan kesehatan, meliputi :
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
 - 2) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
 - 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Presentase anak usia 0-59 Bulan Yang mendapatkan pelayanan balita sesuai standart	=	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	---	---

1.5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjarangan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.



- Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
 - b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
 - c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
 - e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala;
- Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase anak usia} \\
 \text{pendidikan dasar yang} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standart}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas} \\ \text{1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{skrining di satuan pendidikan dasar} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua anak usia pendidikan} \\ \text{dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah} \\ \text{kerja kabupaten / kota tersebut dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun ajaran} \end{array}} \times 100\%$$

1.6. Pelayanan kesehatan usia produktif

a. Pernyataan standart

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai estándar

- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/Tenaga Gizi.
 - Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih
- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :
 - Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.
 - Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
 - Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
 - Pemeriksaan ketajaman penglihatan
 - Pemeriksaan ketajaman pendengaran



- Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun
- 2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai estandar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase warga} \\
 \text{negara usia 15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan pelayanan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun} \\
 \text{yang ada di wilayah kerja dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun yang sama}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

1.7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

- a. Pernyataan Standart
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Pengertian
 - Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - Dokter;



- Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/Tenaga Gizi.
 - Kader Posyandu lansiaPosbindu
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
 - Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekalisetahun.
 - Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadargula darah
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atauMini Mental Status Examination (MMSE)/Test MentalMini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan GeriatricDepression Scale (GDS).
 - Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
 - Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya



c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase warga usia} \\
 \text{60 tahun keatas} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun} \\
 \text{keatas yang mendapat skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar minimal 1 kali} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua penduduk berusia usia} \\
 \text{60 tahun keatas yang ada di wilayah} \\
 \text{kabupaten / kota tersebut dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun perhitungan}
 \end{array}} \times 100\%$$

1.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upayapromosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).



- 3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
- 4) Standar layanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Rumus Perhitungan Kinerja



$$\begin{aligned} & \text{Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} \\ & = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

a. Pernyataan Standart

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
- Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:



- Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja:

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase penyandang} \\
 \text{DM yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM nerdasarkan} \\
 \text{angka prevalensi DM nasional di wilayah} \\
 \text{kerja dalam kurun waktu satu tahun pada} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

1.10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

a. Pernyataan Standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.



3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
- Tindakan kebersihan diri ODGJ berat

4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten / kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotive preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

1.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.



b. Pengertian

- 1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah
- 2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :
 - Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
 - Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- 3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.
- 4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan
- 5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu



tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

1.12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standart

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

b. Pengertian

- Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika
- Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
 - b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugaskesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - Pemberian informasi terkait HIV-AIDS



- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase orang HIV} \\
 \text{yang mendapatkan} \\
 \text{pemeriksaan HIV di} \\
 \text{fasyankes sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{yang mendapatkan pemeriksaan HIV} \\ \text{sesuai standar berisiko terinfeksi dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{yang ada di satu wilayah kerja pada} \\ \text{kurun waktu satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

**4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9**Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**

INDIKATOR	TARGET
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN DASAR	
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%
5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada usia produktif	100%
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%

Ket.

Target Kabupaten berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tapin

4.2.3. Realisasi

Pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Tapin tahun 2021. Dari 12 indikator yang ada, akan disajikan satu per satu perjenis layanan, Indikator dan Nilai capaian per indikator SPM.



Tabel 4.10
Realisasi SPM Dinas Kesehatan Sampai Dengan Desember 2021

Nama Indikator	SASARAN	REALISASI TRIWULAN 1	REALISASI TRIWULAN 2	REALISASI TRIWULAN 3	REALISASI TRIWULAN 4
Pelayanan kesehatan ibu hamil	3399	21,54 %	41,63 %	66 % (2243)	90% (3043)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3245	17,90 %	37,04 %	58 % (1874)	77% (2495)
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3090	22,65 %	47,38 %	73,46 % (2270)	98.93% (3057)
Pelayanan kesehatan balita	15.701	22,49 %	47,07 %	72,11 % (11.322)	92.02% (14.448)
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	3355	0.00	6,86 %	6,86 % (228)	87.16% (2547)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	125.264	6,62 %	13,17 %	16,71 % (20.930)	24.76% (31.011)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.839	5 %	8,7 %	28 % (8617)	48% (14.668)
Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	59.847	6,62 %	9,64 %	11,31 % (6.771)	15,89% (9510)
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)	2.985	25,24 %	43,39 %	53,39 % (1.594)	74.73% (2231)
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	257	29,14 %	102,18 %	103 % (266)	139.14% (358)
Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB)	3073	5,63 %	10,35 %	12.85% (396)	20.01% (615)
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	4322	20.22 %	37,09 % (1603)	52.55 % (2271)	77.49% (3349)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Desember rata – rata sudah mencapai diatas 50% untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak rata – rata pencapaian sudah diatas 80% tetapi jika dibandingkan dengan target nasional masih perlu dilakukan akselerasi karena target SPM



bidang kesehatan adalah 100%.

Pada tahun 2021 ini mendapatkan beberapa kendala dalam pencapaian target sehubungan dengan adanya pandemi covid. Dimana banyak program tidak dapat dilaksanakan seperti yang dijadwalkan, karena sosial distancing untuk mencegah penyebaran virus corona.

Untuk pelayanan kesehatan usia produktif mencapai angka sebesar 24.76% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini karena penjarangan yang dilakukan belum maksimal karena dalam masa pandemi. Usia produktif maka pelayanan yang dilakukan jika ada pemeriksaan tes kesehatan atau tes kebugaran saja, mereka seharusnya dilakukan pemeriksaan di tempat kerja tapi kondisi itu sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Koordinasi lintas sektor masih belum dilakukan secara maksimal untuk pelaksanaan screening kesehatan di tempat kerja.

Untuk pelayanan kesehatan diabetes mellitus dan hipertensi mencapai angka masing – masing 74.73% dan 15,89% dari total penduduk yang beresiko menderita diabetes dan Hipertensi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kedua layanan ini mendapatkan kendala, bebera waktu libur dan belum semua posyandu terlaksanakan dikarenakan masih dalam situasi pandemi, kurangnya partisipasi dari masyarakat, pemantauan petugas belum maksimal, serta kurangnya kepatuhan minum obat dan diet.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 4.11
Indikator, kegiatan pendukung dan realisasi anggaran SPM
Tahun 2021

No.	Nama Indikator	Kegiatan pendukung	Pagu Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan dan pengembangan kesehatan ibu, bayi, balita dan reproduksi	620,452,300,-
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jaminan persalinan	525,238,500,-
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Penanggulangan Kurang Energi (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	108,465,000,-
4	Pelayanan kesehatan balita	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kerja 2	190,860,000,-
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengembangan UKS	181,456,500,-
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	170,323,000,-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	241,804,900,-
8	Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	95,992,500,-
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	54,947,500,-
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	56,720,000,-
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB)	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkolosis (TB)	109,820,000,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV / AIDS	17,408,000.00, -

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin Tahun 2021

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, sebagai berikut :



Tabel 4.12
Dukungan Personil SPM Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	SD	-	1	Pembina Utama / IV. e	-
2	SLTP	-	2	Pembina Utama Muda / IV. c	1
3	SLTA	5	3	Pembina TK. I / IV. B	1
4	Diploma 1	1	4	Pembina / IV. A	8
5	Diploma II	-	5	Penata Tk. I / III d	-
6	Diploma III	4	6	Penata / III c	5
7	Diploma IV	1	7	Penata Muda Tk. I / III b	14
8	S-1	12	8	Penata Muda / III a	7
9	S-2	7	9	Pengatur Tk. I / II d	2
10	S-3	1	10	Pengatur / II c	-
11	Dokter Umum	24	11	Pengatur Muda Tk. I / II b	-
12	Dokter Gigi	10	12	Pengatur Muda / II d	-
13	Apoteker	6	13	Juru Tk. I / I d	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin Tahun 2021

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun penjelasan dari masing – masing layanan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

Tabel 4.13
Permasalahan dan solusi SPM tahun 2021

Indikator Kerja	Permasalahan	Solusi
Pelayanan kesehatan ibu hamil	- Kualitas ANC Masih rendah - Mobilitas sasaran (pindah & pendatang)	- Peningkatan Kapasitas bidan - Kelas Ibu Hamil - Pendataan dan Sweeping
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	- Masih adanya persalinan Non-nakes - 4 Terlambat	- Kemitraan dukun kampung dengan bidan - Kelas Ibu Hamil - Penyuluhan dan sosialisasi
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- Masih ada bayi baru lahir yang belum sempat mendapatkan	- Pelaksanaan kelas ibu hamil - Penyuluhan dan edukasi



	Pelayanan kesehatan paripurna	
Pelayanan kesehatan balita	- Kurangnya Indikator untuk pelayanan anak balita sesuai standar yang ada.	- Peningkatan kegiatan kader ibu balita diposyandu - Penyediaan logistik
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	- Dari sasaran 3355 anak usia dasar masih ada 1904 anak yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar	- PTM (Pembelajaran tatap muka)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	- Kurangnya partisipasi Masyarakat - Kegiatan Sempat dilibur beberapa bulan karena pandemi covid	- Advokasi kades dan kader posbindu - Sosialisasi/promkes tentang posbindu - Pelaksanaan posbindu dengan prokes/kunjungan rumah
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	- Jarak rumah dengan lokasi posyandu, kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga, sarana prasarana kunjungan kegiatan posyandu.	- Sosialisasi program posyandu lansia dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga
Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	- Pandemi Covid. Pandu belum dilaksanakan - Pemantauan petugas belum maksimal (pasif) - Belum terintegrasi dengan PISPK	- Pandu dilaksanakan - Kreatifitas petugas dalam pelayanan Hipertensi - Kegiatan terintegrasi dengan PISPK
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)	- Pandemi Covid - Pandu belum dilaksanakan - Kurangnya kepatuhan minum obat dan diet - Data yang dilaporkan belum termasuk praktek dokter	- Pandu dilaksanakan - Peningkatan edukasi/KIE - Edukasi diet seimbang - Adanya regulasi tentang sistem pelaporan kedinas kesehatan oleh praktek dokter mandiri/klinik.



	mandiri/klinik	
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang Kepatuhan minum obat - Kurang dukungan keluarga - Dukungan Lintas sektor belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi Kepatuhan minum obat - Edukasi pentingnya dukungan keluarga untuk kesembuhan ODGJ - Advokasi lintas sektor untuk meningkatkan dukungan
Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB)	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan terduga TB ke Fasyankes menurun pada saat pandemi Covid-19 - Belum semua petugas melaksanakan penemuan aktif TB ke masyarakat - Belum semua pasien TB dilakukan investigasi kontak oleh petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan edukasi ke masyarakat tentang perbedaan gejala covid-19 dengan gejala TB - Melakukan kegiatan penemuan secara aktif terduga TB dimasyarakat dengan kerjasama lintas program ataupun lintas sektor - Petugas melaksanakan investigasi kontak pada semua pasien TB sehingga dapat ditemukan orang-orang yang kontak erat dengan pasien TB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbasan kegiatan dalam masa pandemi - Kurangnya penyuluhan tentang HIV - Belum semua pasien TB dilakukan Pemeriksaan HIV - Pada saat pandemi Covid-19 belum bisa melakukan deteksi dini HIV ditempat hiburan dan warung malam - Kurangnya kesadaran kelompok beresiko untuk memeriksakan dirinya ke fasyankes 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyuluhan tentang HIV (penyebab, cara pencegahan dll) - Melakukan koordinasi dengan program TB agar semua pasien TB dapat dilakukan pemeriksaan HIV - Koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemeriksaan HIV ditempat hiburan dan warung malam

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dukungan personil untuk kegiatan dalam hal pencapaian kinerja masih kurang kuantitas dan kualitasnya untuk itu perlu dilakukan penambahan dan juga seleksi



yang ketat sehingga petugas yang melakukan pelayanan di tingkat bawah dapat memiliki kompetensi yang diharapkan oleh undang – undang. Kerjasama lintas sektor juga perlu terus dikembangkan sehingga kinerja kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik, karena program kesehatan tidak hanya dapat dilaksanakan oleh petugas kesehatan saja tetapi juga oleh SKPD lain yang terkait dengan kesehatan.



4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah :

Tabel 4.14
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin, Tahun 2021

Berdasarkan RPJMD, target air minum sebesar 2% untuk capaian tiap tahun dan air limbah sebesar 5% untuk capaian tiap tahun.

Sedangkan Sasaran strategis yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah :

Tabel 4.15
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Nilai	Batas Waktu Capaian
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	60 %	2021
	2	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	80 %	2021

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin, Tahun 2021

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimum yang ditetapkan daerah dalam tiap tahun adalah terjadi peningkatan sebesar 2% untuk infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum dan untuk Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah adalah sebesar 5%.

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin melalui Bidang Cipta Karya selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Prosentase
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	2	5,29	68,11 %
	2	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	2	4,95	86,68 %



masyarakat		dasar Pelayanan Air Limbah			
------------	--	----------------------------------	--	--	--

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin, Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dibagi menjadi dua yaitu pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh pihak ketiga dan swakelola oleh masyarakat.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah beserta realisasinya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :





Uraian	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	Persen	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum & Air Limbah	15.493.866.865,00	275.000.000,00	7.975.691.865,00	7.168.175.000,00	15.418.866.865	99,51	75.000.000,00
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.884.372.000,00	0,00	1.884.372.000,00	0,00	1.884.372.000,00	100	0,00
Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	996.320.000,00	0,00	996.320.000,00	0,00	996.320.000,00	100	0,00
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK Penanggulangan Kemiskinan)	6.562.863.865,00	50.000.000,00	624.999.865,00	5.837.864.000,00	6.512.863.865,00	99,24	50.000.000,00
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK Penurunan Kematian Ibu dan	1.730.311.000,00	25.000.000,00	350.000.000,00	1.330.311.000,00	1.705.311.000,00	98,55	25.000.000,00



Stunting)							
Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK Tematik Stunting)	2.278.000.000,00	100.000.000,00	2.178.000.000,00	0,00	2.278.000.000,00	100	0,00
Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK Tematik Penanggulangan Kemiskinan)	2.042.000.000,00	100.000.000,00	1.942.000.000,00	0,00	2.042.000.000,00	100	0,00

4.3.5. Dukungan Personel

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Bidang Cipta Karya terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon IIb), dan 1 kepala bidang Cipta Karya (eselon IIIb) dengan dibantu 1 kepala seksi (eselon IVa) beserta pejabat pelaksana lainnya.

Data ini menyajikan jumlah personil yang melaksanakan Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Bidang Cipta Karya

Tabel 4.16
Jumlah Personil

No	Nama	Golongan Jabatan
1.	H. Yustan Azidin, ST, MT 19690110 199603 1 005	Kepala Dinas PUPR
2.	Fahmi Rizal, ST, MT 19780613 200501 1 013	IV/a (PEMBINA) Kepala Bidang Cipta Karya
3.	Syahruji 19660723 199203 1 008	III/b (Penata Muda Tk. 1) plt. Kasi Pelaksanaan Peyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
4.	Agus Patahilah, ST 19890819 201503 1 002	III/b (Penata Muda Tk.1) Pelaksana
5.	Norsan Heriyanto 19730215 200701 1013	II/d (Pengatur Tk.1) Pelaksana
6.	Zulkaida Fatmarisa, ST	Kontrak
7.	M. Iqbal Azmi	
8.	Gajali Rahman, S. Kom	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin, Tahun 2021

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain bahwa dalam penerapan dan pencapaian SPM ini masalah utamanya adalah dana baik dana yang bersumber dari APBD



maupun dari APBN melalui dana DAK. Dana yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal persinya masih sangat kecil dibanding dengan kegiatan lain diluar Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Permasalahan yang lain yaitu :

1. Belum adanya persamaan pemahaman dalam implementasi SPM
2. Penyusunan rencana dan program yang optimal dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM kualitasnya masih rendah
3. Upaya pengimplementasian SPM di daerah belum tersinergi dengan baik
4. Pedoman operasional lanjutan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM belum ada
5. Database yang akurat dan terperinci pada setiap penerapan dan pencapaian SPM belum ada
6. Monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan data capaian SPM setiap tahunnya masih sangat minim.
7. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam menangani SPM

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dan menambah SDM yang berkompetensi ditahun anggaran yang akan datang sehingga Standar Pelayanan Minimum yang harus dilaksanakan menjadi fokus kegiatan utama bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2



(dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Target dan Realisasi SPM
Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM 2021 (Unit)	Realisasi 2021		Keterangan
			Unit	Target	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100,00%	Tidak ada SK Bencana maupun bencana yang terlapor di tahun 2021
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	74	74	65,05%	Realokasi hunian di bantara sungai lanjutan 2021

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pada tahun 2020 dan 2021 di wilayah pemerintah kabupaten tidak terdapat bencana yang bersifat masif, dan di tahun 2021 tidak ada bencana yang dilaporkan ke Dinas Perumahan, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin baik berupa SK Bencana Alam maupun laporan resmi lainnya sehingga di tahun 2021 tidak ada realisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2021 dilakukan kegiatan lanjutan tahun 2020 yaitu penataan bangunan di kawasan bantaran sungai di sepanjang Jl. Hakim Samad Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Candi Laras Selatan. Penataan berupa kegiatan relokasi hunian masyarakat di sekitar bantaran sungai yang terbagi dalam empat desa yaitu di Kecamatan Tapin Tengah sebanyak tiga desa terdiri dari Desa Pandahan, Desa Pematang Karang Hilir, Desa Hiyung dan di kecamatan Candi Laras Selatan terdiri dari satu desa yaitu Desa Sungai Rutas Hulu.

Rincian target relokasi dalam kurun waktu 2 tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Rincian Target Relokasi Tahun Anggaran 2020 dan 2021

LOKASI	TARGET (UNIT)		
	2020	2021	TOTAL
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima pelayanan (target)}} \times 100$			
Kecamatan Tapin Tengah			
Desa Pandahan	4	21	25
Desa Pematang Karang Hilir	44	29	73
Desa Hiyung	53	12	65
Kecamatan Candi Laras Selatan			
Desa Sungai Rutas Hulu	33	11	44
Desa Sungai Rutas	0	1	1
TOTAL	134	74	208

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021



Kecamatan Tapin Tengah

- Desa Pandahan sebanyak 21 unit
- Desa Pematang Hilir sebanyak 29 unit
- Desa Hiyung sebanyak 12 unit

Kecamatan Candi Laras Selatan

- Desa Sungai Rutas Hulu sebanyak 11 unit
- Desa Sungai Rutas sebanyak 1 unit

4.4.3. Realisasi**1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota layak huni dan terjangkau**

Jenis Pelayanan dasar ini direalisasikan melalui sumber dana APBD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

Tabel 4.19
Realisasi Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Layak Huni Dan Terjangkau

PERHITUNGAN	TARGET (UNIT)	REALISASI		CAPAIAN
		UNIT	%	
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima pelayanan (target)}} \times 100$	0	0	100%	100%
TOTAL	0	0	100	100%

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

Capaian SPM 100% dikarenakan di tahun 2021 tidak ada bencana yang dilaporkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin baik berupa SK Bencana Alam maupun laporan resmi lainnya sehingga di tahun 2021 tidak ada realisasi unit penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.



2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar ini tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20
Realisasi Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Tapin

LOKASI	TARGET (UNIT)		TOTAL	REALISASI (Unit)		CAPAIAN (%)	
	2020	2021		2020	2021	2020	2021
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (Realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima layanan (Target)}} \times 100$							
Kecamatan Tapin Tengah							
Desa Pandahan	4	21	25	4	21	100	100
Desa Pematang Karang Hilir	44	29	73	44	29	100	100
Desa Hiyung	53	12	65	53	12	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan							
Desa Sungai Rutas Hulu	33	11	44	33	11	100	100
Desa Sungai Rutas	0	1	1	0	1	100	100
TOTAL	134	74	208	134	74	100	100

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

Penerapan SPM ini ditargetkan dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2020 dan 2021, di tahun 2020 telah direalisasikan 134 unit sesuai dengan target capaian di tahun 2020 134 unit, sehingga realisasi di tahun 2020 adalah 100%, sedangkan target relokasi 2021 adalah sebesar 74 unit dengan realisasi 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.100.103.326.284,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 23.599.317.177,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 76.504.009.107,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 34.476.912.791,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.17.148.602.791,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.17.328.310.000,00 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel II.2 berikut :



Tabel 4.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Anggaran		Realisasi	%
	DPA	DPPA		
BELANJA OPERASI	18.833.988.784,00	23.599.317.177,00	17.148.602.791,00	72,67
Belanja Pegawai	2.550.606.584,00	2.429.173.477,00	2.414.230.524,00	99,38
Belanja Barang dan Jasa	16.100.152.200,00	17.583.823.700,00	14.643.281.267,00	83,28
Belanja Hibah	183.230.000,00	3.586.320.000,00	91.091.000,00	2,54
BELANJA MODAL	11.499.471.846,00	76.504.009.107,00	17.328.310.000,00	22,65
Belanja Modal Tanah	8.388.301.846,00	72.823.373.107,00	13.781.914.000,00	18,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.320.000,00	152.336.000,00	140.900.000,00	92,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.078.623.000,00	98,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.920.850.000,00	2.433.300.000,00	2.326.873.000,00	95,63
Jumlah	30.333.460.630,00	100.103.326.284,00	34.476.912.791,00	34,44

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

4.4.5. Dukungan Personil

1. Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluruhnya berjumlah 19 orang yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.22
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	6
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5
4	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	3
5	Bidang Pertanahan	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-
Total		19

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

2. Kualifikasi Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bervariasi. Secara rinci komposisinya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 4.22
Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	4
2	Strata 1 (S-1)	13
3	Sarjana Muda (D-3)	1
4	SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)	1
5	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	-
Total		19

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 4 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 13 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan sarjana muda/D3 ada sebanyak 1 orang.

Sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, namun pegawai yang berlatar belakang teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih dianggap kurang, sehingga perlu dilakukan penambahan.

3. Pangkat dan Golongan

Daftar pangkat dan golongan PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Tapin, tahun 2021 dapat dili hat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 4.23
Rekapitulasi Pangkat dan Golongan Aparatur Sipil Negara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	ES
1	YUMANTO, AP, M.AP	19750328 199311 1 002	Kepala	Pembina Utama Muda (IV/c)	2B
2	H.HERMAN CAHYONO, S.Hut	19670210 199703 1 003	Sekretaris	Pembina (IV/a)	3A
3	SUPIAN HADI, S.Sos	19770619 200701 1 010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	4A
4	MUHAMAD JAZULI RAHMAN, ST	19820124 201503 1 001	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penata (III/c)	4A
5	RINO ARDHY JUSTAMA, S.STP	19950711 201808 1 001	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III/a)	-
6	KRISNA DARMAWAN, SE	19900225 202012 1 003	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	Penata Muda (III/a)	-
7	IKHSAN REZA FAKHLEVIE, SE	19930418 202012 1 004	Pranata Barang dan Jasa	Penata Muda (III/a)	-
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
8	ZAUL RAHMAN, S.Sos	19810909 201001 1 020	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penata Tk. I (III/d)	3B
9	H. MAMAN, S.Sos	19650416 198603 1 016	Kasi Kawasan Permukiman	Penata Tk. I (III/d)	4A
10	ERLIS AKHSAN FUAD, ST	19820728 201001 1 019	Kasi Perumahan	Penata (III/c)	4A
11	H. MUHAMMAD IRFAN ROSANDY, ST	19870110 201402 1 004	Kasi Perencanaan Teknis	Penata Muda Tk.I (III/b)	4A
12	MUHAMMAD RAKHMAD RAUZIE	19740512 199503 1 006	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I (III/b)	-
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)					
13	DIDIK SUGITO, S.Kom	19820309 200904 1 004	Kabid Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Penata (III/c)	3B
14	H.MARZUKI, S.AP	19660502 198907 1 001	Kasi Monitoring & Evaluasi Fasilitas PSU Perumahan dan Permukiman	Penata Tk.I (III/d)	4A
15	-	-	Kasi Perencanaan PSU Perumahan dan Permukiman	-	4A
16	ISMA SARI, SP, M.Ling	19840608 201503 2 001	Kasi Penyediaan Fasilitas PSU Perumahan dan Permukiman	Penata (III/c)	4A
BIDANG PERTANAHAN					
17	H.ISROK ANTARIKSO, SKM. M.Kes	19680928 198902 1 001	Kabid Pertanahan	Pembina (IVa)	3B
18	YULIANA HAYATI, SH	19860722 201503 2 002	Kasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Penata (III/c)	4A
19	KUMALASARI, S. Ars	19771025 200604 2 021	Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah	Penata Muda Tk. I (III/b)	4A
20	ABDURAHMAN FADILAH, A.Md	19800321 201001 1 009	Kasi Penatagunaan Tanah	Penata (III/c)	4A

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2021

Jumlah Pejabat Struktural Disperkimtan Tapin sebanyak 15 orang dari total 16 Jabatan Struktural, 1 jabatan struktural Eselon 4A belum terisi dikarenakan pejabat sebelumnya telah pensiun. Jumlah Pejabat Fungsional sebanyak 0 orang.



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Masalah :

- Terbatasnya keahlian SDM aparatur.
- Kondisi data eksisting di lapangan yang sangat dinamis.
- Belum adanya sosialisasi mengenai Permen PUPR RI nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapin.

Solusi :

- Penambahan sumber daya manusia berupa tenaga ahli yang memiliki keahlian dibidang teknis maupun perencanaan akan dapat membantu memaksimalkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin. Adapun di anggaran tahun 2021 telah dialokasikan tambahan tenaga ahli dan fasilitator untuk menunjang kinerja baik dalam hal penerapan SPM maupun kegiatan teknis lainnya.
- Melakukan survey dan updating dan verifikasi kondisi eksisting di lapangan.
- Perlu diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan Permen PUPR RI nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga penerapan SPM dapat dimaksimalkan baik dalam perencanaan maupun realisasi.

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

➤ Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Tahun 2021, maka Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, meliputi :



Tabel 4.24
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Ket
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdadan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % yang dipenuhi	Setiap tahun	Indikator Dasar
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % yang dipenuhi	Setiap tahun	

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian SPM, indikator capaian dan batas waktu yang mendukung pencapaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin, Tahun 2021



4.5.3. Realisasi

Tabel 4.25
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	85,71%

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin, Tahun 2021

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal ditengah masyarakat, dengan beberapa langkah kegiatan antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah
- b. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran Perda
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima agar mentaati peraturan daerah
- d. menyebarkan pamflet mengenai penegakan perda, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- e. menyambut baik laporan mengenai gangguan lingkungan yang disampaikan masyarakat.
- f. Memberikan sikap sopan dan santun terhadap para pelanggar perda.
- g. memberikan sosialisasi mengenai proteksi dini bahaya kebakaran



- h. memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap kawasan yang terancam kebakaran.
- i. memasang spanduk atau papan pengumuman di daerah rawan pelanggaran perda dan daerah rawan kebakaran.
- j. melakukan pendekatan secara langsung terhadap pelanggar Perda.

Capaian anggaran untuk bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah :

Tabel 4.26
Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan perkada Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.218.155.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	222.059.800
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.400.100

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin, Tahun 2021

4.5.5. Dukungan Personil

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin selaku lembaga teknis yang menangani urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran didukung oleh 111 personil



husus bidang pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 11 personel khusus bidang penanggulangan bencana kebakaran.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Ketentraman umum, ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia yang masih belum memenuhi standar kualifikasi, baik dari personel bidang pemeliharaan Umum, Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat maupun bidang penanggulangan bencana kebakaran.
- b. Minimnya anggaran untuk kegiatan penegakan perda dan pemeliharaan ketertiban umum, sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.
- c. kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, bidang ketertiban umum maupun penanggulangan bencana kebakaran.
- d. minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki, mengingat jangkauan WMK di Kabupaten Tapin yang cukup luas.
- e. Sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah.

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menerapkan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terparah bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah



melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM sub urusan Bencana selama 1 (satu) tahun. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :



Tabel 4.27
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

**4.5.3. Realisasi**

Realisasi Pencapaian adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan dalam Pencapaian SPM sub urusan Bencana BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
Jenis Pelayanan Dasar				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100	50
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100	1
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100	1
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	50
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	100



B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	0
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, memiliki Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Pencapaian SPM sub urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	0
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	38.199.900
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	0
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	0
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	10.593.000
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	10.593.000
E	Pengendalian operasi	Tersedianya layanan pusdalops	730.933.200



	dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	150.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	0
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	194.400.000
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	0

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

4.5.5. Dukungan Personil

Personil dalam penerapan SPM sub urusan Bencana berjumlah 39 orang yang terdiri dari PNS BPBD Kabupaten Tapin pada saat ini hanya berjumlah 16 orang dibantu 3 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi PNS BPBD dapat dilihat pada tabel disebelah :

Tabel 4.30
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2021

No	Nama Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	H. Said Abdul Nasir	Magister Manajemen	S-2	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	H.Taufiqurahman,S.Sos,ME	Megister Ekonomi	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)



3	Syahradi,S.IP, MM	Magister Manajemen	S-2	Pembina (IV/a)
4	H. A. Sofyan, S.AP, MM	Magister Manajemen	S-2	Pembina (IV/a)
5	Alpian Anshary, SE, MM	Magister Manajemen	S-2	Pembina (IV/a)
6	Hj. Antung Rusidah	SLTA	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
7	Hj. Kartinah, S.AP	Sarjana Adm. Publik	S-1	Penata Tk. I (III/d)
8	Khairani, S. Sos	Sarjana Sosial	S-1	Penata (III/c)
9	A. Didi Riswandi, SE	Sarjana Ekonomi	S-1	Penata (III/c)
10	Gita Ramadhana, S.Kom	Sarjana Komputer	S-1	Penata (III/c)
11	Hj. Herliana, S. AP	Sarjana Adm. Publik	S-1	Penata (III/c)
12	Yesthita A.W, ST	Sarjana Lingkungan Hidup	S-1	Penata Muda Tk.I (III/b)
13	Rahmad Fajar, ST	Sarjana Teknik	S-1	Penata Muda (III/a)
14	Muhammad Aini	SLTA	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)
15	Rusdiana	SLTA	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)
16	Ramadhani	SLTA	SLTA	Pengatur Tk. I (II/d)

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

Tabel 4.31
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI	
2	M. ALI NORDIN	TENAGA ADMINISTRASI	
3	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI	



4	RAHMANI, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
5	M. NAJMI F, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
6	RAHMAT AMRULLAH, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
7	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS	
8	RIDHA WAHYUDIN	TENAGA PUSDALOPS	
9	M. DHIKA	SATUAN PETUGAS	
10	M.USTAZA	SATUAN PETUGAS	
11	SYAHYUDINOR	SATUAN PETUGAS	
12	ZAILANI	SATUAN PETUGAS	
13	M. AZRUL AZIZ	SATUAN PETUGAS	
14	M. RIYANDIE. P.B	SATUAN PETUGAS	
15	M. SYAFWAN Z Aidan	SATUAN PETUGAS	
16	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
17	M. IKHSAN	SATUAN PETUGAS	
18	M. MUGENI MARHABAN	SATUAN PETUGAS	
19	M. SABIRIN	SATUAN PETUGAS	
20	BAHRUDIN	SATUAN PETUGAS	
21	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
22	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
23	SAFRUDIN	PETUGAS KEAMANAN	
24	M. HAIQAL AKBAR A.L	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan urusan sub bencana.
- 2) Belum sinkronnya antara SPM dengan Renstra SKPD yang telah dibuat, sehingga masih belum terlaksananya SPM dengan maksimal.



- 3) Dukungan personil yang masih kurang serta peralatan yang belum memadai dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana.

Solusi :

- 1) Dukungan penambahan anggaran dalam pelaksanaan memenuhi kebutuhan program kegiatan untuk memaksimalkan penerapan SPM sub urusan Bencana.
- 2) Mengadakan rapat rapat dan koordinasi lintas sektor berkaitan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana di Kabupaten Tapin.
- 3) Penambahan personil yang memiliki keahlian dibidang teknis dan peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana.

4.6. Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota



4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Target pencapaian SPM Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	korban bencana daerah kabupaten/kota	jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota					

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021

4.6.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Realisasi capaian anggaran dan penerima layanan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran

Tabel 4.33
Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rehabiltiasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	172.386.000,00	166.386.000,00	97 %
2	Rehabiltiasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	2.613.400.000,00	2.613.400.000,00	100 %
3	Rehabiltiasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	2.073.600.000,00	1.883.000.000,00	91 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	238.000.000,00	238.000.000,00	100 %
Total		5.098.386.000,00	4.843.480.000,00	95 %

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021



2. Realisasi Penerima Layanan

Tabel 4.34
Realisasi Penerimaan Layanan SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	44 Orang	43 Orang	98 %	2021	26 Bantuan Sosial Uang, 15 Paket Sandang, 3 Alat Bantu	25 Bantuan Sosial Uang, 15 Paket Sandang, 3 Alat Bantu	98 %	2021
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	380 Orang	358 Orang	94 %	2021	380 Bantuan Sosial Uang	358 Bantuan Sosial Uang	94 %	2021
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	864 Orang	833 Orang	96 %	2021	864 Bantuan Sosial Uang	833 Bantuan Sosial Uang	96 %	2021
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	2 Orang	2 Orang	100 %	2021	2 Paket Sembako	2 Paket Sembako	100 %	2021
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	691 Orang	691 Orang	100 %	2021	691 Paket Sembako dan Paket Sandang	691 Paket Sembako dan Paket Sandang	100 %	2021

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.35
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	172.386.000,00	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	2.613.400.000,00	APBD
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	2.073.600.000,00	APBD
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	1.000.000,00	APBD
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	238.000.000,00	APBD
Total		5.098.386.000,00	

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36
Dukungan Personil Tahun 2021

No.	Jenis Personil	Jumlah
1	ASN	6 Orang
2	PTT	5 Orang
3	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
4	TKSK	12 Orang
5	PSM	35 Orang
6	KARANG TARUNA	30 Orang
7	PKH	26 Orang
8	SLRT	41 Orang
9	TAGANA	36 Orang
Total		193 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021

**4.6.6. Permasalahan dan Solusi**

Tabel 4.37
Permasalahan dan Solusi Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Rehabiltiasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Adanya pengurangan jumlah PPKS (Disabilitas Terlantar) karena ada yang meninggal	Menyesuaikan dengan kondisi lapangan
2	Rehabiltiasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	-	-
3	Rehabiltiasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Adanya pengurangan jumlah PPKS (Lanjut Usia Terlantar) karena ada yang meninggal	Menyesuaikan dengan kondisi lapangan
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021

**4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN****4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan**

Penerapan SPM Pendidikan pada tahun 2021 didukung dari dana APBD Kabupaten Tapin, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021

Program-Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Dinas Pendidikan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.830.000	4.830.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.779.100	1.779.100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	191.703.329.320	192.239.566.820
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.745.000	4.745.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.755.000	2.755.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.608.600	46.608.600
	Penyediaan Bahan/Material	1.198.000	1.198.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	897.652.000	897.652.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.491.500	16.491.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.053.400	177.053.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.420.000	133.420.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.070.000	78.070.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.935.700	274.935.700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.999.600	29.999.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.601.700	141.601.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.607.893.700	1.607.893.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.279.500	154.279.500
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.639.000	31.639.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.233.000	1.233.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.600.000	1.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.358.000	1.358.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	40.000.000	40.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	13.000.000	13.000.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	732.990.850	732.990.850
	Pengadaan Mebel PAUD	58.022.300	58.022.300
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	115.264.260	115.264.260
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	177.324.540	177.324.540
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	715.174.560	715.174.560
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.209.600.000	4.209.600.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	360.527.960	360.527.960



	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	12.506.500	12.506.500
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.206.000.000	1.206.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.095.400	30.095.400
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	17.348.000	17.348.000
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	154.622.400	154.622.400
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	148.855.140	148.855.140
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.754.150.000	2.754.150.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26.800.000	26.800.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	67.959.800	67.959.800
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	175.082.600	175.082.600
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	68.722.800	68.722.800
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.696.664.930	19.776.664.930
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.087.000	83.087.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	224.279.700	224.279.700
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	484.647.208	484.647.208
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	251.178.933	251.178.933
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.800.332.713	3.800.332.713
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.965.020.025	6.965.020.025
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	169.771.980	169.771.980



	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	169.767.500	169.767.500
	Pengadaan Mebel Sekolah	198.874.800	198.874.800
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.384.108.600	3.384.108.600
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	116.999.400	116.999.400
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	102.700.000	102.700.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	6.400.000	6.400.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	91.936.500	91.936.500
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	825.278.415	825.278.415
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.841.825.400	6.841.825.400
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2.392.593.600	2.392.593.600
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	223.071.000	223.071.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.018.445.000	2.018.445.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.547.026.000	2.547.026.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.113.280.966	1.113.280.966
	Pengadaan Mebel Sekolah	191.860.100	191.860.100
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.546.478.250	1.546.478.250
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	17.000.000	17.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.891.510.000	2.891.510.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	92.526.400	92.526.400
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.420.000	26.420.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	36.236.600	36.236.600
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.101.403.740	5.101.403.740
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.653.300	37.653.300



PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.449.900	11.449.900
JUMLAH ANGGARAN		268.363.847.190	268.980.084.690

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Tapin, Tahun 2021

Adapun untuk program dan kegiatan yang terkait dengan dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran				% Target Capaian			
					RPJMD	Renstra PD	RKPD	Renja PD	RPJMD	Renstra PD	RKPD	Renja PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Rp. 116.999.400,-				100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Belajar Peserta Didik				Rp. 17.000.000,-				100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Rp. 223.800.000,-				100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				Rp. 13.000.000,-				100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Tapin, Tahun 2021

4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar

1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah Kualitas ANC Masih rendah serta mobilitas sasaran (pindah & pendatang) ibu hamil yang ada.

b. Tindak Lanjut

Dalam memenuhi target dan perlu meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care di antaranya Peningkatan Kapasitas bidan, melaksanakan kelas ibu hamil dan melakukan Pendataan dan Sweeping. Dalam hal mendekati akses pelayanan puskesmas juga sudah menerapkan konsep mobile ANC. Selain itu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, Tindak lanjut dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi secara lebih intens kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan yang lain.

1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Kendala

Sejak tahun 2015, penekanan persalinan yang aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi sekarang masih adanya persalinan Non-nakes.

b. Tindak Lanjut

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan Kemitraan dukun kampung dengan bidan, dan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis

kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

Analisis kematian ibu yang dilakukan membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat / fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat / fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Namun demikian kompetensi petugas kesehatan perlu ditingkatkan dengan penunjukan 4 (empat) RS rujukan yang dilengkapi PONEK (pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) diharapkan bisa menekan angka kematian.

1.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Kendala

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Adapun kendala yang dihadapi sekarang Masih ada bayi baru lahir yang belum sempat mendapatkan Pelayanan kesehatan paripurna.

b. Tindak Lanjut

Kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah

Penyuluhan dan edukasi serta koordinasi lintas sektor tentang deteksi dini pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan juga penguatan rujukan dalam menangani permasalahan dalam menyelesaikan pelayanan kesehatan neonatal.

1.4. Pelayanan Anak Balita

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator cakupan pelayanan anak balita adalah pada kriteria penetapan targetnya. Penetapan target cakupan pelayanan anak balita berdasarkan permenkes No. 43 tahun 2016 adalah 100%. Kendala yang masih dihadapi Kurangnya Indikator untuk pelayanan anak balita sesuai standar yang ada.

b. Tindak lanjut

Tindak lanjut dari permasalahan di atas adalah dengan melakukan Peningkatan kegiatan kader ibu balita diposyandu dan Penyediaan Logistik untuk menunjang lancarnya kegiatan.

1.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Kendala

Permasalahan kesehatan pada Anak Usia Sekolah tingkat dasar adalah dari sasaran 3355 anak usia dasar, masih ada 1904 anak yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar.

b. Tindak Lanjut

Salah satu upaya/program kesehatan yang berkaitan langsung dengan anak sekolah adalah PTM (Pembelajaran tatap muka).

1.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Kendala

Pelayanan kesehatan usia produktif selama ini hanya dilakukan untuk masyarakat usia produktif yang datang ke pelayanan kesehatan,ada pun kendala yang didapatkan kurangnya partisipasi Masyarakat dan Kegiatan Sempat dilibur

beberapa bulan karena pandemi covid.

b. Tindak lanjut

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menindak lanjuti hal tersebut Advokasi kades dan kader posbindu, Sosialisasi / promosi kesehatan tentang posbindu dan Pelaksanaan posbindu dengan prokes/kunjungan rumah.

1.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Kendala

Indonesia termasuk negara berpenduduk struktur tua, karena persentase penduduk lanjut usia yang telah mencapai di atas 7% dari total penduduk. Keadaan ini berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun

kendala yang ditemukan diantaranya Jarak rumah lansia dengan lokasi posyandu, kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga serta sarana prasarana untuk kunjungan kegiatan posyandu.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk kendala tersebut adalah melaksanakan sosialisasi program posyandu lansia dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga.

1.8. Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi

a. Kendala

Saat ini peran fasilitas pelayanan kesehatan primer belum optimal dalam pelaksanaan pengendalian PTM karena masih berorientasi terhadap kuratif – rehabilitatif dan cenderung tersegmentasi. Kendala pelaksanaan pelayanan kesehatan pun diantarant Pandemi Covid. Pandu belum dilaksanakan, Pemantauan petugas belum maksimal (pasif), Belum terintegrasi dengan PISPK.

b. Tindak Lanjut

Upaya – upaya yang dilaksanakan Pelaksanaan Pandu, mendukung kreatifitas petugas dalam pelayanan Hipertensi

serta Kegiatan terintegrasi dengan PISPK.

1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

a. Kendala

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan minum obat dan diet dan pandu yang belum maksimal dilaksanakan karena masih dalam pandemi covid serta data yang dilaporkan ke dinas kesehatan belum termasuk praktek dokter mandiri/klinik.

b. Tindak Lanjut

Diperlukan inovasi bagi setiap Posbindu sebagai upaya agar penderita DM dapat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar , dengan melakukan kegiatan pandu yang terlaksanakan sesuai jadwal, peningkatan edukasi / KIE terutama mengenai kepatuhan minum obat dan DIET serta adanya regulasi tentang sistem pelaporan kedinas kesehatan oleh praktek dokter mandiri/klinik.

1.10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa

a. Kendala

Ditengah Pandemi Covid-19 kendala yang dihadapi adalah masih ada ODGJ yang kurang patuhan minum obat dan kurangnya dukungan keluarga serta dukungan Lintas sektor yang belum maksimal.

b. Tindak Lanjut

Di Kabupaten Tapin untuk menyikapi masalah kesehatan jiwa yang ada diperlukan pelaksanaan edukasi Kepatuhan minum obat, edukasi pentingnya dukungan keluarga untuk kesembuhan ODGJ serta advokasi lintas sektor untuk meningkatkan dukungan.

1.11. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)

a. Kendala

Berikut kendala yang dihadapi tahun 2021 diantaranya kunjungan terduga TB ke Fasyankes menurun pada saat

pandemi Covid-19, belum semua petugas melaksanakan penemuan aktif TB ke masyarakat dan belum semua pasien TB dilakukan investigasi kontak oleh petugas

b. Tindak Lanjut

Strategi penanganan TB yang dilaksanakan Meningkatkan edukasi ke masyarakat tentang perbedaan gejala covid-19 dengan gejala TB, melakukan kegiatan penemuan secara aktif terduga TB dimasyarakat dengan kerjasama lintas program ataupun lintas sector dan petugas melaksanakan investigasi kontak pada semua pasien TB sehingga dapat ditemukan orang-orang yang kontak erat dengan pasien TB.

1.12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV

a. Kendala

Di Kabupaten Tapin masih terdapat kendala dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV diantaranya Keterbasan kegiatan dalam masa pandemi, masih kurangnya penyuluhan tentang HIV, belum semua pasien TB dilakukan Pemeriksaan HIV. Pada saat pandemi Covid-19 belum bisa melakukan deteksi dini HIV ditempat hiburan dan warung malam serta kurangnya kesadaran kelompok beresiko untuk memeriksakan dirinya ke fasyankes.

b. Tindak lanjut

Melakukan peningkatkan penyuluhan tentang HIV (penyebab, cara pencegahan dll), koordinasi dengan program TB agar semua pasien TB dapat dilakukan pemeriksaan HIV dan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemeriksaan HIV ditempat hiburan dan warung malam.

4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah program-program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan 6 (enam) kegiatan diantaranya :



1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK Penanggulangan Kemiskinan)
4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK Penurunan Kematian Ibu dan Stunting)
5. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK Tematik Stunting)
6. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK Tematik Penanggulangan Kemiskinan)

4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

KODE	URAIAN	DPPA	REALISASI				SISA
			FISIK	%	KEUANGAN	%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.011.900.000,00	-	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.011.900.000,00	-	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
1.04 . 1.04.01.01 . 17	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	-	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
.04 . 1.04.01.01 . 17.0	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	-	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
	JUMLAH	5.011.900.000,00	0,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00

Sumber : Disperkimtan Kab.Tapin, Tahun 2021



2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

KODE	URAIAN	DPPA	REALISASI				SISA
			FISIK	%	KEUANGAN	%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.011.900.000,00	74,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.011.900.000,00	74,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah						
1.04 . 1.04.01.01 . 17	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	74,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
1.04 . 1.04.01.01 . 17	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.011.900.000,00	74,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00
	JUMLAH	5.011.900.000,00	74,00	100,00	1.539.250.000,00	30,71	3.472.650.000,00

Sumber : Disperkimtan Kab.Tapin, Tahun 2021

4.7.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

➤ Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah:

Tabel 4.41
Program dan Kegiatan Urusan Trantibunlinmas Tahun 2021
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin

No.	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.341.999.000	684.500.000
1 .	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.090.799.000	626.500.000
2 .	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.500.000	10.000.000
3 .	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.200.000	5.000.000



	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000
	5	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.000.000	12.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	182.500.000	25.000.000
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		134.300.000	26.100.000
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.000.000	5.500.000
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.650.000	7.800.000
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	12.800.000
3.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		459.960.100	156.400.000
	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	391.560.000	130.050.000
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.100	4.000.000
	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	3.000.000
	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	0
	5	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	22.600.000	19.350.000

Sumber : Satpol PP Kab.Tapin, Tahun 2021

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pelaksanaan Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin berkaitan dengan anggaran melalui Program dan Kegiatan Tahun 2021 ini sebagai berikut :



Tabel 4.42
Program dan Kegiatan Urusan Trantibunlinmas Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Desa	4
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	40
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan Penguatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa/kel	1
4	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana	Kegiatan	2
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan	2

Sumber : BPBD Kab.Tapin, Tahun 2021

**4.7.6. Bidang Sosial**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pelaporan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42
Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2021

I	Program Pemberdayaan Sosial	
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
II	Program Rehabilitasi Sosial	
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	1	Penyediaan permakanan
	2	Penyediaan Sandang
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	4	Pemberian Layanan Rujukan
III	Program Penanganan Bencana	
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	1	Penyediaan Makanan
	2	Penyediaan Sandang
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin, Tahun 2021



BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 ini telah dapat disusun, sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tapin mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin selama 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan wajib pelayanan dasar, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Secara Substansial LPPD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang berupa informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Bumi Ruhui Rahayu tercinta.


BUPATI TAPIN,
Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin

Nomor : 08 TAHUN 2022

Tanggal : 05 Oktober 2022

KABUPATEN TAPIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian/ Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	Lembaga Keuangan Bukan Bank - PT Sarana Multi Infrastruktur	Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 8	25 Februari 2020	Rp.148.657.565.500	4	6,51%	Pembangunan RSUD Baru Tapin Kelas C	0,00	0,00	0,00	0,00

Bupati Tapin

M. ARIFIN ARPAN